HASIL PENELITIAN

KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL:
Studi Sosiologi Politik di Maluku Utara

Oleh :

JAELAN USMAN
PO604303003

PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL

KONSENTRASI SOSIOLOGI (S-3)

PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 16

D. Kegunaan Penelitian 17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Fenomena Konflik Dalam Perspektif Sosiologis 20

1. Karakteristik Konflik Yang Mengakar..... 34

2. Institusi Demokrasi Dalam Penyelesain Konflik 39

B. Perubahan Sosial dalam Perspektif Sosiologis 44

1. Analisis Perubahan Sosial 51

2. Dimensi-dimensi Perubahan Sosial 58

C. Perspektif Teori Elit dan Integrasi 61

D. Penelitian Terdahulu 70

E. Kerangka Konseptual 76

F. Proposisi Hipotesis 82

BAB III. METODE PENELITIAN 86

A. Pendekatan dan Desain Penelitian 86

B. Instrumen Penelitian 90

C. Lokasi Penelitian 91

D. Informan 94

D. Pengumpulan Data 98

E. Analisis Data 99

F. Definisi Operasional 101

BAB IV. SETTING: PERKEMBANGAN MASYARAKAT MALUKU UTARA 106

A. Keadaan Geografis dan Potensi Wilayah 106

B. Maluku Utara dalam Perspektif Sejarah 117

1. Sejarah Lima Negeri (Asal Mula Orang Tahani) 117
2. Maluku Utara dalam Lagenda (Ceritra Rakyat) 125

C. Asal Kata “Maluku” Hubungannya dengan “Cengkeh” 133

D. Proses Lahirnya “ Moloku Kie Raha ” 141

1. Kerajaan-kerajaan Maluku Utara 146
   a. Kerajaan Jailolo 146
   b. Kerajaan Ternate 151
   c. Kerajaan Tidore 154
   d. Kerajaan Bacan 158
   e. Kerajaan Loloda 161
   f. Kerajaan Moro 163
   g. Kerajaan Obi 166
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kerajaan 167
   a. Struktur Organisasi Kesultanan Bacan 167
   b. Struktur Organisasi Kesultanan Tidore 171
   c. Struktur Organisasi Kesultanan Ternate 175
   d. Struktur Organisasi Kesultanan Jailolo 178
3. Eksapansi Teritorial Kerajaan-kerajaan Maluku 181

E. Akar Kekerasan dan Konflik di Maluku Utara 198

1. Proses Awal Masuknya Islam di Maluku Utara 200
   a. Media dan Cara-cara Penyebaran Islam 220
   b. Karakteristik Kota-kota Pusat Kerajaan Islam 223
2. Masuknya Bangsa-bangsa Eropa di Maluku Utara 230
   a. Masuknya Bangsa Portugis 232
   b. Masuknya Bangsa Spanyol 239
   c. Masuknya Bangsa Belanda dan VOC 244
   d. Masuknya Bangsa Inggris 250

F. Konflik Bernuansa ‘SARA’ di Maluku Utara 255

1. Kronologis Konflik 1999 – 2001 257
2. Perebutan Sumberdaya dan Kekuasaan 268
3. Ketegangan Masalah Agama dan Etnis 273

BABA V. HASIL PENELITIA: FENOMENA KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL DI MALUKU UTARA 280

A. Dinamika Konflik Antar Elite Dalam Konteks Sejarah 277

1. Proses Islamisasi dan Pengaruhnya di Maluku Utara 283
2. Penyebaran Kristenisasi dan Pengaruhnya di Maluku 295
   a. Perkembangan Misi Jesuit di Maluku Utara 300
   b. Kehadiran Gereja Protestan di Maluku 302
3. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik 309
   a. Faktor Geografis dan Demografis 309
   b. Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi 310
   c. Faktor Politik 310
   d. Faktor Primordialisme Agama 311
   e. Faktor Transmigrasi 312

B. Perubahan Struktur Birokrasi dan Politik di Maluku Utara 316

1. Struktur Birokrasi dan Politik Masa Kolonial 318
2. Struktur Birokrasi dan Politik Masa Kemerdekaan 323
3. Perjuangan Pembentukan Propinsi Maluku Utara 326
4. Klarifikasi dan Resolusi Konflik di Maluku Utara 333

C. Proses Penyelesaian Konflik Antar Elite di Maluku Utara 349

1. Tanggapan dan Solusi Konflik Elite Tradisional 349
2. Tanggapan dan Solusi Konflik Elite Formal 371
3. Tanggapan dan Solusi Konflik Negosiator 380

D. Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menciptakan Integrasi Sosial dan Politik 388

1. Realisasi Program Pembangunan Pascakonflik …….. 388
   a. Program Pemulangan Pengungsi 389
   b. Pembangunan Sosial Budaya 392
   c. Pembangunan Ekonomi 393
   d. Pembangunan Politik 395
2. Upaya Menciptakan Integrasi Sosial dan Politik 396
   a. Peran Pemerintah Pusat 396
   b. Peran Pemerintah Daerah 398
3. Institusi Nilai-nilai Fungsional dan Disfungsional 403
   a. Institusi Nilai-nilai Yang Fungsional 404
   b. Institusi Nilai-nilai Yang Disfungsional 405

E. Transformasi Dampak Konflik Terhadap Perubahan Sosial..... 416

1. Manajemen dan Traformasi Dampak Konflik 418
2. Arah Perubahan Sosial dan Pembangunan 422

a. Bidang Pemerintahan 423
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur 423
c. Hubungan Kemitraan Dengan DPRD 425
d. Pembinaan Ideologi dan Kesatuan Bangsa 426
e. Pembinaan Ketertiban Umum 427
f. Pembinaan Wilayah dan Koordinasi Instansi Vertikal 427

BAB VI. TAFSIRAN DAN ANALISIS SOSIOLOGIS 429

A. Akar Penyebab Konflik Antar Elite di Maluku Utara 429

B. Demokrasi dan Nasionalisme Masyarakat Pasca-Kolonial..... 450

C. Kebijakan Demografi dan Strategi Pembangunan 465

1. Keterbatasan Daya Dukung Ekologi dan Konflik Sosial 474

D Birokrasi, Persatuan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik 479

1. Birokrasi dan Kekerasan (Konflik) 483
2. Desentralisasi Kekuasaan 487
3. Institusi Penyelesaian Konflik 490
4. Lemahnya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik 492

E. Paradigma *Civil Society* Dalam Masyarakat Plural 496

1. Pemberdayaan Civil Society pada Masyarakat Plural 509
2. Strategi Penanganan Konflik 512
3. Pendekatan Filsafat Politik Dalam Civil Society 519

F. Globalisasi, Kearifan Lokal dan Perilaku Komunitas 525

1. Perilaku Budaya dan Kejahatan Struktural 531
2. Budaya Politik dan Ideologi 537
3. Perilaku Komunitas dan Integrasi Sosial Politik 540
4. Budaya Moloku Kie Raha Sebagai Falsafah Hidup 544

G. Dalil – Dalil 545

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 548

A. Kesimpulan 548

B. Saran-saran 558

DAFTAR PUSTAKA 563

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR LAMPIRAN		v
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	15
	C. Tujuan Penelitian	16
	D. Kegunaan Penelitian	17
BAB II.	TINJAUAN PUSTAKA	18
	A. Fenomena Konflik Dalam Perspektif Teori Sosiologi	19
	1. Karakteristik Konflik Yang Mengakar	29
	2. Konsep Demokrasi Dalam Pengelolaan Konflik	33
	B. Perubahan Sosial Dalam Perspektif Teori Sosiologi	37
	1. Analisis Perubahan Sosial	41
	2. Dimensi-dimensi Perubahan Sosial	46
	C. Perspektif Teori Elite dan Integrasi	48
	D. Penelitian Terdahulu	54
	E. Kerangka Konseptual	58
BAB III.	METODE PENELITIAN	62
	A. Pendekatan dan Desain Penelitian	62
	B. Instrumen Penelitian	64
	C. Lokasi Penelitian	65
	D. Informan	68
	E. Pengumpulan Data	69
	F. Analisis Data	70
	G. Definisi Operasional	72

BAB IV. SETTING: PERKEMBANGAN MASYARAKAT MALUKU UTARA 75

A. Kondisi Geografis dan Potensi Wilayah 75

1. Leetak dan Luas Wilayah 76
2. Topografi, Fisiologi dan Geologi 77
3. Iklim dan Penduduk 79
4. Potensi Sumber Daya Alam 81

B. Maluku Utara Dalam Perspektif Sejarah 85

1. Sejarah Lima Negeri (Asal Mula Orang Tahani) 85
2. Maluku Utara Dalam Lagenda (Ceritera Rakyat) 91

C. Asal Kata "Maluku" Hubungannya dengan "Cengkeh" 96

D. Proses Lahirnya "Moloku Kie Raha" 104

1. Kerajaan-kerajaan Maluku Utara 108
   a. Kerajaan Jailolo 109
   b. Kerajaan Ternate 114
   c. Kerajaan Tidore 117
   d. Kerajaan Bacan 120
   e. Kerajaan Loloda 123
   f. Kerajaan Moro 125
   g. Kerajaan Obi 128

2. Struktur Organisasi Kerajaan (Kesultanan) 129
   a. Struktur Organisasi Kesultanan Jailolo 129
   b. Struktur Organisasi Kesultanan Tidore 132
   c. Struktur Organisasi Kesultanan Bacan 135
   d. Struktur Organisasi Kesultanan Jailolo 138

E. Ekspansi Teritorial Kerajaan-kerajaan Maluku 141

BAB V. AKAR KEKERASAN DAN KONFLIK DI MALUKU UTARA 151

A. Proses Masuknya Islam di Maluku Utara 151

1. Pengaruh Islamisasi di Maluku Utara 163
2. Media dan Cara-cara Islamisasi 170
3. Karakteristik Kota-kota Pusat Kerajaan Islam 171

B. Masuknya Bangsa-bangsa Eropa di Maluku Utara 177

C. Proses Kristenisasi di Maluku Utara 197

1. Pengaruh Misi Jesuit di Maluku Utara 201
2. Kehadiran Gereja Protestan di Maluku 203

D. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik 210

1. Faktor Geografis dan Demografis 210
2. Faktor Sosial Budaya, Ekonomi dan Politik 215

BAB VI. DINAMIKA KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL DI MALUKU UTARA 220

A. Konflik Antar Elite Dalam Konteks Sejarah 220

1. Perebutan Sumber Daya Alam dan Kekuasaan 224
2. Perjuangan Pembentukan Provinsi Maluku Utara 228

B. Perubahan Struktur Birokrasi dan Politik 335

1. Struktur Birokrasi dan Politik Masa Kolonial 336
2. Struktur Birokrasi dan Politik Masa Kemerdekaan 241

C. Konflik Bernuansa 'SARA' di Maluku Utara 243

1. Kronologis Konflik 1999 – 2001 244
2. Ketegangan Masalah Agama dan Etnis 254

D. Klarifikasi dan Resolusi Konflik di Maluku Utara 260

1. Resolusi Konflik Elite Tradisional 268
2. Resolusi Konflik Elite Formal 281

E. Proses Penyelesaian Konflik Dalam Menciptakan Integrasi Sosial dan Politik 297

1. Tahap-tahap Penyelesaian Konflik 297
   a. Program Pemulangan Pengungsi 298
   b. Program Pembangunan Sosial Budaya 303
   c. Program Pembangunan Politik 305

2. Proses Integrasi Sosial dan Politik 311
   a. Institusi Ekonomi 314
   b. Institusi Politik 315
   c. Institusi Agama 320

F. Transformasi Konflik Dalam Perubahan Sosial 329

1. Manajemen Konflik 330

2. Proses Perubahan Sosial 336

   a. Dimensi Struktural 338
   b. Dimensi Kultural 342
   c. Dimensi Interaksional 346

BAB VII. TAFSIRAN DAN ANALISIS SOSIOLOGIS 349

A. Akar Penyebab Konflik Antar Elite di Maluku Utara 349

B. Demokrasi dan Nasionalisme Pasca Kolonial 370

C. Kebijakan Demografi dan Strategi Pembangunan 389

D. Konsep Persatuan, Birokrasi dan Konflik 404

E. Paradigma Civil Society Dalam Masyarakat Plural 419

F. Globalisasi, Perubahan Nilai dan Pola Perilaku 446

G. Dalil – Dalil 464

BAB VIII. P E N U T U P 469

A. Kesimpulan 469

B. Saran-saran 473

DAFTAR PUSTAKA 478

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

DAFTAR TABEL

Tabel :	Teks:	halaman:
1.	Karakteristik Informan Kunci	68
2.	Jenis Sumber Daya Ikan dan Potensi, serta Estimasinya	82
3.	Perbandingan Potensi dan Produksi Berdasarkan Jenis Sumber Daya Ikan di Provinsi Maluku Utara sampai Tahun 2005	83
4.	Program Pemulangan Pengungsi Maluku Utara Tahun 2005	300
5.	Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Per-Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun	304

DAFTAR INFORMAN KUNCI

No.	Nama Informan	Umur	Pekerjaan / Jabatan
1.	Djamal Kamarullah, SH	68 Th	Tokoh Masyarakat (Adat Bacan)
2.	Drs.H.M.Yusuf Abdulrahman	67 Th	Tokoh Masyarakat/Budayawan
3.	Drs. H. Muhadjir Albar, M.Si	53 Th	Sekda. Prov. Maluku Utara
4.	Drs. Fachry Amari	54 Th	Sekretaris Kota Ternate
5.	Drs. H. Rivai Umar, M.Si	48 Th	Rektor Unkhair Ternate
6.	Drs. H.M. Yunus Namza, M,Si	47 Th	Rektor Ummu Ternate
7.	Drs. Gazali Syam	50 Th	Sekretaris Kesbang Kota Ternate
8.	Drs. H. Abd. Rahman Lahabato	40 Th	Wartawan (Tokoh Pemuda)
9.	Mahmud Amin Faruk	56 Th	Sekretaris Kesultanan Tidore
10.	Drs. H. Madjid Husen, MM	52 Th	Sekda. Kab. Halmahera Tengah
11.	Drs. Ismail Abd. Razak, MM	51 Th	Kabag. Hukum Kab. Halteng
12.	Drs. Husain Alting, MM	42 Th	Kapita Laut Kesultanan Tidore
13.	Drs. H. Ahmad W.Kasim, M.Si	54 Th	Sekda. Kab. Halmahera Barat
14.	Munawar Ahmad	52 Th	Kepala Desa (Tokoh Masyarakat)
15.	Drs. Ismail Arifin, M.Si	50 Th	Mantan Camat (PMD Halbar)
16.	Drs. Yunus Djabir	58 Th	Mantan Camat (Tokoh Masyarakat)
17.	Drs. H. Muhammad Kasuba	52 Th	Bupati Halmahera Selatan
18.	Yusman Arifin, SH	40 Th	Ketua DPRD Halmahera Selatan
19.	Abdul Kahfi (Nonong)	52 Th	Anggota DPRD Halmahera Selatan
20.	Ahmad Suleman	65 Th	Sekretaris Kesultanan Bacan
21.	Ir. Hein Nomotemo	53 Th	Bupati Halmahera Utara
22.	Arifin Neka, SH	50 Th	Wakil Bupati Halmahera Utara
23.	Novino Lobiau, SH	42 Th	Ketua DPRD Halmahera Utara
24.	Ir. H. Muchtar Balakum	52 Th	Wakil Ketua DPRD Halut
25.	Pdt. Marten Budiman	50 Th	Sekretaris Sinode (Tobelo Halut)
26.	Singa Kao	56 Th	Anggota DPRD Halut
27.	Bel Lopa	68 Th	Ketua Adat Suku Pagu (Kec. Kao)

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor :	Teks:	halaman:
1.	Peta Wilayah Provinsi Maluku Utara	496
2.	Daftar Informan Kunci	497
3.	Rekomendasi Penelitian	498

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL:**
Studi Sosiologi Politik di Maluku Utara

Nama Mahasiswa : **JAELAN USMAN**

Nomor Pokok : **PO604303003**

Menyetujui

Komisi Penasehat

Prof. Dr. H. M. Idrus Abustam
Promotor

Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU
Kopromotor

Prof. T. R. Andi Lolo, Ph.D
Kopromotor

Ketua Program Studi
Ilmu Sosial,

Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah kehidupan manusia senatiasa ditandai oleh pergolakan, pertentangan atau konflik dalam berbagai aspek, diikuti dengan perubahan dan kesinambungan. Kesinambungan diselingi dengan perubahan, dan setelah terjadi perubahan berlangsung pula kesinambungan. Demikian perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia berlangsung terus dalam irama dan tempo yang berubah-ubah, dapat berlangsung dengan lamban dan lambat, seolah-olah tidak terjadi perubahan sama sekali, dapat pula berlangsung dengan cepat. Walaupun setiap abad terjadi perubahan, namun apabila dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya, perubahan-perubahan yang terjadi pada abad ini berlangsung demikian cepatnya sehingga abad ini disebut sebagai abad perubahan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam abad ini telah melanda seluruh dunia dan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam aspek politik Walinono (1979). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dalam abad modern ini ditandai dengan lahir, tumbuh dan berkembangnya berbagai sistem politik baru di atas reruntuhan sistem politik lama yang pernah pula lahir, tumbuh, dan berkembang di atas reruntuhan sistem politik yang mendahuluinya.

Studi ini berasumsi bahwa perubahan-perubahan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dapat mengakibatkan kegoncangan, pergolakan dan ketidakpastian,

sehingga pada gilirannya menuntut kewaspadaan dan campur tangan pemerintah. Setiap perubahan selalu membawa konsekuensi-konsekuensi yang menyangkut semua bidang kehidupan. Karena itu, perlu dikenal dan dipertimbangkan dalam suatu perencanaan dan kebijaksanaan sosial yang dipertanggung jawabkan. Fungsionalisme justru menyoroti struktur dan gejala sosial dari segi konsekuensi bagi kehidupan bersama, agar pihak-pihak yang berkepentingan mampu mengambil tindakan yang tepat demi keseimbangan dan kesinambungan masyarakat, sebagai satu kesatuan sistem. Menurut Fakih (2002), bahwa kajian sosiologis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat diteliti dari berbagai dimensi perubahan sosial, meliputi dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interaksional. Dalam hal ini variabel perubahannya bermacam-macam, antara lain: variabel ideologi, teknologi, ekonomi, profesi birokrasi, pemerintahan serta politik. Teknologi sebagai variabel penentu perubahan, kemudian terjadinya perbedaan antara teknik inovasi baru mendahului sifat ideologis dan unsur sifat organisasi, biasa disebut "*social lag*", yang menjadi penentu dalam adaptasi terhadap perubahan sebagai aspek pokok dalam masyarakat.

Sifat konflik telah berubah dalam satu dekade terakhir, baik dalam inti permasalahan maupun dalam bentuk pengekspresiannya. Salah satu perubahan yang sangat dramatis adalah pergeseran dari konflik antar-negara tradisional (artinya, perang antara negara-negara yang berdaulat) menuju ke konflik dalam negara (artinya, konflik yang terjadi antara faksi-faksi dalam sebuah negara). Konflik-konflik yang paling kejam sepanjang abad ke-20 adalah konflik antar-negara, tetapi pada

tahun 1990-an hampir semua konflik besar di dunia terjadi di dalam negara, (Harris, Peter dan Ben Reilly, 2000). Lebih lanjut disebutkan bahwa, antara tahun 1989 dan 1996, misalnya, 95 dari 1001 konflik bersenjata yang diidentifikasi di seluruh dunia terdorong, meski kadang tak sepenuhnya, oleh pencarian penentuan nasib sendiri atau pengakuan akan identitas komunal dan bukan karena ideologi atau penaklukan wilayah. Hal ini mewakili perubahan besar dalam manifestasi konflik manusia, terutama jika dibandingkan dengan perang dunia dan konflik-konflik besar antar-negara yang terjadi sepanjang abad ini.

Demikian halnya dalam pembahasan tentang konflik dan perubahan sosial, khususnya konflik antar elite di Maluku Utara sebagai salah satu bentuk konflik dalam negara ditinjau dari perspektif historis dan sosiologis. Dalam pengertian ini, pengelolaan konflik domestik membutuhkan pendekatan yang mengakui adanya kebutuhan untuk membangun struktur politik *internal* yang berkelanjutan, daripada sesuatu yang dirancang dan diterapkan terutama oleh aktor eksternal. Dengan demikian, isu-isu mengenai organisasi politik internal dalam negara menjadi lebih penting sekarang daripada sebelumnya, dan karena itu perhatian lebih dipusatkan pada aktor politik domestik yang terlibat dalam konflik yang mengakar.

Pendekatan-pendekatan tradisional seringkali gagal mengangkat kebutuhan dan kepentingan yang menghidupkan konflik, sehingga pada akhirnya diambil solusi yang tidak tepat dengan cara penerapan yang salah (bersifat *ad hoc*). Ada kebutuhan yang tidak terelakkan akan alat-alat baru yang lebih baik, yang bisa mengangkat konteks baru konflik dalam negara dengan lebih efektif, dalam usaha mencari jalan

keluar dari fase kekerasan yang berkepanjangan pada konflik dalam negara dan merancang model pengelolaan yang damai dan berkelanjutan.

Perumus kebijakan mungkin khawatir akan disalahkan jika tidak mengambil tindakan darurat sebelum semua fakta telah masuk, tetapi keputusan-keputusan mereka dapat menimbulkan implikasi jangka panjang bagi korban, pengungsi, dan jalannya konflik pada masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang mendalam mengenai episode-episode kekerasan pada masa lalu, intelijen yang baik mengenai latar kerusuhan-kerusuhan yang tengah berlangsung, dan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan sebagai jawaban pada fakta-fakta yang terus berubah. Hal ini penting agar pemerintah berada dalam posisi mampu mengambil langkah-langkah yang positif dan tegas dalam masa kritis.

Sebagian besar peneliti mengatakan bahwa sebab-sebab konflik berkaitan satu sama lain secara sistematis, dan karena itu masalah harus dilihat secara holistik. Ini tidak berarti bahwa seseorang peneliti tidak dapat mengatakan bahwa sebab-sebab spesifik adalah penentu dan memusatkan tenaganya pada penelitian ke arah tertentu sejauh dimungkinkan. Hal ini dapat diterima sepenuhnya dari sisi metodologi (dalam kenyataan, terobosan ilmiah sering tercipta melalui fokus yang sempit) dan kelompok peneliti dapat menarik manfaat besar dari informasi rinci dan spesifik. Misalnya, tentang manipulasi oleh elite atau kekerasan ritual. Penelitian paling berguna apabila mampu menyusun kronologis sebab-akibat, memperkirakan arah dan kekuatan antara para pelaku dengan peristiwa-peristiwa yang membentuk sistem bersangkutan. Selain itu, dapat pula dijelaskan bahwa sebagian besar konflik disebabkan oleh pertarungan

memperebutkan sumberdaya: latar belakangnya adalah situasi ‘aspirasi yang sedang meningkat diikuti oleh harapan yang menipis’, dan konflik umumnya (meski tidak selalu) memberikan kepada ‘pemenang’ bagian yang lebih besar dari tanah, modal, atau pengaruh dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa tidak adanya kepastian mengenai sumberdaya berkaitan dengan perang di berbagai masyarakat. Namun demikian, sering menjadi perdebatan hangat apakah para pelaku didorong oleh kepentingan ekonomi, politik, budaya atau ideologi, atau oleh kombinasi dari berbagai hal tersebut.

Studi ini tidak bermaksud untuk membeberkan secara panjang lebar dan mendalam seluruh sejarah perkembangan konflik dan perubahan sosial di Maluku Utara, tetapi lebih membatasi diri (fokus) pada dinamika konflik kaitannya dengan perubahan sosial (studi sosiologi politik) dengan unit analisis “konflik antar elite” dalam perspektif pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya pasca-konflik 1999-2001. Dalam hal ini, perubahan hubungan kekuasaan antara elite, khususnya elite adat, elite agama, elite birokrasi, elite politik, dan elite militer (dalam studi ini dikategorikan ‘elite tradisional’ dan ‘elite formal’).

Para pelaku yang terlibat di dalam proses perubahan hubungan kekuasaan di Maluku Utara, dapat dibedakan atas elite tradisional meliputi elite adat dan elite agama, serta elite formal meliputi birokrasi, politikus dan militer. Elite adat, adalah golongan elite yang memperoleh kekuasaan, kewenangan, dan pengaruh berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan adat Moloku Kie Raha. Pada mulanya, satu-satunya elite yang ada di Maluku Utara hanyalah elite adat. Mereka berbuasa karena nilai-nilai dan

aturan-aturan adat yang berlaku (Moloku Kie Raha), yang mendasari dan mengatur segala tingkah laku dan hubungan antara warga masyarakat, baik hubungan antara penguasa dan rakyat, maupun hubungan antara sesama penguasa atau sesama rakyat. Elite adat terdiri atas orang-orang yang dianggap bangsawan, yaitu golongan yang dapat dibedakan dari golongan biasa dan pada umumnya terikat dalam hubungan kekekuargaan. Elite agama, adalah sejak masuknya agama Islam membawa pengaruh yang cukup besar dalam proses perubahan sosial. Elite formal, muncul permulaan abad ke-20 ditandai dengan perubahan drastis dalam hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan empat kerajaan di Maluku Utara.

Penelitian tentang konflik telah banyak dilakukan, termasuk di Maluku Utara. Namun, penelitian tentang perubahan sosial hubungannya dengan konflik di Maluku Utara, sejauh ini belum ada. Karena itu, studi ini mencoba untuk mengkaji hubungan antara elite dan rakyat serta antar sesama elite, sebagai salah satu telaah yang menjadi pusat perhatian sosiologi politik; oleh Lewis Coser (1964) dirumuskan sebagai “cabang sosiologi yang memusatkan perhatian pada sebab-sebab dan akibat-akibat sosial dari pembagian kekuasaan di dalam atau antar masyarakat, serta pada pertentangan-pertentangan sosial dan politik yang mengakibatkan perubahan pada alokasi kekuasaan.” Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dalam usianya yang relatif muda, sosiologi politik sebagai salah satu cabang ilmu soosial memberikan sumbangan yang besar dalam usaha meningkatkan pengetahuan tentang berbagai gejala sosial dan politik, khususnya mengenai elite.

Konflik sosial di Maluku Utara telah memakan korban lebih dari 2.500 jiwa, suatu jumlah yang sangat besar apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya 432.295 jiwa (Yusuf, et.al: 2004). Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban kerusuhan (konflik) di Maluku Utara lebih besar dibandingkan dengan kerusuhan di Ambon (Maluku Tengah). Jika dilihat dari dimensi waktu, kerusuhan di Maluku Utara relatif lebih cepat (reda); dimulai pada bulan Agustus 1999 dan mereda bulan Juni 2001, ternyata memakan korban jiwa dan material yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kerusuhan di Maluku Tengah. Di samping itu, pemberitaan mengenai Maluku Utara relatif kurang. Akibatnya, dampak kerusuhan di Maluku Utara seringkali kurang diperhatikan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah pusat. Perhatian masuarakat luas (pemerintah pusat dan dunia internasional) baru timbul setelah terjadi konflik di Tobelo dan Galela (Halmahera Utara), dengan korban jiwa kurang lebih 1.114 orang, antara lain: di Tobelo 880 jiwa dan di Galela 234 jiwa. Selain itu, korban material khususnya rumah penduduk sebanyak 5.700 hancur dan tempat ibadah (mesjid dan gereja), serta 476 bangunan sekolah rusak. Di samping itu, jumlah pengungsi akibat kerusuhan ini mencapai 197.000 jiwa. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir separuh (50%) dari jumlah penduduk Maluku Utara selama konflik berlangsung, menjadi pengungsi.

Menyadari besarnya intensitas konflik yang terjadi di Maluku Utara, maka pada prinsipnya proses penanganan pasca konflik harus dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menciptakan perdamaian yang sifatnya permanen dan tahan lama. Studi ini selain mengembangkan *grand theory* Weber, juga melalui perspektif

yang ditawarkan Kriesberg (1998), Zartman (1985), dan Mitchell (1981); proses resolusi konflik dapat dibagi ke dalam empat tahapan yang meliputi: (1) tahapan deeskalasi konflik, (2) tahapan negosiasi, (3) tahapan pemecahan masalah, dan (4) tahapan membangun perdamaian.

Menyangkut tentang birokrasi ekonomi, seringkali dapat menahan kekuatan teknologi yang menimbulkan revolusi industri. Gejala yang sama juga berlaku dalam kekuatan birokrasi politik, militer, dan agama. Banyak hal yang bersifat teknologis dan berbagai perkembangan diikuti dengan penurunan bentuk-bentuk organisasi tradisional, menyebabkan tumbuh suburnya birokrasi. Menurut pandangan Weber, birokrasi adalah *ideal academic construction*. Namun dalam pelaksanaannya banyak yang melenceng. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain pelaksanaan birokrasi mengandung banyak kelemahan terutama pada mekanisme dan perangkat yang mendukungnya. Di samping itu, kelemahan lain terletak pada bentuknya yang ideal, sehingga mengandung bias dalam pelaksanaannya (Thoha, 2004).

Kajian sosiologi tentang birokrasi Marx, dilihat sebagai proses produksi dan eksploitasi. Keberadaan birokrasi hanya menguntungkan kelompok pemilik modal. Weber (1964), birokrasi adalah masalah kebudayaan, yaitu adanya rasional barat dan timur. Birokrasi di timur berkembang menjadi tidak rasional karena tidak didukung oleh faktor kebudayaan rasional. Dengan demikian, birokrasi adalah institusi dan orang (*Core*). Di lain pihak birokrasi sebagai alat (*instrument*). Namun hal yang mendasar mengenai birokrasi, adalah “faktor apa yang membedakan rasional Barat dan Timur”? Inti perbedaan rasional Barat dan Timur adalah semangat barat yang

rasional (*rational spirit of the West*). Rasionalisasi dalam sikap hidup merupakan bagian dari tradisi Barat. Rasionalisasi ini kemudian menjelma menjadi '*technical in-nature*' yang akan mewarnai aktivitas berpikir masyarakat Barat (berpikir sistematik langkah demi langkah (Engels, 2002).

Analisis sosiologis memandang bahwa, dalam suatu kehidupan sosial yang teratur, baik masyarakat itu besar maupun kecil, miskin atau pun kaya, sederhana maupun kompleks, selalu saja menyisihkan sebagian anggotanya sebagai orang yang sangat penting, sangat berkuasa atau sangat terkemuka (Keller, 1995). Orang-orang dimaksud dapat disebut dengan istilah tokoh atau pemuka masyarakat, tokoh berpengaruh, tokoh strategis, tokoh penentu, atau dalam studi ini disebut *elite*. Dalam hal ini, kajian sosiologis tentang konflik dan perubahan sosial ditinjau dari perspektif sejarah, Kartodirdjo (1990:94) menjelaskan, setiap masyarakat senantiasa lahir dua kelompok yang berbeda kedudukan dan peranan sosialnya. *Kelompok pertama*, adalah kelompok yang memimpin sebagai golongan kecil yang terpilih. *Kelompok kedua*, adalah kelompok yang memilih sebagai golongan kebanyakan. Para ilmuwan sosial dapat menyebut kelompok kecil yang berkuasa atau memimpin dan terkemuka dalam masyarakat sebagai *elite*, sedangkan kelompok atau golongan kebanyakan disebut *massa*.

Warsito (1999), menyebutkan bahwa elite sebagai kelas yang berkuasa atau kelas yang memerintah (*The Rulling Class*), di hadapan massa yang disebut sebagai kelas yang dikuasai atau kelas yang diperintah. Dengan demikian, dalam masyarakat manapun selalu ada kelompok penguasa di satu pihak dan kelompok yang dikuasai di

pihak lain, tampa memandang tempat maupun waktu. Senada dengan itu, Karim; 1989, dan Susanto; 1999, menjelaskan bahwa pembahasan tentang pembagian kelas sosial (*social class*), para elite dipahami sebagai *upper class*; di Amerika Serikat misalnya, kelas-kelas sosial yang lebih menitikberatkan kepada keahlian dan pengakuan membagi kelas sosial secara berurutan ke dalam: *real upper class, semi upper class, limited succes class, working class, dan real lower class*. Mannheim (1985), dalam karyanya yang sangat terkenal yaitu "*Man and Society in an Age of Reconstruction*" (Manusia dan Masyarakat dalam Zaman Kebangkitan Kembali), menjelaskan bahwa para elite telah berlipat ganda, dan bukannya menurun dengan majunya masyarakat industri. Kelompok elite pada masa lampau, terdiri atas kelompok elite bangsawan (keturunan), kelompok elite agama (karena perannya dalam bidang agama), dan kelompok elite yang karena jabatannya (pekerjaan) dalam perangkat birokrasi kekuasaan.

Sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, perubahan dan kesinambungan itu terus berlangsung. Sejarah Indonesia dipenuhi dengan jatuh-bangunnya berbagai sistem politik. Republik Indonesia, sebagai suatu sistem politik dibangun di atas reruntuhan sistem politik Jepang yang telah meruntuhkan sistem politik sebelumnya, yaitu sistem politik Belanda. Sistem politik Belanda pun telah meruntuhkan secara cepat maupun lambat – berbagai sistem politik yang tersebar pada berbagai tempat di Nusantara. Demikian studi ini akan menyoroti runtuhnya sistem politik di Maluku Utara sebagai akibat atau dampak daripada konflik, khususnya konflik antar elite yang berkepanjangan.

Jenis- jenis konflik baru yang muncul tahun-tahun terakhir di dalam wilayah negara atau konflik dalam negara seperti perang saudara, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan, peperangan domestik, dan lain sebagainya. Perubahannya berlangsung secara dramatis. Ada dua elemen yang kuat seringkali bergabung dalam konflik semacam ini. Pertama *identitas*, yaitu mobilisasi orang dalam kelompok-kelompok komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan lain-lain. Kedua *distribusi*, yakni cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat. Ketika distribusi dianggap tidak adil dilihat bertepatan perbedaan identitas (misalnya, suatu kelompok agama kekurangan sumber daya tertentu dari kelompok lain), akan berpotensi menimbulkan konflik.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam beberapa tahun terakhir melakukan penelitian tentang konflik, dengan fokus konflik di dalam negeri, baik vertikal maupun horizontal. Fokus penelitian yang dimaksud dengan asumsi bahwa, masyarakat Indonesia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan (pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi) banyak mengalami penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan di berbagai wilayah. Atas dasar inilah Indonesia dipilih sebagai tuan rumah dalam sebuah seminar internasional dengan fokus konflik di dalam negeri di Asia Pasifik. Seminar internasional ini memiliki tiga tujuan utama.

1. Mengemukakan berbagi pandangan dari sisi teori, metodologi, dan perbandingan, mengenai konflik, dari akar penyebab konflik hingga dimensi kemanusiaan dan keamanannya, serta mencari cara untuk mewujudkan transformasi positif situasi konflik.

2. Meningkatkan kesadaran di kalangan pemimpin politik mengenai temuan-temuan mutakhir yang dihasilkan akademisi dan praktisi, terutama dalam kaitan dengan peringatan dini, pencegahan dan transformasi konflik.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pencegahan dan peringatan dini, pengurangan konflik, dan rehabilitasi pasca-konflik, berdasarkan pengetahuan teoritis, empiris, dan praktis yang mutakhir. Dalam kurun waktu lima tahun (1994-1999) di Indonesia terjadi lebih dari 200 kerusuhan-kerusuhan massa yang terutama terjadi di kota-kota besar, dan dari semua kerusuhan itu kerusuhan yang terjadi di Ambon khususnya dan kepulauan Maluku umumnya pada tahun 1999 kelihatannya merupakan kerusuhan yang paling dahsyat dengan korban paling banyak dan melibatkan perang antar suku yang merembet pada premordialisme SARA, dan merupakan kerusuhan yang paling lama terjadinya, yaitu lebih dari dua tahun (Anwar, et.al. 2005).

Penelitian ini menjelaskan secara garis besar lima konflik antar-suku yang paling serius pada masa antara (1997-2002). Setiap konflik berlangsung lama, dari beberapa minggu hingga bertahun-tahun. Setiap konflik menelan banyak korban (ratusan hingga ribuan nyawa, serta ratusan ribu pengungsi). Setiap konflik tersebar-luas; setidak-tidaknya ke kabupaten atau ke seluruh provinsi. Dan setiap konflik adalah konflik antar-suku, antar kelompok-kelompok dalam masyarakat negara. Konflik-konflik ada korelasi yang agak erat dengan dua peristiwa penting di bidang politik di Jakarta; meletus setelah Presiden Soeharto tiba-tiba mundur (Mei 1998) dan berkurang setelah pelantikan Presiden Megawati (Juli 2001).

Daftar konflik kekerasan untuk periode ini lebih panjang dari sebelumnya. Konflik-konflik yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia selama beberapa puluh tahun, adalah: (1) Poso, (Kristen-Muslim, 1998-2001); (2) Ambon dan Maluku Selatan (Kristen-Muslim, 1999-2002); (3) Kalimantan Barat (kerusuhan anti Madura oleh Melayu, 1999-2001), (4) Kalimantan Tengah (kerusuhan Dayak-Madura, 2001); dan (5) Maluku dan Maluku Utara (Kristen-Muslim, 1999-2001).

Sehubungan dengan itu, perlu digambarkan karakteristik kepulauan Maluku dan Maluku Utara sebagai provinsi 'seribu pulau' karena terdiri dari begitu banyak pulau besar, sedang dan kecil. Di satu pihak, banyak kepulauan memberi kesempatan akses ke lautan yang cukup luas sehingga banyak usaha kelautan dapat dilakukan di samping pertanian dan perkebunan. Di lain pihak, kondisi ini menyebabkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau menjadi saling terisolir satu dengan lainnya. Karena banyaknya pulau-pulau ini maka keamanan menjadi rawan, bukan saja keamanan di laut tetapi juga di darat, itulah sebabnya banyak suku-suku hidup saling terisolir demi keamanan diri sendiri. Kondisi geografis yang menghasilkan isolasi dan kehidupan pesisir yang keras membentuk watak umumnya suku-suku di kepulauan Maluku dan Maluku Utara menjadi bertemperamen keras.

Maluku dan Maluku Utara bukan saja dikenal sebagai wilayah seribu pulau, tetapi juga geografi wilayah ini menghasilkan banyak suku yang saling terisolir antara satu dengan lainnya. Ada suku-suku utama yang mendiami kepulauan Maluku yaitu suku *Ambon* yang mayoritas tinggal di Maluku Tengah (pulau-pulau Ambon, Buru dan Seram). Suku-suku yang mendiami wilayah Maluku Utara, ialah Ternate, Tidore,

Makian, Tobelo, Galela, dan lain-lain. Suku *Key* yang tinggal di pulau-pulau di wilayah Maluku Tenggara. Suku-suku ini umumnya tinggal di pesisir tetapi banyak juga suku-suku yang tinggal di pedalaman.

Koentjaraningrat (1980), mengatakan bahwa Indonesia terdiri dari kurang lebih 300 suku bangsa; masing-masing mempunyai identitas kebudayaan sendiri. Setiap suku bangsa mengaku (dan diakui) mempunyai daerah teritorial, serta bahasa yang berlainan sehingga satu sama lain tidak saling memahami. Di Maluku terdapat 9 suku bangsa, dan Maluku Utara 15 suku bangsa. Selain itu, banyak suku pendatang terutama Sulawesi (Buton, Bugis, Makassar), Jawa dan Sumatera. Pendatang dari Sumatera kebanyakan suku Minang dan Arab yang telah lama tinggal di Maluku Utara. Suku-suku yang saling terisolir pada umumnya menganut agama suku yang mempercayai kekuatan-kekuatan disekitarnya dan kepercayaan akan perlindungan roh-roh nenek-moyang. Karena itu, proses ‘agamanisasi’ umumnya melalui jalur suku atau desa. Dalam hal ini, bila raja, sultan atau pemimpin suatu suku menganut agama tertentu, maka biasanya seluruh anggota suku akan mengikutinya, dan bilamana suku itu ada yang menganut agama berbeda, maka biasanya suku itu akan terbagi pula atas desa atau kampung yang menganut agama tertentu.

Menyimak beberapa penelitian di atas, umumnya hanya menyangkut latar belakang atau faktor penyebab terjadinya konflik tanpa menggali dan mengungkap akar permasalahan, sehingga solusi dan tindak lanjut dari hasil penelitian itu belum terlaksana sedperti yang diharapkan. Studi ini mencoba untuk menggali informasi yang lebih dalam (akar penyebab) konflik antar elite di Maluku Utara, ditinjau dari

perspektif historis-sosiologis. Dengan kata lain, proses awal timbulnya konflik antar elite dalam kaitan dengan proses perkembangan masyarakat, terutama empat kerajaan yang dikenal dengan “Moloku Kie Raha” dalam perspektif perkembangannya hingga pecah konflik bernuansa ‘SARA’ 1999-2001.

Studi ini bersumsi bahwa konflik selalu ada, berarti konflik itu sebenarnya dibutuhkan. Banyak literatur, terutama dalam bisnis yang memfokuskan pada manfaat konflik dan membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah, mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, dan mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian, mendorong kedewasaan psikologis, serta menimbulkan kesenangan. Menurut hemat peneliti, terlepas daripada manfaat konflik yang dimaksud, yang terpenting dalam studi ini adalah apa dampak positifnya, tidak hanya dalam organisasi tetapi juga di semua tingkat. Dalam konteks ini, peneliti dapat membayangkan; jika tidak ada konflik, maka banyak orang akan menjadi kerdil karena kekurangan stumulasi, berbagai kelompok dan organisasi akan mandek dan mati, dan masyarakat akan runtuh karena beban mereka sendiri yang tidak mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan yang terus berubah, di samping perubahan hubungan dan kekuasaan yang terjadi dalam berbagai dimensi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta persoalan-persoalan yang muncul sesuai dengan fokus pembahasan, maka secara spesifik diformulasikan beberapa pernyataan (*statemen*) yang dikembangkan sebagai berikut :

Akar kekerasan dan konflik sosial yang berkepanjangan di Maluku Utara, disebabkan oleh faktor geografis, demografis, kultural, dan politik – serta dipengaruhi oleh faktor internal (konflik antar elite) dalam perebutan higemoni, sumberdaya alam, dan kekuasaan. Proses penyelesaian konflik merupakan rangkaian kegiatan berbagai pihak yang terlibat secara berkelanjutan melalui pencegahan dan pengelolaan konflik. Karena itu, resolusi konflik dimaksukan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Transformasi konflik merupakan upaya mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, serta mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

C. Tujuan Penelitian

Formulasi permasalahan pokok yang dikemas dalam beberapa pernyataan di atas, diharapkan memperoleh gambaran yang memadai tentang fenomena konflik dan perubahan sosial di Maluku Utara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan mendalam faktor-faktor penyebab konflik sosial yang berkepanjangan, serta kondisi internal dan eksternal, baik yang bersifat manifest maupun laten yang mendorong meluasnya konflik antar elite di Maluku Utara. Selain itu, menjelaskan secara cermat dan hati-hati proses yang dilakukan berbagai pihak sesuai prosedur dan mekanisme yang disepakati bersama dalam penyelesaian konflik secara bertahap dan berkelanjutan. Menjelaskan secara komprehensif strategi dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial dan politik yang tahan lama

berdasarkan kesepakatan (konsensus) yang telah ditentukan bersama. Menjelaskan secara cermat tentang transformasi konflik dalam perubahan sosial di Maluku Utara, terutama perubahan struktural, interaksional, ideologi dan politik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menemukan fakta empiris, sebagai bahan refetensi dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang konflik dan perubahan sosial, khususnya analisis sosiologis berkaitan dengan konsep utama (fokus) pembahasan ini. Selain itu, sebagai acuan dalam mengembangkan teori-teori sosiologi tentang konflik dan perubahan sosial, dengan pendekatan fenomenologi historis dalam menyelesaikan konflik antar elite berdasarkan data dan fakta empiris di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan praktis sebagai dasar pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat, serta membantu pihak-pihak yang berkonflik terutama proses penyelesaian secara politis berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, dengan mengungkap fakta empiris tentang konflik khususnya konflik antar elite, dapat menghasilkan alternatif-alternatif yang kreatif terhadap perubahan sistem dan struktur pemerintahan. Hal ini penting dalam proses demokrasi dan integrasi sosial politik menuju terciptanya masyarakat madani (*civil society*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teoritis untuk memahami fenomena konflik dan perubahan sosial dalam perspektif sosiologis, dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Beberapa hal yang perlu ditekankan sehubungan dengan konsep utama dalam pembahasan ini, adalah konflik antar elite dan dimensi-dimensi perubahan sosial sebagai dampak atau akibat yang ditimbulkan dari konflik yang dimaksud.

Beberapa pandangan dan pemikiran para sosiolog terkait dengan konsep utama (fenomena konflik dan perubahan sosial), antara lain: Karl Marx, Max Weber, Ralf Dahrendorf, Lewis A. Coser, dan Randall Collins. Di samping itu, kaitannya dengan fungsionalisme konflik dalam perspektif perubahan sosial akan ditampilkan pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Talcott Parsons, dan Robert King Merton. Para tokoh sosiolog yang tidak disebutkan dalam konteks ini bukan berarti kurang penting atau diabaikan dalam perkembangan pemikiran sosiologi, tetapi hal ini dilakukan semata-mata karena pertimbangan substansi serta relefansi dengan konsep utama dalam pembahasan ini, dan konstribusi para tokoh tersebut terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis konflik dan perubahan sosial mengasumsikan: pemerintahan yang demokratis adalah kunci menuju pengembangan penyelesaian yang berkelanjutan. Akan tetapi hubungan kebanyakan konflik yang mengakar dengan demokrasi itu rumit, dan demokrasi dalam hal ini bisa mendorong

atau memperburuk konflik sipil. Mobilisasi politik rakyat untuk tujuan pemilihan umum atau tujuan lainnya seringkali dicapai dengan landasan identitas yang sempit. Dengan demikian politik massa, dihubungkan dengan kebangkitan negara demokratis modern, telah memberi sisi tajam pada identitas. Kebencian etnis bisa tertidur panjang sampai kelompok-kelompok yang memandang diri mereka sendiri bersaing habis-habisan memperebutkan sumber daya, hak atau wilayah. Isu identitas seringkali menjadi pembungkus isu-isu lain yang berkaitan dengan distribusi sumber daya ini.

Buku pegangan yang diterbitkan oleh PBB dengan judul "*Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator,*" Peter Harris & Ban Reilly (2000:19), dijelaskan bahwa penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik. Implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri dan dihapuskan. Sebaliknya, konflik adalah sesuatu yang positif. Dalam hal ini, konflik interaksi dari beberapa keinginan dan tujuan yang berbeda dan berlawanan yang di dalamnya bisa diproses, tetapi tidak secara pasti diselesaikan.

A. Femonena Konflik Dalam Perspektif Teori Sosiologi

Sejarah mencatat bahwa, perhatian manusia terhadap konflik tercermin dalam literatur keagamaan kuno. Perang antardewa di zaman kuno bukan hanya untuk melindungi "kebenaran nilai-nilai kehidupan sehari-hari, tetapi juga keharusan memerangi dewa-dewa lain seperti mereka sendiri, sebagaimana komunitas mereka

juga berperang, dan dalam peperangan ini pun mereka harus membuktikan kemahakuasaan mereka. Mitologi Yunani mengenal Ares, dewa perang yang dibenci oleh dewa-dewa lain karena sifatnya yang kejam. Saudara perempuannya Eris adalah dewi percekcokan yang gemar bertengkar dan berperang. Rekannya dari Romawi adalah Mars dan Discardia (Lauer, 1993).

Rentetan panjang revolusi politik yang dihantarkan oleh Revolusi Perancis 1789 dan revolusi yang berlangsung sepanjang abad ke-19 merupakan faktor yang paling besar perannya dalam perkembangan teori sosiologi. Dampak revolusi politik terhadap masyarakat sangat dahsyat dan banyak perubahan positif yang telah dihasilkannya. Tetapi, yang menjadi sasaran perhatian kebanyakan para ahli teori itu bukan konsekuensi positifnya, melainkan efek negatifnya. Para pemikir yang lebih ekstrem saat itu benar-benar ingin kembali ke keadaan seperti Abad Pertengahan yang penuh kedamaian dan ketertiban. Sejumlah pemikir yang lebih canggih menyadari bahwa ada kemungkinan untuk menciptakan perubahan sosial yang dapat mengembalikan keadaan yang diinginkan (Ritzer dan Goodman, 2004).

Revolusi industri yang melanda masyarakat Eropa terutama abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan faktor langsung yang memunculkan teori sosiologi. Revolusi industri merupakan proses perkembangan yang saling berkaitan yang berpuncak pada transformasi dunia Barat dari corak sistem pertanian menjadi sistem industri. Selain itu, birokrasi ekonomi berskala besar muncul untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh industri dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, segelintir orang mendapat keuntungan besar, sementara sebagian

besar yang bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang menerima upah yang rendah. Situasi itulah, kemudian muncul reaksi menentang sistem industri dan kapitalisme. Reaksi ini diikuti oleh ledakan gerakan buruh dan berbagai gerakan radikal lain yang bertujuan menghancurkan sistem kapitalisme (Giddens, 2004).

Para teoritisi konflik memandang, konflik dan pertentangan kepentingan (*consern*) dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan, sebagai determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial. Dengan kata lain, struktur dasar masyarakat sangat ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai individu dan kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Karena sumber-sumber daya ini dalam kadar tertentu selalu terbatas, maka konflik untuk mendapatkannya tidak dapat dihindari (selalu terjadi). Brewer (1999), menjelaskan bahwa Marx dan Weber dapat menerapkan gagasan umum ini dalam teori sosiologi mereka dengan cara yang berbeda, sesuai dengan substansi yang dibahas.

Compbell (1994), menegaskan bahwa teori konflik bukanlah suatu teori terpadu atau konprehensif. Perhatian utama umumnya terhadap pelbagai teori konflik adalah mengenal dan menganalisa timbulnya konflik dalam kehidupan sosial, sebab-sebab dan bentuknya dalam banyak hal, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Karena itu teori konflik merupakan teori yang menekankan pada kenyataan sosial di tingkat struktur sosial daripada tingkat individual, antarpribadi atau budaya. Demikan halnya teori fungsional, beberapa implikasi dari teori konflik yang penting telah membentang ke pelbagai tingkat kenyataan sosial lainnya. Tingkat

antarpribadi khususnya dapat dianalisa dengan mudah menurut prinsip-prinsip yang banyak dikembangkan dalam teori konflik.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik-konflik sosial yang bersumber pada struktur sosial, termasuk yang terjadi secara tatap muka. Dalam hal ini, teori konflik tidak harus mengabaikan sama sekali nilai dan norma budaya. Tetapi harus lebih cenderung melihat nilai dan norma sebagai ideologi yang mencerminkan usaha kelompok-kelompok dominan. Seperti halnya Marx, telah berusaha mengungkapkan pelbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan yang mungkin dikelabui oleh munculnya konsensus nilai dan norma. Apabila konsensus terhadap nilai dan norma ada, para ahli teori konflik curiga bahwa konsensus itu mencerminkan adanya kontrol dari kelompok dominan dalam masyarakat terhadap pelbagai media komunikasi, dengan mana kesadaran individu dan komitmen ideologi itu dibentuk. Hal senada menurut Parsons, bahwa konsensus normatif mencerminkan komitmen moral individu yang bersifat sukarela. Namun demikian, menurut para ahli teori konflik sebagai sesuatu yang luar biasa naifnya, karena pandangan Parsons mengandung dukungan ideologi terhadap struktur sosial yang ada, khususnya struktur kekuasaan (Martin, 1993).

Sejumlah pengamat politik dan sosial yang menekankan pentingnya konflik dalam kehidupan manusia. Polybius, sejarawan Romawi, Ibnu Khaldun, Machiavelli, Jean Bodin dan Thomas Hobbes. Sekitar abad ke-18, para pemikir ekonomi dan biologi menjadikan konflik sebagai pusat perhatian teori mereka. Konflik antara kepentingan diri sendiri dengan sosial, meliputi karya Adam Smith, Thomas Malthus

yang menggambarkan perjuangan untuk mempertahankan hidup dalam nada suram. Senada dengan itu, temuan Charles Darwin yang menyatakan bahwa “yang terkuatlah yang paling beruntung dalam perjuangan mempertahankan hidup,” adalah penting bagi perkembangan evolusi (Craib, 1994: 93-99).

Elster (2000), pemikiran Marx berakar pada pemikiran tradisional Jerman tentang idealisme dan sejarah. Sejak abad ke19, dua kecenderungan dominan ini hadir bersama dalam sistem filosofis Hegel. Konsepsi Hegel tentang siklus perubahan sejarah memungkinkan Marx dengan caranya sendiri dalam memperluas teori masyarakat yang revolusioner. Hegel sangat prihatin atas berulangnya kekerasan dalam sejarah Eropa, sehingga memutuskan untuk menyusun suatu sistem filosofis yang seutuhnya menjelaskan sumber gejolak sosial dalam perkembangan manusia dan masa depan peradaban. Sarana yang digunakan untuk memajukan interpretasinya tentang peradaban dan sejarah adalah *dialektika*.

Menurut Marx, bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilikan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Karena itu, masyarakat terpecah menjadi dua kelompok: “yang memiliki” dan “yang tidak memiliki” kekuatan-kekuatan produksi – menjadi kelas-kelas sosial. Dalam masyarakat yang telah terbagi berdasarkan kelas tersebut, dapat mensub-ordinasikan kelas sosial lain dan memaksa kelompok tersebut untuk bekerja memenuhi kepentingan mereka sendiri. Kelas dominan menjalin

hubungan dengan kelas-kelas yang tersubordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, kelas-kelas yang tersubordinasi memberontak serta menuntut penghapusan hak-hak istimewa kelas dominan. Sementara menurut Weber, konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi perlu juga dilihat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang sering terjadi. Diantara berbagai tipe konflik itu, terdapat dua tipe konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang fundamental (kehidupan sosial dalam kadar tertentu, dan dominasi). Pertentangan untuk memperoleh kekuasaan semata-mata didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam kadar tertentu, sebagai tujuan dari pertentangan itu sendiri (Sanderson, 2003: 11-14).

Lauer (1993), meskipun Weber kurang deterministik dan lebih *jelimet* daripada Marx dalam analisisnya mengenai konflik, telah memperluas bidang konflik itu muncul. Weber juga mengakui pentingnya konflik dalam bidang ekonomi, perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise atau status dan kekuasaan politik. Perhatian atas konflik keagamaan berakar pada pemikiran manusia yang aktif dalam peristiwa sosial dan politik. Dengan demikian, teori konflik adalah ciptaan manusia yang mengalaminya.

Pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas hanya pada organisasi politik formal, tetapi juga terjadi di dalam setiap tipe kelompok, seperti organisasi keagamaan dan pendidikan. Menurut Weber, orang seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial atau pun konsepsi tentang bentuk gaya hidup

kultural yang terbaik. Gagasan dan cita-cita bukan hanya dipertentangkan, tetapi dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya. Orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan, dan pada saat yang sama berusaha saling meyakinkan bahwa bukan kekuasaan yang dituju, tetapi kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis benar (Robertson, 1995).

Dahrendorf sering dihubungkan dengan apa yang disebut aliran konflik, karena ada pertentangan terhadap pandangan sebelumnya, yang menggambarkan bahwa masyarakat itu dalam pengertian "koordinasi fungsional, integrasi dan konsensus". Dalam sejarah sosiologi Barat, Dahrendorf menemukan hal-hal penting dalam pemikiran Marx. Ia lebih mempercayai pertimbangannya sendiri dengan menggunakan metode empirik dalam menerima dan menolak teori-teori Marx. Versi utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa konsep kelas ala Marx yang telah dirumuskan, ternyata dalam perkembangannya terputus penerapannya terutama pada situasi abad ke-20. Dahrendorf mencoba untuk meyakinkan bahwa analisis Marx terlalu sempit, hanya membahas tentang konsep pemilikan legal. Kriteria kelas ala Marx, yaitu alat produksi dalam pengertian yang legal dan bukan struktur otoritas. Jadi, dengan cara membebaskan definisi kelas yang sempit, dapat dipergunakan bagi seluruh hubungan produksi (Johnson, 1986).

Tokoh lain, yang dijadikan acuan dalam membahas perspektif teori konflik adalah Lewis Coser. *The Functional of Social Conflict* (1964), ditegaskan bahwa selama lebih dua puluh tahun Coser tertarik pada model sosiologi dengan tekanan struktur sosial. Pada saat yang sama dia menunjukkan model tersebut selalu

mengabaikan studi tentang konflik sosial. Berbeda dengan beberapa ahli sosiologi yang menegaskan eksistensi dua perspektif yang berbeda – teori kaum fungsional struktural versus teori konflik. Menurut Coser, beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, suatu proses yang ditonjolkan oleh kaum fungsional struktural, juga menunjuk pada proses lain yaitu konflik sosial. Selanjutnya, Coser menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif untuk membentuk struktur. Coser sangat percayaan terhadap ahli sosiologi Jerman "Georg Simmel", dan juga tidak mencoba menghasilkan teori yang mencakup seluruh fenomena sosial. Coser yakin bahwa, setiap usaha untuk menghasilkan suatu teori sosial yang historis adalah prematur. Simmel tidak pernah menghasilkan riset makro sosiologis sehebat Marx, Durkheim, atau Weber. Simmel mempertahankan pendapatnya, bahwa sosiologi bekerja untuk menyempurnakan dan mengembangkan konsep-konsep sosiologis di mana isi dunia empiris dapat ditempatkan.

Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik itu (keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur) dapat dilihat dari ilustrasi suatu kelompok yang sedang memahami konflik dengan *out-group*. Di dunia internasional kita dapat melihat bagaimana konflik, apakah dalam bentuk tindakan militer atau di meja perundingan, mampu menetapkan batas-batas geografis nasional. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, oleh karena konflik kelompok baru dapat lahir dan mengembangkan identitas strukturalnya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, hubungannya dengan konsep utama, perlu dikemukakan beberapa teori yang relevan khususnya menyangkut cara dan metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik antar elite di Maluku Utara. Dalam hal ini asumsi yang dikembangkan adalah "konflik bukan untuk dihindari melainkan harus dikelalo berdasarkan kepentingan dan konteks yang ada." Teori-teori yang dimaksud antara lain :

Teori Hubungan Masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisari yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dan suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik; (2) mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

Teori Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagi masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap; (2) melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Teori Kebutuhan Manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia – fisik, mental, dan sosial – yang tidak

terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu; (2) agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Teori Identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, dengan harapan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing, dan untuk membangun empati serta rekonsiliasi di antara mereka; (2) meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Teori Kesalahpahaman Antarbudaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain; (2) mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain; (3) meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

Teori Transformasi Konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-

masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: (1) mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; (2) meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik; (3) mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdaya-an, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan.

Kecenderungan peneliti dalam mengembangkan kategori-kategori yang telah ditentukan, adalah teori yang disebutkan terakhir (teori transformasi konflik) berdasarkan konsep utama studi ini (konflik antar elite hubungannya dengan dimensi-dimensi perubahan sosial yang ditimbulkan, sebagai akibat atau dampak dari proses tranformasi dalam menciptakan integrasi sosial dan politik). Namun demikian, teori-teori lain yang telah disebutkan di atas, tetap diperhatikan berdasarkan fakta empiris dalam kaitan dengan strategi dan kebijakan yang ditempuh (Manajemen Konflik) yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

1. Karakteristik Konflik Yang Mengakar.

Konflik dengan kekerasan (konflik yang mengakar) sudah ada sejak zaman pra-kolonial, hingga sekarang. Setelah kemerdekaan, dalam lima puluh tahun pertama Indonesia dilanda berbagai konflik dengan kekerasan berkaitan dengan separatisme, peranan agama dalam negara sekuler, dan pembagian kekuasaan dan sumberdaya. Konflik-konflik itu, oleh para pengamat dinamakan: konflik komunal, konflik suku, konflik sosial, konflik politik, atau konflik agama. Anwar, et.al. (2005), menjelaskan

bahwa konflik dengan kekerasan meningkat sejak pertengahan 1990-an, menyusul runtuhnya pemerintah otoriter dan diikuti oleh konflik beberapa daerah (konflik separatis di Aceh dan Papua, konflik antargolongan di Kalimantan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara).

Beberapa tahun terakhir berbagai jenis konflik baru yang terjadi dalam wilayah negara atau konflik dalam negara, seperti perang saudara, pemberontahan bersenjata, gerakan seperatis, dan kekerasan domestik lainnya. Harris dan Reilly (2000:11), dalam tiga tahun terakhir, misalnya, setiap konflik bersenjata yang besar berasal dari level domestik dalam negara, dan bukan antar negara. Dua elemen kuat seringkali bergabung dalam konflik semacam ini. Yang pertama, adalah *identitas*: mobilitas orang dalam kelompok-kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, adalah *distribusi*: cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Kedua elemen ini merupakan kombinasi dari faktor kuat yang didasarkan pada identitas dengan potensi yang lebih luas tentang ketidakadilan ekonomi dan sosial yang seringkali menyalakan apa yang disebut sebagai “konflik yang mengakar.”

Karakteristik yang paling menonjol dari konflik internal, adalah tingkat ketahanannya. Dalam hal ini, istilah *konflik etnis* seringkali digunakan. Etnis adalah konsep yang luas, mencakup banyak elemen: ras, kultur, agama, keturunan, sejarah, bahasa, dan lain-lain. Singkatnya, konflik yang disebabkan konsep apapun yang oleh sebuah komunitas dianggap sebagai identitas fundamental dan yang menyatukan mereka dalam sebuah kelompok. Karena itu, mereka memilih (merasa berkewajiban)

untuk melakukan kekerasan dalam melindungi identitas yang dimaksud. Selain itu, faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas ini bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya, seperti wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja, dan sebagainya.

Konflik antar elite yang dimaksud, dikategorikan sebagai konflik dengan kekerasan, di mana faktor penyebab diawali dengan isu-isu yang kompleks dan fundamental, kemudian mendorong pertentangan yang berskala kecil (lokal) terutama menyangkut ideologi atau geopolitik di masa lalu. Konflik dalam negara karena identitas cenderung lebih bertahan dalam jangka panjang, silih berganti antara fase laten dengan ledakan kekerasan yang berkepanjangan (selama beberapa periode atau dekade). Konflik seperti ini, sangat umum dan nyata namun sulit dipecahkan. Hal ini karena isu yang dikembangkan sangat emosional. Dalam hal ini, para elite langsung menusuk sesuatu yang memberi orang kesadaran akan dirinya sendiri, mendefinisikan ikatan seseorang dengan komunitasnya, serta sumber kepuasan terhadap kebutuhan akan identitasnya. Konflik yang demikian (konflik antar elite) tidak mungkin terbatas pada apa yang disebut “dunia yang sedang berkembang”.

Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan, jika semua pihak memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat daripada pandangan yang lain. Kecuali itu, kemungkinan lainnya adalah perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat sebagai sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah, dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi. Sehubungan dengan itu, perlu

dijelaskan definisi konflik dan kekerasan yang dimaksud dalam studi ini. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu dan kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kekerasan meliputi: tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebakan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu, konflik tetap berguna bila dilihat dari keberadaan manusia dan masyarakat Indonesia dengan karagaman suku, agama, dan budaya. Dari tingkat mikro; antarpribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara, serta semua bentuk hubungan manusia, meliputi: sosial, ekonomi, dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik.

Konflik terjadi karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, misalnya; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya serta kekuasaan yang tidak seimbang. Kondisi ini kemudian menimbulkan masalah-masalah, seperti: diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat yang dimaksud saling berkaitan, membentuk sebuah mata rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif.

2. Konsep Demokrasi Dalam Pengelolaan Konflik

Konsep demokrasi yang ditekankan dalam pengelolaan konflik, bukanlah suatu pernyataan ideologis, melainkan suatu argumen praktis yang didasarkan pada pengalaman dan studi yang luas. Dalam hal ini, demokrasi yang dimaksud bukan saja sebagai prinsip paduan, tapi juga sebagai sistem yang dapat diterapkan bagi pengelolaan konflik yang positif. Dengan kata lain, kalau sebuah sistem pemerintah ingin dianggap demokratis, ia harus mengkombinasikan tiga kondisi yang penting: *kompetisi* yang berarti antara individu dan kelompok terorganisir untuk kekuasaan politik; *partisipasi* saling terbuka dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, setidaknya melalui pemilihan umum yang jujur dan adil; dan tingkatan tertentu *kebebasan sipil dan politik* yang cukup untuk memastikan integritas kompetisi politik dan partisipasi. Tegasnya, partisipasi dan kompetisi adalah penting; meski demokrasi memiliki banyak bentuk, tidak ada sistem yang bisa dianggap demokratis tanpa tingkatan yang berarti dari kedua hal tersebut.

Demokrasi, seperti halnya sistem politik lainnya, bukan tanpa kekurangan dalam kondisi yang tidak menentu. Tetapi dengan tidak ada alternatif yang baik, pengalaman menunjukkan bahwa struktur demokratis; dalam kemungkinannya yang tidak terhingga, dapat menawarkan sarana penanganan damai bagi konflik yang berkepanjangan melalui kerangka kerja yang saling terbuka, adil dan dapat dipercaya. Sistem demokrasi dalam pemerintahan memiliki derajat legitimasi, saling terbuka,

fleksibilitas dan kapasitas untuk beradaptasi terus menerus yang memungkinkan konflik dapat dikelola secara damai.

Meskipun demokrasi dan solusi demokratis penting, namun demokrasi yang dirancang secara buruk bisa memperparah konflik komunal dan bukan menguranginya. Pengenalan politik "demokratis" bisa dengan mudah memobilisasi etnis, mengubah pemilihan umum menjadi konflik. Dalam masyarakat yang terpecah-belah (konflik yang berkepanjangan), kombinasi institusi politik mayoritarian dan pemilihan umum bisa membuat segalanya lebih buruk. Institusi demokrasi lainnya yang menyediakan diri bagi kampanye politik ya atau tidak memecah belah, seperti referendum, juga bisa membawa efek negatif dalam masyarakat yang terpecah-belah. Ini sebabnya mengapa nilai-nilai dasar demokrasi, seperti pluralisme, toleransi, saling keterbukaan, negosiasi, dan kompromi menjadi kunci pengelolaan konflik.

Duverger (1998), menegaskan bahwa *antagonisme* menghasilkan konflik, tapi dalam kesempatan tertentu juga menolong membatasi konflik dan meningkatkan integrasi. Setiap tantangan terhadap ketertiban sosial yang ada meliputi suatu visi dan rencana bagi suatu ketertiban sosial yang lebih tinggi dan lebih otentik. Konflik dan integrasi tidaklah berlawanan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perspektif fungsionalisme. Integrasi adalah usaha untuk membangun interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian atau berbagai unsur dari masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, proses integrasi merupakan upaya mempersatukan masyarakat menuju terwujudnya suatu komunitas

yang harmonis, didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Budiardjo, (1992:112), demokrasi ialah sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dari pengertian ini kemudian dapat dipahami bahwa konsep demokrasi yang dimaksud tidak lain adalah, cara membentuk kebijaksanaan dengan memberi banyak kemungkinan para anggota kelompok untuk mempengaruhi kebijakan itu. Dengan demikian, lawan demokrasi adalah otokrasi, yaitu cara membentuk kebijakan dengan hanya pemimpin yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kebijakan, sedangkan anggota kelompok sama sekali tidak diberi kesempatan, baik langsung maupun tidak. Dengan kata lain, otokrasi dapat dilakukan dengan cara diktator dan totaliter. Diktator adalah cara melaksanakan kebijakan dengan lebih banyak paksaan, sedangkan totaliter pekasaan kebijakan yang meliputi berbagai segi kehidupan manusia.

Perubahan sistem politik suatu pemerintahan demokratis ke pemerintahan totaliter akan mempengaruhi keluarga, pendidikan, agama, dan sebagainya. Bagian-bagian itu walau saling berkaitan, tetapi merupakan suatu struktur-mikro yang dapat dipelajari secara terpisah. Karena itu, harus berhati-hati menggunakan analogi ini, di mana masyarakat tidak benar-benar mirip dengan organisme hidup. Keduanya terdapat sebuah perbedaan yang sangat penting, yaitu sistem organisme bagian-bagian saling terkait dalam suatu hubungan yang intim, sedang sistem sosial hubungan sangat dekat seperti itu tidak begitu jelas terlihat, dengan bagian-bagian yang kadang-kadang sangat terpisah (Giddens, 2004).

Kriesberg (1998), membedakan kajian tentang konflik ke dalam empat hal, yaitu: (1) isu yang dikonflikkan; (2) karakteristik dari kelompok-kelompok yang berkonflik; (3) hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik; dan (4) cara yang digunakan oleh masing-masing kelompok dalam berkonflik. Dalam hubungan dengan struktur masyarakat Indonesia yang heterogen, khususnya masyarakat Maluku Utara yang dibahas dalam studi ini, untuk mendisiplinkan kelompok pada dasarnya didorong oleh suatu keinginan dan semangat persatuan di antara anggota masyarakat. Kesadaran menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta tunduk kepada kepentingan dan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan. Karena itu, anggota masyarakat harus senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap sesama. Keadaan masyarakat yang relatif terikat struktur sosialnya, maka kelangsungan hidup yang tercermin dalam ikatan moral dipertahankan. Ada kecenderungan sikap masyarakat lebih baik tenteram dalam keadaan bersahaja daripada harus berubah dengan gejolak sosial dan timbulnya berbagai penyimpangan yang tak kunjung selesai (konflik). Masyarakat pada umumnya lebih condong untuk mengidentifikasi dirinya dengan kebiasaan dan perilaku yang berubah secara nyata dan langsung sifatnya. Hal ini dapat dipahami bahwa ketertiban dan kestabilan masyarakat sangat tergantung pada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada saat tertentu.

Mencermati uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa mengintensifkan konflik memang perlu. Misalnya, ketika orang-orang hidup makmur dan memiliki kekuatan serta sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak memperhatikan atau menolak untuk mengakui, bahwa banyak orang lain miskin atau

tersisih. Dalam hal ini, konflik perlu diundang atau dimunculkan sehingga perubahan-perubahan yang memang diperlukan bisa terjadi. Mereka yang bekerja di bidang pembangunan dan hak asasi manusia sering harus menghadapi tugas – bukan untuk menyelesaikan konflik – tetapi untuk mengefektifkan konflik dan membuatnya semakin nyata, sehingga isu-isunya lebih banyak diketahui dan tindakan efektif untuk menanganinya (mengelola konflik secara efektif dan berkelanjutan).

B. Perubahan Sosial Dalam Perspektif Teori Sosiologi

Perubahan sosial dalam perspektif teori sosiologi mencakup berbagai aspek dengan pengertian yang sangat luas. Wilbert Moore, mendifinisikan perubahan sosial sebagai "perubahan penting dalam struktur sosial." Struktur sosial yang dimaksud adalah "pola-pola perilaku dan interaksi sosial". Difinisi ini mencakup berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Di samping itu, dalam berbagai literatur lain juga ditemukan difinisi tentang perubahan sosial mencakup bidang-bidang yang luas, antara perubahan sosial didifinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial, serta "setiap modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar prilaku" (Lauer, 1993).

Konsep perubahan sosial yang dimaksud, adalah pemikiran tentang *proses sosial* yang melukiskan rentetan perubahan yang saling berkaitan. Definisi klasik yang dikemukakan oleh Pitirim Sorokin menegaskan bahwa, "*setiap perubahan*

subyek tertentu dalam perjalanan waktu, entah itu perubahan tempatnya dalam ruang atau modifikasi aspek kuantitatif atau kualitatifnya" (Sztompka, 2004). Dengan demikian, konsep perubahan sosial menunjukkan: (1) berbagai perubahan, (2) mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi di dalam atau mengubahnya sebagai satu kesatuan), (3) saling berhubungan sebab-akibat dan tidak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau yang mendahului faktor yang lain, (4) perubahan itu saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu (berurutan menurut waktu). Misalnya, proses sosial yang bergerak dari tingkat makro ke tingkat mikro, yaitu industrialisasi, demokratisasi, perluasan perang, mobilisasi gerakan sosial, kristalisasi lingkungan pertemanan, dan krisis keluarga. Pentingnya analisis teoritis perubahan sosial adalah kaitan antara proses makro dan mikro.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan, para ahli sosiologi dewasa ini mulai meragukan validitas teori sistem organik dan dikotomi statika sosial dan dinamika sosial. Ada dua kecenderungan intelektual yang menonjol, yaitu: (1) penekanan pada kualitas dinamis realitas sosial yang dapat menyebar ke segala arah, yakni membayangkan masyarakat dalam keadaan bergerak (berproses), dan (2) tidak memperlakukan masyarakat (kelompok, organisasi) sebagai sebuah obyek dalam arti menyangkal konkretisasi realitas sosial.

Pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori perubahan sosial adalah, dari bentuk *rasionalisme* yang dimiliki. Sehubungan dengan itu, studi ini mencoba mengkaji pemikiran Weber tentang teori perubahan sosial khususnya *rasionalisme birokrasi* kaitannya dengan konflik antarelite. Menurut Weber (1964),

bentuk *rationality* meliputi *mean* (alat) yang menjadi sarana urama dan *ends* yang meliputi aspek kultural, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya orang Barat hidup dengan pola pikiran rasional yang ada pada perangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung kehidupannya. Orang yang rasional akan memilih mana yang paling benar untuk mencapai tujuannya.

Tahel (1994), konsep perubahan yang diajukan Weber, dapat terjadi pada perilaku individu. Orang memiliki jenis rasionalitas rangkap; misalnya perilaku naik Haji bagi kelompok komunitas pegawai negeri. Pertama kali memang orang akan menggagasnya sebagai bentuk rasionalitas yang berorientasi kepada nilai (*value oriented rationality*), tetapi sebagai seorang muslim yang patuh yang bersangkutan juga memiliki perkaitan dengan sejumlah emosi yang dirasakan dalam hubungannya dengan Tuhan (*effective rationality*). Mendirikan ibadah Haji bagi seorang muslim juga merupakan bentuk rasional yang sangat tradisional yang harus dilakukan sebagai kebiasaan turun-temurun (*traditional rationality*). Pelaksanaan ibadah Haji di kalangan birokrat (pegawai pemerintah), pada masa sekarang ini memiliki nilai tambah dalam hal kepangkatan. Meskipun tidak secara tertulis, tetapi di kalangan pejabat pemerintah (sejak masa Orde Baru) telah muncul suatu asumsi yang positif bagi pengembangan karir kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah Haji.

Abdullah (1986), meskipun Weber tidak mengkaji agama Islam secara khusus dan mendalam hingga masa akhir hayatnya, tetapi dalam beberapa karyanya selalu mempertimbangkan Islam sebagai salah satu agama ‘universal monoteisme’ yang sangat keras. Islam merupakan agama monoteisme yang universalistik. Pada

awal kajiannya, mengatakan bahwa Islam adalah “agama prajurit” yang mengabdi kepada kepentingan feodalistik. Pada awalnya perkembangan Islam dilalui dengan peperangan dan penaklukan atau penguasaan, di mana setiap kemenangan (yang biasa disebut kemenangan jiwa atau perang suci), selalu menyertai peristiwa akumulasi kekayaan, prestise sosial, dll. Islam yang berkembang secara patrimonial, selalu berkelanjutan logis bahwa struktur sosial yang terbentuk selalu berlandaskan ‘karisma’ penguasa, fenomena ini adalah ciri utama negara Islam.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam studi ini, adalah perubahan ide atau ideologi. Dalam hal ini, ide merupakan bagian dari variabel yang terlibat dalam perubahan sosial. Manusia adalah makhluk yang harus memahami dunia ini. Dengan demikian, seluruh mitos, agama, ilmu pengetahuan, dan ideologi, berfungsi memberi makna kepada dunia. Manusia primitif mungkin menerangkan suatu kecelakaan dengan mengacu kepada setan yang melarangnya menyandung batu yang dapat menyebabkan ia celaka, sedangkan manusia modern dapat menerangkan dengan mengacu kepada keadaan di sekitarnya. Namun keduanya, mitos dan ilmu, membantu mencapai tujuan yang sama, memberikan makna atas segala sesuatu yang terjadi. Karena itu mungkin benar, bahwa ideologi yang beranekaragam dapat menyertai pola perubahan yang serupa. Hal ini tidak berarti bahwa ideologi merupakan unsur yang tak dapat disingkirkan dari perubahan.

Mennheim (1985), dapat mendefinisikan ideologi sebagai sistem ide yang menghasilkan perilaku yang mempertahankan tatanan yang ada. Menurutnya, konsep ideologi menceriminkan ide bahwa “kelompok penguasa sangat tertarik pada situasi

di mana mereka tak mampu lagi melihat fakta tertentu yang dapat merusak pengertian mereka tentang dominasi." Untuk melihat kebenaran pandangan Mennheim tersebut, tidak perlu membatasi diri pada pengertian ideologi seperti telah diuraikan di atas. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lerner (1983), bahwa "ide adalah senjata ampuh" dan manusia memiliki ide baik untuk memahami maupun untuk mengendalikan kehidupan mereka, atau ide dapat menguasai manusia selaku "semangat setan yang seketika dapat menjelma menjadi tukang sihir yang menguasai dan menyebabkan manusia melaksanakan perintahnya."

1. Analisis Perubahan Sosial

Analisis perubahan sosial mencakup perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial (terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berbeda). Dengan kata lain, bayangan tentang perubahan adalah sesuatu yang terjadi dalam jangka waktu tertentu; berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan cermat, meski terus berubah (Sztompka, 2004:3).

Konsep perubahan sosial meliputi 'atom' terkecil dinamika sosial, perubahan keadaan sistem sosial atau perubahan setiap aspeknya. Perubahan itu biasanya berkaitan dengan aspek lain dan sosiologi harus menemukan konsep yang lebih kompleks untuk analisis bentuk-bentuk keterkaitan tersebut. Yang terpenting adalah pemikiran tentang "proses sosial" yang melukiskan rentetan perubahan yang saling

berkaitan. Perubahan sosial dapat dibedakan dalam beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fenoeman atau dimensi sistem sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan sistem sosial tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul berbagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen.

Terciptanya keseimbangan atau kegoncangan, konsensus atau pertikaian, harmoni atau perselisihan, kerjasama atau konflik, damai atau perang, kemakmuran atau krisis, dan sebagainya, berasal dari sifat saling mempengaruhi dari keseluruhan sistem sosial yang kompleks itu. Dengan demikian, yang menjadi sorotan dalam analisis perubahan sosial adalah "komponen dan dimensi utamanya," antara lain :

a. Perubahan komposisi (misalnya, migrasi dari satu kelompok ke kelompok lain, menjadi satu kelompok tertentu, pengurangan jumlah penduduk karena kelaparan, demobilisasi gerakan sosial, bubarnya suatu kelompok).
b. Perubahan struktur (terciptanya ketimpangan, kristalisasi kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya hubungan kerjasama / hubungan kompetitif).
c. Perubahan fungsi (misalnya, spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan, hancurnya peran ekonomi keluarga, diterimanya peran yang diindok-trinasikan oleh sekolah atau universitas).
d. Perubahan batas (misalnya, penggabungan beberapa kelompok oleh kelompok lain), mengendurnya kriteria keanggotaan kelompok dan demokratisasi keanggotaan, serta penaklukan).

e. Perubahan hubungan antarsubsistem) (misalnya, penguasaan rezim politik atas organisasi ekonomi, pengendalian keluarga dan keseluruhan kehidupan privat oleh pemerintah totaliter).
f. Perubahan lingkungan (misalnya, kerusakan ekologi, gempa bumi, munculnya wabah (virus HIV, lenyapnya sistem bipolar internasional).

Meskipun demikian, perubahan sering terjadi hanya sebagian dan terbatas tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Contoh, kekuatan sistem politik demokratis terletak dalam kemam-puannya menghadapi tantangan, mengurangi protes dan menyelesaikan konflik dengan mengadakan perombakan sebagian tanpa membahayakan stabilitas dan kontinuitas negara sebagai satu kesatuan. Perubahan seperti ini merupakan perubahan di dalam sistem.

Fakih (2002), analisis perubahan sosial menurut teori evolusi, masyarakat akan berkembang dari masyarakat sederhana (*primitive*) menuju ke masyarakat modern (*complex*). Penganut teori ini berasumsi bahwa masyarakat akan berubah secara linier atau seperti garis lurus, dari masyarakat primitif ke masyarakat maju. Masa depan manusia dapat dipastikan, yakni akan melalui suatu proses panjang menuju masyarakat maju. Asumsi tersebut diperkuat oleh asumsi mereka yang lain yakni masyarakat modern yang dicita-citakan, disebut sebagai bentuk tujuan suatu masyarakat yang bernilai ‘baik, dan ‘sempurna.’ Penganut teori evolusi terkadang

mencampuradukkan antara pandangan subyektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial yang disebut sebagai kemajuan, kemanusiaan, dan kebudayaan.

Teori evolusi ini sangat berpengaruh terhadap hampir semua teori tentang perubahan sosial sesudahnya, seperti teori fungsionalisme yang dikembangkan Parsons maupun teori-teori modernisasi dan pembangunan yang dikembangkan Rostow dan Mc-Clelland. Hanya saja, jika teori evolusi menganut paham bahwa perubahan masyarakat terjadi dalam waktu yang lama, bagi penganut teori moderninasi dan pembangunan proses perubahan tersebut dipercepat dengan pendekatan revolusi melalui pelbagai intervensi. Padangan inilah yang kemudian menjadi pijakan bahwa proses modernisasi bisa direkayasa.

Giddens (2004), teori evolusi masih mengandung banyak deskripsi yang cermat. Kebanyakan masyarakat beralih dari masyarakat sederhana ke masyarakat kompleks. Pada batas-batas tertentu memang ada tahap-tahap perkembangan dan setiap tahap berbagai unsur budaya terkait ke dalam sistem yang terintegrasi. Dengan adanya modernisasi beberapa perubahan sosial telah dianggap perlu, misalnya sistem transportasi dan bank, spesialisasi pekerjaan dan organisasi sosial yang didukung oleh peran, bukan jalinan kekerabatan. Semua masyarakat yang melakukan modernisasi harus mengalami rangkaian perubahan yang kurang lebih sama. Jadi, walaupun teori tentang adanya serangkaian tahap tidak sepenuhnya benar, namun teori itu pun tidak sepenuhnya salah. Strategi teoritis evolusioner adalah strategi yang berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan rangkaian-rangkaian perubahan sosial dalam jangka waku yang panjang. Evolusioner umumnya berpendapat bahwa banyak

masyarakat yang telah mengalami perubahan-perubahan yang umumnya serupa dari zaman dahulu hingga sekarang, dan mereka berusaha keras mengidentifikasi perubahan-perubahan ini dan menjelaskan kenapa perubahan ini terjadi.

Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan sosial, dalam perjalannya telah menjadi sebuah ideologi. Perkembangan ini adalah akibat dari dukungan dana dan politik yang luar biasa besarnya dari pemerintah dan organisasi maupun perusahaan swasta di Amerika Serikat serta negara-negara liberal lainnya. Semua itu menjadikan modernisasi dan pembangunan sebagai suatu gerakan ilmuwan yang antar disiplin ilmu-ilmu sosial yang memfokuskan kajian terhadap perubahan sosial di Dunia Ketiga sangat berpengaruh. Akibatnya, menjadikan teori modernisasi tidak hanya sekedar merupakan ‘industri sedang tumbuh’, tetapi telah menjadi sebuah aliran pemikiran bahkan telah menjadi sebuah ideologi. Pengaruh modernisasi di Dunia Ketiga sangat luas, tidak saja di kalangan akademisi di perguruan tinggi, tetapi juga di kalangan birokrasi yakni para perencana dan pelaksana program pembangunan di negara-negara sedang berkembang (Suwarsono, 1994).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern). Selain itu, modernisasi juga berwatak kompleks (melalui banyak cara dan disiplin ilmu), sistematik, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju suatu homogenisasi (*convergency*) dan bersifat progresif. Teori ini dipergunakan di kalangan inter-disiplin, sehingga lahirlah

aliran modernisasi dalam sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, pendidikan, bahkan agama. Gerakan modernisasi agama terutama dalam bentuk sekularisasi maupun pembaharuan teologi. Namun, hal inilah yang menyebabkan perubahan. Dalam hal ini, berlaku teori perubahan otomatis (*the theory of automatic change*), sebagai hasil elaborasinya ialah teori evolusi, di mana esensinya irasional, tidak disadari prosesnya. Perubahan diakibatkan oleh variasi kebiasaan yang terjadi sebagai respon terhadap suatu kebutuhan, tetapi tidak direncanakan.

2. Dimensi-dimensi Perubahan Sosial

Perubahan sosial meliputi beberapa hal penting, di antaranya: proses dan mekanisme perubahan sosial, dimensi perubahan sosial serta kondisi dan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat. Adanya interaksi sosial akan menimbulkan proses sosial di dalam masyarakat. Hal ini akan menentukan arah norma dan nilai-nilai dalam organisasi-organisasi, lembaga sosial dan bentuk-bentuk sosial lainnya di mana bentuknya tidak berubah dan tetap dalam kerangka kerjanya. imensi-dimensi perubahan sosial meliputi: struktural, kultural, dan interaksional.

a. Dimensi Struktural

Dimensi perubahan struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial. Secara ringkas dimensi perubahan struktural meliputi: (1)

bertambah atau berkurangnya kadar peranan; (2) menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan; (3) adanya peningklatan atau penurunan sejumlah peranan, atau pengkategorian peranan; (4) terjadinya pergeseran dari wadah atau kategori peranan; (5) terjadinya modifikasi saluran komunikasi di antara peranan-peranan atau kategori peranan; (6) terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur.

b. Dimensi Kultural

Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, antara lain: adanya penemuan (*discovery*) dalam berpikir, perubahan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Hal ini dapat meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru ke dalam kebudayaan. Bentuk-bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus menerus. Inovasi kebudayaan, difusi dan integrasi kesemuanya melibatkan proses perubahan sosial di dalam dimensi kultural.

c. Dimensi Interaksional

Perubahan sosial menurut dimensi interaksional, mengacu kepada adanya perubahan hubungan sosial di dalam masyarakat, yang diidentifikasikan dalam lima dimensi. Modifikasi dan perubahan dalam struktur daripada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Perubahan sosial dalam banyak hal

dapat dianalisis dari proses interaksi sosial. Misalnya, perubahan sosial di pedesaan terjadi karena urbanisasi, yang dapat dianalisis dalam hal variasi dan frekuensi kontak sosialnya; pergeseran dari pola hubungan yang primer ke pola hubungan sekunder atau grup; pergeseran dari tipe masyarakat *gemenschaft* ke *gesellsahaft*; pergeseran dari interaksi di antara status kehidupan yang sama ke interaksi kontraktual yang banyak memutuskan tali persaudara-an; pergeseran dari bentuk-bentuk kerjasama ke hubungan yang penuh dengan persaingan dan sendiri-sendiri; dan pergeseran dari nilai-nilai individual sebagai pribadi dengan hubungan yang bersifat pribadi serta menjadi pola hubungan yang impersonal.

C. Perspektif Teori Elite dan Integrasi

Istilah "*elite*" berasal dari kata Latin, yaitu "*eligere,* " yang berarti memilih. Elite dalam pemakaian biasa adalah bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia, serta orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Pada abad 18 penggunaan istilah ini dalam bahasa Perancis, kemudian meluas dengan memasukkan penjelasan baru dalam berbagai bidang. Dalam ilmu sosial, tekanan bergeser dari keadaan pilihan menjadi terkemuka. Arti elite paling umum ialah "sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat." Ahmadi (1997), memberikan pengertian elite dalam dua kategori, yaitu: (a) Sejumlah orang di mana punya peranan penting dalam masyarakat, (b) Kelompok atau golongan yang berkuasa. Dengan demikian, elite ialah kelompok yang istimewa dan

mempunyai nilai lebih. Kemudian Huky (1982), mengemukakan bahwa elite dalam masyarakat yang kompleks adalah sejumlah kecil orang yang memiliki kekuasaan. Mereka dapat sebagai group, baik yang bersifat konkrit maupun abstrak yang mengontrol pihak lainnya. Ide tentang elite ini menjadi monoritas yang melaksanakan kekuasaan; di mana saja ia berbicara mengenai ‘kelas-kelas penguasa’.

Elite dalam pengertian yang paling umum, adalah sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan-kedudukan tinggi. Dalam arti yang lebih khusus, adalah sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu terutama golongan kecil yang memegang pemerintahan serta lingkungan dari mana pemegang kekuasaan itu diambil, Schoorl (1984). Dengan demikian, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari warga masyarakat lainnya, sehingga menempati kedudukan sosial di atas para warga masyarakat lainnya. Keller (1995), mendefinisikan elite sebagai kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan. Keesing (1992), menilai bahwa elite merupakan istilah netral dari “kelas penguasa”. Dengan kata lain, elite adalah suatu minoritas peribadi-peribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Duverger (1998), mengemukakan bahwa elite adalah individu yang paling mampu dalam setiap cabang kegiatan manusia. Elite ini berjuang melawan massa-melawan mereka yang kurang berbakat, kurang mampu untuk mencapai posisi kekuasaan. Kemudian Nashir (1999), mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang sangat berbakat atau terbaik dalam masyarakat. Sedangkan menurut Alwi dan Zainal (1989), elite adalah mereka yang mempunyai kekuasaan terbesar dalam suatu

kelompok atau suatu masyarakat. Mereka mampu memperoleh bagian terbesar dari apa yang dapat diperoleh dalam suatu sistem di mana mereka berkuasa.

Berdasarkan beberapa pengertian elite di atas, dapat diketahui ciri-ciri elite, meliputi: (1) kohesinya, (2) kepentingan peribadinya, (3) nilai-nilainya, (4) representativitasnya terhadap kepentingan umum atau kalangan khusus yang ada kaitannya, (5) responnya terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat umum, (6) hasil kerjanya– biasanya berkaitan dengan efisiensi dan profesionalisme, dan (7) kelancaran hubungannya dengan kelompok elite yang lain (Martin; 1993).

Ahmadi (1997), mememberikan suatu batasan bahwa "Integrasi sosial atau integrasi masyarakat adalah adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan suatu persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-sama dijunjung tinggi." Dalam hal ini, terjadi akomodasi, dan asimilasi di antara anggota masyarakat secara keseluruhan. Dalam hubungan ini Svalastoga (1989), mengemukakan bahwa diferensiasi mennciptakan tekanan disintegrasi. Aspek ini dalam teori fungsional menekankan koordinasi struktural, sub-sub unit dan penyatuan simbol sebagai persoalan integrasi. Dalam teori konflik dan pertukaran, dikatakan bahwa penggunaan kekuasaan untuk menciptkan kelas-kelas bukan hanya menjadi pusat perbedaan, tetapi juga sumber disintegrasi melalui konflik. Untuk menyelesaikan konflik, satu hal penting yang harus dipertimbangkan adalah **"**seleksi sosial**"**. Konsolidasi dan penyatuan politik melahirkan pilihan tekanan-tekanan yang

diresponi, atau sama sekali tidak diresponi. Proses disintegrasi memunculkan pilihan tekanan-tekanan untuk pembangunan, bila tidak masyarakat akan hancur.

Turner (1991), mengatakan bahwa proses integrasi berkaitan dengan fungsi-fungsi kebutuhan untuk berintegrasi. Integrasi unit sosial bermakna bila ada disintegrasi, rusaknya hubungan-hubungan dan simbol-simbol umum masyarakat. Dalam beberapa teori konflik ada ketegangan-ketegangan yang tetap dan dialektika diantara tekanan-tekanan pada unit-unit sosial yang mengendalikannya. Dalam hal ini, pembentukannya disebut "proses integrasi" dan sesudahnya disebut "disintegrasi". Populasi yang beragam senantiasa mengarah kepada tekanan-tekanan disintegrasi yang terbagi atas: (1) sub-sub kelompok dan tingkatan-tingkatannya, (2) masalah penyatuan simbol sub budaya yang berbeda, termasuk waktu, sub kategori, dan (3) masalah konsolidasi kekuasaan politik.

1) Integrasi melalui Koordinasi Struktural

Perlunya saling ketergantungan di antara sumber-sumber kelompok sebagai aspek mendasar organisasi sosial. Dengan adanya diferensiasi sub unit tersebut harus memikirkan sumber-sumber dengan unit yang lain agar dapat hidup. Secara umum jaringan-jaringan dan bagian-bagian yang saling ketergantungan dapat menghasilkan masalah koordinasi. Simbol umum dan pelaku utama sangat menunjang saling ketergantungan struktur.

2) Integrasi melalui Penyatuan Simbol

Dimensi integrasi dan kesadaran yang melahirkan kekuasaan untuk mengatur dan mengontrol menurut teori struktural, konstitusi dan penggunaan

informasi, petunjuk evaluasi dan peraturan berpengaruh pada tatanan sosial. Sedang norma dan kerangka lembaga penting untuk menghadapi desakan-desakan yang kuat. Masalah koordinasi merupakan proses konsolidasi politik yang melegitimasi penyatuan simbol. Pemusatan kekuasaan mempengaruhi pengembangan evaluasi dan pendefinisian simbol. Proses politik diarahkan untuk mengatur tindakan dan koordinasi interaksi unit-unit sosial, sehingga proses tersebut dapat menentukan bahwa simbol dan media simbol apa yang cocok dengan situasi kekuasaan.

3) Integrasi melalui Konsolidasi Politik

Secara umum integrasi melalui konsolidasi politik terdiri dari : *Sentralisasi*, K*onsentrasi*, dan *Legitimasi*. Integrasi melahirkan koordinasi struktural, penyatuan simbol dan konsolidasi politik yang dihasilkan oleh tekanan-tekanan integrasi. Penyebabnya adalah perbedaan sub kelompok sub kategori dan unit-unit. Bila semua aspek tersebut efektif dalam mengatasi masalah, maka proses integrasi akan terealisasi dengan baik.

Berdasarkan pandangan dan pemikiran para ahli yang telah dikemukakan di atas, dalam hubungan dengan konsep utama (konflik dan perubahan sosial) di mana teori-teori konflik kaitannya dengan teori-teori perubahan sosial yang mendominasi pembahasan ini adalah *grand theory* Max Weber, yang dielaborasi dengan beberapa teori yang relevan sesuai dengan konteks dan arah penelitian ini. Dalam hubungan dengan perspektif teori konflik penulis lebih cenderung mengembangkan beberapa proposisi Lewis Coser tentang fungsi-fungsi konflik, serta pandangan Dahrendorf

tentang konflik-konflik dalam organisasi (birokrasi). Dalam hubungan dengan proses perubahan sosial tetap dominasi pemikiran Weber terhadap berbagai aspek terutama yang dikembangkan Parsons dan Merton tentang fungsionalisme struktural maupun integras sosial dan politik dalam studi ini.

Kecenderungan ini didasarkan pertimbangan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*social realitas*) atau sebagai perubahan dalam keseimbangan (*equilibrium*) dalam hubungan sosial. Dalam hal ini, ada tiga macam perubahan: (1) suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar (*immanent change*); (2) suatu perubahan sosial yang terjadi apabila *outsider* secara tidak sengaja dan spontan membawa ide-ide baru kepada anggota dari suatu sistem sosial (*selective contract change*); (3) suatu perubahan terjadi bila ide-ide atau cara-cara baru dibawa secara sengaja oleh *outsider* (*direct contract change*).

Konflik dan perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang wajar. Setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas, di mana pertentangan-pertentangan (konflik kepentingan) selalu terjadi dan beriringan dengan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia (anggota masyarakat) itu sendiri. Sumardjan (1986), perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan suatu kemajuan atau justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah nilai dan norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya. Perubahan sosial

berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan karena setiap perubahan dalam suatu sistem sosial (masyarakat) mengakibatkan perubahan bidang-bidang lainnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang konflik dan perubahan sosial telah banyak dilakukan, khususnya para ilmuwan sosial. Pada umumnya hasil-hasil penelitian tersebut dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang melatar belakangi timbulnya pergolakan atau konflik di dalam masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi perubahan sosial di berbagai aspek kehidupan. Dari hasil-hasil penelitian itu, penelitei mengklasifikasi beberapa hasil penelitian yang relevan ditinjau dari beberapa aspek, terutama aspek perubahan yang ada hubungannya dengan satudi ini.

Penelitian Alexander Weilenman (1994), diterjemahkan oleh Soenarwan, dengan judul: “Riset Evaluasi dan Perubahan Sosial.” Penelitian ini mengungkapkan bahwa, suatu masyarakat dan masing-masing bagiannya mempunyai kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik mereka, atau lebih tepatnya menyesuaikan dengan perubahan yang relevan dengan lingkungan mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat itu mengalami perubahan sosio-kutural dan mentransformasikan dirinya sendiri agar dapat memperbesar kemungkinan untuk memperlihatkan sifatnya, untuk tetap dirinya sendiri, dan untuk memenuhi tujuan fundamentalnya.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa, suatu problem tidak memiliki cara penyelesaian yang hanya satu, pasti, dan langsung. Sebaliknya, setiap solusi atau penyelesaian tergantung dari bagaimana problem itu terstruktur, yaitu atas dasar asumsi-asumsi yang dipakai guna mendukung situasi problem itu. Asumsi-asumsi itu pada gilirannya mencerminkan tata nilai dan gambaran tujuan, serta mempengaruhi tata nilai dan gambaran tujuan yang lain. Secara spesifik, problem yang kurang terstruktur terjadi bilamana dua (atau lebih) tata nilai dan gambaran tujuan yang saling bertentangan membawa karakte-ristik situasi tersebut. Boleh dikatakan dengan pasti bahwa pada umumnya, kita dapat mengadakan pendekatan terhadap situasi problem-sosial dengan perangkat tata nilai dan gambaran tujuan yang berbeda, meskipun salah satu darinya sebenarnya, mendominasi yang lain dan menonjol. Sebenarnya pemegang kekuasaan cenderung untuk memandang situasi problem sebagai terstruktur-baik, dan merasa puas bahwa tata nilai dan gambaran tujuan mereka sendiri yang paling cocok.

Penelitian Ngadisah (2003), dengan judul: “Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua,” menjelaskan bahwa selama tiga dasawarsa pembangunan nasional di Indonesia (1970-190-an) telah terjadi perubahan yang sangat pesat, sehingga memberi kesan bahwa keberhasilan pembangunan dapat diukur dari banyaknya proyek-proyek fisik yang dibangun. Pengorbanan faktor manusia dalam proses pembangunan dianggap wajar, karena dimasukkan sebagai “*cost*” yang harus dibayar demi keberhasilan pembangunan itu. Dengan kata lain, faktor-faktor sosial budaya telah diabaikan dalam proses pembangunan tersebut.

Akibatnya, makna kesejahteraan direduksi hanya pada aspek fisik, yang diukur dari kenaikan pendapatan per-kapita secara nasional sebagai indikator pertumbuhan. Di samping itu, warga masyarakat di kawasan tertentu yang terkena dampak pembangunan, khususnya warga masyarakat yang berdekatan atau tergusur karena proyek. Bagi mereka, kehadiran proyek justru menjadi beban karena terlalu banyak perubahan yang belum siap mereka terima. Lebih-lebih bagi mereka yang tergusur, beban menjadi semakin berat karena di samping menerima dampak secara fisik, mereka harus mengembangkan pola-pola adaptasi di lingkungan baru yang dapat menimbulkan konflik, seperti yang dialami masyarakat Timika.

Penelitian Syahril Muhammad (2004), dengan judul: Kesultanan Ternate (Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik), menyimpulkan: (1) dilihat dari status sosial, masyarakat di Kesultanan Ternate terdiri atas tiga tingkatan, yaitu: golongan bangsawan yang terdiri dari keluarga sultan dan pembesar-pembesar lainnya. Kemudian anak-anak sultan bergelar *kaicil* untuk putra dan *boki* atau *nyaicil* untuk putri. Jika anak-anak berada pada jenjang ketiga dari sultan yang berkuasa, bergelar *jou mama datu*, sedang pada jenjang keempat *bergelar jou mamuse*. Tingkatan kedua adalah rakyat biasa, yang biasa disebut *bala* atau *anak bala*. Tingkatan ketiga adalah hamba sahaya. (2) dari segi ekonomi, pada masa-masa awal Kesultanan Ternate mengandalkan "*comercial power*" dan bergantung pada fluktuasi arus pedagangan internasional di Asia Tenggara. (3) kehadiran bangsa Eropa terutama Hindia Belanda di wilayah Kesultanan Ternate, menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, meliputi: ekonomi, politik dan sosial budaya. perubahan-perubahan yang

terjadi sebagai akibat konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat (Ksultanan Ternate). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahan di wilayah Kesultanan Ternate, dengan transformasi sistem sosial, ekonomi dan politik melalui elite-elite penguasa lokal di wilayah masing-masing.

Menyimak beberapa penelitian di atas, umumnya hanya menyangkut latar belakang atau faktor penyebab terjadinya konflik tanpa menggali dan mengungkap akar permasalahan, sehingga solusi dan tindak lanjut dari hasil penelitian itu belum terlaksana seperti yang diharapkan. Studi ini mencoba untuk menggali informasi yang lebih dalam (akar penyebab) konflik antar elite di Maluku Utara, ditinjau dari perspektif historis-sosiologis. Dengan kata lain, proses awal timbulnya konflik antar elite dalam kaitan dengan proses perkembangan masyarakat, terutama empat kerajaan yang dikenal dengan “Moloku Kie Raha” dalam perspektif perkembangannya hingga pecah konflik bernuansa ‘SARA’ 1999-2001.

E. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, teori-teori yang menjadi acuan dalam studi ini meliputi kelompok teori sosiologi klasik dan modern tentang konflik dan perubahan sosial. Dalam hal ini, dinamika konflik dan perubahan sosial masyarakat Maluku Utara yang ditelusuri mulalui proses panjang perjalanan Maluku Utara, sejak terbentuknya empat kerajaan (Moloku Kie Raha) hingga terjadinya konflik bernuansa ‘SARA’ 1999-2001 serta dimensi-dimensi perubahan yang mewarnai proses perjuangan pembentukan Propinsi Maluku Utara dalam era reformasi.

Studi ini mengasumsikan bahwa, ada beberapa fenomena empiris yang memiliki kekuatan cukup kuat mempengaruhi timbulnya konflik dan perubahan sosial di Maluku Utara. Fenoeman-fenomena empiris yang dimaksud, meliputi: dimernsi struktural (perubahan sistem dan struktur sosial); dimensi interaksional (perebutan hubungan sosial di dalam masyarakat); dan dimensi ideologi (perubahan nilai dan norma-norma sosial yang bersumber dari kebudayaan dan agama). Ketiga dimensi perubahan sosial ini merupakan konsep utama yang dikembangkan sesuai dengan kondisi obyektif (fakta empiris) di lapangan.

Perubahan sosial dalam analisis sosiologi menyangkut dorongan-dorongan perubahan sosial yang inheren dalam konstruksi tatanan sosial yang bersangkutan. Premis ini mencerminkan posisi masalah (*problem-stellung*) sosiologis, yang terus berkembang sejak awal abad ke-19. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku Utara banyak terjadi perubahan tatanan sosial. yang dimaksud tatanan sosial di sini dapat berupa keadaan transisi dan pra-konflik, keadaan individual (elite politik) sampai ke kehidupan sosial seperti kelembagaan sosial dan struktur masyarakat. Masalah perubahan sosial, dimulai dengan organisasi sosial sebagai suatu kontinuitas dan disorganisasi sosial.

Masalah ideologi yang berkembang di Indonesia (Pancasila), dan benturan yang dirasakan dari aspek kehidupan komunal (sosial budaya) dan aspek kehidupan agama di dalam masyarakat. Dewasa ini, masalah ideologi-agama semakin tajam dan diperuncing oleh pergolakan masyarakat dengan basis etnik. Masyarakat dalam budaya Islam merupakan sumber perubahan sosial yang bermuara pada pembentukan

masyarakat sipil menurut konsep Islam, yang diperjuangkan dalam komunitas kritis yang kemudian menjelma dalam bentuk kelembagaan, sosial dan politik. Dalam perkembangannya dapat mengarak kepada kemampuan kekuatan Islam sebagai sebuh peradaban yang mendukung nilai-nilai demokrasi, suatu ajaran ideologi sosial yang berasal dari intensitas keterlibatan masyarakat dan budaya Islam di Indonesia.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, maka untuk mengarahkan peneliti dalam mengembangkan konsep utama sesuai dengan fakta empiris, untuk menjelaskan konflik dan perubahan sosial. Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh konflik dapat dijelaskan apa adanya sebagai sumbangan bagi pengembangan sosiologi, terutama teori-teori yang digunakan dalam studi ini. Dalam hal ini, konflik dan perubahan sosial merupakan indikator pembangunan. Indikator yang dimaksud menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial sebagai akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh fenomena konflik, khususnya konflik antar elite di Maluku Utara.

Sehubungan dengan itu, beberapa proposisi Coser yang relevan dengan konsep utama penelitian ini, antara lain: “Kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjuangan yang berkepanjangan dengan pihak luar, di dalam kelompok tersebut cenderung menjadi tidak toleran. Mereka tidak mungkin toleran melebihi yang diperbolehkan oleh kesatuan kelompok. Kelompok yang demikian cenderung menerima karakater yang mirip-sekte; yang memilih anggotanya atas dasar karakteristik khusus yang karena itu ukurannya cenderung terbatas dan menuntut keterlibatan seluruh kepribadian para anggotanya.”

Coser menegaskan bahwa, kohesi sosial dalam kelompok mirip-sekte itu tergantung pada penerimaan secara total seluruh aspek kehidupan kelompok. Satu-satunya cara agar dapat mengatasi masalah perbedaan pendapat ialah dengan pengunduran diri dari kelompok secara paksa atau sukarela. Di lain pihak, kelompok-kelompok "bertipe gereja," tidak terlibat dalam perjuangan berkepanjangan dengan pihak luar dan cenderung utuk tidak menuntut seluruh kepribadian para anggotanya. Kelompok yang demikian cenderung membiarkan adanya "konflik yang ditolerir," dan mereka memiliki kemampuan bagi perubagan dan penyempurnaan.

"Konflik-konflik di mana pesertanya merasa bahwa mereka semata-mata merupakan wakil dari kolektivitas-kolektivitas, berjuang bukan untuk dirinya tetapi hanya untuk cita-cita kelompok yang diwakili; sangat mungkin lebih radikal serta tak kenal ampun ketimbang mereka yang berjuang hanya untuk alasan-alasan pribadi. Penghapusan unsur-unsur personal cenderung mempertajam konflik karena tidak terdapatnya unsur-unsur pengubah di mana faktor-faktor pribadi akan dimasukkan. Ikatan ideologis yang ketat lebih mungkin terjadi dalam struktur yang kaku ketimbang dalam struktur yang mampu mengadakan penyesuaian dan fleksibel."

Singkatnya, bilamana terdapat konsensus dasar tentang nilai-nilai inti yang ada dalam suatu kelompok, maka konflik dengan berbagai kelompok luar dapat memperkuat kohesi internal kelompok. Dalam struktur kelompok yang mirip-gereja atau ikatan longgar, perbedaan-perbedaan lain dalam kelompok dapat ditolerir tanpa ancaman serius bagi stabilitas kelompok. Akan tetapi dalam kelompok mirip-sekte (memiliki ikatan kuat), konflik internal lebih mungkin tidak terungkapkan.

SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL

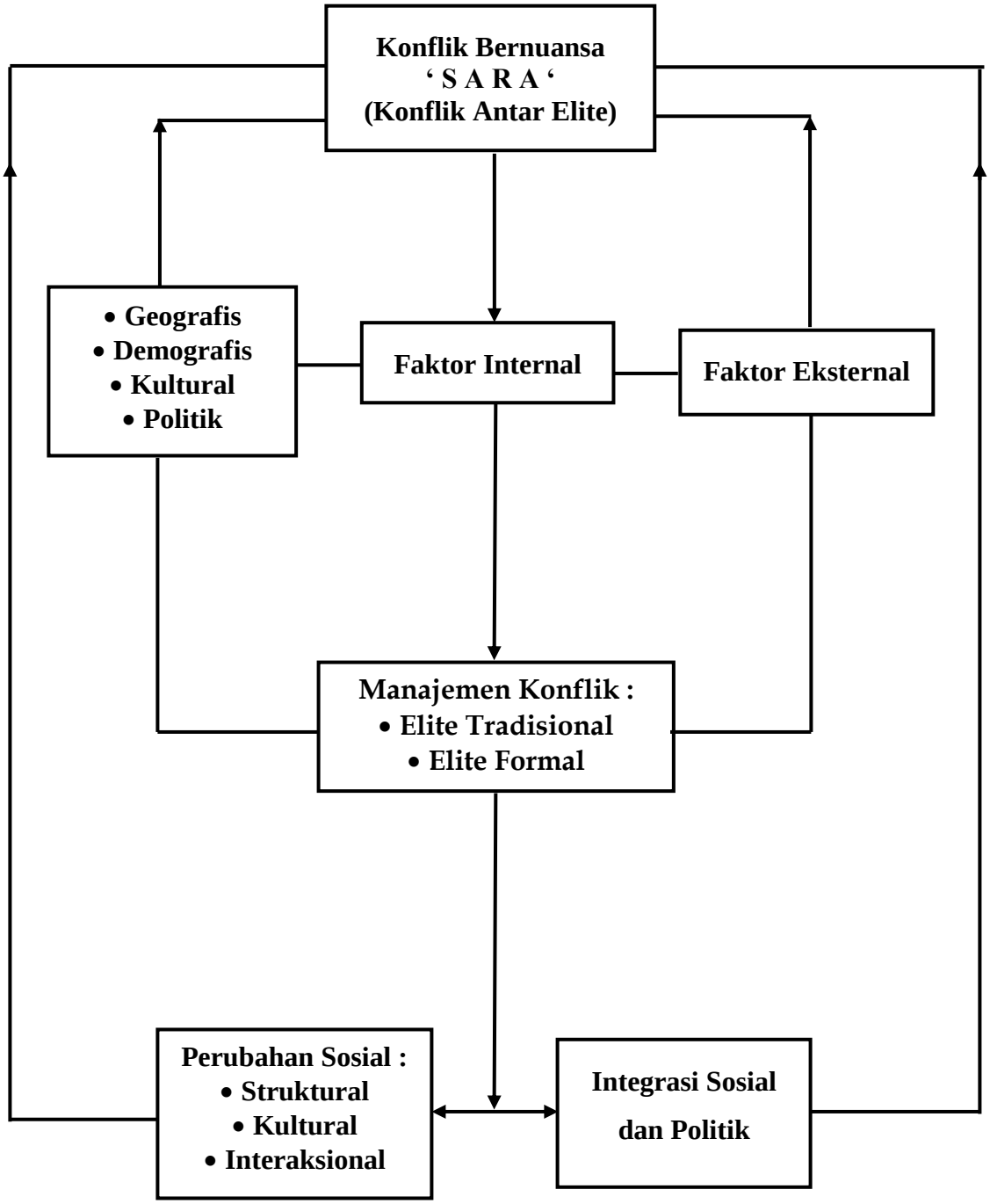

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasi dengan pendekatan kuantitatif, namun tetap dominasi metode kualitatif yang didukung oleh metode kuantitatif. Selain itu, desain penelitian yang digunakan adalah studi sejarah, dipadukan dengan beberapa jenis penelitian yang relevan, anatara lain: studi kasus, *grounded research*, dan studi *etnografi*.

Pendekatan kualitatif dimaksud untuk menjelaskan fenomena konflik dan perubahan sosial berdasarkan fakta empiris. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, metode kualitatif lebih mudah ketika berhadapan dengan kenyataan ganda, terutama untuk menjelaskan hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan kata lain, metode kualitatif di mana data yang dikumpulan berupa ceritra rakyat (lagenda), gambar dan bukan angka-angka (deskriptif), dapat dianalisis berdasarkan interpretasi peneliti untuk memberikan gambaran serta penjelasan secara komprehensif beberapa fenomena sosial yang ada hubungannya dengan konsep utama yang dibahas. Dalam hal ini, menelusuri latar belakang dari fenomena yang ditelitei sebagai suatu konsep yang utuh ditinjau dari aspek sejarah (historis) dan sosiologis.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tidak sekedar diartikan sebagai pemilihan metode yang difokuskan pada jenis data dan analisis yang bersifat kualitatif, tetapi mempunyai landasan filosofis yang mendasari lahirnya paradigma

tertentu tentang metode ini. Pemilihan metode bukanlah hal yang sederhana, karena di dalamnya menyangkut asumsi-asumsi dasar tentang teori sosial. Para peneliti kualitatif telah membuat rel sendiri untuk tidak menggunakan pendekatan ilmu alam dalam mempelajari masyarakat. Bila pendekatan kuantitatif dikembangkan oleh penganut aliran *positivisme*, maka pendekatan kualitatif dikembangkan penganut *filsafat hermeneutika*. Hermeneutika adalah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang selama tiga sampai empat dasawarsa terakhir menjadi pokok pembicaraan dalam perdebatan ilmu-ilmu sosial (Strauss & Juliet, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada dua masalah yang menjadi sumber pendekatan. *Pertama*, masalah metode yang paling tepat untuk ilmu sosial. *Kedua*, masalah asas-asas filsafat ilmu pengetahuan yang mestinya melandasi ilmu-ilmu sosial. Atas dasar pembahasan kedua masalah itu, lahirlah suatu pandangan bahwa *hermeneutika* adalah landasan *epistemologi* yang tepat untuk menegaskan jenis pengetahuan ilmiah, yang seyogyanya dikembangkan dalam ilmu sosial maupun jenis metode penelitian yang diperlukan. Jenis pengetahuan yang dimaksud adalah interpretatif, dan metode yang cocok untuk menghasilkan pengetahuan interpretatif tersebut didasarkan pada *verstehen***,** yaitu cara mengembangkan pengetahuan yang memanfaatkan kemampuan manusia menempatkan diri melalui pikiran dalam situasi dan kondisi orang lain, agar mampu memahami pikiran, pandangan, perasaan, cita-cita, dorongan, dan kemauannya.

Studi sejarah yang dipilih seabagai desain penelitian yang dikembangkan dalam studi ini, dikombinasi dengan jenis-jenis penelitian yang relevan, antara lain:

studi kasus, grounded research, dan studi ethnografi sebagai salah satu kerangka kerja yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Sebagai suatu kategori desain penelitian, studi ini tidak mudah didispesifikasi dari segi akurasi dan generalisasi. Meskipun demikian, dari kedua aspek ini dapat dijelaskan sesuai dengan pandangan para, bahwa pemahaman atas makna, proses pemaknaan, dan produksi makna oleh interaksionisme simbolik, ethnometodologi, dan ethnografi praktif, semuanya mengarah pada penentuan obyek yang spesifik. penggunaan jenis penelitian yang dimaksud dengan analisis data secara induktif, bertujuan untuk mencari kesamaan-kesamaan (*universalitas*) serta membuat kategori-kategori umum, melalui pemberian makna secara ketat atas konsep-konsep yang digunakan.

B. Instrumen Penelitian

Upaya mendapatkan data dan informasi yang akurat sesuai dengan obyek sasaran yang dibahas, maka penciuman lapangan (kehadiran peneliti dalam setting) merupakan hal penting untuk memperoleh data dan informasi yang dimaksud. Dalam hal ini, kehadiran peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen utama penelitian, di samping instrumen lain yang sifanya hanya mendukung peneliti dalam menggali dan mengungkap berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pokok yang dibahas, yaitu konflik dan perubahan sosial dalam perspektif sejarah Maluku Uatara terutama menyangkut proses pertumbuhan dan perkembangan empat kerajaan besar, atau yang lebih dikenal dengan istilah “Moloku Kie Raha”.

Berkaitan dengan peran yang dimaksud, maka kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat penuh dan diketahui oleh informan. Hal ini mengingat data dan informasi yang akan digali adalah “sebuah proses” (perjalanan panjang) Moloku Kie Raha ditinjau dari berbagai dimensi dan dinamika yang ikut mewarnai perjalanan tersebut. Selain itu, proses perjuangan rakyat Maluku Utara menuntut provinsi hingga pecahnya konflik tahun 1999-2001. Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas dan akurasi data yang diteliti. Sehubungan dengan itu, peneliti sangat hati-hati dalam menggali dan mengungkap hal-hal yang sensitif terutama menyangkut sejarah Moloku Kie Raha. Hal ini mengingat penulisan sejarah tentang kerajaan-kerajaan Maluku banyak direkayasa untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena itu, beberapa informan mengharapkan agar penelitian ini benar-benar mengungkap akar penyebab konflik secara benar dan apa adanya, terutama dalam kaitan dengan timbulnya konflik dan upaya pemecahannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Provinsi Maluku Utara, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor: 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebagai wilayah otonom, Provinsi

Maluku Utara terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 2 (dua) kota, 45 kecamatan 675 desa dan 83 kelurahan, dengan jumlah pulau sebanyak 397 buah pulau besar kecil, sebanyak 64 pulau yang dihuni dan 133 pulau tidak dihuni, dengan luas wilayah keseluruhan ± 140.256,36 Km^2 , yang terdiri dari luas daratan 33.278 km^2 (23,72%) dan perairan seluas 106.977,32 Km^2 (76,28%).

Menyadari akan kompleksitas dan luasnya wilayah penelitian, maka sesuai dengan fokus penelitian, dipandang perlu mengambil sampel lokasi. Karena itu, lokasi yang dipilih adalah tiga kabupaten dan dua kota, dengan pertimbangan dua kabupaten dan dua kota merupakan bekas wilayah empat kerajaan di Maluku Utara. Dua kabupaten dan dua kota yang dimaksud, adalah: Kabupaten Halmahera Selatan (Kesultanan Bacan), Kabupaten Halmahera Barat (Kesultanan Jailolo), Kota Tidore Kepulauan (Kesultanan Tidore), Kota Ternate (Kesultanan Ternate), dan Kabupaten Halmahera Utara sebagai lokasi awal terjadinya konflik di Maluku Utara, sebelum meluas ke daerah-daerah lain tahun 1999-2001.

Selain alasan dan pertimbangan di atas, Maluku Utara dipilih sebagai lokasi penelitian juga dimaksudkan untuk menjelaskan konflik secara konprehensif dan berkelanjutan. Karena itu, studi ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas berdasarkan fakta dan data empirik mengenai akar permasalahan, yang menyebabkan timbulnya konflik antar-suku dan antar-kelompok, atau dalam studi ini disebut konflik antar-elite. Hal ini mengingat wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki posisi strategis, karena terletak berbatasan dengan Kawasan Pasifik dan mempunyai peluang akses langsung ke wilayah Philipina.

Secara historis dapat dilihat Pulau Morotai yang pernah dijadikan sebagai pangkalan militer pada masa Perang Dunia kedua, ditinjau dari aspek *geopolitik* dan *geostrategi* perang (konflik) sangat menguntungkan. Demikian pula perairan di sebelah barat wilayah Maluku Utara merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 3). Posisi ini merupakan nilai lebih bagi Maluku Utara, terutama dalam hal keterkaitan dan hubungan dengan wilayah lain di Indonesia maupun sebagai akses ke perdagangan internasional. Sementara dalam proses penataan pemerintahan yang baru, dalam kurun waktu yang sama sejak pembentukan provinsi ini, terjadi konflik horizontal yang dampaknya masih terasa sampai saat ini. Berbagai keunggulan wilayah yang dijelaskan di atas, belum dapat terlaksana sesuai harapan. Dampak konflik berimplikasi pada kehancuran dan korban jiwa serta aset pemerintah dan masayarakat. Kondisi wilayah cenderung tidak stabil yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kepemerintahan pada umumnya.

D. Informan

Informan kunci sebagai sumber data utama yang memberikan keterangan secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehubungan dengan itu, informan kunci dalam penelitian ini dipilih secara proporsional sesuai dengan jumlah bobot dan fakta yang ditelitei. Dalam hal ini, informan kunci yang dimaksud meliputi semua kelompok elite di lima wilayah kabupaten/kota. Kelompok elite tersebut dapat dibedakan atas “elite tradisional” yang meliputi elite adat, elite agama, dan tokoh

masyarakat yang dipandang berkompeten dalam menjelaskan masalah pokok yang dibahas; dan “elite formal” yang meliputi elite birokrasi dan politik, termasuk tokoh-tokoh lokal dan nasional yang berkompeten menjelaskan konflik di Maluku Utara. Di samping itu, para negosiator terutama para akademisi, organisasi nonpemerintah, dan Jurnalis (media massa) sebagai sumber data (informan kunci) terutama dalam kaitan dengan upaya penyelesaian konflik di Maluku Utara.

Setelah diidentifikasi sejumlah informan sesuai dengan kategori yang telah disebutkan di atas, ditemukan sebanyak 65 orang sebagai informan (sumber data) dan dari jumlah tersebut ditentukan 27 orang sebagai “informan kunci” yang selalu siap menerima peneliti selama dalam penelitian, untuk menggali informasi lebih dalam tentang masalah pokok yang dibahas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabrl 1. Karakteristik Informan Kunci

Karakteristik Informan Kunci	Jumlah
1. Elite Tradisional :	
- Elite Adat	4
- Elite Agama	2
2. Elite Formal :	
- Elite Birokrasi (Kabupaten/Kota)	7
- Elite Politik (Partei Politik/Anggota Dewan)	5
- Aparat Keamanan	1
- Kepala Desa	4
3. Negosiator :	
- Para Akademisi	2
- Ornop/LSM, dan Jurnalis (Media Massa)	2
Jumlah	27

Sumber : Identifikasi Informan Kunci (Januari, 2006).

E. Pengumpulan Data

Berdasarkan obyek sasaran penelitian, dengan mengacu pada konsep utama atau permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi :

1. **Observasi**.

   Bentuk observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi biasa, di samping pengamatan langsung terhadap obyek sasaran yang ditelitei untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena konflik dan perubahan sosial di Maluku Utara, seperti pengamatan terhadap Keraton (Istana) Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, serta benteng-benteng peninggalan Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda di wilayah Kesultanan Maloko Kie Raha dalam hubungan dengan perilaku masyarakat dan institusi-institusi sosial. Juga, ikut aktif dalam berbagai kegiatan sosial politik selama penelitian berlangsung terutama berkaitan dengan pemulangan penungsi dan Pilkada kabupaten/kota.

2. **Wawancara.**

   Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepht interview*) terhadap informan kunci yang telah ditentukan, di samping wawancara terstruktur (tertulis) terhadap pihak-pihak terkait (birokrasi dan politik) untuk mememperoleh gambaran dan informasi tentang konflik dan perubahan sosial di Maluku Utara. Wawancara mendalam (*indepht interview*) kepada informan kunci, adalah untuk menggali informasi yang lebih dalam (akar permasalahan) tentang

konflik antar elite kesultanan Maloko Kie Raha yang berkepanjangan, kaitannya dengan dinamika perkembangan masyarakat dalam perubahan sosial. Wawancara terstruktur (tertulis) ditujukan kepada pejabat pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, untuk memperoleh penjelasan menyeluruh (*komprehensive*) terutama dalam hubungan dengan strategi dan kebijakan pemerintah pasca konflik tentang pengelolaan konflik (manajemen konflik) yang dilakukan pihak-pihak terkait sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Dokumentasi.

Peneliti dapat menelaah kembali dokumen-dokumen penting tentang sejarah perkembangan kesultanan Maloko Kie Raha terutama yang berkaitan dengan masuknya para penjajah (Portugis, Spanyol dan Belanda), termasuk proses penyiaran agama Islam dan Kristen) di Maluku dan Maluku Utara. Terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA di Maluku dan Maluku Utara, tidak terlepas dari perspektif sejarah masa lalu yang penuh dengan konflik kepentingan yang dalam penelitian ini disebut “konflik antar elite.”

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan selama penelitian (*Analysis during data collection*). Hal ini dimaksudkan agar fokus penelitian (konsep utama) tetap diberi perhatian khusus melalui wawancara mendalam (diolah dan ditulis dalam cacatan). Selanjutnya seluruh data dianalisis secara kualitatif, untuk menjelaskan konflik dan perubahan sosial dengan unit analisis konflik antar elite sesusi dengan fakta yang ada. Langkah

berikutnya adalah melakukan *analisis interaktif* dengan memadu data secara menyeluruh (*komprehensif*). Selain itu, *content analysis* sebagai pelengkap terutama dalam mengkaji peraturan perundangan dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, baik formal maupun informal, serta pernyataan para tokoh atau elite lokal dan nasional yang berkaitan dengan proses perubahan sosial.

Analisis secara induktif berlangsung bersamaan dengan proses penelitian. Hal ini karena, penelitian kualitatif lebih menghendaki bimbingan penyusunan "teori substantif" yang berasal dari data. Dengan demikian, analisis secara induktif adalah pencarian data bukan untuk membuktikan hipotesis penelitian, melainkan analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan kategori-kategori yang telah dikumpulkan. Selain itu, analisis komparatif dan eksperimen keduanya menggunakan logika perbandingan. Komparasi yang dibuat adalah komparasi fakta-fakta replikatif, kemudian dibuat konsep atau abstraksi teoritis. Dari komparasi tersebut, dapat menyusun kategori-kategori serta membuat generalisasi.

Analisis data berdasarkan fakta empiris ialah teori berdasarkan data, bukan teori hasil telaah deduktif-logik. Teori substantif ditemukan dan dibentuk untuk daerah substantif tertentu. Dalam penelitian kualitatif dengan analisis induktif adalah teori berdasarkan data, sedang teori formal ditemukan dan dibentuk untuk kawasan kategori konseptual teoritik. Dalam klasifikasi Merton adalah "teori taraf menengah" (*middle range theories*), yang menampilkan keberlakuannya pada daerah substantif tertentu, dan tidak menjangkau apa yang disebut *grand theoris*.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep dasar atau istilah yang perlu didefinisikan, untuk menyamakan persepsi tentang fokus penelitian (konsep utama). Konsep dasar atau istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Konflik antar-elite, adalah salah satu bentuk konflik dalam negara, selain konflik sosial yang bernuansa SARA (suku, agara, ras dan antargolongan) yang sering terjadi di berbagai daerah. Konflik antar-elite yang dimaksud adalah konflik para elite (tradisional dan formal) dalam perebutan higemoni, sumberdaya alam, dan kekuasaan dengan membawa simbol-simbol etnis dan agama dalam skala yang lebih luas di Maluku Utara. Dimensi konflik ini memiliki dampak yang sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Kategoeri yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah, keadaan di mana konflik terus berlangsung dan hampir tidak pernah berkesudahan, sejak terbentuknya empat kerajaan (Moloku Kie Raha).
2. Geografis, demografis, kultural, dan politik adalah kondisi di mana geografis Maluku Utara yang kompleks dan unit, yakni seabagai provinsi kepulauan di belahan Timur Indonesia dengan potensi kekayaan alam terutama rempah-rempah (cengkeh dan pala). Di satu sisi, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya – dan disi lain, dapat membawa bencana bukan saja antar-suku atau kelompok-kelompok lokal tetapi antar-agama dalam skala yang lebih luas.
3. Faktor internal dan eksternal, adalah kondisi internal empat kerajaan (Moloku Kie Raha) yang sejak awal sudah saling bermusuhan terutama antara Ternate dan

Tidore dalam upaya merebut hegemoni Maluku melalui politik ekspansi. Kondisi ini semakin intens setelah masuknya negara-negara Eropa di Maluku, yang semula hanya motivasi ekonomi (perniagaan rempah-rempah) tetapi kemudian meningkat ke politik (kekuasaan) dan yang terpenting adalah penyebaran agama Kristen (Katolik dan Protestan).

4. Manajemen konflik, adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan konflik melalui strategi dan kebijakan yang dikembangkan pasca konflik. Kategori elite seperti telah dijelaskan di atas, ialah elite tradisional dan elite formal. Elite tradisional meliputi golongan elite adat dan agama. Elite formal adalah para golongan birokrasi, politikus, dan militer (TNI dan Polri).

   a. Elite Adat, adalah golongan elite yang memperoleh kekuasaan, kewenangan, pengaruh dan prestise berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat Maluku Utara. Elite Agama, adalah mereka atau para pejabat (para penguasa kerajaan atau pemerintah) yang dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya selalu didasarkan atas nilai-nilai (ajaran agama), khususnya agama Islam. Salah satu pengaruh yang sangat kuat di mana agama Islam diterima sebagai agama kerajaan, adalah adanya berbagai peraturan dan jabatan-jabatan baru yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

   c. Elite Formal, adalah para pejabat birokrasi, politikus (pimpinan partai politik dan anggota DPR) baik pusat mapun daerah. Elite formal yang dimaksud ialah konsep jaringan sosial yang dibangun oleh para penguasa untuk mencari

dukungan dan mempengaruhi masyarakat. Pada prinsipnya sebuah jaringan sosial adalah suatu hubungan yang terjalin antara seseorang penguasa dengan orang masyarakat. Hubungan ini terjadi karena manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama untuk mencapai suasana kehidupan yang damai dan ternteram.

5. Perubahan sosial, adalah dinamika atau proses perubahan yang terjadi sebagai dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh konflik. Dalam hal ini, perubahan-perubahan yang mencakup berbagai dimensi. Dimensi-dimensi perubahan sosial meliputi struktural, kultural, ideologi dan politik. Sellain itu, kategori-kategori yang dikembangkan adalah, dimensi birokrasi ditelusuri melalui proses perubahan sistem dan struktur pemerintahan dan politik.
6. Integrasi sosial dan politik, adalah kondisi di mana tercipta suasana pergaulan dan antar-hubungan berbagai komponen masyarakat pasca konflik yang kondusif, melalui berbagai upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan sesuai nilai-nilai dan norma-norma budaya yang disepakati bersama dan tahan lama. Dengan kata lain, melalui pengelolaan konflik dan transformasi konflik yang intensif dan berkelanjutan dapat menimbulkan kesadaran semua unsur di dalam masyarakat, untuk tetap menjaga dan memelihara persatuan, kedamaian, serta persaudaraan, dengan moto: Maluku Utara yang damai, maju, dan mandiri.

BAB IV

SETTING: PERKEMBANGAN MASYARAKAT MALUKU UTARA

A. Kondisi Geografis dan Potensi Wilayah

Maluku Utara dalam sejarah dikenal empat kesultanan (Moloku Kie Raha) sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal hingga keseluruh dunia. Di samping itu, Moloku Kie Raha juga sebagai pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur. Wilayah kekuasaan Moloku Kie Raha khususnya Kesultanan Ternate, meliputi hampir seluruh kawasan Timur Indonesia, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Selatan (Pulau Selayar), bahkan sampai ke negeri seberang Mindanau (Philinan Selatan). Kesultanan Ternate memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Timur (Maluku dan sekitarnya), karena kedudukannya yang sangat strategis sebagai pusat rempah-rempah yang merupakan komoditi perdagangan dunia yang sangat diperlukan saat itu. kekuasaannya yang sangat luas dan besar ketika itu membuat Ternate disegani, baik oleh lawan maupun kawan.

Pemberian alam yang unik kepada kepulauan Maluku Utara dan sekitarnya, yaitu pohon cengkeh yang sangat lebat buah dan daunnya mirip pohon salam, menyelimuti lereng-lereng gunung berapi. Batang pohon cengkeh, jika jatuh di tanah dan kering kena sinar matahari, tidak saja dapat meningkatkan rasa sedap bubur sagu yang pada dasarnya hambar itu, tetapi juga meningkatkan cita rasa masakan serumit masakan Cina dan Perancis. Kegunaannya sebagai bahan untuk ramuan wewangian,

kemenyan, obat-obatan, kosmetik dan perangsang untuk menimbulkan rasa gairah dalam masa-masa awal abad permulaan telah mendatangkan pedagang dari segala penjuru sampai sejauh tanah Cina dan Arab. Yang terpenting lagi dari kegunaan pohom ajaib ini adalah sebagai pengawet daging agar tahan lama, karena di Eropa maupun negara-negara lainnya sangat membutuhkan tumbuhan ini, maka dicarilah berbagai cara untuk bisa mendapatkannya.

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Maluku Utara (Ternate) telah lama dikunjungi pedagang-pedagang Jawa dan Melayu. Mereka membawa cengkeh dan pala dari Maluku dan Banda ke Pulau Jawa, kemudian dibawa ke Malaka. Dari Malaka, rempah-rempah ini diangkut ke kota-kota di India. Selanjutnya rempah-rempah itu sampai ke Eropa melalu Aden dan Hormuz. Dengan melalui perantaraan pedagang-pedagang Jawa dan Melayu,cengkeh kemudian terkenal di seluru Eropa. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang Cina telah mengenal cengkeh sejak abad ke-7, karena mereka telah mengenal jalan-jalan laut ke pulau-pulau penghasilnya, maka berdatanganlah orang-orang Cina ke Maluku Utara (Leirissa, 1996).

1. Letak dan Luas Wilayah

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan, terdiri dari 395 buah pulau besar dan kecil: 64 pulau di huni dan 331 pulau tidak dihuni dengan luas daratan 33.278 Km² (23,73%) dan perairan (lautan) 106.977,32 Km² (76,27%). Luas wilayah keseluruhan 140.977,32 Km². Geografis Maluku Utara berada diantara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° sampai 129° Bujur Timur.

Batas-batas wilyah meliputi: Sebelah Timur dengan Laut Halmahera, sebelah Barat dengan Laut Maluku, sebelah Utara dengan Laut Samudera Pasific, sebelah Selatan dengan Laut Seram.

Wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sesuai Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, terdiri dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, meliputi: 45 kecamatan, 675 desa, dan 83 kelurahan dengan jumlah penduduk 910.656 Jiwa, (Bappeda Maluku Utara, Tahun 2004).

2. Topografi, Fisiografi, dan Geologi

Wilayah Maluku Utara sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang terdiri atas pulau-pulau volkanis dan pulau karang. Sebagian lainnya merupakan daratan. Pulau Halmahera memiliki banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Buli, Weda, Payahe, dan Dodinga. Di setiap daerah terdapat punggung gunung yang merapat ke pesisir, sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli, Halmahera Timur sampai Teluk Kao, Halmahera Utara. Pesisir Barat mulai dari Teluk Jailolo ke Utara dan Teluk Weda ke Selatan dan Utara, ditemui daerah daratan yang luas. Pada bagian lainnya terdapat deretan pegunungan yang melandai dengan cepat ke arah pesisir. Pulau-pulau yang relatif sedang adalah: Obi, Morotai, Taliabu, dan Bacan umumnya memiliki daratan yang luas dengan diselingi pegunungan yang bervariasi, potensi hutan dan kelautan yang belum banyak disentuh (diolah dan dikembangkan) untuk kemakmuran dan hajat hidup rakyat banyak.

Sebagian besar provinsi ini, bagian Tengah dan Utara merupakan daerah pegunungan dengan bahan induk yang bervariasi, bagian Utara dan Timur Laut semenanjung Halmahera didominasi oleh pegunungan. Semenanjung Utara disusun oleh formasi gunung api (Andesit dan Batuan beku Basaltik). Pada semenanjung Timur Laut ditemuakan batuan beku asam, basa dan ultra basa serta batuan sedimen. Daerah pegunungan merupakan bentangan lahan dengan puncak dan pegunungan curam tertoreh serta lereng yang curam (> 40%). Di sepanjang Utara Halmahera terdapat barisan gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Pada bagian ini daratan alluvial tidak ditemukan, tetapi memasuki daerah Kao, ditemukan daratan alluvial yang luas pada daerah pedalaman, daratan volkanik yang berombak dan daratan alluvial berawa secara lokal.

Kedua semenanjung (Utara dan Timur) daerah pegunungan dikelilingi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan yang berkembang dari bahan yang sama. Pulau Morotai banyak kesamaan dengan pulau Halmahera bagian Utara dan Timur, yang dicirikan oleh oleh gunung-gunung yang berkembang dari batuan sedimen dan batuan beku basa. Pada semenanjung bagian Selatan Halmahera lebih didominasi oleh daerah gunung terutama berkembang dari bahan-bahan sedimentasi batu napal dan batu gamping (Marl dan Limestone), di mana pada bagian ini terbentang daratan sempit alluvial arah Timur – Barat.

Kawasan sepanjang pantai Barat Halmahera terbentang sejumlah pulau-pulau besar dan kecil yang dimulai dari Ternate bagian Utara sampai Obi di bagian Selatan. Pulau-pulau kecil di bagian Utara umumnya adalah daerah volkanik yang tersusun

dari bahan andesit dan batuan beku basaltik dengan lereng curam (30-40%) sampai sangat curam (> 45%). Kelompok pulau-pulau Bacan mempunyai bentangan lahan pegunungan yang sama dengan Halmahera Utara, yaitu batuan beku basa dan batuan metamorfik. Batuan metamorfik walaupun menyebar secara lokal, tetapi merupakan batuan induk dominan pada daerah ini.

Sepanjang pesisir terdapat daratan pantai yang sempit, dan bagian Tengah dari pusat pulau Bacan dibentuk oleh daratan alluvial. Bentang lahan pulau Obi mengikuti pola yang sama, di Bagian Tengah didominasi oleh daerah pegunungan dengan bahan penyusunnya berupa batuan beku basa dan diapit oleh deretan perbukitan dari batuan sedimen. Kelompok kepualuan Sulabesi mempunyai struktur yang sama, tetapi memiliki susunan bahan induk yang berbeda. Sebagian besar pulau Taliabu dan Sanana merupakan daerah pegunungan dengan puncak tajam dan lereng yang curam, juga berkembang dari batuan metamorfik. Pada bagian Barat pulau Sanana juga ditemukan bahan induk granit.

3. Iklim dan Penduduk

Wilayah Maluku Utara dipengaruhi oleh iklim laut tropis dan iklim musim. Dengan demikian iklimnya sangat dipengaruhi oleh lautan dan bervariasi antara tiap bagian wilayah, yaitu iklim Halmahera Utara, Halmahera Barat/Tengah, Bacan dan Kepulauan Sula: (1) Daerah iklim Halmahera Utara, musim hujan berada pada bulan Desember-Pebruari, musim kemarau dalam bulan Agustus-Desember; (2) Daerah iklim Halmahera Tengah/Barat, dipengaruhi musim Utara pada bulan Oktober-Maret, pacaroba pada bulan April. Masim Selatan pada bulan April-September yang

diselingi angin Timur dan pancaroba pada bulan September; dan (3) Daerah iklim Bacan dan kepulauan Sula, dipengaruhi dua musim yaitu musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan pancaroba pada bulan April, musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan pancaroba dalam bulan September (Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2005).

Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Biro Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 berjumlah 910.656 Jiwa, tersebar pada 6 (enam) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan tingkat penyebaran yang tidak merata, di mana konsentrasi penduduk hanya pada wilayah-wilayah tertentu seperti Kota Ternate, Kota Tidore dan wilayah lainnya (Kantor Statistik Provinsi Maluku Utara, 2005). Di lihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, maka penduduk di Provinsi Maluku Utara termasuk ke dalam golongan umur penduduk muda (0 – 19 Tahun), di mana sebagian besar penduduk adalah kelompok usia muda (50,62%), dan jumlah penduduk akan semakin menurun pada kelompok umur yang lebih tua. Lebih dari setengah jumlah penduduk adalah penduduk usia produktif (10 – 45 Tahun), yaitu sekitar 67,36 % dari total seluruh penduduk Maluku Utara.

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan, dapat dilihat bahwa bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian sekitar 55,62%, sedangkan untuk bidang-bidang lain distribusinya hampir berimbang kecuali bidang perdagangan dan jasa sebesar 17,56 %. Persebaran penduduk desa-kota, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada penduduk desa. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain dipengaruhi

oleh adanya perubahan status beberapa wilayah dari kecamatan menjadi kabupaten dan dari desa menjadi kecamatan melalui pemekaran kabupaten/kota, di samping terjadinya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota cukup tinggi, juga factor lain seperti meningkatnya kesejahteraan penduduk.

4. Potensi Sumberdaya Alam

Potensi sumberdaya alam baik sumberdaya mineral atau bahan galian tambang yang terdapat di Provinsi Maluku Utara antara lain: Emas di Gosowong Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Obi, tembaga, mangan, besi, pasir besi, batubara, biji nikel, gas bumi, batu gamping dan marmer. Selain itu, sumberdaya lainnya yang cukup potensial untuk dieksplorasi adalah potensi panas bumi.

a. Potensi Pertanian dan Kehutanan

Potensi pertanian tanaman pangan yang menonjol adalah umbi-umbian, kacang-kacangan, padi, holtikultura dan lain-lain. Potensi perkebunan yang menonjol adalah kelapa, kakao, cengkih, pala, kopi, lada dan vanili, sementara untuk sub sektor kehutanan yang menonjol adalah kayu, damar dan rotan.

b. Potensi Kelautan dan Pariwisata

Jenis komoditi penangkapan ikan di Provinsi Maluku Utara adalah jenis cakalang, tuna, kerapu, kakap, napoleon, baronang, teripang, dan rumput laut. Sementara potensi budidaya air tawar yang dapat dikembangkan adalah ikan mas, gurami, nila, mujair dan ikan gabus. Berdasarkan hasil penelitian Badan Riset Departemen Kelautan Perikanan, dan Komisi Nasional Stock Assessment,

wilayah perairan Maluku Utara berada dalam wilayah pengelolaan Laut Seram dan Laut Maluku dengan jumlah potensi sumberdaya ikan (*standing stock*) yang diperkirakan mencapai 1.035.230,00 ton dengan jumlah potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield, MSY*) yang dapat dimanfaatkan sebesar 828.180,00 ton/tahun terdiri dari , ikan pelagis 621.135,00 ton pertahun dan ikan demersal 207.045,00 ton pertahun. Estimasi potensi sumberdaya perikanan tangkap di Maluku Utara, dituangkan tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Sumber Daya Ikan dan Potensi, serta Estimasinya

No.	Jenis Sumber Daya Ikan (SDI)	Potensi (Ton/Tahun)	Estimasi SDI Di Bawah 12 Mil
1	Pelagis Besar	424.260,00	339.408,00
2	Pelagis Kecil	169.834,33	135.867,46
3	Demersal	101.872,08	81.497,66
4	Ikan Karang	67.801,78	54.241,42
5	Lobster	14.992,37	11.993,90
6	Cumi-Cumi	22.874,18	18.299,34
7	Udang Peneid	26.545,26	21.236,21
	Total	828.180,00	662.544,00

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, Desember 2005

Kegiatan perikanan tangkap menghasilkan berbagai jenis hasil tangkapan berupa ikan konsumsi bernilai ekonomis penting diantaranya ikan pelagis besar seperti cakalang, tuna, tongkol, dan jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti kembung, layang, tembang, selar dan beberapa jenis ikan pelagis ekonomis lainnya yang ditangkap oleh masyarakat nelayan di sekitar perairan pantai. Beberapa jenis ikan demersal yang diusahakan oleh masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan antara

lain kerapu, lolosi, beronang, kakatua, kakap, serta jenis-jenis lainnya yang belum dikomersialkan dan masih terbatas pada konsumsi masyarakat.

Hasil identifikasi jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di sekitar perairan pantai terdapat sekitar 98 jenis ikan, 74 diantaranya bernilai ekonomis penting, 20 jenis telah dikomersialkan termasuk didalamnya cumi -cumi, udang lobster, penaed, ikan teri dan nener estuary, serta 12 jenis ikan hias ekonomis penting dan penyebaran sumberdaya ikan hampir merata di seluruh wilayah.

Tabel 3. Perbandingan Potensi dan Produksi Berdasarkan Jenis Sumber Daya Ikan di Perairan Maluku Utara Sampai Tahun 2005

No.	Jenis Sumber Daya Ikan	Potensi (Ton/Tahun)	Produksi/Tahun (Ton)	
			2003	Tingkat Pemanfaatan
1	Pelagis Besar	424.260,00	24.667,52	5.81
2	Pelagis Kecil	169.834,33	20.003,09	11.77
3	Demersal	101.872,08	12.727,23	12.41
4	Ikan Karang	67.801,78	10.287,16	15.12
5	Lobster	14.992,37	3.013,16	20.10
6	Cumi-Cumi	22.874,18	9.111,18	39.82
7	Udang Peneid	26.545,26	3.727,35	14.03
	Jumlah	828.180,00	83.536,65	

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, Desember 2005

Mengantisipasi tingkat pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan eksploitasi sumberdaya, khususnya ikan akan meningkat pada masa-masa yang akan datang, maka pengembangan sub sektor perikanan budidaya merupakan faktor sangat penting dan potensial. Pengembangan sektor perikanan di Provinsi Maluku Utara sangat mungkin untuk dikembangkan dan ditingkatkan lebih maju lagi, karena adanya beberapa peluang sebagai berikut :

- Potensi sumberdaya perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal termasuk potensi perairan ZEE yang ada di selat Pasifik.
- Letak geografis yang terdapat pada bibir Pasifik yang merupakan sumber pertumbuhan dunia.
- Permintaan dunia terhadap produk perikanan cukup tinggi terutama pada era globalisasi AFTA, NAFTA, APEC dan WTO.
- Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar yang merupakan potensi pasar yang cukup menjanjikan.

Sektor pariwisata sangat potensial seperti wisata alam Pulau Dodola dan Pantai Manaf di Kecamatan Sanana, Danau Duma dan Makette di Kecamatan Galela, Danau Ngade dan Tolire di Pulau Ternate, Air Terjun Cibicebi di Kecamatan Patani dan wisata bahari dengan Pulau Lelei dan Guraici dengan taman laut dan ikan – ikannya di Kecamatan Kayoa, wisata budaya dan sejarah yang indah untuk dikembangkan dan sebagian besar belum tersentuh atau dikelolah secara professional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan devisa Negara. Banyak faktor yang berpengaruh, antara lain sumberdaya manusia, infrastruktur, dan minimnya investor di sektor ini. Minimnya investasi juga disebabkan kurang infrastruktur utama maupun pendukung serta promosi yang terpadu.

Rencana pengembangan obyek wisata belum berjalan secara terpadu dan komprehensif. Obyek wisata sebagai pilar utama, industri pariwisata memerlukan adanya keterkaitan sektor yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dengan sektor lainnya. Lemahnya sektor ini disebabkan karena masih minimnya dan kurangnya

investasi yang besar untuk menjadikan obyek wisata yang tersedia sebagai industri pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan dan devisa daerah.

B. Maluku Utara Dalam Perspektif Sejarah

Mengungkap Maluku Utara pada masa lalu, berarti membuka kembali tabir kejayaan masa kerajaan-kerajaan lokal, terutama proses awal terbentuknya Maluku Utara kaitannya dengan peran cengkeh dalam dunia perniagaan yang telah membawa nama harum Maluku pada umumnya dan Maluku Utara pada khususnya. Sehubungan dengan itu, sebelum membahas sejarah terbentuknya Maluku Utara, terlebih dahulu dijelaskan sejarah lima negeri. Kelima negeri yang dimaksud meliputi: Maba, Patani, Weda, Gane, dan Tahani. Dalam hal ini, Tahani yang dikenal sekarang merupakan tempat (daerah) pertama kedatangan Noh bin Djafar Sadik di Maluku Utara, dalam rangka menyebarkan agama Islam. Dalam Lagenda (*Hikayat Bacan*), disebutkan bahwa Noh bin Djafar Sadik tiba pertama di Limau Dolik Pulau Makian, kemudian di tempat inilah beliau mulai menjalankan misinya "menyiarkan agama Islam", dan menikah dengan seorang gadis Limau Dolik (Tahani) – hingga mendirikan empat kerjaan besar, yang kemudian dikenal dengan "Moloku Kie Raha." Di tempat ini pula beliau wafat, bukti sejarah yang dapat dilihat adalah Makam beliau timbul sebagai "Keramat" di Tanjung Limau Dolik, tempat pertama beliau tiba. Kisah selengkapnya tentang hal ini, hubungannya dengan lahirnya empat kerajaan besar "Moloku Kie Raha", dapat dibahas pada bagian lain dalam tulisan ini.

1. Sejarah Lima Negeri (Asal Mula Orang Tahani)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan kunci tentang proses awal terbentuknya Maluku Utara, antara lain: Kepala Desa Tahani, Kecamatan Mafilut Kabupaten Halmahera Utara (*MA/53 th*), menjelaskan bahwa menurut catatan yang ditulis oleh Kakek (Tahani: *Tete*), waktu itu (1982) beliau berusia kurang lebih 100 tahun. Pada zaman dahulu (tidak diketahui pasti tahun berapa), yang jelas sebelum kedatangan Noh bin Djafar Sadik (Penyiar agama Islam pertama) di Maluku Utara, diperkirakan sekitar akhir abad ke-11. Di Tahani, ada seorang raja bernama "Barbara" (raja pertama) di jazirah Maluku Utara. Wilayah kekuasaannya sangat luas, yang meliputi sebagian wilayah Malaysia hingga Philipina Selatan (sekarang Islam Moro), atau lebih dikenal dengan Mindanau.

Raja Barbara ketika itu masih kafir (belum beragama atau 'animisme'), terkenal sangat kerjam dan sangat disegani baik kawan maupun lawan. Nama yang sebenarnya adalah "Bara-bara," artinya "berkepala tujuh." Karena memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, serta pengikut yang banyak terutama para budak. Setiap bulan tugas para budak adalah, keliling seluruh jazirah Maluku Utara menggunakan perahu untuk mencari dan mengumpulkan bahan makanan di wilayah kekuasaannya terutama Halmahera, untuk dibagikan kepada semua penduduk khususnya Tahani. Suatu ketika, salah satu kelompok dari para budak tersebut melewati tanjung Liboba dan melihat seorang gadis yang sedang mandi dan mencuci di tanjung itu, rambutnya yang panjang dibiarkan hanyut terbawa bersama ombak. Penglaman ini kemudian disampaikan kepada Raja Barbara setibanya di Makian (Tahani). Mendengar berita

itu, Raja Barbara langsung memerintahkan kelompok (budak) tersebut kembali ke tempat di mana gadis itu berada, dan mengambil (menculik) gadis itu untuk dibawa ke Tahani yang kemudian menjadi isteri Raja Barbara.

Waktu itu, di Maba ada 5 (lima) orang bersaudara berasal dari keturunan penguasa Halmahera khususnya bagian timur. Lima bersaudara tersebut, empat orang laki-laki dan satu orang perempuan (bungsu) bernama Boki Masahaya. Pada suatu ketika, Boki Masahaya mandi di kali (sekitar tanjung Liboba) secara kebetulan para budak Raja Barbara melewati tanjung itu. Tanpa disadari, para budak itu kemudian menculik Boki Masahaya dan dibawa ke Tahani untuk menjadi isteri Raja Barbara. Mendengar peristiwa ini, orang tua Boki Masahaya (ayah dari lima bersaudara) yang dimaksud di atas, Tete Sekel langsung memburu perahu para budak Raja Barbara yang menculik anak gadisnya dengan jalan kaki. Namun upaya beliau gagal, karena setelah berjalan dari Maba sampai di Weda, perahu yang menculik anaknya sudah masuk ke Makian. Bukti sejarah, bekas kaki Tete Sekel setiap tempat (tanjung) yang dilewati hingga sekarang masih ada. Akhirnya, Tete Sekel kembali ke Maba dan berpesan kepada Raja Barbara (dalam bahasa Tahani), yang artinya: “Raja Barbara sudah berhasil mendapatkan anaknya, tetapi anak itu ada bahasanya. Karena itu, kembali untuk mengenal dan mengetahui bahasa yang dimaksud.”

Mendengar pesan itu, Raja Barbara dan isterinya Boki Masahaya pergi ke Maba menemui Ayah Boki Masahaya. Kemudian memanggil semua anaknya (lima bersaudara) untuk berkumpul dan membagi harta warisan, sebagai bekal kehidupan mereka kelak. Pesan (wasiat) kepada kelima anaknya bahwa, Boki Masahaya adalah

anak bungsu dan puteri satu-satunya maka semua ilmu yang dimiliki akan diwariskan kepadanya. Itu sebabnya, sejarah mencacat bahwa "ilmu apa saja terutama ilmu tentang peperangan" sesuai kondisi alam dan masyarakat ketika itu, berpusat di Tahani. Inilah yang dimaksud dengan "sejarah lima negeri" atau lebih dikenal dengan "asal mula orang Tahani," yang dalam kancah perkembangan Maluku Utara, di mulai dari daerah ini terutama Limau Dolik tertapi kemudian dimanipulasi.

Kelima negeri yang dimaksud adalah lima bersaudara sesuai pembagian masing-masing, yaitu anak pertama menetap dan menjadi penguasa di Maba, anak kedua menetap dan menjadi penguasa di Patani, anak ketiga menetap dan menjadi penguasa di Weda, anak keempat menetap dan menjadi penguasa di Gane, sedang anak kelima (satu-satunya perempuan) menjadi pewaris semua ilmu termasuk bahasa, yang kemudian lebih dikenal dengan bahasa Tahani. Namun sejarah mencatat bahwa, karena kelima negeri ini berasal dari satu kandungan dan jika terjadi perselisihan – tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, melainkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sekilas tentang asal mula orang Tahani dan Limau Dolik (Pulau Makian), seperti banyak disebut dalam Lagenda (*Hikayat Bacan*) secara singkat dikisahkan bahwa, pada zaman dahulu masyarakat Makian umumnya dan Limau Dolik (Tahani) khususnya hidup berpindah-pindah (meramba hutan) dari satu tempat ke tempat lain di bawah gunung Solimongo dan Kie Besi. Masyarakat ketika itu terdiri atas dua kelompok, dengan menempati lokasi yang berbeda. Kelompok yang satu dipimpin oleh Raja Barbara, berlokasi di sekitar hutan kaki gunung Solimongo (di atas Limau

Dolik). Kelompok yang lain berlokasi sekitar hutan Bailele sebelah barat Limau Dolik dengan jarak yang ditempuh kurang lebih 2 km.

Perkembangan kemudian, kedua kelompok ini sepakat untuk membangun sebuah kampung yang sekarang dikenal dengan Tahani. Ketika kedatangan Noh bin Djafar Sadik, terutama Raja Barbara menyatakan masuk Islam semua kelompok masyarakat ikut dan sepakat untuk membuat kampung yang semula bernama "Dayo Yorik," kemudian disebut "Daori." Ada beberapa makna tentang "Tahani" sesuai kondisi ketika itu. *Pertama*, "Tahani" terdiri dari dua kata, yaitu "Tahan" dan "I", ketika Noh bin Djafar Sadik tiba di Dolik dan tinggal bersama masyarakat setempat. Kemudian datang berbagai utusan dari kampung lain untuk mengambil beliau, tetapi oleh Raja Barbara bersama semua masyarakat melarang atau "menahan" sedangkan "I" yang dimaksud adalah Noh bin Djafar Sadik, sehingga disebut "Tahan-I" (Tahani) artinya "menahan Noh bin Djafar Sadik" untuk membina dan mengajarkan agama Islam hingga masyarakat benar-benar menguasai Islam. *Kedua*, Tahani mengandung makna "gudang dari berbagai ilmu terutama ilmu perang." Sejarah mencatat bahwa, di Tahani, lahir berbagai pemimpin termasuk panglima perang karena di tempat inilah (Limau Dolik) pemimpin empat kerajaan besar dilahirkan. Di samping itu, makna lain yang dapat ditarik adalah "tahan banting" dalam artian, sabar menghadapi berbagai pergolakan dan cobaan terutama berkaitan dengan proses penyebaran Islam.

Sumber lain (*YD/58 th*), menyebutkan bahwa sebenarnya Makian tidak hanya dikenal sebagai tempat pertama penyebaran agama Islam, tetpi juga tempat pertama tumbuh dan berkembangnya cengkeh di Maluku Utara hingga dikenal di seluruh

dunia. Ditegaskan bahwa sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa terutama Belanda, bandar perdagangan rempah-rempah khususnya cengkeh dan pala adalah Makian. Setelah masuk Belanda yang tidak saja monopoli perdagangan waktu itu, tetapi jung ingin memusnahkan cengkeh di bumi Maluku Utara terutama di Makian. Taktik ini dilakukan dengan mengganti cengkeh dengan kenari, oleh sebab itu kenari di Maluku Utara terbanyak bahkan hanya ada di Makian. Kalau pun ada di daerah lain, itu karena orang Makian yang membawa dan menanamnya. Banyak hal yang membuktikan Makian pada masa lalu adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji dan diangkat ke permukaan, khususnya Tahani dan Limau Dolik dalam perspektif ekonomi, politik, dan sosial budaya (khususnya agama) kurang tersentuh dalam catatan sejarah. Fenomena ini menarik karena orang Makian khususnya Tahani dalam banyak hal selalu tampil sebagai pemimpin, terutama pertentangan antara Ternate dan Tidore sepanjang sejarah Maluku Utara selalu mengambil peran penting, baik sebagai mediator mapun panglima (kapita) dalam penerangan.

Catatan sejarah yang ditulis oleh Prof. Robert Dick (tidak dipublikasikan) menyebutkan bahwa, sepanjang sejarah Maluku Utara terjadi lima kali peperangan yang dipimpin oleh kapita dari Tahani. *Pertama*, perang Lola (antar kerajaan lokal), diperkirakan akhir abad ke-13 dipimpin oleh Kapita Djabir. *Kedua*, perang Payahe (masih antar kerjaan lokal), diperkirakan awal abad ke-14 dipimpin Kapita Hidayat. *Ketiga*, perang Teluk Kao (perang melawan Spanyol) sekitar akhir abad ke-15 yang dipimpin oleh Kapita Hasan dan Husain (dua bersaudara). *Keempat*, perang Nuku (antara Ternate dan Tidore) dipimpin Kapita Kayyun (orang Tidore: Kujjum artinya

menucu). Di satu pihak, Nuku (Tidore) dapat dibantu atau bersekutu dengan Spanyol, kemudian Inggris. Pihak lain, Ternate bersekutu atau dibantu oleh Portugis, kemudian Belanda. *Kelima*, perang merebut ibukota (antara Ternate dan Jailolo), yang dipimpin oleh Kapita Ali Sangaji (secara lengkap akan dibahas pada bagian lain).

Demikian dapat disimpulkan bahwa, Maluku Utara dahulu dikenal lima negeri, jauh sebelum terbentuknya Moloku Kie Raha. Dari lima negeri ini kemudian berkembang menjadi satu kesatuan dalam bentuk kerajaan, sehingga disebut "Gam Raha" (kesatuan lima negeri atau daerah). Terlepas dari apa pun makna proses awal perkembangan kelima negeri tersebut, yang jelas menjadi cikal bakal perkembangan masyarakat Maluku Utara termasuk lahirnya empat kerajaan besar yang menghiasi percaturan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Maluku.

2. Maluku Utara Dalam Lagenda (Ceritera Rakyat)

Sejarah terbentuknya Maluku Utara banyak diwarnai oleh berbagai lagenda (ceritera rakyat), maupun mitos tentang kerajaan-kerajaan khususnya empat kerajaan besar (Moloku Kie Raha). Naidah, salah seorang klan Jiko yang menjabat sebagai Hukum Soasiu dari 1859-1864 dan penulis *Hikayat Ternate*, berceriteran tentang riwayat kelahiran raja-raja Maluku yang mirip lagenda Jaya Katwang di Jawa Timur. Naskah yaang ditulis dalam bahasa Ternate dan diterjemahkan oleh P. van der Crab ke dalam bahasa Belanda, kemudian diterbitkan pada 1878. Hikayat ini diberi judul oleh Crab: "*Geschiedenis van Ternate, in der Ternataanschen en Maleischen Teks, beschreven door der Ternataan Naidah, met Vertaling en aantekeringen doe*" Sejarah

Ternate, dalam Teks berbahasa Ternate dan Melayu, ditulis Naidah, seorang Ternate, dengan terjemahan dan catatan oleh P. van der Crab, sebagai berikut :

> *Syahdan, mendaratlah di Ternate seorang Arab bernama Jafar Sadek (terkadang disebut juga Jafar Nuh). Dia naik ke atas sebuah bukit bernama jere-jere dan membangun rumahnya di sana. Di kaki bukit itu terdapat sebuah danau kecil bernama Ake Santosa. Suatu petang, ketika hendak mandi, Jafar Sadek melihat tujuh bidadari sedang mandi di danau. Kemudian Jafar Sadek menyembunyikan salah satu sayap ketujuh bidadari itu. Setelah puas mandi, ketujuh bidadari bersiap-siap pulang, tetapi salah seorang diantaranya benama Nur Sifa, tidak dapat terbang pulang karena sayapnya hilang. Nur Sifa adalah puteri bungsu diantara ketujuh bidadari itu. Karena tidak punya sayap, Nur Sifa terpaksa tinggal di bumi dan kawin dengan Jafar Sadek.*
>
> *Dari perkawinan ini lahirlah tiga orang anak laki-laki, masing-masing diberi nama: anak pertama Buka, kedua Darajat, dan ketiga Sahajat. Pada suatu hari, ketika Nur Sifa memandikan si bungsu (Sahajat), ia melihat bayangan sayapnya yang terpantul di air mandi Sahajat. Ia melihat ke atas dan sayapnya tersisip di atap rumahnya, tempat di mana suaminya menyembunyikan. Ia lalu mengambil sayapnya dan mencoba terbang sebanyak tiga kali, tetapi setiap kali terbang, si bungsu selalu menangis. Kemudian Nur Sifa menampung air susunya pada sebuah gelas dan berpesan kepada si sulung (Buka) agar memberi minum adiknya bila menangis, dan memberitahukan ayahnya kalau pulang, bahwa ibunya telah kembali ke tempat asalnya. Kemudian Nur Sifa terbang tanpa mengindahkan tangisan Sahajat.*
>
> *Ketika Jafar Sadek tiba di rumah dan mendengar pemberitahuan Buka, ia pun menangis. Tangisan Jafar Sadek didengar seekor burung elang (bahasa Ternate: guheba) yang bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Setelah Jafar Sadek menceriterakan segalanya, burung itu lalu menawarkan jasa untuk menerbangkannya ke Kayangan dengan menaiki punggungnya. Sesampainya di Kayangan, Jafar Sadek bertemu ayah Nur Siifa dan berkata kepadanya: "Isteri saya, anak Anda". Penguasa langit itu lalu menghadirkan tujuh bidadari yang secara lahiriah mirip, baik wajah, postur tubuh maupun perawakannya. Jafar Sadek diminta menunjuk isterinya, salah seorang di antara ketujuh bidadari yang serupa itu, dengan syarat bila ia tidak dapat menunjuk secara tepat, ia harus mati. Ia boleh membawa pulang isterinya bila dapat menunjuk dengan tepat. Dalam keadaan bingun, datanglah seekor lalat besar berwarna hijau (Ternate: gufu sang) hinggap di pundaknya dan menawarkan jasa sambil meminta imbalan. Kepada lalat gufu sang, Jafar Sadek menjanjikan semua yang berbau busuk di muka bumi untuknya, dan gufu sang pun dapat menyetujinya dengan pesan: "perhatikan baik-baik, karena saya akan terbang mengelilingi semua bidadari itu, dan pada siapa aku hinggap, itulah isterimu". Gufu sang mengenal Nur Sifa*

dan bau badannya sebagai seorang yang tengah menyusui. Atas bantuan gufu sang, Jafar Sadek menunjuk dengan tepat isterinya, akhirnya Penguasa Langit menerimanya sebagai anggota keluarganya serta merestui perkawinannya.

Selama tinggal di Kayangan, Jafar Sadek dan Nur Sifa dikarunia seorang putera yang diberi nama Mashur Malamo. Setelah anak ini berusia satu tahun, mereka pamit hendak kembali ke bumi. Tetapi, setiap kali akan kembali, si kecil selalu menangis. Maka Penguasa Langit (Kayangan) itu berkata: "Pasti ia mau penutup kepalaku" (Ternate: kopiah). Ketika kopiah itu dikenakan di kepala si kecil (Mashur Malamo), ia pun diam. Maka kembalilah keluarga itu ke bumi, dan Mashur Malamo dengan kopiah yang dibawanya dari langit, pemberian kakeknya si Penguasa Kayangan.

Ketika Jafar Sadek dan Nur Sifa tiba di bumi, mereka bersua kembali dengan ketiga anaknya yang telah lama ditinggalkan. Nur Sifa memberi tanda-tanda tertentu sebagai tempat duduk keempat anaknya. Anak pertama Buka, diberinya sepotong buncak pohon (Ternate: age). Buka kemudian bertolak ke Makian dan menjadi cikal bakal Kerajaan Makian (Bacan). Anak kedua Darajat, mendapat tempat duduk sepotong kayu terapung (Ternate: ginoti). Ia bertolak ke Moti dan menjadi cikal bakal Kerajaan Moti (Jailolo). Anak ketiga Sahajat, memperoleh batu (Ternate: mari) sebagai tempat duduk. Sahajat pergi ke Tidore dan menjadi cikal bakal Kerajaan Tidore. Anak keempat Mashur malamo, memperoleh tempat duduk sebuah kursi dan menjadi cikal-bakal Kerajaan Ternate. Sementara kopiah pemberian kakeknya yang dibawa dari langit (Kayangan) menjadi mahkota Kerajaan Ternate (Amal, 2002).

Hikayat Bacan menuturkan mitos kelahiran empat kerajaan, agak berbeda dengan versi Naidah dalam Hikayat Ternate. Tokoh sentral dalam Hikayat Bacan masih tetap seorang Arab bernama Jafar Nuh atau Jafar Sadek. Hikayat Bacan tidak menyebut nama isterinya, demikian pula tujuh bidadari Kayangan seperti dituturkan Naidah. Jika Naidah menyebutkan jumlah anak Jafar Sadek sebanyak empat orang dan semuanya laki-laki, maka Hikayat Bacan menyebut lima orang; empat orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kisah kelahiran raja-raja pendiri kerajaan di Maluku Utara dalam versi Hikayat Bacan ialah sebagai berikut :

Di zaman dahulu kala; Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan adalah sambung-menyambung menjadi satu semenanjung dan semua bernama Gapi. Di

kawasan ini terdapat banyak negeri yang dikepalai masing-masing kepalanya dengan kekuasaannya sendiri-sendiri. Kepala tiap-tiap negeri itu bergelar Ambasoya. Karena itu, terdapatlah Ambasoya seperti Kasiruta, Sungebodol, Indapoat, Lata-lata, Supae, Mandioli, Topa, atau Ombi, Sungai Ra, Amasing, Salap dan Samboki. Ambasoya adalah bahasa Bacan, yang mempunyai arti Ngofamanyira atau Datu, yaitu Kimalaha atau Sangaji.

Syahdan, tiba di tanah Gapi seorang Arab bernama Nuh Ibnu Jafar Sadek. Ia memperoleh lima anak, empat laki-laki dan seorang perempuan, di atas bukit tanah Gapi. Ketika anak-anak itu dewasa, bapaknya berkata kepada mereka: "Aku berdoa memohon kepada Allah SWT supaya kamu dijadikan Raja Moloku di tanah yang berlain-lainan. Maka Jafar Sadek pun berdoa sesuai keinginannya itu. Tiba-tiba datang gelap-gulita, guntur dan kilat, angin ribut serta hujan lebat semalam suntuk hingga terbit fajar di pagi hari. Ketika pagi tiba, semenanjung dari Ternate sampai Bacan sudah terputus-putus dan berselang-seling menjadi pulau Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Maka tiap-tiap anak dari keempat anak laki-laki itu diberi tempat. Anak pertama, bernama Said Muhammad Bakir atau Said Husin, di atas gunung Makian dan bergelar Maharaja Yang Bertakhta Kerajaan Moloku Astana Bacan, Negeri Komolo Besi Limau Dolik. Anak kedua, menjadi Moloku Jailolo. Anak ketiga, menjadi Moloku Tidore. Anak keempat, menjadi Moloku Ternate. Anak kelima (perempuan) pergi ke tanah Gapi di Banggai dan bermukim di sana.

Senada dengan Hikayat Bacan di atas, menurut salah satu informan kunci (*AK/52 th*), menjelaskan bahwa Kerajaan Bacan yang bermula dari Pulau Makian dengan ibukotanya di Limau Dolik, di mana pada waktu itu sultan yang diangkat dan disyahkan seluruh masyarakat, yaitu putera pertama Noh bin Djafar Sadik bernama Muhammad Bakir sebagai sultan pertama di Makian. Kehidupannya sebagai raja di Makian tidak berlangsung lama, karena alasan di daerah ini kekurangan air; selain ancaman bencana alam gunung berapi (Kie Besi). Pada suatu ketika, sultan bersama isterinya pergi meninggalkan pulau Makian secara diam-diam atau menghilang tanpa diketahui masyarakat setempat, khususnya Limau Dolik – menuju ke selatan dengan tujuan Bacan, dan pulau pertama yang disinggahi adalah Kasiruta.

Kehadiran Muhammad Bakir (Said Husin) bersama permaisurinya (Boki), disambut gembira oleh masyarakat Kasiruta dan sekitarnya. Hal ini karena setelah sekian lama mereka mengidam-idamkan seorang pemimpin yang kharismatik dan berwibawa untuk membina mereka, kini di depan mata dengan kehadiran dua sosok manusia yang santun itu. Meskipun sebelumnya telah ada seorang pemimpin yang disebut "Ompu Datuk" (Datuk Singabodol), namun kehadiran Sultan Muhammad Bakir bersama isterinya seolah membawa berkah tersendiri bagi perkembangan dan masa depan yang diharapkan. Mulai saat itu, masyarakat Kasiruta bersama pemimpin yang dicintai bekerja keras membangun sebuah kerjaan baru, yang kemudian disebut "Kerajaan Bacan" pertama di Kasiruta dibawah pimpinan Sultan Muhammad Bakir, sebagai sultan (kolano) pertama dengan julukan "Kapas Lolo".

Menurut informan lain (*DK/68 th*), menjelaskan bahwa setelah Muhammad Bakir wafat, jabatan sultan (raja) dipegang oleh puteranya yang ketujuh, yaitu: Zainal Abidin (Tafakum Sambasulu), dengan gelar "Kaicili Bolotu." Kemudian meninggal dunia dan digantikan oleh puteranya "Bayanu Sirullah" sebagai sultan (raja) Kasiruta III. Kemudian putera Bayanu Sirullah yang bernama "Alauddin I", menggantikan ayahnya sebagai sultan (raja) Kasiruta IV.

Sultan Alauddin I kemudian pindah ke Pulau Sekki (Bacan). Karena itu, Alauddin I merupakan sultan (raja) Bacan pertama setelah pindah dari Kasiruta. Singkatnya, proses perjalanan (perkembangan) sultan Makian (Muhammad Bakir) yang bertolak dari Limau Dolik menuju ke Kasiruta, kemudian masuk ke pulau Sekki (Bacan) dan menetap di sana hingga sekarang. Keturunan selanjutnya, mulai dari

Sultan Alauddin I sampai sekarang diperkirakan sultan (raja) yang ke-19 atau ke-20 yang dijabat oleh Gahral Syah.

C. Asal Kata "Maluku" Hubungannya dengan "Cengkeh."

Asal kata "Maluku" yang sebenarnya hingga kini belum jelas, sehingga oleh berbagai versi memberi penjelasan berdasarkan interpretasi dan pemahaman masing-masing. Ada beberapa versi atau pendapat tentang Maluku muncul pada abad 20, antara lain: nama Maluku dari Kerajaan Moro yang telah lenyap (ucapan Pastor Neyms di Sostey Ternate tahun 1925). Kata Maluku diambil dari bahasa Ternate "Moi loku", artinya "satu genggam." Dengan demikian, secara formal asal kata Maluku hingga kini belum ada kesepakatan bersama (Hasan, 2001).

Berbicara tentang asal kata Maluku, tidak dapat dipisahkan dengan peran cengkeh, khususnya pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Seperti diketahui bahwa cengkeh sebagai salah satu bahan rempah-rempah yang membuat Maluku dikenal berbagai suku bangsa di dunia. Cengkeh pada awalnya berguna sebagai bumbu masak, ramuan obat-obatan, dan sarana pengawetan makanan pada musim dingin yang sangat dibutuhkan di Eropa. Karena itu, menjadi bahan komuditi utama dalam dunia perniagaan yang mendatangkan keuntungan yang berlimpah, sehingga mengundang perselisihan terutama sesama bangsa Eropa yang kemudian berwujud menjadi penjajahan.

Cengkeh dalam catatan sejarah diungkapkan oleh Antonio Pigafetta (1972), agar supaya "Tuan Yang Mulia" mengetahui di pulau mana tumbuh cengkeh itu, ialah

di lima pulau yaitu: Ternate, Tidore, Moti, Makian dan Bacan. Tidak dimana pun di dunia ini tumbuh cengkeh selain lima gunung di lima pulau ini. Kemudian Gabriel Robello, menegaskan bahwa cengkeh itu berasal dari Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Pada waktu itu perkebunan rempah-rempah di Maluku diperluas. Dalam hal ini, cengkeh mempunyai beberapa nama sesuai bahasa setempat. Di Ternate, pada awalnya cengkeh disebut "gaumedi," di Tidore "gomode," di Makian Luar "ada," di Makian Dalam "odai," di Malaka "chianche," dan di Saranghani "bunga lawan." Dengan demikian, Maluku dan cengkeh keduanya menjadi satu rangkaian nama yang memiliki suatu pengertian. Maluku itu tempatnya, sedangkan cengkeh itu rempah-rempahnya. Bila orang menyebut "Moloku" berarti "tempat cengkeh" dan bila orang mencari cengkeh, "Maluku-lah tempatnya."

Demikian dapat dikatakan bahwa, tampa cengkeh Maluku tidak dikenal. Dengan adanya cengkeh, Maluku dikenal dan didatangi berbagai suku bangsa di dunia sehingga menjadi pusat perniagaan rempah-rempah. Kedatangan berbagai suku bangsa ke kepulauan penghasil cengkeh ini, dengan beragam adat dan budaya yang berbeda. Karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk hidup bersama maka lahir tata kehidupan bernegara yang berbentuk kerajaan. Kemudian lahir empat kerajaan di empat pulau cengkeh, yaitu: Ternate, Tidore, Moti dan Makian. Keempat kerajaan ini berkembang dengan gemilang berkat cengkeh. Kata "Moloku" berasal dari kekuasaan yang gemilang dari empat kerajaan ini. Kata "gunung" kemudian diartikan kerajaan. Pengertian yang sebenarnya dari asal kata "Moloku Kie Raha" adalah "empat gunung tempat asal cengkeh," dialih-artikan menjadi "Kekuasaan Empat Kerajaan."

Singkatnya, sejak abad keenam “Maluku” telah dikenal di Tiongkok dengan sebutan “Mi-li-ku” yang berarti “Negeri Asal Tanaman Rempah.” Lahirnya empat kerajaan di empat gunung pada abad ke-13, kata “Moloku” beralih menjadi “Maluku” yang berarti “raja” (Penguasa) dan kata “kie” berarti “gunung” atau “kerajaan.” Perkembangan selanjutnya, cengkeh yang melahirkan empat kerajaan tersebut hanya sebagai simbol terutama dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda), ingin menguasai Moloku Kie Raha dengan memusnahkan cengkeh. Taktik memusnahkan cengkeh dan menguasai kerajaan Moloku Kie Raha, adalah untuk mempertahankan kedudukannya di Nusantara terutama di Maluku. Kondisi inilah yang mengesankan bahwa “Moloku” dari kata “Mamluk”, yang berarti penguasa (raja). Dengan demikian, istilah “Moloku Kie Raha” memiliki pengertian sesungguhnya adalah “empat gunung Tempatnya cengkeh” atau “empat pulau asal cengkeh”, yaitu: Makian, Moti, Tidore, dan Ternate.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulan bahwa, nama “Maluku” dapat ditinjau dari 3 (tiga) pengertian, yaitu: (1) Maluku ditinjau dari sudut sejarah; (2) Maluku ditinjau dari perdagangan dan pelayaran; dan (3) Maluku ditinjau dari sudut administrasi dan pemerintahan. Untuk pengertian pertama, yang dimaksud dengan Maluku pada zaman bahari hanya terbatas pada pulau-pulau di kawasan utara Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Makian, Moti, dan Bacan. Antonio Galvao, yang pernah menjabat Gubernur Portugis ke-7 di Maluku antara 1536-1540, menulis dalam *Historia das Moluccas*, mengatakan bahwa … Nama sebenarnya kepulauan Maluku terbatas pada pulau-pulau yang berada di bawah pemerintahan dan raja-raja Maluku,

lebih khusus lagi ialah: Ternate, Tidore, Moti, Makian, Kayoa, Bacan, Labuha, yang sebenarnya bernama: Gapi, Duko, Moti, Makian (Mara), Maligo, Seki, dan Kasiruta.

Hal senada juga diungkapkan oleh P.H. van der Kemp, bahwa Maluku yang sebenarnya meliputi Ternate, Tidore, Bacan dan Halmahera (Jailolo). Pendapat serupa juga dikemukakan Naidah, penulis *Hikayat Ternate*, "Maluku artinya Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan." Menurutnya, hal ini disebabkan "Moloku Kie Raha, ma asal rimoi bato, ma-kabasaran se ma-istiadat rimoi bato", artinya "Empat Gunung Maluku, sesungguhnya punya satu asal-usul, punya kemegahan dan budaya yang sama." Dalam pengertian kedua, yakni Maluku ditinjau dari sudut perdagangan dan pelayaran; yang menjadi rujukan adalah Traktat London 1824 – perjanjian bilateral antara Inggris dan Belanda – berikut pertukaran nota diantara kedua kerajaan Eropa ini berkenaan dengan traktat tersebut. Menurut Traktat London, yang termasuk daerah Maluku untuk pelayaran dan perdagangan meliputi: Sulawesi di belahan barat, Papua di belahan timur, Timor di belahan selatan, dan Kalimantar di belahan utara, termasuk pulau-pulau yang ada di dalamnya (Amal, 2002).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dalam rumpun bahasa daerah Maluku Utara, seperti bahasa Galela, dikenal adanya kata "luku" yang sering diberi awalan "ma". Dalam bahasa Halmahera Utara itu, kata "luku" berarti "dalam", dengan menambah preposisi "ma" kepada kata "luku", menjadi "maluku" bermakna "dalam sekali". Dalam bahasa Tobelo, ada juga kata "loko", tetapi dengan makna yang sama dengan kata serupa dalam bahasa Ternate yang berarti "gunung" atau "batu cadas." Apakah

kata-kata dari bahasa daerah ini menunjuk kepada asal-usul nama “Maluku”, inilah merupakan pertanyaan yang jawabannya hingga sekarang tidak dapat dipastikan.

Suatu konstruk pendapat yang dibangun tentang asal-usul nama “Maluku” mengembalikan kata ini ke ungkapan “loko” yang berarti “gunung.” Hal ini seperti diuraikan di atas, dikenal dalam bahasa-bahasa daerah di Maluku Utara. Ungkapan “Ternate maloko” bermakna “Ternate makie” atau “gunung Ternate.” Dari ungkapan ini muncul kata bersayap: “Ternate se Tidore, Moti se Mara maloko kie raha”, antinya: “Ternate dan Tidore, Moti dan Makian, dunia dari empat gunung.” Makna lain dengan mengutip pendapat salah satu informan (*YA/67 th*), yang diketagorikan sebagai “elite agama” juga Budayawan, dalam wawancara (20/11/06), menjelaskan bahwa: “Maluku” terbentuk dari kata “moloku” yang dalam bahasa Ternate bermakna “menggenggam atau menyatukan.”

Hal ini berkaitan erat dengan konfederasi empat kerajaan Moloku, dengan motto persatuan, yaitu *moi-moi i moloku* (semua dalam satu kesatuan/genggaman). Namun pendapat ini sulit diterima berdasarkan beberapa alasan. *Pertama*, kata “loku” bukan berasal dari bahasa Ternate, tetapi dari bahasa Melayu pasaran, yang juga digunakan di Ambon dan Manado. “Loku” memiliki banyak arti: Misalnya, dalam ungkapan “beras satu loku” (satu genggam beras), kata ini juga menunjuk kepada takaran. Selain itu, kata “loku” juga bermakna “mengangkat” seperti ungkapan “loku samua” (angkat semua). Dengan demikian, “loku” memiliki makna yang beragam dalam bahasa Melayu pasaran. Karena itu, kata ini tidak identik dengan *Konfederasi Moti*, sebagai istilah ketatanegaraan. *Kedua*, sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan di

Maluku Utara, belum pernah terbentuk suatu konfederasi. Sultan Khairun (Ternate) pernah menginginkan berkonfederasi dengan Jailolo di bawah kepemimpinannya. Demikian pula, Sultan Nuku (Tidore) pernah mencita-citakan suatu konfederasi antara Tidore dan Jailolo, dan karena itu ia menghidupan kembali kerajaan Jailolo – yang telah dianeksasi secara total oleh Ternate di bawah Sultan Mandarsyah (1636), dan mengangkat Ssangaji Tahani sebagai Sultan Jailolo.

Setelah berabad-abad hubungan antara negeri asal cengkeh dengan beberapa suku bangsa terutama Cina dan Arab, datang orang-orang Portugis. Pengetahuan orang-orang Portugis tentang negeri asal rempah-rempah diperoleh dari cerita dan tulisan yang datang ke Lusitania (para perantau) yang mengisahkan pengalaman mereka. Dari cerita dan pengalaman inilah yang mendorong orang Portugis berupaya mencari jalan pelayaran menuju ke pulau asal rempah-rempah terutama cengkeh. Pada 1512, Portugis dibawah pimpinan Antonio Abrew dan Francisco Serrao tiba di Banda dan Hitu. Hal ini terdengar oleh Kolano Ternate, Bayan Sirullah, dengan segera mengutus adiknya, Kaicil Darwis ke Hitu untuk mengundang orang Portugis itu ke Ternate. Dengan ditemukan jalan pelayaran menuju ke kepulauan rempah-rempah, Moloku Kie Raha didatangi berbagai suku bangsa termasuk Spanyol yang tiba di Tidore tahun 1521 (Paramita, 1980).

Pelayaran perniagaan rempah-rempah mulai marak terjadi pada abab ke-7 Masehi, saat kepulauan rempah-rempah telah disebut di Cina dengan nama “Mi-li-ku” (Negeri asal tanaman rempah). Dalam dokumen Portugis dan Spanyol oleh orang Cina, menyebut wilayah ini dengan nama “Batu China de Moro” yang artinya “Batu

atau kepulauan milik orang Cina". Perniagaan rempah-rempah terutama cengkeh, bagi orang Cina pada abad-abad ini telah menjadi idola. Dengan demikian, upaya pelayaran (mencari jalan) ke kepulauan rempah-rempah telah dilakukan oleh orang Cina jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa. Karena itu, sangat mungkin merekalah orang pertama (bangsa Cina) yang menemukan jalan ke kepulauan ini sehingga mengklain kepulauan ini adalah miliknya.

Hasan (2001), menyebutkan bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi, telah ada hubungan dagang antara Indonesia dan Cina dalam perniagaan rempah-rempah. Dengan demikian, hubungan pelayaran ke Indonesia dan ke kepulauan rempah-rempah (Maluku Utara) telah ada sejak abad ini. Pelayaran perniagaan rempah-rempah mulai marak terjadi pada abad ketujuh sebelum Masehi, saat kepulauan rempah-rempah telah disebut di Cina dengan nama: Mi-li-ku, yang berarti; "Negeri asal tanaman rempah-rempah." Kemudian, wilayah ini dalam dokumen Spanyol dan Portugis oleh orang Cina dinamakan: *Batu Cina de Maro*, artinya; "Batu atau kepulauan milik orang Cina."

Menurut catatan sejarah tentang perniagaan, cengkeh pada abad-abad silam merupakan bahan perniagaan utama yang mempengaruhi dunia pedagangan saat itu, karena mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Dengan kata lain, cengkeh mendorong peniaga dan pelaut untuk menemukan pulau penghasil rempah-rempah terutama cengkeh. Walaupun pada era kegelapan saat itu terselubung pengetahuan tentang pelayaran, namun upaya manusia untuk menorobos tirai kegelapan yang mendahului pengetahuan terus berlanjut. Penemuan kompas oleh orang Cina, telah

memberikan jalan pengetahuan tentang kelautan, hingga menjadi kepastian bahwa orang Cina-lah yang pertama-tama menjajaki kepulauan rempah-rempah, kemudian menyusul suku bangsa lain (terutama Eropa), dengan tujuan yang sama.

Penggunaan cengkeh oleh bangsa Cina sebelum abad ke-7 merupakan bukti bahwa kepulauan ini telah dikenal oleh mereka, kemudian menyusul suku bangsa lain dengan berbagai upaya untuk mencapai bandar cengkeh. Berlomba-lomba: Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berusaha menguasai bandar perniagaan cengkeh, telah mengangkat negeri ini ke perkembangan ekonomi dunia dan membawanya ke percaturan politik antara bangsa dan kerajaan setempat. Rempah-rempah, terutama cengkeh merupakan sokoguru perekonomian bagi Kerajaan Moloku Kie Raha, terutama Ternate. Perkembangan perekonomian melalui perniagaan cengkeh sebagai bahan ekspor yang sangat dibutuhkan di pasar dunia, membuat negeri ini dikunjungi berbagai suku bangsa pelaut dan pedagang serta bermacam-macam barang dagangan yang masuk, seperti: sutra, perselin, keramik, senjata, dan bahan makanan sehingga negeri ini semakin makmur, serta kerajaan semakin berjaya.

Menyimak berbagai versi atau pendapat di atas, penulis cenderung pada pandangan yang lebih logis tentang asal kata “Maluku.” Dalam hal ini, kata Maluku berasal dari bahasa Arab “malik” yang berarti “raja.” Para saudagar Arab menyebut deretan pulau-pulau di bagian utara Maluku sebagai “jazirah al mamluk” (kepulauan atau negeri raja-raja), yang menunjuk kepada empat kerajaan di zaman bahari yang sangat berpengaruh secara politis dan ketatanegaraan dalam wilayah empat kerajaan, yaitu Makian (Bacan), Moti (Jailolo), Tidore, dan Ternate.

C. Proses Lahirnya "Moloku Kie Raha"

Berbicara tentang empat kerajaan besar (Moloku Kie Raha) yang mewarnai konstalasi politik, ekonomi, dan sosial budaya bahkan agama di Maluku Utara, sesungguhnya lahir di Makian, kemudian tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan ruang dan waktu hingga mencapai masa-masa kejayaan, pasang surut, silih berganti, kemudian tumbuh kembali mencari identitas dan jati dirinya, terutama dalam hubungan dengan proses Islamisasi dan perniagaan rempah-rempah yang telah membesarkan empat kerajaan tersebut di Maluku.

Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber (informan kunci), dokumen-dokumen dan literatur tertulis, jelaslah bahwa Maluku Utara pada zaman dahulu hanya terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Gapi dan Halmahera. Hal ini sesuai penjelasan dari salah seorang informan kunci (*DK/68 th*), menegaskan bahwa Pulau Gapi yang induknya di Makian, suatu ketika Noh bin Djafar Sadik (penyebar agama Islam pertama) di Maluku Utara bermunajat (berdo'a) seraya memohon petunjuk kepada Allah SWT tentang nasib (pekerjaan dan tempat) anak-anaknya kelak. Tiba-tiba datang angin topan dan badai yang sangat dahsyat semalam suntuk menggoncang Pulau Gapi, dengan kebesaran Allah SWT sesuai munajat yang dipanjatkan, di pagi hari saat terbit fajar Pulau Gapi sudah terbagi pulau-pulau yang berjejer dari utara ke selatan, mulai dari Makian sebagai induk, kemudian Moti, Tidore dan beberapa kecil,

Ternate yang merupakan ujung dari Pulau Gapi, kemudian Obi, Bacan (relatif besar) dan pulau-pulau disekitarnya, Sanana, Taliabu, kepulauan Sula, dan lain-lain.

Pulau Ternate semula disebut “jore-jore” artinya “ujung,” karena terletak di bagian ujung Pulau Gapi berbatasan dengan Pulau Halmahera bagian barat. Dengan terbagainya Pulau Gapi yang berinduk di Makian ke dalam pulau-pulau sedang dan kecil sebagaimana disebutkan di atas, maka sejak itulah (tidak diketahui pasti) diperkirakan pertengahan sampai akhir abad ke-12 lahir empat kerjaan yang meliputi: Makian, Moti, Tidore, dan Ternate, dengan sultan (raja) seperti telah disebutkan, yaitu: Muhammad Bakir (anak pertama) menjadi Sultan Makian, Muhammad Takis (anak kedua) menjadi Sultahn Moti, Muhammad Takir (anak ketiga) menjadi Sultan Tidore, Boki Tunjung (anak keempat dan satu-satunya perempuan), menjadi cikal bakal mendirikan kerajaan di pesisir pantai Sulawesi bagian timur (Luwuk Banggai dan Buton), serta Muhammad Nafis (anak kelima) menjadi Sultan Ternate.

Hikayat Bacan (tidak diketahui pasti), diperkirakan sekitar akhir abad ke-12 atas prakarsa Noh bin Djafar Sadik bersama empat sultan dan seluruh masyarakat Pulau Makian, khususnya Limau Dolik sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan pertama, yang kemudian dikenal dengan “Pertemuan atau *Konfederasi* Dolik.” Inti dari pertemuan ini adalah, membangun sebuah kampung di dekat kaki gunung Solimongo (Pulau Makian), tepatnya di atas ketinggian Limau Dolik – kemudian diberi nama “Kie” artinya negeri atau kampung. Inilai negeri atau kampung pertama yang dibangun Noh bin Djafar Sadik bersama keempat suttan yang telah diangkat secara musyawarah mufakat masyarakat di wilayah masing-masing, Muhammad

Bakir (Sultan Makian), Muhammad Takis (Sultan Moti), Muhammad Takir (Sultan Tidore), dan Muhammad Nafis (Sultan Ternate).

Dinamika perkembangan dan perubahan di berbagai aspek kehidupan yang terkesan lamban tapi pasti, kata “Kie” dialih-artikan menjadi “Pulau” atau “Gunung,” seperti yang dipahami sebagian masyarakat Maluku Utara hingga sekarang. Atas dasar inilah, kata “Kie,” kemudian berkembang menjadi “Kie Besi,” yang merupakan nama kerajaan (gunung) Makian sehingga kerajaan ini sering pula disebut “Kerajaan Kie Besi.” Di samping itu, Dolik sebagai kampung atau tempat pertama tiba Noh bin Djafar Sadik, setelah pertemuan pertama empat sultan dengan membangun sebuah kampung atau negeri di kaki gunung Solimongo, kata “Dolik” ditambah “Limau” menjadi “Limau Dolik” yang dikenal hingga sekarang.

Pertemuan pertama empat sultan bersama masyarakat dan Noh bin Djafar Sadik di Limau Dolik (Makian), pada intinya adalah untuk membangun sebuah negeri (kampung) sebagai pusat pertemuan empat sultan dalam rangka mengatur strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, kampung atau negeri pertama yang dibangun di Makian lebih dimaksudkan, untuk menjalin ukhuwah islamiah dalam membina dan mengembangkan masyarakat secara islami di wilayah masing-masing. Demikian makna “Kie” yang sesungguhnya, adalah menjaga persatuan dan perdamaian di Maluku Utara.

Seiring dengan perjalanan waktu yang diwarnai dengan berbagai pergolakan dan pemberontakan yang terus berlangsung di wilayah empat kesultanan, baik secara

internal maupun eksternal terutama ambisi Ternate dalam merebut hegemoni untuk menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di jazirah Maluku. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Portugis yang ketika itu telah berada di Maluku, terutama Ternate yang sedang bergolak dengan beberapa kerajaan kecil (Loloda dan Moro) di wilayah Halmahera Utara yang telah dikuasai kesultanan Jailolo. Menghadapi kondisi empat kesultanan yang semakin tidak menentu, di mana Ternate dengan ambisinya telah menghianati kesepakatan pertama Limau Dolik, yaitu "menjaga persatuan dan perdamaian." Atas dasar inilah kemudian empat kesultanan menyelenggarakan pertemuan kedua di Pulau Moti (tidak diketahui pasti) diperkirakan sekitar akhir abad ke-13, kemudian lebih dikenal dengan "Konfederasi Moti."

Pertemuan kedua empat sultan di Pulau Moti merupakan prakarsa bersama, untuk memperkokoh persatuan dan perdamaian yang mulai goyah dan terancama akibat pengaruh dari luar terutama bangsa-bangsa asing. Menurut salah satu informan (*DK/68 th*), pertemuan (*konfederasi*) Moti adalah atas prakarsa Kesultanan Makian sebagai induk dari empat kerajaan. Tujuan utama pertemuan ini untuk menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan pertama di Limau Dolik, kemudian melahirkan istilah "Moloku Kie Raha" yang dikenal hingga sekarang.

Di samping itu, kesepakatan keempat sultan bahwa pusat pertemuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategis tetap di Makian, dan apabila dalam keadaan darurat keempat sultan tidak dapat bertemu di Makian, maka keputusan Sultan Makian sebagai induk (pusat) empat kerajaan akan diterima dan dihormati ketiga sultan lain sebagai keputusan bersama. Karena itu, istilah "Moloku Kie Raha"

ditambah “Masurabi Kie Mara,” artinya: empat kerajaan berpusat “surabi” di Makian. Namun, kata “Masurabi Kie Mara” belakangan dihilangkan karena alasan politis. Selain itu, keempat sultan dapat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang yang saling menguntungkan dan menghormati hak masing-masing, serta yang terpenting adalah kerjasama dalam menentang segala bentuk agresi, monopoli dan dominasi perdagangan rempah-rempah oleh bangsa-bangsa Eropa.

1. Kerajaan-kerajaan Maluku Utara

Di samping empat kerajaan besar (Moloku Kie Raha), sejarah menunjukkan bahwa di Maluku Utara terdapat beberapa kerajaan kecil selain empat kerajaan besar di atas, antara lain: Kerajaan Loloda, Kerajaan Moro, dan Kerajaan Obi. Kerajaan-kerajaan tersebut, dalam perjalanan sejarah Maluku Utara terbatas pengaruhnya dan tidak begitu signifikan, sehingga kurang mendapat tempat dalam catatan sejarah. Karena itu, tulisan ini mencoba mengangkat garis besar eksistensi ketiga kerajaan tersebut dalam perkembangan masyarakat Maluku Utara. Berdasarkan fakta sejarah menunjukkan bahwa eksistensi ketiga kerajaan kecil (Loloda, Moro dan Obi) lebih awal dari empat kerajaan besar lain di Maluku Utara.

a. Kerajaan Jailolo

Deretan perkembangan Maluku Utara yang dihiasi dengan jatuh bangunnya beberapa kerajaan besar maupun kecil. Para sejarawan, menyebutkan bahwa “Jailolo” adalah kerajaan tertua di Maluku Utara. Kerajaan ini timbul dari sebuah kampung dengan nama yang sama, kemudian berkembang hingga menguasai hampir seluruh

pulau Halmahera. Kapan terbentuk atau lahirnya kerajaan ini, tidak begitu jelas. Menurut Paramita (1980), mengatakan bahwa pada masa paling awal ada seorang kolano yang berkuasa di Loloda, Halmahera Utara. Tetapi, kolano ini kehilangan kekuasaannya dengan tampilnya Kolano Jailolo pertama, yang berwibawa namun tiran. Kemungkinan besar Kolano Jailolo pertama ini adalah seorang wanita, karena sejarah menyebutkan bahwa ia kemudian menikah dengan Kolano Loloda. Namun, perkawinan ini bersifat politis, dengan tujuan untuk memperluas wilayah Jailolo.

Setelah Ratu Jailolo yang tiran itu wafat, Loloda mampu melepas diri dari kekuasaan Jailolo. Ketika berlangsung pertemuan Moti pada abad ke-14, Raja Loloda berikhtiar untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi terhalang oleh anging ribut, sehingga mendarat di Dufa-dufa, Ternate. Karena memerintah dengan tangan besi, terjadi perlawanan dan pemberontakan terhadap Kolano Jailolo, yang diikuti dengan eksodus para pemberontak politik ke pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera, yaitu Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Di pulau-pulau kecil inilah para pemberontak Jailolo mendirikan kerajaan-kerajaan yang pada gilirannya meronrong dan bahkan mengakhiri eksistensi Kerajaan Jailolo (Amal, 2002).

Sumber lain menyebutkan bahwa, ketika Jailolo terbentuk sebagai kerajaan, wilayahnya belum mencakup Halmahera Utara bagian barat karena di sana terdapat Kerajaan Loloda. Selain itu, di bagian utara Halmahera juga terdapat kerajaan Moro, yang pada masa perkembangan berikut menjadi sasaran perluasan Kerajaan Jailolo di bawah Kolano Kartabumi pada abad ke-16. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan kunci (tokoh agama dan budayawan), dalam wawancara (20/11/05),

secara rinci dan panjang lebar menjelaskan bahwa: Suatu ketika (tidak diketahui pasti; diperkirakan pertengahan abad ke-13), Kerajaan Jailolo pernah dibawah kekuasaan seorang asing bernama Syarif yang datang dari Mekkah, yaitu adik dari Sultan Mendanao (Philipina Selatan) dan Sultan Borneo (tidak diketahui pasti kapan berkuasa). Setelah berdirinya Kerajaan Ternate tahun 1275, eksistensi kerajaan Jailolo mulai terancam. Ancaman tersebut dimulai ketika Ternate dibawah Kolano Siele (1284-1298), menyerang Jailolo dan menduduki beberapa desa. Kemudian tahun 1304, Kaicil Ngara Malamo menyerang kembali Jailolo dan menduduki beberapa desa lainnya (YA/76).

Ambisi Ternate untuk menyerang Jailolo semakin meningkat, ketika Kolano Tulu Malamo berkuasa tahun 1343, setelah membatalkan persekutuan Moti secara unilateral kemudian menyerang Jailolo untuk ketiga kalinya. Penyerangan ketiga ini lebih didorong oleh hasratnya untuk merebut peringkat dalam rangking kerajaan-kerajaan di Maluku berdasarkan perjanjian Moti. Dalam perjanjian Moti, Jailolo ditetapkan menduduki peringkat pertama dalam urutan empat kerajaan besar di Maluku. Setelah penyerangan itu, menuntut Jailolo melepaskan peringkat pertamanya dan menyerahkan kepada Ternate. Penyerbuan dan ambisi Ternate ini mendapat reaksi keras dari Tidore dan Bacan.

Ternate kembali menyerang dan menduduki Jailolo untuk keempat kalinya tahun 1359, di masa kekuasaan Kolano Marhum. Ternate berhasil menanamkan pengaruhnya, ketika terjadi perang suksesi di kalangan keturunan bangsawan Jailolo. Jamilu, salah satu pangeran Jailolo kepercayaan Ternate – memenangkan suksesi ini.

Tetapi, Jamilu tidak menduduki takhta Jailolo, karena diangkat oleh Marhum sebagai Raja Muda di Ambon (Paramita, 1980).

Antara 1521-1550, Jailolo bersekutu dengan Tidore dan Spanyol melawan Ternate dan Bacan yang bersekutu dengan Portugis. Pada masa ini, Kolano Jailolo berupaya membina persekutuan dengan orang-orang Tobaru untuk memperoleh tambahan tenaga perang. Persekutuan-persekutuan yang digalang Jailolo ini terbukti sangat bermanfaat dalam mempertahankan eksistensinya dari-dari serbuan-serbuan Ternate. Tahun 1527, serangan Ternate terhadap Jailolo kembali terjadi untuk kelima kalinya, dibawah pimpinan Taruwese (Raja Muda atau Wakil Sultan Ternate) tetapi tidak berhasil, karena dipukul mundur oleh Jailolo. Dengan bantuan Portugis, Ternate kembali menyerang Jailolo untuk keenam kalinya dan berhasil mendudukinya, tetapi pendudukan ini tidak berlangsung lama.

Tahun 1529, Kartabumi (ketika itu belum menjadi Sultan Jailolo) mulai mengorganisir rakyat Jailolo dan dengan bantuan Tidore, berhasil mengusir Ternate dari wilayah Kerajaan Jailolo dari desa-desa yang dikuasai Ternate sejak masa Siele. Untuk sementara, Jailolo bebas dari kekuasaan Ternate. Setelah berhasil mengusir Ternate dan Portugis, pada tahun yang sama (1529) Katarabumi mulai mengganggu misionaris Portugis di Morotai dan Morotia. Pasukannya mengepung Tolo, Rao, Sakita, dan Cio selama beberapa waktu. Akibat ganggung ini, Ternate kembali menyerang Jailolo dengan bantuan Portugis. Ibukota Jailolo berhasil diduduki, tetapi wilayah lainnya masih tetap berada di bawah kekuasaan Katarabumi.

Ketika Sultan Khairun bertakhta di Ternate (1536), memberikan legitimasi kepada Katarabumi. Karena itu, kedua kesultanan ini dapat bekerjasama dengan baik di masa pemerintahan Khairun. Katarabumi sangat mendukung kebijakan Khairun yang tegas terhadap Portugis. Karena itu, ketika empat kerajaan besar ini bersepakat untuk menghentikan lajunya evangelisasi di Morotai dan Morotia (1547) pelaksanaan tugas operasional militer dipegang oleh Jailolo atas permintaan Katarabumi sendiri. Jailolo kemudian mengerahkan sejumlah besar pasukannya untuk menggempur kerajaan kecil di Halmahera Utara tersebut.

Kejayaan Jailolo tidak berlangsung lama, terutama setelah wafatnya Kolano Jailolo (Katarabumi) dan Sultan Ternate (Khairun). Tahun 1600, Ternate di bawah kekuasaan Sultan Saidi menyerbu kembali Jailolo dan mendudukinya dengan bantuan Portugis. Kolano Jailolo, Saubo (pengganti Katarabumi) terpaksa melarikan diri. Tahun 1611, Spanyol menyerbu dan menduduki Jailolo. Ketika itu, Ternate tengah menggalang persekutuan dengan Belanda. Raja Jailolo diboyong ke Ternate dan sejak saat ia tidak pernah lagi bertakhta di kerajaannya. Setelah Spanyol meninggalkan Jailolo (1620), Ternate menjadikan Jailolo sebagai kerajaan *vazal*-nya. Raja Jailolo terakhir (Kaicil Alam), tetap ditempatkan di Ternate (bukan di ibukota kerajaannya). Ia dipandang sebagai anggota keluarga Kesultanan Ternate dan dinikahkan dengan Puteri Boki Gamalama (adik Sultan Sibori Amsterdam dari Ternate), pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Kaicil Alam wafat tahun 1684, sejak saat itu Jailolo hanya menjadi sebuah distrik di bawah otoritas Ternate. Kepala distrik Jailolo dipegang oleh seorang sangaji. Tahun 1858, kepala distrik Jailolo bergelar *Fonyira*.

Sejak wafatnya Katarabumi, Kerajaan Jailolo memang tidak pernah lagi memiliki pemimpin sekaliber dia. Karena itu, kerajaan ini mulai tenggelam untuk kemudian menghilang seiring dengan wafatnya Kaicil Alam (1684). Sultan Saifuddin dari Tidore, memandang penting menghadirkan kembali eksistensi Kerajaan Jailolo dalam peta kekuatan politik di Maluku. Tanpa Jailolo Moloku Kie Raha tidak memiliki kekuatan dan tidak bermakna. Ketika bertemu dengan Gubernur Kompeni untuk wilayah Maluku, Saifuddin mengungkapkan bahwa di masa lalu Maluku terdiri atas empat kerajaan, bukan tiga. Karena itu, Saifuddin mengusulkan agar Kaicil Alam dikembalikan ke posisinya sebagai Raja Jailolo. Sebab Jailolo merupakan salah satu pilar yang menegakkan Maluku. Menurutnya, perdamaian dan keamanan Maluku dapat terjamin dan langgeng apabila didukung oleh empat kerajaan (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo). Dengan saling menghormati hak-hak setiap kerajaan, perdamaian dapat diwujudkan di Maluku (Lairissa, 1996).

b. Kerajaan Ternate

Terjadinya eksodus besar-besaran orang Halmahera ke berbagai pulau di bagian barat Halmahera, seperti pulau Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan lain-lain karena akibat pertikaian politik. Orang-orang yang mendarat di Ternate kemudian mendirikan pemukiman di dekat puncak gunung Gamalama. Pemukiman pertama ini diberina nama Tobona. Pilihan pemukiman dekat puncak gunung dimaksudkan untuk menghilangkan jejak dari pengejaran penguasa Jailolo. Ketika itu, Gamalama adalah

gunung berapi yang aktif (belum pernah meletus). Menurut para pemukim bahwa, dengan menetap di ketinggian seperti itu, mereka akan menjadi sehat dan kuat.

Komunitas Tobona dikepalai oleh seorang pimpinan yang disebut *momole*, dan inilah awal mula masa kekuasaan *momole* di Ternate. Momole yang mengepalai pemukiman Tobona bernama Guna. Karena para pelarian politik terus berimigrasi ke Ternate, terbentuklah pemukiman-pemukiman baru, masing-masing Foramadiahi (sekitar 1254) yang dipimpin Momole Molematiti, kemudian Sampala yang dipimpin Momole Ciko, dan Gamlamo yang tidak diketahui siapa momolenya. Berbeda dengan Tobona, tiga pemukiman terakhir dibangun dekat laut (di pesisir pantai). Jarak antara satu pemukiman dengan pemukiman lainnya cukup jauh, sehingga komunikasi di antara kampung-kampung tersebut relatif sulit dan kurang lancar. Kondisi ini berjalan bertahun-tahun. Pada 1257 komunitas Tobona sebagai komunitas pelopor, mengambil prakarsa mengadakan suatu musyawarah (tidak jelas di mana musyawarah itu diselenggarakan). Kemungkinan pertama musyawarah itu dilaksanakan di Tobona, karena komunitas kampung ini yang memprakarsai. Sedang kemungkinan kedua, musyawarah itu dilakukan di Sampala, mengingat Momole Sampala yang kemudian terpilih sebagai pemimpin seluruh komunitas yang ada.

Terlepas dari lokasi penyelenggaraan musyawarah, yang terpenting adalah putusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut, yaitu pengangkatan Ciko (Momole Sampala) sebagai pimpinan komunitas-komunitas yang ada di Ternate, yang kemudian lahirlah Kerajaan Ternate dengan Ciko sebagai raja pertama. Setelah menjadi Raja Ternate, Ciko mengubah namanya menjadi Kaicil Mashur Malamo, dan

gelar momole diganti dengan kolano, yang berarti “raja.” Peristiwa ini mengawali masa Kerajaan Ternate, dengan ibukota ditetapkan Sampala dan Ciko berkuasa hingga 1272. Setelah Kaicil Mashur Malamo berkuasa (1257-1272), Kerajaan Ternate telah berkuasa secara berturut-turut Kaicil Jamin (1272-1284), kemudian Kaicil Siele (1284-1298). Pada masa Siele inilah ibukota kerajaan dipindahkan dari Sampala ke Foramadiahi. Siele kemudian digantikan secara berturut-turut: Kamalu (1298-12304) dan Kaicil Ngara Malamo (1304-1317).

Masa pemerintahahn Ngara malamo inilah, Ternate memperluas wilayahnya melalui politik ekspansi teritorial dengan merebut beberapa desa kecil Kerajaan Jailolo. Dengan politik ekspansi, mengantarkan Ternate menjadi kerajaan paling besar di jajaran kerajaan-kerajaan Maluku pada masa-masa berikutnya terutama dari akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-16. Memasuki abad ke-16, pamor Ternate sebagai kerajaan paling tangguh mulai merosot. Dengan demikian, Ngara Malamo adalah peletak dasar politik ekspansi Kerajaan Ternate. Kemudian digantikan oleh Patsyaranga Malamo (1317-1322), menyusul Sidang Arif Malamo (1322-13231). Pada masa kekuasaan Sidang Arif Malamo, keempat kerajaan mulai didatangi para pedagang manca negara, antara lain: Cina, Arab, dan Gujarat – maupun pedagang-pedagang nusantara (Jawa dan Malaka). Diantara para pedagang ini, ada yang mulai menetap, dan perdagangan rempah-rempah terutama di Ternate, Tidore, dan Makian mulai ramai. Setelah Ternate, Makian merupakan pelabuhan dagang yang terkemuka ketika itu di jazirah Maluku (Amal, 2002).

Peristiwa penting dan bersejarah tercatat pada masa pemerintahan Sidang Arif Malamo, adalah prakarsanya untuk menyelenggarakan pertemuan Moti (1322). Dari pertemuan ini melahirkan berbagai keputusan yang intinya adalah, peredaan ketegangan antar kerajaan-kerajaan Maluku terutama empat peserta musyawarah, serta penetapan peringkat kerajaan-kerajaan di Maluku. Jailolo ditetapkan sebagai kerajaan yang menempati peringkat pertama dalam senioritas, menyusul Ternate, Tidore, dan Bacan. Delegasi Bacan memprotes keputusan ini dan meminta diberi hak atas peringkat pertama, berdasarkan pertimbangan dari segi silsilah bahwa Raja Bacan berasal dari putera tertua. Peserta pertemuan yang lain menolak keberatan Bacan dengan alasan, penempatan Jailolo pada urutan pertama bukan didasarkan pada silsilah, tetapi pada senioritas: Jailolo merupakan kerjaan pertama yang berdiri di Maluku mendahului tiga kerajaan lainnya.

c. Kerajaan Tidore

Kerajaan besar kedua di Maluku setelah Ternate adalah Tidore. Tidak dapat dipastikan kapan kerajaan ini didirikan. Valentjin-Keyzer, mencatat bahwa Kerajaan Tidore pada mulanya terletak di pegunungan Batu Cina, sebelah selatan Dodingan. Tetapi, tidak dapat dipastikan sejak kapan pusat kerajaan itu dipindahkan ke Pulau Tidore (Kota Soaisu), seperti sekarang dan siapa raja pertamanya.

Menurut De Clerq mengemukakan delapan nama sebagai Raja Tidore yang berkuasa, tanpa menyebut tahun kekuasaannya. Kedelapan nama yang berkuasa masa-masa awal Kerajaan Tidore itu, berturut-turut: (1) Sah Jati, (2) Busamuangi, (3) Sabu, (4) Balibunga, (5) Duku Madoya, (6) Kie Matiti, (7) Sele, dan (8) Matangena.

Setelah raja-raja tersebut, tercatat dua Raja Tidore yang berkuasa, masing-masing; Nuruddin (1343) dan Hasan Syah (1373). Kedua kolano ini belum menggunakan gelar sultan, meskipun dipastikan bahwa ketika itu Islam telah masuk ke wilayah Kerajaan Tidore. Gelar sultan baru digunakan pada tahun 1495 ketika Caliati menjadi Raja di Tidore. Antara Kolano Hasan Syah dengan Sultan Caliati terdapat mata rantai penguasa yang putus, namun hal ini tidak ditemukan catatan sejarah tentang siapa yang berkuasa di Tidore pada masa itu (Amal, 2002).

Kerajaan Tidore sering juga disebut *Kei ma-Kolano* atau "Raja Gunung." Sebutan ini sering ditujukan kepada Kerajaan Tidore, karena kekuasaannya hanya sebatas pulau berikut gunung yang ada di pulau ini. Sebutan *Kie ma-Kolano* bagi Kerajaan Tidore sebenarnya tidak tepat, karena kerajaan ini berkuasa tidak hanya terbatas pada ini saja. Menurut Sekretaris Kesultanan Tidore, dalam wawancara (29/09/05) menjelaskan bahwa, dalam sejarah ketatanegaraan dan ketatapemerintahan Tidore, telah menguasai sejumlah pulau dan wilayah yang luas. Tidore menguasai Halmahera Tengah dan Timur (Weda, Maba, Patani, dan Gebe – Seram Pasir atau Seram Timur, Ambon dan desa-desa lain di bawah Rarakit, Werinamatu, Ulisiwa dan sekitarnya, kepulauan Ampat, dan Papua daratan yang cukup luas itu (AF/56).

Tidore selalu terlibat persaingan ketat dengan Ternate, terutama dalam bidang politik dalam rangka merebut hegemoni Maluku. Karena itu, masing-masing kesultanan selalu siap berebut mitra asing. Ketika berita kedatangan Portugis di Ambon di bawah pimpinan Francisco Serro sampai ke Ternate dan Tidore, terjadi perlombaan kedua kesultanan ini untuk menjemput Serro. Namun, perlombaan ini

dimenangkan oleh Ternate (Tidore kalah cepat). Bertolak dari pengalaman ini, maka ketika Spanyol tiba di Tidore sembilan tahun kemudian – Tidore segera memikatnya dalam sebuah kemitraan antara Tidore dengan Spanyol yang berlangsung sekitar satu setengah abad (1521-1663).

Persaiangan politik kedua kesultanan ini terus berlangsung dan tidak pernah akur sampai sekarang, bahkan dalam banyak hal kedua kesultanan ini sering terlibat dalam perselisihan pendapat terhadap suatu permasalahan. Misalnya, ketika Boki Gamalama (adik Sultan Ternate – Sibori Amsterdam), minta diceraikan suaminya (Pangeran Alam – Raja Jailolo terakhir) Ternate menolak, sedang Tidore mendukung. Demikian pula, ketika Dano Hasan baba meminta dukungan agar dikukuhkan sebagai Sultan Jailolo oleh Pemerintah Belanda, Tidore mendukung dan Ternate menentang. Dalam menghadapi kekuasaan asing, Ternate terlihat lebih cerdik terutama dalam memanfaatkan tangan-tangan asing untuk kepentingan politiknya. Sementara Tidore selalu bertindak konservatif. Apabila Ternate pernah memanfaatkan tentara Kompeni untuk memulihkan loyalitas daerah-daerah seberang lautan di pantai timur Sulawesi dan Sulawesi Utara, maka Tidore tidak pernah mengambil kebijakan seperti itu. Kesultanan Tidore lebih mengambil jarak ketimbang meminta bantuan militer untuk menegakkan kekuasaannya.

Kebijakan menjaga jarak dengan mitra asing menyebabkan Tidore lebih aman dari campur tangan kekuasaan asing, khususnya pada masa bercokolnya Spanyol di daerah ini. Sebaliknya, kebijakan Ternate yang sangat terbuka terhadap mitra asing menyebabkan banyak campur tangan kekuasaan asing terhadap urusan

dalam negeri yang merongrong kedudukannya sebagai negara merdeka. Contohnya, campur tangan Portugis dalam pengangkatan Sultan Tabariji dan cara-cara Kompeni dalam menggembosi kekuasaan Mandasyah, serta meredam pemberontakan Sibori Amsterdam. Dalam kasus pemberian hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Kompeni misalnya, Ternate telah melakukan sejak 1607, sementara Tidore baru membuka kesempatan setengah abad kemudian (1657). Sikap politik akomodatif Ternate terhadap kekuasaan asing menyebabkan basis-basis operasional bangsa-bangsa Eropa menjadikan Ternate sebagai pusat kegiatan dan kekuasaannya. Sedang Tidore sepi dari kegiatan semacam itu, bahkan membatasinya.

Politik menjaga jarak dengan kekuasaan asing yang dijalankan Tidore selama lebih dari satu seperempat abad (1521-1657) di bawah beberapa sultannya (Almansur, Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Kie Mansur, Iskandar Sani, dan Gapi Baguna), menurut beberapa sumber – disebabkan pengaruh para jolebe (kelompok agama) yang demikian kuat terhadap para sultan dalam mengambil kebijakan. Para jolebe ini cemas jika penguasa Tidore bertekuk lutut di bawah pengaruh kekuasaan asing yang nasrani itu. Apabila ini terjadi, menurut mereka – rakyat Tidore akan dikonversi ke agama Kristen. Kecemasan ini, cukup beralasan mengingat pengalaman Ternate (tetangganya yang tidak pernah akur). Hal senada juga diungkapkan salah satu informan (Kabag Hukum Kabupaten Halteng) dalam wawancara (28/09/05); Harus dicatat bahwa, ketika Spanyol memperoleh hak menetap di Tidore selama lebih dari a140 tahun, kesultanan ini dapat menghalau intrik-intrik Portugis, kemudian Kompeni Belanda. Apabila Portugis dapat mendikte pengangkatan Tabariji sebagai

sultan di Ternate, maka Spanyol tidak dapat melakukan hal yang sama di Tidore. Sebaliknya, jika Ternate dapat memanfaatkan kekuatan Kompeni untuk ekspansi dan menjaga eksistensi teritorialnya, maka Tidore tidak dapat melakukannya. Hal inilah yang menyebabkan Ternate dapat mempertahankan hegemoninya.

d. Kerajaan Bacan

Kerajaan Bacan yang bermula dari Limau Dolik (Tahani) di Pulau Makian, kurang memiliki catatan sejarah dalam percaturan dan perkembangan Maluku Utara. Berbeda dengan Kerajaan Ternate dan Tidore, yang bayak menghiasi perjalanan sejarah di kawasan Timur Indonesia terutama Maluku dan Maluku Utara. F. Valentjin (penulis *Beschrijving der Moluccas*), tidak pernah menulis secara rinci mengenai Bacan, dibanding dengan ketika menulis tentang Ternate dan Tidore. Bahkan, jauh lebih rinci ilustrasi Valentjin tentang Makian dan Jailolo daripada Bacan. Seperti telah dijelaskan bagian lain dalam kajian ini bahwa, kedudukan awal Kerajaan Bacan bermula dari Limau Dolik (Makian), kemudian dipindahkan ke Kasiruta karena alasan bencana gunung berapi Kie Besi. Selama beberapa abad kemudian baru masuk Pulau Sekki (Bacan) hingga sekarang.

Berdasarkan catatan sejarah yang diangkat dari lagenda atau ceritera rakyat tentang proses pembentukan Kerajaan Bacan, tidak terlepas dari tiga kerajaan lain yaitu: Jailolo, Tidore dan Ternate dalam Moloku Kie Raha. Menurut Kronik Bacan, menyebutkan bahwa, Kerajaan Bacan diperkirakan berdiri pada tahun 1322. Hal ini sesuai dengan penuturan beberapa sumber berdasarkan lagenda (ceritera rakyat) yang telah diuraikan. Menurut salah satu informan (mantan Kepala Desa Amasing), dalam

wawancara (08/01/06) mengatakan bahwa, latar belakang berdirinya Kerajaan Bacan, harus dimulai sejak perpindahannya dari Kasiruta ke Pulau Sekki (Bacan), karena terjadi perkawinan antara Boki Hongi (puteri Sultan Alauddin I) dengan Patra Alam (putera Sangaji Samargalila). Kisah perjodohan antara Patra Alam dan Boki Hongi, diawali ketika Samargalila berfikir di atas gunung Sekki (Rorasa Bacan) yang artinya: aku membujuk Sultan Alauddin I agar puterinya (Boki Hongi) dijodohkan dengan puteranya (Patra Alam). Kemudian rorasa tersebut dikabulkan oleh Sultan Alauddin I (Raja Kasiruta keempat), maka Patra Alam dikawinkan dengan Boki Hongi. Setelah itu, keinginan Samargalila agar Kerajaan Kasiruta dikembangkan di Pulau Sekki. Sejak itulah Kerajaan Kasiruta pindah ke Pulau Sekki (Bacan) hingga sekarang, dan Sultan Alauddin I sebagai sultan pertama.

Sekilas perkembangan Kerajaan Bacan setelah pindah dari Kasiruta dengan Sultan pertama (Alauddin I), dikisahkan bahwa Sultan Alauddin I memiliki 5 (lima) orang anak (empat orang perempuan dan satu orang laki-laki), masing-masing: (1) Nur Salat, kemudian menjadi sultan kelima (kedua) di Pulau Sekki (bacan), (2) Boki Tunjung, kawin dengan Sultan Ternate, (3) Boki Hongi, kawin dengan Sultan Tidore, (4) Boki Johar Puspa, kawin dengan anak dari Sangaji Samargalila, dan (5) Boki Rigola, kawin dengan anak dari Sangaji Ngofagita.

Kemudian keturunan dari Sultan Nur Salat, dua orang masing-masing: (1) Muhammad Ali Ma’rifatullah (sultan keenam Kerajaan Bacan), dan (2) Lawang Tunggu Lawang (Kapita Lao), yaitu pimpinan perairan laut. Deri Sultan Muhammad Ali Ma’rifatullah memiliki tiga anak laki-laki, masing-masing: (1) Alauddin II (sultan

Bacan yang ketujuh), (2) Malikuddin (sultan Bacan yang kedelapan), dan Nasaruddin (sultan Bacan yang kesembilan). Setelah Sultan Nasaruddin wafat, jabatan sultan dipegang oleh Muhammad Sabadin (cucu dari Sultan Malikuddin – anak dari Kaicil Mojong) sebagai sultan kesepuluh. Sultan kesebelas dipegang oleh Sultan Ahmad (anak dari Sultan Nasaruddin), sultan keduabelas dijabat oleh Tarafannur Muarrafa (Hamzah) – anak dari Kaicil Maidan. Sultan ketigabelas adalah Iskandar Alam (anak dari Patra Alam). Pada masa pemerintahan Iskandar Alam adalah masa-masa sulit, karena harus berhadapan berbagai pergolakan baik dari dalam maupun dari luar.

Sultan Iskandar Alam terkenal tegas dan tidak mengenal kompromi dengan pihak Hindia Belanda, sehingga pihak Belanda melakukan berbagai cara termasuk mempengaruhi internal kerajaan melalui politik tipu daya. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan musyawarah dengan Sultan Iskandar Alam dan hasilnya Sultan Iskandar Alam harus berangkat ke Batavia untuk berunding, dalam rangka membahas masalah-masalah yang dihadapi Kerajaan Bacan. Namun, hal tersebut hanya siasat (tipu daya) pihak Belanda, di mana setelah Sultan Iskandar Alam pergi meninggalkan Bacan – Belanda mengangkkat Marwan sebagai sultan keempatbelas. Pengangkatan Marwan sebagai sultan tidak sesuai dengan tradisi setempat, yaitu tidak melalui pihak ampat (adat) seperti pendahulu-pendahulunya di Bacan. Dengan kata lain, Sultan Marwan diangkat oleh Belanda sebagai boneka dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Kompeni Belanda. Kondisi ini diketahui oleh Sultan Iskandar Alam, sehingga beliau memutuskan untuk tidak kembali ke Bacan dengan mengirim

pesan (Rorasa Bacan), yang artinya: *walaupun beliau jauh dari Kerajaan Bacan, namun apa yang direncanakan di Bacan beliau telah mengetahuinya*.

Sultan Iskandar Alam, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan setelah itu, beliau memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia melalinkan ke suatu negeri, yaitu Sailon. Disanalah beliau kawin dan menetap hingga wafat. Sebagai bukti bahwa beliau kawin dan memiliki keturunan di Sailon dengan mengirim salah satu puteranya bernama Basyarun untuk kembali ke Bacan, ibunya berasal dari Jogya bersana Puteri Sakina yang ketika itu diasingkan oleh Belanda ke Banglades (1887). Bekal Basyarun adalah berupa syair-syair dari negeri Sailon, yaitu syair-syair dari negeri Arab. Syair-syair itu hingga kini tetap diabadikan untuk dilantunkan, diiringi dengan rabana terutama ketika masyarakat melakukan acara seperti sunatan, atau acara-acara keagamaan lain di mana syair-syair ini juga disebur zikir.

e. Kerajaan Loloda

Menurut catatan Gubernur Maluku, Robertus Padtbrugge (1677-1682) dalam memori serah terima jabatan kepada penggantinya Jacob Lobs (1682-1686), menyebutkan sebuah ungkapan yang terkenal bagi kerajaan-kerajaan di Maluku Utara sebagai berikut :

Loloda, ngara ma-beno (dinding pintu)
Jailolo, jiko ma-kolano (penguasa teluk)
Tidore, kie ma-kolano (penguasa pegunungan)
Ternate, kolano Maluku (penguasa Maluku)
Bacan, dehe ma-kolano (penguasa daerah ujung)

Ungkapan di atas mengandung makna bahwa, dalam deretan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, selain empat kerajaan yang telah disebut (Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan), Loloda merupakan salah satu kerajaan yang meskipun pengaruh dari kerajaan ini tidak begitu signifikan tetapi tidak bisa dipisahkan dalam percaturan politik dan kekuasaan ketika itu. Sebagai *ngara ma-beno*, Kerajaan Loloda yang terletak di bagian utara Halmahera, merupakan "pintu masuk" ke kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Sementara Bacan sebagai daerah paling ujung di selatan Halmahera, merupakan pintu keluarnya.

Berdasarkan catatan sejarah Maluku Utara (versi Tidore), raja-raja Loloda bermula dari puteri Jafar Sadek ketiga, Sagarnawi. Demikian dikisahkan bahwa, kerajaan-kerajaan Maluku (Loloda, Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan) merupakan "panca tunggal", atau dengan sebutan lain adalah *soa fala raha*. Tidak diketahui secara pasti kapan Kerajaan Loloda didirikan dan siapa penguasa pertamanya. Namun seperti telah diungkapkan terdahulu bahwa, kemungkinan besar Kerajaan Loloda lebih dulu eksis daripada Kerajaan Jailolo.

Ketika berlangsung pertemuan Moti (1322), yang diprakarsai Ternate, Loloda juga diundang. Raja Loloda telah berupaya menghadiri pertemuan tersebut dengan meninggalkan, namun terhalang oleh angin ribut sehingga delegasi Loloda mendarat di Dufa-dufa Ternate, dan gagal mengikuti persekutuan itu. Hal ini pulalah yang menyebabkan Kerajaan Loloda menjadi bulan-bulanan politik ekspansi Ternate. Sejak itu, Kerajaan Loloda sudah tidak berperan dan tidak berpengaruh lagi. Meski demikian, kerajaan yang berpenduduk kurang lebih 200 jiwa (masa itu); sebagian

besar adalah orang-orang Galela masih dibiarkan Ternate untuk berfungsi di bawah kekuasaannya, dan Raja Loloda masih tetap diperkenankan menggunakan gelar kolano. Namun Kolano Loloda tergolong “miskin”, karena tidak memiliki rempah-rempah. Dalam perjuangan Nuku melawan Belanda, barisan penasehat yang diangkat terdiri dari lima orang, masing-masing; dua orang dari Maba, Kimalaha Galela, satu orang dari Mareku, dan Imam Loloda (Katoppo, 1957).

f. Kerajaan Moro

Kerajaan Moro terletak di daratan Halmahera Utara pantai timur, mulai dari tanjung Bisoa di utara sampai Tobelo. Karena letaknya di daratan Halmahera, maka disebut juga dengan Morotia (Moro daratan). Sebagian lagi wilayahnya terletak di seberang laut yang dinamakan Morotai (Moro lautan). Dengan demikian, Kerajaan Moro memiliki wilayah Moro daratan (Morotia) dan Moro lautan (Morotai). Ibukota kerajaan Moro adalah Mamuya, di Morotia (sekarang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Galela). Sebagaimana Loloda, Kerajaan Moro juga tidak diketahui secara pasti kapan berdiri dan siapa pendirinya. Kota-kota penting Kerajaan Moro, selain Mamuya, antara lain: Sugala, Pune (Galela), Tolo, Cawa, Samafo (Tobelo), Sakita, Mira, Cio, dan Rao (Mototai).

Prnduduk kerajaan ini sebagian besar memeluk agama Islam, sebagian lagi beragama Katolik, dan lainnya memiliki kepercayaan animisme. Secara geografis, penduduk Kerajaan Moro terdiri dari etnis Galela dan Tobelo, baik di Morotia maupun di Morotai. Menurut catatan sejarah, hal yang paling menonjol dari Kerajaan Moro adalah dalam hal “misi evangelisasi” yang dijalankan misionaris-misionaris

Barat. Antonio Galvao, Gubernur Portugis ke-7 di Ternate, dapat dipandang sebagai pelopor penyebaran Kristem di Kerajaan Moro dengan mengirim pastor Ferdinand Vinogre ke Mamuya. Meskipun upaya pendeta ini tidak banyak membawa hasil, karena atas tekanan-tekanan Raja Jailolo. Namun, situasi berubah dengan tibanya Franciscud Xaverius di Moro (1546) dan berkeliling selama tiga bulan di kerajaan ini. Ia kemudian membentuk Misi Jesuit, dan sejak itu agama Kristen Katolik mulai berkembang, terutama di Mamuya dan Tolo (Morotia), Rao dan Sakita (Morotai). Pusat Misi Jesuit ditempatkan di Tolo, kota yang berpenduduk terbesar ketika itu, kurang lebih 3000 jiwa (Lairissa, 1996).

Kerajaan Moro telah lama menjadi incaran kerajaan-kerajaan besar lain di Maluku Utara, terutama Ternate. Sultan Khairun, pernah menyampaikan maksudnya kepada Xaverius bahwa ia menghendaki salah satu puteranya menjadi raja di Moro. Raja Jailolo Katarabumi, menjelang pertengahan abad ke-16 mengepung Tolo selama tiga bulan, tetapi pasukannya terpaksa mengundurkan diri karena datang bata bantuan Portugis. Akibat serangan dan tekanan Ternate terhadap Mamuya, menyebabkan Raja Moro melarikan diri dan mencari bantuan Portugis.

Seorang pedagang Portugis yang telah lama bermukim di Maluku Utara, menasehati Raja Moro untuk beralih ke agama Katolik, jika ia menginginkan perlindungan Portugis. Nasehat itu diturutinya, dan kemudian bersama Sangaji Tolo, keduanya memeluk Kristen dalam suatu upacara keagamaan di dalam benteng Gamlamo di Ternate. Dengan pakaian kebesaran Portugis, keduanya dibaptis pastor

Simon Vaz di hadapan Gubernur Portugis. Nama baptis keduanya adalah Don Joao de Mamuya, dan Don Tristiao de Tolo.

Ketika Babullah dinobatkan sebagai Sultan Ternate (1570), melanjutkan perang terhadap Portugis yang telah dikobarkan pendahulunya (Sultan Khairun). Peperangan ini berhasil dimenangkan Babullah dan mengakibatkan Portugis terusir dari sebagian besar wilayah Maluku Utara. Dengan demikian, misi Jesuit Moro yang di zaman Khairun banyak mendapat bantuan dan kemudahan, mulai surut pada masa Babullah. Para pastor mulai meninggalkan Kerajaan Moro menuju Ternate, dan 1574 meninggalkan Maluku Utara. Akhir abad ke-16, Babullah menggabungkan Kerajaan Moro ke dalam wilayah Kesultanan Ternate dengan mengirim ekspedisi ke Galela, kemudian ke Tolo (Tobelo), dan Morotai. Meskipun pasukan Babullah mendapat perlawanan sengit di Tolo (pusat misi Jesuit) Kerajaan Moro, namun seluruh wilayah Moro akhirnya ditundukkan ke dalam wilayah Kesultanan Ternate. Sejak itulah eksistensi Kerajaan Moro pun berakhir.

Ketika Sultan Saidi berkuasa di Ternate (1584-1606), penduduk Bisoa, Galela, Tolo, Cawa, dan Samafo, mengirim utusan dengan iringan musik dan isyarat perdamaian. Mereka meminta Sultan Ternate agar diperkenankan kembali ke agama Katolik. Tidak jelas bagaimana akhir dari permintaan tersebut. Tetapi, pada tanggal 27 Nopember 1606, Ternate menandatangani sebuah perjanjian dengan Spanyol, yang antara lain menetapkan bahwa, Ternate akan mengembalikan bekas budak Portugis dan Spanyol yang telah beralih ke agama Islam, dan tidak akan memaksakan orang Kristen masuk Islam, termasuk para budak. Perjanjian ini berhubungan dengan

masalah orang Moro. Masa pemerintahan Sultan Mudafar (1610-1627), sejumlah orang Moro dari Mamuya, Samafo, Kioma, dan Tolo dievakuasi ke Ternate. Pada 1628, Sultan Hamzah di Ternate juga memutuskan untuk membawa sekitar 800 orang Moro ke Ternate untuk memperkuat angkatan perangnya. Sementara pada 1686, sejumlah orang Moro yang berasal dari Morotai, Cio, Sopi, Sakita, dan Mira dipindahka ke Jailolo dan Dodinga.

g. Kerajaan Obi

Di pulau Obi juga terdapat sebuh kerjaan, tetapi oleh Kerajaan Bacan sejak awal dijadikan kerajaan *vazal*, kemudian dianeksasi dan menghilang dari percaturan politik di Maluku Utara. Tidak diketahui secara pasti Kerajaan Obi berdiri dan siapa yang mendirikannya. Pada wal abad ke14, Obi mengklaim memiliki pemerintahan sendiri, sekalipun tidak memiliki peranan berati dibandingkan empat kerajaan besar lain di Maluku Utara, tetapi Bacan segera meredam klaim tersebut. Kapan Bacan memasukkan Obi ke dalam wilayah kekuasaannya juga tidak diketahui secara pasti. Pada masa Awaluddin II bertakhta di Bacan, terjadi skandal yang menghebohkan berkaitan dengan pulau ini, yakni Obi dijual kepada Kompeni seharga 800 ringgit.

Menurut penjelasan salah satu informan (*YD/58 th*), ketika itu Kerajaan Bacan masih di Kasiruta, Obi telah berdiri sebuah kerjaan (tidak diketahui secara pasti tahun dan siapa pendirinya), tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa di pulau ini telah memiliki struktur pemerintahan tradisional yang dipertahankan secara turun-temurun, jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Perkembangan kemudian,

terutama pada masa Sultan Awaluddin II berkuasa menjadikan Obi sebagai sumber pendapatan yang memasok bahan makanan dan ikan. Obi merupakan salah pulau yang kaya akan sumberdaya alam baik darat maupun laut, sehingga selain Bacan dua kerajaan lain terutama Ternate berupaya untuk menguasai pulau ini. Berdasarkan perjanjian Bongaya yang mengakhiri peperangan antara Makassar dan Belanda, Obi dinyatakan sebagai bagian dari Kesultanan Ternate. Meskipun demikian, secara defakto Obi tetap merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Bacan.

2. Struktur Organisasi Kerajaan (Keultanan)

Struktur organisasi pemerintahan empat kerajaan di Maluku Utara (Moloku Kie Raha), berdasarkan fakta sejarah menunjukkan bahwa keempat kesultanan sejak awal berdirinya hingga perkembangan kemudian didasarkan nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya tradisional masyarakat setempat. Nilai-nilai Islam yang dimaksud adalah “musyawarah untuk mencapai mufakat,” yang dikombinasi dengan tradisi budaya (kebiasaan-kebiasaan) masyarakat setempat dalam melaksanakan berbagai aktivitas hidup dan kehidupan bersama. Untuk lebih jelas struktur organisasi kesultanan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi Kesultanan Ternate

Sejarah mencatat bahwa sejak abad ketiga sebelum Masehi, Ternate telah dikenal sebagai kota perniagaan rempah-rempah yang ramai dikunjungi berbagai suku bangsa terutama Cina dan Arab. Sejak itu pila, organisasi ketatanegaraan dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dari berbagai suku

bangsa yang mendiami wilayah ini. Sejak tahun 1251, kelompok-kelompok suku bangsa di Ternate mengadakan musyawarah (*Fora Madiyahi*), artinya: "Duduk Yang sebenarnya" dengan susunan organisasi kenegaraan sebagai berikut :

1) Puncak pimpinan (Raja), disebut "Kolano" dari kata "kokola-nao" artinya: "Tegak supaya kuat." Kekuatan di bawahnya terdiri atas; lembaga kerajaan, dewan menteri, pemerintahan wilayah, dan angkatan bersenjata.
2) Dewan menteri, disebut "Soa-Sio" meliputi: (a) *Kimalaha Marsaoli*, sebagai Jogugu atau Perdana Menteri, (b) *Kimalaha Tomagola*, memegang kekuasaan pertahanan keamanan, (c) *Kimalaha Tomaito*, yang memegang kekuasaan perekonomian, (d) *Kimalaha Tomadi*, memegang kekuasaan wilayah, (e) *Kimalaha Payahe*, memegang kekuasaan keamanan dalam negeri/kerajaan, (f) *Fanyira Jiko*, mengurus hukum adat dan agama, (g) *Fanyira Jawa*, mengurus pendidikan dan agama, (h) *Fanyira Tabala*, mengurus hubungan dengan kerajaan lain, (i) *Fanyira Torongara*, mengurus dalam negeri/kerajaan
3) Sangaji, adalah pemerintah wilayah atau gubernur
4) Kolano Tolak, adalah kerajaan di dalam kekuasaan Ternate
5) Sala Hakan, adalah gubernur berkuasa penuh
6) Sosorus, adalah utusan Kerajaan Ternate
7) Heku Cim, adalah Angkatan Laut dan Darat Kerajaan Ternate
8) Tul Lamo, adalah sekretaris jenderal atau sekretaris kerajaan
9) Sadaha Kie, adalah kepala bendahara negara
10) Sowahi, adalah protokoler kerajaan

11) Sadaha, adalah kepala rumah tangga Istana

Lembaga Kerajaan, antara lain: (1) *Gam Raha* (empat kekuatan bangsa), sebagai yang tertinggi memilih dan mengangkat kolano, serta menyatakan perang dan damai, (2) *Bobato Nyagimoi se Tufkange* (dewan delapan belas), sebagai lembaga penetapan hukum adat dan berhak mengajukan kandidat kolano, (3) *Fala Raha* (empat penasehat agung), sebagai lembaga penasehat kolano, dan (4) *Sabua Raha* (empat hakim agung dan empat hakim agama).

Perlu dicatat bahwa Ternate dalam mengorganisir daerah kekuasaannya yang luas di berbagai pulau kawasan timur Indonesia, khususnya pasca Khairun dan Babullah mengalami banyak kesulitan. Sultan Tabariji (1532) dapat dikatakan cukup idealis, tindakan-tindakannya yang kontroversial telah mrepotkan penjajah. Dalam suatu pertemuan umum dengan para bobatonya, Tabariji mengungkapkan bahwa ia ingin melihat Kesultanan Ternate “dalam wujud seperti sebelum kedatangan bangsa asing.” Sayangnya Tabariji tidak dapat merealisasikan gagasan besar ini, ia ditangkap dan diasingkan ke Gowa. Selain itu, Mandarsyah (1648-1675) dan Sibori Amsterdam (1675-1689) telah bersusah payah dalam mempertahankan warisan kesultanannya itu, tetapi hasilnya tidak sebesar yang diharapkan. Hal ini karena, pengaruh Kompeni sudah terlalu kuat sehingga sulit untuk diatasi.

Kesultanan Ternate menjalankan pemerintahannya secara tidak langsung, yaitu daerah-daerah taklukan berada di bawah kekuasaan rara-raja lokal. Raja-raja lokal ini dibiarkan menjalankan pemerintahan atas nama Sultan Ternate. Karena itu, pengangkatan raja-raja tersebut dilakukan oleh Sultan Ternate berdasarkan hasil

pemilihan lembaga-lembaga adat setempat. Hal ini bisa dilihat di daerah-daerah seperti Buton, Banggai, Buol, Toli-toli, Gorontalo, dan lain-lain di pesisir pantai Sulawesi bagian Timur. Tetapi, karena sistem kontrol dan pengawasan yang lemah sehingga pemerintahan raja-raja lokal ini tidak efisien.

b. Struktur Organisasi Kesultanan Tidore

Struktur organisasi pemerintahan Kesultanan Tidore, dimulai ketika Nuku berkuasa, yaitu: (1) Pusat kerajaan, yaitu Pulau Tidore, Pulau Maitara, dan Pulau Mare, (2) Daerah luar dan daerah ulurannya, yang disebut "manca negara," yang meliputi: Halmahera Tengah dengan dua jazirah di sebelah timur dan Pulau Gebe; Daerah Kalana Fat, yaitu Gugusan Kepulauan Raja Ampat, termasuk pantai barat dan utara Irian (Papua); Seram Timur dengan pulau-pulau Seram laut, Gorong, Watubele, Kai dan Aru, termasuk pantai selatan Irian (Papua).

Sultan Tidore menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan sebuah *Dewan Wazir* dan sebuah *Majelis Kerajaan*, dibantu oleh sebuat *Kepaniteraan* yang dikepalai oleh seorang *sekretaris*.

1) *Dewan Wazir*, terdiri dari: *Jogugu*, patih atau perdana menteri; *Kapitan Laut*, panglima angkatan laut dan kepala urusan kelautan; *Hukum Sangaji*, *Hukum Soa-Siu*, berganti-ganti menurut gilirannya mengepalai urusan dalam negeri.
2). *Majelis Kerajaan*, yang terdiri dari 31 orang anggota, yaitu 4 orang *wazir* dan 27 orang *bobato* (= bupati), bersama-sama dengan sultan dalam menetapkan: kebijakan umum pemerintahan, pengangkatan dan pemecatan raja-raja, *sangaji-*

sangaji (= bupati-bupati) dan lain-lain kepala daerah; menentukan pernyataan perang dan menutup perdamaian.

Peradilan dijalankan dan dilaksanakan oleh dua buah badan peradilan, yakni sebuah Majelis Peradilan, yang terdiri dari salah satu dari kedua orang *hukum* menurut gilirannya sebagai ketua, dua orang *bobato*, yang dipilih oleh majelis kerajaan di antara anggota-anggotanya sendiri, dua orang khatib dan dua orang modim. Majelis pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutuskan dalam tingkatan pertama semua perkara pelanggaran dan kejahatan, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan hukum sipil. Mahkamah pengadilan tertinggi terdiri dari seluruh majelis kerajaan dan diketuai oleh seorang *hukum,* yang menurut gilirannya ketika itu memangku urusan peradilan.

Sultan Tidore berdaulat atas seluruh kerjaan dan mengepalai pemerintahan. Seorang sultan harus dipilih di antara pangeran-pangeran, putera sultan atau putera dari seorang yang pernah memerintah sebagai sultan; ia harus memenuhi syarat-syarat seorang sultan. Bakal sultan, putera mahkota bergelar *raja muda*; sebelum dilantik menjadi raja muda, pangeran itu harus menunjukkan kecakapan dan kelebihan yang dimiliki sebagai pemimpin, dan biasanya sebelumnya ia panglima angkatan laut atau laksamana kerajaan dengan *Kapita Laut*. Orang-orang bukan orang Tidore, di Negara Tidore, di ibukota Soasiu berada di bawah kepala-kepalanya sendiri dengan gelaran *kapitan*, menurut banyaknya jiwa dan kepentingan ekonomi; misalnya ada letnan Tionghoa; ada *kapitan* Makassar yang mengepalai seluruh orang Indonesia

yang bukan Tidore. Kedudukan *kapitan* Makassar dianggap sedemikian penting oleh sultan, sehingga ia pun terhitung anggota majelis kerajaan selaku *bobato*.

Negeri-negeri dan kampung-kampung di Pulau Tidore dan Mare, serta di Halmahera Tengah diperintah oleh kepala-kepala yang bergelar *Kimelaha*, *Gimelaha*, *Hukum*, dan *Ngofamanyira* atau *Fomanyira*; kedudukan mereka dapat disamkan dengan seorang bupati, walaupun wilayahnya kecil dan rakyatnya relatif sedikit. *Kimalaha*, *hukum*, dan *ngofamanyira* diangkat oleh sultan; biasanya diangkat dari putera *kimalaha*, *hukum*, atau *ngofamanyira* yang berhenti atau meninggal dunia. Bilamana suatu daerah tidak ada *sangajinya*, maka sultan mengangkat *kimalaha* atau utusan untuk sementara waktu. Masing-masing *sangaji* dibantu oleh seorang *kapitan laut* (kepala angkatan laut), seorang imam dan seorangt khatib.

Daerah-daerah yang melingkupi Kepulauan Raja Ampat diperintah oleh empat orang raja, yang biasa disebur *raja-raja Papua* dan berotonomi penuh dalam daerah wilayah masing-masing; seorang raja baru harus dilantink dan diambil sumpahnya oleh sultan di Tidore. Susunan pemerintahan tiap-tiap swapraja sama dengan susunan pemerintahan Kesultanan Tiidore. Masing-masing raja ada *jogugunya*, ada *kapitan* lautnya, dan ada *khatibnya*. Putera raja yang bakal jadi raja, juga bergelar “Raja Muda.” Di antara empat kerajaan di bawah Kesultanan Tidore ini, Raja Salawati yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, yaitu selain Pulau Salawati dan Pulau Batanta serta pulau-pulau di sekelilingnya, juga seluruh tanah Papua (Irian) dari Tanjung Sele ke selatan dan ke timur sampai dengan pantai utara Teluk Berau; dari Tanjung Sele ke utata dan dari Tanjung Sorong ke timur.

Raja Misool menguasai pantai barat Irian (Papua), yaitu pantai selatan Teluk Berau dan Jazirah Onin. Kepala-kepala suku bangsa Papua bertakluk pada raja-raja Salawati dan Misool, apa yang bergelar *Raja* ada pula yang bergelar *Kolano, Korano, Mayor, Jimelaha* atau *Sangaji*. Mereka tidak berhubungan langsung dengan Sultan Tidore, demikian pula semua perintah dan titah dari sultan untuk mereka senantiasa diberikan dengan melalui raja Salawati atau raja Misool. Seram Timur terdiri dari beberapa negeri atau kampung dan pulau-pulau, keppala-kepalanya berotonomi penuh; masing-masing bergelar Raja (*Orangkaya atau Raja Patih*). Negeri-ngeri di Seram Besar (biasa juga disebut *Nusa Ina*) yang termasuk bilangan kesultanan Tidore, yaitu Kilbawar, Waru, Kian, Kwaos, Rarakit, Guliguli, dan Kilmuri, serta Pulau-pulau Seramlaut, Pulau-pulau Gorong, Pulau-pulau Watubela, dan Tior.

b. Struktur Organisasi Kesultanan Bacan

Struktur organisasi Kesultanan Bacan sejak Muhammad Bakir berkuasa, bergelar "Maharaja Yang Bertakhta Kerajaan Moloku Astana Bacan, Negeri Komolo Besi Limau Dolik." Kronik Bacan menyebutkan bahwa, Sida Hasan naik takhta menggantikan ayahnya Muhammad Hasan (1343). Pada masa pemerintahan Sida Hasan, terjadi evakuasi orang-orang Makian ke Bacan, dengan menempati kawasan Dolik, Talimau dan Imbu-imbu.

Raja Bacan yang berkuasa setelah Sida Hasan, adalah Zainal Abidin (tidak diketahui pasti tahun kekuasaannya) diperkirakan tahun 1522. Zainal Abidin memiliki dua putera, masing-masing Kaicil Bolotu dan Kaicil Kuliba. Kaicil Bolotu

kemudian memerintah negeri Besi (Makian), setelah Zainal Abidin wafat, Kaicil Bolotu kembali ke Kasiruta dan menjadi raja di sana dengan gelar Bayanu Siirullah, sedang Kuliba kembali ke negeri Besi untuk menjalankan pemerintahan di sana. Bayanu Sirullah kemudian digantikan oleh Awaluddin I, dan setelah itu tampuk Kesultanan Bacan dipegang oleh Sultan Muhammad Ali, ayah angkat Sultan Babullah dari Ternate. Pemerintahan Muhammad Ali kemudian digantikan Sultan Awaluddin II (1660-1706). Sultan Awaluddin I dan II dikenal sebagai "Sultan Dubu-Dubu." Pada masa pemerintahan Sultan Awaluddin II, Ternate mengembalikan seluruh Pulau Makian ke Bacan, kemudian mengangkat adiknya Kaicil Musa, untuk menjalankan pemerintahan Kesultanan Bacan di Makian. Setelah Awaluddin II wafat, para bobato Kesultanan Bacan mengangkat Kaicil Musa sebbagai penggatinya dengan gelar Malikuddin.

Pemerintahan Makian yang ditinggal Kaicil Musa, karena pengangkatannya sebagai Sultan Bacan, diserahkan kepada Kaicil Tojimlia. Setelah Malikuddin wafat, digantikan oleh Kaicil Kie dengan gelar Sultan Nasruddin. Selanjutnya, mengangkat Kaicil Lawan untuk memerintah Makian, dan masa pemerintahan Kaicil Lawan merupakan masa pemerintahan Kesultanan Bacan yang terakhir di Makian. Sejak saat itu, Makian dianeksasi Ternate sehingga kekuasaan Bacan tidak pernah lagi kembali sampai seterusnya.

Ketika Portugis tiba di Maluku (1512), Bacan merupakan salah satu dari empat kerajaan besar yang ada di Maluku. Dalam jajaran kesultanan Maluku, Bacan merupakan satu-satunya kesultanan yang berpenduduk heterogen. Sejak evakuasi

kkerajaan ini dari Makian, penduduk Bacan terdiri atas berbagai suku, terutama suku Makian, Galela, dan Tobelo. Penduduk asli Bacan relatif sedikit dibanding tiga suku lain terutama suku Makian.

Lembaga-lembaga adat dan sistem pemerintahan Kesultanan Bacan hampir sama dengan Kesultanan Ternate dan Tidore. Satu-satunya perbedaan yang tampak adalah, di Kesultanan Bacan terdapat lembaga *Sekretaris Kesultanan* yang mendampingi Sultan dalam urusan pemerintahan. Ia menata administrasi kesultanan, terutama surat keluar-masuk dari dan untuk kesultanan. Struktur organisasi pemerintahan Ksultanan Bacan, dijalankan oleh Sultan dan dibantu oleh sejumlah aparatur pemerintahan, sebagai berikut :

1) *Bobato Dalam*, dengan sebutan dan hierarki militer seperti, Mayor (khusus untuk dano), Kapiten Ngofa (khusus untuk dano), Kapita Kie (bangsawan tinggi), empat orang Letnan, masing-masing dua Letnan Ngofa dan dua Letnan Kie. Di bawah Letnan ada Alfris dan Sersan yang mengawal pos penjagaan Sultan.
2) *Bobato Luar*, yang menjalankan pemerintahan, khususnya dari kelompok soaisu, misalnya Jogugu yang dibantu para Hukum (hakim) dan Kimalaha Sapanggala yang mengemban tugas dari Sultan untuk mengepalai soa saanani. Tugas Hukum Kesultanan Bacan tidak berbeda dari tugas seorang polisi.
3) *Bobato Akhirat*, yaitu pejabat-pejabat agama Islam yang terdiri dari Kalem (Qadhi Kesultanan) di pusat kesultanan, dibantu sejumlah Imam, Khatib, dan Modim. Ketiga jabatan terakhir ini juga terdapat di daerah-daerah. Dalam beberapa hal, imam bekerjasama dengan Hukum. Sebagai perpanjangan tangan Jogugu, Imam

membentuk pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata atau penjatuhan hukuman pidana. Dalam kasus pidana, eksekusinya baru bisa dilaksanakan setelah memperoleh approbasi (izin atau fiat) dari Residen.

Di samping kelompok bobato di atas, terdapat juga jabatan-jabatan penting lain dalam Kesultanan Bacan, yaitu: (1) Kapita Laut, sebagai panglima militer, (2) Kaapala Bangsa, salah seorang dari suku Soaisu yang ditugaskan sultan sebagai penanggung jawab atau pelaksana kesultanan, (3) Imam Juru Tulis, Khatib Juru Tulis dan Modim Juru Tulis, dan (4) Imam Ngofa, Khatib Ngofa dan Dano.

Berbeda dengan Ternate dan Tidore, di mana sultan memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jogugu dan pejabat-pejabat kesultanan lainnya. Di Bacan, hak prerogatis untuk pengangkatan semacam itu tidak dimiliki sultan, melainkan dipilih langsung oleh rakyat menurut sebuah aturan yang ditetapkan oleh sultan. Alasan di balik pemilihan ini adalah agar pejabat-pejabat tersebut membawa perintah-perintah kesultanan kepada rakyat dan tidak boleh melawan lembaga-lembaga dan adat-istiadat negeri.

d. Struktur Organisasi Kesultanan Jailolo

Eksistensi Kesultanan Jailolo sebagai salah satu dari empat kesultanan di Maluku dalam percaturan politik, ekonomi dan sosial budaya tidak berlangsung lama karena setelah pertemuan Moti, kesepakatan empat sultan dilanggar oleh Ternate. Ketika Kaicil Tulu Malamo naik takhta kemudian secara sepihak membatalkan perjanjian Moti, dan menyatakan persekutuan yang telah dibuat pendahulunya tidak

mengikat lagi bagi Ternate. Ketika Sultan Nuku berkuasa di Tidore, sebagai sultan terbesar di kawasan timur sepanjang sejarah Kesultanan Tidore (1797), mengeluarkan dekrit yang mengangkat Sangaji Tahani (Makian) menjadi Sultan Jailolo.

Sangaji Tahani adalah mantan Jogugu Tidore, yang memangku jabatan ini selama 17 tahun di masa pemerintahan Sultan Kamaluddin (kakak Nuku). Sangaji Tahani bukanlah tokoh yang berasal dari kalangan bangsawan, melainkan rakyat kebanyakan dan merupakan salah seorang pembantu kepercayaan Nuku dalam perjuangannya menentang Belanda. Dengan keluarnya dekrit Nuku, maka Kesultanan Jailolo kembali berdiri dan cita-cita Saifuddin untuk menegakkan perdamaian dan keamanan yang langgeng di atas empat pilar kerajaan di Maluku telah direalisasikan. Raja Jailolo pertama setelah berdiri kembali, dengan gelar Sultan Muhammad Arif Billa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kerajaan Jailolo, gelar tradisional kolano diganti dengan sultan. Sultann Jailolo pertama ini mulai berkuasa sejak 1797 sampai wafat 1807, dengan tiga putera, masing-masing Sugi, Niru, dan Hayuddin.

Cita-cita Nuku dengan menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo, dalam kenyataannya hanya merupakan kerajaan *vazal* Tidore, seperti halnya ketika Sultan Khairun berkuasa di Ternate. Hal ini karena pemerintahan Nuku berada di atasnya, tidak sepenuhnya berhasil disebabkan orang-orang Alifuru tidak mau mengakui Sultan Jailolo yang ditunjuk Nuku sebagai raja mereka. Mereka tetap menyatakan kesetiannya kepada Kesultanan Ternate. Hanya beberapa kampun di pantai barat Halmahera yang dapat dikuasai Jailolo.

Setelah Sultan Muhammad Arif Billa wafat, digantikan oleh puteranya, Kimalaha Sugi (sebelumnya menjabat sebagai Ngofa Jou, puteran mahkota). Sultan Jailolo kedua ini bergelar Muhammad Asgar. Ketika Inggris menduduki Ternate (1810), Muhammad Asgar tidak diakui sebagai Sultan Jailolo, karena ia “belum pernah diangkat oleh penguasa yang berhak, dan tidak berhak untuk menggunakan gelar sultan. Kemudian Inggris menangkap dan menaham Muhammad Asgar. Ketika Inggris meninggalkan Maluku (1817), Sultan Jailolo kedua ini diserahkan kepada Belanda, dan tahun 1818 ia diasingkan ke Jepara (Jawa Tengah) bersama lima pengikutnya. Tahun 1825 ia dikembalikan ke Seram Utara, namun karena aksi-aksi pemberontakannya, tujuh tahun kemudian Muhammad Asgar kembali ditangkap dan diasingkan ke Cianjur (Jawa Barat), dan di sana ia meninggal dunia (1839).

Putera Sultan Jailolo pertama lainnya, Hajuddin melanjutkan kekuasaannya sebagai Sultan Jailolo ketiga, bergelargelar Saifuddin Jihad Muhammad Hajuddin Syah dengan pusat kekuasaan masih di Seram Utara. Berbeda dengan Sultan Jailolo kedua yang tidak memperoleh dukungan Belanda, Hajuddin Syah mendapat restu Gubernur Ambon, Markus (1826). Hal ini bukan karena kemurahan hati Belanda, tetapi akibat perpindahan besar-besaran orang-orang Halmahera Timur (Weda, Maba, Patani, dan Gebe), serta orang-orang Tobelo yang menjadi pengikut Sultan Jailolo, ke Seram Utara. Perpindahan ini memaksa Gubernur Ambon mengakui Kesultanan Jailolo ”dalam pengasingan” di Seram Utara.

Setelah terjadi kemelut antara orang-orang Halmahera Timur dengan orang Tobelo di Halmahera Utara, pendukung garis keras Sultan Jailolo ketiga di Seram

Utara (1832), sehingga Kerajaan Jailolo dibekukan. Sultan Hajuddin Syah kemudian ditangkap dan diasingkan ke Batavia, kemudian Cianjur dan meninggal dunia 1946. Dengan wafatnya Hajuddin Syah, berakhir pula riwayat Kesultanan Jailolo julid dua. Belakangan, Dano Hasan Baba berupaya menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo (1876), dengan meminta Pemerintah Belanda mengakuinya sebagai Sultan Jailolo, tetapi permintaan itu ditolak. Dano Hasan diburu serta ditangkap di Weda, kemudian diasingkan ke Pulau Muntok di Sumatera.

E. Ekspansi Teritorial Kerajaan-kerajaan Maluku

Setelah Perjanjian Moti, rakyat di wilayah di Maluku dapat menikmati alam perdamaian dan keamanan lebih dari dua dasawarsa, namun masa ini segera sirna ditelan ambisi Ternate untuk menguasai hegemoni Maluku. Sejak awal berdirinya empat kerajaan, Ternate sudah menunjukkan sikap yang tidak simpatik terhadap tiga kerajaan lainnya, terutama Kerajaan Jailolo. Hal ini karena Jailolo memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas dibanding tiga kerajaan lain, di mana Halmahera Utara terdapat dua kerajaan kecil yang eksis lebih awal telah dikuasai oleh Jailolo.

Sebelum pembatalan perjanjian Moti oleh penguasa Ternate (Syah Alam) didahuli penaklukan atas Makian dan menjadikannya sebagai wilayah Ternate (1332-1334). Sejak Makian terbuka sebagai bandar internasional bagi perdagangan rempah-rempah karena potensi produksi rempah-rempahnya yang sangat besar, membuat Ternate mulai mengincar daerah ini. Setelah Makian, giliran Kepulauan Sula ditaklukkan oleh Kolano Ngolo Macahaya (1350-1357), pengganti Bohiyat atau Abu

Hayat (1347-1350). Kemudian berbagai penaklukkan dilakukan Ternate atas Maluku Tengah, Seram Barat, dan Buru.

Zaman keemasan politik ekspansi Ternate, dalam kenyataannya mencapai puncak pada masa pemerintahan Babullah (1570-1583). Sultan Ternate terbesar ini berhasil memperluas wilayah kesultanannya hingga akhirnya membentang dari Mindanao di utara sampai Bima di selatan, dan dari Makassar di barat hingga kepulauan Banda di timur. Babullah dijuluki penguasa 72 pulau, yang semuanya berpenduduk. Di masa ini, Ternate tampil sebagai kesultanan paling berpengaruh baik dalam politik maupun militer, dan amat disegani oleh kerajaan-kerajaan di belahan timur Nusantara. Menurut sebuah sumber Inggris, Babullah mampu mengerahkan 90.700 prajurit bila diperlukan, dan kontributor prajurit terbesar datang dari wilayah-wilayah seberang laut Ternate. Hingga awal abad ke-17, teritorial Ternate adalah yang terluas di wilayah Timur Indonesia (Amal, 2002).

Berbeda dengan Tidore, yang walaupun wilayah kekuasaannya sangat luas; perolehan wilayah-wilayah taklukan Ternate selalu lewat peperangan. Pada masa-masa awal ekspansi teritorial Ternate dilakukan oleh klan-klan yang menjadi peletak dasar pembentukan kerajaan, kemudian menjadi pendukung perluasannya. Klan-klan ini dikenal dengan *Fala Raha*, terdiri dari klan Tomagola, Tomaito, Limatahu, dan Marsaoli. Di akhir abad ke-14, keluarga Tomaito memimpin sebuah ekspedisi militer ke Kepulauan Sula dan mempersembahkan penguasaannya kepada Kolano Ngolo Macahaya (1350-1357). Keluarga Tomaito sendiri kemudian menciptakan institusi *salahakan* (gubernur) untuk menjalankan pemerintahan atas kepulauan tersebut. Pada

awal abad ke-15, keluarga Tomagola mempersembahkan ke dalam teritorial seberang laut Ternate daerah Maluku Tengah, termasuk Pulau Buru, Amelau, Manipa, Buano, Seram Laut, Nusa Laut, Hoamoal, Saparua dan Kepulauan Ambon.

Prestasi politik dan militer yang mengabadikan nama Babullah sebagai sultan terbesar adalah, keberhasilannya mengusir kekuasaan Portugis keluar dari negerinya (Maluku) untuk selama-lamanya. Ia telah melikuidasi eksistensi kekuasaan Portugis setelah bercokol lebih dari setengah abad. Tidak hanya di pusat kekuasaan Portugis (Ternate), tetapi juga jaringan-jaringannya di Morotai dan Morotia berhasil dibersihkan. Masa pemerintahan Babullah ialah masa yang penuh peperangan. Seperti diketahui bahwa, peperangan selalu membawa penderitaan. Para sultan lain seperti Tidore, Bacan dan Jailolo selalu diliputi kecemasan akan tindakan-tindakan Ternate. Mereka tidak dapat memprediksi keamanan kerajaannya, dan tidak ada jaminan serta kepastian bahwa mereka akan bebas dari serangan Babullah.

Pasca Khairun dan Babullah adalah masa di mana pamor Kesultanan Ternate mulai memudar secara perlahan, tapi pasti. Setelah kedua tokoh kharismatik ini, Ternate tidak lagi memiliki sultan-sultan sekaliber mereka. Keadaan ini lebih diperparah dengan kedatangan VOC Belanda yang ikut menggorogoti kekuasaan dan kedaulatan kesultanan terbesar di Maluku ini. Ternate mulai mengalami masa-masa sulit, baik di bidang politik maupun militer (1652). Sultan Mandarsyah ditekan secara halus untuk menandatangani perjanjian dengan Gubernur VOC (Reinierz), di Batavia. Perjanjian itu menetapkan bahwa Kesultanan Ternate tidak boleh lagi mengangkat

salahakan untuk kawasan seberang lautannya di Maluku Tengah. Ternate juga harus melaksanakan *hongi* (penebangan pohon cengkeh) di daerah-daerah tersebut.

Kerajaan Buton sebagai salah satu daerah taklukan Kerajaan Ternate mulai memusingkan Mandarsyah (1652), di mana tentara Kerajaan Makassar melakukan infiltrasi dan menduduki beberapa pulau di sekitar Buton. Keadaan ini diperburuk dengan pengkhianatan sejumlah besar *bobato* Buton yang memihak Makassar. Kapita Laut Kaicil Ali, beserta pasukannya yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Sanana dan Alifuru Jailolo, dengan susah payah mempertahankan pulau-pulau itu dari serangan Raja Makassar. Usulam Kaicil Ali agar Mandarsyah meminta bantuan Kompeni ditolak, karena Mandarsyah yang permaisurinya seorang puteri Buton; yakin bahwa ia masih memiliki pengaruh cukup kuat pada kenyataannya tidak demikian. Pengaruh Sultan Ternate telah merosot jauh di mata rakyat Buton.

Serangan Makassar yang semakin gencar terhadap Buton, membuat hari-hari kejatuan kawasan ini tinggal dihitung dengan jari. Dengan susah payah Kaicil Ali mencoba menghalau serangan itu, tetapi dalam suatu pertempuran mempertahankan ibukota Buton, Ali gugur di medan laga. Dengan wafatnya Ali, semakin kecil peluang Mandarsyah untuk mempertahankan pulau itu. Ia mengutus Kapita Laut Saidi untuk membangun kembali Buton, dan dalam keadaan putus asa ia menghubungi Kompeni untuk meminta bantuan. Mandarsyah berhasil meyakinkan de Vlaming (Gubernur Kompeni Ambon), akan perlunya bantuan Kompeni menyelamatkan Buton yang tengah sekarat. De Vlaming dan Mandarsyah tiba di Buton (September 1654), namun yang mereka temukan adalah sebuah kenyataan pahit, Raja Buton telah menjalin

persekutuan dengan Makassar, baik rakyat maupun para *bobato* andalan Mandarsyah sebagian besar tidak lagi setia kepada Ternate. De Vlaming sendiri, setelah melihat kenyataan itu, meneruskan pelayarannya ke Makassar.

Dengan lepasnya Buton dari kekuasaan Ternate telah membawa implikasi negatif bagi daerah-daerah kekuasaan lainnya di Sulawesi Utara dan sepanjang pantai timur pulau ini. Kepulauan Sangir Talaud, Gorontalo dan Limboto, Buol, Toli-toli, Inobonto, Moutong, Teluk Tomini, Parigi dan lainnya, memudar loyalitas kepada Kesultanan Ternate. Sibori menyadari benar kenyataan ini dan berupaya memulihkan kesetiaan wilayah-wilayah ini. Karena itu, Sibori mendekati Gubernur Maluku untuk meminta bantuan. Dengan bantuan Kompeni, Ternate menyerang Gorontalo dan daerah pesisir timur Sulawesi untuk memulihkan loyalitas kepada Ternate. Bahkan, pemulihan loyalitas Sangir Talaud diupayakan sendiri tanpa bantuan Kompeni. Untuk sementara, Ternate bisa berpuas diri karena berhasil memuliskan kesetiaan daera-daerah tersebut. Tetapi loyalitas yang berhasil dipulihkan ini tidak setebal atau sekuat di masa kekuasaan Babullah (Amari dan Siokona, 2003).

Abad ke-17 merupakan masa yang paling suram bagi Kesultanan Ternate, kaitannya dengan daerah-daerah taklukkan. Satu demi satu daerah-daerah ini melepas diri, dan di penghujung abad ini sampai awal abad ke-18, daerah seberang laut hanya tersisa Kepulauan Sanana dan Tobungko-Banggai. Kompeni Belanda merupakan salah satu kontributor yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Ternate. Dengan berbagai perjanjian yang dibuatnya dengan Ternate, para Sultan Ternate yang tidak berdaya itu secara halus maupun kasar ditekan untuk menyetujui konsep-konsep yang

di satu pihak mengukuhkan kekuasaan Kompeni, tetapi di lain pihak menempatkan Ternate dalam posisi dilematis serta hampir tidak ada advokasi.

Bertakhtanya Saifuddin sebagai Sultan Tidore (1657-1689) telah membawa implikasi politis yang lebih pragmatis. Saifuddin menyadari bahwa kebijakan non-kooperatif penguasa Tidore sebelumnya terhadap kekuasaan asing harus ditinggalkan jika Tidore mau menjadi kesultanan yang diperhitungkan. Karena itu, Saifuddin dapat menerima kebijakan pemberian hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Kompeni. Ia mengubah sikap oposisi dan non-kooperatif Tidore terhadap VOC yang telah berlangsung selama setengah abad. Saifuddin menyadari supremasi Ternate selama ini. Karena itu, salah satu kebijakannya adalah menjadikan Tidore sebagai kesultanan terkemuka di Maluku, menggantikan Ternate yang tengah surut pamor dan pengaruhnya. Meskipun sampai akhir hayatnya Saifuddin tidak mampu mewujudkan impiannya untuk merebut hegemoni Maluku, tetapi atas kepribadiannya yang sangat menarik, Saifuddin sangat dicintai rakyat Tidore.

Setelah Almansur (1512-1526), Saifuddin adalah salah satu Sultan Tidore terbesar dalam abad ke-17. Setelah Saifuddin, Tidore memiliki sultan pengganti yang lemah. Akibatnya, pamor Tidore yang dibangun Saifuddin mulai merosot tajam dan mengalami kemunduran yang gawat. Wilayah Kesultanan Tidore di Halmahera Timur bergolak (1716). Rakyat Weda, Patani, Maba. Bicoli, dan Gebe memberontak karena beratnya beban upeti. Mereka diwajibkan mempersembahkan ambar kepada Sultan Tidore yang sulit diadakan. Rakyat Tidore di wilayah ini menyatakan “Kami siap dibunuh, sebab tidak mungkin mendapatkan ambar.” Pemberontakan ini juga

dimanfaatkan oleh Ternate, untuk kepentingan politiknya dalam bernegosiasi. Ketika para pemberontak menghadap Sultan Ternate, memintanya untuk menerima mereka sebagai kawula Kesultanan Ternate, serta bersedia di tempatkan di wilayah kekuasaan Ternate. Sultan menerima mereka dengan kebesaran, kemudian mereka ditempatkan di Kayoa, Gane dalam, Foya, Kao, dan Galela. Enam tahu kemudian, setelah tercapai persetujuan antara Ternate dan Tidore yang difasilitasi Kompeni (1722), mereka direlokasi ke tempat asalnya. Namun, perdamaian antara rakyat yang memberontak dengan Sultan Tidore baru tercapai (1728).

Puncak keterpurukan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Kamaluddin (1784-1797). Sultan yang gemar berjudi ini terpaksa melarikan diri ke Ternate untuk menghindari penyerbuan Pangeran Nuku. Kaicil Nuku yang berhasil meloloskan diri dari Tidore, mendirikan markas besar perlawanannya di antara Patani dan Weda. Ia mengirim pembantu-pembantunya ke Maba, Seram Timur, Kepulauan Raja Ampat, serta Papua untuk mencari dukungan. Nuku juga merekrut orang-orang Mindanao yang ada di Patani. Kepada para pembantunya, Nuku menginstruksikan agar mengontak orang-orang Spanyol dan Inggris jika bertemu di perairan Maluku, membantunya melikuidasi kekuasaan Kompeni. Nuku memproklamasikan dirinya sebagai Sultan Tidore (1780), dan menyatakan kesultanannya sebagai sebuah negara merdeka yang lepas dari kekuasaan Kompeni Belanda.

Setelah berjuang beberapa tahun, Nuku memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang. Ia berhasil membebaskan kesultanannya dari kekuassan Belanda dan mengembalikan pamornya. Di penghujung abad ke-18 dan permulaan abad ke-19

adalah era keemasan Tidore di bawah Nuku. Ada empat konsep politik yang ingin diwujudkan Nuku. *Pertama*, mempersatukan seluruh wilayah Kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh. *Kedua*, memulihkan kembali empat kesultanan Maluku. *Ketiga*, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kerajaan Maluku. *Keempat*, mengenyahkan kebuasan dan penjajahan asing dari Maluku.

Bagi Tidore sendiri, keempat gagasan politik Nuku telah dijalankan dengan baik, meskipun belum maksimal (gagasan ketiga dan keempat). Nuku berhasil menghidupkan jiwa Kesultanan Tidore dengan kembali menguasai seluruh wilayah Tidore seutuhnya. Ia juga berhasil menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo, sehingga untuk pertama kalinya dalam jangka waktu yang relatif lama, Maluku telah berdiri di atas empat pilar (kerajaan) seperti di masa awal kelahirannya. Selanjutnya, ia juga berhasil menciptakan persekutuan tiga dari empat kerajaan Maluku (Tidore, Bacan, dan Jailolo) kecuali Ternate. Sementara terusirnya Belanda untuk sementara waktu dari wilayah kekuasaan Tidore merupakan keberhasilan Nuku yang lain. Pada konteks ini, keberhasilan Nuku dapat dibandingkan dengan keagungan Babullah yang telah mengenyahkan Portugis di bumi Maluku.

Setelah wafatnya Nuku (1805), sejarah lama Tidore kembali berulang. Perebutan kekuasaan oleh pengganti-pengganti Nuku dan campur tangan pemerintah Belanda dalam suksesi Tidore, menyebabkan pamor Tidore terpuruk kembali menjadi kesultanan yang lemah. Berselang satu tahun wafatnya Nuku, Belanda merampas kembali benteng-benteng di Tidore. Diselingi kekuasaan dan pemerintahan Inggris antara (1810-1816), Tidore akhirnya kembali dalam kekuasaan Belanda, ketika Sultan

Ahmad Mansur bertakhta di Tidore (1822), demikian juga Ternate harus menerima perjanjian bahwa di seluruh Maluku (Utara) akan dibentuk keresidenan di mana Ternate, Tidore, dan Bacan beserta seluruh daerah taklukannya dikukuhkan dalam satu Keresidenan Maluku.

Sejak 1800 hingga 1803, Maluku di bawah pemerintahan Inggris dan menjadi sebuah keresidenan, Residennya H. Weber berkedudukan di Ternate. Tahun 1803, Inggris menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda, kemudian Belanda mengembalikannya kepada Inggris (1810) di bawah pimpinan Kapten Tucker. Kekuasaan Inggris yang kedua ini berlangsung dari 1810 sampai 1817, dan setelah itu diserahkan kembali kepada Belanda untuk seterusnya hingga pendudukan Jepang. Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris dan sebaliknya, dari Inggris ke Belanda, terjadi dua kali dalam waktu cukup singkat, tidak menimbulkan kesulitan berarti bagi Maluku, baik secara politis maupun sosio-ekonomik.

Pembubaran VOC atau Kompeni (1799), karena merupakan badan usaha niaga, praktis hanya berpengaruh bagi Maluku di bidang ekonomi tetapi tidak begitu besar di bidang pemerintahan. Namun, pembubaran tersebut memiliki pengaruh cukup signifikan di bidang ketatanegaraan dengan program pemerintah Belanda untuk melakukan reorganisasi atasnya. Dengan bubarnya VOC seharusnya monopoli juga ikut dihapuskan, sebagaimana halnya dengan penghapusan ekstripasi. Tetapi, pemerintah Belanda tetap mempertahankan monopoli sampai beberapa dekade kemudian, hingga akhirnya dihapus (1864). Sementara itu, konon diketahui bahwa sejak 1770 orang-orang Perancis telah menyelundupkan sejumlah bibit atau anakan

cengkeh dari Ambon dan Ternate ke Pulau Mauritius serta ditanamnya di sana. Dari Mauritius, orang-orang Inggris kemudian membawa bibitnya (1800) ke Zanzibar. Antara 1801 hingga 1803, Inggris juga membawa sejumlah anakan cengkeh Maluku ke Penang. Sampai dewasa ini, kedua bekas koloni Inggris itu masih menghasilkan cengkeh, yang di Indonesia dikenal sebagai cengkeh "Zanzibar."

Pertengahan abad ke-19 perdagangan bebas mulai berkembang. Pedagang-pedagang besar Eropa (Belanda) mulai beroperasi. Perdagangan lokal rempah-rempah mulai ditujukan untuk ekspor. Kerajaan-kerajaan Maluku yang selama ini memegang perdagangan lokal rempah-rempah, tidak lagi memiliki hak tersebut karena dialihkan Belanda kepada pedagang-pedagang swasta (kerajaan dilarang berdagang). Pelabuhan Ternate dibuka dan menjadi pelabuhan niaga utama di Maluku. Orang-orang Cina mulai membuka toko serta bergerak dalam usaha hasil bumi dan hasil laut, mulai di kota-kota besar hingga ke kampung-kampung.

Rakyat Gamhoku (Tobelo) melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Laba, seorang mantan pimpinan penyelundup (1855). Akibatnya, Pemerintah Belanda membumihanguskan ibukota Tobelo, dan memindahkan penduduknya ke Gamsungi, sekaligus menjadikannya sebagai ibukota distrik Tobelo. Abad ke-19, diwarnai juga dengan tindakan perompakan orang-orang Tobelo, Galela dan Loloda, juga orang-orang Weda, Patani dan Maba yang cukup memusingkan Belanda. Perompakan ini meliputi daerah yang luas, muali dari Maluku Tengah, yang oleh orang-orang Weda, Patani dan Maba, sampai ke pantai timur Sulawesi, Jawa Timur dan Nusa Tenggara, oleh orang-orang Tobelo dan Galela. Para perompak ini bahkan bekerjasama dengan

para perompak Mindanao dan Balangingi dari Philipina Selatan. Selain merampok harta benda, operasi kawanan perompak ini ditujukan untuk menangkap penduduk dan dijadikannya sebagai budak belian.

BAB V

AKAR KEKERASAN DAN KONFLIK DI MALUKU UTARA

Sejak terbentuknya empat kerajaan yang berasaskan Islam di Maluku Utara (Moloku Kie Raha), akar kekerasan dan konflik mulai tampak. Hal ini karena sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara setelah Majapahit, proses selanjutnya terutama dalam kaitan dengan penyebaran Islam di Maluku dan Maluku Utara khususnya, berhadapan dengan kerajaan-kerajaan lokal yang eksis lebih awal atau komunitas-komunitas masyarakat yang ketika itu masih kafir, di samping ambisi masing-masing sultan dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan dan perebutan sumberdaya alam. Kondisi ini diperparah dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa, yang ingin monopoli perdagangan rempah-rempah (cengkeh), mengintervensi kekuasaan serta penyebaran misi "Kristenisasi" di Maluku dan Maluku Utara.

A. Proses Masuknya Islam di Maluku Utara

Proses awal masuknya Islam di Indonesia sangat *variatif* antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa sumber menjelaskan bahwa, masuknya agama Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan, demikian pula kerajaan-kerajaan serta daerah-daerah yang didatangi mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berbeda-beda. Demikian halnya, masuknya Islam di Maluku Utara menurut beberapa informan kunci memiliki versi dan pandangan yang bervariasi, sesuai dengan realitas dan fakta sejarah yang ada.

Masuknya agama Islam di Maluku Utara menurut beberapa sumber, adalah berawal dari Makian melalui Noh bin Djafar Sadik dari Arab (Bagdad), seorang Muballiq besar yang tiba di Makian sekitar abad ke-11. Kepastian tentang kedatangan Noh bin Djafar Sadik, hingga kini masih dalam perdebatan. Namun, bukti sejarah seperti “Makam beliau” yang oleh masyarakat setempat dijadikan sebagai “Keramat” terdapat di Limau Dolik (tempat pertama beliau tiba), sedangkan isterinya Boki Nur Safa di Dukon, tidak jauh dari Limau Dolik juga sebagai “Keramat.” Bukti lain yang menegaskan bahwa, masuknya Islam di Maluku Utara bermula di Makian, adalah Mesjid Tahani yang diperkirakan lebih tua 161 tahun dengan Mesjid Sultan Ternate. Kedua Mesjid ini memiliki model dan konstruksi yang sama, karena dirancang oleh tokoh yang sama sebagai simbol penyebaran Islam di Maluku Utara.

Kedatangan dan penyebaran Islam di Maluku Utara memiliki aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Demikian pula daerah-daerah lain di Indonesia. Situasi dan kondisi politik Majapahit di pulau Jawa lemah karena perpecahan dan perang di kalangan keluarga raja dalam perebutan kekuasaan, maka kedatangan dan penyebaran Islam makin dipercepat. Bupati-bupati pesisir karena telah merasakan kebebasannya dari pengaruh kekuasaan raja-raja Majapahit, sehingga makin lama makin yakin akan kekuasaannya sendiri dalam pengaruh pertumbuhan kepentingan ekonomi daerah-daerahnya. Daerah otonomi di pesisir merasa merdeka justru karena kelemahan pendukung-pendukung kerajaan yang sedang mengalami keruntuhan. Perjuangan antara kota-kota perdagangan di pesisir dengan daerah-daerah agraris di pedalaman makin meningkat. Kebebasan ekonomi dan politik mempunyai tujuannya

sendiri dan melalui bupati-bupati pesisir yang memeluk agama Islam itulah faktor keagamaan merupakan kekuatan baru dalam proses perkembangan masyarakat ketika itu, termasuk di daerah Maluku dan Maluku Utara.

Menurut J.C. van Leur, mengatakan bahwa karena pertentangan antara keluarga bangsawan dengan kekuasaan pusat Majapahit serta aspirasi-aspirasi keluarga bangsawan untuk berkuasa sendiri atas negara, maka Islamisasi menjadi alat politik. Kedatangan Islam ke Indonesia bagian Timur (Maluku Utara) tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalulintas pelayaran Internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14 Islam datang di daerah Maluku. Raja Ternate ke-12, Molomateya (1350-1357), bersahabat dengan orang Arab yang memberikan petunjuk bagaimana pembuatan kapal-kapal, tetapi agaknya bukan dalam kepercayaan (Kartodirdjo, 1975).

Pada masa pemerintahan Marhum di Ternate datanglah seorang datu dari Jawa bernama Maulana Husain yang menunjukkan kemahiran menulis huruf Arab yang ajaib di dalam Qur’an dan sangat menarik hati Marhum dan orang-orang di Maluku Utara. Kemudian diminta oleh mereka agar Maulana Husain mengajarkan huruf-huruf yang indah itu. tetapi sebaliknya permintaan Maulana agar mereka tidak hanya akan mempelajari huruf Arab saja melainkan juga mereka harus mempelajari agama Islam. Demikianlah Maulana Husayn berhasil meng-Islamkan banyak orang-orang di daerah ini (Paramita, 1980).

Raja yang dianggap benar-benar memeluk agama Islam ialah Zainal Abidin (1486-1500), yang belajar agama Islam di Madrasah Giri. Ketika berada di Jawa; ia

terkenal sebagai *Raja Bulawa* (artinya raja cengkeh), karena membwa cengkeh dari Maluku (Ternate) untuk persembahan. Sekembalinya dari Jawa, membawa muballigh yang bernama Tuhubahahul. Menurut '*Hikayat Tanah Hitu'* yang ditulis oleh Rijali bahwa, yang mengantar Zainal Abisin ke Giri ialah Perdana Jamilu Hitu. Hubungan Ternate, Hitu dengan Giri di Jawa Timur sejak itu sangat erat. Selain itu, hubungan perdagangan antara Maluku, Jawa dan Malaka juga telah diberitakan oleh Tome' Pires, dan Antonio Galvao. Kedua orang Portugis itu menceriterakan pula tentang perkiraan masuknya Islam di Maluku. Menurut Tome' Pires, kapal-kapal dagang dari Gersik adalah milik Pate Cucuf (Raja Ternate yang telah memeluk Islam, bernama Bem Acorala), dan hanyalah Raja Ternate yang disebut 'sultan' sedang yang lain digelari raja. Lebih lanjut dikatakan bahwa, ia sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi Raja Tidore, yaitu Raja Almansur.

Sumber lain menyebutkan bahwa, di Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Bacan sudah terdapat masyarakat Muslim. Di daerah Maluku, raja yang mula-mula memeluk Islam menurut Tome' Pires kira-kira sejak 50 tahun yang lalu, berarti antara tahun (1460-1465). Tahun tersebut dapat dikatakan bersamaan dengan berita Antonio Galvao yang mengatakan bahwa, di daerah ini dimulai 80 atau 90 tahun yang lalu. Kalau dihitung dari waktu Galvao di sana sekitar (1540-1545) menjadi (1460-1465). Hubungan antara Maluku dan Giri seperti telah disebutkan di atas, terus berlangsung sampai abad ke-17. Menurut catatan sejarah, Peci dari Giri yang diberikan kepada masyarakat Hitu dianggap magis dan sangat dihormati serta ditukar dengan cengkeh. Selanjutnya dalam waktu yang relatif lama anak-anak orang terkemuka meneruskan

dan menerima petunjuk-petunjuk dari madrasah (Pesantren) Giri. Jadi pada masa itu ikatan politik dan ekonomi antara Maluku dan Jawa terus hidup. Demak dengan Japara merupakan persekutuan Hitu dalam memerangi Portugis ketika mereka di Lei Timur (Ambon) dalam mengenalkan agama Kristen (Lairissa, 1996).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa, situasi politik ketika kedatangan Islam di kepulauan Maluku tidak seperti di Jawa. Di sana orang-orang Muslim tidak menghadapi kerajaan-kerajaan yang sedang mengalami perpecahan karena perebutan kekuasaan negara. Mereka datang dan mengembangkan Islam dengan melalui perdagangan, dakwah dan perkawinan. Waktu kedatangan Tome' Pires dan Galvao ke daerah itu masih banyak masyarakat yang belum Islam. Mereka percaya akan pengaruh nenek moyangnya. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat yang dipimpin oleh ketua-ketua kampung, yang disebut *sangaji* atau *bobato*. Tetapi, kata Antonio Galvao, sering pula terjadi perkelahian antara suku itu. pada waktu Galvao ada di Maluku, ia menghadapi pula persaingan antara raja-raja Muslim sendiri, yaitu Ternate dan Tidore.

Perluasan kerajaan Islam di Maluku dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Khairun. Proses Islamisasi Maluku juga menghadapi persaingan politik dan monopoli diantara bangsa-bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris). Persaingan di antara pedagang-pedagang asing itu, dapat menyebabkan persaingan antara kerajaan-kerajaan Islam sendiri di Maluku, terutama empat kerajaan besar yang disebut "Moloku Kie Raha," yang pada akhirnya kekuasaan politik dan ekonomi jatuh ketangan Kompeni Belanda.

Pada masa kedatangan dan penyebaran Islam di Maluku dan Maluku Utara khususnya, terdapat beranekaragam suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi dan sosial budaya. Suku bangsa yang bertempat tinggal di daerah-daerah pedalaman, ditinjau dari sudut pandang antropologi-budaya belum banyak mengalami percampuran jenis-jenis bangsa dan budaya dari luar seperti India, Persia, Arab, dan Eropa. Struktur sosial, ekonomi dan budayanya agak statis dibanding dengan suku bangsa yang mendiami daerah pesisir. Mereka yang berdiam di pesisir lebih-lebih di kota-kota pelabuhan, menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial-budaya yang lebih berkembang, disebabkan karena percampuran dengan bangsa dan budaya dari luar. Di samping itu, masa-masa pertumbuhan Islam di Indonesia khususnya di Jawa, dikenal Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang mendirikan pesantren atau pondok di Ampel Denta, Surabaya, Sunan Giri terkenal dengan pesantrennya sampai ke daerah Maluku, bahkan beberapa kyai dari Giri diundang ke Maluku Utara untuk menjadi guru-guru agama. Mereka ada yang dijadikan khatib, modim, dan sebagainya dalam masyarakat dengan upah cengkeh.

Masa kedatangan dan penyebaran Islam, di Indonesia terdapat negara-negara yang bercorak Indonesia-Hindu. Di sumatera terdapat kerajaan Sriwijaya dan Melayu, di Jawa terdapat Majapahit, Sunda, dan Pajajaran, di Kalimantan terdapat kerajaan Negara-Daha dan Kutai. Di Bali kerajaan yang bercorak Hindu itu masih terus sampai abad ke-20. waktu-waktu itu di beberapa daerah lainnya masih terdapat banyak kerajaan-kerajaan yang sedikit atau samasekali tidak mendapat pengaruh dari kerajaan-kerajaan Hindu tersebut. Kerajaan-kerajaan semacam itu di Sulawesi ialah

Gowa, Wajo, Bone dan lain-lain. Seperti diberitakan oleh Tome' Pires (1512-1515) di sana lebih kurang ada 50 kerajaan yang subur tetapi masih berhala.

Berdasarkan berita Tome' Pires di atas, dapat diketahui bahwa di daerah Sumatera, selain banyak kerajaan yang sudah Islam juga banyak yang belum Islam (*cafre*). Mungkin diantara kepercayaan-kepercayaan tersebut bukan pengaruh Hindu. Di daerah kepulauan Maluku dan Maluku Utara terdapat kelompok-kelompok yang belum Islam, tetapi mungkin pula banyak diantaranya tidak memperoleh pengaruh budaya Hindu. Tome' Pires menyebutkan bahwa di Banda sepanjang pantai terdapat pedagang-pedagang Muslim, tetapi di pedalamannya banyak yang menganut berhala, dan mereka tidak mempunyai kerajaan tetapi desa-desa yang dipimpin oleh *cabila* dan orang tua-tua. Struktur pemerintahan seperti telah dikemukakan Tome' Pires diperkuat oleh Antonio Galvao yang menyebutkan bahwa di Maluku, setiap tempat merdeka dengan daerah dan batas-batasnya sendiri. Mereka hidup bersama dalam kelompok-kelompok masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Masyarakat-masyarakat tersebut diperintah oleh orang tua-tua yang dianggap lebih baik daripada lainnya.

Menyimak uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa meskipun sejak abad-abad pertama hingga lebih kurang akhir abad ke-15 di Indonesia terdapat beberapa kerajaan yang menerima pengaruh Hindu/Budha, namun pengaruh tersebut hanyalah merupakan pengaruh yang tipis dan penghalus semata-mata. Karena itulah dari sudut pandang kebudayaan, istilah Indonesia-Hindu mungkin lebih tepat untuk menyebut masyarakat kerajaan-kerajaan yang mendapat pengaruh Hindu-Budha yang muncul

dan berkembang di beberapa bagian Indonesia sejak abad-abad pertama sampai akhir abad ke-15 itu. Dengan demikian, pengaruh kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India (golongan Brahmana) atau pendeta-pendeta Hindu/Budha lebih masuk kepada elite dan bangsawan daripada masyarakat umum.

Antonio Galvao, menyebutkan bahwa di daerah Maluku pada abad-abad kedatangan dan penyebaran Islam di daerah itu masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membuat patung-patung untuk penghormatan terhadap orang tua dan nenek moyangnya. Patung-patung tersebut dibuat dari kayu atau batu dengan muka orang laki-laki, anjing, kucing dan binatang-binatang lainnya yang mereka suka. Memuja badan-badan langit, matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dari berita itu jelaslah bahwa pemujaan yang digambarkannya bukanlah Hindu-Budha, tetapi kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang dan kepada tenaga-tenaga alam. Kepercayaan tersebut juga masih terdapat pada suku-suku di Kalimantan antara lain: pada upacara *Tiwah*. Jelas bahwa kepercayaan Indonesia pra-Hindu yang diteruskan masa-masa Indonesia-Hindu. Perhitungan waktu yang telah dikenal oleh bangsa-bangsa Indonesia sebelum pengaruh Hindu, yaitu mengenai hari pasaran yang terdiri dari lima hari masa Indonesia-Hindu digabungkan dengan perhitungan tujuh hari dalam satu minggu itu, seperti kita ketahui dari istilah *Pncawara* dan *Saptawara* yang dipergunakan dalam prasasti-prasasti.

Para ahli yang pernah membahas masalah kedatangan Islam di Indonesia masih berbeda-beda. Sebagian berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7, dan sebagian lagi mengatakan

Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, terutama di Samudra Pasae. Ahli-ahli yang mengatakan abad ke-7, terutama mendasarkan diri kepada berita Cina dari T'ang yang mengatakan adanya orang-orang Tashih yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima (674), karena ternyata pemerintahan di Holing itu sangat kerasnya. Sebutan Tashih dalam berita itu ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Pada masa-mas kemudian sebutan Ta-shih juga didapatkan dari berita Jepang yang ditulis aekitar tahun 748 M, yang menceritrakan perjalanan pendeta Kanshin. Diceritrakan pula pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal Po-sse dan Ta-shih K-uo. Menurut Rita-Rose di Meglio istilah Po-sse dapat pula menunjuk jenis bangsa Melayu, tetapi Ta-shih hanya untuk menunjukkan orang-orang Arab dan Persia, bukan untuk orang-orang Muslim India.

Sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia abad ke-13 itu didasarkan kepada dugaan akibat keruntuhan dinasti Abbasiah oleh Hulagu tahun 1258. kemudian diperkuat pula oleh bukti berita Marco Polo tahun 1929, berita ibn Battutah abad ke-14 serta nisan-nisan makam Sultan Malik as Saleh tahun 1297. Diantara ahli-ahli itu ada yang juga menguatkan bahwa kedatangan Islam, sehingga terbentuknya masyarakat Muslim di Indonesia sejak abad ke-13 ialah berdasarkan kepada masa arus penyebaran dan kedatangan ajaran tasawwuf.

Menyimak uraian-uraian di atas jelaslah bahwa awal mula masuknya Islam di Indonesia belum ada kesepahaman, masih perlu penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam berdasarkan bukti-bukti yang ada. Namun, studi ini mencoba untuk mengangkat bukti-bukti yang menunjukkan awal mula masuknya Islam, khususnya di

daerah Maluku Utara. Sehubungan dengan itu, dalam studi ini perlu dipisahkan tiga pengertian, yaitu: kedatangan, proses penyebaran, dan perkembangan Islam. Karena itu, abad ke-7 M boleh jadi dapat dipandang sebagai abad permulaan kedatangan dan hubungan antara pedagang-pedagang Muslim dengan sebagian kecil daerah dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hubungan pelayaran dan perdagangan dengan negeri-negeri di benua Asia bagian Timur dan Tenggara melalui beberapa tempat pelabuhan di pesisir selatan Malaka justru pada abad ke-7 dan 8 ada di bawah pengawasan Sriwijaya. Kedatangan orang-orang Muslim itu belum dipasatikan, apakah mereka disamping berhubungan dagang juga telah melakukan Islamisasi melalui dakwah atau tidak. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kelompok masyarakat Ta-shih di atas telah ditafsirkan sebagai orang-orang Arab di daerah kekuasaan Sriwijaya pada abab ke-7 itu. Apabila sejak itu proses Islamisasi telah meluas, masalahnya nanti setelah 5 atau 6 abad kemudian baru muncul bentuk kerajaan yang bercorak Islam, yakni Samudra Pasai sesuai fakta sejarah yang lebih konkrit.

Pendapat para ahli tentang negeri asal serta golongan-golongan masyarakat Muslim yang mengenalkan agama Islam kepada bangsa Indonesia juga berbeda-beda. Ahli-ahli yang memberi tafsiran Ta-shih seperti dikatakan dalam berita Cina abad ke-7, adalah orang-orang Arab mengambil kesimpulan bahwa orang-orang Muslim yang datang ke Indonesia itu adalah langsung dari negeri Arab. Tetapi sebagian ahli, diantaranya C. Snouck Horgronje, berpendapat bahwa orang-orang Islam yang datang dan menyebarkan agamanya pertama-tama di Indopnesia ialah tidak langsung dari

negeri Arab, melainkan melalui orang-orang Islam dari Gujarat (India). Bukti-bukti hubungan langsung antara Indonesia dan Arab, yaitu contoh hubungan utusan dari Mataram, Banten ke Mekkah pada pertengahan abad ke-17.

Pendapat tersebut didasarkan pada unsur-unsur Islam di Indonesia yang menunjukkan persamaannya dengan di India. Ceritrea-ceritera populer dalam bahasa di Indonesia mengenai Nabi dan pengikut-pengikut pertamanya tidak hanya jauh dari nilai sejarah tetapi juga jauh dari ceritra-ceritra Arab, dan aslinya kembali terdapat di India. Dikatakan pula oleh sarjana Belanda itu bahwa persamaan dengan ceritra-ceritra di atas beberapa kebiasaan Muslim di Indonesia menunjukkan kebiasaan-kebiasaan Syi'ah di pantai Malapar dan Koromandel, dan mereka penganut Sunnah Ortodo yang dalam hukum tergolongan "mazhab Syi'ah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian kepurbakalaan J.P. Moquette mengenai nisan kubur dari Samudra Pasai yang memuat nama Sultan Malik as-Saleh yang berangka tahun 696 H (1297 M), dan beberapa nisan lainnya dari abad-abad berikutnya yang dibuat dari marmer. Ia berpendapat bahwa beberapa nisan tersebut menunjukkan pembuatan yang berasal dari satu pabrik di Cambay-Gujarat. Beberapa ahli lainnya bila membicarakan kedatangan dan asal Islam ke Indonesia itu mengikuti pendapat kedua ahli tersebut di atas. Meskipun demikian ketidak-sesuaian pendapat selalu ada, yaitu kecuali dari ahli-ahli yang berpendapat bahwa asal muasal Islam yang datang ke Indonesia dari Arab seperti telah dikemukakan terdahulu. Karena itu, S.Q. Fatimi berpendapat bahwa orang-orang Muslim pembawa Islam ke

Indonesia berasal dari Bengala. Pendapat ini didasarkan kepada berita Tome' Pires serta aliran tasawwuf yang masuk ke Indonesia dan Malaysia.

Apabila pembawa Islam ke Indonesia pada masa-masa awal itu adalah, golongan pedagang, maka jelaslah bahwa yang menjadi pendorong utama ialah faktor ekonomi-perdagangan. Hal ini sesuai dengan masa perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional antara negeri-negeri di bagian Barat, Tenggara dan Timur Asia. Kedatangan pedagang-pedagang Muslim seperti halnya para pedagang lainnya ke Indonesia ialah dalam upaya mencari keuntungan dari perdagangan hasil-hasil bumi ketika itu, terutama rempah-rempah (cengkeh dan pala) di mana di Eropa sangat laku yang dapat membawa keuntungan yang berlimpah.

Pengaruh rempah-rempah, para pedagang dari berbagai negara berlomba-lomba untuk mendapatkan monopoli perdagangan di Indonesia, khususnya di Maluku (Ternate, Ambon, dan Banda). Para pedagang asing terutama Eropa berusaha mencari simpati dari masyarakat terutama para raja, para bangsawan yang memegang peranan dalam dunia perdagangan. Para raja dan golongan bangsawan seringkali menjadi pemilik saham-saham dan kapal-kapal di mana mereka mendapat keuntungan bagi hasil. Kecuali itu, para pedagang yang menjadi pembawa dan penyebar Islam ke Indonesia mungkin disertai pula oleh beberapa muballigh yang pekerjaannya lebih khusus untuk mengajarkan agama. Turut-sertanya muballigh-muballigh atau guru-guru agama tentu lebih memudahkan proses Islamisasi. Di samping itu, guru-guru agama atau muballigh-muballigh dapat menyelenggarakan pesantren-pesantren guna membentuk kader-kader yang kelak menyebarluaskan Islam.

Di samping golongan-golongan tersebut di atas, ada pula golongan yang lebih khusus peranannya dalam bidang tasawwuf. Kedatangan golongan Sufi tersebut ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13. Penyebaran Islam melalui tasawwuf lebih mudah diterima oleh bangsa Indonesia terutama untuk orang-orang yang sebelumnya telah mempunyai dasar-dasar ajaran ke Tuhanan. Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa pembawa Islam itu seolah-olah hanya orang-orang dari luar. Sesungguhnya tidak demikian, sejak Samudra-Pasai dan Malaka menjadi pusat kerajaan Islam serta menjalin hubungan dengan banyak daerah-daerah lainnya di Indonesia, orang-orang Indonesia dari pusat-pusat Islam itu menjadi pembawa dan penyebar agama Islam ke daerah-daerah kepulauan Indonesia. Selain itu, pada abad ke-16/17 ketika hubungan antara Indonesia dengan Mekah sangat lancar, beberapa orang Indonesia yang bermukim di Mekah dan sekembalinya ke tanah air mereka membawa faham-faham atau ajaran-ajaran dalam Islam yang mereka pelajari selama bermukim di Mekah untuk kemudian dikenalkan kepada kawan-kawan, keluarga dan sahabatnya di Indonesia.

1. Pengaruh Islamisasi di Maluku Utara

Sejak abad ke-16 Kesultanan Ternate memasuki babak baru dalam sejarah perkembangannya, yaitu babak perjuangan kebangsaan melawan dominasi bangsa-bangsa Barat di Maluku. Sejarah kebangsaan Ternate merupakan ungkapan semangat *patriotisme* yang dibimbing oleh “solidaritas Islam” yang telah ditanam dan dipupuk selama tiga abad sebelumnya (abad ke-13 dan ke-14). Terbentuknya empat kerajaan

Maluku (Moloku Kie Raha) melalui *Moti Salen Verbon* memberikan catatan sejarah terbentuknya miniatur konsep Negara Kesatuan di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Kehadiran Kolonialisme menggoreskan catatan berharga, Ternate sebelum Batavia sempat menjadi ibukota dan menampung empat Gubernur Jenderal Belanda, termasuk *Jan Pieter Zoon Coen*. Bekas benteng-benteng Portugis dan Spanyol tersebar di pulau Ternate dan Tidore seperti kita saksikan dewasa ini.

Kerajaan tertua di Maluku adalah Jailolo, karena penduduk Ternate, Tidore, dan Bacan lebih banyak sehingga penguasa dari ketiga daerah ini lebih menonjol. Pada permulaan abad ke-14 Ternate maju pesat karena perkembangan perdagangan rempah-rempah terutama dijalankan oleh orang Jawa dan Melayu yang datang ke kepulauan Maluku, khususnya Ternate dan Tidore. Perdagangan rempah-rempah yang dijalankan oleh orang-orang Ternate, Jawa, dan Melayu menjadi lebih ramai dengan masuknya orang-orang Cina dan Arab, di mana di antara pedagang-pedagang ini menetap secara turun-temurun.

Kemajuan yang dialami Ternate menimbulkan iri hati kerajaan-kerajaan sekitarnya, khususnya Tidore, Bacan dan Obi. Akibatnya, sering timbul perang antara mereka di satu pihak dan Ternate di lain pihak. Kondisi ini kemudian diselesaikan melalui perundingan empat kerajaan di Pulau Moti, untuk mencapai suatu persetujuan sehingga tidak lagi timbul perang dan iri hari antara mereka. Hasil perundingan ini kemudian dikenal dengan “Persekutuan Moti.” Selain itu, diputuskan bahwa Raja Jailolo akan menjadi raja utama, karena ia merupakan raja yang tertua. Raja Ternate menjadi raja yang kedua karena pentingnya, kemudian Tidore yang ketiga dan Bacan

yang keempat. Namun hal ini tidak berlangsung lama, di mana hasil perundingan tersebut berubah pada akhir abad ke-15.

Sultan Ternate kemudian dapat menempatkan diri sebagai raja utama di Maluku. Orang-orang yang datang ke daerah ini bertambah banyak, di samping para pedagang yang telah disebut di atas (orang-orang Cina dan Arab). Melalui kontak dagang khususnya rempah-rempah (cengkeh dan pala) membuat Ternate mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini karena Ternate didatangi berbagai suku, yang berarti jumlah penduduknya semakin banyak sekaligus mengakui kekuasaan Ternate, yang pada gilirannya Kesultanan Ternate semakin besar dan kuat. Dengan menetapnya orang-orang Melayu, Jawa dan Arab di Ternate dan sekitarnya, maka penyebaran agama Islam pun berkembang pesat di wilayah ini.

Proses Islamisai yang dilakukan para pedagang di Maluku Utara, terutama dalam pergaulan dan pembaruan antara orang Islam pendatang dan pribumi lokal, diikuti dengan perkawinan yang telah memberikan pengaruh cukup signifikan dalam sejarah penyebaran Islam di Maluku. Kombinasi keseluruhan cara semacam itu telah dilakukan dengan baik di Maluku, karena iklim pemerintahan para penguasa di kawasan ini cukup kondusif. Masalah paling kontroversial tentang islamisasi Maluku, adalah kapan tepatnya agama Islam mulai masuk di kawasan ini. Para penulis sejarah Maluku, baik lokal, nasional, maupun asing merujuk sumber-sumber portugis yang menetapkan tahun pelantikan Sultan Zainal Abidin dari Ternate yakni 1486 sebagai permulaan tarikh Islam di Maluku. Dasar penetapan tahun ini sebagai awal masuknya Islam di Maluku adalah ketika Zainal Abidin Bertakhta, menggunakan gelar “Sultan”

yang islami, dan melepaskan titel tradisional “kolano,” yang telah digunakan raja-raja sebelumnya. Penentuan peristiwa besar dengan mengaitkannya pada penggunaan gelar ini perlu diberi beberapa catatan :

Pertama : Thome Pires seorang ahli farmasi Portugis yang tiba di Malaka setelah kerajaan itu jatuh ke tangan Potugis (1511) dan penulis buku terkenal, *suma Oriental: An Account of the East from the Red Sea to Japan*, yang di tulis di Malaka dan diselesaikan di India (1512-1515), menyatakan bahwa menurut orang-orang Maluku, yakni para pedagang Ambon dan Banda, Islam masuk di Maluku 50 tahun lalu. Tome Pires berada di Malaka (1512). Dengan demikian, Maluku telah menerima Islam 50 tahun sebelum penaklukan Malaka oleh Portugis. Islamisasi Maluku terjadi kira-kira (1459-1460), dua puluh tahun lebih awal pemberitaan sumber-sumber Portugis, yang mematok tahun 1486, saat wafatnya Kaicil Marhum dan bertakhtanya Zainal Abidin. Kaicil Marhum, sebelum wafat, telah memeluk Islam, dan dialah Kolano Ternate pertama yang jenazahnya dipelihara menurut syariat Islam.

Kedua : De Clerq melaporkan bahwa pada 1334 dan 1372 telah naik takhta di Tidore dua Kolano, yaitu Nuruddin dan Hasan Syah. Sekalipun keduanya tidak menggunakan gelar “Sultan”, tetapi gelar “Syah” (sultan, raja) yang disandang Hasan berasal dari titel Kaisar Persia setelah memeluk agama Islam. Gelar semacam ini juga digunakan raja-raja Malaka dan Aceh setelah memeluk agama Islam. Sultan Malaka, Iskandar Syah, sebelumnya bernama Paramisara. Iskandar Syah kemudian digantikan puteranya, Muhammad Iskandar Syah. Demikian pula, beberapa Sultan Malaka setelah itu menggunakan gelar “Syah”, seperti Mudaffar Syah, Mansur Syah, dan

Mahmud Syah. Gelar “Syah” menunjukkan identitas seseorang sebagai raja beragama Islam dari sebuah kerajaan yang juga Muslim. Dengan demikian, penggunaan gelar “Syah” oleh Kolano Hasan dari Tidore mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang raja Muslim dari kerajaan yang islami. Apabila asumsi ini dapat dibenarkan, maka dapat disimpulkan bahwa islam masuk ke Tidore sekitar 1372, bukan pada masa pemerintahan Caliati pada 1495. Demikian juga komunitas Muslim telah terbentuk di Tidore beberapa waktu sebelum bertakhtanya Hasan Syah.

Ketiga : Pada awal abad ke-14, terutama pada masa pemerintahan Sidang Arif Malamo di Ternate (1322-1331), Kaicil Sele di Tidore, dan Sida Hasan di Bacan, telah banyak orang Jawa, Cina, Arab serta Melayu bermukim di Ternate, Bacan dan Tidore. Sidang Arif Malamo adalah raja yang sangat luas pergaulannya dengan orang-orang asing, terutama Arab. Ia bahkan belajar bahasa Arab, dan gaya hidupnya meniru gaya hidup orang Arab yang islami. Baik orang Arab, Gujarat, Jawa maupun Melayu yang bermukim di Ternate, Tidore dan Bacan adalah pedagang-pedagang Muslim. Karena itu, tidak sukar membayangkan bahwa mereka telah “menularkan” keyakinan dan agamanya, selain gaya hidup dan budayanya.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, dapat dikatakan bahwa sejak awal proses Islamisasi di Maluku telah memberikan pengaruh positif terhadap aspek ekonomi, politik dan sosial budaya di kalangan elit6e kerajaan. Pigafetta, mengunjungi Maluku (1521), dan kembali ke negrinya bersama ekspedisi Spanyol pertama di Tidore ia menulis bahwa orang-orang Maluku telah memeluk agama Islam lima puluh tahun yang silam. Sedangkan Barros mengatakan bahwa rakyat Maluku telah menjadi

Muslim delapan puluh tahun sebelum kedatangan bangsa Portugis (1512). Thome Pires sendiri menulis (1544) bahwa Islam masuk ke Maluku sekitar delapan puluh atau sembilan puluh tahun yang lalu.

Pengaruh Islamisasi di Maluku pada masa-masa awal tidak dapat dipisahkan dari kerja keras seorang pedagang sekaligus muballigh asal Jawa bernama Datu Maula Hussein. Ia tiba di Ternate pada 1465. Hussein adalah seorang muballigh besar pada masanya, memiliki pengetahuan agama Islam yang luas dan dalam, serta pakar tilawah dan kaligrafi arab. Pada waktu malam hari, ia membaca al-Quran dengan tilawah dan suaru yang merdu, serta membuat kaligrafi diatas potongan-potongan papan. Keahliannya ini membuat orang pribumi Ternate terpesona dan kagum. Setiap kali ia mendendangkan ayat-ayat suci al-Quran, banyak orang berdatangan untuk mendengarkannya. Jumlah pengagumnya kian bertambah. Semakin banyaknya orang-orang Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo yang masuk Islam, Hussein membuka pengajian untuk mengajarkan al-Quran dan Islam. Upayanya dikatakan cukup sukses dan merembet sampai ke lingkungan istana. Hussen diminta membaca al-Quran dan menjelaskannya didepan kolano, para bobato serta keluarga istana, yang berujung dengan pengucapan dua kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam.

Zainal Abidin melakukan perjalanan ke Giri (1494), untuk belajar agama Islam pada Sunan Giri (Jawa Timur), salah satu dari sembilan wali (walisongo) yang terkenal itu. Maula Hussein menyertainya dan kembali untuk seterusnya ke kampung halamannya. Dengan demikian, Zainal Abidin adalah Sultan Maluku pertama yang belajar agama Islam langsung pada Sunan Giri. Setelah tiga bulan belajar di madrasah

Sunan Giri, ia kembali ke Ternate dengan memboyong beberapa ulama Jawa untuk mengajarkan Islam di Ternate. Di antara ulama-ulama Jawa itu ada yang diangkatnya sebagai Imam, sebuah jabatan struktural Kerajaan Ternate. inilah asal-usul lembaga Imam Jawa pada struktur kelembagaan Kesultanan Ternate.

Salah satu upaya Zainal Abidin yang penting untuk mengembangkan Islam, selain mendirikan sejumlah sekolah dengan guru-guru ulama yang diboyong dari Giri, adalah membentuk lembaga *jolebe* sebagai salah satu perangkat agama kerajaan. Dengan demikian, meletakkan dasar untuk menjadikan Ternate sebagai kerajaan Islam. Bayanullah (1500-1522), yang melanjutkan tugas-tugas penyebaran Islam ke daerah-daerah. Ada dua tindakan Bayanullah yang layak dicatat, yaitu: *Pertama*, Kesultanan Ternate menyatakan berlakunya hukum perkawinan Islam bagi seluruh kawula kesultanan yang beragama Islam. Sultan Bayanullah juga melarang praktek pergundikan yang marak waktu itu, terutama di kalangan para bobato. *Kedua*, Semua kawula kesultanan, tanpa kecuali baik Muslim maupun Kristen, harus berpakaian secara islami. Sultan Bayanullah melarang laki-laki memakai cawat (*cidako*), dan perempuan harus memakai pakaian yang menutup auratnya.

2. Media dan Cara-cara Islamisasi

Berdasarkan fakta empiris dan penjelasan beberapa sumber menunjukkan bahwa, media dan cara-cara Islamisasi (saluran penyebaran Islam) pada tahap-tahap awal ialah perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalulintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16, perdagangan antara negeri-negeri di bagian Barat, Tenggara

dan Timur benua Asia dan di mana pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia, India) turut-serta mengambil bagian. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan, karena bagi Islam tidaklah ada pemisahan antara pedagang dengan agamanya dan kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk menyampaikan ajaran agamanya kepada piahk (orang) lain. Karena itu, pola perdagangan pada abad-abad sebelum dan ketika kedatangan Islam sangat menguntungkan, karena golongan raja-raja dan bangsawan banyak yang melakukan kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik saham-saham dan kapal-kapal.

Proses Islamisasi yang dilakukan melalui perdagangan, secara umum dapat digambarkan bahwa para pedagang yang datang ke Maluku Utara, diantaranya ada yang tinggal baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat-laun, berkembang menjadi perkampungan. Perkampungan para pedagang Muslim dari negeri-negeri asing (umumnya dari Arab) disebut *Pekojan*. Di antara golongan pedagang tersebut tentunya ada yang kaya dan pandai bahkan ada pula yang menjadi syahbandar pelabuhan dalam suatu kerajaan. Dari sudut ekonomi jelas mereka mempunyai status sosial yang lumayan, sehingga orang-orang pribumi terutama anak-anak bangsawan tertarik untuk menjadi istri bagi saudagar-saudagar asing. Bagi pedagang-pedagang asing yang datang ke negeri-negeri lainnya biasanya tidak membawa istri. Karena itu mereka cenderung untuk membentuk keluarga di tempat yang baru. Perkawinan dengan orang penganut berhala dianggap tidak sah, maka wanita tersebut di-Islam-kan terlebih dahulu dengan cara “mengucapkan dua-kalimat syahadat.” Proses ini berjalan sejak berabad-abad terhadap penduduk pribumi lokal.

Dari uraian di atas jelas bahwa perkawinan antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi lokal merupakan bagian yang erat kaitannya dengan proses Islamisasi. Dengan kata lain, perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang sangat penting. Hal ini karena ikatan perkawinan itu sendiri sudah menjadi "ikatan lahir-bathin," tempat mencari kedamaian diantara kedua individu (suami-isteri) membentuk keluarga yang justru merupakan inti daripada masyarakat, yang pada gilirannya adalah membentuk keluarga Muslim. Kemudian dari perkawinan itu membentuk pertalian kekerabatan yang lebih besar diantara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita.

Selain melalui tasawwuf, Islamisasi juga melalui pendidikan atau pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama (kyai atau ulama). Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam. Pembinaan calon-calon guru agama (kyai atau ulama) di pesatren, dan setelah keluar dari pesantren mereka akan kembali ke kampung atau desanya masing-masing; menjadi tokoh keagamaan dan menyelenggarakan atau membukan pesantren. Dengan demikian, pesantren beserta para kyai mempunyai peranan yang penting dalam proses pengembangan pendidikan masyarakat. Semakin terkenal kyai yang mengajar itu semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya semakin luas dalam penyebaran Islam di Indonesia.

3. Karakteristik Kota-kota Pusat Kerajaan Islam

Karakteristik kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam ditinjau dari letak geografisnya, pada umumnya kota-kota tersebut terletak di pesisir-pesisir dan di

muara sungai-sungai besar. Demikian kota-kota seperti Samudra Pasai, Pedie, Aceh, Demak, Banten, Gowa (Makassar), Banjarmasin, dan Ternate berfungsi sebagai kota pusat kerajaan yang bercorak maritim. Berbeda dengan Panjang dan Kerta, keduanya merupakan kota pusat kerajaan yang bercorak agraris. Dilihat dari sudut ekonomi dan militer maka kedua kota pusat kerajaan Islam terdapat perbedaan-perbedaan.

Masyarakat kota pusat kerajaan Islam bercorak maritim, menitikberatkan kehidupannya kepada perdagangan, yaitu suatu ciri yang erat hubungannya dengan kenyataan bahwa para pedagang lebih sesuai hidup dalam masyarakat kota bercorak maritim. Kekuatan militernya lebih dititikberatkan kepada angkatan lautnya (suatu ciri yang erat hubungannya dengan suasana politik dan pengluasannya). Sebaliknya, masyarakat kota pusat kerajaan bercorak agraris dalam kehidupan ekonominya lebih menitikberatkan pada pertanian, sementara kekuatan militernya lebih dititikberatkan kepada angkatan daratnya. Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pusat kerajaan Islam, baik bercorak maritim maupun agraris, disebabkan beberapa faktor khususnya kota-kota kerajaan yang bercorak maritim hubungannya dengan proses Islamisasi terutama di kawasan Timur (Maluku dan Maluku Utara).

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam khsusnya di Maluku Utara, tidak terlepas dari kondisi sosial-budaya, ekonomi dan politik kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam di pesisir utara Pulau Jawa, di pesisir selata Malaka dan beberapa daerah lainnya. Demak muncul sebagai kota pusat kerajaan antara lain karena usaha Raden Patah berhasil menghimpun kekuatan masyarakat, kemudian menaklukkan Majapahit yang sebenarnya sudah lemah akibat

perebutan kekuasaan di kalangan keluarga yang menganut agama Hindu sendiri. Kota Cirebon berkembang karena penguasa berhubungan politik dengan Demak bahkan menjadi daerah bagian dari Demak.

Selain faktor politik, ekonomi dan geografi, kota-kota di Indonesia ada juga yang tidak dapat dilepaskan pertumbuhannya dari faktor yang berhubungan dengan kosmologi serta faktor magis-religieus. Berdasarkan beberapa bukti dari literatur kuno dan prasasti di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Robertvon Heine-Geldern, menduga bahwa pendirian suatu pusat kerajaan dengan kosmologi itu bukan hanya dalam pendirian suatu kerajaan saja, tetapi juga dalam penobatan raja, pemberian gelar raja, gelar ratu-ratu, menteri-menteri, pendeta-pendeta keraton, pembagian provinsi-provinsi, upacara-upacara adat, dalam pekerjaan seni, pembuatan denah kota, denah dan struktur ibu kota atau pusat kerajaan, kota-kota besar lainnya, keraton-keraton, dan kuil-kuil. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tradisi tersebut sampai kini di daratan Asia Tenggara masih hidup, sedangkan di Indonesia tradisi ini sudah mulai samar-samar karena pengaruh Islam dan Eropa.

Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi orang Eropa terutama Portugis yang mula-mula mencari jalan ke kepulauan rempah-rempah, faktor ekonomi, politik, terutama agama, di samping petualangan. Faktor petualangan inilah menimbulkan keinginan untuk menjelajah lautan ke tempat-tempat yang belum dikenal. Dengan dorongan ketiga faktor di atas, mereka mulai melakukan perjalanan menyusuri pantai barat Afrika ke selatan lalu membelok ke pantai timur Afrika kemudian menuju ke utara. Di daerah Babel-mandep mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Islam

yang sejak berabad-abad telah melakukan perdagangan antara kepulauan Indonesia, Persia, dan Laut Merah. Dengan semangat perang salib mereka tidak bisa mentolerir perdagangan ini, sehingga timbul pemberontakan dengan pedagang-pedagang Islam.

Bagi orang-orang Portugis raja-raja di Asia yang bukan beragama Islam tidak menjadi lawan, tetapi tidak demikian dengan pedagang-pedagang atau raja-raja yang beragama Islam. Pemberontakan timbul antara armada-armada Islam dengan armada-armada Portugis. Meskipun demikian pemusnahan terhadap perdagangan orang Islam tidak dapat terlaksana dengan mudah. Setelah berhasil menduduki Malaka, orang-orang Portugis kemudian melanjutkan pelayaran ke kepulauan rempah-rempah, di bawah pimpinan de Abreu dan singgah di Gersik, selanjutnya ke Maluku (Banda). Di sana mereka membeli pala, cengkeh, dan fuli, yang ditukar dengan bahan pakaian dari India. Kedatangan orang-orang Portugis di Banda membuat suasana perdagangan semakin ramai.

Setelah mendapat tempat untuk menetap di Maluku dan Malaka orang-orang Portugis berusaha mendapat tempat di Sumatra yang merupakan daerah yang kaya akan produksi lada. Mereka tidak berhasil menanamkan kekayaan di Sumatra, karena kerajaan Aceh begitu kuat mengontrol semua daerah pengaruhnya pada kerajaan-kerajaan yang terletak di sebelah selatan. Di Jawa orang-orang Portugis hanya diterima dengan baik di Pasuruan (Balambangan). Daerah-daerah lain telah berada di bawah pengaruh Demak, yang tidak menyenangi orang-orang Portugis, setelah pengalamannya dengan orang-orang Portugis pada tahun 1513. Di daerah Jawa Barat

hanya untuk waktu yang singkat mereka diterima dengan baik, karena perluasan pengaruh Demak yang bercorak Islam telah masuk ke daerah ini.

Di tempat-tempat lain di kepulauan Indonesia di mana mereka berhasil menetap adalah di daerah Timor. Kehadiran mereka di Ternate untuk beberapa waktu hanya dimungkinkan karena pertentangan-pertentangan yang sering timbul antara Ternate dan Tidore. Meskipun demikian, karena kehadiran mereka merugikan rakyat Ternate sehingga menimbulkan pemberontakan pada tahun 1533. Pemberontakan ini dikenal sebagai *Moluccan Vampire* (binatang malam). Antonio Galvao yang menjadi gubernur Portugis antara (1536-1540) berhasil meredakan situasi.

Perdagangan cengkeh kemudian lebih berkembang di Hitu, orang-orang Portugis menuju ke Hitu, tetapi karena sudah terkenal melakukan sistim monopoli ternyata mereka tidak disenangi. Di samping faktor ekonomi yang membuat mereka tidak simpatik, faktor agama-pun memiliki peranan penting. Sebagaimana telah diketahui bahwa daerah Hitu, seperti halnya Ternate dan Maluku pada umumnya telah memeluk agama Islam. Timbul pemberontakan yang tidak dapat dihindarkan, yang mengakibatkan jatuhnya korban. Orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon dan pindah ke Lei Timor. Sikap orang Hitu yang tidak mau berhubungan dengan Portugis mendorong mereka untuk mengganggu perdagangan orang Hitu dengan orang Jawa dan Makassar. Sekitar tahun 1537 armada dagang yang datang ke Hitu dirusak oleh orang Portugis.

Keadaan makin memburuk bagi orang-orang Portugis karena tindakan-tindakan yang memaksakan kekuasaannya terhadap Ternate, Tidore maupun Jailolo.

Di samping faktor ekonomi, faktor agama juga memainkan peranan penting sehingga terkadang tidak dapat dipisahkan. Ekspansi ekonomi, tidak jarang berkaitan dengan ekspansi agama. Hal ini yang dirasakan di Ternate dan Tidore, di mana penduduk merasa bahwa dengan menerima agama yang baru ini, berarti mengakui kekuasaan asing yang begitu merugikan rakyat Maluku Utara. Hal ini bila diamati lebih jauh tentang orang-orang Portugis, daerah yang seagama dengan mereka merupakan jaminan perlindungan bagi mereka terhadap orang-orang yang beragama Islam. Misalnya, di daerah Halmahera Utara dan sekitarnya.

Orang-orang Portugis yang telah kehilangan popularitasnya di Maluku, khususnya Ternate dan Tidore tidak dapat mempertahankan kepentingan dagangnya. Karena situasi dan kondisi yang telah begitu berubah sejak kedatangan mereka untuk pertama kali, mereka mengalihkan perhatian ke kepulauan Nusatenggara, tepatnya Timor. Namun dengan kedatangan orang-orang Belanda mereka mulai terdesak. Karena itu, sejak akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, tiba gilirannya bagi orang-orang Belanda, Inggris, Denmark dan Perabcis datang ke Indonesia. Di samping orang-orang Portugis yang berperan dalam perdagangan dan cenderung kepada politik monopolinya, maka orang-orang Belanda tidak kalah peranannya dalam usaha-usaha politik monopoli perdagangan di Indonesia. Orang-orang Inggris ketika itu hanya membuntuti orang-orang Belanda. Misalnya, orang Belanda mendirikan sebuah kantor di suatu tempat, kemudian orang Inggris mengikutinya. Apabila timbul ketegangan antara penguasa-penguasa pribbumi dengan Belanda, maka orang Inggris mengambil sikap berpihak kepada orang-orang pribumi.

B. Masuknya Bangsa-bangsa Eropa di Maluku

Sejak 1506, Lodewijk de Bartomo tiba di Ternate dan Banda seabagai orang Eropa pertama yang datang ke Maluku. De Bartomo adalah seorang Portugis, dan sekembalinya ke tanah asalnya (Portugis) kemudian melaporkan bahwa rakyat di Banda masih liar, sementara Islam telah memasyarakat di Ternate hingga dalam lingkungan keluarga istana. Tidak jelas posisi de Bartomo ketika berkunjung di daerah-daerah Maluku. Di samping itu, tidak terdapat bukti adanya kontak dengan pejabat atau penguasa lokal. Beberapa tahun setelah kedatangan de Bartomo, Portugis secara resmi tiba di Maluku dalam upayanya untuk mencari daerah asal rempah-rempah. Kemudian disusul Spanyol dalam selang waktu yang relatif singkat, serta Belanda dan Inggris dalam selang waktu yang berbeda.

Di kalangan bangsa-bangsa Eropa ketika itu, Portugis dan Spanyol adalah dua pesaing utama dalam upaya menemukan daerah-daerah baru. Paul Alexander VI mengambil inisiatif mempertemukan kedua kerajaan itu, sehingga persaingan yang tajam tidak berlarut-larut yang pada gilirannya mengancam eksistensi masing-masing. Pertemuan ini kemudian menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan *Traktat Tordesillas*, yang berkarakter imperialisme ini pada intinya “membagi dunia” ke dalam dua bagian, yaitu Amerika dan sekitarnya sebagai kawasan di bawah Spanyol, dan Asia untuk Portugis.

Berdasarkan perjanjian ini, Portugis menuju ke Asia. Laksamana Alfonco d’Albuquerque kemudian menaklukkan Goa, India (1509) dan Malaka (1511). Tahun

1512 d'Albuquerque mengirim sebuah ekspedisi yang terdiri dari dua kapal dan sebuah karavel di bawah pimpinan Antonio de Abreu untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Ekspedisi ini tiba di Banda awal tahun 1512, dan setelah memuat armadanya dengan rempah-rempah, de Abreu membeli sebuah junk Cina besar, dan menugaskan Francisco Serrao untuk mmemimpinnya dengan awak kapal terdiri dari orang-orang Portugiis dan pribumi yang direkrut dari orang-orang Banda beragama Islam. Tahun 1512, Serrao tiba di Ternate sebagai seorang pejabat Eropa (Portugis) pertama, dari sebuah program eksplorasi penguasa Portugis yang ambisius dan telah dimulai pertengahan abad ke-15. Ekspansi Portugis di seberang lautan merupakan penjelmaan visi rakyatnya dan sikap yang diangkat menuju daerah-daerah baru. Serrao adalah fungsionaris Portugis pertama yang berhasil merundingkan hak-hak monopoli negerinya atas perniagaan rempah-rempah dan hak ekslusif pendirian benteng Portugis di Gamlamodengan Sultan Ternate (Bayanullah).

Alvaro de Cocho menyusul ke Ternate dengan sebuah junk yang dinakodai Louis Botin, kemudian kapal inilah yang untuk pertama kalinya membawa dokumen dan muatan rempah-rempah dari Maluku ke Portugis. Serrao menulis surat kepada Raja Portugis (Don Manuel), dalam suratnya; Serrao memuji Sultan Ternate sebagai "seorang raja yang sangat bijaksana, sangat ramah dan bersahabat." Pujian ini sangat beralasan, karena sejak kedatangannya di Ternate, Serrao telah diangkat sebagai penasehat Kesultanan Ternate. Seperti hanya Antonio Galvao pada masa Sultan Khairun, Serrao juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemerintahan Kesultanan Ternate. Lopo Soares (Raja Muda Goa), mengirim Don Triastiao de

Menese ke Ternate (1519) dan di Bacan (1520), kemudian menuju Ternate. Pada tahun ini juga (1520), Raja Portugal mengirim adiknya (Jorge de Brito) untuk membangun benteng Portugis di Gamlamo (Ternate), dengan nama "*Nostra Senhora de Rosario*" (wanita cantik berkalong bunga mawar) dan menjadi komendan benteng tersebut. Setelah menyelesaikan pembangunannya (1521), Jorge de Brito kembali ke Goa, dan tewas dalam salah satu pertempuran di Aceh.

Tahun 1524, Garcia Henriques diangkat sebagai Gubernur Portugis kedua di Ternate, dengan menerima penyerahan benteng Gamlamo dari de Brito (September 1525) setelah melalui serangkaian konflik antara keduanya. Henriques kemudian menggempur Tidore dengan bantuan Ternate, beberapa hari setelah wafatnya Sultan Almansur, penyerangan ini membuahkan hasil. Pada bulan Mei 127, Jorge de Menezes diangkat sebagai Gubernur Portugis ketiga dan tiba di Ternate melalui Goa dan Kalimantan, tidak seperti sebelumnya (melalui Jawa dan Banda). De Moneses melanjutkan penyerangannya terhadap Tidore, tetapi Tidore telah bersekutu dengan Spanyol. Armada Portugis yang dikirim berikut prajuritnya yang dibawa dari India (Goa), serta pasukan Ternate dan Bacan yang ikut membantu berhasil dihancurkan. Akhirnya suatu perjan jian untuk mengakhiri perang dan permusuhan ditantatangani Tidore dan Portugis. Peristiwa ini membuat Kaicil Darus (Darwis) dari Ternate ditangkap dan dipenjarakan karena dituduh tidak setia, selanjutnya dihukum mati dengan dipenggal kepalanya (Amal, 2002).

Gonsalo Pereira tiba di Ternate (22 Desember 1530), melalui Kalimantan sebagai Gubernur Portugis yang baru. Beberapa hari setelah berkuasa ia menangkap

de Menezes karena korupsi dan mengirimnya ke Goa sebagai tahanan. Pereira berupaya menjalin hubungan baik dengan Sultan Ternate dan selalu mendesaknya agar mencari cengkeh sebanyak-banyaknya dengan harga murah. Bahkan dengan tega mengorbankan rakyat untuk membayar harga cengkeh yang dibelinya. Di samping itu, Pereira menyerang Jailolo dengan alasan merasa terhina dengan pernyataan-pernyatan rajanya. Tindakan yang tidak manusiawi ini menimbulkan kebencian di kalangan rakyat, selain orang-orang Portugis sendiri juga membencinya. Pada suatu ketika, Pereira sedang tidur siang dan orang-orang Ternate yang biasa keluar masuk benteng menggedor pintu kamar, kemudian Pereira membuka pintu dan saat itulah ia ditikan dengan sebilah keris yang menyebabkan tewas seketika. Periistiwa ini terjadi (27 Mei 1531) yang mengakibatkan Sultan Bohiyat ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap mendalangi kejadian itu. Vincente de Fonseca, dipromosikan sebagai pengganti Pereita (1532), kemudian membebaskan Bohiyat dan selanjutnya mengangkatnya kembali sebagai Sultan Ternate.

Tristiao de Ataide tiba di Ternate (1533) dan melihat adanya peluang, ia mengambil alih benteng Gamlamo dengan kekerasan dari Franseca. Menangkapnya dan mengirim ke Goa untuk dipenjarakan di sana. De Ataide adalah seorang gubernur yang kejam, di mana kekejamannya dipamerkan dengan maksud untuk ditakuti serta dikagumi orang. Dengan bantuan Ternate dan Tidore, ia menyerang Bacan serta menghacurkannya, menyusul Jailolo. Akibat kekejaman de Ataide, kemudian para sultan di Maluku mengirim utusan ke daerah-daerah untuk mempersiapkan rakyatnya berperang. Di Ternate, penduduk setempat dengan bantuan orano-orang Jailolo

melakukan penyerangan terhadap orang-orang Portugis dan membumihanguskan kota Ternate, kemudian menuju Tidore, Bacan dan Jailolo untuk mempertahan kan kota-kota itu dari serangan balasan Portugis. Mantan Sultan Ternate yang dimakzulkan Portugis, Deyalo dikembalikan ke takhtanya. Di Bacan, sebuah sungai dibendung dan dialihkan untuk mencegah orang memasuki kota, serta membangun benteng dengan pagar yang tinggi dan menyerang orang Portugis yang ada di Bacan serta merampas harta bendanya, termasuk para budak dan senjata. Sebuah kapal Portugis dirampas dan kapten kapalnya (Balthazer) beserta seluruh awaknya dibunuh.

Tristiao de Ataide mengirim kurir ke Malaka dan Goa untuk meminta bantuan. Don Estevao (penguasa Goa) memenuhi permintaan itu dan setelah bantuan tiba, de Ataide menyerang Tidore, tetapi gagal karena armada perangnya telah dicegat di tengah laut serta dipukul mundur ke Ternate. Kemudian serangan dialihkan ke Jailolo. Di sini pasukan Portugis berhasil mendarat, tetapi dipukul mundur kemudian melarikan diri ke Ternate. Karena pasukan Portugis banyak yang tewas di dalam pertempuran-pertempuran itu, de Ataide mengirim kembali kurirnya untuk meminta bantuan. Namun sebagai jawabannya, de Ataide dipecat dan harus menyerahkan jabatannya kepada Antonio Galvao. Masa pemerintahan de Ataide merupakan masa yang penuh pertumpahan darah, terutama di Ternate dan Bacan. Perang dan kelaparan demikian hebatnya melanda kedua negeri ini, sehingga orang-orang gugur di medan laga (perang) dianggap paling beruntung.

Antonio Galvao tiba di Maluku (29 Oktober 1536) dengan dua kapal yang penuh bahan pangan, persenjataan dan pasukan militer yang terpilih dari banyak

pelamar. Setibanya di Ternate, ia mendapati kota Ternate telah terpanggang dan porak-poranda. Berbagai fasilitas kota hancur, banyak orang Portugis, budak dan tawanan mati. Di samping itu, harga bahan kebutuhan pokok melambung san gat tinggi. Karena itu, tindakan awal Galvao adalah “menurunkan” harga kebutuhan pokok. Tindakan ini berhasil dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, ketika sedang sibuk menata ulang segala fasilitas yang telah dirusak de Ataide, Galvao memperoleh informasi bahwa para sultan Maluku tengah bermusyawarah di Tidore untuk mempersiapkan peperangan melawan Glvao, kerena dianggap sikapnya tetap seperti de ataide. Melalui komendan armadanya (Gonsalo Vaz Sermache), Galvao mengirim pesan menawarkan suatu perundingan perdamaian. Pesan ini ditolak para sultan, karena yakin kekuatannya yang telah mengalahkan de Ataide dalam berbagai pertempuran sebelumnya.

Galvao mengadakan perundingan dengan dewannya yang membahas suatu ekspedisi militer guna mengatasi persekutuan para sultan Maluku. Mayoritas dewan berpendapat bahwa tidak mungkin menggempur Tidore dan melawan sekian banyak pasukan para sultan tanpa minta bantuan ke Goa. Menurut Galvao, bantuan tidak mungkin tiba dalam waktusingkat, walaupun Raja Muda Goa adalah ayahnya sendiri, sementara logistik semakin menipis. Akhirnya, dengan mempercayakan pertahanan benteng Gamlamo kepada de Ataide (mantan Gubernur Portugis yang digantikannya), Galvao pergi ke Talangame di mana kapal-kapal Portugis bersandar. Selanjutnya, Galvao berangkat dengan dua kapal besar dan beberapa juanga di bawah pimpinan kaptennya masing-masing (GonzaloVaz, Fernao Leitao, Francisco de Monray dan

Balthazar Viloso). Pasukan yang ikut serta dalam ekspedisi ini, 170 tentera reguler, 100 penembak jitu, 120 budak dan sejumlah bangsawan serta kesatria Portugis.

Di Tidore, kesultanan-kesultanan yang bersekutu memiliki 40 hingga 50 ribu tentara di bawah pimpinan Kapita Laut Tidore (Kaicil Rade). Pasukan ini dilengkapi dengan bom, senapan, tombak, pedang, dan perisai hasil jarahan dari orang-orang Portugis dan Spanyol. Di samping itu, terdapat juga pasukan berkuda dan pasukan pemanah. Akhirnya, tembak-menembak kedua pasukan pun dimulai. Setelah meredanya kontak senjata antara pasukan Portugis dan pasukan para sultan, Galvao mengirim kepada Sultan Tidore (Amiruddin Iskandar Zulkarnain), dan para sultan lainnya (Ternate, Bacan, dan Jailolo) untuk menyampaikan bahwa ia datang bukan untuk memerangi mereka, tetapi untuk persahabatan dan perdamaian, serta akan memberikan penawar jika mereka merasa telah disakiti. Namun kurir Gallvao, dibunuh dan sepanjang hari mencacimakinya. Galvao memerintahkan pasukannya agar tidak terpancing melayani cacimaki dan kata-katan hinaan itu.

Tidore menembakkan altilerinya semalam suntuk, yang membuat pasukan Portugis cemas. Armada Galvao mebalas tembakan tersebut, ketika pagi tiba. Pasukan Galvao mulai mendarat di bagian bawah kota. Meriam-meriam Tidore menyambut pendaratan itu dengan tembakan gencar yang memaksa pasukan Portugis mundur dan naik kembali ke kapalnya. Keesokan harinya, sebuah regu intelejen Portugis berhasil menawan seorang tentara Tidore yang kemudian diinterogasi dan dipaksa membeberkan pertahanan serta benteng-benteng Tidore berikut kekuatan pasukannya. Atas jasa tawanan tersebut sebagai petunjuk jalan, Galvao melakukan

serangan fajar pada hari berikutnya dengan tujuan menaklukkan salah satu benteng yang terletak di bukit. Pasukan Portugis yang didaratkan terdiri dari 120 tentara reguler, 80 penembak jitu serta sejumlah budak. Menurut Galvao, pertahanan pasukan para sultan terdiri dari beberapa lapis. Paling depan adalah pasukan Ternate di bawah pimpinan Sultan Deyalo, di samping kanannya pasukan Tidore, di sebelahnya lagi pasukan Bacan pimpinan Sultan Raudin (Alauddin II), dan disebelah kiri pasukan Jailolo yang dipimpin Kolano Katarabumi.

Sultan Tidore kemudian mengirim kurir kepada Galvao untuk menawarkan sebuah perundingan perdamaian, tetapi karena kurir itu bukan merupakan tokoh kunci, Galvao memberitahukan agar sultan mengirim seorang pejabat resmi, dan menyampaikan pesan khusus bahwa Portugis ingin berdamai. Karena itu, Sultan Tidore kemudian mengirim mengutus panglima perangnya (Kaicil Rade), yang dikenal dikalangan Portugis sebagai “seorang pria berwibawa dan berperilaku paling santun.” Demikian pula, ketika Galvao siap menggempur Jailolo dan Bacan, Kaicil Rade muncul kembali sebagai penengah. Rade berhasil mendamaikan Tetapi, ujung-ujung dari perdamaian itu adalah Portugis memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah empat di Maluku Utara.

Armada Spanyol dibawah komendan Carvalhindo, tiba di pelabuhan Tidore pada 8 November 1521. Sultan Tidore, Almansur menyambut hangat kedatangan mereka dan penuh keramahan. Kedua pihak kemudian mengadakan perundingan dan berhasil mencapai kesepakatan untuk transaksi cengkeh, dengan harga mengikuti pasaran lokal yang relatif tinggi. Kemudian orang-orang Spanyol mengapalkan

cengkeh yang telah dibeli, setelah tercapai kesepakatan dengan Sultan Tidore tentangt pemberian hak monopoli dan perdagangan cengkeh. Ketika akan bertolak, kapal utama dari dua kapal yang tersisa (Victoria) mengalami kebocoran dan dipindahkan ke kapal lain. Victoria bertolak dari pelabuhan Tidore (11 Desember 1521) menuju Buru untuk memuat perbekalan, selanjutnya ke Timor. Antonio Pigafetta (seorang Italia), turut serta dalam pelayaran ini, kemudian menulis buku yang memuat banyak informasi tentang Maluku (Amal, 2002).

Berhasilnya ekspedisi pertama yang penuh pengorbanan, Spanyol kemudian mengirimkan ekspedisi kedua yang di bawah pimpinan Garcia Jafre de Loasia (1525) dan ekspedisi ketiga (1527) di bawah pimpinan Alfaro de Saanedra. Sebuah ekspedisi Spanyol di bawah komendan Legazpi berhasil menduduki Philipina dan menjadikan sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan Spanyol di Asia Selatan. Setelah Spanyol dan Portugis menyatu dalam sebuah uni (1850), operasi-operasi Maluku langsung berada di bawah Gubernur Jenderal Spanyol di Philipina, sementara Philipina sendiri berada di bawah Raja Muda Spanyol yang berkedudukan di Mexico.

Sebagaimana halnya Portugis, Spanyol juga terlibat dalam sejumlah aksi militer terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Gubernur Spanyol (Don Pedro da Cunha), memerintahkan penyerbuan benteng Gamlamo dan menangkap Sultan Saidi bersama keluarnya, serta sejumlah bobato Kesultanan Ternate (1606). Mereka kemudian diasingkan ke Manila. Akibat penyerbuan ini, wilayah Ternate terpecah dua; ibukota kesultanan (Gamlamo), praktis menjadi ibukota pendudukan Spanyol; yang batasnya, mula-mula sampai Kalumata (sekitar satu kilometer dari sebelah selatan benteng

Kalumata). Benteng ini kemudian diduduki Spanyol hingga (1663), di mana Spanyol terpaksa meninggalkan Maluku. Kawasan antara benteng Kalumata dengan benteng Oranye, sekitar 6 kilometer (praktis menjadi daerah tak bertuan).

Akibat pendudukan tersebut, Belanda terpaksa membangun ibukota baru (ketika benteng Oranye dibangun di daerah kampung Melayu). Kompeni juga dapat mendirikan sebuah benteng kecil lainnya di kota baru yang diberi nama *Coille la Baca*. Dengan demikian, sejak 1606 Ternate dikuasai oleh dua kekuasaan asing; Ternate Utara di bawah kekuasaan Kompeni Belanda dengan pusat kekuasaan di benteng Oranye, dan Ternate Selatan di bawah Spanyol dengan puat kekuasaan di benteng Gamlamo. Tetapi, penangkapan dan pengasingan yang dilakukan Spanyol terhada Sultan Saidi sekeluarga dan para bobatonya telah menimbulkan kemarahan rakyat Ternate.

Dewan Mangkubumi Kesultanan Ternate mengutus Kaicil Ali ke Banten untuk meminta bantuan Belanda, tetapi kedatangan Laksamana de Jong bersama pasukannya dalam rangka memenuhi permintaan terset, tidak menyulutkan nyali Spanyol dan berbagai rencananya atas Maluku. Beberapa tahun setelah penyerbuan benteng Gamlamo, Spanyol dengan bantuan Tidore menyerbu dan menduduki Jailolo, Sahu dan Gamkonora (1611). Pendudukan ini baru berakhir (1620), semua tindakan itu mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jenderal Spanyol di Manila. Ketika Laksamana de Jong tiba di Ternate (1607), kesultanan Ternate memberikan berbagai kemudahan dan memenuhi seluruh tuntutan Belanda, yang dimulai dari pembangunan benteng, pemukiman dan pemerintahan terbatas dalam wilayah

ekslusif, serta monopoli rempah-rempah dengan harapan Kompeni bisa menetralisasi Spanyol. Berbagai kemudahan itu telah dimanfaatkan Belanda untuk memperkuat posisinya di Maluku, dan mampu bersaing secara terbuka dengan Spanyol. Sementara itu, tindakan-tindakan kontaversial Spanyol mulai mendapat reaksi dan perlawanan rakyat, sehingga dukungan persahabatan dari rakyat tidak lagi diperoleh karena rakyat memandangnya tidak berbeda dengan Portugis.

Sejak VOCmelancarkan kegiatan niaganya secara intensif, Spanyol tidak mampu bersaing dagangnya dan hanya mampu bertahan karena kemurahan hati para Gubernur Belanda di Ternate. Otoritas Spanyol di Manila memutuskan menutup garnisun dan menarik kembali pasukannya di Maluku (1662). Tahun 1663 pasukan-pasukan Spanyol di Tidore dan Ternate diberangkatkan menuju Manila, yang menandai panarikan diri Spanyol dari Maluku. Don Francisco de Atienza Ybaraz (panglima angkatan laut Spanyol) di Malina, yang memimpin langsung evakuasi ini. Orang-orang Spanyol terakhir di Maluku diberangkatkan dari Gamlamo (Ternate) ke Manila di bawah pimpinan Gubernur Spanyol terakhir, Don Francisco de Attienso (2 Mei 1663). Rombongan terakhir ini menumpang empat buah kapal, masing-masing Calamata. Santa Lucia, Don Giela, dan Galei, serta dua belas junk, yang menandai berakhirnya pendudukan Spanyol selama 142 tahun (1521-1663) di Maluku.

Menurut salah satu sumber (AF/56), tindakan-tindakan Kompeni ini tidak mengendorkan nyali Spanyol, dengan membentuk pasukan gabungan dengan Tidore (20 Juni 1608) untuk menduduki Jailolo, Sahu, dan Gamkonora. Penyerbuan pasukan gabungan terhadap ketiga daerah ini membawa hasil positif, tetapi atas pertimbangan-

pertimbangan tertentu, Spanyol akhirnya mengundurkan diri dari ketigas daerah ini. Persaingan antara Spanyol dan Belanda telah menyeret sekutu-sekutunya yang telah lama bersaing, yaitu Tidore dan Ternate untuk berseteru secara terus menerus. Kedua kerajaan besar di Maluku itu terlibat dalam sejumlah konflik militer untuk membantu sekutunya masing-masing. Posisi Spanyol semakin lemah dalam persaingan dengan Belanda, Gubernur Jenderal Spanyol di Manila memerintahkan untuk mengakhiri kehadiran mereka di Maluku (1662) dan menarik seluruh pasukannya secara bertahap hingga (1663) penarikan ini selesai dan tamatlah riwayat Spanyol di Maluku. Kepergian Spanyol dari wilayah Maluku, membuat Tidore kehilangan sekutu strategisnya dalam menghadapi Ternate. Karena itu, dalam suratnya yang ditulis menyusul berakhirnya kehadiran Spanyol di Maluku, Sultan Saifuddin dari Tidore menyampaikan pesan kepada Sultan Mandarsyah dari Ternate agar kedua kesultanan yang bertetangga dan nota bene berasal dari satu leluhur ini, menjalin persahabatan dan perdamaian di Maluku serta mengakhiri konflik di antara mereka.

Berakhirnya kekuasaan Spanyol di Maluku, menyebabkan seluruh tata niaga rempah-rempah di daerah-daerah yang berada di bawah kontrol kerajaan-kerajaan Maluku praktis beralih di bawah kendali penuh Kompeni, yang kemudian diabsahkan dengan berbagai penjanjian yang dibuatnya dengan kerajaan-kerajaan lokal. Tidore dan Belanda menandatangani perjanjian tentang hak monopoli Kompeni atas tata niaga rempah-rempah (1667). Dalam tahun ini juga perjanjian yang sama dibuat Kompeni dengan Bacan. Laksamana Speelman yang mewakili Belanda di dalam perundingan tersebut, berhadapan dengan Sultan Ternate, Tidore dan Bacan, selain

selalu menekankan pemberian hak monopoli rempah-rempah kepada Belanda, juga mendesakkan hak Kompeni untuk memberikan persetujuan pada setiap pergantian sultan di kesultanan-kesultanan tersebut. Dengan demikian, hak prerogatif lembaga-lembaga kesultanan dalam pengangkatan sultan telah dilucuti dengan adanya hak memperoleh persetujuan Kompeni terlebih dahulu dalam penetapan seorang sultan. Bahkan dalam praktek pengangkatan sultan-sultan ketika itu, hak persetujuan atau suara Kompeni merupakan kata putus, bukan suara lembaga-lembaga adat.

Dalam perundingan terpisah dengan Sultan Saifuddin dari Tidore di benteng Oranye (27-28 Maret 1667), Laksamana Speelman atas nama Kompeni mengakui hak-hak Tidore atas Papua dan Kepulauan raja Ampat sebagai imbalan pemberian hak monopoli dalam perniagaan rempah-rempah yang diberikan oleh Sultan Tidore. Pengakuan kedaulatan Tidore ini merupakan prestasi terbesar Saifuddin yang akan dikenang sepanjang masa. Perjanian-perjanjian yang dibuat Laksamana Speelman dengan ketiga sultan di atas telah membuat status kesultanan-kesultanan itu tidak lebih dari kerajaan vazal Belanda. Dengan perjanjian-perjanjian itu, posisi para sultan menjadi lebih kuat terhadap para bobatonya dan sangat lemah terhadap Kompeni. Implikasinya, para sultan menjadi sangat tergantung kepada Kompeni.

Menurut sumber lain (YD/58) menegaskan bahwa, perjanjian-perjanjian itu juga menetapkan para sultan dilarang berhubungan dengan kekuasaan asing lainnya tanpa seizin Kompeni. Akibatnya, para sultan dan kesultanannya terisolasi dari kemungkinan melakukan kontak dengan negara-negara asing, karena setiap perikatan dengan negara asing harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kompeni.

Sepanjang sejarah Maluku sejak 1667, tidak ada lagi hubungan semacam itu yang dilakukan kerajaan-kerajaan di Maluku, kecuali yang dilakukan Nuku di akhir abad ke-18. Di samping itu, Kompeni juga tidak berkehendak mendamaikan kesultanan-kesultanan yang berselisih dan bahkan menjadikan sebagai sebuah kebijakan.

Sebuah perjanjian yang dibuat antara Kompeni dan Ternate, ditandatangi di Batavia (7 Januari 1676), menetapkan bahwa wilayah Ternate di seberang laut, yaitu Maluku Tengah digabungkan dengan provinsi Ambon dan akan diangkat penguasa-penguasa khusus di wilayah itu. Dengan demikian, Ternate harus melepaskan kekuasaannya atas Pulau Buru, Ambalau, Buano, dan Kelang. Alasan yang digunakan Kompeni untuk memaksanakan penyerahan wilayah itu adalah, *salahakan* Ternate yang ditempatkan di wilayah-wilayah itu tidak mampu mengatasi penyelundupan rempah-rempah oleh para pedagang Bugis – Makassar. Alasan yang sama, digunakan Kompeni terhadap Sultan Jamaluddin dari Tidore untuk melepas haknya atas Seram Timur dan sekitarnya. Pelanggaran terhadap hak monopoli bagi kompeni, merupakan hal paling sensitif dan tidak dapat dimaafkan. Kompeni juga menandatangi sebuah perjanjian dengan Sultan Ternate, Tidore dan Bacan (7 Juli 1768), yang menetapkan bahwa semua hukum mati yang diputuskan pengadilan kesultanan harus memperoleh persetujuan Gubernur Belanda, sebelum dieksekusi. Dengan perjanjian ini, Kimalaha Tomagola dan Kimalaha Tomajiko yang diputus bersalah oleh Pengadilan Kesultanan Ternate dan dijatuhi hukuman mati, selamat dari eksekusi karena Gubernur Kompeni menolak memberikan persetujuannya.

Semakin besarnya kekuasaan Kompeni di Nusantara membuat Pimpinan Pusat VOC di Belanda, memerintahkan pembentukan Dewan Politik (1669) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, tidak semua sultan di Maluku memiliki loyalitas tanpa batas. Sultan Sibori Amsterdam dari Ternate melakukan pemberontakan terhadap Kompeni (1680), walaupun pemberontakan ini berakhir dengan ditangkapnya Sultan Sibori Amsterdam di Sahu dan diasingkan ke batavia, yang kemudian dibebaskan. Hal ini menunjukkan sikap keberanian seorang sultan untuk mempertahankan harga diri dan kesultanannya. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Tidore dan Bacan. Selain menutup mata dan bersekongkol dengan para penyelundup Mindanao serta membiarkan orang-orang Halmahera Timur melakukan penyelundupan selama puluhan tahun, kedua kesultanan ini juga memperlambat realisasi program penebangan pohon-pohon cengkeh dan pala. Karena tekanan Kompeni yang serius, Sultan Patra Alam dan para petinggi Kesultanan Tidore terpaksa mengumumkan pengakuan kedaulatan Kompeni atas kesultanannya (1779). Akibatnya, Kaicil Nuku memisahkan diri dan mulai melakukan rencana pemberontakan terhadap Kompeni.

Kebijakan Kompeni di Makian, setelah memperoleh seluruh hak monopoli perdagangan rempah-rempah dengan pengunduran diri Spanyol, ialah mengamankan tata niaga rempah-rempah dalam berbagai bentuk gangguan. Meskipun Kompeni telah mengupayakan berbagai langkah untuk mengamankan kebijakan tersebut, tetapi dalam prakteknya pelanggaran yang bersifat terobosan tetap saja terjadi. Para

pedagang Bugis-Makassar tetap saja bertransaksi di Seram Pasir, yang merupakan surga bagi para penyelundup dan pasar gelap rempah-rempah.

Di samping kebijakan di atas, Kompeni juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah produsen utama cengkeh, seperti Makian, Ternate, Tidore, Moti, dan Bacan, dengan memberikan insentif berupa kompensasi tahunan untuk para sultan dan bobato-bobatonya di daerah-daerah tersebut. Para sangaji Makian dapat memperoleh insentif paling tinggi, karena Makian merupakan produsen cengkeh terbesar dan berkualitas tinggi (unggul), yaitu "cengkeh raja." Sejarah mencatat bahwa, ketika Both diangkat sebagai Gubernur pertama-tama berkunjung ke Makian, sebelum ke Ternate. Di pulau inilah ia berunding dan mengadakan perjanjian untuk pertama kalinya atas nama Kompeni dengan para Sangaji Makian. Ketika terjadi pembangkangan 180 keluarga Makian yang dipimpin langsung para sangajinya (Maret 1742), terhadap Kesultanan Ternate menuntut agar mereka dialihkan statusnya menjadi kawula Kesultanan Tidore, dengan susah payah Kompeni mencari solusi yang menguntungkan orang-orang Makian. Kompeni mendesak Sultan Saifuddin agar Tidore mengabulkan keinginan para pembangkang itu dengan sungguh-sungguh. Hal yang sama juga dilakukan orang Patani dan Maba bertengkar dengan Sultan Tidore, dan menuntut agar Kompeni memberikan solusi yang memuaskan mereka, karena kedua daerah ini merupakan penghasil cengkeh dan pala yang potensial di Halmahera Timur. Bahkan (1745), orang-orang Makian dinyatakan sebagai warga *gubernemen* dan kewarganegaraan Ternatenya dilepas oleh Kompeni.

Selain memantapkan monopoli perdagangan rempah-rempah, Kompeni juga mulai memonopoli impor barang-barang komsumtif dengan memaksa kesultanan-kesultanan Maluku melarang kawulanya memperdagangkan barang-barang tersebut, dan menerapkan sistem perizinan yang ketat untuk memperkuat kontrol atasnya. Hanya pedagang kecil, termasuk orang-orang Cina yang diperbolehkan beroperasi. Pemantapan monopoli rempah-rempah dan ekstirpasinya oleh Kompeni telah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Di Bacan dan Halmahera Timur, ganti rugi yang diberikan kepada petani atas penebangan tanaman rempah-rempah tidak pernah sampai ke tangan yang berhak, tetapi menguap di tangan para bobato sehingga menyebabkan terjadi pergolakan di mana-mana.

Sir Francis Drake adalah orang Inggris pertama yang mengunjungi Maluku (14 November 1579), ia tiba di Moti dengan kapal Golden Hind dari Australia. Deputi Sultan Babullah kemudian membawanya ke Ternate dan disambut dengan upacara kebesaran. Tujuan kedatangan Drake semata-mata untuk berdagang rempah-rempah, dan setelah terjadi transaksi ia kembali ke negaranya melalui Banten. Keberadaan Inggris di Nusantara dalam bentuk yang lebih terorganisir dimulai ketika Sir James Lancaster, memimpin sebuah armada dagang di bawah bendera EIC (*East India Company*), yaitu “Serikat Dagang India Timur” tiba di Aceh (1602), kemudian ke Banten, di sana EIC mendirikan sebuah benteng dan bertahan hingga (1682).

Sebuah armada di bawah pimpinan Sir Henry Midleton (1604), berhasil mencapai Maluku serta singgah di pelabuhan Ternate dan Tidore. Armada Midleton merupakan armada dagang pertama Inggris yang sampai ke maluku. Dari Maluku

Utara, armada tersebut kemudian meneruskan perjalan ke Ambon. Namun, Inggris baru mendirikan pos dagangnya di Ambon (1620) dengan seizin VOC. Pejabat-pejabat Inggris yang ditempatkan di pos Ambon ini berjumlah 10 orang, terdiri dari 8 orang Inggris, satu orang Jepang dan satu orang Portugis, tetapi kemudian ditangkap Kompeni Belanda (1623) dengan dakwaan berkomplot melawan VOC. Kesepuluh orang itu kemudian dihukum mati dengan memenggal kepala mereka. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda ini terkenal dengan nama "Pembantaian Ambon." Sejak peristiwa tersebut, Inggris menarik diri bukan hanya di Ambon dan Maluku, tetapi juga seluruh Nusantara, kecuali Banten. Pos di Banten ini kemudian ditutup dan dipindahkan ke Bengkulu (Sumatera Selatan), sebagai satu-satunya pos permanen yang tersisa di Indonesia. Dengan kepindahan tersebut, Inggris bagi VOC tidak lagi sebagai ancaman yang serius.

Thomas Fores melayari Maluku dan Papua (1774-1775), dan menyinggahi pelabuhan Ternate, Tidore dan Bacan. Semasa kunjungannya ke Maluku (1774), dan sempat beraudiensi dengan Gubernur VOC dan Sultan Ternate. Tetapi, campur tangan politik Inggris di wilayah Maluku baru dimulai ketika Nuku yang melakukan pendekatan kepada Inggris melalui para *country traders* menentang Kompeni. Sejak 1785, Nuku mulai melakukan kontak dengan Inggris dengan mengirimkan utusannya ke Bengkulu, Bengal dan Madras untuk meyakinkan Inggris agar membuka kembali pos niaganya di Maluku Utara, Maluku Tengah dan Papua.

Tahun 1786, Inggris membawa utusan Nuku menemui Gubernur Jenderal Inggris di Calcutta untuk menyampaikan maksud Nuku tentang pembukaan kembali

pos dagang Inggris, kedua utusan ini kembali ke Tidore tahun itu juga. EIC mengutus Kapten MacCluer (1790), untuk melakukan penyelidikan di pantai sekitar Misoal dan tanjung Sele hingga teluk Berau dan pantai selatan Papua. Penyelidikan ini ditujukan untuk membuat peta kawasan tersebut. Sementara itu, para *country traders* menyampaikan pendapat mereka kepada EIC di Calcutta tentang keuntungan politik dan ekonomi yang dapat diraih Inggris bila membantu Nuku. Tahun 1792, Nuku memperbarui perjanjian dengan EIC melalui para *country traders* di Bengal, dengan harapan Inggris lebih berperan dalam menghadapi permasalahan Maluku.

Inggris tiba di Bacan (13 Maret 1797), dan mengajukan tuntutan penyerahan yang sama tetapi komendan pos Belanda di sini juga menolak tuntutan tersebut. Packenham meneruskan perjalanan ke Makian dan bertemu dengan Nuku di Makian. Pasukan gabungan Inggris dan Tidore mendarat di Bacan (16 Maret 1797), dan Bacan langsung diserahkan kepada Inggris. Untuk kedua kalinya (1798), Inggris menuntut penyerahan Maluku dari Gubernur Budack tetapi tetap ditolaknya. Armada Inggris di bawah pimpinan Hills (1799), mengajukan untuk ketiga kalinya tuntutan serupa yang juga ditolak Budack. Namun, terjadi pergantian gubernur dari Budack ke Cransen (awal Juni 1799), kemudian menyerahkan Maluku kepada Inggris. Cransen sendiri sebenarnya menolak menyerahkan Maluku kepada Inggris, tetapi atas pengkhianatan Van Dackum dan Rodijk, akhirnya diserahkan kepada Inggris (21 Juni 1799).

Beberapa hari setelah penyerahan tersebut, Inggris mengakui Nuku sebagai Sultan Tidore. Perjuangan Nuku menentang Belanda, selain dibantu badan-badan resmi EIC, juga didukung oleh para *country traders.* Mereka mensuplai senjata dan

amunisi untuk pasukan Nuku. Bantuan konkrit yang diberikan Nuku kepada Inggris adalah penyerbuan Bacan dan Ternate dalam upaya memaksa Belanda menyerahkan Maluku kepada Inggris. Dengan bantuan Nuku, Inggris berhasil merebut benteng Oranye (21 Juni 1799), setelah gagal dalam penyerbuan sebelumnya pada 11 Februari dan 4 Mei 1799. Selama pemerintahan Inggris, seluruh Maluku Utara, Maluku Tengah dan Banda dipimpin seorang gubernur yang berkedudukan di Ambon. Maluku Utara menjadi residen dengan ibukota Ternate. Residen pertama di Maluku Utara adalah H. Webber. Gubernur Inggris di Ambon (William Farquhar), atas nama pemerintah Inggris di India mengadakan perjanjian baru dengan Nuku (22 Juni 1801), yang menegaskan hubungan bersama tanpa mengganggu kemerdekaan Tidore.

Atas prakarsa W.B. Martin, diadakan perjanjian antara Sultan Nuku (Tidore) dan Sultan Maimuddin Syah (Ternate), 5 November 1801. Isi perjanjian perdamaian ini, antara lain: semua peristiwa dan perbuatan-perbuatan masa lampau dilupakan dan saling memaafkan, serta kedua kesultanan beserta rakyatnya akan hidup damai dalam suasana pesahabatan dan persaudaraan. Suatu hal yang kurang menguntungkan Nuku adalah, perjanjian perdamaian antara Inggris dengan Belanda. Berdasarkan perjanjian ini, Inggris harus menyerahkan semua wilayhnya di Indonesia (termasuk Maluku). Inggris meninggalkan Maluku (Juni 1803). Belanda kembali menyerahkan Maluku kepada Inggris di bawah Kapten Tucker (1810). Tucker diganti oleh Kapten Forbes, seorang komendan militer dan kepala pemerintahan sipil (1811). Setelah itu, W. Ewer diangkat sebagai Residen Maluku di Ternate (1814), kemudian digantikan oleh W.B. Martin. M.G. MacKenzie ditunjuk menjadi Residen Ternate.

C. Proses Kristenisasi di Maluku Utara

Proses Kristenisasi sudah lama berakar di kepulauan Maluku sejalan dengan penguasaan daerah-daerah dan suku-suku di bawah pemerintahan penjajah *Portugis* dan *Spanyol* (Kristen Katolik), kemudian di bawah penguasaan Belanda dan Inggeris (Kristen Protestan). Namun, karena lokasi mereka yang saling terisolir dan tersebar maka jemaat-jemaat Kristen itu sangat kurang terpelihara dan tidak berkembang, sehingga umumnya kekristenan yang masih muda itu kembali terjatuh pada pengaruh agama tradisi yang animistis, penuh dengan pengaruh adat-istiadat nenek moyang dan tahyul menghasilkan suatu kekristenan bangsa yang 'sinkretistik.'

Ketika Tabariji berkuasa, Sultan Ternate menggantikan Abu Hayat (1532), atas pengaruh Portugis, kemudian ia dipaksa turun dari takhtanya dan diasingkan ke Goa bersama ibunya, Nyai Cili Boki serta suaminya, Pati Sarangi (1534). Selama di pengasingan, Tabariji bertemu seorang bangsawan Portugis, Jordao de Freitas, yang menasehatinya agar berpaling ke agama Kristen jika ia mau berjaya dan memperoleh kembali takhtanya. Tabariji menyetujui nasehat de Freitas dan beralih agama dengan nama baptis Don Manuel. Setelah setelah di baptis, Tabariji alias Do Manuel menulis sebuah surat wasiat yang isinya "menghibahkan pulau-pulau Ambon dan sekitarnya, antara pulau Buru dan Seram, kepada de Freitas dan keturunannya, baik yang sah maupun tidak sah, selama keluarga itu hidup." Wasiat ini dikukuhkan kembali (1543-1546), semasa Spanyol dan Portugis menyatu dalam bentuk uni bahkan menjadikan surat wasiat itu sebagai alas hak untuk merebut kembali Ambon abad ke-17.

Sementara itu, sukses de Ataide melawan Jailolo telah menarik perhatian Kolano Mamuya dan Sangaji Tolo, dua tokoh penting di Kerajaan Moro, Halmahera Utara, melakukan pendekatan untuk menghadapi tetangga-tetangga Kerajaan Moro yang Muslim (Ternate dan Jailolo), yang mengincar Moro setiap ada kesempatan. Raja Mamuya meminta bantuan kepada Gonsalo Veloso, seorang pedagang Portugis yang telah menetap lebih 30 tahun di Maluku dan menikah dengan adik sultan Ternate. Veloso menasehati Raja Mamuya bahwa untuk memperoleh perlindungan Portugis "atas jiwa dan kerajaannya," ia harus memeluk agama Kristen. Raja Mamuya dan Sangaji Tolo akhirnya dibaptis di benteng Gamlamo Ternate, dalam suatu upacara megah yang dipimpin pastor Simon Vaz dan dihadiri Gubernur de Ataide. Mereka memperoleh nama baptis Don Joao de Mamuya, untuk Raja Mamuya dan untuk Sangaji Tolo yakni Don Tristiao de Ataide de Tolo.

Koversi agama yang dilakukan Raja Mamuya dan Sangaji Tolo memiliki pengaruh yang signifikan dalam bentuk penolakan ataupun sebaliknya. Dalam suatu bentrokan yang terjadi kemudian antara orang-orang Muslim Galela dan Don Joao de Mamuya beserta pengikut-pengikutnya, Raja Mamuya beserta keluarganya mati terbunuh. Bahkan, pastor Simon Vaz sendiri juga dibunuh pada 1534 dalam sautu pesta keagamaan. Peristiwa pembunuhan tersebut telah menebarkan benih-benih permusuhan antara para sultan di Maluku dan kekuasaan Portugis. Sultan Khairun dari Ternate yang selama ini dikenal sebagai seorang tokoh paling simpatik dan liberal terhadap agama Kristen, malahan berprakarsa mengundang Sultan Tidore, Bacan dan Jailolo untuk mencari solusi atas perkembangan mengkhawatirkan yang

terjadi di Moro. Raja Jailolo (Katarabumi), kemudian mulai melakukan serangan-serangan militer atas Tolo. Ia mengepung negeri itu dengan pasukan Alifurunya dalam jangka waktu yang lama, dan baru menarik kepungannya setelah diusir pasukan-pasukan Portugis.

Kerajaan Moro adalah daerah pensuplai bahan pangan untuk Ternate sejak lama. Dari kerajaan ini. Terkirim beras, sagu dan ikan ke Ternate serta beberapa daerah lainnya. Karena yakin akan perlindungan Portugis terhadapnya bila terjadi konflik, sejak peristiwa pembunuhan Raja Mamuya umat Kristen Moro menghasilkan suplai bahan pangan untuk Ternate serta menolak posisi dominan Ternate dalam hubungannya dengan Moro. Sejak 1546, kegiatan misionaris Moro ditingkatkan. Orang-orang Portugis menyebut kerajaan ini dengan “O Moro” yang meliputi Morotia atau Moro daratan yang terdiri dari Galela, Pune, Tolo, Tobelo, Cowa, dan Samafo serta Morotai atau Moro di seberang laut yang mencakup pulau Morotai dan pulau Rao di teluk barat, dengan kota-kota penting Mira, Sakita dan Cio.

Pada masa Pemerintahan Khairun, telah tiba di Ternate evanglis terkenal Franciscus Xaverius, dengan menumpang perahu dari Ambon, pada 1546. Xaverius memanfaatkan enam bulan waktunya untuk melakukan penginjilan di Ternate. dan dari bulan Juli 1546 hingga Januari 1547 melakukan aktivitas misinya di Moro. Di Ternate, ia berhasil mendekati kalangan istana dan bersahabat akrab dengan Sultan Khairun. Xaverius bahkan berhasil membaptis beberapa kerabat dekat Kesultanan. Dalam penyebaran agama Kristen, Xaverius memadukan kepercayaan dan kebiasaan spiritual dengan kesenangan orang-orang pribumi terhadap musik lokal. Setibanya di

Moro, Xaverius membentuk Misi Jesuit dan mengunjungi pusat-pusat pemukiman komunitas Kristen serta mendirikan beberapa gereja. Tetapi, keberhasilan dan kemajuan misi Kristen ini telah menimbulkan kecemasan para sultan Maluku yang saling bersaing untuk mengontrol Moro dan menentang setiap intervensi Portugis atas kerajaan tersebut.

Baik Xaverius maupun para pastor lain menitikberatkan evangelisasi mereka bukan pada hal-hal yang bersifat doktrinal. Mereka lebih condong menekankan pada hal-hal yang bersifat ritual gerejani, pada pelbagai bentuk upacara, penyalan lilin dan musik untuk menimbulkan minat umat Kristen lokal yang sangat bersahaja dan menanamkan rasa hormat mereka kepada gereja, orang-orang suci dan nama yesus. Dengan cara semacam ini, mereka berharap dapat menimbulkan kepercayaan dan kekuatan pada pribadi umat Kristen secara individual. Di tolo, misalnya, pernah diberitakan bahwa orang-orang Kristen lokal, setelah minum “air suci” merasa yakin bahwa air itu dapat menangkal segala macam penyakit. Hal serupa juga terjadi di Bacan, ketika berlangsungnya pembaptisan (1557). Rakyat yang sakit ketika itu, dipercik “air suci” di wajah mereka, dan mereka merasa “Tuhan memberi mereka kesehatan.” Kepercayaan terhadap ritus-ritus Kristen lainnya juga diterima secara antusias. Seorang lanjut usia menerangkan kepada misi bahwa setelah memperoleh pengampunan dosa, badannya terasa sehat. Sementara lainnya melihat ritus gereja sebagai “jalan memuji dunia lain.” Di Bacan, orang Kristen lokal percaya bahwa kekristenannya sangat efektif untuk mengusir *suwanggi*, salah satu mahluk halus paling ditakuti dan dipercayai dapat merobek-robek serta meminum darah manusia.

Mereka percaya bahwa orang Portugis tidak mempan diganggu *suwanggi* karena telah lama memeluk Kristen.

1. Perkembangan Misi Jesuit di Maluku Utara

Misi Jesuit yang paling berhasil adalah di Moro dan Bacan. Pada bulan Juli 1557, Antonio Vaz berhasil membaptis sekitar enam hingga tujuh sangaji di Bacan. Dua setengah bulan berikutnya. Berbagai lapisan masyarakat di pulau ini, laki-laki, perempuan dan anak-anak, termasuk orang yang dekat dengan keluarga kerajaan Bacan, juga berhasil dikonversinya ke dalam agama Kristen. Di Moro, pusat misi Jesuit di tempatkan di Tolo, sebuah kota dengan penduduk terbanyak di Kerajaan Moro. Sejak 1562, basis Misi Jesuit juga di dirikan di Sakita dan Rao, Morotai, yang dipimpin pastor Nicolau Nunes, Fernao de Osario, Marcus prancudo dan Diego Magelhaes. Ketika Sangaji Sugala dan Cowa (Morotai) di babtis di Ternate (1534), pastor Simon Vaz terbunuh pada tahun itu juga di sao, sebuah desa dekat Sugala sekarang masuk pesisir kecamatan Galela. Akibat pembunuhan ini, untuk sementara waktu tidak ada pastor yang berani ke Moro. Kemajuan dan kesuksesan Misi Jesuit di Bacan dan Moro disambut gembira dan penuh harapan oleh Gubernur de Ataide. Dalam sepucuk suratnya yang ditujukan kepada Raja Muda Portugis di Goa, de Ataide dengan bangga menyatakan :

Dengan bantuan orang-orang Kristen Moro, saya berani menjadikan Maluku sebagai Portugis baru. Saya telah melihat dengan mata batin saya bahwa tidak sukar untuk berbuat seperti yang telah saya gambarkan di atas tanpa perlu biaya sepeser pun

dari kerajaan. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa, apa yang diimpikan Ataide bertolak belakang dengan laporan Xaverius. Dalam suartnya kepada pusat Jesuit di Roma (20 Januari 1548), menulis “Banyak komunitas Kristen yang telah lama tidak memperoleh kunjungan, disebabkan jaraknya yang demikian jauh dari India, yang merupakan penyebab pembunuhan-pembunuhan terhadap para pastor yang pergi ke sana.” Di negeri Moro, lanjut Xaverius, ia telah membaptis banyak rakyatnya dan dalam jangka waktu tiga bulan keberadaannya di sana, ia telah mengunjungi banyak komunitas Kristen. Xaverius memandang negeri ini sangat berbahaya karena banyak terjadi peperangan di antara penduduknya. Penduduk negeri ini, menurutnya adalah ‘*bangsa barbar*’ dan buta huruf. Mereka dapat berbuat jahat kepada orang yang mereka benci dan membunuhnya. Mereka memakan makanan dari pohon sagu dan memakai pakaian yang terbuat dari serat pohon malinjo serta meminum anggur (tuak) dari pohon enau. Mereka, tutur Xaverius, belum beragama dan sering membunuh anak isterinya sendiri. Di Morotia banyak orang Tavaros (Tobaru) yang sering dieksploitasi Kesultanan Ternate dan Jailolo dalam peperangan.

Sejak kedatangan Xaverius ke Moro, agama Kristen Katolik berkembang dengan amat pesat. Hampir semua komunitas di Moro memperoleh penempatan seorang pastor (*frater*) sebagai pembimbing. Walaupun perkembangan kuantitas jamaat berhasil dinaikkan secara drastis oleh para misionaris, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap *poligami* yang dilakukan pengikutnya di kalangan pribumi Moro. Menurut pastor de Castro, penghapusan *poligami* mengalami kegagalan total. Orang-orang Moro menolak menikah menurut hukum Kristen, sebab

ikatan adat dan tradisi tentang hal ini jauh lebih kuat. Laki-laki Moro tidak dapat hidup tanpa *poligami*.

Sultan Khairun yang tidak henti-hentinya memberi kemudahan dan bantuan kepada Misi Jesuit, mati dibunuh oleh Portugis di dalam benteng Gamlamo, Ternate (25 Februari 1570), kemudian digantikan oleh puteranya (Babullah). Ketika naik takhta (1570), ia bersumpah akan menuntut balas atas kematian Khairun dan berjuang hingga orang Portugis meninggalkan Maluku. Sumpah ini kemudian direalisasikan dengan sejumlah kebijakan, termasuk dalam kaitannya dengan Misi Jesuit. Semua kemudahan yang telah diberikan Khairun dicabut oleh Babullah, serta mengambil tindakan tegas terhadap pasukan Portugis yang ada di Moro, tidak terkecuali orang-orang sipil Portugis dan para pastor, bahkan orang-orang Kristen pribumi. Selama 36 tahun beroperasi di Maluku, Misi Jesuit telah menunjukkan hasil yang gemilang, khususnya di Moro dan Bacan. Meskipun akhirnya dihentikan Sultan Babullah, tetapi dari segi misi yang diembannya (Misi Jesuit), telah mencatat prestasi yang cukup signifikan. Hanya karena kesalahan kebijakan politik Gubernur Mesquita dalam membunuh Khairun, bencana yang tidak pernah diperhitungkan telah menghancurkan semuanya, bukan hanya otoritas dan militer Portugis tetapi juga harus dipikul oleh Misi Jesuit dan bahkan orang-orang Kristen pribumi.

2. Kehadiran Gereja Protestan di Maluku

Kehadiran Gereja Kristen Protestan di Maluku sejak 1621, cikal bakalnya adalah perkumpulan (pelayat orang sakit), yaitu memberikan pelayanan spiritual

kepada orang-orang sakit. Perkumpulan yang dipimpin oleh Tobias, dkk ini diberi izin operasional oleh Gubernur Kompeni, Houtman (1626). Pada tahun yang sama, telah bertugas di Bacan Kornelis Maas, dan Geritszoon Bloem di Tafasoso (Makian). Sebelum itu, sejumlah pendeta yang dipimpin Jan Herman (17 September 1624) yang pernah menjadi penginjil di Manila selama 13 tahun, dikirim dari batavia ke Ternate. Rombongan pendeta ini melakukan tugas tidak atas nama resmi Kompeni, tetapi secara individual. Pendeta remi pertama adalah Gregorius Candidius, yang diangkat dengan persetujuan Pemerintah Pusat Kompeni di Batavia, tiba di Ternate (1626). Namun, sulit melakukan tugasnya karena kurang mendapat dukungan dari Gubernur Maluku, Jaques Le Fabre. Candidius melaporkan kondisi yang ditemui sekembalinya ke Batavia. Kemudian Candidius kembali ke Ternate untuk kedua kalinya disertai seorang pendeta dari Dewan Gereja Hindu Belanda di Batavia.

Setibanya di Ternate, kedua pendeta ini menggiatkan aktivitas penginjilan dengan mulai menggarap daerah Makian, Bacan dan Obi. Ritus peribadatan Kristen mulai dilaksanakan dengan memberikan khutbah-khutbah dalam bahasa Melayu dan Belanda. Dalam laporannya kepada Gubernur Antonie Huardt di Ambon, Candidius (pendeta yang bertanggung jawab atas tugas-tugas penginjilan di Maluku) mengeluh karena ketidakberhasilan atas tugasnya, disebabkan kendala yang datang dari para sultan yang secara terang-terangan menunjukkan sikap antipati kepada mereka. Namun dalam laporan itu juga digarisbawahi kesulsesan para penginjil dalam misinya di Manado dan Sangir Talaud. Selama lebih dari dua setengah abad melakukan aktivitas penginjilan di Maluku (1621-1880), hasil yang dicapai kurang memuaskan.

Di Ternate, komunitas Kristen terbatas di “Kampung Sarani” yang sebagian besar penduduknya bukan etnis Maluku Utara, tetapi Manado, Sangir dan ambon. Sementara di Makian dan Tidore dapat dikatakan penginjilan “tidak berbekas.” Di Bacan karena digarap lebih intens, hasilnya agak memadai. Kemajuan-kemajuan penting penginjilan garu terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Halmahera Utara dan Halmahera Timur, yang dilakukan sebuah perkumpulan “Zending Negeri Belanda,” yaitu ‘ZNB’ (*Utrechtsche Zending Verenigung*) yaitu ‘Perkumpulan Zending Utrecht’ Perkumpulan penginjil ini didirikan di Utrecht (1865), dengan tujuan melaksanakan penginjilan di papua. Tetapi, Residen Ternate pada waktu itu, P. van der Crab (1863-1867) meminta agar UZV beroperasi di Halmahera. Permintaan ini dikabulkan oleh pimpinan UZV dan rombongan pertama pendeta UZV tiba di galela (14 April 1866). Rombongan ini terdiri dari dua pendeta, masing-masing van Dyken dan H.H. Bode, disusul Klaassen sebagai pendeta ketiga, setahun kemudian tiba pula pendeta Been.

Galela merupakan pos pertama UZV di Halmahera, kota di mana sebenarnya berpenduduk hampir seluruhnya Muslim. Karena itu, selama lima tahun pertama pos UZV di kota ini, tidak mencapai hasil apa pun. Hingga tahun 1870, Klaassen dan Bode masih bekerja dalam misi penginjilan di Galela. Sebuah pos baru dibuka di Leate (Soakonora) dan Klaassen ditugaskan untuk memimpinnya, kemudian kembali ke Belanda dan digantikan oleh des Graaf (1873), yang pernah bertugas di Ternate selama sepuluh tahun sebagai wakil pendeta. Selama bertugas di pos Leate, de Graaf pernah mengeluh karena “harus menjaga sebuah gereja kecil tanpa seorang Kristen

pun.” Ketika de Graaf kembali ke belanda, pos Leate dirangka kepemimpinannya oleh van Baarda. Namun, karena gagal menunaikan misinya, pos ini ditutup (1897). Pos zending berikutnya didirikan di Tobelo (1870) oleh Been, dan memimpin hingga 1878. Tidak jelas apa yang menyebabkan Been dipecat dari kepemimpinannya di pos Tobelo (1878), tetapi posisinya kemudian digantikan oleh pendeta Hueting yang tiba di Halmahera sejak 1876. Van Dyken bertugas di Duma sekitar 35 tahun, dan selama itu pula Duma yang berpenduduk 200 jiwa (1899) menjadi sebuah komunitas Kristen. Ini berarti selama 35 tahun melakukan aktivitas zending baru berhasil mengkonversi 200 orang ke dalam agama Kristen.

Pada masa pemerintahan Inggeris yang singkat (1811-1815) masuklah para pekabar Injil Inggeris di Indonesia. Di Ambon diutus seorang pekabar Injil bernama *Jabez Carey* anak dari *William Carey* yang dikenal sebagai rasul untuk India karena usaha peka-baran Injilnya yang luar biasa di sana. Jabez Carey sangat dicintai jemaat di Ambon, tetapi dengan berat hati ia harus meninggalkan Ambon ketika pemerintahan diserahkan Inggeris ke Belanda pada tahun 1817. Gereja di Maluku kemudian hi-dup kembali setelah kedatangan usaha Pekabaran Injil NZG (*Nederlandze Zendeling Genootschap* dengan J. Kam sebagai salah satu utusan Injilnya) yang bekerjasama dengan '*Gereja Protestan*' (1815-1864) dan kemudian berdiri di ba-wah Gereja Protestan selama hampir satu abad lamanya (1864-1935) sebelum kemudian dipimpin oleh orang-orang Maluku sendiri dengan dibentuknya '*Gereja Protestan Ma-luku*' (GPM). GPM dapat dikata adalah gereja dengan perkembangan yang paling tua di Indonesia, dan sejak dibentuknya GPM di tahun

1935 pekabaran Injil di Maluku dilakukan sepenuhnya oleh orang-orang Kristen Maluku sendiri.

Stigmatisasi bahwa agama Kristen adalah '*agama Belanda*' tidaklah keliru, sebab bukan saja faktanya memang bahwa agama Kristen datangnya ke Indonesia bersama dengan para penjajah, ternyata hubungan antara gereja dengan pemerintah Belanda memang sangat erat sekali. Para pendeta dan pembantunya biasa diangkat sebagai pegawai pemerintah Belanda, bahkan ketika di tahun 1885 didirikan '*Sekolah Guru Injil*' atau 'STOVIL' (*School Tot Opleiding Van Inlandse Leeraren*) di Ambon, guru-guru Injil itupun kemudian diangkat sebagai pegawai pemerintah pula. Baru pada tahun 1935 dengan dibentuknya GPM maka gereja Maluku berdiri lepas dari pemerintah Belanda, namun tata gereja yang dibuat oleh gereja baru ini masih memiliki kesamaan dengan tata gereja Gereja Protestan yang berkiblat ke Belanda, kekristenan masih dianggap sebagai '*gereja bangsa*'.

Anak-anak yang belum dibaptiskan maupun yang bukan anggota gereja diakui sebagai anggota gereja, *keanggotaan gereja identik dengan kebangsaan/kesukuan*. Jadi, gereja Maluku bukan saja menjadi '*gereja bangsa*', tetapi juga sebagai '*gereja pemerintah*' dan situasi yang sifatnya pengaturan dari atas itu kemudian membuka peluang terjadinya praktek sebagai '*gereja pendeta*' pula. Situasi demikianlah yang kemudian mendatangkan bahaya bagi kekristenan di Maluku, soalnya menjadikan kekristenan sebagai agama bangsa membuka peluang bahwa kekristenan belum benar-benar dihayati oleh semua warga bangsa, dan sama seperti pada zaman Konstantin dimana bangsa Romawi dikristenkan secara masal, demikian juga gereja

bangsa ini kemudian belum bisa melepaskan adat-istiadat maupun kekafiran yang menjadi kelemahan bangsa-bangsa yang belum mengenal Injil di Maluku. Jadi yang seharusnya agama Kristen memperbaiki kelemahan adat-istiadat bangsa maka sekarang agama Kristen itulah yang kemudian diperlemah.

Di samping hambatan dari tradisi dan pemerintahan, hambatan juga datang dari luar seperti apa yang terjadi di *Halmahera* (Maluku Utara), apalagi hasil rempah-rempah di Maluku Utara ini dianggap kurang menguntungkan dibandingkan hasil rempah-rempah di Maluku Selatan (Ambon) sehingga kurang diprioritaskan oleh para penjajah. Sejak ditinggalkan oleh Portugis dan Spanyol di tahun 1630 dan dikuasai Belanda, memang jemaat Kristen di Halmahera yang semula dirintis oleh *Franciscus Xavier* itu kurang mendapat pemeliharaan sehingga merosot baik dalam hal ibadat maupun kerohanian, dan baru pada tahun 1865 badan pekabaran Injil Belanda bernama UZV (*Utrechtse Zendings Vereen-iging*) memulai pekerjaannya di sini. Berbeda dengan di Ambon, di Halmahera kesulitan politik dari luar lebih besar karena pengaruh ke-sultanan *Ternate* dan *Tidore* yang waktu itu berkuasa atas suku-suku di Halmahera, terutama Sultan Ternate yang memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan *islamisasi* penduduk mengingat bahwa umumnya penduduk yang sudah mengalami *kristenisasi* oleh Belanda cenderung mempunyai loyalitas yang lebih dan mendukung penjajah. Faktor '*fanatisme tradisi agama*' juga sangat berperan. Orang Halmahera yang menganut Islam yang pindah menjadi beragama Kristen mendapat hambatan berat, sebaliknya orang Kristen yang mau masuk Islam juga tidak direlakan oleh gereja bangsanya.

Pekabaran Injil di Halmahera dimulai di antara suku *Tobelo* (di pantai timur). Di daerah itu terbukalah pintu untuk Injil dengan terjadinya pemberontakan pada tahun 1896. Raja-raja *Jailolo* memberontak melawan sultan Ternate yang berpusat di pantai barat dan mengajak suku Tobelo untuk melawan sultan Ternate. Seorang utusan Injil Belanda (Hueting) berhasil mempengaruhi seorang raja kafir yang kemudian minta dibaptis pada tahun 1898, ini membuka pintu ke arah *kristenisasi* di kalangan suku Tobelo, bahkan dalam waktu tiga tahun saja sudah dilakukan pembaptisan massal kepada sekitar 3000 orang di sana. Pada tahun 1910 didirikan '*sekolah guru*' di Tobelo tetapi hasilnya sedikit karena kekurangan murid dan pada tahun 1933 ditutup karena berhentinya subsidi dari pemerintah Belanda. Baru setelah kemerdekaan dibuka lagi *sekolah guru* yang kemudian menjadi '*sekolah penginjil*.' Mirip dengan kekristenan di Ambon, kekristenan di Halmahera juga cenderung bersifat sinkretis dan menjadi '*gereja bangsa*' pula, dan adat-istiadat kafir masih dipraktekkan jemaat Kristen, apalagi ketika usaha pekabaran Injil disana diteruskan oleh pekabar Injil dari Ambon, terjadi peng'*ambonisasi*'an kekristenan di Tobelo (kekristenan yang sinkretis bercampur baur dengan kepercayaan kafir).

Tradisi memang memainkan peranan yang luar biasa di dalam kegerejaan Ambon. Kebiasaan-kebiasaan dianggap oleh mereka itu seperti anasir-anasir Kristen yang hakiki. Terjadilah suatu corak kegerejaan demikian rupa, sehingga boleh dikatakan bahwa kekristenan sudah *diambonisasikan*. Dengan sendirinya corak itu dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Ambon kemana-mana. Jikalau anasir-anasir kekristenan sudah bercampur dengan anasir-anasir suku itu secara begitu jauh, maka

idak heran, bahwa di dalam campuran agama Ambon terdapat pula anasir-anasir tahyul." Pengaruh penginjil-penginjil Belanda dan kemudian penginjil-penginjil Ambon masih kuat pada gereja Halmahera sehingga usaha mereka membuat 'tata-gereja' juga terpengaruh sama halnya dengan tata gereja GPM. Pada tahun 1947 gereja di Halmahera secara resmi dipimpin orang-orang pribumi dengan nama GMIH (*Gereja Masehi Injili Halmahera*). Lepasnya GPM dan GMIH dari gereja Belanda membwa pengaruh positif, yaitu makin mandiri dan dengan adanya aliran-aliran baru menyebabkan kekristenan di Maluku berangsur-angsur mengalami perbaikan.

D. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik

Mencermati pembahasan dan uraian di atas tentang akara kekerasan dan konflik di Maluku Utara, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mendorong serta mempengaruhi timbulnya konflik berkepanjangan di Maluku dan Maluku Utara baik internal mapun eksternal. Dari berbagai faktor tersebut, studi ini mengklasifikasi beberapa faktor utama yang saling terkait menyebabkan konflik di Maluku Utara.

1. Faktor Geografis dan Demografis

Kondisi geografis ‘seribu pulau’ (Maluku dan Maluku Utara), menyebabkan kehidupan laut yang keras mewarnai sikap dan perilaku penduduk. Kengan kondisi seperti itu, keamanan menjadi rawan di mana penduduk lebih mudah berbenturan. Keadaan menjadi lebih rawan dan panas ketika para pendatang suku-suku pelaut yang berlatar-belakang keras, pada kenyataannya telah menjadi kekuatan mayoritas dengan

pengikat agama dibandingkan suku asli sekaligus menjadi kekuatan yang membuat perimbangan bergeser. Tidak dapat disangkal bahwa cikal bakal permusuhan ini disebabkan kemakmuran dan kesuburan alam kepulauan Maluku Utara akan hasil bumi (rempah-rempah) yang disebut ‘emas hijau.’

Faktoo geografis dan demografis terkait dengan masa lalu (sejarah), menjadi sebab-sebab dasar yang belum tersentuh. Kedua kelompok (Muslim dan Kristen) masing tinggal di wilayah-wilayah yang sangat terpisah satu sama lain, menyebabkan sikap penduduk dari berbagai sudut tetap negatif, dan emosi tetap tinggi – meskipun berbagai upaya dan langkah telah diambil oleh pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat (sipil dan keagamaan) baik lokal maupun internasional belum mampu menciptakan perdamaian seperti yang diharapkan.

Hasil pengamatan (penciuman lapangan) menunjukkan bahwa, pertarungan kekuasaan dan persaingan atas sumber daya terkait dengan suku dan gama terutama disebabkan oleh perlakukan istimewa yang diberikan kepada satu kelompok atau yang lain, baik pemerintah Kolonial maupun Orde Baru dapat menimbulkan konflik (persaingan tidak sehat, iri hati, dan permusuhan). Di antara persoalan-persoalan mendasar ini, perhatian penulis terutama bentuk-bentuk pengelompokkan tradisional versusu bentuk-bentuk pengelompokkan menurut wilayah, politik dan ekonomi yang memisahkan kaum Muslim dan Kristen ke dalam berbagai bentuk yang berpotensi menimbulkan konflik dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Kondisi ini menurut hasil analisis menunjukkan bahwa, para elit tradisional maupun formal memainkan peran penting dalam mempertahankan pemisahan itu

karena secara politik dapat menguntungkan pihak-pihak yang tidak menghindaki terciptanya perdamaian di Maluku dan Maluku Utara. Hal ini nampak jelas ketika konflik di Maluku Utara yang melibatkan kedua kelompok (Muslim dan Kristen) di wilayah pertambangan Malifut (Halmahera Utara), merupakan salah satu bentuk konflik antar elite yang memiliki akses sangat luas. Indikasi yang dapat dianalisis adalah, salah satu dari kelompok-kelompok itu berada di bawah perlindungan salah seorang anggota keluarga kerajaan dari bekas Kerajaan Ternate dan Tidore yang masih memiliki pengaruh atas penduduk dan wilayah Maluku Utara.

Program transmigrasi nasional dan/atau lokal di beberapa daerah di tanah air telah menghasilkan konflik antar-suku yang berdampak terusirnya suku pendatang sehingga harus mengungsi. Situasi demikianlah yang terjadi di Ambon dan Maluku Utara (Halmahera Utara), umumnya para pendatang itu secara homogen beragama Islam sehingga terjadi benturan dengan suku-suku lokal, lebih-lebih suku lokal yang beragama Kristen. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah lebih karena konflik antar-suku khususnya antara suku Makian dengan suku Kao yang kemudian meluas dalam batasan premordialisme agama sehingga suku-suku lain juga ikut terlibat. Para pejabat transmigrasi dan ahli-ahli sosial perlu benar-benar memperhatikan dampak sosial budaya serta keagamaan dari program transmigrasi, karena jika hal ini tidak dipertimbangkan dengan baik pemecahanannya, tidak mustahil sikap premordialisme kesukuan akan makin menampakkan diri di masa mendatang.

Padatnya jumlah penduduk di pulau Jawa dan makin langkanya lahan di sini menimbulkan usaha *proyek transmigrasi*. Sebenanrnya ide transmigrasi sudah terasa

sejak abad ke-19, di mana kepadatan di pulau Jawa yang relatif jauh lebih padat dari pulau-pulau lainnya telah mendatangkan perhatian lebih pada gejala perubahan pedesaan di pulau Jawa itu. Sejak tahun 1860 sampai tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa hasil penelitian tentang penyediaan tanah, kekurang makmuran rakyat, beban pajak dan keadaan kehidupan beberapa golongan masyarakat. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa perkembangan penduduk yang relatif cepat di pedesaan terutama dalam hubungannya dengan pengadaan tanah serta kemakmuran rakyat secara keseluruhan telah menimbulkan keprihatinan, kecemasan berbagai pihak.

Terkait dengan faktor geografis dan demografis ini, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam kebijakan *emigrasi* yang dimulai 1905; melalui program *kolonisasi* sebagai upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kekurangan lahan pertanian sekaligus mengurangi kepadatan penduduk Pulau Jawa. Dari berbagai laporan dapat diketahui bahwa program yang disebut *emigrasi* atau transmigrasi itu meningkat ketika ada rencana di tahun 1947, yang disebut ‘Rencana Lima Belas Tahun Tambunan’ dan ‘Rencana Tiga Puluh Tahun Tambunan' di tahun 1951 yang lebih ambisius. Namun, usaha transmigrasi tidak sepi dikritik karena dianggap bakal menghasilkan daerah-daerah kantong yang tidak terlalu mudah dan makin sulit untuk dapat menyesuaikan diri dengan daerah yang didatangi dan bisa menjurus pada pemukiman yang *eksklusip* di antara penduduk pribumi lokal yang potensial menghasilkan benturan sosial-budaya. Situasi demikian sudah sering menimbulkan gejolak di lokasi-lokasi transmigrasi.

Program Transmigrasi resmi setelah kemerdekaan memang memecahkan masalah kependudukan di pulau Jawa, tetapi hal ini ternyata berdampak terhadap lokasi transmigrasi itu sendiri, apalagi adanya penyalah gunaan oleh oknum pejabat tertentu yang mengirimkan orang-orang sesuku dan seagama, sehingga program transmigrasi sering diberi cap *jawanisasi* atau *islamisasi*. Lokasi transmigrasi di banyak tempat menimbulkan permusuhan dengan penduduk lokal, bahkan situasi ini menghasilkan pengungsian besar-besaran para pendatang dari lokasi transmigrasi.

Konflik transmigran pendatang dengan pribumi tidak sekedar melibatkan yang berbeda agama, sebab dalam konflik Kalbar Madura yang Islam ikut ditolak oleh suku Melayu yang Islam disamping oleh suku Dayak, demikian juga puluhan ribu pengungsi beragama Islam dari Jawa/Madura terpaksa keluar dari Aceh yang Islam. Kondisi ini akan lebih parah bila agama pendatang berbeda dengan pribumi. Soal transmigrasi di kepulauan Maluku sudah berlangsung lama. Kita dapat melihat bahwa *transmigrasi spontan* secara berangsur-angsur sudah terjadi selama berabad-abad karena daya tarik 'emas-hijau', bukan saja datang dari kepulauan yang berdekatan seperti *Buton*, *Bugis* dan *Makassar* (BBM) tetapi juga dari pulau-pulau yang berjauhan seperti *Jawa*, *Kalimantan* dan *Sumatera* (JKS). Dari mancanegara, kelompok-kelompok Cina dan Arab yang sudah bermukim sejak lama di kepulauan Maluku, dan *program transmigrasi resmi* dari pemerintah RI membuka peluang terjadinya transmigrasi yang besar-besaran bahkan dengan adanya *bedol desa*, maka potensi konflik menjadi lebih besar. Bibit-bibit konflik yang disebabkan 'transmigras*i*' baik yang spontan maupun yang resmi ternyata memainkan peran di kepulauan

Maluku. Komposisi penduduk asli yang dahulu memang mendominasi tatanan sosial, ekonomi dan politik di Maluku, baik dalam jumlah maupun pengaruh di sektor pemerintahan dan militer.

Perimbangan ini beubah ketika suku-suku asli beragama Islam yang tinggal di Maluku Utara mendapat teman primordial suku-suku pendatang dari luar seperti BBM dan JKS sehingga golongan ini menjadi mayoritas di Maluku. Masalahnya bukan sekedar perubahan jumlah tetapi juga para pendatang umumnya lebih giat, sehingga berangsur-angsur tatanan sosial, ekonomi dan politik di Maluku dan Maluku Utara berubah. Kondisi sosial-ekonomi yang makin tidak berimbang menghasilkan timbulnya kecemburuan sosial, bahkan ditingkat elite pertarungan demikian makin tajam. Tomagola (2001), mencermati bahwa akar konflik adalah dirasakannya ketidak adilan ekonomi dan politik. “Sumbunya Makian” sekarang merembet ke agama.

2. Faktor Sosial Budaya, Ekonomi dan Politik

Kekayaan alam provinsi ‘seribu pulau’ yang menghasilkan kehidupan sosial budaya yang lebih baik bagi penduduknya. Sejak abad ke-7 kedatangan pelaut Cina dapat menyadarkan arti ekonomis komoditi rempah-rempah, yang kemudian juga dikejar jauh dari tanah Arab dan Eropah maka ‘harta’ tak ternilai ini punya potensi diperebutkan oleh para sultan dan raja suku-suku lokal. Makmurnya para pendatang yang sekarang menguasai nadi ekonomi bukan saja mendatangkan kecemburuan sosial, tetapi juga menimbulkan kemarahan yang timbul di hati pribumi menghadapi

dominasi pendatang. Bukan saja ‘emas hijau’ yang diperebutkan, tetapi bumi di mana ‘emas hijau’ itu dihasilkan kemudian menjadi ajang perebutan (konflik).

Kedatangan armada-armada Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggeris yang melakukan kolonisasi, maka perebutan bumi/tanah dan kekuasaan politik untuk menguasainya ternyata memecah belah suku-suku itu. Bila kemudian polarisasi politik berkembang antara kesultanan pribumi dengan penjajah Eropah, kemudian polarisasi politik itu di zaman kemerdekaan terjadi antara suku asli dengan para pendatang, pendatang yang sekarang banyak menguasai tanah, gedung dan jabatan-jabatan politik di Maluku Utara.

Menurut salah satu informan (*SK/58 th*), bahwa penyebab utama timbulnya konflik di Maluku Utara adalah faktor politik. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang sejarah di mana sejak masa penjajahan, Belanda yang memperlakukan secara istimewa umat Kristen. Namun, kami sebagai umat Kristen harus melokalisir ketidak-puasan kami dan tidak memukul rata seakan-akan semua yang beragama Islam memusuhi orang Kristen. Sebagai bukti, kelompok garis keras dalam Islam yang sebenarnya adalah kelompok minoritas yang tidak mendapat dukungan dari sebagian besar bangsa Indonesia yang beragama Islam, ini terlihat dari hasil Pemilu di mana kelompok Islam moderatlah yang paling banyak mendapat dukungan. Tidak dapat dipungkiri, dalam situasi krisis di berbagai bidang yang dihadapi Indonesia isu agama memang cukup ampuh untuk menjadi kendaraan politik, Sehingga simbol-simbol agama digunakan untuk tujuan politik.

Para elite politik sering menggunakan isu premordialisme agama sebagai komoditi politik, namun sesungguhnya tidak ada konflik antar agama. Tetapi, yang ada adalah konflik antar-umat beragama. Selama beberapa abad kehadiran Kristen di Maluku, tidak ada konflik agama yang terjadi antara suku-suku asli yang beragama Islam dengan suku-suku asli yang beragama Kristen, serta perbedaan diselesaikan dengan tradisi lokal. Bila ada konflik antar-suku, itu adalah konflik politik. Memang dapat dimaklumi mengapa agama sering dijadikan isu penyebab, soalnya agama Kristen diidentikkan dengan kehadiran penjajah sehingga agama Kristen sudah distigmatisasikan dengan penjajahan, dan melawan penjajah sama halnya dengan melawan agama Kristen. Keterlibatan agama lebih disebabkan karena sebagai 'komunitas sosial' di mana mereka yang menganut Kristen itu lebih loyal kepada Belanda sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatan dalam konflik yang melibatkan Belanda dan Sultan.

Secara sosiologis dapat diketahui bahwa, suku-suku asli (agama Kristen) yang sejak zaman Belanda mempunyai supremasi baik jumlah maupun pengaruh dalam pemerintahan sekarang harus menghadapi kenyataan yang beubah drastis dimana sekarang menjadi minoritas di kandang sendiri. Kondisi mana sama dengan penyebab konflik di Maluku pada umumnya, Kalimantan dan Papua. Banyaknya faktor warisan sejarah yang potensial menjadi akar penyebab konflik yang ada di kepulauan Maluku kelihatannya cukup matang untuk meletus dan tinggal menunggu adanya pemicu atau pembakar, sebab kematangan itu sudah terlihat dengan sering terjadinya konflik-konflik kecil secara sporadis menjelang 1999-2001.

Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis dapat ditarik beberapa faktor yang melandasi terjadinya konflik yang berkepanjangan di Maluku Utara, antara lain:

a. *Faktor-faktor sejarah*, perlakuan istimewa yang diberikan pemerintah kolonial dan pemerintah Orde Baru kepada kelompok (suku dan agama) tertentu, yang merupakan warisan sejarah dan berkembang meninggalkan benih-benih berupa perselisihan-perselisihan.

b. *Fakto-faktorr perorangan/kelompok*, rasa frustrasi yang dirasakan perorangan dan kelompok dapat setelah beberapa waktu menciptakan rasa sakit hati yang mendalam. Ini sering dimanfaatkan oleh para elit lokal maupun nasional yang memperlakukan perasaan itu seakan-akan merupakan nilai-nilai, kepentingan dan kebutuhan kelompok.

c. *Faktor-faktor kebijakan*, atau lebih spesifik: (a) janji-janji yang tidak ditepati, ditambah dengan sikap memecah belah dari pihak pemerintah dan militer, yang menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati; (b) korupsi dalam pemerintahan dan kekacauan dalam pengaturan serta pengelolaan sumber daya alam menciptakan kontradiksi, yang pada gilirannya menimbulkan konflik.

d. *Faktor-faktor kelembagaan atau struktur lokal*, memainkan peranan dalam merangsang konflik ketika faktor-faktor itu mendorong perebutan kekuasaan dan persaingan untuk memperoleh sumber daya dalam lembaga-lembaga setempat. Bila ciri-ciri penduduk setempat dan lingkungan hidup mereka mendorong hubungan perseteruan, dan bila para pemimpin dan para birokrat (elite tradisional dan formal) setempat mempertahankan pemisahan berdasar suku dan agama.

Lembaga dan struktur harus diubah untuk meningkatkan nilai bagi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan rekonsiliasi.

e. *Faktor-faktor manajemen sumber daya*, eksploitasi sumber daya setempat oleh pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan asing menciptakan jurang antara bentuk-bentuk kontrol wilayah menurut adat dan menurut konsep modern dengan pembagian wilayah (sehingga diperlukan, paling tidak, pergeseran konsep dari konsep hak milik bersama ke konsep hak milik pribadi).

f. *Faktor-faktor luar*, LSM internasional dan berkantor pusat di Jakarta memainkan peran dalam membangkitkan dan meningkatkan kesadaran politik rakyat banyak; gerakan-gerakan yang sering memperjuangkan pemberantasan ketikadilan dapat menimbulkan konflik.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, faktor yang tidak kalah penting yang ikut mempertebal permusuhan ialah unsur-unsur separatis dan partisan dari luar Maluku Utara serta memanaskan situasi. Berita yang tidak seimbang, yang *mengecilkan kesalahan sendiri* dan *membesarkan kesalahan lawan*, juga semakin memanaskan situasi. Di samping itu, sesuai pengamatan selama penelitian terlihat jelas peran provokator yang berlindung di balik kepentingan dan penderitaan rakyat serta oknum-oknum militer tertentu. Indikasi yang kerusuhan biasa dipicu provokator yang trampil akan strategi militer. Tidak bisa disangkal peran *money politics* dari pejabat-pejabat tertentu (elite birokrasi dan politik) yang ingin mengalihkan perhatian nasional atas pengadilan pada dirinya, seperti kerusuhan perkotaan, pembantaian oleh para ‘ninja’ dan lainnya dengan cara membiayai para provokator.

BAB VI

DINAMIKA KONFLIK DAN PERUBAHAN SOSIAL DI MALUKU UTARA

A. Konflik Antar Elite Dalam Konteks Sejarah

Maluku Utara yang dikenal sebagai ‘emas hijau’ karena wilayah ini sangat subur dan berkelimpahan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala yang menjadi daya tarik bagi semua orang sampai ke mancanegara. Di satu sisi, mendatangkan berkah bagi sebagian penduduknya, tetapi disi lain, menjadi malapetaka bagi semua penduduknya berupa konflik berkepanjangan hingga meletusnya kerusuhan berdarah (tragedi kemanusiaan 1999-2001). Memang daya tarik itu luar biasa sehingga peta-peta dalam bahasa Inggeris menamakan kepulauan ini sebagai ‘*Island of Spices*.’

Daya tarik emas hijau yang dihasilkan di kepulauan Maluku, ternyata sudah tercium oleh pelaut dan pedagang *Cina* sekitar abad ke-7, mereka secara kelompok-kelompok sudah kerap mengunjungi kepulauan Maluku. Pedagang Cina sifatnya perorangan dan mereka hanya membeli rempah-rempah untuk di jual di negerinya sendiri, tetapi kemudian berdatanganlah kerajaan-kerajaan yang bukan saja tertarik oleh hasil bumi tetapi juga bumi atau tanah dimana rempah-rempah itu dihasilkan. Kemudian berdatangan juga para saudagar dari Aceh, Malaka dan Gersik yang berlatar belakang agama Islam yang ikut meramaikan perdagangan komoditi hasil bumi yang sangat menggiurkan itu dan beberapa yang menetap di kepulauan ini. Sebelum itu, emas hijau ini ternyata sudah menarik saudagar-saudagar dari seberang lautan sampai ke jazirah Arab.

Negara Eropa pertama yang berekspansi di Maluku adalah Portugis. Dua armada *Portugis* mendarat di Maluku pada tahun 1521 dibawah kepemimpinan Anthoni d'Abreu dan Francisco Serau dan mendaratkan armada mereka di pulau *Banda* dan *Penyu* dan mendirikan benteng di Pikapoli, di negeri Hitu dan Mamala sebagai basis armada mereka. Armada ini bukan saja membawa misi dagang, tetapi Portugis juga membawa misi politik dengan melakukan penjajahan atas daerah yang dikuasainya dengan kekuatan senjata. Sembilan tahun kemudian (1530), armada Spanyol juga berhasil mendarat di kepulauan Maluku dan sempat mendirikan benteng di Tidore sekalipun tidak dipertahankan dalam waktu yang terlalu lama.

Sejalan dengan misi dagang dan politik, baik Portugis maupun Spanyol juga membawa misi agama ke Maluku. Misi Kristen Roma Katolik kemudian melakukan usaha Kristenisasi penduduk yang dikuasainya. Konflik Islam-Kristen sudah terjadi sejak awal kedatangan para penjajah, berhadapan dengan kekuatan penolakan dari kesultanan pribumi di lokasi yang sudah terlebih dahulu melakukan Islamisasi. Tidak heran bila bibit konflik ini menimbulkan benturan kekerasan, yang berpuncak pada terbunuhnya Sultan Khairun oleh Portugis (1570).

Perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Portugis dimanfaatkan oleh Belanda untuk masuk ke kepulauan Maluku, membawa misi Kristen Protestan. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat sejak didirikannya VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) tahun 1602. Konflik antar elite sejak awal berjalan bersamaan dengan konflik antar pengikut agama serta konflik ekonomi, yaitu perebutan penguasaan atas perdagangan rempah-rempah dan tanah Maluku. Sebagai akibatnya, umumnya agama

terkotak-kotak dalam kesukuan dan kedesaan dan konflik ekonomi dan politik tidak terhindarkan, yang pada gilirannya melibatkan konflik antar pengikut agama.

Konflik ini bukan saja antara suku-suku yang menganut agama Kristen di daerah yang dikuasai penjajah Eropa dengan suku-suku yang menganut agama Islam di bawah penguasaan kesultanan, tetapi konflik antar penganut agama juga terjadi antara desa Kristen Roma-Katolik yang berada di bawah kekuasaan Portugis dan desa Kristen Protestan yang berada di bawah kekuasaan Belanda, ketika terjadi perang antara Portugis dan Belanda yang menyebabkan ribuan korban jiwa. Pertentangan ini makin hebat ketika Belanda kemudian menguasai seluruh kepulauan Maluku, karena ikatan premordialisme agama menyebabkan pemerintah Belanda merasa lebih dekat dengan penduduk (desa-desa) yang beragama Kristen dan mengistimewakakan.

Menurut salah satu sumber (*YA/67 th*), menyebutkan bahwa ada dua alasan mengapa Belanda mengistimewakan penganut agama Kristen Protestan. *Pertama*, mereka lebih mudah berkooperasi dengan pihak Belanda. *Kedua*, gereja di Maluku mempunyai ikatan *paternaslisme* dengan gereja di Belanda. Kondisi ini mengurangi adanya potensi perlawanan terhadap penguasa Belanda. Namun, kondisi ini tidak menguntungkan karena agama Kristen kemudian lebih dianggap sebagai agama Belanda, atau bahkan sebagai agama Penjajah. Suatu stigmatisasi yang jelas sangat merugikan kerukunan agama di Maluku dan Maluku Utara terutama pihak Kristen. Konsekuensinya melawan Belanda dianggap juga sebagai melawan kekristenan atau melawan kekristenan berarti pula harus melenyapkan pengaruh kekuasaan Belanda. Dengan adanya julukan seribu pulau, Maluku dan Maluku Utara dihuni oleh berbagai

suku yang mendorong distribusi penganut agama berdasarkan pembagian kampung/ desa, atau oleh Belanda disebut ‘negeri’ yang masing-masing mempunyai rajanya sendiri-sendiri, dan bila ada suku yang menganut dua agama maka terpisah menjadi ‘desa Islam’ dan ‘desa Kristen’ sekalipun sama sukunya.

Kondisi *eksklusivistik* ini diperparah oleh adanya politik *devide et impera* Belanda yang memang tidak menghendaki adanya kesatuan di kalangan penduduk pribumi, bahkan kalau bisa makin mempertentangkan mereka agar mereka lemah dan tidak mengganggu kekuasaan penjajah. Sebenarnya di kalangan suku-suku pribumi sadar bahwa, mereka adalah bersaudara sesuku atau setidaknya suku-suku mereka sejak dahulu saling tenggang rasa. Meskipun para penjajahan telah membuat mereka terjerat pada *premordialisme* baru yaitu SARA (suku-agama-ras-antar golongan) yang dihasilkan politik *devide-et-impera*, sebenarnya tali kekerabatan yang mengikat antar mereka masih kuat secara turun temurun.

Ketika kepulauan Maluku berangsur-angsur menerima kedatangan suku-suku pendatang yang ikut mencari rezeki dan membawa agama yang berbeda, maka kemudian adat-istiadat lokal sebagai perekat kesukuan menjadi kurang bermakna lagi, sebaliknya unsur perbedaan ‘SARA’ makin mengkristal dan potensial untuk memecah belah suku-suku lokal di kepulauan Maluku. Itulah sebabnya masyarakat kepulauan Maluku dan Maluku Utara itu makin menjadi heterogen sehingga dalam kehidupan selanjutnya ke pelbagai suku-suku itu makin susah untuk direkatkan satu sama lain dan puncaknya dalam kerusuhan 1999 bahwa, kekerabatan itu bukan saja sudah luntur tetapi berantakan menjadi permusuhan.

1. Perebutan Sumberdaya Alam dan Kekuasaan

Sejarah mencatat bahwa, sejak kemunculannya empat kesultanan di Maluku Utara, Kesultanan Ternate dan Tidore sudah berebut hegemoni terutama sumber daya alam dan kekuasaan melalui politik ekspansi. Ternate meluaskan pengaruh ke Halmahera Utara, Kepulauan Lease, Ambon, Buru, Sula, dan Seram, sedangkan Tidore melakukan ekspansi ke Halmahera Tengah, Seram Timur, dan kawasan Raja Ampat di Papua. Persaingan ini membuat mereka memilih mitra koalisi asing yang berbeda. Ternate merangkul Portugis pada tahun 1512, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol sepuluh tahun kemudian. Hanya dua kali sepanjang sejarah dua kerajaan ini bersatu. *Pertama*, ketika penguasa Portugis menurunkan Sultan Tabariji dari Ternate (1533) dari singgasana. *Kedua*, saat Sultan Khairun dibunuh Portugis (1570). Namun, persekutuan ini hanya bersifat sementara. Sultan Tidore tampaknya khawatir, kesewenang-wenangan asing dalam urusan internal kerajaan dapat menjadi preseden buruk. Kompetisi yang tak jarang berujung pada perang, baru berakhir pada tahun 1949 tatkala dua kerajaan ini tak lagi difungsikan.

Persaingan muncul kembali menjelang Maluku Utara menjadi provinsi. Elite Ternate pimpinan Sultan Mudaffar Syah menghendaki Ternate menjadi ibukota provinsi transisi sebelum dipindahkan ke Sidangoli, desa di Halmahera Utara yang dekat dengan Ternate, di satu pihak. Sementara di pihak lain, Tidore ngotot agar Soasiu, ibukota Halmahera Tengah, yang terletak di Pulau Tidore menjadi ibukota transisi. Dan Sofifi, desa di Halmahera Tengah yang lebih dekat dengan Soasiu,

menjadi ibu kota definitif. Hasil akhir persaingan Ternate-Tidore yang dituangkan ke dalam UU tentang Provinsi Maluku Utara adalah Ternate menjadi ibu kota transisi, sementara Sofifi ibukota definitif. Kompromi ini ternyata tidak memuaskan kedua pihak. Ternate melihat perpindahan ibukota ke Sofifi akan merugikannya dalam jangka panjang. Sebaliknya, Tidore yang selama ini tertinggal jauh dari Ternate akan berubah menjadi wilayah yang strategis. Tetapi, elite Tidore takut kalau-kalau Mudaffar Syah mempertahankan Ternate sebagai ibukota permanen, bila ia terpilih jadi gubernur dalam pemilu lokal. Karena itu, bersama para elite Makian dan Tidore mulai melakukan oposisi terhadapnya.

Setelah status Provinsi Maluku Utara diresmikan tanggal 5 Oktober 1999, meletus konflik antara warga dua kecamatan bertetangga, Malifut dan Kao. Yang disebut pertama dihuni transmigran muslim dari Pulau Makian. Sementara mayoritas warga Kao penduduk asli daerah itu (mayoritas beragama Kristen Protestan) dan merupakan konstituen Sultan Ternate. Konflik ini terkait dengan perebutan wilayah tambang emas di Gosowong, perbatasan Kao-Malifut. Dalam insiden tersebut, 16 desa Malifut musnah terbakar. Sembilan hari kemudian, masyarakat Tidore dengan dukungan Dewan Adatnya menyerang sasaran non Muslim di daerahnya. Tragedi ini berhubungan dengan beredarnya surat Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta SP Titaley STH kepada Ketua Gereja Masehi Injili (GMIH) Tobelo, isinya menggambarkan upaya gereja mengadu domba umat Islam dan menguasai wilayah Halmahera Utara melalui kekerasan di Maluku Utara. Surat itu palsu, tetapi elite lokal menjadikannya sebagai senjata untuk memobilisasi massa.

Sesungguhnya, peristiwa di Tidore adalah ekspresi Kesultanan Tidore atas fenomena kebangkitan Kesultanan Ternate. Tidore sendiri sudah sejak lama cemas atas aktivitas Sultan Ternate yang giat menghidupkan kembali instrumen politik kerajaan seperti pasukan adat, dan kampanye tentang sistem nilai lama di mana Kesultanan Ternate menjadi pusat budaya dan politik. Dari akumulasi pertentangan itu, dan isu Kristenisasi yang dihubungkan dengan Sultan Ternate mengakibatkan tidak populer. Bahkan komunitas Ternate Utara, yang tadinya merupakan basis Sultan Ternate, ikut bergabung dengan Ternate Selatan. Dengan demikian, nama Sultan Tidore kini berkibar. Namun, harga yang harus dibayar cukup mahal, para pendukung Sultan Ternate di Halmahera Utara memberontak. Semangat 'jihad' yang dikobarkan para musuh Mudaffar, bukannya menyelesaikan masalah, malah meningkatkan skala pertikaian. Karena itu, para elite untuk sementara dapat menghentikan isu Kristenisasi. Isu ini memang berhasil meningkatkan kebencian masyarakat pada Mudaffar Syah, dan sebaliknya, meningkatkan popularitas tokoh Tidore. Juga meninggikan semangat 'jihad' masyarakat. Namun, ini akan merugikan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Bukan tidak mungkin, dalam waktu yang bersamaan kerusuhan serupa akan merambat ke Papua dan Manado yang repot mengurusi pengungsi Ternate. Jika demikian, maka tidak akan ada seorang pun yang memperoleh keuntungan. Malah yang akan terjadi justru disintegrasi bangsa.

Menyimak uraian di atas, terdapat tiga sumber daya alam di wilayah Maluku Utara, yaitu pertambangan, hasil hutan, dan kelautan. Sangat menarik ketika upaya eksploitasi ketiga sumber daya alam ini harus melibatkan usaha dan modal skala

besar, maka permainan kekuatan modal berskala nasional bahkan internasional dapat dilakukan. Dalam hal tambang, ada dua kekayaan tambang Maluku Utara yang sangat potensial, yaitu emas dan nikel. Di Gosowong (Halmahera), saat ini emas dikelola oleh perusahaan Asing Australia New Crest yang menanam modal di perusahaan patungan dengan PT Aneka Tambang, yaitu PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Keberaan perusahaan tambang ini menarik, karena kebetulan berada di wilayah Kerusuhan, yaitu Kecamatan Malifut (Halmahera Utara).

Maluku Utara memang kaya akan potensi sumberdaya alam, terutama yang berkaitan dengan eksplorasi pertambangan seperti emas dan nikel. Lahan inilah yang seringkali menjadi perebutan antar elite lokal di daerah sekitarnya, di samping akar konflik yang sudah tertanam di antara suku-suku asli dan pendatang yang berharap mendapat konsesi hasil atas hak tambang di wilayah tersebut. Aktivitas pengelolaan tambang emas banyak dilakukan di wilayah sekitar perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat, serta Kecamatan Malifut. Sesuai hasil pengamatan menunjukkan bahwa, salah satu perusahaan tambang legal yang telah lama bercokol di daerah ini yaitu PT. NHM. Perusahaan ini mulau beroperasi (1997) untuk eksploitasi emas di kawasan Gosowong. Daerah ini juga diklaim masyarakat Kao sebagai salah satu bagian dari wilayah Soa Pagu.

Pada awal kehadirannya, perusahaan ini sangat baik berhubungan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Tidak hanya masyarakat Malifut, banyak anggota masyarakat Kao yang juga direkrut menjadi karyawan. Dalam perkembangannya, ternyata perusahaan ini dianggap sangat merugikan masyarakat sekitarnya, terutama

setelah manajemen PT. NHM dipegang oleh John Bloke. Perusahaan tidak saja dianggap melakukan diskriminasi tenaga kerja dengan menempatkan warga setempat sebagai pekerja “kelas dua” (rendahan), tetapi juga menghasilkan limbah yang tidak tertangani dengan baik, sehingga mencemarkan lingkungan sekitar. Kondisi yang kemudian diperparah dengan dirumahkannya sekitar 250 tenaga kerja beragama Islam dan Kristen di Gosowong, Kecamatan Kao (Halmahera), sejak Oktober 1999 karena terjadi konflik (tampaknya pihak perusahaan tidak mau mengambil resiko karena pertikaian dua kelompok tersebut). Langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mengganti para pekerja lokal adalah dengan mendatangkan para pekerja dari luar daerah, seperti dari Ternate, Manado, Makassar, dan Jawa.

2. Perjuangan Pembentukan Provinsi Maluku Utara

Setelah melalui perjuangan panjang penuh pengorbanan sejak tahun 1953, baru pada Oktober 1999 rakyat Maluku Utara berhasil menjadikan wilyahnya sebagai provinsi tersendiri, dengan ibukota sementara Ternate. Melihat pesta yang dilakukan, tampaknya mereka optimis bahwa dengan status baru, Maluku Utara yang kaya akan sumber alam dapat membangun kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Tetapi kini segala sesuatunya telah berubah menjadi suram. Keharmonisan sosial yang dibangga-banggakan musnah (rusak) seketika. Saling bunuh antar-golongan masyarakat terus berlangsung hingga lebih dari satu tahun (sejak Agustus 1999 sampai Februari 2001). Seperti dijelaskan bahwa banyak faktor penyebabnya, di antaranya; perebutan tambang emas di Halmahera, ekses kerusuhan Ambon, dan persaingan politik elite

lokal. Namun, akar masalah sebenarnya terletak pada persaingan dua kesultanan, Ternate dan Tidore, pulau kembar yang hanya berjarak lima mil. Putra Sultan Tidore terakhir, H Mahmud Raimadoya, mengatakan bahwa kerusuhan itu tidak ada urusan dengan sejarah hubungan kerajaan-kerajaan di Maluku, melainkan bersumber dari permainan politik elite lokal.

Perjuangan pemimpin dan tokoh masyarakat mulai terhenti setelah pecah peristiwa pemberontakan permesta (1958). Pada tahun 1963, para tokoh-tokoh partai politik Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkondo kembali bangkit meneruskan perjuangan para pendahulunya dengan mendesak DPRD-GR Maluku Utara, mengeluarkan sebuah resolusi nomor 4/DPRD-GR/1964 tanggal 12 Januari 1964 yang intinya memberikan dukungan atas perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan resolusi tersebut digalanglah berbagai potensi masyarakat untuk terus memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara.

Proses terbentuknya Provinsi Maluku Utara terlepas dari Provinsi Maluku, merupakan hasil dari perjuangan panjang selama kurang lebih 42 tahun. Kebanggaan akan sejarah kebesarannya di masa lalu, potensi sumber daya alam, dinamika sosial politik dan ekonomi serta jumlah penduduknya mulai menggelitik hati para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat sejak 18 September 1957, DPRD Peralihan Maluku Utara mengeluarkan sebuah resolusi meminta Pemerintah Pusat menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun tidak berhasil. Irian Barat ditetapkan sebagai provinsi dengan ibukota Soasio – Tidore, melalui UU No. 15 tahun 1956.

Perkembangan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi termuda di kawasan Timur Indonesia, tidak terlepas dari perspektif sejarah kejayaan dan pasang surut empak kesultanan di Maluku Utara khususnya Kesultanan Ternate sebagai salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh antara abad ke-14-16. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah-daerah yang luas di kepulauan Maluku sampai Mindanao sebelah Utara, dan Sulawesi bagian Timur di sebelah Barat. Demikian besarnya kekuasaan dan pengaruh kesultanan Ternate pada masa itu, sehingga bahasa Ternate menjadi populer di Maluku. Raja-raja yang memerintah dikenal dengan "Raja 72 pulau."

Berakhirnya pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru akibat G-30/S/PKI 1965, mengakibatkan semakin tidak jelasnya nasib perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. Di era reformasi, semangat perjuangan yang tepat terpatri dan menjadi suatu akumulasi kebutuhan atas kehadiran sebuah provinsi berkobar kembali mencari identitas dan jati diri yang telah diperjuangkan selam kurang lebih 43 tahun silam. Seiring dengan itu, aspirasi Cendekiawan, Birokrat, tokoh masyarakat, LSM, dan Generasi Muda disatukan dalam wacana informal. Aspirasi ini kemudian dikemas dalam satu keputusan oleh DPRD Maluku Utara dan Halmahera Tengah, tentang persetujuan usulan atas pembentukan Provinsi Maluku Utara. Kemudian keputusan ini diteruskan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI. Atas dasar inilah Pemerintah bersama DPR menerbitkan UU No. 46 tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999, Maluku Utara resmi menjadi provinsi terpisah dari Provinsi Maluku.

Impian telah menjadi kenyataan, rakyat bersorak gembira, menyambut kehadiran Provinsi Maluku Utara 12 Oktober 1999. Namun, sorak sorai kegembiraan rakyat tiba-tiba terhenti, langit cerah tiba-tiba kelabu bahkan kelam. Provinsi baru ini diterpa kerusuhan (konflik horizontal) yang tak terelakkan. Negeri ini terjerembab ke dalam lembah nestapa, ribuan jiwa melayang, belasan ribu lahan pertanian binasa, ratusan ribu orang meninggalkan kampung halaman mengungsi ke mana-mana, harta benda berupa rumah, gedung-gedung sekolah, tempat-tempat ibadah luluh lantah rata dengan tanah. Investasi meliyaran rupiah terganggu roda produksinya, ekspor pun tersendat. Roda ekonomi terseok-seok berputar, bahkan nyaris berhenti sama sekali. Keamanan dan ketertiban masih belum menjamin ketenteraman hidup masyarakat, maka apa boleh dikata dengan berat hati Pemerintah Pusat menjatuhkan pilihan kepada "Pemberlakuan Keadaan Darurat Sipil."

Itulah gambaran situasi Maluku Utara dari dimensi ekonomi, politik, sosial budaya yang dihadapi sebagai akibat atau dampak dari konflik yang berkepanjangan. Dilihat dari aspek psikologis, adalah luka-luka hati, kebencian dan dendam kusumat antar kelompok bahkan keluarga yang terseret ke dalam pertikaian. Luka hati seperti ini memerlukan penanganan yang arif dan adil, bila tidak maka proses penyelesaian yang telah dan sedang berjalan yang lebih dikenal dengan "3R" (tiga langkah penangnan masalah konflik dan pengembalian pengungsi. Ketiga R tersebut adalah: *Rekonstruksi/rehabilitasi, Reevakuasi, dan Rekonsiliasi* atau istilah penulis "Integrasi Sosial dan Politik," dapat memerlukan waktu yang relatif panjang (minimal satu generasi atau 25 tahun).

Konteks ini perlu dijelaskan bahwa, terbentuknya Provinsi Maluku Utara seiring dengan timbulnya konflik bernuansa 'SARA' adalah akselarasi antara euforia reformasi, otonomi daerah dan persaingan antar-elite. Bertiupnya udara kebebasan, sebagai buah reformasi dan pemberian otonomi kepada daerah, muncullah kekuatan-kekuatan sosial politik baru di masyarakat yang mengambil posisi dalam perebutan kekuasaan. Dalam hal ini, orientasi kekuatan sosial politik tersebut adalah kekuasaan, yang terkadang mendapat kemudahan dengan terjadinya konflik. Ilustrasi permainan elite formal Maluku Utara dalam memanfaatkan era reformasi dan otonomi daerah, antara lain: *developmen of power* yang diharapkan – dalam implementasinya masih jauh dari penguatan oleh masyarakat. Kewenangan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dimaknai oleh elite formal (birokrat dan politikus lokal) sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengelola segala potensi di dalam teritorialnya termasuk masyarakat. Karena itu, tidak heran bila elite formal kemudian kambuh penyakit lamanya, bahkan semakin akut bagi elit lokal untuk memperkaya diri.

Salah satu upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan daerah, adalah dengan pemekaran wilayah. Tujuan pemekaran wilayah sebenarnya adalah, memberikan kesempatan kepada publik. Kenyataannya, upaya ini sering disalah gunakan oleh elite formal lokal sebagai lahan pembagian kekuasaan di antara mereka, bahkan dengan keterlibatan aktor pusat (elite formal nasional). Maka dari itu, dapat dikatakan UU ini merupakan UU yang tergolong 'basah,' karena kelancarannya seringkali berkaitan dengan dana dalam lobi-lobi pengambilan keputusan. Semakin kuat lobi dilakukan, maka akan semakin cepat UU tersebut disahkan. Hal ini karena

bagaimanapun juga – secara redaksional – UU Pemekaran Wilayah tergolong paling mudah dibuat. Seperti halnya yang terjadi di banyak daerah, persoalan pemekaran wilayah di kepulauan Makulu ternyata menimbulkan ekses perdebatan yang serius di antara elite formal (lokal) maupun sesama masyarakat. Perdebatan yang muncul di antara elite formal (lokal) terutama berkaitan dengan pembagian kekuasaan/jabatan di daerah yang baru dimekarkan, sementara perdebatan yang terjadi di kalangan warga masyarakat terutama berkaitan dengan eksistensi adat dan penguasaan sumberdaya di sekitar perbatasan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa kebijakan pemakaran wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya pertikaian (konflik horizontal) yang secara kasat mata terjadi di dalam masyarakat Maluku Utara. Meskipun begitu, pertikaian (koflik antar-elite) tidak bisa dipisahkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, pembentukan Kecamatan Malifut/Makian-Daratan adalah salah satu akses yang paling penting dalam menuju konflik di Maluku Utara, karena pembentukan kecamatan ini merupakan salah satu momentum berkuasanya orang-orang Makian dalam jajaran elite, terutama dalam penguasaan birokrasi di Maluku Utara. Indikasi ini sangat akurat, karena ketika itu reformasi baru digulirkan, dan otonomi daerah dalam kebijakan desentralisasi masih dalam bentuk wacana. Karena itu, kebijakan mengenai pemekaran atau pembentukan wilayah baru tidaklah melewati proses yang rumit. Kebijakan pemberian status kecamatan kepada Malifut memang sangat diharapkan oleh orang Makian yang telah lama (tahun 1975), menetap di wilayah Kecamatan Kao, dan tidak jelas statusnya. Dengan pembentukan kecamatan baru, kesenjangan yang ada diperkuat dengan kebencian akibat semakin

menguatnya identitas suku Makian yang notabene merupakan suku pendatang. Hal ini karena nama “Makian Daratan” ternyata sangat mengusik perasaan warga Kao, yang telah lama tinggal dan menjadi tuan rumah untuk wilayah yang kini ditempati oleh orang-orang Makian.

Terlepas dari persoalan agama, titik singgung yang sangat dipermasalahkan oleh masyarakat Kao adalah persoalan wilayah adat dan penghargaan terhadap nilai-nilai asli (suku Kao). Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara dengan segala arogansinya memutuskan secara sepihak pembentukan Kecamatan makian Malifut, berdasarkan PP No. 42 tahun 1999, tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat setempat, terutama yang akan menjadi batas wilayahnya. Sebenarnya, masih banyak agenda pemekaran wilayah yang harus ditangani di tingkat kabupaten; akibat pembentukan Provinsi Maluku Utara, daripada harus buru-buru memekarkan wilayah kecamatan. Ternyata, persoalan pemekaran tidak selesai hanya sampai pada pembentukan Kecamatan Malifut.

Terdapat potensi konflik antar-daerah terutrama menyangkut perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat, dan bahkan menyangkut juga perbatasan dengan Kecamatan Malifut yang telah diundangkan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan yang ada, jelas Kecamatan Malifut yang dibentuk berdasarkan PP No. 42/1999 merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Utara. Meskipun demikian, di dalam ketentuan wilayah yang diberikan kepada Kabupaten Halmahera barat meliputi beberapa desa yang sebenarnya secara defacto masih berada dalam wilayah Kecamatan Malifut. Beberapa desa yang menjadi

perebutan wilayah perbatasan tersebut, antara lain: Desa Akelamo Kao dan Desa Bobaneigo. Desa Akelamo merupakan perbatasan antara Kecamatan Jailolo (ibukota Kabupaten Halmahera Barat) dengan Kecamatan Malifut, sedangkan Desa Bobaneigo merupakan perbatasan antara Kecamatan Jailolo Selatan dengan Kecamatan Kao.

B. Perubahan Struktur Bitokrasi dan Politik

Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di wilayah Maluku Utara memiliki perbedaan serta mengalami perubahan sesuai inisiatif sultan (raja) maupun akibat tekanan kebijakan kolonial. Kesultanan Tidore, misalnya; telah mengalami tiga masa perubahan struktur pemerintahan, sementara Ternate mulai menanggalkan kolano dan menggantikan dengan “sultan” setelah Zainal Abidin menganut agama Islam. Sejak 3 Januari 1815, pemerintah Belanda mengundang-kan suatu peraturan ketatanegaraan bagi Hindia Belanda, *Regerings Reglement (RR)*, yang mulai berlaku secara efektif pada 1818. Dengan peraturan ini, pemerintahan di Ternate yang sejak 1619 dijalankan seorang gubernur dan disebut *Landvoogdij der Maluksche Eilanden* dinyatakan terhapus. Status ternate sendiri menjadi keresidenan yang langsung berada dibawah seorang gubernur yang berkedudukan di Ambon. Pemerintahan baru ini di sebut *Gouvernement der Moluksche Eilanden* dan berpusat di Ambon. Karena itu, status Ternate turun menjadi keresidenan. Pulau Ternate, sebagai ibukota kerajaan dan wilayah *gubernemen*, dibagi kedalam dua daerah, yaitu: Ternate Utara di bawah pemerintahan swapraja, dan Ternate Selatan di bawah gubernemen.

Di luar pulau Ternate, wilayah kerajaan ini mencakup Halmahera Utara dan Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kepulauan Banggai dan Tobungku di pantai timur Sulawesi Tengah. Kedua wilayah terakhir ini, sesuai UU 1907, dilepaskan dari Ternate dan digabungkan ke dalam Gubernemen Sulawesi dan Daerah Taklukannya (*Gouvernement der Celebes en Onderhorigheden*), yang berpusat di Makassar. Pada 16 April 1921, status Keresidenan Ternate kembali mengalami degradasi dan diciutkan menjadi *afdeling* yang dipimpin seorang asisten residen dan digabungkan ke dalam Keresidenan Amboina.

1. Struktur Birokrasi dan Politik Masa Kolonial

Sebelum Perang Dunia kedua, status Ternate ialah ibukota *Afdeling Noord molukken,* dibawah Keresidenan Maluku yang berpusat di Ambon. *Afdeling* Maluku Utara, dipimpin seorang asisten residen, membawahi tujuh *onderafdeling* meliputi: Jailolo, Tobelo, Tidore, Weda, Bacan, Sanana dan Ternate sendiri; masing-masing dipinpin oleh seorang *Hofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB). Tiap *onderafdeling* membawahi beberapa distrik, dikepalai seorang *Districthoofd;* terdiri dari sejumlah kampung (desa sekarang). Kota Ternate pada masa ini, memiliki pemerintahan yang dualistis. Ia terbagi ke dalam dua wilayah: Ternate Utara dengan pemerintahan tidak langsung di bawah swapraja (*zelfbestuur gebied*), dan Ternate Selatan yang berada di bawah pemerintahan langsung Belanda (*gouvenemen gebied*). Sistem pemerintahan dualistis ini bertahan hingga 1945. Kemudian di bawah pendudukan militer Jepang, Ternate dipinpin seorang Minseibu (1942-1945).

Di masa pendudukan Belanda, seusai Perang Dunia kedua, status Ternate ditingkatkan menjadi ibukota Keresidenan Maluku Utara. Residennya dijabat secara berturut-turut oleh Jabir Syah (1945-1959), Zainal Abidin Syah (1949-1956), serta Dede Usman Syah (1956-1959). Pada 9 April 1946, pemerintah pendudukan Belanda mengeluarkan sautu keputusan (*gouvernement bersluit*). Keputusan ini memberikan kesempatan kepada daerah-daerah swapraja di Kalimantan dan Timur Besar untuk membentuk Kotapraja, (*stadsgemeente*) berikut dewannya (*gemeenteraad*), dengan kewenangan yang sama seperti *stadsgemeente* di daerah-daerah berpemerintahan langsung (*rechtstreekbestuur gebied*), semisal *gemeente* Ambon, Manado, dan lain sebagainya. Berdasarkan peraturan pemerintah Belanda tersebut, di mana swapraja Ternate membentuk Kotapraja (*stadsgemeente*) Ternate, berikut Dewan Kotapraja (*gemeenteraad*) yang beranggotakan 10 orang (Desember 1946). Kotapraja Ternate dipimpin seorang walikota (*burgermeester*), pertama kali dijabat oleh M.A.M. Soleman, yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Dewan Kota. Setelah M.A.M. Soleman, jabatan Walikota Ternate secara berturut-turut dipegang oleh Duno Umar Saifuddin, Hien Diao, Jan Abubakar Wesplat, dan Yasin Bopeng.

Mayoritas keanggotaan Dewan Kota di pegang oleh pribumi, menyusul dua orang keturunan Cina, dan satu orang keturunan Belanda. Selain sebagai badan legislatif dengan kewenangan yang sangat terbatas, Dewan Kota juga bertindak sebagai penasehat walikota. Sementara walikota sendiri didampingi oleh seorang sekretaris dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 1957, terbentuk DPRD Gotong Royong Maluku Utara menggantikan Dewan Kotapraja. Pada tahun berikutnya,

berdasarkan UU No. 60 tahun 1958, terbentuk Pemerintahan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku, yang beribukotakan Ambon. *Stadsgemeente* atau Kotapraja Ternate bubar, dan statusnya direduksi menjadi sekadar sebuah kecamatan yang dipimpin oleh Yasin Bopeng, mantan Walikota Ternate. Sekalipun demikian, Kecamatan Ternate masih tetap berstatus Kotapraja, hingga keluarnya keputusan Gubernur Maluku tertanggal 30 Maret 1965, yang mengakhiri status kekotaprajaan Ternate dan mengkonversinya menjadi sebuah kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1981, tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate, pada 11 Maret 1982 Ternate menjadi kota Administartif. Sekitar 17 tahun, ternate bertahan dengan status ini. Selama masa tersebut, yang menjabat sebagai Walikota Ternate secara berturut-turut adalah : Drs. Thaib Armaiyn (1982-1991), Drs Muhammad Hasan (1991-1995), dan Drs. Syamsir Andili (1995-1999). Perubahan Administrasi pemerintahan yang berhasil diciptakan pada masa kota administratif ini adalah pembagian wilayah Ternate ke dalam dua kecamatan: Kecamatan Ternate Utara dan Kecamatan Ternate Selatan. Selain itu, sistem pemenrintahan lingkungan diubah menjadi sistem kelurahan, yang membawahi sejumlah lingkungan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dinamika perubahan struktur politik dan pemerintahan hingga berakhirnya status Ternate sebagai kota administratif tahun 1999, status Ternate masih di bawah kendali sistem pemerintah kolonial di mana sistem pemerintahan yang diterapkan di daerah ini mulai 1945-1999 memperlihatkan corak yang kontradiktif dan tidak lazim. Dari sebuah

stadsgemeente (pemerintahan kota) yang setaraf dengan kabupaten, Ternate kemudian melorot jauh menjadi kecamatan (suatu ketentuan yang tidak rasional), karena menyalahi prinsip-prinsip umum pemerintahan kota. Baru dua dasa warsa kemudian, Ternate didongkrat menjadi kota administratif, tetapi tentu saja masih di bawah strata kabupaten.

Pada Januari 1942, untuk pertama kali Jepang melakukan pemboman atas Ternate. Pada tahun yang sama (5 April 1942), pesawat-pesawat Jepang menjatuhkan selebaran di atas Kota Ternate yang menyerukan agar rakyat menangkap orang-orang Belanda dan menyerahkan kepada serdadu Jepang. Sementara orang-orang Belanda diberi waktu satu jam untuk berkumpul di dermaga dan menyerahkan diri. Tanggal 6 April 1942, berlabuh di lepas pantai Ternate 19 kapal perang dan kapal pengakut tentara. Karena Asisten Residen Velde dan Komandan Garnisun (Kapten Sondang), beberapa hari sebelumnya telah diangkut Kapal Hanum Maru ke Ambon, berikut perempuan dan anak-anak, maka penyerahan Kota Ternate hanya dilakukan Kontrolir van der Groot, didampingi dokter Chasan Boesoiri dan seorang perawat (Nyonya Jeanne van Diejen) di atas kapal komando Jepang.

Setelah penyerahan kekuasaan, Jepang mulai menjalankan pemerintahan. Pejabat tertinggi yang menjalankan pemerintahan sipil adalah *Minseibu* dan *Gonco*, menggantikan kepala pemerintahan setempat (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*), serta *Bun Gun Co* menggantikan kepala distrik. Yang menjabat sebagai kepala kampung disebut *Sunco*. Selain Minseibu dan Ketua Pengadilan, yang dijabat orang Jepang, pimpinan pemerinntahan selebihnya diserahkan kepada tenaga-tenaga Indonesia.

Baik untuk militer maupun sipil, komando tertinggi dipegang Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makassar.

Kehadiran Jepang bukan hanya membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, tetapi ikut pula menambah beban penderitaan rakyat, karena kekurangan makanan, kerja paksa, wabah penyakit, serta berbagai penderitaan lainnya, terutama di daerah-daerah dengan konsentrasi besar pasukan jepang. Banyak rakyat mati, karena penyakit busung lapar dan berbagai penyakit menular lainnya. Di samping itu, tidak sedikit rakyat mati karena keganasan tentara Jepang. Pada tanggal 15 September 1944, tentara Sekutu mendarat di Morotai (Halmahera Utara) yang ketika itu hanya dipertahankan dua batalion tentara Jepang. Dalam waktu kurang dari empat jam, tentara Jepang berhasil dipukul mundur oleh Jenderal MacArthur (Panglima Tentara Sekutu), yang turut dalam penyerbuan Morotai.

Sejak pendaratan Sekutu di Morotai, keunggulan militer Jepang praktis lumpuh. Tentara Sekutu dengan strategi loncat katak, berhasil menguasai berbagai konsentrasi militer Jepang dan pulau-pulau yang didudukinya. Sejak Februari 1944, militer Jepang mulai mengalami kemunduran di hampir semua kancah pertempuran di kawasan Pasifik. Sementara itu, Sultan Jabir Syah dan keluarganya disebrangkan ke Pulau Hiri oleh unsur-unsur perlawanan masyarakat terhadap Jepang. Sultan dan keluarganya diboyong tentara Australia ke Morotai, atas upaya komando Belanda, kemudian diterbangkan ke Australia (8 September 1944). Di Australia, Sultan Ternate kembali melakukan kontak dengan pemerintah Belanda dalam pengasingan yang dipimpin Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook.

Di Ternate sendiri, Minseibu menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pejabat sementara, dokter Chasan Boessoirie (25 Agustus 1945). Dengan demikian berakhirlah pendudukan Jepang yang singkat di Ternate. Dalam bulan September 1945, sebuah korvet Australia membawa pulang Sultan Ternate. Sejak di Australia, Sultan Jabir Syah telah diangkat sebagai Asisten Residen, kemudian Residen untuk seluruh Maluku Utara, dengan pangkat Letnan Kolonel titulir pada tentara KNIL. Ia kemudian mengambil alih pemerintahan dari Chasan Boessoirie dan dengan demikian mulai berjalan sistem pemerintahan Nederland Indie pasca perang dunia kedua. Suatu kenyataan yang patut dicatat; Sultan Jabir Syah telah berhasil memperjuangkan status daerah ini dari sebuah 'afdeling' menjadi "Keresidenan."

2. Struktur Birokrasi dan Politik Masa Kemerdekaan

Provinsi Maluku berdiri pada tanggal 19 Agustus 1945, bersama dengan tujuh provinsi yang lain, dengan ibukota adalah Ternate. Gubernur Maluku ketika itu (Latuharhary), tidak pernah memerintah provinsi ini di Ambon, apalagi di Ternate. Latuharhary meminpin dari Jakarta, malah mendirikan beberapa perwakilan Provinsi Maluku di Bandung, Semarang, Surabaya, Cirebon, Magelang, Yogyakarta, Malang, Bondowoso, dan Palembang. Nanti pada tahun 1955, Ambon resmi sebagai ibukota Provinsi Maluku. Sejalan dengan perubahan sturur birokrasi dan politik, terjadilah alih kekuasaan di Maluku yang berakibat pada perubahan konstalasi politik, ekonomi dan agama yang tidak terhindarkan serta berpengaruh terhadap kerukunan antar suku-suku dan perbedaan lain di provinsi kepulauan ini.

Perjuangan kemerdekaan RI melepaskan diri dari pemerintahan Belanda, kepulauan Maluku sebagai bagian kepulauan Nusantara juga mengalami masa transisi yang cukup berat mengingat, suku-suku (terutama agama Kristen) di sana memiliki pertalian premordialisme agama dengan Belanda dan sejak lama sudah mempunyai potensi konflik dengan suku-suku yang menganut agama Islam yang kini ikut dalam pemberontakan melawan Belanda. Pembentukan DPRD Gotong-Royong Maluku Utara menggantikan Dewan Kotapraja, sesuai UU No. 60 tahun 1958, terbentuk Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Utara dengan ibukota Ambon. Meski demikian, Ternate masih berstatus kotapraja hingga dikeluarkannya keputusan Gubernu Maluku tanggal 30 Maret 1965, yang mengakhiri status Ternate sebagai kotapraja dan mengkonversinya menjadi sebuah kecamatan.

Perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat di Provinsi Maluku untuk berperan serta dalam pemerintahan. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat, sebagian wilayah Provinsi Maluku yang meliputi Kewedanan Tidore, Weda, dan Patani-Gebe diserahkan dan digabungkan ke dalam wilayah Provinsi Irian Barat dengan menetapkan ibukota di Soasio (Kewedanan Tidore). Dengan UU Darurat No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat, wilayah Provinsi Maluku yang diserahkan ditambah dan ditata sehingga meliputi: (1) Kewedanan Tidore, terdiri dari Distrik Tidore, Oba, dan Wasilei.

Meskipun telah dikeluarkan kekuatan baru mengenai Provinsi Irian Barat, namun tidak serta merta diberikan pengaturan yang jelas mengenai status wilayah ini. Kemudian wilayah ini disamakan dengan kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Maluku, yaitu dikenal Halmahera Tengah. Secara historis, di mana peran wilayah ini dalam perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah RI, dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, maka UU No. 6 tahun 1990 ditetapkan wilayah ini menjadi Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba, Kecamatan Wasilei, Kecamatan Patani-Gebe, Kecamatan Weda, dan Kecamatan Maba. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2003, wilayah Maluku Utara dimekarkan menjadi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Barat (induk), Halmahera Utara, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula. Wilayah Halmahera Tengah dimekarkan menjadi Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah (induk).

C. Konflik Bernuansa 'SARA' di Maluku Utara

Konflik bernuansa 'SARA' di Kepulauan Maluku selama kurun waktu 1999-2001 telah mengakibatkan kurang lebih 5.000 orang meninggal dunia dan sekitar 500.000 orang terusir dari tempat tinggalnya. Pertikaian massa tidak hanya terjadi kota Ambon saja, melainkan meluas hingga Maluku Utara. Di Maluku Utara, jumlah korban jiwa tidak sebanding di Maluku (Ambon), namun ekses sosial, politik dan ekonomi lokal sama besarnya dengan Kota Ambon dan sekitarnya.

1. Kronologis Konflik 1999 – 2001

Secara umum, konflik yang terjadi di Maluku Utara dapat dibagi ke dalam empat gelombang. Gelombang pertama, Agustus 1999 yang dipicu oleh pertikaian antara suku Kao (penduduk asli) dengan suku Makian (pendatang), di sebelah selatan Pulau Ternate terutama berkaitan dengan pengelolaan pertambangan emas di Kecamatan Manifut. Pada gelombang pertama ini jumlah korban jiwa hanya dalam hitungan jari (puluhan), demikian juga harta benda dan berbagai fasilitas umum serta rusaknya tempat-tempat ibadah.

Gelombang kedua, Oktober-November 1999. Skala kerugian dan korban jiwa yang ditimbulkan terutama fasilitas-fasilitas umum (publik) jauh lebih besar dari gelombang pertama. Pada gelombang kedua ini kurang lebih 16 desa Suku Makian rata dengan tanah, sementara jumlah korban yang meninggal kurang lebih 100 orang dari kedua belah pihak. Ketiga Sultan yang memerintah di Maluku Utara (Sultan Ternate, Sultan Tidore, dan Sultan Bacan), mengambil peran aktif dalam meredakan konflik antara kedua komunitas.

Gelombang ketiga, 26 Desember hingga bulan Maret 2000. Pada periode ini konflik yang terjadi lebih merupakan imbas dari konflik di Maluku Tengah (Ambon). Gelombang ketiga ini serangan-serangan secara simultan antara kelompok Kristen dengan desa Muslim di Gahoku, Toguliwa, Gurua, Kampung Baru, Gamsungi, Luari, dan Popilo Kecamatan Tobelo, desa Mamuya di Kecamatan Galela. Beradasarkan data yang dimiliki oleh LSM setempat, dalam kerusuhan ini korban yang meninggal

tercatat kurang lebih 800 orang, di mana 200 orang di antaranya meninggal karena terbakar hidup-hidup di Masjid Baiturrachman di Desa Popilo.

Gelombang keempat, terjadi pada bulan Mei-Agustus 2001. Menurut salah satu informan kunci (*HN/53 th*) dalam wawancara (19/0106), menjelaskan bahwa konflik yang terjadi pada gelombang terakhir ini disulut oleh kedatangan sekitar 8.000 Laskar Jihad dari Ambon, Sulawesi Selatan, dan Jawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai sumber (informan kunci), menjelaskan bahwa kronologis konflik yang terjadi pada 1999-2001 di Maluku Utara sesuangguhnya dimulai setelah diproklamasikannya Maluku Utara sebagai provinsi. Haasil analisis dan penciuman langsung menunjukkan bahwa, proses awal sebelum merebaknya konflik yang dimulai dengan perebutan wilayah dan persiapan-persiapan untuk menjadi ibu kota provinsi. Seiring dengan itu, berbagai kepentingan dan ambisi para elite baik lokal maupun nasional yang kemudian mendorong meluasnya konflik antar suku dan agama secara luas.

Menurut salah satu sumber (*HA/42 th*), menjelaskan secara rinci bahwa sejak pertengahan September 1999, sehari sesudah DPR RI menyetujui Maluku Utara menjadi Provinsi dengan ibukota sementara Ternate; beredarlah pernyataan para pemuda, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat Tidore yang meminta pertanggung jawaban Bupati Halmahera Tengah atas penggunaan dana daerah dalam perjuangan Tidore sebagai ibukota sementara Provinsi Maluku Utara yang gagal. Menyadari akan posisi yang terjepit, Bupati Halmahera Tengah bersama Walikota Ternate mencari cara lain, dengan cepat membuat acara pelantikan Sultan Tidore (Oktober 1999),

yang kelak dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap Sultan Ternate. Pada saat yang sama di Ternate dan Tidore berkeliaran para provokator dari Ambon menyusup di tengah-tengah para pengungsi Ambon maupun pengungsi Makian.

Pada tanggal 1 November 1999, di Tidore diadakan pertemuan antara tokoh masyarakat (agama), pemuda serta para pejabat sipil dan militer. Dalam forum ini, Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) dipaksa untuk membacakan selebaran gelap (surat kaleng) yang mengatasnamakan Ketua Sinode GPM, bahwa serangan ini berasal dari pihak Kristen terhadap pihak Islam di Tidore dan Ternate. Kejadian yang sama juga terjadi di Ternate sehari sebelumnya. Karena tidak bersedia, Pendeta GPM Tidore kemudian dibunuh. Setelah itu massa membakar tiga gereja dan rumah-rumah orang Kristen, sebanyak 9 orang meninggal dan 700 jiwa terkurung di Markas Polres Halmahera Tengah selama satu minggu, kemudian mengungsi ke Bitung (Sulawesi Utara) dengan kapal perang TNI-AL, sebagian kecil ke Tobelo. Pada kesempatan ini, turut mengungsi anggota TNI-POLRI non Islam, serta warga Muslim pendatang (Jawa dan Sumatera) karena merasa terancam. Kejadian ini membuat Tidore sejak 10 Nopember 1999 tidak lebih sebagai sebuah 'pulau Islam'.

Setelah kejadian tanggal 3-4 November 1999 di Tidore, dilanjutkan tanggal 6-11 November 1999 di Ternate. Jumlah kerugian dan korban jiwa di Ternate jauh lebih besar dibanding Tidore, yaitu 8 buah gereja dan 964 buah rumah dirusak dan dibakar, 30 orang meninggal serta ribuan warga Kristen mengungsi, sebagian besar ke Bitung (Sulawesi Utara), dan sebagian lagi ke Tobelo (Halmahera Utara) yang merupakan komunitas Kristen terbesar di Maluku Utara. Peristiwa atau konflik yang

terjadi di Tidore dan Ternate merupakan gerakan yang terorganisir dan telah dipersiapkan secara matang oleh *provokator*, yang juga merupakan elite politik atau 'elite formal' karema ambisi kekuasaan.

Upaya Sultan Ternate dengan menghidupkan kembali kekuatan kesultanan yang telah lama terkubur, terkesan tiba-tiba dan mendadak karena kemunculan itu serta merta juga membangkitkan kembali instrumen-instrumen kesultanan dari tidur panjang. Instrumen kesultanan yang dimaksud adalah struktur pemerintahan (adat), dengan memunculkan "pasukan kuning" yang pada gilirannya digunakan sebagai mesin politik Mudafar Syah (Sultan Ternate) sekaligus kendaraan politiknya dalam pencalonan Gubernur Maluku Utara.

Menyadari kebangkitan Sultan Ternate, Walikota Ternate (Syamsir Andili) dan Bupati Halmahera Tengah (Bahar Andili); berupaya mencari tandingannya dengan menghidupkan kembali instrumen Kesultanan Tidore, dengan mengangkat Djafar Danoyunus sebagai Sultan Tidore. Strategi pengimbangan itu dapat diduga berkaitan erat dengan mobilisasi dukungan dari kekuatan adat, mengingat bahwa Bahar Andili (alm) juga memiliki ambisi untuk menjadi Gubernur Maluku Utara. Selain itu, Syamsir Andili ingin mempertahankan kekuasaannya sebagai Walikota Ternate. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya menghidupkan kembali instrumen Kesultanan Tidore adalah dalam rangka mencari dukungan, serta sebagai reaksi terhadap ambisi Sultan Ternate.

Hasil analisis dan pengamatan di lapangan menunjukan bahwa, kekuatan masyarakat Ternate sebenarnya terbagi ke dalam dua wilayah. Wilayah bagian utara

Ternate masih didominasi oleh kekuatan pendukung Sultana Ternate, semenatara Ternate bagian selatan didominasi oleh orang-orang Tidore dan masyarakat Makian yang secara historis memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Kesultanan Ternate. Pada kenyataannya, usaha Mudafar Syah untuk menjadi Guber Maluku Utara kandas, karena preferensi Golkar ternyata berbeda dengan yang diinginkan oleh Sultan Ternate. Meskipun demikian, kekecewaan Mudafar Syah kemudian diarahkan untuk mendukung dan bergabung dengan PDK, sebagai mesin politik ternyata membuahkan hasil menjadi anggota DPR-RI periode 2004-2009. Di sisi lain, usaha Bahar untuk menjadi Gubernur Maluku Utara juga kandas karena meninggal dunia pada masa pemilihan, sedangkan usaha Syamsir Andili untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Walikota Ternate membuahkan hasil (terwujud) untuk periode kedua dalam Pilkada (2005-2010).

Menurut tokoh agama dan budayawan Maluku Utara (*YA/67 th*), bahwa hal yang perlu dicermati adalah kepentingan Islam fundamentalis secara nasional yang ingin membelokkan komitmen kebangsaan Indonesia dengan mengubahnya menjadi penguasaan Negara oleh Islam radikal, ditambah dengan kasus Ambon yang berlarut-larut sehingga menimbulkan emosi yang tak terkendali. Selain itu, ambisi beberapa elite lokal yang dalam studi ini disebut “elite formal” untuk merebut kursi gubernur (gubernur pertama) Provinsi Maluku Utara di satu sisi, dan di sisi lain ambisi para elite tersebut dalam mempertahankan jabatan sebagai walikota/bupati, serta jabatan-jabatan strategis di Kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara umumnya. Dalam konteks perebutan jabatan dan status ibukota Provinsi Maluku Utara tersebut,

kemudian terakumulasi dengan berbagai kepentingan yang dilatar-belakangi oleh fanatisme etnis dan golongan tertentu dalam upaya mencapai tujuan politiknya. Sikap ambisius dan fanatisme yang berlebihan dari para elite lokal itu, tidak mendapat respon (dukungan) dari masyarakat luas. Karena itu, para elitr kemudian membabi-buta dalam memancing emosi masyarakat dengan membawa slogan-slogan agama, khususnya agama Islam.

Fenomena yang juga menarik untuk dipertanyakan adalah, apa sebenarnya motif kemunculan Sultan Jailolo dan Bacan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kebangkitan Sultan Ternate dan Tidore. Belum ada data atau fakta kuat yang mendukung keterlibatan mereka dalam persaingan politik di Maluku Utara, termasuk dukungan atau afiliasi mereka terhadap kekuatan Ternate atau Tidore. Namun, sesuai hasil pengamatan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa, bangkitnya Sultan Bacan besar dugaan berafiliasi dengan kekuatan Tidore (alasan historis), sementara Sultan Jailolo tetapi mendukung Sultan Ternate. Di mana kemunculan Sultan Jailolo adalah atas prakarsa Sultan Ternate, yang kenyataannya sampai hari ini tidak diakui oleh sebagaian besar masyarakat di wilayah ini. Dugaan ini sesuai dengan penjelasan dari beberapa sumber bahwa, kemunculan Kesultanan Bacan dan Jailolo tidak sekuat Kesultanan Ternate dan Tidore. Hanya saja, kemunculan tersbut bersamaan dengan konstalasi politik terutama setelah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat memperkuat dugaan bahwa, Sultan Bacan akan berkualisi dengan Sultan Tidore, sedangkan bangkitnya Sultan Jailolo setelah berabad-abad dideglarasi Ternate adalah untuk menambah kekuatan Sultan Ternate dalam mewujudkan ambisinya.

Menurut salah satu sumber (*NL/42 th*), mengungkapkan bahwa kedudukan Mahmud Syah (Sultan Jailolo) sebagai sultan atau politisi yang mendapat dukungan penuh dari Sultan Ternate (Mudafar Syah), mengingat keduanya adalah kader Golkar selama Orde Baru, dan sama-sama pindah ke PDK karena merasa dikecewakan. Kewenangan tersebut dianggap wajar karena secara historis, semenjak penjajahan Portugis, wilayah Kesultanan Jailolo telah dianeksasi oleh Kesultanan Ternate. Kebangkitan Sultan Jailolo diharapkan oleh Sultan Ternate agar dapat menduduki kursi DPD, namun karena terganjal persyaratan administrasi KPU, maka Sultan Jailolo berafiliasi dengan PDK untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan berhasil menjadi salah satu anggota DPRD Halmahera Barah. Sementara menurut sumber lain (*MB/52/ th*) mengatakan bahwa, terjadi ketidakcocokan antara Bupati Maluku Utara dengan Sultan Ternate.

Sumber lain (*AN/50 th*), mengatakan bahwa ketika situasi di Tobelo sudah dirasa tidak aman untuk orang Islam, Pendeta di Desa Gamhoku membuat perjanjian dengan imam di desa itu untuk mengundang semua orang Islam Gamhoku masuk ke dalam gereja supaya tidak diserang oleh orang-orang Kristen dari desa-desa lain, dan semua orang Islam sudah berada di dalam gereja, tiba-tiba ada seorang (Islam) lari karena dikejar orang-orang Kristen, setelah memotong tangan dari seorang Kristen di dalam satu pertikaian dan masuk ke dalam gereja. Massa Kristen menuntut orang tersebut dikeluarkan dari gereja, tetapi dia tetap dilindungi di dalam gereja. Pendeta Gamhoku berusaha bernegosiasi dengan massa Kristen, tetapi setelah beberapa lama situasi tidak dapat dikendalikan.

Sekretaris ‘Sinode’ (*MB/48 th*), mengatakan bahwa di akhir Desember 1999 orang-orang Islam Makian, Kayoa, dan Tidore mengalahkan orang Islam Ternate (pasukan Sultan) yang pada November 1999 masih melindungi orang-orang Kristen di Ternate, situasi semakin panas karena di Ternate tidak ada satu golongan pun yang membela kepentingan dialog antar-agama. Jelas setelah 'penyatuan kekuatan Islam' serangan-serangan terhadap orang Kristen bertambah di berbagai daerah. Pada tanggal 30 Desember 1999 melalui RRI stasiun Ternate dikumandangkan seruan jihad ke seluruh pelosok daerah Halmahera. Sejak 1 Januari 2000 terjadi berbagai penyerangan di Jailolo, Sahu, dan daerah-daerah Halmahera Tengah, dan di Wasilei Halmahera Selatan, mengakibatkan terjadi pengungsian orang-orang Islam ke Ternate dan orang-orang Kristen ke Kao dan Tobelo, untuk sementara dianggap aman.

Berdasarkan penjelasan dan keterangan berbagai sumber di atas, nampak jelas bahwa kecenderungan dari pihak Muslim untuk menguasai pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera dan desa-desa di pesisir Halmahera. Hal ini dibenarkan salah satu sumber bahwa, cara-cara penyerangan yang digunakan mirip satu sama lain, yaitu menyiapkan 'pasukan putih' yang sudah ada di tempat dan dibantu pasukan jihad yang datang dari Ternate, Tidore, Makian, Kayoa dengan menggunakan ‘*speedboat*’ dan serangan dilakukan dari darat dan laut. Sementara itu, ada isyu (yang tidak harus dibuktikan dahulu, karena ini berarti akan memakan korban jiwa luar biasa) bahwa akan terjadi ‘*ethnic-religious cleansing’* di Maluku Utara. Karena itu, dengan adanya pasukan keamanan yang menjaga kawasan di sekitar Halmahera tidak cukup untuk menghentikan konflik. Dalam konteks ini, di satu pihak yang merasa lebih kuat tidak

akan mau menghentikan ‘*agresivitas*’ terhadap pihak lain, sementara di lain pihak, ada ketakutan bahwa pada akhirnya pihak keamanan berpangku tangan ketika terjadi penyerangan besar-besaran. Dengan demikian, solusi pembagian wilayah merupakan jawaban yang masih terus diperdebatkan, tetapi nampaknya ini satu-satunya solusi sementara untuk menghentikan aksi kekerasan (konflik).

Setelah peristiwa yang memilukan dan tidak pernah dibayangkan ini, terjadi pengungsian orang-orang Kristen dari Tidore dan Ternate ke Bitung dan sebagian lagi mengungsi ke Halmahera Utara. Jumlah pengungsi warga Kristen dari Ternate dan Tidore di Bitung/Manado Sulawesi Utara dan Halmahera Utara hingga Februari 2000 diperkirakan 25.000 orang. Aksi kerusuhan di Tidore dan Ternate berlanjut setelah 50 hari, tepatnya tanggal 26 Desember 1999. Dalam hal ini penyerangan yang dilakukan ‘pasukan putih’ ke bagian utara kota Ternate yang dijaga ketat oleh Dewan Adat (pasukan kuning). Bangunan-bangunan sekolah milik Yayasan Pendidikan Katolik dan Yayasan Pendidikan Protestan dibakar, bahkan Gereja Katolik dan Protestan pun tidak luput dari kebrutalan pasukan putih. Dicegah oleh 'pasukan kuning' tetapi panah dan batu beterbangan ke arah 'pasukan kuning'.

Upaya untuk mengatasi pertikaian antara kedua pihak, ‘pasukan kuning’ dan ‘pasukan putih’ (sama-sama Islam), datang pasukan Polisi dan TNI melerai pertikaian itu, 'pasukan kuning' diperintahkan mundur, sementara 'pasukan putih' memulai lagi pembakaran bangunan-bangunan sekolah dan gereja. Ketika 'pasukan kuning' bereaksi, mereka balik ditembaki oleh Polisi dan TNI yang mengakibatkan kurang lebih 100 orang luka berat, seolah 'pasukan kuning' yang melawan perintah untuk

mundur. Maka merajalelalah 'pasukan putih' sehingga seluruh bangunan sekolah dan tempat ibadah warga Kristen habis terbakar. Marah dan sakit hati terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak keamanan serta diliputi oleh perasaan sedih karena kota Ternate, yang selama ini dikenal sebagai kota yang ‘aman dan tenteram’ serta penuh dengan toleransi antar umat beragama yang sudah berlangsung selama ratusan tahun menjadi sirna, seiring dengan konflik antar elite yang berlindung di balik kepentingan sesaat dengan mengatasnamakan etnis dan agama demi ambisi politiknya.

Di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa konflik tersebut merupakan konflik merebut kekuasaan daripada konflik antar-agama, karena pada kenyataannya yang saling berhadapan antara ‘pasukan kuning’ yang membela Kesultanan Ternate di satu pihak, dengan ‘pasukan putih’ yang mewakili kesultanan Tidore dan didukung oleh orang Makian dengan berbagai unsur Islam fundamentalis di pihak lain, yang ingin merebut kekuasaan melalui *religious cleansing* di Maluku Utara. Akumulasi dari berbagai kepentingan itu, terjadilah penyerangan ‘pasukan putih’ terhadap Keraton Kesultanan Ternate, dihadang oleh ‘pasukan kuning’ di mana kedua pihak sama-sama beragama Islam. Selanjutnya dilakukan suatu kompromi kedua pihak, ‘pasukan putih’ diwakili Sultan Tidore dan ‘pasukan kuning’ diwakili Sultan Ternate, menghasilkan suatu kesepakatan dengan menandatangani ‘surat perdamaian’.

Fakta menunjukkan bahwa tindakan kompromi yang dilakukan kedua pihak adalah sengaja (rekayasa) oleh para elite (tradisional dan formal) yang berada di balik kerusuhan tersebut, bahwa telah terjadi pertikaian antara Sultan Tidore dan Sultan Ternate. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa kedua kesultanan khususnya

Kesultanan Tidore; sejak lama (setelah kemerdekaan RI) sudah tidak berperan lagi dalam katatanegaraan serta pemerintahan, demikian pula Kesultanan Ternate. Karena itu, peran dan prakarsa yang diambil syarat dengan muatan politis.

2. Ketegangan Masalah Agama dan Etnis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konflik berawal dari masalah agama dan etnis yang pada intinya berhadap-hadapan kedua kesultanan yang bermusuhan sejak ratusan tahun silam, di mana kedua kesultanan ini secara historis memang tidak pernah damai. Dengan demikian, konflik 1999-2001 yang bermula dari masalah tapal batas Kecamatan Malifut-Kao pada prinsipnya adalah membuka kembali tabir permusuhan yang sekian lama terpendam, dan sengaja ditutup-tutupi oleh pihak tertentu yang haus akan harta dan kekuasaan. Kedua kesultanan yang sama-sama berlabelkan Islam, serta memiliki satu leluhur kemudian berkembang dan bermusuhan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik dan sosial budaya. Konlik 1999-2001 di Maluku Utara juga mengisyaratkan bertapa kedua kesultanan ini sulit melupakan masa lalu yang penuh gejolak, untuk kemudian menatap masa depan yang penuh kompetitif dalam membangun Maluku Utara yang “damai, maju, dan mandiri” seperti yang diharapkan bersama.

Kesultanan Tidore dengan pendukung setianya (kebanyakan suku Makian) terutama komunitas Tahani, seperti halnya ketika Nuku berkuasa di Tidore dengan mengangkat Sangaji Tahani (Muhammad Arif Billa) sebagai Sultan Jailolo yang telah diekspansi Kesultanan Ternate. Dalam konflik 1999-2001 nampak jelas pendukung

kedua kesultanan ini, di mana Sultan Ternate yang didukung oleh “Dewan Adat” atau lebih dikenal dengan ‘pasukan kuning’ karena memakai ikat kepala *kain kuning*, yang menguasai bagian utara Kota Ternate, sedang Sultan Tidore dengan ‘pasukan putih’ yang juga dipimpin oleh Kepala Desa Tahani menguasai bagian selatan Kota Ternate, saling menyerang satu sama lain. Aksi kekerasan antara kedua pihak kemudian dapat diredam atas kesadaran masing-masing pihak, di mana konflik dapat merugikan serta merusak semua tatanan kehidupan yang telah dibangun sekian lama dengan susah payah, bahkan dengan air mata darah; dan hanya menguntungkan segelintir orang (kelompok elite) yang haus akan harta dan takhta.

Sejak tahun 1980 Pulau Makian, dinyatakan sebagai 'pulau tertutup' karena meletusnya gunung berapi Kie Besi (1973-1980) oleh pemerintah Kabupaten Maluku Utara, maka orang Makian serta sebagian besar perangkat desa dari pulau tersebut dipindahkan (transmigrasi lokal) ke daratan pulau Halmahera dengan membentuk Kecamatan baru yang diberi nama Kecamatan Malifut. Kecamatan Malifut dibentuk dengan mengambil sebagian wilayah Kecamatan Jailolo (enam desa) dan sebagian wilayah Kecamatan Kao (lima desa).

Wilayah Malifut merupakan sebuah desa tua yang sangat luas, dahulu adalah tanah milik penduduk Kao dan Jailolo (gabungan antara suku Kao, Pagu, Boeng, dan Modole yang mayoritas penduduknya beragama Kristen) yang diberikan kepada transmigan asal Makian, kemudian terbenturanlah kultur dan budaya masyarakat di Kecamatan Malifut dengan penduduk asal, yang sebenarnya tidak terlalu menyetujui pembentukan Kecamatan Malifut. Akan tetapi begitu kuatnya posisi Pemerintah saat

itu yang sebagian diduduki oleh suku Makian yang pindah ke Tidore dan Ternate, sehingga masyarakat sama sekali tidak berkutik. Pemerintah pada waktu itu memberi 'dispensasi' untuk warga ke-5 desa (desa Sosol, Wangeotak, Gayok, Balisosang, dan Tabobo) asal Kecamatan Kao bahwa mereka secara administratif tetap berhubungan dengan Kecamatan Kao.

Pada tahun 1997, dibukalah Tambang Emas yang dikelola oleh PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), yang berlokasi di daerah yang dimiliki suku Pagu (di Gosowong) dan dengan ini kepentingan ekonomis juga berpengaruh. Seiring dengan terbentuknya Provinsi Maluku Utara, berimplikasi rentang kendali bagi pemekaran kabupaten; diantaranya adalah Kabupaten Halmahera Utara. Timbullah angan-angan dari para pejabat suku Makian yang banyak menduduki posisi kunci di Pemerintahan Kabupaten Maluku Utara, menjadikan Malifut sebagai ibukota kabupaten. Terobsesi dengan keinginan itu, para elit lokal (formal) harus berpacu menyelesaikan tapal-batas antara Kecamatan Malifut dan Kao yang diganjal oleh 5 desa, maka kemudian diusulkan secara diam-diam ke Pemerintah Pusat pembentukan kecamatan baru yang diberi nama Kecamatan “Malifut Makian-Daratan” dengan mengklaim 5 desa (Sosol, Wangeotak, Gayok, Balisosang dan Tabobo) ke dalam kecamatan baru.

Kelima desa tersebut keberatan, dengan alasan sebagai penduduk asli Kao (tuan tanah). Karena itu, mereka tidak mau tunduk di bawah penduduk pendatang (suku Makian) yang seratus persen beragama Islam. Suasana makin tegang dan panas berkisar akhir Juli atau awal Agustus 1999 di Kao, bersamaan dengan dikeluarkannya PP No. 42/99 dari Pemda Tk II Maluku Utara untuk meresmikan wilayah Malifut

sebagai kecamatan dengan nama Makian-Malifut atau Kecamatan “Makian-Daratan.” Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, kemudian mulai saling mengancam. Keresahan makin meningkat dan terjadi bentrokan-bentrokan pada waktu Kecamatan Malifut-Makian Daratan diresmikan tanggal 18 Agustus 1999 (siang) dan Camat dari kecamatan baru ini (Husen Koda), dengan *loudspeaker* (pengerasa suara) mengatakan bahwa yang tidak mau ikut kecamatan yang baru ini silakan angkat kaki keluar dari wilayah dan jika perlu bakar rumah mereka.

Menurut salah satu sumber, yang mewakili Himpunan Keluarga Maluku Utara (*AL/40 th*), menyebutkan bahwa “konflik tersebut menyangkut kepentingan antar agama dan ekonomi yang tumpang tindih. Pertikaian makin merebak karena kepentingan politik, khususnya pemilihan gubernur, ikut masuk ke dalamnya.” Awalnya, kejadian 18 Agustus 1999 itu terjadi di Malifut. Di situ pemerintah lewat PP Nomor 42/1999 menggabung umat Islam dan Kristen dalam satu Kecamatan Malifut. Hal senada juga ditegaskan oleh Tomagola (2001) bahwa, perebutan wilayah agama di Maluku Utara terjadi sejak 127 tahun lalu. Persoalan baru muncul ketika di Malifut ditemukan tambang emas yang sekarang dikerjakan PMA dari Australia. Pertikaian makin keruh, kata Tamrin, ketika kepentingan politik ikut masuk.

Menurut sumber lain (*YD/58 th*), bahwa perpindahan oleng-orang Makian ke beberpa pulau sekitarnya sudah merupakan tradisi. Akar persoalan migrasi mereka dalam perspektif alamiah terjadi akibat bencana alam gunung berapi di pulau itu. Selain faktor alamiah, faktor lain yang mendorong migrasi penduduk Makian adalah hasrat Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, karena

keterbatasan Belanda untuk menjangkau wilayah Makian. Makian merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah internasional, juga menjadi sasaran elite kerajaan-kerajaan sekitarnya. Sejak tahun 1655, oleh pemerintah Kolonial Belanda mengambil kebijakan untuk memberantas semua tanaman rempah-rempah di Pulau Makian. Akibat kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang tidak dapat diterima dari sudut pandang apapun, menyebabkan masyarakat pulau ini sulit untuk kembali mengusahakan produktivitas lahan seperti sedia kala.

Hasil analisis dan penciuman lapangan menunjukkan bahwa, masalah baru timbul ketika dikeluarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara, menindaklanjuti rekomendasi Menteri Sosial (Mintaredjo, SH) untuk memindahkan seluruh warga masyarakat di Pulau Makian ke pemukiman di bagian Kecamatan Kao. Kebijakan ini direspon negatif oleh sebagian warga masyarakat Makian. Respon negatif ini terutama bersumber dari persepsi masyarakat Maluku yang percaya mengenai adanya kekuatan magis yang dimiliki oleh masyarakat Kao, menyebabkan terjadi perbedaan orientasi perpindahan masyarakat Makian. Meskipun demikian, sebagian besar warga masyarakat tetap ‘patuh’ kepada kebijakan pemerintah untuk mendiami wilayah Kecamatan Kao yang masih sangat jarang populasinya dengan teritorinya yang sangat luas. Namun, banyak juga dari mereka (masyarakat Makian) yang berspekulasi mencari penghidupan di pulau-pulau sekitar seperti Tidore, Ternate, Bacan, Moti, dan lain sebagainya.

Sejumlah organisasi nonpemerintah (Ornop), meliputi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Eknas WALHI), Kontras, Jaringan Advokasi Tambang

(JATAM), dan Mineral Policy Institute (MPI/LSM Pertambangan di Australia), yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk solidaritas Kao-Malifut, menuntut Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi atas peristiwa yang terjadi di kawasan Kecamatan Kao, Malifut, dan Jailolo (Kabupaten Halmahera Utara), serta mendesak Komnas HAM melakukan koreksi terhadap kinerja kepolisian di daerah tersebut, yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Awalnya masyarakat berjalan ke kawasan PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM/Newcrest) untuk melakukan aksi damai karena PT NHM memperluas lahan pertambangannya sampai ke kawasan yang bukan menjadi tempat penambangan.

Akibat perluasan itu masyarakat terdesak dan mengakibatkan mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mereka juga kehilangan pekerjaan sebagai petani, berburu, dan sebagai nelayan, karena kawasan itu sudah dijadikan sebagai areal pertambangan. Sebelum sampai ke PT NHM, Polisi (Brimob) menghentikan mereka dan menangkap serta menyiksa mereka. Sumber lain menyebutkan bahwa, tindakan aparat yang menangkap dan menahan masyarakat secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran HAM. Selain itu, para aparat juga melakukan pembunuhan kilat terhadap mereka yang melakukan aksi damai. Karena itu, Komnas HAM diminta segera menurunkan Tim Pencari Fakta (TPF) sebagai upaya untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Lebih lanjut diharapkan kepada Komnas HAM segera mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi masyarakat dari bentuk-bentuk pemusnahan sumber kehidupan masyarakat.

D. Klarifikasi dan Resolusi Konflik di Maluku Utara

Mencermati berbagai kejadian yang berkaitan dengan konflik bernuansa 'SARA' di Maluku Utara, maka berdasarkan kondisi riil setelah penciuman lapangan, penulis memandang perlu klarifikasi secara obyektif dalam kaitan dengan upaya dan langkah-langkah (resolusi konflik) sesuai dengan penjelasan berbagai pihak terkait (informan kunci) dalam studi ini. Menurut beberapa sumber mengungkapkan bahwa, kerusuhan ini terjadi ada kaitanya dengan tragedi di Ambon. Hal ini terutama karena kelompok masyarakat Ambon Nasrani sebagian melarikan diri ke Maluku Utara. Di samping itu, sikap feodal Sultan Ternate yang kontraversial dengan memanfaatkan pasukannya menyerang warga muslim yang mendiami Kota Ternate terutama suku Makian, Bacan, Tidore dan Sanana.

Penegasan salah satu sumber (*YA/67 th*), setelah mencermati laporan awal beberapa tokoh masyarakat Maluku Utara yang ada di Jakarta, dengan mengatas-namakan Himpunan Kerukunan Maluku Utara (HKMU) kepada Pemerintah Pusat, yang di ekspose secara luas melalui media cetak dan elektronika yang menyimpulkan bahwa kerusuhan di Maluku Utara dipicu oleh tiga hal pokok, yaitu : (1) perebutan wilayah antara penduduk beragama Kristen dan Islam di Halmahera, (2) perebutan tambang emas di Kecamatan Malifud, dan (3) oerebutan jabatan/kursi Gubernur Maluku Utara. Selain itu, mengutip hasil wawancara dengan salah satu sumber (*FA/54 th*) mengatakan bahwa, Thamrin Amal Tomagola menjelaskan adanya ulah Sultan Ternate yang telah membuahkan konflik berkepanjangan.

Menyadari akan hal tersebut, beberapa tokoh Agama, tokoh masyarakat, wakil rakyat dan Pemuda di tempat pengungsian yang terhimpun dalam Wadah Team Advokasi, setelah dengan sungguh-sungguh mengkaji, mencermati dan menganalisis problematik tragedi pembantaian yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Maluku Utara, bahkan dengan tragedi tersebut telah terjadi konflik meluas di Halmahera bagian Selatan, Team Advokasi dan sumber-sumber yang kapabel dalam menjelaskan masalah yang sebenarnya sekaligus klarifikasi di dasarkan pada fakta, data serta peristiwa sebagaimana di paparkan sebagi berikut :

Bahwa perlu di perjelas dan di pertegas kembali sesungguhnya yang terjadi tanggal 3-4 November 1999 di Tidore, dan tanggal 6-11 November 1999 di Ternate Propinsi Maluku Utara bukan Tragedi kerusuhan, sebagaimana yang dilaporkan oleh beberapa Tokoh Masyarakat Maluku Utara di Jakarta, tetapi yang terjadi adalah kasus targedi pembantaian terhadap golongan Minorotas dan kejahatan atas kemanusiaan (*craim humanity*). Hal ini didasarkan pada fakta sebagai berikut: (1) semua korban pembantaian adalah golongan minoritas (Kristen) yang berdomisili di Ternate dan Tidore; (2) semua rumah penduduk yang hancur, rusak dan musnah adalah milik golongan minoritas; (3) semua sarana dan prasarana peribadahan dan pendidikan yang hncur, rusak dan musnah adalah Gereja dan Sekolah, SMP, SMA Kristen, STT Kalvari, semua milik golongan minoritas; (4) yang mengungsi meninggalkan Ternate dan Tidore, adalah semua golongan minoritas, Tani, Buruh, Nelayan, Wiraswasta, Pegawi Negeri Sipil dan Anggota POLRI, Para Pengurus Yayasan Kristen dan Pendidikan Kristen, para Pendeta dan Pengurus Gereja; (5) korban meninggal dunia

secara sadis dan mengerikan, baik yang telah teridentifikasi oleh aparat keamanan adalah seluruhnya golongan minoritas; (6) data dan fakta tersebut diperkuat dengan dukunggan data hasil wawancara beberapa sumber yang terlibat dalam kerusuhan; dan (7) dari fakta dan data kejadian tersebut, maka tidak ada persangkaan lain dan atau pemungkiran fakta selain mengakui sebagai suatu pembenaran.

Bahwa kronologis peristiwa (konflik), 18 Agustus 1999 dan 24 Oktober 1999 di Malifut Kabupaten Halmahera Utara, akar permasalahannya adalah sengketa batas wilayah Kao-Malifut, bukan perebuatan wilayah antar Kristen dan Muslim. Hal tersebut didasarkan pada alasan kronologis sebagai berikut: (1) 12 Juli 1973 hasil penelitian Direktorat Vulkanologi Bandung yang pada kesimpulannya bahwa Gunung Berapi Kie Besi di pulau Makian akan meletus, sehingga perlu dipikirkan relokasi penduduk Makian di daratan Halmahera; (2) 30 Juni 1975 dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara No. 9/10-1/MU//75 tentang pulau Makian dianggap tertutup untuk sementara waktu; (3) sejak 1975 Penduduk Pulau Makian secara bertahap mulai dipindahkan ke daratan Halmahera Kecamatan Kao (sekarang Kecamatan Malifud), hal tersebut berdasarkan usul Bupati Kepala Daerah Tk. II Maluku Utara tentang penegasan Status Wilayah Kecamatan Makian, Makian Daratan di Malifud; (4) sejak adanya relokasi warga Makian ke daratan Halmahera (sekarang Kecamatan Malifud), puluhan tahun lamanya penduduk di Malifud hidup berdampingan dengan penduduk asli di Kecamatan Kao secara damai, baik dan kekeluargaan tanpa ada konflik yang mengarah pada keretakan hubungan sosial dan permusuhan yang mengarah pada anti suku, agama dan ras.

Konflik di Maluku Utara memakan korban lebih dari 2.410 jiwa (jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya 432.295 jiwa (Tomagola, 2001). Secara mengejutkan, Tomagola juga menggambarkan bahwa korban konflik kekerasan di Maluku Utara ternyata lebih besar apabila dibandingkan dengan konflik kekerasan di Ambon (Maluku Tengah). Dalam jangka waktu yang relatif singkat (dimulai dari bulan Agustus 1999 dan situasi mereda bulan Juni 2001), konflik kekerasan di Maluku Utara ternyata memakan korban jiwa dan material yang lebih dahsyat dibandingkan konflik kekerasan di Ambon.

Bila dibandingkan dengan kasus Maluku Tengah, pemberitaan mengenai konflik di Maluku Utara relatif minim. Akibatnya, dampak konflik dan kekerasan yang terjadi dalam wilayah ini seringkali kurang diperhatikan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. Perhatian masyarakat luas serta dunia, timbul setelah koflik kekerasan di Tobelo dan Galela dengan korban jiwa yang sangat besar. Kantong kerusuhan (konflik kekerasan) terbesar di Maluku Utara sebenarnya adalah di Tobelo dan Galela. Jumlah korban jiwa terbesar terdapat di Tobelo 880 jiwa, semenatara di Galela meskipun jumlah korban jiwa tidak sebesar di Tobelo (hanya 234 jiwa), tetapi jumlah rumah yang hancur cukup besar yaitu (1.425 rumah). Jumlah kehancuran terbesar adalah daerah Malifut (2.133 rumah) dan Jailolo (3.593). Total kerusakan kurang lebih 5.700 rumah musnah rata dengan tanah. Di samping itu, yang sangat disayangkan bahwa selain fasilitas ibadah yang dirusak, juga menghancurkan fasilitas pendidikan (sebanyak 476 bangunan sekolah hancur). Kerusakan terbesar di Tobelo (sebanyak 81 bangunan sekolah dihancurkan). Jumlah pengungsi sebanyak

(197.000 Jiwa), demikian dapat dikatakan bahwa hampir separuh (50%) dari jumlah penduduk Maluku Utara menjadi pengungsi selama konflik berlangsung. Fakta yang dapat dijadikan acuan adalah, tidak adanya wakil-wakil masyarakat Maluku Utara yang diikutsertakan dalam perjanjian Malino II.

Mengingat besarnya intensitas konflik yang terjadi di Maluku Utara, pada prinsipnya proses penanganan pasca konflik harus dilaksanakan secara seksama dan sungguh-sungguh, agar timbul kesadaran dan perdamaian semua elemen masyarakat yang bersifat permanen. Melalui perspektif yang ditawarkan Kriesbang (1998), Miall, et.al (2002), proses resolusi konflik dapat dibagi ke dalam empat tahapan meliputi: (1) tahapan de-eskalasi konflik; (2) tahapan negosiasi; (3) tahapan pemecahan masalah; dan (4) tahapan membangun perdamaian. Selain dari keempat tahapan di atas, dalam upaya resolusi konflik di Maluku Utara juga akan dilihat proses *law-enforcement* yang dilakukan oleh aparat terkait.

Tahapan-tahapan di atas diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip resolisi konflik sebagai berikut: (a) upaya kooperatif, di mana kedua belah pihak harus melihat permasalahan sebagai suatu hal di mana mereka dapat berkolaborasi dan menemukan pemecahan masalah yang dapat diterima semua pihak; (b) pendekatan integratif, pemecahan memenuhi harapan dan kebutuhan semua pihak, atau dengan menggunakan pendekatan '*win-win solution*'; (c) memiliki pengertian yang mendalam memengani kebutuhan mendasar dari semua pihak yang terlibat; dan (d) proses dan hasilnya harus melalui jalan damai.

Pada tahap pertama konflik yang terjadi masih diwarnai dengan pertikaian senjata, sehingga proses resolusi konflik harus dibarengi dengan pendekatan yang berorientasi militer. Sejauh ini, resolusi konflik telah diupayakan oleh pemerintah dengan memberlakukan status darurat sipil di Maluku Utara (Kepres No. 8 tahun 2000). Dari hasil penciuman lapangan dan analisis mendalam diperoleh kesan bahwa, selama konflik berlangsung peran aparat dalam mencegah timbulnya konflik sangat lamban (kurang). Seperti yang dikisahkan beberapa sumber, konflik yang berlarut-larut sebenarny dapat dicegah apabila TNI/Polri bersikap tegas dan mau mengatasi masalah dengan turun langsung ke lapangan.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara mendalam disimpulkan bahwa TNI/Polri sangat berperan dalam upaya-upaya perlindungan terhadap berbagai pihak (warga masyarakat yang bertikai). Misalnya, ketika konflik merebak di Tidore (warga Kristen) mengungsi ke barak militer dan mendapat perlindungan selama beberapa hari sebelum dijemput oleh kapal militer. Secara aktif kepolisian juga melakukan razia senjata dan membentuk Pan Swakarsa di Ternate, yaitu dengan mendorong ‘pasukan kuning’ (pasukan adat Kesultanan Ternate) untuk menjaga perdamaian di Ternate. Namun, tanpa dibekali pengetahuan lapangan yang cukup dan juga proses rekrutmen yang tidak memadai; dalam pelaksanaan selanjutnya kehadiran ‘pasukan kuning’ justru memperburuk situasi konflik di wilayah ini.

Proses de-eskalasi juga terlaksana karena adanya kesadaran kritis dari para pelaku di lapangan. Misalnya, ketika ‘pasukan putih’ (gabungan orang Tidore dan Makian) melihat fakta di lapangan sangat bertentangan dengan asas kemanusiaan

yang diperjuangkan oleh Laskar Jihad, maka atas kesadaran sendiri kelompok ini memutuskan untuk menghentikan penyerangan dan kembali ke tempatnya masing-masing). Tahapan selanjutnya berupa negosiasi yang hanya bisa dilakukan ketika de-eskalasi konflik sudah terlaksana, atau bisa dilakukan bersamaan dengan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban korban konflik. Dalam konflik di Maluku Utara, tahapan negosiasi diinsiasi oleh pemerintah pusat melalui perjanjian Malino II serta melalui pertemuan-pertemuan yang disponsori oleh aparat/militer.

Tahapan ketiga atau tahapan pemecahan masalah adalah, tahapan di mana perlu diupayakan kondisi yang kondusif bagi kelompok-kelompok yang bertikai agar dapat melakukan transformasi konflik. Diharapkan pada tahapan ini sudah bisa diperoleh kesepahaman tentang alternatif pemecahan konflik, yang kemudian dapat ditindaklanjuti masing-masing kelompok. Sejauh ini, proses normalisasi kehidupan di Maluku Utara boleh dibilang masih jauh dari tahapan resolusi konflik dan yang ada hanyalah perdamaian yang sifatnya di permukaan (semu). Lebih jauh lagi tahapan pemecahan masalah yang membutuhkan beberapa hal penting seperti pengakuan terhadap legitimisa terhadap kelompok lain, serta pertukaran informasi yang benar mengenai penyebab dan kendala struktur yang dapat menghambar proses resolusi konflik. Fakta yang dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Sejauh ini yang dilakukan hanya proses pemecahan masalah dengan pendekatan kekuasaan, dalam hal ini pihak pemerintah pusat melakukan dominasi, serta eksploitasi terhadap pihak lainnya. Karena itu, permasalahan yang ditinggalkan seperti pemekaran wilayah Kao-Malifut, perbatasan Halmahera Barat dan Halmahera

Utara, serta arogansi perusahaan pertambangan (NHM) terhadap pembebasan lahan dengan masyarakat di wilayah ini yang hingga sekarang belum ada titik temu ke arah penyelesaian masalah seperti yang diharapkan semua pihak. Berbagai persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, merupakan bom waktu di Maluku Utara sehingga sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik kembali.

Tahapan terakhir tentang pembangunan perdamaian meliputi rekonsiliasi dan konsolidasi di Maluku Utara, untuk memulihkan kembali kesucian masyarakat yang sudah ternoda dari konflik (telah diupayakan oleh berbagai pihak). Namun, hal ini belum menjadi prioritas utama oleh pemerintah setempat yang sekarang lebih terkonsentrasi (sibuk) dengan upaya pemekaran wilayah dan pemberian bantuan bagi konrban konflik, terutama dalam menghadapi suksesi (Pilkada) Gubernur Maluku Utara 2007. Salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini, ialah perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat belum atau tidak pernah mendapat prioritas. Secara umum kesan yang diperoleh selama penciuman lapangan adalah, adanya upaya untuk menekan kejadian (konflik) yang telah berlalu ke dalam alam bawa sadar. Tidak ada upaya untuk mengungkap secara gamblangrealitas penderitaan dan kekerasan yang dialami oleh masing-masing kelompok.

Tidak ada upaya nyata dari elite formal dan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pengelolaan terhadap konflik, sehingga masyarakat (kelompok-kelompok yang pernah berkonflik) belum memiliki kesempatan untuk merubah paradigma konflik kekerasan menjadi konflik yang konstruktif. Menurut Kriesbang (1998), proses rekonsiliasi adalah proses di mana kedua kelompok berhasil merubah

destructive conflict menjadi *constructive conflict* dan hal ini sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi bangsa yang sudah lemah dan hampir hancur. Selanjutnya tahapan konsolidasi, yaitu perlu diberdayakan lembaga negara termasuk lembaga peradilan, proses penegakan hukum serta jasa sosial sebagai suatu bentuk manajemen konflik bagi konflik-konflik yang akan terjadi. Perjalanan resolusi konflik di Maluku Utara masih sangat panjang, karena belum bisa mencapai tahap konsolidasi – bahkan setiap langkah penanganan konflik menimbulkan permasalahan baru.

1. Resolusi Konflik Elite Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa elite tradisional menjelaskan bahwa, resolusi konflik bernuansa 'SARA' sesuai tradisi dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masing-masing kesultanan, terbukti mempersatukan semua komponen masyarakat di wilayah kekuasaan selama berabad-abad, meskipun harus diakui bahwa sejarah empat kesultanan di Maluku Utara atau yang dikenal dengan "Moloku Kie Raha" dalam perkembangannya selalu diwarnai pertentangan dan konflik, terutama antara Ternate dan Tidore. Dengan mengambil hikmah dari konflik 1999-2001 yang terjadi bersamaan dengan masyarakat daerah ini merayakan kehadiran Provinsi Maluku Utara, setelah sekian lama berjuang untuk memisahkan diri dari Provinsi Maluku (Ambon). Namun siatuai yang riang gembira itu, berubah seketika menjadi permusuhan, pertikaian, saling benci, dendam membara sesama anak bangsa dengan merebaknya konflik bernuansa 'SARA' terutama antara suku dan agama, karena ulah segelinter orang (kelompok elite politik dan birokrat). Memahami akan

hal tersebut, perlu menggali nilai-nilai budaya masing-masing kesultanan dalam membangun Maluku Utara seperti yang diharapkan bersama. Sehubungan dengan itu, Sekretaris Kesultanan Tidore, menjelaskan bahwa :

> "*Konflik pada dasarnya merupakan suatu fenoeman yang alamiah, dan pasti ada dan mengada di semua pola hubungan dan juga budaya. Perkembangan dan kemajuan suatu konflik tidak lepas dari makna dan interpretasi yang diletakkan komunitas setempat pada perilaku peristiwa tertentu, sehingga ia sangat culture spesific. Dengan demikian, dapat dengan mudah dipahami bahwasanya suatu konflik tumbuh melalu suatu proses interaktif yang didasarkan pada pencarian dan penciptaan*" (*AF/56 th*).

Mencermati pandangan di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk memahami suatu konflik bukan sekedar memahami dan menemukan fariabel-fariabel yang berkorelasi dengannya. Tetapi, pemahaman ini harus merupakan suatu upaya dan proses penemuan yang lebih jauh, dengan mencernakan kepekaan akan nilai, norma dan pengalaman komunitas termaksud. Dengan demikian, merupakan suatu konsekuensi logis bagi para pendamai, yakni pihak-pihak yang bertujuan melakukan penyelesaian konflik juga dituntut untuk memahami, bukan sekedar mengetahui makna yang berkembang dalam komunitas yang menjadi subyek untuk didamaikan. Dalam upaya melakukan perdamaian tersebut, maka baik pihak yang berperan untuk membantu penyelesaian konflik, maupun pihak yang berkonflik sendiri harus memperhitungkan sejumlah variabel yang meliputi: 1) proses terjadinya konflik; 2) faktor-faktor yang diduga menjadi sumber konflik; 3)bentuk konflik yang terjadi; 4)pemahaman dan persepsi pada pihak mengenai konflik; 5)situasi/kondisi yang diduga mempertajam konflik; 6) tingkat kekuatan; 7) tingkat kerugian/kerusakan yang diakibatkannya; 8) kegagalan mekanisme penyelesaian konflik.

Tanpa adanya pemahaman yang mendalam, kemungkinan program yang telah didesain untuk mengatasi konflik kurang berhasil kalau tidak dikatakan gagal. Secara singkat program-program yang telah didesain untuk menciptakan hubungan yang damai dan meningkatkan rasa keadilan, harus ditanamkan kembali nilai-nilai sosial budaya (adat istiadat secara utuh). Dalam konflik yang terjadi di Maluku Utara, merupakan konflik yang berimplikasi luas, selain 'SARA' juga konflik politik dan sosial (antar elite) yang mengakibatkan hubungan kemanusiaan dan persaudaraan terganggu, terutama masyarakat kecil semakin lemah, dan kestabilan ekonomi belum memadai yang pada akhirnya berimbas kepada semua elemen masyarakat. Karena itu, semua kelompok yang berbeda: agama, suku, adat istiadat (budaya), usia dan lainnya; dapat dicatat berupa hal yang diduga memiliki makna yang signifikan dalam memicu konflik, antara lain: a) instabilitas politik, b) krisis ekonomi yang berkepanjangan, c) kesenjangan ekonomi, d) lemahnya tingkat penegakan hukum, e) erosi nilai-nilai tradisional yang mengedepankan kebersamaan dan harmoni, dan f) masuknya aktor dari luar. Penyelesaian konflik menurut Sekretaris yang diperkuat oleh Kapita Laut Kesultanan Tidore, menjelaskan bahwa :

> "*Kita harus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya tradisional misalnya, konsep 'Marimoi Ngone Foturu' – 'Moi ua Ngone bato' – 'Fogogoru' dan lain sebagainya. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang dikenal oleh komunitas Maluku Utara dari berbagai etnis dan agama yang berinteraksi di dalamnya. Perbedaaan nilai dan norma tentu saja akan dijumpai karena hukum adat yang berbeda, akan tetapi logikanya akan sama. Karena itu, perlu diciptakan pendekatan yang sangat hati-hati dengan memperhatikan praktek-praktek yang diwarnai dengan budaya masing-masing. Disinilah perlu digunakan hukum adat yang memberikan mekanisme bagi pihak yang bersengketa*" (*AF/56 th; HA/42 th*).

Lebih jauh ditegaskan bahwa, konflik bernuansa ‘SARA’ sebenarnya lebih disebabkan permainan elite politik pusat maupun lokal, dan akibat yang ditimbulkan adalah penderitaan masyarakat lapisan bawah. Adat istiadat mengatur interaksi sosial, rakyat hanya menyerahkan segala keputusan terhadap Kolano, karena status Kolano dipilih oleh rakyat maka status itu merupakan tanggung jawab dunia dan akhirat. Sultan dipandang sebagai sosok yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun termasuk keluarganya. Sultan adalah simbol persatuan rakyat, karena sultan dipercaya dapat membawa tatanan sosial yang terbaik bagi rakyatnya (umat yang berbeda agama dan etnis). Dengan kata lain, Sultan adalah sosok yang independen, yang dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang terbaik yang tidak memecah belah warganya dari perpecahan etnis dan agama.

Kabag. Hukum Kabupaten Halmahera Tengah menambahkan bahwa :

> “*Dulu masyarakat majemuk hanya berada di kota-kota besar, tetapi sejak tahun 1970-an percepatan pluralisasi masyarakat, baik dalam pengertian vertikal, sosial ekonomi maupun horizontal agama dan ketiadaan rasa kesaingan seharusnya bisa dipupuk. Tetapi hegemoni dan dominasi ingatan kolektif yang dibina negara, menjadikan kesemuanya artivisual. Karena itu, ketika kekuasaan terjadi, pruralitas yang telah mewujudkan dirinya dalam berbagai corak ‘keasingan’ menjadi sumber konflik. Bahkan sampai sekarang masih dihantui …. Barangkali sudah waktunya …. Belum terlambat …. Harus menggali kembali ingatan kolektif tradisional lokal*.” (*IR/52 th*).

Lebih jauh dijelaskan bahwa, mungkin sebuah ironi, kalau barulah disaat pelemahan pada tatanan daerah dan masyarakat lokal terjadi, desentralisasi dan otonomi sedang digalakkan. Karena itu, selain konflik dan kelemahan pemerintah; tidak ada salahnya harus kembali mengkaji unsur-unsur kekuatan dari massyarakat dan tradisi lokal. Hal ini bukan untuk kembali ke masa silam, tetapi menemukan harta

karun yang hilang. Mungkin dengan harta inilah, semua komponen masyarakat dapat bersama-sama menata kehidupan sosial dan kenegaraan yang aman dan tenteram.

Dewasa ini sering terlontar gagasan untuk menciptakan identitas suatu daerah atau kota, yang kemudian kerap dicoba dalam wujud fisik, baik berupa gapura, pagar, bentuk atap, anak tangga atau bentuk-bentuk lain dari suatu kawasan, di mana kebutuhan inipun muncul dalam berbagai sloga mulai dari jati diri budaya hingga pariwisata. Identitas dapat disamakan dengan sesuatu jejak panjang yang dibentuk oleh kebudayaan sepanjang perjalanan dalam sejarah, jejaknya adalah peradaban sendiri. Untuk mengetahi identitas tersebut, harus terlebih dahulu memahami diri sendiri dan lingkungannya. Identitas bersifat pluralistik, bukan suatu pola tunggal. Karena itu haru dipahami, selain kesatuan juga terdapat kebhinekaan.

Pendekatan yang demikian, serta berupaya sepenuhnya memahami substansi penjelasan di atas, misi Kesultanan Tidore dalam upaya membangun Maluku Utara ke depan adalah: a) Menjadikan masyarakat Maluku Utara sebagai masyarakat yang berbudaya menuju terwujudnya masyarakat madani; b) Membangun masyarakat yang cinta damai, agamais sesuai keyakinan individu; c) Mempertinggi harkat dan martabat manusia sebagai konsekuensi dari interaksi sosial masyarakat; d) Mendukung pelestarian warisan sejarah dan budaya serta unsur-unsur yang menjadi pembentukan jari diri. Dengan demikian, profil budaya yang diinginkan adalah: “terbangunnya masyarakat yang berbudaya, memiliki harga diri dan jati diri, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan, beradab dan keserasian yang bernuansa *adat se atoran*.”

Proses perjalanan sejarah di Maluku Utara, Islam telah memainkan peran penting dan telah menjadi kekuatan potensial dalam kehidupan praktis kerajaan-kerajaan di Maluku selama berabad-abad. Hidup berdampingan kerajaan-kerajaan di Maluku tidak selalu rukun dan damai, terutama antara Kesultanan Ternate dan Tidore karena rivalitas dan ambisinya masing-masing. Meskipun demikian, bila agama Islam terancam; seperti yang dialami kaum Muslim di Moro atas tekanan Portugis dan pastor-pastor Kristen, semua perbedaan dan pertentangan di antara kerajaan-kerajaan itu dilupakan; semangat persatuan yang kukuh di antara kerajaan-kerajaan tersebut dapat dibangkitkan demi menyelamatkan Islam yang sedang terancam.

Sultan Khairun sangat gigih dan toleran membela kepentingan Kristen pada masa kepemimpinannya di Maluku, pembelaan dan kemudahan diberikan kepada pihak Kristen, akhirnya memprakarsai sebuah pertemuan di antara para penguasa se-Maluku untuk membahas dan mencari solusi penyelamatan kaum Muslimin Moro yang mendapat tekanan dari Portugis dan pemimpin-pemimpin Kristen. Tetapi, Islam juga telah dijadikan simbol dan alasan pembenaran bagi suatu tindakan militer, seperti yang dilakukan Raja Jailolo (Katarabumi), terhadap umat Kristen Tolo, dan Sultann Babullah terhadap komunitas Kristen Moro. Hal yang sama juga dilakukan Sultan Sibori Amsterdam, ketika menentang pemerintahan Kompeni Belanda di Maluku di Maluku Tengah dan Ternate. Perlu dipahami bahwa, agama-agama di Indonesia (termasuk Maluku), bukan hanya Islam – tetapi selalu jastifikasi politik. Meskipun demikian, harus pula diakui bahwa “Islam” telah menjadi alat perekat bagi persatuan dan kesatuan kerajaan-kerajaan Maluku.

Kerajaan-kerajaan di Maluku Utara didirikan di atas di atas fondasi dan adat dan tradisi yang kukuh dan relatif sama. Perbedaan-perbedaan yang muncul terkait dengan konstalasi politik dan ekonomi, hampir tidak ada dan tidak signifikan dengan fondasi tersebut. Bentuk-bentuk masyarakatnya yang heterogen dan pluralistik tidak menjadi *handikap* dalam komunikasi dan hubungan interaksi kultural yang cukup relevan pada masa-masa awal perkembangan kerajaan-kerajaan itu. Namun demikian, harus diakui bahwa perkembangan berikut dengan kondisi geografis yang unik dan kompleks (lebih dari tiga ratus pulau) menjadi kesulitan tersendiri. Paling sedikit ada dua faktor yang perlu dikaji, dalam kaitan dengan proses penyelesaian konflik antar elite di Maluku Utara, yaitu "persamaan kultur" dan "agama Islam." Naidah, dalam catatan sejarah menyebutkan bahwa Maluku *kie raha ma asal rimoi bato, maka kabasaran se ma istiadat rimoi bato* (Empat gunung Maluku, sesungguhnya punya satu asal usul, punya kemegahan dan kultur yang sama).

Kesatuan adat-istiadat (budaya) yang mewarnai kerajaan-kerajaan Maluku, seperti yang ditegaskan Naidah, menyangkut banyak hal; sebagai ilustrasinya gelar *Kolano* yang digunakan raja-raja Maluku pada masa pra-Islam. Penggunaan gelar semacam ini telah melembaga baik di kerajaan-kerajaan besar maupun kecil, bahkan tetap dipertahankan penguasa Jailolo hingga berakhirnya riwayat kerajaan tersebut. Hal serupa juga ditemukan pada penyebutan pangkat dan organ kekuasaan di dalam berbagai kerajaan Maluku. Dengan demikian, faktor kultur telah menjadi perekat dan pematri kesatuan emosional kerajaan Maluku serta menjadi alat penyanggah yang harus dipertimbangkan secara matang dan sungguh-sungguh.

Kecuali itu, Tidore dan Bacan terkenal sebagai kerajaan-kerajaan "pemberi ibu" kepada Ternate, karena banyak Sultan Ternate menyunting permaisurinya dari kedua kerajaan tersebut. Dengan budaya politik semacam itu, konflik yang keras (*antagonis*) antara kerajaan-kerajaan Maluku yang mengancam eksistensi salah satu di antaranya (kecuali Jailolo yang akhirnya dilikuidasi Ternate), dapat diredam secara efektif. Sehubungan dengan agama Islam sebagai perekat, kenyataan yang harus dicatat adalah para raja Maluku merupakan orang-orang Muslim (*moor*). Kenyataan menunjukkan bahwa, agama Islam terlihat secara jelas sebagai salah satu alat perekat yang kuat di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Setelah Islam masuk ke dalam jantung kekuasaan kerajaan-kerajaan Maluku (Utara), Islam menjelma sebagai jati dirinya. Hal ini bisa dilihat pada restrukturisasi kerajaan-kerajaan Maluku menjadi kesultanan (kecuali Jailolo), yang dipelopori Ternate diikuti Tidore dan Bacan.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh elite adat Kesultanan Bacan, bahwa:

> "*Ketika eksistensi Islam terancam oleh perkembangan pesat Kristenisasi Katolik di Moro, terutama setelah kunjungan Franciscus Xaverius (1546), Sultan Khairun yang terkenal paling tinggi toleransi keagamaannya, dan karena itu banyak mendapat pujian dari para pastor yang bertugas di Moro, tak urung merasa cemas. Ia kemudian mengumpulkan para penguasa Maluku lainnya (Tidore, Bacan dan Jailolo), untuk membahas dan mencari solusi tentang kodisi yang dihadapi umat Islam Moro*." (*DK/68 th*).

Penegasan di atas menunjukkan bahwa tingkat fanatisme keislaman dalam wilayah Maluku Utara masih sangat kuat, meskipun fanatisme itu sering disalah-gunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti konflik yang terjadi tahun 1999-2001. Jika memahami sejarah empat kesultanan dengan benar, maka segala bentuk perbedaan baik agama, suku maupun tradisi budaya tidak akan menjadikan masyarakat untuk

bermusuhan satu sama lain. Sebagai contoh, sejak berdirinya empat kesultanan yang bermula dari Limau Dolik, Pulau Gapi (Makian) sudah memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Pandangan para sultan waktu itu bersama masyarakat yang majemuk (berbeda agama, suku, adat istiadat) untuk membangun Bacan sebagai satu kerajaan yang kuat dan kokoh di atas pondasi keragaman.

Sehubungan dengan itu, konflik yang terjadi merupakan musibah yang sulit diduga dan tiba-baba. Karena itu semua pihak harus menyadari dan menggali kembali adat budaya setempat, khususnya wilayah Kesultanan Bacan (sekarangan Kabupaten Halmahera Selatan) dikenal dengan "Saruma" dan sekarang menjadi lambang daerah. *Saruma* bagi masyarakat Bacan dan Halmahera Selatan umumnya, adalah suatu institusi (lembaga adat) yaitu: nilai-nilai dan norma-norma budaya yang dijunjung tinggi dan dihormati semua elemen masyarakat dalam membina persatuan dan kesatuan, perdamaian dan persaudaraan warga masyarakat yang beranekaragam. Karena itu, *Saruma* tidak hanya sekedar 'lambang daerah' tetapi harus dipahami dan diimplementasikan dalam setiap aktivitas di lingkungan keluarga serta masyarakat, sehingga setiap warga memiliki pemahaman dalam mensosialisasikan nilai budaya *Saruma* guna meredam berbagai persoalan (perbedaan) yang dihadapi.

Menurut salah satu sumber (*AS/65 th*), menambahkan bahwa *SARUMA* mengandung makna *satu ruma*, *satu jiwa* atau *satu hati*, merupakan tradisi budaya yang diwariskan para leluhur Kesultanan Bacan yang perlu dihayati dan ditanamkan dan setiap warga masyarakat Bacan dan Halmahera Selatan, terutama dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang. Hal ini harus betul-

betul di antisipasi, mengingat konflik yang terjadi 1999-2001 sebetulnya adalah kurang atau merosotnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya tersebut. Perlu juga ditegaskan bahwa, nilai-nilai dan norma-norma budaya *SARUMA* paduan antara nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Bacan dan Halmahera Selatan, dengan tradisi budaya setempat termasuk nilai-nilai agama-agama lain (khususnya Kristen Katolik dan Protestan), sehingga tidak ada persoalan tentang perbedaan suku, budaya dan agama yang semua terangkul dalam budaya *SARUMA*.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa, masyarakat Bacan dan Halmaheras Selatan umumnya adalah dikenal masyarakat *agamais*. Karena itu, keempatan kesultanan sebenarnya berperan dalam mengembangkan agama Islam, tetapi Kesultanan Bacan lebih banyak menyebarkan Islam mengingat sejarah kesultanan ini merupakan awal mula menyiarkan Islam, sebelum berkembang ke daerah-daerah lain yaitu di Makian (Limau Dolik atau Tahani). Upaya untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai budaya kesultanan, bukan untuk menata kehidupan masyarakat sekarang seperti di zaman kerajaan (kesultanan) melainkan lebih merupakan penghormatan sekaligus sebagai sesuatu yang positif dari masa lalu, diangkat kembali dengan satu tekad atau satu misi yaitu: persatuan dan kedamaian seluruh masyarakat.

Menurut Sekretaris ‘Sinode’ (*MB/50 th*) menjelaskan bahwa, konflik yang terjadi 1999-2001 di wilayah Maluku Utara dan Halmahera Utara khususnya, telah menghancurkan semua pranata kehidupan yang telah dibangunan selama berabad-abad. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali semua elemen masyarakat (Kristen dan Islam) bekerja keras, bahu-membahu untuk sama-sama membangun kembali semua

pranata kehidupan yang telah hancur itu. Menyadari hal tersebut, lewat sidang-sidang *Sinode* tahun 2002 untuk menetapkan program lima tahun (2002-2007), terutama untuk membina umat Kristiani dalam mengantisipasi kehidupan di masa mendatang dengan mengambil hikmah di balik konflik yang pernah dialami agar tidak terulang kembali. Dalam hubungan ini, program-program yang telah ditetapkan tidak hanya untuk komunitas Kristen tetapi semua komunitas Kristen dan Islam di Halmahera Utara dan Maluku Utara umumnya. Karena itu, program-program tersebut senantiasa dikoordinasikan dengan program MUI (Majelis Ulama Indonesia) sampai tingkat kecamatan, di mana pada prinsipnya program pembinaan umat pasca konflik adalah 'program kemitraan' antara pemerintah dan semua elemen masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya setempat.

> "*Salah satu nilai budaya yang harus digali kembali untuk disosialisasikan terhadap setiap warga masyarakat, baik di kalangan komunitas Islam maupun Kristen khususnya wilayah Halmahera Utara, ialah "Hibua Lamo" sebagai suatu institusi atau lembaga adat, yang telah terbukti serta dapat mempersatukan masyarakat selama berabad-abad silam. Meskipun demikian, "Hibua Lamo" ini dipolitisir oleh Belanda khususnya dalam kaitan dengan misi perdagangan dan monopoli di wilayah Maluku, termasuk di dalamnya penyebaran misi Kristenisasi (Protestan) karena agama Islam dan Kristen (Katolik) telah eksis lebih dahulu. Namun setelah terjadi konflik masyarakat menyadari bahwa konflik yang dialami hanya membawa kerugian bagi semua, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Tetapi, yang ada hanya penyesalan dan kenistaan*." *(MB/50 th*).

Lebih jauh ditegaskan bahwa, 'Hibua Lamo' mengandung makna 'sebuah rumah besar' yang di dalamnya bernaung atau berlindung semua warga masyarakat, baik Kristen maupun Islam dalam membina dan menata hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain, masyarakat Halmahera Utara pada awalnya adalah satu keluarga (berasal dari satu rumah) dan perkembangan kemudian sesuai dengan kemajuan dan

perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama menyangkut masalah keyakian (agama) merupakan hak individu untuk menentukan pilihan. Hal ini dapat dipahami bahwa, masyarakat Halmahera Utara khususnya dan Maluku Utara umumnya semula adalah tidak mengenal agama (animisme). Harus diakui eksistensi Islam lebih awal, kemudian Kristen (Katolik) oleh Portugis dan Spanyol, dan Kristen (Protestan) oleh Belanda sekitar 1866. *Hibua Lamo* bagi masyarakat Halmahera Utara merupakan suatu tradisi budaya yang dijunjung tinggi (baik Islam maupun Kristen) untuk hidup berdampingan secara damai dalam waktu yang relatif lama.

Menurut salah satu sumber (tokoh masyarakat Kao), menyebutkan bahwa:

> *"Konflik yang terjadi terutama dipicu oleh masalah perbatasan wilayah Kao dan Malifut. Sesuangguhnya kalau dipahami secara benar nilai budaya dan tradisi-tadisi yang telah mempersatukan masyarakat (Malifut dan Kao), konflik tersebut lebih karena pengaruh dari luar. Perlu dicatat bahwa, masyarakat (suku Makian) sejak pindah (transmigrasi lokal) tahun 1975 hidup berdampingan secara damai kurang lebih 25 tahun. Hal ini karena, filosofi masyarakat Kao sebagai penduduk asli sejak dahulu sudah tertanam pandangan hidup meliputi: o'dora, (kasih sayang), o'layani (pelayanan), o'diai (kebenaran), dan o'adili (keadilan). Bagi masyarakat khususnya dan Halmahera Utara umumnya filsafat ini tetap dipelihara secara turun temurun hingga sekarang*." (*SK/56 th*).

Berdasarkan pandangan hidup di atas, masyarakat Kao (mayoritas Kristen) menerima dan memandang saudara-saudaranya (minoritas) penduduk asli maupun pendatang dengan penuh kasih sayang, yang merupakan implementasi dari *o'dora*. Makna yang ditarik dari filosofi hidup di atas ialah, siapapun dan dari manapun tetap diperhatikan serta membutuhkan kasih sayang sesama manusia. Karena itu, dalam menata kehidupan seasma secara baik sesuai dengan adat istiadat dibutuhkan pelayanan tanpa pilih kasih sebagai implementasi dari *o'layani*. Dengan kata lain,

setiap warga masyarakat baik penduduk asli, pendatang, Islam maupun Kristen tetap mendapat pelayanan yang sama. Dengan demikian, untuk menata kehidupan yang damai sejahtera melalui kasih sayang dan pelayanan harus diikuti dengan penegakan kebenaran dan keadilan, sebagai implementasi dari *o'diai* dan *o'adili*. Menempatkan suatu hal dalam hidup dan kehidupan secara benar dan adil baik dari kacamata adat dan budaya setempat maupun norma-norma hukum yang berlaku. Singkatnya, dengan mengambil hikmah dari konflik yang merugikan semua elemen masyarakat; sudah waktunya menata ulang tadisi budaya yang merupakan filosofi hidup, dengan tetap berpegang teguh nilai-nilai agama – konflik semacam itu tidak akan terjadi.

Kondisi masyarakat Malifut-Kao sekarang sudah sangat kondusif, meskipun merupakan lokasi awal konflik di Maluku Utara (1999-2001), tetapi Malifut-Kao juga pertama-tama melaksanakan program rekonsiliasi, karena kedua belah pihak saling menyadari akan kekeliruan besama sehingga saling menerima dalam merealisasikan program rekonsiliasi, kemudian menyusul wilayah lain dan sampai sekarang ada wilayah tertentu belum merealisasikan rekonsiliasi ini seperti yang diharapkan. Bagi masyarakat Malifut-Kao program rekonsiliasi dapat dilaksanakan atas prakarsa tokoh adat tokoh masyarakat setempat, karena pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat lamban dalam mengambil keputusan.

Menurut salah satu tokoh agama menegaskan bahwa, setelah mengetahui secara ringkas dan menyeluruh persoalan dibalik konflik di Maluku Tengah (Ambon) dan Maluku Utara, beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menangani masalah tersebut, khususnya umat Kristiani bahwa: (1) hal yang perlu dilakukan adalah

menahan diri. Sikap yang terlalu cepat memberi komentar yang membela pihak Kristen bukan saja membohongi diri sendiri tetapi tidak jujur kepada Tuhan. Berita yang disebarluaskan hendaknya bersikap netral dan lebih mengedepankan kasih dan kebenaran firman Tuhan; (2) dari tragedi ini dapat menyadari bahwa *stereotip* umat Kristen selalu baik dan menjadi korban ternyata tidak sepenuhnya benar, sebab ada juga umat Kristen yang berlaku di luar kemanusiaan dan telah menyebabkan puluhan ribu orang menderita dan mengungsi; (3) para Pendeta perlu menyadari bahwa umat Kristen perlu didewasakan sehingga bertobat dan melakukan kehendak Tuhan dalam semua aspek hidup; (4) segala upaya yang dilakukan demi mencapai rekonsiliasi dan menyalahkan yang salah serta membantu yang menjadi korban baik yang beragama Kristen maupun Islam. Bantuan hendaknya untuk tujuan kemanusian, rehabilitasi dan rekonsiliasi bangsa, dan bukan untuk memperbesar volume perang; dan 5) Banyak umat Islam yang berkehendak baik; yang dengan mereka kita harus bekerja-sama menuju rekonsiliasi bangsa.

2. Resolusi Konflik Elite Formal

Menurut Sekretaris Kota Ternate menjelaskan bahwa, konflik yang terjadi di Maluku (Ambon) yang dikienal dengan ‘Tragedi Ramadhan’ terjadi Januari 1999. Konflik di Maluku Utara terjadi 8 bulan setelah konflik Ambon, yaitu Agustus 1999 di Malifut-Kao. Dugaan kuat konflik tersebut memiliki hubungan dengan konflik di Ambon. Pemerintah Kota Ternate bersama Pemda Kabupaten dan Provinsi telah berupaya dengan mengarahkan segala kemampuan yang dimiliki, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Lebih lanjut dijelaskan bahwa :

"*Tiga bulan telah berlalu (tanggal 18 Agustua 1999), penyelesaian konflik yang telah diupayakan tidak tersosialisasi dengan baik (sejak bulan Oktober 1999 sampai sepanjang tahun 2000) gelombang kerusuhan merebak hampir semua daerah dalam wilayah Maluku Utara. Konflik telah meluas, gelombang pengungsi besar-besaran membanjiri Kota Ternate dan kota-kota lain yang dianggap aman. Mengantisipasi kondisi yang semakin tidak terkendali, oleh Pemerintah Pusat menerapkan "Darurat Sipil' dengan bantuan aparat keamanan dalam mengatasi konflik. Bersamaan dengan itu, diadakan reskonsiliasi dengan program 'Pasar Bakubae' dan 'Persaudaraan Sejati' diikuti dengan program 'pemulangan pengungsi' serta rehabilitasi. Namun, segala upaya yang dilakukan belum mencapai hasil maksimal seperti yang diharapkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, secara teknis banyak kendala yang dihadapi antara lain: pengungsi yang telah dikembalikan, kemudian kembali karena alasan keamanan, ketidakcocokan data antara satu pihak dengan pihak lain dalam penanganan pengungsi sehingga perlu ada klarifikasi"* (*FA/54 th*).

Hal senada ditegaskan Sekretaris Kabupaten Halmahera Tengah, bahwa :

"*Dalam upaya penyelesaian konflik Maluku Utara harus dilihat bahwa, apa yang dialami di Malifut-Kao, Ternate, Tidore, Galela, Tobelo, Bacan dan berbagai wilayah di provinsi yang baru diresmikan di era reformasi ini tidak lain merupakan imbas dari konflik Ambon. Apa yang disebut 'Tragedi Idul Fitri' atau 'Idul Fitri Berdarah' di Ambon dan 'Natal Berdarah' di Tobelo keduanya merupakan 'tragedi kemanusiaan' yang tidak bisa dilupa dan harus mengambil pelajaran berharga untuk kemudian dikubur dalam-dalam masing-masing pihak (Islam dan Kristen). Karena semua itu hanya ulah atau ambisi sekelompok (elite birokrasi dan politik) yang pada gilirannya merugikan semua elemen masyarakat (terutama masyarakat lapisan bawah) yang tidak berdaya dan buta akan politik. Pemda Halteng sejak awal pengembalian pengungsi telah melakukan program-program yang dicanangkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masalah pengembalian pengungsi dan aktivitas lain yang berkaitan dengan penangan konflik di wilayah Halmahera Tengah mengalami kemajuan dan cukup berhasil dibanding daerah lain."* (*MH/52 th*).

Upaya penyelesaian konflik di Maluku Utara, seperti yang ditegaskan Sekda Halteng di atas, sesuai fakta di lapangan bahwa program pengembalian pengungsi sebagai langkah awal penyelesaian konflik di wilayah Halmahera Tengah dikatakan cukup berhasil. Hal ini karena program tersebut dilaksanakan atas koordinasi dan Pengawasan langsung dari Pemda, serta tetap berpegang teguh pada prinsip 'upaya

menyelesaikan masalah (konflik)' tanpa harus menimbulkan permasalahan baru dari kebijakan dan langkah-langkah yang diambil. Kenyataan ini tentu sangat berbeda dengan pelaksanaan program pengembalian pengungsi oleh Pemda Halmaherat Barat, Pemerintah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara yang hingga sekarang persoalan ini tidak selesai, bahkan menimbulkan permasalahan baru antara pengungsi dengan elite birorat yang menangani kegiatan ini. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Desa Tahani, Kecamatan Malifut yang banyak terlibat di dalam upaya penyelesaian konflik terutama proses pengembalian pengungsi, menjelaskan bahwa :

> "*Secara alamiah timbul kesadaran masing-masing pihak, terutama antara Malifut-Kao bahwa konflik yang terjadi karena akibat kekeliruan bersama, di mana pemerintah baik kabupaten/kota maupun provinsi hanya mengulur-ulur waktu serta tidak serius menangani rekonsiliasi (hanya sebatas retorika) tanpa diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Karena itu, atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat (Kecamatan Malifut, Ibu, Kao dan Tobelo) melaksanakan rekonsiliasi tanpa dukungan dana dari pemerintah, dengan alasan dana belum cair dari pusat. Kenyataannya sampai hari ini, program rekonsiliasi tidak juga kunjung selesai, sementara dana yang begitu besar dari Pemerintah Pusat tidak jelas penggunaannya."* (*MA/52 th*).

Penegasan di atas dapat dipahami bahwa, langkah yang diambil Kecamatan Malifut dan Kecamatan Ibu sebagai lokasi awal terjadi konflik cukup berhasil, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menyampaikan laporan ke pusat seolah-olah program rekonsiliasi telah dilaksanakan. Hal ini karena Pemerintah Pusat hanya melihat laporan tertulis, tanpa melihat langsung kenyataan di lapangan. Maka dari itu, Pemerintah Pusat harus mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak terkait dalam penggunaan dana pengungsi di Maluku Utara. Kalau persoalan ini dibiarkan tanpa ada upaya serius dari pihak yang berwenang, tidak tertutup kemungkinan konflik

yang sama bisa terulang dan lebih dahsyat. Pernyataanl ini sebagai peringatan bagi para elite birokrasi dan politik, agar menyadari kekeliruan yang pernah dilakukan dan sadar akan tindakan yang tidak memihak kepada rakyat.

Menyinggung tentang ‘Tim 9’ sebagai reaksi atas kebijakan ‘Malino II’ oleh Pemerintah Pusat dalam upaya penyelesaian konflik di Maluku (Ambon), beberapa pihak yang terdiri dari elite politik dan birokrasi (elite formal) mengambil langkah serupa. Namun, harus diakui bahwa pembentukan ‘Tim 9’ merupakan langkah atau tindakan terburu-buru. Sebab, harus diakui bahwa konflik di Maluku Utara memiliki hubungan dengan konflik Maluku Tengah (Ambon) tetapi substansi dan karakteristik (akar persoalan) tidaklah sama, sehingga kehadiran Tim 9 tidak efektif. Karena itu ini bubar karena tidak signifikan persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, program yang berhubungan dengan penyelesaian konflik di Maluku Utara, adalah langsung ke akar rumput yaitu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik. Tim 9 sebagai reaksi dalam penyelesaian konflik di Malauku Utara atas ‘Keputusan Malino II’ merupakan rekayasa politik elite formal dalam mengambil keuntung dari program rekonsiliasi, meskipun kemudian Tim 9 tidak berlanjut.

Kondisi Maluku Utara umumnya dan Halmahera Utara khususnya, relatif aman (kondusif) setelah kurang lebih lima tahun dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, meskipun berbagai kendala dan kelemhan yang ditemui dalam kaitan dengan pengembalian pengungsi dan rekonsiliasi. Dalam hubungan ini, berbagai elemen masyarakat bersama Pemda Halmahera Utara, melaksanakan suatu “eklarasi Damai” pada tahun 2002 dan hasilnya cukup baik. Hail ini dapat dibuktikan dalam

pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) langsung pada tanggal 27 Juni 2005 yang oleh sebagian masyarakat Maluku Utara mengklaim akan rusuh, namun pada kenyatannya berlangsung aman dibanding daerah lain. Karena itu, langkah berikut yang harus dilaksanakan baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif adalah dapat merealisasikan 'amanah' yang diberikan rakyat (yang dituangkan dalam berbagai komitmen politik), sehingga masyarakat benar-benar merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata. Singkatnya, strategi pembangunan Halut ke depan adalah: "*Memelihara dan mejaga rasa saling percaya dalam berbudaya dan beragama, dengan prinsip membangun peradaban dan persaudaraan sejati*." Pembangunan tidak hanya di pusat kota tetapi sampai ke pelosok pedesaan.

Menurut salah satu sumber (Bupati Halmahera Utara), menjelaskan bahwa:

> "*Kerugian dan kehancuran yang ditimbulkan konflik 1999-2001, kembali ke titik nol. Karena itu, upaya merealisasikan program-program pasca konflik; pertama-tama harus mengembalikan suasana yang kondusif. Bagi Pemda Halut, dalam mengawali pemerintahan yang baru tiga bulan (seuumur jagung) belum punya rencana strategis, tetapi skala prioritas adalah menciptakan akselarasi pembangunan lintas sektoral mengingat keterbatasan anggaran.*" (*HN/53 th*).

Harus dipahami bahwa, dalam pelaksanaan program pembangunan melalui anggaran berbasis kinerja, adalah sinergi antara satu sektor dengan sektor lain sesuai alokasi anggaran yang tersedia. Dalam hal ini, efektivitas pelaporan, pengawasan dan koordinasi terus digalakkan. Sebagai contoh, laporan harus dibuat setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, dan laporan tahunan melalui kerja keras. Dengan kata lain, harus dibiasakan melaporkan hal-hal yang sekecil apa pun menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan ada kesan di masyarakat: hal-hal yang kecil saja tidak dilaporkan,

apalagi yang besar. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di masa datang terutama yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Menyangkut tentang 6 (enam) desa perbatasan dengan Halmahera Barat, Pemda Halut tetap berpegang pada aturan, yaitu UU yang mengatur tentang hal tersebut.

Senada dengan pejelasan di atas (Wakil Bupati Halut) mengatakan bahwa:

> "*Suasana yang tercipta antara Islam dan Kristen sejak dahulu sudah terbina melalui tradisi budaya, karena kedua komunitas ini sesungguhnya adalah bersaudara seperti yang nampak pada budaya 'Hibua Lamo' yaitu: satu rumah besar yang di dalamnya menghimpun keberagaman suku terutama Galela-Tobelo, kemudian karena tuntutan perkembangan dan perubahan dalam berbagai aspek khususnya menyangkut pembagian wilayah tetapi tradisi (nilai budaya) saling menghargai dan menghormati satu sama lain tetap terpelihara hingga berabad-abad. Tragedi baru-baru merupakan suatu bencana yang harus diambil sebagai pengalaman pahit sepanjang sejarah dalam membangun masa depan, dan tidak akan terulang kembali. Dengan demikian, tragedi atau musibah yang dialami 1999-2001 adalah pengaruh dari luar terutama konlik Ambon (Maluku), yang tidak perlu disikapi sebagai rasa simpati dan empati yang berlebihan. Hal yang tercipta dalam Pilkada 27 Juni 2005 merupakan cermin masa depan Halut yang diharapkan bersama."* (*AN/50 th*).

Suasana kebersamaan dan keselarasan melalui *Hibua Lamo* harus terus dibagun dan digalakkan dalam berbagai aktivitas, meskipun harus diakui nilai budaya ini harus ditempatkan pada proporsi dan batas-batas yang jelas agar tidak direkayasa oleh pihak-pihak tertentu melalui polarisasi dan akulturasi jangka panjang sehingga bisa memicu konflik antar komunitas yang ada. Sejarah mencatat bahwa, masyarakat Halmahera Utara, seperti halnya masyarakat di daerah lain dalam wilayah Provinsi Maluku Utara; pada awalnya adalah kafir (animisme) tidak berbudaya dan tidak beragama. Setelah Islam masuk selama berabad-abad baru Kristen, kemudian seiring

dengan perjalanan waktu berkembangan dua komunitas (Islam dan Kristen) yang memiliki satu leluhur ini mengembangkan keyakinan masing-masing dalam suasana persaudaraan dan perdamaian. Setelah masuknya bangsa-bangsa asing (Eropa), mula-mula Porrtugis, kemudian Spanyol dan silih berganti Belanda dan Inggris membuat keadaan yang damai dan tenteram berubah terutama Hindia Belanda di mana budaya *Hibua Lamo* tidak lagi sebagai perekat bagi kedua komunitas. Sementara, enam desa perbatasan dengan Halmahera Barat, sudah ditindak lanjut melalui Perda Halut No. 2 Tahun 2006 tentang 'Pembentukan Kecamatan-kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara' di mana Kabupaten Halmahera Utara, yang semua terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan. Dalam hal ini, Kecamatan Malifut yang banyak menuai sengketa dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao Telluk yang di dalamnya terdapat 6 (enam) hingga sekarang masih sengketa dengan Kabupaten Halmahera Barat.

Menurut beberapa sumber (anggota DPRD Halut), menegaskan bahwa; persoalah krusial yang harus diantisipasi wilayah perbatasan Kecamatan Malifut-Kao yang banyak menuai protes, adalah 5 (lima) desa di Kecamatan Kao telah diatasi melalui pemekaran wilayah yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini, Kecamatan Kao dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kao (induk) temasuk lima desa yang 'dipersengketakan'; Kecamatan Kao Utara dan Kecamatan Kao Barat. Menyangkut pemekaran ini telah dibicarakan dengan semua elemen terutama warga masyarakat Malifut-Kao, terutama persolan nama yang sering sering disengketakan sehingga membuat status Malifut tidak jelas (kabur) selama kurang lebih 30 tahun.

Sebagian mempersoalkan ‘Makian-Malifut’ atau ‘Malifut Makian Daratan’ sesuai PP No. 42 tahun 1999 menjadi Kecamatan Kao Selatan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya keputusan yang diambil sesuai Perda Halut No. 2 Tahun 2006 dikembalikan ke UU No. 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, dan UU No. 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

Sumber lain (Bupati Halmahera Selatan), menegaskan bahwa:

> “*Penyadaran masyarakat tentang dampak konflik yang dialami 1999-2001 yang merugikan semua pihak adalah menata kembali berbagai pranata sosial, ekonomi dan politik dengan berpegang teguh prinsip kebersamaan dan keadilan di atas keberagaman suku, agama dan adat istiadat. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan semua komponen masyarakat agar merasa diperhatikan sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman dan terteram dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah ditetappkan. Dalam hal ini, kemajemukan masyarakat Halmahera Selatan harus mendapat perhatian yang sama dan tidak ada pihak yang merasa dominan dalam pembangunan. Menyadari bahwa, di antara komunitas yang beragam di Halsel terdapat suku atau komunitas Galela-Tobelo yang memiliki ciri khas (keistimewaan) yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan konflik. Ciri khas atau keistimewaan tersebut, adalah Islam dan Kristen. Hal ini berbeda dengan komunitas lain yang salah satu (Islam atau Kristen) yang mayoritas (dominan). Hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar tidak berpotensimenimbulkan konflik.*” (*MK/52 th*).

Kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh kaitannya dengan program penyelesaian konflik, khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan baik oleh eksekutif maupun legislatif bersama semua komponen tetap mengedepankan nilai-nilai agama yang mengayomu keragaman dan perbedaan. Hal yang perlu ditekankan adalah kerukunan beragama dan saling menghormati satu sama lain, dialog terbuka antar-agama dan antar-suku agar masing-masing pihak memahami dan menjalankan nilai agamanya dengan baik. Dengan demikian, para tokoh agama, tokoh adat, elite politik dan pemuka masyarakat terutama aparat pemerintah harus menjadi contoh

dalam merealisasikan program pembangunan. Hal ini perlu ditekankan mengingat ekses yang timbul setelah Pilkada 27 Juni 2005 (Agustus 2005) yang mengakibatkan kerusakan atau terbakarnya gedung DPRD Halsel, yang dilakukan oleh pendukung (tim sukses) salah satu calon bupati (yang kalah). Karena itu, perlu sosialisasi nilai *Saruma* seperti yang telah dijelaskan di atas.

Menurut salah satu informan kunci (*RU/48 th*), menjelaskan bahwa:

> "*Konflik yang terjadi di Maluku Utara terutama disebabkan kesenjangan pendidikan dan ekonomi. Karena itu, dalam upaya penyelesaian konflik yang telah menimbulkan berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) harus mendapat perhatian (priorritas) utama yang tidak lain adalah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah bersama semua komponen masyarakat harus memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal atau pendidikan keterampilan dalam upaya mempersiapkan SDM yang mampu bersaing dan unggul dalam berbagai bidang usaha.Dengan demikian, harus disadari bahwa usaha peningkatan kualitas yang dimaksud harus dimulai dari tenaga pendidik yaitu guru dan dosen. Hal ini harus diakui bahwa kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh tenaga pendidik itu sendiri. Sebagai contoh, banyak siswa SMA-SMK dan mahasiswa yang malas belajar tetapi tidak ada penekanan dari guru atau dosen.*"

Ilustrasi di atas seabagai menggabarkan bahwa, kesenjangan pendidikan di Maluku Utara masih jauh teringgal dibanding daerah lain dan tidak berlebihan bika dikatakan bahwa masalah kesenjangan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya konflik, di samping faktor-faktor lain seperti kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena itu, masalah ini terutama dengan terjadinya konflik yang menimbulkan dampak negatif yang sangat luas harus segera diatasi kalau tidak ingin konflik yang sama terulang kembali. Meskipun harus diakui bahwa, dengan adanya konflik yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara juga memiliki sisi positif, terutama

masing-masing pihak menyadari dan memahami akan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki khususnya dalam kaitan dengan keberagaman. Dengan demikian, sudah waktunya dunia pendidikan terutama perguruan tinggi perlu memikirkan “manajemen konflik” sebagai salah satu solusi. Hal ini mengingat kemajemukan di Maluku Utara, antara lain terdiri dari 28 dari kurang lebih 30 suku (etnis). Selain pendidikan untuk memahami pluralisme (keberagaman) budaya, harus dipahami bahwa budaya adalah nilai-nilai, norma-norma dan perilaku yang mengatur orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Disamping itu, harus berfikir golobal dan bukan loak atau sukuisme dan kedaerahan (inkulturasi budaya) dalam arti luas.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu sumber (Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate), bahwa dampak yang ditimbulkan konflik 1999-2001 meliputi berbagai aspek baik korban juwa maupun kerugian material. Namun, bisa dikatakan bahwa konflik tersebut untuk sementara sudah dapat diatasi. Meskipun harus diakui masinh ada persoalan teknis yang berkaitan dengan masalah pengembalian pengunsi, yang sampai sekarang belum kembali ke tempat asalnya. Seperti yang telah dijelaskan salah satu sumber sebelumnya bahwa, salah satu faktor yang perlu mendapat porsi yang lebih (prioritas utama) adalah pendidikan. Hal ini karena masalah pendidikan di daerah ini masih jauh tertinggal dibanding dengan daerah lain, salah satu contoh yang sangat dirasakan ialah terbatasnya para ilmuwan, khususnya yang berkualifikasi ‘doktor’ (strata tiga) kurang dari 10 orang. Hal ini bisa dibayangkan, suatu daerah (provinsi) yang begini luas dengan keterbatasn ilmuwan (tenaga pemikir) baik di birokrasi maupun di perguruan tinggi.

Menyadari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah harus memikirkan hal sebagai skala prioritas untuk mengejar ketertinggalan ini khususnya menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang bertaraf nasional. Karena itu, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: (1) kualitas pendidikan kejuruan yang berorientasi peningkatan kemampuan dan daya saing, yaitu tenaga-tenaga trampil yang siap memasuki pasar kerja, dan (2) perencanaan pendidikan yang betul-betul menuntut kesadaran akan profesionalisme terutama yang berkaitan dengan bidang tugas dan tanggung jawab yang diemban (anggaran berbasis kinerja). Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

> "*Ada tiga hal penting yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, yaitu: (1) perencanaan yang betul-betul utuh keberpihakannya serta berorientasi peningkatan kualitas; (2) proses yang betul-betul dikawal yang relevan dengan perencanaan itu; dan (3) evaluasi hasil yang terus menerus untuk mengetahui seberap jauh jenjang pendidikan 'stekcholder' agar setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan*." (*YN/48 th*).

Perlu ditekankan bahwa, kebijakan pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama pendidikian dasar dan menengah adalah sangat berpengaruh dan menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Namun, perhatian pemerintah terhadap pendidikan terutama perguruan tinggi masih kurang dan terkesan tidak serius. Karena itu, kualitas pendidikan mulai dari SD sampai perrguruan tinggi masih ketinggal jauh khususnya di wilayah Timur Indonesia. Penekanan dan penegasan tentang kualitas pendidikan dewasa ini penting, mengingat UU Guru dan Dosen yang telah disyahkan mengatur dengan jelas, di mana guru (tenaga pendidik) pada jenjang SD harus strata

satu (S1) dan seterusnya. Dengan demikian, kualifikasi tenaga edukatif (Dosen) harus minimal strata dua (S2) sesuai bidang keahliannya.

Berkaitan dengan kualitas SDM Maluku Utara yang relatif jauh tertinggal dibanding daerah lain, sehingga dalam perspektif pembangunan di berbagai bidang baik ekonomi, politik dan sosial budaya masih nampak ‘ego sektoral’ sebagai akibat ketidakpahaman terhadap teori dan fakta empirik di lapangan. Dengan kata lain, di negeri ini (Maluku Utara) ada sesuatu yang ‘hilang’ yaitu tidak adanya ilmuwan yang memahami akan realitas dan teori. Sebab, harus diakui bahwa metodologi hanya dipunyai ilmuwan, sehingga sering terjadi arogansi terutama menyangkut ‘landasan teori’ dan ‘metodologi’ yang digunakan kadang tidak sesuai dengan fakta (kenyataan) di lapangan (khususnya substansi dan tujuan yang diharapkan).

Selain itu, peran media massa terutama ‘Jurnalisme Damai’ dalam membuat laporan suatu kejadian dengan bingkai (*frame*) yang lebih luas, lebih berimbang, lebih akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi. Tugas Jurnalisme Damai adalah melawan simplifikasi jurnalisme perang yang cenderung mereduksi situasi konflik hanya dalam dua pihak. Dalam konflik di Maluku dan Maluku Utara, pers selama kurang lebih lima tahun cenderung hanya melihat bahwa yang terjadi adalah pertentangan antara umat beragama (Islam dan Kristen), padahal persoalan yang sesungguhnya terjadi tidaklah sesederhana itu. Dengan kata lain, Jurnalisme Damai memerlukan sejumlah hal seperti Jurnalis yang tangguh dalam menegakkan kode etik professional pers dan memiliki wawasan yang memadai menyangkut masalah yang diliput dan tidak mengutamakan kepentingan

bisnis, politis atau kepentingan kelompok dan golongan. Menurut salah satu suumber, menjelaskan bahwa :

> "*Karena mengendalikan berita kebencian sama halnya dengan meredam konflik di lapangan, maka jurnalis sebagai pabrik wacana haruslah menentukan perannya secara profesional. Oleh karena itu, jurnalisme damai merupakan salah satu referensi tentang bagaimana seorang jurnalis mentransfosmasikan fakta dan realitas konflik menjadi realitas media dan membuka peluang pada pemahaman non kekerasan (non-violence) dan kreativitas bagi aplikasi kerja jurnalis dalam membuat liputan*." (*AL/40 th*).

Harus diakui bahwa, memang jurnalis dan media memiliki kebebasan untuk berekspresi, namun kebebasan yang dimiliki oleh jurnalis haruslah didedikasikan kepada kebenaran dan keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ditengah konflik menahun di Maluku Utara, jurnalisme damai tidak diterima dengan mulus oleh para pihak yang melingkupi *stakeholders* media, termasuk oleh para jurnalis sendiri. sehingga memunculkan jurnalisme damai di wilayah-wilayah konflik secara total dan fundamental memincu perlawanan dari para pihak yang lebih suka menggunakan paradigma jurnalisme perang atau mereka yang seringkali berlindung dibalik tameng obyektivitas. Tetapi hal ini menjadi tugas moral para jurnalis progresif yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan Hak Asasi Manusi dan demokrasi.

Tugas ini memang tidak mudah. Apalagi sebagian besar jurnalis di Maluku dan Maluku Utara menjadi korban dari konflik, di samping situasi dan kondisi di lapangan yang tidak kondusif. Kehadiran jurnalis sebagai saksi yang netral dalam pertikaian, bisa menguntungkan semua orang dalam menelusuri akar persoalan serta menemukan letak kesalahan dan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, diperlukan jurnalis untuk melacak dan mengungkap berbagai sumber,

sehingga persoalan Maluku umumnya dan Maluku Utara khususnya bisa didudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Resolusi konflik terutama langkah-langkah yang ditempuh pasca konflik untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya serta kesepakatan-kesepakatan yang dibuat untuk hidup berdampingan secara damai dalam jangka waktu yang relatif lama tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, harus tetap menghormati dan menjaga jangan sampai terulang. Fungsi media adalah mencerahkan pikiran dengan mengungkap fakta dan memberikan kesempatan pada akal sehat berteriak lantang untuk meredam prasangka dan kebencian.

Memahami peran dan fungsi media dan jurnalis yang demikian penting, terutama dalam kaitan dengan penyelesaian konflik, harus terus ditumbuhkan dengan sikap netralis, menghormati keberagaman dan cinta kebersamaan. Hal yang penting dikedepankan adalah, tidak ingin melihat Maluku dan Maluku Utara mengalami tragedi yang sama terulang. Karena itu, harus meneguhkan tekad dan komitmen untuk tidak membuat pemberitaan yang membangkitkan suasana konflik. Sebagai contoh, Natal dan Ramadhan yang seharusnya diwarnai dengan hal-hal yang mendekatkan manusia dengan sifat-sifat luhur mereka, ternyata tidak mampu menghentikan nafsu atau niat balas dendam, kebencian, dan keinginan untuk menghabisi pihak lawan. Konrban berjatuhan dalam jumlah cukup besar, membuat Indonesia khususnya dan dunia internasional terkesimak bagaimana orang Maluku dan Maluku Utara yang terkenal religius itu mengalami keputusasaan (*desperation*) yang luar biasa. Putus asa karena mereka tidak lagi percaya pada dialog untuk mencari solusi, melainkan memilih perang untuk mengatasi masalah. Ini berarti emosi lebih dikedepankan

dibanding rasio. Saling toleransi antar-warga yang berbeda agama (Islam-Kristen), beubah menjadi saling curiga yang memudahkan provokasi.

Mengadopsi metode penjelasan sosial segitiga kepercayaan (*Triangle Trust*), tentang relasi simbiosis media, masyarakat dan negara. Media di Maluku dan Maluku Utara memiliki posisi sangat penting. Di tengah konflik kekerasan antar-kelompok dalam masyarakat yang terpecah, sedang negara terutama pemerintah daerah, dalam kondisi tidak berdaya untuk meredam dan mengelola konflik. Media menjadi instrumen penting dalam masyarakat yang harus bisa berpikir jernih, dan mampu memberikan perspektif positif untuk menolong masyarakat komunitasnya sendiri, tempat media tumbuh dan berusaha.

Sepanjang tahun 1999-2001, masyarakat Maluku dan Maluku Utara ditandai dengan keterpecahan komunitas antar suku dan agama (Islam dan Kristen). Media masa dan para jurnalis mendapat teror dari masyarakat untuk ikut terlibat, dengan memihak salah satu komunitas (Islam atau Kristen) yang sedang berkonflik. Konflik berlarut sampai menelan banyak korban, sehingga masyarakat tidak percaya pada pemerintah yang dianggap tidak mampu menangani konflik. Karena frustasi, mereka bebas melakukan apa saja. Karena penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan melakukan koordinasi dengan institusi-insitusi organisasi perangkatnya. Karena banyak institusi yang ikut terpecah. Aparat keamanan, dalam beberapa kasus ikut terjebak dalam sentimen konflik masing-masing pihak (Islam dan/atau Kristen).

Dalam kondisi semacam ini, media menjadi instrumen yang punya potensi bisa menolong dengan keterbatasannya. Karena media, sebenarnya hanyalah institusi sederhana yang mengandalkan eksistensinya pada sumberdaya informasi. Bukan senjata, traktor atau ideologi. Intervensi yang bisa dilakukan media, minimal media, tidak ikut terpecah-pecah. Harus tetap terjalin adanya koordinasi dan solidaritas antarpekerja media. Kemudian mencoba beraksi bersama untuk tidak terjebak dan terlibat dalam konflik yang sedang terjadi di masyarakat, dengan tidak takluk pada tuntutan keinginan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sering tidak rasional. Sekaligus secara bersamaan memberikan porsi bantuan yang cukup, untuk membuat pemerintah mempunyai kepercayaan diri.

Strategi intervensi media untuk turut dalam penyelesaian konflik di Maluku Utara, dilakukan hingga kondisi berjalan normal yang ditandai dengan terciptanya kondisi saling menerima dan menghentikan konflik, sampai mulai normalnya kembali institusi pemerintahan. Di satu sisi, media harus mampu mengelola informasi agar kondisi masyarakat tidak terjebak kembali dalam sentimen antar komunitas agama yang potensial menimbulkan konflik, dendam dan trauma yang berkepanjangan. Sedangkan pada sisi yang lain, media harus mulai kembali menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti melakukan investigasi atas konflik antar elite dengan mengungkap akar penyebab karena ada berkecenderungan akan adanya pengaburan sesuai fakta. Media perlu mendorong pengungkapan peristiwa yang terjadi, dan mendorong pertanggungjawaban negara atas penyelesaian konflik di Maluku dan Maluku Utara menuju integrasi sosial dan politik yang sehat dan dinamis.

E. Proses Penyelesaian Konflik Dalam Menciptakan Integrasi Sosial dan Politik

Penelitian mengenai komunitas yang terpecah belah akibat konflik dan kekerasan bukan hal yang mudah, terutama konflik yang terjadi di Maluku Utara, karena untuk mengungkap fakta (penciuman lapangan), sering atau tergantung pada persepsi informan mengenai pihak mana yang terlibat serta didukung oleh analisis dan pengkanjian yang mendalam tentang kondisi obyektif sesuai fakta empiris. Di samping itu, interpretasi penulis berdasarkan kebijakan dan langkah-langlkah yang ditempuh pemerintah Maluku Utara pasca konflik 1999-2001 menuju proses integrasi sosial dan politik di berbagai aspek kehidupan yang tahan lama. Bahwa integrasi yang sempurna memang tidak ada, namun melalui strategi dan kebijakan berbagai pihak terkait terutama antar-pihak yang berkonfllik diharapkan terwujud integrasi sosial dan politik dalam waktu yang relatif lama.

1. Tahap-tahap Penyelesaian Konflik

Konflik sosial bernuansa ‘SARA’ atau studi ini, disebut “konflik antar elite” di Maluku Utara telah menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat baik korban jiwa, sarana dan prasarana (fasilitas umum), maupun beban psikologis khususnya terhadap wanita dan anak-anak. Selain itu, konflik juga telah membawa dampak negatif dalam berbagai bidang pembangunan terutama tatanan kehidupan sosial masyarakat. Upaya dan langkah-langkah penyelesaian telah dilakukan berbagai pihak yang terlibat pasca konflik, terutama pemerintah (skala prioritas) dalam bidang

ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun bidang politik dan keamanan antara lain: program pemulanganan pengungsi, pemulihan pelayanan sosial dasar, penanganan trauma mental pasca konflik, rehabilitasi sarana dan prasarana umum, pemerintahan; pembangunan prasarana dan sarana hukum dan keamanan; revitalisasi dan penataan kembali kelembagaan dan kapasitas pemerintahan daerah; sosialisasi, peningkatan budaya dan, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan; rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, peribadatan; revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya; dan pemantapan wawasan kebangsaan.

Langkah-langkah (tahap-tahap penyelesaian konflik) yang ditempuh melalui koordinasi lintas instansi, baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mengatasi permasalahan secara *komprehensi*ve melalui kebijakan yang dijabarkan menunjukkan perkembangan situasi wilayah yang kondusif, dan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan pembangunan yang lebih luas. Upaya perbaikan dan pemulihan mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri, berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama ini, telah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun masih terdapat permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga masih perlu penanganan yang serius.

a. Program Pemulangan Pengungsi

Pemulangan pengungsi ke tampat asalnya selama ini belum juga tuntas secara menyeluruh hingga akhir tahun 2004 sesuai dengan target pemerintah. Hal ini

karena data pengungsi yang sering mengalami perubahan karena mobilisasi penduduk yang sangat tinggi dari suatu wilayah ke wilayah lain. Oleh karena itu dilakukan pemutakhiran data pada tiga titik konsentrasi pengungsi yaitu 1) Konsentrasi Tobelo, 2) Konsentrasi Ternate, 3) Konsentrasi di Bitung/Manado dan luar daerah lainnya. Hasil pendataan kembali jumlah pengungsi ternyata bertambah, yaitu semula 24.406 KK (Data Bakornas) menjadi 36.999 KK atau 184.995 Jiwa. Hasil pemutahiran data pengungsi ini disepakati untuk ditetapkan sebagai data base pengungsi dan target serta sasaran pemulangan pengungsi di Provinsi Maluku Utara untuk pemulangan pengungsi tahun 2002 dan 2003.

Program pemulangan pengungsi ditetapkan pemerintah harus tuntas tahun 2005, namun dengan terjadinya perubahan data pengungsi maka tahun 2004 telah dipulangkan 34.851 KK; masih tersisa 2.148 KK. Tahun 2005 diprogramkan kembali dan diharapkan tuntas, hingga sekarang tidak tuntas. Pada kenyataannya pengungsi yang pulang secara swadaya (atas kesadaran sendiri) yang perlu mendapat bantuan, sebagai berikut: (1) Sisa pemulangan pengungsi tahun 2004 sebanyak 2.148 KK; (2) Jumlah pengungsi yang menetap di tempat pengungsian sebanyak 1.100 KK tersebar di Tobelo 300 KK dan di Tenate 400 KK serta 400 KK eks karyawan perusahaan pisang yang tersebar di Tobelo dan Galela; (3) Jumlah pengungsi yang pulang secara swadaya ke daerah asal yang perlu mandapat bantun sebanyak 1.121 KK. Jumlah pengungsi yang perlu ditangani dalam tahun 2005 adalah sebanyak 4.369 KK. Penanganan pengungsi ini rencana dituntaskan dengan optimalisasi aggaran melalui alokasi pendanaan APBN dan Inpres 6/2003:

Tabel 4. Program Pemulangan Pengungsi Maluku Utara Tahun 2005.

No	Status Pengungsi	Jumlah Pengungsi	APBN	Inpres 6/2003
1.	Sisa jumlah pengungsi Tahun 2004	2.148 KK	1.814 KK	334 KK
2.	Pengungsi yang kembali secara swadaya	1.121 KK	-	1.121 KK
3.	Pengungsi yang menetap ditempat pengungsian	1.100 KK	700 KK	400 KK
	Jumlah	4.369 KK	2.514 KK	1.855 KK

Sumber : Bappeda Provinsi Maluku Utara, Desember 2005.

Tabel di atas menggambarkan bahwa program pemulangan pengungsi di Maluku Utara sebagai langkah awal (skala prioritas) penyelesaian konflik yang harus diselesaikan tahun 2005, pada kenyataannya belum selesai. Sesuai hasil pengamatan di lapangan, khususnya di Kota Ternate masih banyak warga pengungsi khususnya dari Tobelo dan Galela (daerah konflik Halmahera Utara) masih menempati lokasi-lokasi disudut kota, dengan kondisi yang memperihatinkan. Hasil sesuai dengan penuturan salah satu informan yang juga koordinator lapangan dalam pemulangan pengungsi, menjelaskan bahwa :

> "*Program pemulangan pengungsi terutama yang masih menempati sudut-sudut Kota Ternate hingga sekarang belum juga tuntas, terutama disebabkan oleh ketidakcocokan data (berubah-ubah). Karena itu, Pemerintah Kota berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar masalah in tidak berlarut-larut. Kami sebagai pelaksana menunggu perinta., Hal yang menyedihkan adalah kondisi pengungsi itu sendiri. Karena itu, perlu ada ketegasan terutama yang mengkoordinasi para pengungs, mengingat ada indikasi penambah data pengungsi yang tidak sesuai dengan data awal, bahkan penambahan itu cukup besar*" (*GS/50 th*).

Ketidak sesuaian data pengungsi antar-pihak yang bertanggung jawab atas pemulangan pengungsi di Maluku Utara, merupakan problem yang berlarut-larut

dalam kaitan denga usaha penyelesaian konflik di Maluku Utara. Berdasarkan hasil pengamatan (penciuman lapangan) menunjukkan bahwa ketidak-seriusan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini sesuai dengan penegasan dari beberapa sumber bahwa, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam 2 (dua) tahun terakhir (2004-2005) hanya disibukkan dengan urusan Pilkada (politik) serta menghadapi suksesi gubernur (2007), sehingga membiarkan masalah pengungsi ini makin terlantas. Karena itu, Pemerintah Pusat seharusnya memberikan ketegasan dan tidak hanya menerima laporan tertulis tetapi perlu melihat fakta di lapangan. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut tidak tertutup kemungkinan kondisi yang kondusif, bisa memicu konflik baru terutama menjelang suksesi gubernur 2007.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun sesungguhnya kondisi tersebut tidak terjadi dengan sendirinya tanpa harus melakukan berbagai upaya untuk mencapai suatu kemajuan. Terjadinya konflik kekerasan menyebabkan Maluku Utara mengtalami kemunduran yang sangat signifikan dalam bidang pembangunan. Upaya normalisasi kehidupan di Maluku Utara sejauh ini telah mendapat prioritas baik pemerintah pusat maupun berbagai *stakeholders* lainnya, yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program-program pembangunan.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 menyebutkan bahwa, pentingnya penyelesaian konflik dan hal ini lebih ditekankan lagi dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 mengenai penyelesaian konflik yang terjadi di Maluku Utara. Penyebab konflik versi pemerintah sebagaimana tercantum

dalam rencana tindak lanjut pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2002) adalah sentralisme pembangunan dan hubungan pusat dan daerah yang menempatkan daerah sebagai subordinasi kekuasaan sentralistik pemerintah pusat. Peningkatan jumlah penduduk, terbatasnya kesempatan kerja dan masalah pendidikan juga disebut sebagai penyebab lain konflik yang terjadi.

Berbagai kebijakan pemerintah pusat yang berupaya untuk mempercepat normalisasi kehidupan di Maluku Utara, antara lain: GBHN 1999-2004, Tap MPR No. IV/99 telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk segera melakukan penyelesaian konflik yang berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif untuk mempertahankan dan memantapkan integrasi nasional. Dalam Propenas 2000-2004 disebutkan bahwa, penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Maluku dan Maluku Utara dilakukan secara khusus untuk mewujudkan rasa aman, pulihnya suasana, dan kondisi warga yang trauma akibat konflik antar kelompok yang berkepanjangan, serta terlaksananya pengadilan bagi pelanggar hak asasi manusia dan tindak kekerasan.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam melakukan normalisasi kehidupan di Maluku Utara ini terkesan sebagai suatu pendekatan proyek. Program-program yang dirancang lebih menekankan pada aspek fisik dan tidak dibarengi oleh tahapan implementasi yang bersih di lapangan. Secara konseptual pemerintah juga tidak memasukkan unsur pendidikan yang dapat mendukung timbulnya budaya damai

di Maluku Utara dalam program-program pendidikan. Padaha hal ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak-anak maupun kaum muda selama konflik berlangsung.

b. Program Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya tetap menjadi titik perhatian dalam rangka pemulihan kondisi sosial masyarakat pasca konflik terutama bi bidang kesehatan, dan pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa :

1) Di bidang kesehatan, sampai tahun 2005 tenaga kesehatan untuk pelayanan 57 Puskesmas, 18 puskesmas diantaranya masih membutuhkan tenaga dokter dan rata-rata 1 Puskesmas tersedia 4 paramedis. Dari 6 Puskesmas yang mengalami kerusakan total baru 1 Puskesmas yang sudah dibangun. Selain itu, terbatasnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kondisi ini ditandai dengan masih tingginya angka kematian bayi yaitu: (120 bayi dari 10.549); angka kematian ibu (47 Ibu dari 16.369). Status Gizi Balita dengan gizi buruk mencapai (675 balita dari 84.177) dalam tahun 2005.
2) Di Bidang Pendidikan, kondisi tingkat pendidikan yang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal, menunjukan bahwa penduduk berusia 10 tahun keatas yang tidak/belum tamat SD/MI tahun 2002 sebesar 4,42% dan tamat SD/MI 43,75%, tamat SLTP sebesar 23,40%, tamat SMU/SMK sebesar 22,12% dan yang tamat Diploma sampai dengan Universitas sebesar 4,42%. APK SD/MI pada tahun 2004-2005 sebesar 109,82 %, dan APM sebesar 96,59 %. APK SMP/MTs pada tahun 2004-2005 88,10 % sedangkan APM sebesar 81.01 %.

APK SMA/MA pada tahun 2004-2005 sebesar 59.85 % sedangkan APM 56.86 %. Rasio siswa per kelas menurut jenjang pendidikan SD adalah 1 : 24, MI 1 : 25, SMP 1 : 24, MTs 1 : 33, SMA 1 : 42 dan MA 1 : 31 serta SMK 1 : 35.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, fisik, dan kelembagaan. Karena itu, penanggulangannya tidak saja mencakup warga miskin tetapi juga lingkungannya baik lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik. Jumlah penduduk miskin terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2003 jumlah penduduk miskin: 110.100 orang, tahun 2004: 110.100 orang, dan tahun 2005: 118.800 orang – dari jumlah penduduk Maluku Utara: 849.346 jiwa tahun 2003 dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,16%, yang tersebar di 8 kabupaten/kota yang tergolong penduduk miskin sebesar 49,5% atau sebanyak 420.681 jiwa.

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Prosentase Penduduk Miskin Per-kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk	Rasio PM/TP
		Jumlah (Jiwa)	Prosensus (%)		
1	Halmahera Barat	73.336	17,43	90.173,00	81,33
2	Halmahera Tengah	16.025	3,81	33.089,00	48,43
3	Halmahera Utara	119.609	28,43	165.326,00	72,35
4	Halmahera Selatan	91.279	21,70	167.041,00	54,64
5	Halmahera Timur	22.068	5,25	52.919,00	41,70
6	Kepulauan Sula	58.719	13,96	114.817,00	51,14
7	Ternate	28.821	6,85	147.015,00	19,60
8	Tidore Kepulauan	10.824	2,57	78.966,00	13,71
	Jumlah Provinsi :	420.681	100	849.346	49,5

Sumber: Bappeda Provinsi Maluku Utara, Tahun 2005

Tabel di atas menggambarkan bahwa, jumlah penduduk miskin sebanyak 420.681 jiwa, angka tertinggi di Kabupaten Halmahera Utara; 119.609 jiwa (28,43%),

diikuti Kabupaten Halmahera Selatan; 91.279 jiwa (21,70%), Kabupaten Halmahera Barat; 73.336 jiwa (17,43%), Kabupaten Kepulauan Sula; 58.719 jiwa (13,96%). Jumlah penduduk miskin di 4 (empat) daerah lainnya, yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, rata-rata dibawah 7%. Selain itu, dilihat dari rasio penduduk miskin dan total jumlah penduduk kabupaten/kota, maka sebagian besar dari Halmahera Barat (81,33%) yaiitu penduduk miskin, diikuti Halmhera Utara (72,35%), Halmhera Selatan (54,64%), Kepulauan Sula (51,14%), Halteng (48,43%), dan Haltim (41,70%), sedangkan Kota Ternate dan Tidore Kepulauan masing-masing (19,60%) dan (13,71%).

c. Program Pembangunan Politik

Berdasarkan laporan Direktorat Sosial Politik Pemerintah Provinsi Maluku Utara (2000), menyebutkan bahwa penyebab konflik di Maluku Utara adalah faktor PP No. 42/99 mengenai pemekaran wilayah, dampak dari kerusuhan Ambon serta adanya selebaran bernuansa SARA. Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi proses simplifikasi terhadap penyebab konflik di Maluku Utara sehingga tidak heran bila penanganan (proses penyelesaian) konflik tidak serius dan lebih berorientasi pada pendekatan ‘proyek.’ Meskipun langkah-langkah kearah itu sudah dilakukan, tetapi disadari kompleksitas permasalahan yang muncul kepermukaan sebagai alasan atau faktor yang menghambat penyelesaian konflik, antara lain:

1) Faktor geografis, menjadikan perkembangan pembangunan antar wilayah sering menjadi kendala dalam upaya percepatan pembangunan di semua sektor, sehinnga

pertumbuhan antar wilayah yang satu dengan yang lain menjadi tidak seimbang. Hal ini lebih disebabkan oleh perbedaan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, akses taransportasi antar wilayah, dan ketersedian infrastruktur.

2) Distribusi sumber daya pembangunan yang tidak seimbang mendorong timbulnya disparitas sosial, disparitas pendapatan antar penduduk, di samping kebijakan pembangunan yang lebih bersifat sektoral yang mengabaikan pendekatan program dan wilayah, sehingga pelaksanaan program pembangunan lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang mengakibatkan dampak ganda dan manfaat pembangunan belum secara menyeluruh dirasakan oleh masyarakat.
3) Masih lemahnya manajemen pengelolaan pembangunan, data dan informasi, serta belum memanfaatkan keunggulqn potensi wilayah, lemahnya koordinasi antar instansi, maupun antar daerah, disamping perumusan program pembangunan yang kurang mempertimbangkan daya inovasi, sehingga alokasi dana pembangunan mengharapkan bantuan pemerintah pusat ketimbang melakukan terobosan dalam pengelolaan potensi daya, seperti mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
4) Masih belum terintegrasinya program pembangunan di masing-masing tingkat pemerintahan (kabupaten/kota), sehingga penanganan dampak konflik belum dilakukan secara stimultan mengakibatkan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh masing-masing tingkat pemerintahan kurang mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas dan kebutuhan yang harus ditangani, misalnya prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan dan pemukiman penduduk.

5) Pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan ditandai oleh adanya kendala dan masalah yang sangat mendasar dan membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap pembangunan ketenagakerjaan di daerah. Kendala dan masalah yang tersebut adalah ketidak-seimbangan antara pertumbuhan dan pertambahan angkatan kerja di satu pihak, dan kesempatan kerja di lain pihak yang menimbulkan tingkat pengangguran baik secara terbuka maupun secara terselubung.
6) Struktur perekonomian masyarakat yang masih lemah yang ditandai dengan tingkat produktifitas rendah.
7) Belum memadainya infrastruktur dasar baik di bidang pemerintahan, lingkungan pemukiman, jalan dan jembatan, prasarana pendukung lainnya.
8) Belum teridentifikasinya potensi daerah secara terpadu baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan maupun sumberdaya ekonomi.
9) Lemahnya data base yang mendorong akses data secara akurat melalui sistim on line/website dengan pihak luar yang ingin menanamkan modalnya di daerah.
10) Masih rendahnya arus investasi luar, serta kurangnya investasi lokal.

Upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi guna mempercepat proses integrasi sosial dan politik, terutama dalam hubungan dengan pelayanan masyarakat dengan keterlibatan semua komponen, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, upayah kearah itu hanya dapat dilakukan melalui kerja sama lintas pelaku yang diarahkan bagi pencapaian tujuan pemerintah. Sehubungan dengan itu, beberapa kendala yang perlu diantisipasi adalah: 1) Masih belum adanya kesepahaman dalam

menjalankan peran dan fungsi dari masing-masing komponen pelayanan terhadap, sehingga sering dijumpai program yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pelayanan tidak mencapai sasaran dengan baik, terutama kegiatan di bidang publik, misalnya program pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan jasa; 2) Pergeseran paradigma birokrasi tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, sehingga peran dan fungsi birokrasi kurang dipahami dan dihayati yang mengakibatkan pratek birokrasi masih menonjolkan arogansi yang terkesan dilayani dan bukan melayani, disamping motivasinya lebih mengutamakan manfaat personal ketimbang pelayanan publik; 3) Pelayanan Publuk lebih terkesan semata-mata tugas pemerintah, sehingga peran *stakeholders* kurang memperoleh akses mengakibatkan fungsi control tidak berjalan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, serta saluran-saluran dialogis masih kurang ditumbuhkembangkan yang pada gilirannya dinamika demokratisasi menjadi kurang berkembang dan menimbulkan miskomunikasi sosial diantara kelompok masyarakat.

Di bidang politik, secara umum dapat dikatakan proses demokratisasi telah berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pemilihan umum mulai dari pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden putaran I dan II telah berjalan sesuai aspirasi dan kehendak rakyat. Hal ini berarti proses perubahan di bidang politik dalam kaitan dengan pertumbuhan demokrasi telah berjalan, meskipun masih ada ekses-ekses sebagai ciri masyarakat plural. Pada tingkat komunitas, aspirasi politik melalui organisasi politik kelemahan masih bertumpu pada sumberdaya manusia dan fasilitas bagi pendidikan politik dan pencerahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Namun demikian, tahun 2005 kesadaran politik masyarakat terkait dengan Pilkada secara langsung pada 7 (tujuh) kabupaten/kota (27 Juni 2005) telah berjalan lancar dan aman, meskipun pihak yang kalah tetap ada sikap ketidakpuasan. Namun, hal itu tidak menimbulkan kerawanan politik (konflik) seperti yang dikhawatikan banyak pihak (terutama elite politik yang terlibat dalam pilkada).

Proses penyelesaian konflik di Maluku Utara, terutama penanganan semua permasalahan akibat konflik, tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat lokal, tetapi harus melibatkan berbagai komponen (termasuk pihak-pihak yang terlibat), pemerintah daerah dan dunia usaha, terutama dukungan pemerintah pusat secara konsisten melalui dana dekonsentrasi maupun Inpres Nomor: 6 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik, agar dapat terselesaikan tanpa hambatan yang berarti.

Menurut Sekretaris Provinsi Maluku Utara, menjelaskan bahwa strategi dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam upaya mempercepat proses integrasi sosial dan politik, adalah selain program-program yang telah disebutkan juga program yang bertujuan mewujudkan rasa aman dan memulihkan kembali suasana dan kondisi masyarakat yang trauma sebagai dampak konflik sosial antar kelompok masyarakat. Sasarannya adalah terwujudnya rasa aman, pulihnya suasana dan kondisi masyarakat yang terganggu akibat konflik. Dalam tahun 2002-2005 diarahkan pada pembangunan prasarana darurat dan rumah penduduk korban kerusuhan.

> "*Pembangunan politik diarahkan terhadap upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik rakyat guna membudayakan kehidupan demokrasi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya*

pembangunan, menciptakan kehidupan politik yang dinamis dan mampu mengakomodasi setiap perubahan kepentingan serta aspirasi rakyat dan perkembangan dinamika lingkungan regional dan nasional." (*MA/52 th*).

Upaya dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam mempercepat proses integrasi sosial dan politik adalah: (1) Mengembangkan iklim budaya dan etika politik yang demokratis melalui prinsip-prinsip persamaan, dialogis, kebebasan dan keterbukaan yang berbasis pada konstitusi dan kemasyarakatan; (2) Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif, kemandirian partai-partai politik serta mewujudkan pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); (3) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, melalui peningkatan keikutsertaan rakyat dalam proses penentuan keputusan dan kebijakan daerah; (4) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif, sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya; (5) Mendukung pelaksanaan/ penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat; dan (6) Meningkatkan peran serta pengawasan fungsional, legislatif dan masyarakat guna mendapatkan sinergi pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien.

Kesenjangan antar sektor, antar wilayah, antar kota dan desa serta dampak krisis ekonomi dan kondisi sosial pasca konflik, perlu disikapi dengan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta percepatan pengembangan wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana yang memadai. Namun selama ini upaya pembangunan prasarana dan sarana yang diupayakan belum membawa hasil yang optimal, disebabkan karena adanya keterbatasan dana dan luasnya wilayah yang harus

dijangkau. Karena itu, untuk mempercepat proses integrasi sosial dan politik melalui pengembangan wilayah diperlukan perhatian dan penanganan baik pemerintah daerah maupun dari seluruh potensi masyarakat.

Sehubungan dengan upaya mendukung peningkatan kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar dalam kondisi miskin diperlukan upaya pemberdayaan dan pemihakan pada masyarakat terutama dalam menghadapi berbagai masalah struktural yang sulit dipecahkan oleh mayarakat sendiri. Pemberdayaan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik terkait dengan pemberian kesempatan bagi elemen masyarakat, kelembagaan dan organisasi masyarakat dalam memperoleh serta memanfaatkan haknya bagi peningkatan kehidupan. Hal ini penting dalam upaya mengatasi ketidakmampuan masyarakat karena adanya keterbatasan, kurang atau tidak adanya kesempatan, kemampuan dan keterampilan serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta perbedaan yang muncul akibat keragaman suku, agama, budaya dan adat istiadat perlu dipecahkan secara serius dan bertahap dengan melibatkan masyarakat secara langsung yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat seperti lembaga-lembaga adat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.

2. Proses Integrasi Sosial dan Politik

Upaya menciptakan integrasi sosial dan politik pasca konflik di Maluku Utara, tidak dapat dipisahkan dengan proses awal pertarungan antar elite dalam

perebutan jabatan (kursi) gubernur pertama (1999-2002). Sehubungan dengan itu, perlu dijelaskan bahwa dalam struktur masyarakat majemuk, memiliki karakteristik yang berbeda-beda sebagai sifat dasar bagi masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya masyarakat Maluku Utara yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan telah terintegrasi atas dasar konsensus nilai-nilai dan institusi sosial yang tetap dijaga dan dihormati bersama. Nilai-nilai dan Institusi sosial yang tetap fungsional tersebut adalah Keluarga dan Pendidikan. Dalam konteks ini, proses integrasi sosial dan politik sebagai akibat yang ditimbulkan konflik, tidak bisa dipisahkan dari pertarungan mengenai siapa yang jadi gubernur pertama yang berlarut-larut (1999-2002).

Karakteristik dan sifat dasar masyarakat Maluku Utara yang majemuk memiliki nilai-nilai dan tradisi budaya yang berbeda antara satu suku, agama, dan ras yang lain. Namun terhadap nilai-nilai dan institusi keluarga dan pendidikan tetap melaksanakan fungsinya dalam menciptakan integrasi masyarakat, dengan tetap menghormati perbedaan karakteristik nilai dan sifat dasar masing-masing. Institusi keluarga sebagai sistem sosial yang dapat mengintegrasikan masyarakat melalui konsensus nilai-nilai yang bersifat fundamental. Sesuai dengan fungsi-fungsinya, institusi keluarga sangat memungkinkan masyarakat terintegrasi karena anggota kelompok dari suatu masyarakat dapat menjadi anggota kelompok masyarakat lain. Karena itu, konflik sosial antar kelompok masyarakat dapat segera ditangani melalui institusi keluarga yang tetap fungsional. Sebagai contoh, Keluarga *Dudy Kadato* (Camat Kao 1975), yang menjadi inspirator masuknya penduduk suku Makian di

Malifut, melalui program Transmigrasi Lokal tahun 1975. Dudy Kadato memiliki keluarga dari kedua belak pihak (Islam dan Kristen), adalah penduduk asli Kao juga sebagai tokoh masyarakat yang cukup disegani dan dikenal dalam masyarakat luas. Ketika terjadi konflik di Malifut yang melibatkan masyarakat dari kedua kelompok, Keluarga Dudy Kadato tetap menempatkan fungsinya sebagai pihak yang netral dan melihat persoalan secara proporsional. Hal karena adanya perkawinan antara kedua kelompok, sehingga sekalipun terjadi konflik institusi keluarga tetap fungsional.

Demikian pula institusi pendidikan, walaupun masyarakat Maluku Utara dilanda konflik yang berkepanjangan namun institusi pendidikan tetap fungsional dalam rangka menciptakan integrasi masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan maupun analisa fakta di lapangan menunjukkan bahwa, institusi pendidikan selain melaksanakan fungsi-fungsi yang telah ditentukan terutama pendidikan formal, juga berfungsi untuk mempertahankan sistem stratifikasi yang ada dalam masyarakat melalui "*proses sosialisasi*" anak untuk menerima nilai-nilai dan sistem perbedaan, prestise dan status sosial kelompok lain.

Menyadari bahwa konflik sosial bernuansa 'SARA' di Maluku Utara yang berlangsung kurang lebih dua tahun, dan telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan harta benda. Dalam hubungan ini, upaya penyelesaian dalam rangka integrasi sosial dan politik harus didasarkan pada nilai-nilai dan institusi sosial yang disfungsional dan menimbulkan konflik. Dengan kata lain, nilai-nilai dan institusi sosial yang dulu berfungsi dan menciptakan integrasi, tetapi dalam perkembangannya mengalami

perubahan yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial dan disintegrasi masyarakat. Nilai-nilai dan institusi sosial yang dimaksud, antara lain:

a. Institusi Ekonomi.

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang kaya akan potensi ekonomi (sumber daya alam) yang cukup melimpah, seperti keanekaragaman hayati hutan dan pertanian, hayati laut dan pertambangan. Namun usaha pemberdayaan potensi sumber daya alam yang melimpah ini belum maksimal, sehingga kondisi ekonomi di daerah ini masih tergolong di bawah standar. Dengan kata lain, pelaksanaan nilai-nilai dan institusi ekonomi terutama ditinjau dari pembagian kerja serta distribusi barang dan jasa masih dihadapkan berbagai hambatan. Salah satu persoalan mendasar institusi ekonomi, adalah berkembangnya "*disparitas*" antar daerah, antar kota dan desa, serta antar kelompok masyarakat. Ketiga ciri disparitas itu pada gilirannya menimbulkan konflik, diindikasikan adanya dominasi kelompok minoritas kaya dan marginalisasi mayoritas masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Bentuk-bentuk dominasi yang timbul, seperti dominasi sumber daya alam, modal teknologi, informasi dan pasar. Akibatnya betapapun tingginya pendapatan asli daerah tidak dapat memberikan dampak perbaikan ekonomi rakyat, pemerataan pendapatan, dan pembagian kerja. Contoh: Perusahaan Tambang di wilayah Malifut, yang merupakan Perusahaan Asing (Australia). Kehadiran Perusahaan Tambang ini di satu sisi dapat meningkatkan PAD dan peningkatan taraf hidup masyarakat, namun di si lain menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan penduduk pendatang dan

penduduk asli, terutama penduduk asli (etnis Kao) yang tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sementara penduduk pendatang (etnis Makian) yang rata-rata memiliki keterampilan dengan tingkat pendidikan yang memadai dapat bekerja dan diterima di Perusahaan Tambang tersebut.

Pelaksanaan nilai-nilai dan institusi ekonomi dalam masyarakat Maluku Utara tidak terlepas dari kualitas SDM sebagai modal dasar. Secara historis dan kultur masyarakat Maluku Utara telah memiliki pengalaman berinteraksi dan berakulturasi dengan peradaban modern dalam rentang waktu yang panjang. Proses yang panjang ini selain melahirkan sikap terbuka dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan, juga telah tertanam dasar-dasar inovasi dan etos kerja yang relatif baik. Namun, realitas menunjukkan bahwa SDM di Maluku Utara memiliki sejumlah kelemahan mendasar, antara lain: tingkat penyebaran penduduk tidak merata, tingkat kelahiran relatif tinggi, kualitas penduduk relatif rendah, taraf hidup sebagian besar warga di bawah garis kemiskinan, serta ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat dengan pertumbuhan kesempatan kerja atau penyediaan lapangan kerja baru bagi penduduk yang siap memasuki pasar kerja.

b. Institusi Politik.

Pelaksanaan nilai-nilai dan institusi politik memiliki aspek yang sangat kompleks, karena mencakup hampir semua nilai dan pranata sosial dalam masyarakat Maluku Utara. Institusi ini yang banyak disoroti dalam pembahasan ini, di mana hasil pengamatan dan analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai dan institusi

politik terutama menyangkut kebijakan pemerintah yang sifatnya informal, tetapi berdampak terhadap timbulnya konflik yang berkepanjangan. Di samping itu, tindakan para elit politik khususnya pimpinan parpol baik di tingkat pusat maupun lokal yang melakukan kebijakan-kebijakan internal partai yang sering menghambat upaya penyelesaian konflik itu sendiri. Pelaksanaan nilai-nilai dan institusi politik yang disfungsional dan mendorong timbulnya konflik sosial atau disintegrasi masyarakat di Maluku Utara, yang akan dijelaskan terutama yang berkaitan dengan agenda politik pemerintahan yang mendesak untuk segera diselesaikan setelah tercipta suasana yang kondusif.

Kebijakan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi institusi politik sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam rangka pelaksanaan proses demokrasi dan pendidik politik terhadap masyarakat, ada dua agenda politik yang mendesak untuk segera dilaksanakan pasca konflik di Provinsi Maluku Utara (setelah kondisi kondusif), adalah pembentukan DPRD dan pemilihan Gubernur yang definitif. Setelah ditetapkan status “Keadaan Darurat Sipil” bagi Provinsi Maluku Utara, keadaan mulai berangsur-angsur membaik (Kondusif), berbagai aktivitas masyarakat (pendidikan, perekonomian, sosial kemasyarakatan) mulai normal dan berlangsung dengan baik, sementara itu pengembalian pengungsi khususnya di Kota Ternate dilakukan secara bertahap (hingga sekarang). Agenda politik yang pertama adalah “*Pembentukan DPRD Provinsi Maluku Utara*”, pada kenyataannya banyak kebijakan PDS yang disfungsional, antara lain: menunda pembentukan DPRD yang

seharusnya paling lambat Desember 2000, kenyataannya Januari 2001 baru dilantik Direktorat Sospol Provinsi Maluku Utara, Juni 2001.

Proses pembentukan DPRD Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan yang berlaku, sejumlah Parpol telah terdaftar yaitu sebanyak 30 Partai Politik. Menghadapi kedua agenda politik tersebut, proses pembentukan DPRD eskalasi politik semakin tinggi, karena terdapat perbedaan pendapat antar elite Partai Politik mengenai proses pengisian keanggotaan DPRD, karena elite politik yang menginginkan agar pengisian keanggotaan DPRD dilakukan melalui Pemilu Lokal, atau berdasarkan pembagian kursi masing-masing partai politik peserta Pemilu 1999 serta menolak pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara sesuai hasil Pemilu tahun 1999. Agenda kedua adalah "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif." Agenda ini juga banyak kebijakan PDS yang disfungsional selama proses suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagi agenda politik yang dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat. Suksesi Gubernur yang juga merupakan salah satu tugas pokok Pj. Gubernur (PDS), ternyata banyak kebijakan dan tindakan yang dilakukan aparat birokrat maupun aparat keamanan, terutama PDS di luar kewajaran dan tata cara demokrasi.

Kebijakan dan tindakan aparat birokrat (elite formal) dan keamanan (PDS) yang *disfungsional* dimaksud adalah, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil *fungsional* bagi kelompok tertentu atau kandidat yang didukung oleh Pj. Gubernur, tetapi *tidak fungsional* bagi kelompok lain bahkan merugikan. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa tindakan PDS yang disfungsional dan melanggar kode etik atau kelayakan demokrasi pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi

Maluku Utara dalam Sidang Paripurna DPRD, tanggal 5 Juli dan 11 Juli 2001. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara salah satu elite formal, menjelaskan bahwa :

> "*Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 Juli 2001 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, PDS (AME) yang sudah purnawirawan (pensiunan TNI) mengenakan seragam militer lengkap, dengan atribut tongkat komando serta pistol di pinggang duduk di meja Pimpinan Dewan diapit oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, suatu tindakan di luar kelaziman dan tata cara Protokoler Dewan. Kehadiran PDS dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara adalah kapasitasnya sebagai Pj. Gubernur dan disiapkan tempat khusus untuk para undangan termasuk Pj. Gubernur*." (*MB/52 th*).

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kehadiran Pj. Gubernur yang juga PDS dalam sidang Paripurna DPRD ini, dapat menyalahi prosedur persidangan Dewan, karena tidak duduk di tempat yang telah disiapkan bersama para undangan lain melainkan duduk berdampingan dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, bahkan bersikap sebagai Pimpinan Dewan dan ikut meneliti kertas suara yang diserahkan Ketua DPRD kepada setiap anggota Dewan yang akan menggunakan hak pilihnya. Pada waktu sela antara tahap I dan II pemilihan (skorsing sidang), Pj. Gubernur (AME) melakukan lobby kepada F.PDIP untuk memilih pasangan Thaib Armaiyn dan Yamin Waisale (calon yang didukung).

Ketika berlangsung Sidang Paripurna DPRD 5 Juli 2001 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, suasana dalam Gedung sangat tertib dan aman sehingga proses pemilihan berjalan lancar dan demokratis. Sedang suasana di luar Gedung DPRD memanas antara kelompok pendukung pasangan Thaib Armaiyn dan Yamin Waisale dengan pendukung pasangan Abdul Gafur dan Yamin Tawari, namun kesigapan aparat utamanya kepolisian sehingga mengindari

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah pemilihan dan terpilih pasangan dr. Abdul Gafur dan Drs. Yamin Tawari sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, semua anggota Dewan dan para kandidat saling bersalaman dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (suatu sikap yang sportif ditampilkan sebagai pertanda suksesnya proses pemilihan yang demokratis). Namun, di luar dugaan semua anggota DPRD bersama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diperintahkan PDS untuk berkumpul di lapangan kecil sekitar Gedung DPRD, untuk diterbangkan ke Bandara Babullah, kemudian ke Pangkalan TNI-AL Ternate.

Evakuasi anggota DPRD bersama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih merupakan tindakan yang berlebihan dari PDS untuk menciptakan opini bahwa, akan terjadi kerusuhan. Pada kenyataannya suasana sebelum dan sesudah pemilihan tidak terjadi kerusuhan seperti yang diperkirakan. Kebijakan PDS yang disfungsional lain adalah, setelah hasil pemilihan diumumkan, semua jalur komunikasi dan informasi khususnya Facsimile ke Jakarta diblokir, kecuali facsimile milik Gubernur terpilih untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Hal ini sebagai tindakan diskriminatif karena pada saat yang sama, media massa elektronik dan cetak di Jakarta memuat berita yang mendiskreditkan Gubernur terpelih oleh kelompok yang didukung PDS.

Sidang Paripurna DPRD Paropinsi Maluku Utara tanggal 11 Juli 2001 untuk membahas bukti pengaduan masyarakat, juga terjadi konspirasi antara PDS, Ketua DPRD dan Sekda Provinsi Maluku Utara untuk membatalkan pemilihan Gubernur dan Gubernur tanggal 5 Juli 2001 yang berlangsung sangat demokratis dan syah sesuai ketentuan yang berlaku. Konspirasi ini antara lain : Membangun opini melalui

media lokal (RRI Ternate dan Tabloit) bahwa Provinsi Maluku Utara khususnya Kota Ternate pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terjadi chaos, kenyataannya sampai saat ini kondisi Maluku Utara cukup aman dan kondusif. Memaksa anggota DPRD untuk menanda tangani pernyataan suap (many politik) dari Gubernur terpilih. Melalui ormas dan lembaga seperti LSM, OKP, ICMI, MUI dan Ichwanul Muslim yang pengurusnya satu etnis dengan Sekwilda (kandidat yang didukung Pj. Gubernur) untuk menyampaikan surat tentang penolakan terhadap hasil Sidang Paripurna DPRD tanggal 5 Juli 2001 yang mengatasnamakan rakyat Maluku Utara.

c. Institusi Agama.

Institusi dan nilai-nilai di bidang agama kaitannya dengan konflik antar elite di Maluku Utara banyak mendapat sorotan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pelaksanaan institusi nilai-nilai agama (lembaga agama) banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu (elite birokrasi dan politik) untuk mencapai tujuan politiknya. Hal ini bila ditelusuri lebih dalam, bahwa masyarakat Maluku Utara yang telah mengalami proses panjang interaksi antar agama serta terjalin hubungan yang harmonis dalam mewujudkan integrasi kini telah luntur dan mengalami perubahan yang menimbulkan disintegrasi.

Pengalaman religius dan akulturasi nilai-nilai budaya yang dihormati bersama berlangsung terus menerus, serta mengalami proses pendewasaan dari waktu ke waktu sehingga masyarakat Maluku Utara terkenal sangat toleran dan familier. Namun perkembangan terakhir seiring dengan desakan reformasi di berbagai bidang

yang cenderung disfungsional serta keluar dari kolidor nilai-nilai moral dan etika keagamaan, menyebabkan harmonisasi dan toleransi anat ummat beragama luntur dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Akibat atau dampak yang lebih luas dari disfungsionalnya nilai-nilai dan institusi di bidang agama, adalah memudarnya fungsi dan peran lembaga-lembaga agama (Islam-Kristen) dalam merespon serta menyikapi pengaruh-pengaruh dari luar yang ingin mengadu domba antar ummat beragama, sebagaimana terjadi di Halmahera Utara umumnya dan Kecamatan Malifut-Kao khususnya.

Penjelasan di atas terutama dalam kaitan dengan nilai-nilai dan institusi sosial kemasyarakatan yang disfungsional, serta mendorong timbulnya disintegrasi atau konflik antar elite di Maluku Utara. Dalam hal ini, analisis fungsional struktural menjelaskan bahwa terjadinya konflik sosial karena tidak berfungsinya nilai-nilai dan institusi dalam masyarakat. Karena itu, upaya untuk mengintegrasikan masyarakat harus menelusuri kembali latar belakang terintegrasinya masyarakat oleh nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas nilai-nilai dan institusi tersebut dalam mengintegrasikan masyarakat. Dalam hubungan dengan ketiga institusi yang disfungsional di atas, satu sama lain saling terkait dalam proses pencapaian tujuan. Hal ini bila ditinjau dari proses hubungan-hubungan sosial dengan kemungkinan proses integrasi setelah terjadi konflik yang berkepanjangan. Proses disfungsional nilai-nilai dan institusi dalam sistem sosial yang mendorong konflik sosial yang lebih luas, karena adanya perbedaan tujuan dan harapan masing-masing kelompok. Namun sebagai suatu sistem sosial yang pernah terintegrasi atas

konsunsus nilai-nilai umum tertentu, tetap ada kemungkinan untuk melakukan hubungan antar fungsi atau unit sosial dalam mengintegrasikan masyarakat, di samping ada perbedaan yang menimbulkan konflik.

Integrasi masyarakat Maluku Utara pasca konflik ditinjau dari perspektif perubahan sosial, masyarakat hanya dapat berintegrasi dengan tetap menghormati nilai-nilai dan institusi kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Oleh karena masyarakat Maluku Utara bersifat majemuk dan terjadinya integrasi sosial selama ini berlaku di dalam derrajat yang terbatas, sehingga terjadi "*segmnentasi*" dalam bentuk kesatuan-kesatuan sosial yang terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan "*primordial*" dengan sub-sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Dalam kondisi yang demikian, maka dengan mudah timbul konflik-konflik di antara kesatuan-kesatuan sosial itu. Menyimak latar belakang atau sebab utama timbulnya konflik antar elite di Maluku Utara, ada dua tingkatan konflik yang terjadi yaitu: konflik di dalam tingkat yang bersifat "ideologis" dan konflik di dalam tingkat yang bersaifat "politis."

Di tingkat yang bersifat ideologis, konflik itu terjadi dalam bentuk konflik "*sistem nilai*" yang dianut serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial (kelompok masyarakat Islam sebagai kesatuan sosial di satu pihak, dan kelompok masyarakat Kristen sebagai kesatuan sosial di lain pihak). Pada tingkat yang bersifat politis, konflik itu terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status, kekuasaan, dan sumber daya ekonomi yang terbatas dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, sadar atau tidak pihak-pihak yang berselisih akan berusaha dengan berbagai cara memperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya, membentuk

lembaga kemasyarakatan untuk mempertahankan hidup bersama, bersaing di dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Mencermati hal ini, secara teoritis dapat dijelaskan bahwa penyimpangan mungkin mempunyai akibat-akibat yang positif (*fungsional*) bagi suatu masyarakat. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa, semua fakta sosial cenderung untuk memberikan kontribusi-kontribusi ternteu pada keadaan harmonis dari masyarakat. Perilaku menyimpang, kalau terjadi dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal. Karena itu, tidak mungkin menghapuskannya secara tuntas (Durkheim, 1984). Dengan demikian, penyimpangan dapat mempunyai akibat positif, misalnya, terjadi kejelasan pada norma-norma sosial. Adanya kejahatan menandakan terjadinya keluwesan pada perasaan-perasaan kolektif dalam masyarakat. Artinya, perbbedaan pendapat mengenai masalah-masalah tertentu dalam masyarakat. Pennyimpangan dapat mengarah pada kristalisasi dari perasaan-perasaan dan dapat membantu untuk menentukan ke arah mana moralitas publik akan berubah. Penyimpangan juga dapat menyebabkan warga masyarakat lebih sadar mengenai nilai bersama, sehingga memberikan kontribusi pada solidaritas sosial.

Senada dengan itu, Coser (1964) lebih lanjut menjelaskan bahwa ungkapan permusuhan dalam konflik membantu fungsi-fungsi positif, sepanjang konflik itu dapat mempertahankan perpecahan kelompok dengan cara menarik orang-orang yang ssedang konflik. Dengan demikian, konflik dapat dipahami sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menjaga kelompok dalam mengatur sistem-sistem hubungan. Hal yang sama juga dikemukakan Merton (1968), yang mengidentifikasikan kelompok-

kelompok tertentu yang memerlukan jasa mesin politik. Misalnya, golongan yang tertekan, atau golongan bisnis, sebagai imbalan dari jasa yang diberikan, maka mesin politik tersebut menuntut kesetiaan pada partai, suara pada pemilihan umum, dan lain sebagainya. Proses ini berjalan terus sehingga penyimpangan sebenarnya merupakan hasil dari ketidakmantapan struktur sosial yang kontraversial. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penyimpangan dapat bersifat fungsional dan dikembangkan oleh suatu masyarakat ataupun komunitas setempat.

Mengutip pandangan Merton bahwa upaya penyelesaian konflik dengan pendekatan fungsionalisme, banyak mengandung kebenaran. Hasil pengamatan dan analisis mendalam ditemukan bahwa, masyarakat Maluku sejak penjajahan, melalui kekuatan militer dan politik menguasai seluruh pranata sosial dalam upaya mewujudkan integrasi masyarakat. Kondisi dan tradisi serupa tetap berlaku setelah kemerdekaan, terutama selama pemerintahan Orde Baru di mana kekuatan militer yang mendukung organisasi politik yang berkuasa, sebagai '*Single Mayority'* yang memaksakan nilai-nilai tertentu, berfungsi menegakkan stabilitas dan menciptakan integrasi. Namun integrasi yang tercipta berada pada derajat yang terbatas, sehingga sering muncul konflik antara kelompok masyarakat dan diselesaikan oleh kekuatan militer maupun partai politik yang berkuasa.

Kelemahan-kelemahan dalam mekanisme pengendalian konflik selama rezim Orde Baru telah mengundang hadirnya kesatuan sosial yang dominan untuk memaksakan kekuasaannya dalam menjamin agar sistem sosial tetap berfungsi. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan memiliki kelemahan, karena

pemaksaan tersebut akan tetap berada di dalam batas konsensus masyarakat mengenai nilai-nilai umum tertentu yang bersifat fundamenatal. Karena itu, hubungan-hubungan yang tercipta atas pemaksaan dan tekanan akan melahirkan terjadinya perpecahan bahkan menghancurkan semua pranata sosial yang ada, seperti konflik yang berkepanjangan dan puncaknya tahun 1999-2001.

Pendekatan fungsionalisme Merton dalam mengkaji fenomena konflik dan perubahan sosial di Maluku Utara, banyak mengandung kebenaran karena terjadinya integrasi sosial dan politik atas berfungsinya nilai-nilai umum tertentu hanya berlaku pada derajat yang terbatas. Hal mana konsensus yang dilahirkan hanya merupakan prasyarat sebagai tumbuhnya integrasi. Memang disadari bahwa dalam masyarakat majemuk tidak pernah terjadi integrasi total yang berlangsung lama. Karena itu, integrasi sosial dan politik di Maluku Utara setelah mengalami konflik hanya terjadi apabila: “sebagian besar masyarakat membuat konsensus tentang batas-batas wilayah kecamatan sebagai suatu kehidupan politik dan pemerintahan bersama tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras.”

Proses integrasi yang digalakkan pemerintah bersama semua komponen masyarakat di Maluku Utara, akan berkembang mencapai tujuan yang diinginkan apabila mengambil pengalaman masa lalu sebagai pelajaran yang berharga dengan tidak memaksakan nilai-nilai atau sistem sosial tertentu berfungsi, tetapi nilai-nilai dan sistem sosial itu bisa saja berfungsi bagi suatu kelompok dan disfungsional bagi kelompok lain. Atas dasar inilah “*alternatif fungsionalisme*” muncul sebagai jawaban dalam menangani fenomena konflik yang terjadi. Pada tingkat nasional, nilai-nilai

umum Pancasila misalnya; telah dihayati oleh semua warga negara, tetapi pada kenyatannya Pancasila hanya sebatas sebagai: (a) pernyataan perasaan anti kolonialisme; (b) pernyataan bersama dari berbagai komponen masyarakat Indonesia untuk mengakui toleransi dan akomodasi timbal balik yang bersumber pada pengakuan akan keanekaraman SARA, kedaerahan dan pelapisan sosial; (c) merupakan perumusan tekad bersama untuk menyelenggarakan kehidupan sebagai bangsa. Pancasila sebagai dasar negara (falsafah hidup bangsa), kemudian dapat dijabarkan ke dalam norma-norma hukum.

Pancasila dengan berbagai peraturan perundangan yang dilahirkan belum sepenuhnya dihayati dan tersosialisasi ke dalam jiwa segenap warga negara, terutama masyarakat lapisan bawah yang sering menjadi korban atas tekanan dan paksaan nilai-nilai dasar tersebut. Dalam kondisi yang demikian, maka masyarakat Maluku Utara mudah tersosialisasi ke dalam kesatuan-kesatuan primordial yang telah hidup berabad-abad. Karena itu, setiap kesatuan primordial tersebut memiliki sistem nilai yang berbeda-beda sehinga cenderung dalam menafsirkan fenomena sosial yang dihadapi berdasarkan sistem nilai yang dianutnya. Sebagaimana halnya penafsiran atas konflik yang terjadi '*bersifat laten'* bagi kelompok masyarakat lapisan bawah, dan '*bersifat manifes'* bagi kelompok elite.

Proses integrasi sosial politik di Maluku Utara pasca konflik, secara garis besar dikemukakan kualitas integrasi dari sudut pandang normatif, koersif dan fungsional. *Pertama*, integrasi normatif, yaitu suatu ikatan sosial yang terjadi karena adanya suatu kesepakatan atau konsensus terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar

(*basic values and norms*). Ditinjau dari segi dimensinya, integrasi ini lebih berdimensi “Integrasi Budaya.” *Kedua*, integrasi fungsional, yaitu suatu ikatan sosial yang didasarkan pada situasi saling ketergantungan fungsional antara satu unsur dengan unsur lainnya. Dari segi demensi, integrasi ini lebih berdimensi “Integrasi Ekonomi.” *Ketiga*, integrasi koersif, yaitu suatu ikatan sosial yang terjadi karena adanya kekuatan yang memaksa. Dilihat dari dimensi, integrasi ini lebih berdimensi “Integrasi Politik.”

Secara teoritis, ketiga bentuk integrsi ini harus ada dan dipertahankan keseimbangannya. Hal ini karena masyarakat Maluku Utara yang majemuk, maka untuk menjaga keseimbangan antara ketiga bentuk integrasi itu merupakan tantangan dan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Bila integrasi normatif terlalu lemah, berkembang *sekretarianisme* dan *primordialisme*, akibatnya selalu diancam konflik laten yang sewaktu-waktu timbul dalam konteks yang tidak rasional dan emosional. Sebaliknya, bila integrasi normatif terlalu kuat, Provinsi Maluku Utara akan dilanda *chauvinisme* dan *ekslusivisme* yang akan menghambat proses pembangunan. Bila integrasi fungsional lemah, maka tidak ada saling ketergantungan antar suku dan satu suku mendominasi atas suku lain, sehingga mengalami kesenjangan antar suku serta antar daerah semakin tajam dan pada gilirannya mengakibatkan eksploitasi ekonomi terhadap kelompok yang lemah. Sebaliknya, bila integrasi fungsional terlalu kuat maka setiap golongan, suku dan daerah bersifat *dependen* (kehilangan kemandirian). Selanjutnya, bila integrasi koersif terlalu lemah maka akan jatuh ke dalam situasi anarkis, dan setiap suku akan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mengindahkan

inilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Akibatnya, masyarakat mengalami *anomi* dan tidak ada kepastian hukum (kekaburan norma). Sebaliknya, bila integrasi koersif telalu kuat akan terjadi pemaksaan suku lainnya untuk terintegrasi dengan cara-cara yang menjurus pada "*otoritarianisme*" atau bahkan "*fasisme.*"

Konflik di satu sisi, potensial (fungsional) bagi masyarakat yang bersifat majemuk, di mana konsensus (integrasi) hanya terjadi dalam derajat yang terbatas sehingga untuk mewujudkan derajat integrasi yang lebih luas dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama, terutama bagi masyarakat Indonesia umumnya dan Maluku Utara khususnya adalah "Integrasi karena paksaan atau tekanan" (*Integrasi semua*). Dalam hal ini, terjadinya integrasi karena ada paksaan atau tekanan dari kelompok atau kesatuan sosial yang dominan atas kelompok atau kesatuan sosial lain. Selain itu, terjadinya integrasi dalam masyarakat majemuk karena saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok atau kesatuan sosial dalam bidang ekonomi. Karena itu, analisis fungsionalisme bahwa faktor yang mengintegrasikan masyarakat adalah kesepakatan atas nilai-nilai umum tertentu, yang mungkin fungsional bagi suatu kelompok tetapi disfungsional terhadap kelompok lain, yang harus dihayati dan disosialisasikan terhadap semua warga masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik, di mana 'penegakan keadilan' pada akhirnya akan membawa hasil *win-win solution.* Inilah yang menjadi prinsip dasar yang harus ditegakkan sekaligus merupakan prinsip pertama dan utama. Kemudian prinsip kedua yang perlu diwujudkan dalam suatu penyelesaian konflik adalah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hanya memfasilitasi usaha menghentikan kerusuhan

dan memulihkan keadaan, terutama dari segi keamanan, pada akhirnya masyarakatlah yang akan menyelesaikan masalah mereka sendiri.

F. Transformasi Konflik Dalam Perubahan Sosial

Transformasi konflik yang dimaksud dalam studi ini, adalah pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan konflik melalui struktur interaksi dan mengubah struktur konflik menjadi struktur damai. Dalam hal ini, struktur konflik ekonomi menyangkut distribusi pendapatan dan pemupukan kekayaan. Struktur politik adalah menyangkut pembagian kekuasaan dan pengaruh. Struktur identitas memiliki dua arti. Pertama, bagaimana persepsi mengenai kelompok hubungan antara kelompok terkait dengan struktur agen yang dikonstruksi secara sosial masyarakat bersangkutan (Maluku Utara), terutama kedua belah pihak yang terlibat konflik. Kedua, adalah berkaitan erat dengan pertanyaan mengenai struktur persepsi, yang menentukan definisi dasar-dasar dan batas-batas bagi argumentasi lisan yang beradab dalam masyarakat: cara berbagai kelompok melihat norma-norma dan menafsirkan realitas perselisihan dan konflik.

Sehubungan dengan itu, pertanyaan mendasar yang dikembangkan dalam studi ini adalah: Bisakah pendekatan transformasi konflik hubungannya dengan perubahan sosial dapat diaplikasikan di daerah-daerah yang berpotensi konflik, dan/atau di daerah-daerah yang masih berkonflik fisik dan ingin menghadapi konflik yang sistemik serta interpersonal, khususnya di Maluku dan Maluku Utara? Untuk

menjawab pertanyaan ini, diperlukan suatu komitmen besar dari berbagai pihak untuk menghilangkan anggapan bahwa konflik adalah sesuatu yang negatif dan membangun komitmen untuk menginstitusionalisasikan konflik dengan cara damai.

1. Pengelolaan (Manajemen) Konflik

Berdasarkan pembahasan terdahulu, terutama landasan teori yang digunakan dalam membahas proses transformasi dampak konflik bernuansa 'SARA,' antara lain: manajemen yang berorientasi pada perilaku yang timbul karena 'manajer' (para elite) meyakini dengan pendekatan klasik (perbedaan suku dan agama) dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Perilaku manusia dalam berbagai situasi sistem sosial mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Konsep manajemen klasik memusatkan perhatian pada sistem sosial, sedangkan konsep manajemen now-klasik lebih memperhatikan perilaku hubungan manusia yang bersifat personal (individual). Dalam hubungan dengan transformasi konflik, bahwa konflik awalnya merupakan suatu penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat (sistem sosial). Dalam hal ini perselisihan di bawah ke bidang politik, dijauhkan dari pertarungan fifik. Dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman manusia, kondisi ini mengalami perubahan. Demikian dapat menjelaskan bahwa, konflik antar elite di Maluku Utara dapat ditransformasikan ke arah perubahan sosial dan pembangunan (dalam arti positif). Dengan kata lain, konflik dalam arti perbedaan tidak harus dihindari karena bersifat alamiah; melainkan harus dikelola dalam menciptakan (inovasi) perubahan.

Hasil analisis dan penciuman lapangan menunjukkan bahwa, keberagaman suku berkaitan dengan potensi konflik yang lebih besar. Situasi yang paling mudah memicu konflik adalah, ketika dua kelompok suku utama bersaing untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini dapat dijelaskan dari sisi rasionalitas pelaku konflik: rasional bagi sebuah kelompok suku untuk menggunakan kekerasan hanya bila kelompok dapat mencapai sesuatu dengan menggunakan kekerasan. Dalam situasi di mana hanya ada dua kelompok yang dominan, mencederai suku yang lain kadang menghasilkan perubahan politik yang diinginkan, dan dominasi bagi suku yang mencetuskan kekerasan. Namun, penggunaan kekerasan secara besar-besaran untuk tujuan politik di Maluku Utara tidak dapat membuahkan hasil 'yang diinginkan,' karena dalam lingkungan multi suku tidak ada satu suku yang cukup kuat untuk melancarkan serangan yang dapat menundukkan suku-suku lainnya.

Analisis konteks konflik yang terjadi di kepulauan Maluku, kelompok-kelompok asli beragama Kristen yang dominan dan sepanjang sejarah memiliki kekuatan ekonomi dan politik bertarung melawan kelompok-kelompok agama/suku yang dianggap mendapat dukungan dari pemerintah pusat (Muslim, transmigran dan 'BBM,' imigran Bugis, Buton, dan Makassar). Masing-masing kelompok memiliki alasan mengapa kelompoknya yang harus mendominasi kehidupan politik: Kelompok Kristen menunjuk pada dominasinya di tingkat lokal, sedangkan kelompok kedua menunjuk pada perannya di tingkat nasional. Di Halmahera, transmigran Muslim yang mendominasi bidang ekonomi (Makian) berhadapan dengan mayoritas asli yang umumnya beragama Kristen. Dalam hal ini, kedua kelompok melihat diri masing-

masing sebagai pemimpin daerah yang sah. Pihak-pihak yang terlibat konflik adalah pelaku kunci, selalu dalam pelarian dan pencegahan konflik; konflik tidak akan dapat dicegah atau dilerai bila pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi potensi konflik atau konflik yang sedang terjadi. Namun, pendegahan konflik dapat didukung dari luar. Ada 3 (tiga) pendekatan pendukung: pengelolaan konflik, penyelesaian konflik, dan transformasi konflik.

Pendekatan pengelolaan konflik (*conflict management*), peluang-peluang untuk mencegah konflik kekerasan ditemukan dalam perilaku konflik. Jika perilaku konflik dapat dimasukkan ke dalam persaingan politik, konflik dapat diatasi melalui persaingan tanpa kekerasan. Pengelolaan perilaku konflik dapat difokuskan pada pengendalian kekerasan dengan kekuatan militer, atau pada pembangunan ruang-ruang bagi persaingan politik, misalnya, Pilkada langsung. Contoh pengendalian kekerasan dengan kekuatan militer adalah pendekatan tradisional yang digunakan sektor keamanan dalam mencegah konflik, dan menegakkan pertahanan, serta konsep yang lebih baru, yaitu penegakan perdamaian.

Pada awalnya konsep ini ditawarkan sebagai strategi transformasi konflik, tetapi kemudian dianggap sebagai pencegahan konflik. Pembangunan menyangkut perubahan-perubahan dalam status ekonomi berbagai kelompok, dan menimbulkan perselisihan. Meski tidak mungkin mencegah perselisihan agar tidak terjadi, namun pencegahan konflik dapat diarahkan pada pengembangan mekanisme dan lembaga penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, perselisihan sebuah masyarakat mengelola perselisihan kepentingan dan konflik erat kaitannya dengan mutu dan legitimasi

struktural, lembaga dan tata aturannya. Kunci untuk penyelesaian konflik secara damai adalah, pertama dan terpenting, mengembangkan lembaga-lembaga demokratis yang stabil dan menghormati hak asasi manusia.

Secara tradisional ada perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan demokrasi di satu pihak, dengan konflik di pihak lain. Pendekatan pengelolaan konflik dapat (kadang-kadang) bertentangan dengan prioritas-prioritas dalam bidang hak asasi manusia atau dengan tujuan gerakan tanpa kekerasan. Jika perilaku konflik diatasi dengan kekuatan militer, ini dapat (kadang-kadang) menindas kekuatan-kekuatan perubahan yang membuka kemungkinan untuk mengubah pemerintahan yang mengandalkan kekerasan menjadi pemerintahan yang tidak terlalu menggunakan kekerasan. Pencegahan konflik tidak harus hanya terfokus pada perilaku konflik. Pencegahan konflik juga bertujuan menyelesaikan perselisihan akar perilaku, dengan membujuk pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyepakati kompromi-kompromi.

Menyadari bahwa, potensi sumberdaya alam Provinsi Maluku Utara sebagai sumber pemasukan andalan dalam menggerakan roda perekonomian daerah. Di satu sisi, pengelolaan sumberdaya alam mampu menyerap tenaga kerja produktif. Namun, di sisi lain, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara tidak bijaksana dapat memicu menurunnya fungsi lingkungan hidup seperti yang dialami dewasa ini, antara lain: ekosistem pesisir dan laut yang semakin rusak akibat penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak, penambangan karang dan pasir yang tidak terkendali, citra pertambangan yang merusak lingkungan, lemahnya penegakan

hukum terhadap illegal logging dan penhyelundupan kayu serta tindakan *illegal* lainnya yang banyak terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Manajemen yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu: pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dioptimalkan, mengingat peranan dari kekayaan sumber daya alam ini sangat penting terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan perlindungan dari bencana ekologis. Agar kerusakan sumber daya alam tidak semakin parah, perlu adanya perhatian dan penangan yang lebih serius terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan akibat konflik sosial dan krisis ekonomi yang disertai melemahnya wibawa hukum yang berdampak langsung terhadap kerusakan tersebut. Selain itu, meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri juga perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan sehingga fungsi lingkungan tetap terjaga kelestariannya.

Proses transformasi konflik dalam perubahan sosial di Maluku Utara, sesuai agenda pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Maluku Utara tahun 2003-2007, dapat dikatakan bahwa dalam membangun daerah sesuai misi Provinsi Maluku Utara, tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, melaikan secara holistik yakni mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengalaman empiris memberikan pengetahuan bahwa aspek politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan serta kelembagaan saling berinteraksi.

Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif senantiasa dilaksanakan, terutama dalam mensikapi situasi dan kondisi yang berkembang. Harus diakui bahwa, meskipun proses pelantikan DPRD pada situasi yang tidak kondusif, namun Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, dapat melaksanakan tugas konstitusional dengan baik. Selain itu, pimpinan dan seluruh Anggota DPRD periode 2000-2004, telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerah dan memberikan andil cukup besar dalam menghasilkan produk-produk yang strategis, antara lain: lima dokumen induk perencanaan, Perda yang sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Mengutip pandangan salah satu sumber (informan kunci), bahwa:

> "*Kinerja Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, kerja keras bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan tugas-tugas strategis untuk kepentingan daerah ini. Begitu juga kinerja Pimpinan dan seluruh anggota DPRD periode 2004-2009 selama perlajanan tugasnya sangat proaktif dalam menyelesaikan berbagai agenda pembangunan yang diharapkan akan memberikan konstitusional daerah ini. Untuk itu, perlu Saya sampaikan, kebersamaan yang telah terbangun, kerjasama yang telah tercipta, harmonisasi yang telah terbina patut dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.*" (*YA/40 th*).

Upaya menciptakan suasana tenteram dan tertib di Provinsi Maluku Utara pasca kerusuhan adalah mencegah konflik baru antara kelompok masyarakat yang bertikai melalui sutau kerjasama dengan aparat keamanan, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat. Kunjungan ke kecamatan dan desa, senantiasa diikuti dengan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya menjaga situasi dan kondisi daerah yang telah kondusif. Kondisi kantibmas cukup kondusif, berkat kesadaran berdemokrasi yang cukup tinggi, dengan mengedepankan perilaku yang

taat azas, sistem hukum dan sistem demokrasi. Ini tidak lepas dari peran para elite di tingkat lokal dalam mendewasakan kontituennya dalam berpolitik, serta komponen dan komunitas lainnya. Penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin sesuai UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, baik dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi, pawai, rapat umum maupun mimbar bebas, kesemuanya masih dalam koridor sistem.

2. Proses Perubahan Sosial

Perubahan sosial sebagai suatu konsep perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, baik yang terjadi secara alami maupun karena rekayasa sosial. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, pada tingkat komunitas lokal, regional, dan global. Suatu perubahan sosial dapat berlangsung secara gradual atau cepat, secara damai atau dengan kekerasan, secara kontinu atau sekali-sekali, secara teratur atau dalam keadaan kacau. Perubahan pada angka kematian dalam suatu situasi penuh kekerasan, misalnya, dapat berlangsung cepat, penuh kekerasan, sekali-sekali, dan dalam keadaan kacau, seperti yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara.

Masyarakat umumnya (Maluku Utara khususnya), terintegrasi berdasarkan faktor-faktor dasar tertentru. Salah satu faktor dasar tersebut adalah adanya nilai-nilai tertentu, yang dianut oleh bahagian terbesar warga masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, ada kemungkinan bahwa suatu masyarakat dapat berubah apabila nilai-nilainya diubah. Adakalanya pengaruh nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat

tidak terlalu disadari, karena pengaruh nilai-nilai tersebut kadang-kadang bersifat tertutup atau tidak langsung. Karena itu, dalam mengadakan perubahan-perubahan maka nilai-nilai itu harus ditonjolkan secara eksplisit.

Pentingnya peranan nilai-nilai dalam perubahan sosial, seperti ditekankan Weber dalam teorinya tentang birokrasi pada faktor legitimasi. Apabila suatu tertib sosial ingin dibentuk atau dipertahankan, maka warga masyarakat harus mengakui sahnya tertib itu sesuai dengan patokan-patokan tertentu. Weber beranggapan bahwa patokan-patokan hukum akan tetap memegang peranan yang menonjol di dalam masyarakat-masyarakat kontemporer. Artinya, ada kesempatan yang luas mengenai bagaimana merumuskan dan menegakkan peraturan-peraturan, serta adanya hak-hak tertentu yang harus dilindungi, maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Meakioun demikian, dapat dikatakan bahwa legitimasi tidak hanya berlaku bagi peraturan, namun juga pada aspek-aspek sosial lainnya secara luas dan menyeluruh. Karena itu, kelompok-kelompok elite yang berkuasa dan diakuinya kekuasaannya; dapat dianggap sebagai suatu pencerminan dari dianutnya nilai-nilai tertentu.

Demikian halnya, perubahan sosial masyarakat Maluku Utara pasca konflik dapat ditelusuri melalui beberapa hal penting diantaranya: proses dan mekanisme perubahan sosial, dimensi-dimensi perubahan sosial, serta kondisi dan faktor-faktor perubahan sosial. Dalam hal ini, perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat. Hal ini akan menentukan arah norma dan nilai-nilai dalam organisasi-organisasi, lembaga sosial dan bentuk sosial lainnya, di mana bentuknya tidak berubah dan tetap pada kerangka

kerjanya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan sulit dipisahkan, tetapi secara teoritis dapat dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mengacu kepada perubahan pola-pola perilaku, termasuk teknologi dan dimensi-dimensi dari ilmu, material dan nonmaterial.

a. Dimensi Struktural

Dimensi perubahan struktural mengacu kepada perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas, dan perubahan dalam lembaga sosial. Dalam hubungan dengan struktur masyarakat Maluku Utara dalam perspektif konflik, dapat ditelusuri melalui dimensi struktural yang meliputi: bertambah atau berkurangnya kadar peranan, serta aspek perilaku dan kekuasaan. Mengacu kepada pandangan Weber, bahwa perubahan dan konflik bersumber pada aspek-aspek konstitutif dan tatanan sosial. Dalam hal ini, terjadinya konflik mengakibatkan perubahan struktur dalam berbagai dimensi.

Birokrasi merupakan salah satu agen perubahan sosial. Birokrasi menurut Weber, meliputi Birokrasi Publik (yang hidup dalam struktur pemerintahan) dan Birokrasi Provit (yang hidup dalam organisasi swasta). Semua konsep birokrasi dalam acuan Parsons (Weberian), adalah produk berpikir barat yang dibangun pada azas kemodernan sehingga sesuatu yang barat adalah yang rasional. Praktik-praktik birokrasi pemerintahan di Indonesia (termasuk di Maluku Utara), tidak terlepas dari perubahan struktur kekuasaan oleh pemerintah. Ada korelasi yang positif antara

tingkatan hierarki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan (*power*). Semakin tinggi *layer* atau lapis hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya, sebaliknya semakin rendah lapis hierarkinya semakin tidak berdaya (*powerless*). Adapun yang berada di luar lapis-lapis hierarki (*beyond the hierarchy*) adalah rakyat yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi.

Korelasi ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan pada hierarki atas sangat tidak imbang dengan penggunaan kekuasaan di tingkat bawah. Dengan kata lain, sentralisasi kekuasaan di tingkat hierarki atas semakin memperlemah posisi pejabat di hierarki tingkat bawah dan tidak memberdayakan rakyat yang berada di luar hierarki. Korelasi tersebut sekaligus mengartikan bahwa hierarki bawah dianggap kurang mampu mengatasi segala urusan, atau hierarki bawah tidak berani melakukan tindakan kalau tidak sepengetahuan hierarki atas. Pandangan seperti inilah membuat birokrasi sangat tergantung pada seseorang yang berkuasa. Karena itu, sentralisasi kekuasaan sekaligus membenarkan ‘birokrasi pemerintah sebagai kerajaan pejabat.’

Seiring dengan bergulirnya reformasi yang menguatkan kembali Otonomi Daerah melalui kebijakan desentralisasi, maka tidak heran jika kekuatan-kekuatan primordial baik dalam etnosentrisme maupun feodalisme mulai menampakkan wujud barunya. Penguatan Suku Makian atas struktur ekonomi maupun pemerintahan, sedangkan suku-suku lain seperti Suku Kao juga mencoba menggugat eksistensi kultur mereka dengan mengatas-namakan wilayah dan kesultanan masyarakat adat.

Kebangkitan feodalisme ditandai dengan masuknya elite Ternate ke dalam politik dan pemerintahan lokal maupun nasional.

Kebangkitan ini harusnya dicermati lebih jauh ke dalam sistem perwakilan. Artinya, kebangkitan Ternate merupakan cerminan untuk mewakili aspirasi warga masyarakat lokal, ataukah kebangkitan tersebut hanya bersifat personal atau oligarki yang hanya akan menguntungkan segelintir orang atas nama kesultanan. Sehubungan dengan itu, menarik untuk mencermati keinginan beberapa sultan di Maluku Utara untuk bangkit memperjuangkan kembali hak-haknya yang telah sekian puluh tahun hilang ditelan "sentralisme." Misalnya, Kesultanan Ternate menginginkan agar kraton memiliki kewenangan untuk ikut-serta dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Tidak hanya sekedar pengakomodasian aspirasi kesultanan, namun juga setidaknya diakui secara kelembagaan formal. Unngkapan berikut menarik untuk dipahami:

> "*Dulu, di zaman penjajahan, kami para raja dan sultan ini memiliki konsesi atas hasil hutan, tambang dan sebagainya, karena itu memang hak tradisional kami, ... Sekarang, setelah merdeka, hak para sultan justru dirampas. Sultannya melarat, yang kaya konglomerat, ... Karena itu, kami susun maklumat bersifat umum. Tapi, nanti sampai di daerah, kami akan berjuang menuntut hak ekonomi kami yang telah dirampas pemerintah*."

Gejolak politik elite di Maluku Utara mulai terasa terutama ketika terjadi pergantian Bupati Maluku Utara. Beberapa kali konflik menguat selama pemilihan pimpinan daerah, sehingga sering ditempuh jalan tengah dengan memilih orang Jawa. Hal ini bisa dilihat dengan kehadiran Sutikno dan Supanji yang pernah memipin Kabupaten Maluku Utara. Eksistensi pemimpin formal (Bupati) terkadang juga tidak

harmonis dengan keberadaan sultan yang masih kental dengan kekuatan adatnya. Bupati Maluku Utara yang dijabat oleh Abdullah Assagaf, yang notabene merupakan orang Makian ternyata semapt membuat ketidak-senangan orang-orang Ternate yang pada akhirnya berbuntut pada pembakaran Kantor Bupati Maluku Utara.

Demikian halnya, ketika muncul wacana pembentukan Provinsi Maluku Utara, Sultan Ternate ternyata telah bergabung dengan Golkar untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur di provinsi baru baru tersebut. Namin, niat Sultan Mudafar Syah itu kanda karena ternyata calon yang kemudian diusung oleh Golkar adalah Abdul Gafur. Hanya saja pada putaran terakhir pemilihan Gubernur Maluku Utara yang kedua kali, Sultan Ternate dicalonkan oleh Golkar sebagai calon wakil gubernur tetapi gagal. Kegagalan Mudafar Syah untuk mendapat posisi tersebut dinilai oleh dirinya sendiri sebagai penghianatan Golkar. Alhasil, kegagalan tersebut kemudian memacu untuk beralih ke Partei Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk mendapatkan kursi legislatif.

Gagasan pokok yang digambarkan di atas, adalah masyarakat memproduksi diri melalui upaya baik melalui individu maupun kolektif, dan melalui tindakan yang mengubah alam dengan mengatasi struktur-struktur yang ada. Gagasan ini menggaris bawahi pentingnya ekonomi. Bahkan politik diatur oleh ekonomi: politik tidak lain adalah ilmu produksi yang obyeknya semua yang terkait dengan produksi. Karena itu, tugas pembuat undang-undang atau hukum juga tunduk kepada ekonomi. Perubahan tatanan sosial hanya mungkin melalui perubahan kepemilikan sehingga menjadi milik

seluruh masyarakat dalam aspek hubungan kebebasan dan kekayaan. Keteraturan akan tercipta, karena kekacauan disebabkan oleh kelas pemalas atau parasit.

Struktur-struktur itu hanya bisa diciptakan, dilanggengkan, dan diubah oleh pelaku-pelaku sosial. Pelaku-pelaku sosial kendati dikatakan bebas, dikondisikan oleh struktur-struktur tersebut. Semakin banyak orang mampu mengambil jarak, memberi makna atau nilai terhadap tindakan, dan kritis terhadap apa yang dilakukan, semakin terbuka kemungkinan perubahan struktural dan perubahan kultural. Dimensi moral berhadapan dengan struktur-struktur tersebut terletak di dalam pilihan-pilihan diri sendiri terhadap tatanan sosial, politik atau ekonomi yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama. Struktur-struktur sosial merupakan buah aktivitas kolektif manusia dan bisa menjadi mandiri terhadapnya. Struktur sosial adalah hasil aktivitas kolektif, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai buah ciptaan yang disengaja.

b. Dimensi Kultural

Perubahan sosial dalam dimensi kultural, terutama mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti: adanya penemuan (*discavery*) dalam berpikir (ilmu pengetahuan), perubahan hasil (*invention*) teknologi, serta kontak dengan kebudayaan lain menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu dapat meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru ke dalam kebudayaan. Bentuk-bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi secara terus menerus. Inovasi kebudayaan, difusi dan

integrasi kesemuanya melibatkan proses perubahan sosial di dalam dimensi kultural. Aspek material dan nonmaterial, merupakan aspek yang terlibat di dalamnya.

Perdebatan mengenai nilai-nilai budaya MKR (Moloku Kie Raha) hingga sekarang belum ada kesepahaman, namun dalam kaitan dengan pembahasan ini penulis lebih cenderung mengutip definisi kebudayaan yang diajukan oleh E.B. Tailor, bahwa "kebudayaan adalah segala daya cipta yang terangkum di dalam pengetahuan, kepercayaan/keyakinan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, beragam kemampuan dan kebiasaan lain yang diterima oleh manusia sebagai anggota dari sebuah masyarakat" (Koentjaraningrat, 1992; Kaplan, David, et.al, 2002). Definisi ini, bila dikaitkan dengan kebudayaan MKR maka dapat dipahami bahwa, segala daya cipta komunitas di jazirah Maluku Utara, yang dikenal "Moloku Kie Raha," meliputi: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. tetapi, apakah definisi semacam ini representatif? Jawaban atas pertanyaan ini, dapat disimak pembahasan terdahulu tentang sejarah terbentuknya empat kerajaan di Maluku Utara.

Demikian perubahan sosial dalam dimensi kultural masyarakat Maluku Utara (Budaya MKR), secara garis besar dapat dikatakan bahwa: perilaku hidup masyarakat MKR khususnya kota Ternate sebagai pusat peradaban di wilayah ini (proyeksi kehidupan masyarakat MKR) tampaknya sudah sulit untuk dipertahankan dan dijadikan pola anutan '*Ngofa se dano gam Kie Raha.'* Gaya hidup metropolitan 'telah mulai masuk ke perilaku dan kehidupan warga Kota Ternate dan wilayah biasnya. Gaya hidup yang muncul dalam bentuk: (1) irama hidup keseharian; (2) gaya menggunakan bahasa; (3) gaya berpakaian; (4) gaya mengatur perabot dan

mendekorasi rumah; (5) jenis makanan kegemaran; (6) pola rekreasi; (7) pola penggunaan waktu senggang; dan (8) pola apresiasi seni.

Strategi yang harus dikembangkan dalam menghadapi problem tersebut, adalah sikap konsekuensi dan konsistensi semua warga MKR dalam memperkuat jati diri budaya MKR seperti dijelaskan di atas, serta memperkuat solidaritas berbangsa dan bernegara. Semenjak abad ke-19 masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku budaya, kejahatan struktural (dalam arti ketidakadilan struktural), disadari sebagai masalah yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan pendekatan individual. Dengan demikian, perubahan kultural dan perubahan struktural menjadi syarat untuk membenrantas kejahatan struktural sebagai penyebab kemiskinan. Dengan kata lain, hubungan-hubungan dalam masyarakat yang renggang akibat konflik harus diubah secara radikal antara pemerintah dan yang diperintah. Masyarakat dipahaminya sebagai kesatuan manusia yang menyediakan diri untuk pekerjaan yang berguna. Definisi ini sudah mengandung proyek organisasi sosial yang dicita-citakan. Sebuah sistem industri dibangun untuk menghadapi kesengsaraan, dan ketidaktahuan yang merupakan penyebab kemiskinan.

Moloku Kie Raha adalah lembaga adat bersama antara empat kesultanan Maluku Utara, sebagai akibat penjelmaan rasa untuk melanjutkan hidup dalam bentuk suatu '*Gemain schaft*' yang disusun oleh ppikiran. Dalam pergaulan hidup tumbuh dan berkembanglah kegiatan yang menjadi kebiasaan, karena dilakukan berulang kali dan turun trmurun sehingga menjadi tradisi normatif (adat istiadat). Dengan kata lain, terbentuknya lembaga adat (Moloku Kie Raha) yang mengatur perkembangan hidup

selanjutnya dan menjamin stabilisasi struktur kekuasaan empat kesultanan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Konsep Moloku Kie Raha muncul pertama kali dan menjadi sistem yang mengatur perilaku hidup empat kesultanan sampai sekitar awal abad ke-17 (Fr. Valentjin). Ketika Kerajaan Jailolo dihancurkan dan Pulau Halmahera dicaplok oleh Ternate dan Tidore. Sejak saat itu sesungguhnya *Moloku Kie Raha* tinggal sebagai kenangan atau mitos di kalangan para bangsawan dengan berbagai variasi di tiga kerajaan yang ada di Maluku Utara (Lairissa, 1996). Struktur mitos Moloku Kie Raha mencakup keterangan mengenai asal usul kekuarga penguasa (kolano) keempat kerajaan yang dikatakan masih bersaudara.

Moloku Kie Raha adalah suatu pandangan hidup (*Weltanschaung*). Inti dari konsep Moloku kie Raha adalah '*keseimbangan*' yang bertolak dari filsafat *Kie Raha* yaitu: '*Jou se Ngofangare*' yang diterjemahkan menjadi "kau" dan "aku" (dalam arti bahwa segala sesuatu di muka bumi, segala pemikiran, segala tindakan yang akan ditempuh harus didasarkan pada kehendak engkau dan kehendak aku). Bentuk pemikiran inilah yang melahirkan bentuk kerajaan Kie Raha (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo). Dengan demikian, masing-masing kesultanan dapat mengatur dan mengurus urusan dalam negerinya sendiri dengan tetap menjaga dan memelihara keseimbangan.

Pertentangan antara berbagai pusat kerajaan itu tidak bersifat dikotomis, di mana yang satu harus menghancurkan yang lainnya agar bisa maju. Pandangan ini mengandung dualisme, di mana dua unsur atau kekuatan saling bersaing tetapi tidak

saling menghancurkan, sebab kehadiran yang satu hanya bernilai kalau yang lain tetap ada. Demikian konsep Moloku Kie Raha merupakan pandangan hidup serta falsafat hidup dari masyarakat Maluku Utara yang bersifat siklis, di mana berulang dari awal dan akan kembali pada asal. Segala sesuatunya selalu bertolak dari satu, dan akhirnya kembali lagi ke satu. Meskipun agama Islam telah masuk pemikiran secara siklis tetap ada dan dipegang kuat oleh masyarakat.

c. Dimensi Interaksional

Perubahan sosial ditinjau dari dimensi interaksional, mengacu kepada adanya perubahan hubungan sosial di dalam masyarakat, yang diidentifikasi dalam lima dimensi. Modifikasi dan perubahan dalam struktur daripada komponen-komponen massyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Dalam hal ini, frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peranan undang-undang, merupakan skema pengaturan diri dimensi spesifik dari perubahan dalam relasi sosial. Artinya, perubahan sosial banyak dianalisis dalam proses interaksi sosial.

Secara garis besar perubahan sosial dalam dimensi interaksional di Maluku Utara dapat digambarkan bahwa, terjadinya konflik bernuansa ‘SARA’ menimbulkan persepsi mengenai kesempatan/ancaman berkembang berinteraksi dengan tiga mekanisme lain: persaingan, perantara, dan pembentukan kategori. Pembentukan kategori merujuk pada penerapan label-label penyerangan seperti ‘Islam’ dan ‘Kristen.’ Struktur peluang dan ancaman berubah secara radikal pada 21 Mei 1998,

hari Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pembubaran kualisi kekuasaan yang telah berdiri lama di Jakarta menyebabkan pecahnya secara mendadak dan serius garis komando, meninggalkan eksekutif di provinsi-provinsi terkatung-katung dan menjadi bulan-bulanan lawan mereka.

Elite Maluku Utara pada awalnya mampu menghadapi tantangan dalam mepertahankan hubungan kerja mereka dengan pusat moderat. Meski ada ketegangan internal yang makin membesar, mereka mempertahankan front ini sampai Oktober 1999, 17 bulan setelah peluang-peluang baru mengubah agenda bersama mereka dari mempertahankan rezim dan membangun ekonomi menjadi semacam nasionalisme lokal. Namun, dengan sukses yang kembali pasti diperoleh begitu Provinsi Maluku telah terbbentuk, faksi-faksi internal masuk ke dalam konflik terbuka mengenai pembagian hasil-hasil yang diperoleh dari kemenangan.

Kategori yang digunakan untuk memberi ciri pada pihak adalah suku, baik tempat asal maupun agama. Mereka menggunakan persaingan antara dua kesultanan dalam sejarah dari masa beratus-ratua tahun silam (Tertane dan Tidore), yang saling bermusuhan dalam persaingan antara Belanda melawan Spanyol abad 17, dengan meninggalkan akibat-akibat yang dalam pada keadaan sosial. Ternate berada di pihak yang menang dan memenangkan pemerintahan sendiri atas bagian timur dan utara pulau ini, sementara Tidore berada di pihak yang kalah kehilangan wilayahnya, termasuk Ternate Selatan yang jatuh ke dalam kekuasaan langsung Belanda. Wilayah selatan Ternate ini menjadi masyarakat plural yang dihuni oleh para migran, pulau ini tetap kosmopolitan hingga hari ini.

Eksodus pengungsi Makian ke Ternate dan Tidore (konflik 1999-2001), mencetuskan amarah yang meluas yang pada gilirannya memperdalam permusuhan (merusak hubungan antar suku dan agama). Para pembangkan Kao yang dilukiskan sebagai Kristen, mengusir orang-orang Islam (Makian) dari rumah mereka. Padahal sebenarnya, baik suku maupun agama bukanlah idiom politik yang nyaman bagi politisi lokal yang membentuk kelompok anti Mudafar. Mereka sebenarnya adalah loyalis Golkar berlarian pembangunan sekuler selama Orde Baru (elite formal).

Perubahan sosial dalam dimensi interaksional masyarakat Maluku Utara, juga dapat dilihat dalam pemilihan umum medeium kekuasaan adalah partai politik. Golkar adalah raksasa Orde Baru, PPP dan partai-partai adalah penantangnya yang memperjuangkan reformasi. Namun, seperti Poso dan Ambon, partai-partai politik di Maluku Utara hanyalah kendaraan semata bagi kaum elite. Pemain-pemain kunci malahan mengembangkan teater yang bermacam ragam yang penuh dengan simbol-simbol asal-usul, sekarang dikaitkan pada sejarah dan tempat, lain kali agama. April 1999 sebuah dewan pembagi-bagi imbalan di Jakarta di bawah Presiden B.J. Habibie sebagai ketua memutuskan untuk membentuk sebuah provinsi baru di Maluku, yaitu Provinsi Maluku Utara.

BAB VII

TAFSIRAN DAN ANALISIS SOSIOLOGIS

A. Akar Penyebab Konflik Antar Elite di Maluku Utara

Tanpa disadari, konflik terbuka atau ‘perang’ antarkelompok masyarakat di Maluku (Ambon) ‘perang sipil’ dan beberapa tempat di Maluku Utara, berlangsung lebih dari dua tahun. Korban yang berjatuhan kian mengerikan, wilayah konflik pun semakin meluas, menjangkau pulau-pulau kecil dan terpencil di provinsi seribu pulau selama beberapa tahun terakhir, mengakibatkan kehidupan masyarakat di wilayah ini tidak tenteram (tidak menentu), karena setiap saat terancam rusuh (konflik) di mana nyawa manusia selalu terancam dan bahkan sudah sangat murah harganya.

Ada dua pemikiran tradisional mengenai sebab-sebab perang (konflik). Satu pemikiran menekankan motivasi dan kehidupan yang kurang sejahtera kelompok yang mencetuskan konflik langsung, dan mencoba menjelaskan kekerasan dari perspektif itu (model ‘ketimpangan kesejahteraan’ atau model ‘kecewa’). Pencegahan konflik berdasarkan pemikiran ini menekankan pentingnya mencegah, atau paling tidak mengurangi ketimpangan kesejahteraan antara kelompok-kelompok suku, agama, daerah, dan kelas-kelas masyarakat.

Aliran pemikiran tradisional yang lain, menjelaskan dari sisi keserakahan. Penjelasan dari aliran rasional ini menekankan bahwa konflik terjadi lebih disebabkan ‘keserakahan’ daripada ‘rasa tidak puas,’ pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lebih mengejar keuntungan ekonomi yang timbul dari situasi ekonomi yang kacau

daripada memperbaiki kelompoknya yang hidup serba kekurangan. Kemungkinan besar konflik terjadi jika negara terlalu lemah sehingga tidak berdaya mencegah pengerahan kekuasaan atau menghentikan aparat keamanannya melakukan pemerasan atau penganiyaan. Dari sisi peluang, soal rasa tidak puas juga relevan. Bukti empiris menunjukkan bahwa memperbanyak saluran-saluran tanpa kekerasan untuk meng-adakan perubahan dapat mengurangi konflik dalam jumlah besar. Pencegahan konflik berdasarkan pemikiran ini menekankan pembangunan demokrasi, struktur lembaga-lembaga penyelesaian konflik, dan aparat keamanan yang profesional dan transparan. Namun, kedua pandangan ini tidak jauh berbeda. Keduanya menolak bahwa, konflik didorong oleh persoalan-persoalan ideologi dan kepentingan-kepentingan kelompok, serta menekankan kegunaan maksimum bagi individu dan kelompok.

Konflik yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara sudah bergeser, serta berkembang sedemikian rumit dan konpleks. Jika pada tahap awal, sebagaimana digambarkan oleh para pengamat, termasuk penulis sendiri, faktor penyebabnya lebih bernuansa etnik dan ekonomi, maka dalam perjalanannya mengalami komplikasi yang luar biasa dan sarat dengan aroma agama dan politik. Dalam konteks ini, agama dijadikan identitas dan simbol untuk saling menghakimi dan menghabisi satu sama lain, seolah-olah ajaran dan nilai-nilai agama sangat jauh dari kepentingan untuk berdamai. Setiap anggota masyarakat penganut identitas agama, tampaknya merasa dirinya berhak dan wajib menyerang pihak lain, dengan melupakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hakikat fundamental dari keberadaannya sebagai manusia. Dalam situasi seperti itu, jelas mereka sangat jauh dari kesadaran pluralitas sebagai

eksistensi keindonesiaan, bagian tak terpisahkan keagungan Sang Pencipta yang sama-sama diyakini oleh pihak-pihak yang bertikai dan saling menghancurkan itu.

Benarkah agama menjadi faktor penyebab utama konflik berkepanjangan di Maluku dan Maluku Utara? Mereka yang ‘bertarung langsung di lapangan,’ ada yang merasakan dan bahkan meyakininya sebagai jihad agama. Sosiolog UI asal Ternate, Tomagola (2001), mengatakan bahwa yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara sekarang ialah terbakarnya ‘sumbu agama’ karena dalam proses-proses konflik, simbol-simbol agama (seperti gereja-gereja dan masjid-masjid) dihancurkan sehingga mengundang kemarahan komunitas pemiliknya. Pada saat itulah sentimen antar penganut agama meningkat, berkembang menjadi fanatisme buta yang sama sekali menghilangkan toleransi nilai-nilai kemanusiaan.

Bila hal itu diakui, maka sebenarnya agama bukanlah sebuah penyebab, melainkan suatu akibat dari proses-proses konflik yang terjadi. Fanatisme yang muncul dari penganutnya, sebagai dampak dari ketersinggungan simbolistik dalam proses-proses itu. Dalam konteks ini, dan inilah dikhawatirkan kemungkinan penyebab sehingga perang antarkelompok masyarakat tetap menyala berkelanjutan, adalah agama dengan berbagai identitas simboliknya hanyalah sebagai obyek yang menjadi korban dari kepentingan-kepentingan eksternal di luar dirinya. Sejarah konflik antar-etnis dan antar-agama yang terjadi di berbagai belahan dunia, jelas menunjukkan kecenderungan seperti ini, sehingga seolah-olah api perang yang membara dikesankan sebagai ‘perang agama’. Padahal, sesungguhnya perang yang syarat dengan muatan politik kepentingan di luar kesadaran anggota-anggota dan

kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik. Kalau keberadaan agama harus dibela dengan kekerasan, apa sumbangannya terhadap peradaban manusia? Kalau simbol-simbol dan praktek formal menjadi ukuran utama kesalehan, kapan agama bisa mengantar pemeluknya menuju kedalaman hidup penerimaan pluralitas? Kalau sektrarianisme menjadi pilar identitas para penganutnya, bagaimana agama dapat membangun institusi sosial yang lebih adil? Inilah aspek-aspek agama yang diungkap melalui pertanyaan-pernyataan yang sangat rentan terhadap kekerasan.

Agama sering tampil dalam dua wajah yang saling bertentangan. Di satu sisi, agama merupakan tempat di mana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh. Di dalam agama, banyak orang dan kelompok dapat menimba kekuatan dan mendapatkan topangan berhadapan dengan penderitaan, penindasan atau rezim totaliter. Di sisi lain, agama sering dikaitkan dengan fenomena kekerasan (konflik) seperti halnya Indonesia akhir-akhir ini. Pembelaan cenderung mengatakan bahwa agama mengajarkan perdamaian dan menantang kekerasan, tetapi manusia menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga menyulut kekerasan. Agama baru menjadi konkret sejauh dihayati oleh pemeluknya. Kalau agama menganjurkan pemeluknya untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, kenyataan sering berbicara lain. Sejarah mencatat bahwa, betapa besar andil agama dalam membakar kebencian dan meniupkan kecurigaan, membangkitkan salah pengertian dan mengundang konflik. Sering muncul pembelaan bahwa agama bukan merupakan pemicu utama konflik. Banyak pengamat dan pemuka agama menuding kesenjangan ekonomi, pertarungan kekuasaan politik, atau kecemburuan sosial.

Persoalannya kemudian adalah, agama cukup sering bukannya mengelakkan konflik tetapi malahan memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis. Pemenaran ini bukanya hanya berfungsi meringankan atau memberi alibi tanggung jawab pribadi, tetapi semakin meneguhkan tekad, mempertajam permusuhan dan memistiskan motif pertentangan menjadi perjuangan membela iman dan kebenaran. Dengan pemistisan motif tersebut, konflik berubah bentuk menjadi perjuangan yang mempertaruhkan keberadaan manusia, lalu menjadi lebih irasional. Setiap kompromi akan dianggap sebagai kelemahan atau penghianatan. Motif konflik menjadi irasional. Irasionalitas ini tercermin dalam mencampuradukkan kepentingan pribadi/kelompok dengan kehendak Tuhan. Agama tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya, karena percampuradukkan itu adalah tanda tidak adanya unsur kritis, tidak berfungsinya perangkat kewaspadaan dan kaburnya rambu-rambu pengarah pemahaman.

Kehendak Tuhan mau ditangkap secara langsung dengan ketelanjangan kemampuan manusia. Dengan menempatkan agama sebagai suatu entitas tersendiri yang tidak bisa salah berarti mengasingkan diri dari pemeluknya. Klaim bahwa agama selalu mengajarkan yang baik memang benar, tetapi apakah para pemeluk agama menyadari antara ajaran (pengetahuan) dan tindakan itu masih ada jarak. Keyakinan dan ajaran tidak otomatis menjadi sistem tindakan, justru yang rentan terhadap kekerasan adalah yang terakhir ini. Agama yang konkret ialah yang dihayati oleh pemeluknya dengan sistem ajaran, norma moral, institusi, ritus, dan simbol para pemeluknya. Memahami agama secara konkret dapat membawa pada kesadaran akan mekanisme kekerasan. Hal ini dapat membawa ke proses pemurnian agar agama

semakin membatu pemeluknya mencari kedamaian hidup dan menyumbang kepada peradaban yang menghormati kemanusiaan.

Kebenaran adalah korban pertama dari setiap pertikaian, jika kekerasan berlangsung maka aturan dan hukum bungkam seribu basa. Tak salah jika kata-kata di atas dipersepsikan sebagai kondisi Maluku dan Maluku Utara masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pertikaian antar elite yang diformat sedemikian rapi, sehingga nampak konflik 'SARA' terutama antar-suku dan agama. Kemudian diaplikasikan dua golongan atau komunitas yang berbeda keyakinan (Islam dan Kristen) tetapi pada dasarnya bersaudara, telah meluluh-lantahkan kedua daerah ini jadi abu dan menghancurkan segenap pranata sosial, budaya, hukum dan kebenaran. Dengan mengambil persepsi bahwa, pertikaian dan kebenaran berawal dari benak dan pikiran manusia, maka peneliti harus mengambil pilihan yang tepat.

Pilihan yang tepat bagi Peneliti di daerah konflik, khususnya di Maluku Utara adalah "Konflik antar elite hubungannya dengan Perubahan Sosial." Tulisan ini mencoba memetakan konflik pra-kekerasan, mengidentifikasi banyak pihak dan berbagai penyebab, sehingga membuka jalan bagi dialog untuk memetakan jalan ke arah intergasi sosial dan politik. Selain itu, merancang cara untuk memberdayakan non-elite dengan cara melacak pengaruh hubungan antar agenda mereka dan akibat sesungguhnya, membangun kerangka kerja alternatif untuk kemudian memahami proses perubahan sosial. Ini penting dilalukan oleh seorang peneliti terutama ketika masyarakat semakin skeptis terhadap tindakan yang berkaitan dengan sumber-sumber informasi resmi seperti pemerintah atau militer.

Akar persoalan penyebab konflik di Maluku Utara seperti halnya yang terjadi di Maluku Tengah, tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial, perebutan sumber daya alam serta pertikaian elite politik dan birokrasi merupakan faktor pembungkus "konflik agama" yang selama ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menghentikan konflik; antara lain: proses rekonsialisasi di Maluku Utara, dari Penetapan Darurat Sipil dan Perjanjian Malino II, Forum *Pela Gandong* serta Forum *Baku Bae*. Namun, hingga saat ini proses perdamaian yang sesungguhnya di Maluku dan Maluku Utara khususnya, belum terselesaikan dengan baik. Indikasi ini terlihat masih banyaknya pengungsi yang belum dapat kembali ke tempat tinggalnya semula, dan alotnya proses pemulangan pengungsi serta relokasi yang digagas oleh pemerintah daerah setempat, merupakan bara dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan sensibilitas terhadap berbagai bentuk struktur dan figur konflik.

Isu konflik di Maluku Utara ialah paduan dari beberapa isu lama yang masih berlanjut dan isu baru yang muncul sebagai sisi lain dari gerakan reformasi. Isu lama yang dimaksud, ialah ketidakpuasan terhadap kekuasaan dalam pemerintahan yang dianggap oleh beberapa daerah sangat sentralistik, mendikte dan diskriminatif., baik yang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sementara itu, isu baru yang muncul ialah berkembangnya *euphoria* demokrasi di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru. Konflik yang muncul pada masa transisi adalah lahirnya ke"aku"an kelompok

yang membedakan dengan “mereka.” Situasi semacam ini makin dipertajam dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001. Pembedaan antara “aku” dan “mereka” memunculkan kondisi konflik yang menurut Koentowijoyo salah satunya bersumber dari ketidakselarasan kultural (*cultural incopability*). Namun, faktor kultur sebagai sumber konflik juga dapat muncul dari ketiadaan penghargaan suatu kelompok (kaum pendatang di suatu daerah) terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan kata lain, warga pendatang seringkali menganggap rendah kebiasaan dan adat-istiadat masyarakat lokal. Keadaan demikian, menurut Eriksen, bahwa suatu kelompok etnis atau kelompok indentitas dapat bangkit kembali karena warga tersebut menganggap diri mereka berada di bawah ancaman.

Karateristik kelompok-kelompok yang berkonflik dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu: (1) kejelasan batas-batas antara kelompok-kelompok yang berkonflik, dan (2) derajat pengorganisasian masing-masing kelompok. Batas-batas kelompok yang berkonflik erat kaitannya dengan pola interaksi dan komunikasi yang dikembangkan dari kedua belah pihak, kehidupan anggota setiap kelompok yang banyak dipengaruhi oleh komitmen anggota dalam kelompoknya. Dalam hal derajat pengorganisasian kelompok-kelompok yang berkonflik, ada tiga hal yang perlu dianalisis: (1) anggota dari kelompok-kelompok yang berkonflik tidak mempunyai indentitas bersama dan tidak terorganisir dengan baik; (2) anggota yang berkonflik sangat sadar akan indentitas kelompok mereka. Kelompok kedua ini terdapat diferensiasi peranan dalam mempertahanan organisasi, dikaitkan dengan spesialisasi masing-masing anggota dalam hubungan konflik dengan kelompok lawan dan

kelompok-kelompok tertentu di luar mereka; dan (3) kepemimpinan dalam kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam kelompok yang sangat terorganisir dan terdeferensiasi dengan baik, ada kecenderungan pemimpinnya mengklaim dirinya untuk mendapatkan legitimasi dan otoritas yang dapat mewakili seluruh anggota kelompok, diakui oleh pihak lawan, dan perannya diterima oleh mereka.

Suatu konflik sosial selalu melibatkan banyak pihak, maka analisis terhadap suatu konflik juga tidak lepas dari keseluruhan hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Apa dan bagaimana bentuk pola hubungan yang dikembangkan serta tujuannya, merupakan masalah dasar yang perlu dicermati. Kelompok-kelompok yang berkonflik bisa saja independen dari kelompok lain yang lebih besar yang mempunyai yuridiksi atasnya, atau sebaliknya berada di bawah dan menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar yang mempunyai kekuasaan di atasnya. Walaupun pihak lain telah menentukan hubungan sistematis di antara kelompok-kelompok yang berkonflik, namun kelompok yang bersangkutan bisa tidak setuju, karena mungkin isu yang dikonflikkan adalah status mereka masing-masing di dalam sistem. Hal ini penting untuk diingat agar tidak membuat asumsi yang secara implisit partisan.

Hal lain yang penting dan menentukan hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik ialah sistem sosial di mana kelompok itu berada dan menjadi bagian dari kelopok tersebut. Karena itu, perlu pula diperhatikan '*power inequality'* dan konteks sistem karena kedua hal itu mempengaruhi kelompok-kelompok yang berkonflik. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berkaitan dengan derajat integrasi di antara mereka, derajat dan isi norma-norma dan kepercayaan yang diyakini bersama,

serta kekuasaan relatif yang dimilikinya, penggunaan sangsi negatif atau pemaksaan baik yang nyata maupun yang berupa ancaman oleh suatau kelompok terhadap kelompok lain agar bertindak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar dapat dijelaskan struktur konflik yang terjadi di Maluku Utara selama kurun waktu 1999-2001. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, setidaknya ada tiga faktor penting yang mendasari konflik yaitu: (1) kompetisi untuk memperluas teritori agama; (2) kompetisi untuk mencari kontrol pertambangan emas; (3) kompetisi untuk merebut kursi gubernur. Sumber konflik di Maluku Utara bahkan sudah ada sejak masa kolonialisme. Politik pecah belah (*devide et impera*) yang dilakukan Belanda dengan menggunakan instrumen agama sebagai alat politiknya merupakan salah satu sumber konflik yang cukup signifikan untuk menjelaskan apa yang terjadi 1999-2001 di wilayah Maluku. Dengan menganak-emaskan penduduk yang mau memeluk agama Kristen dan melakukan politik pecah belah, ditambah dengan dukungan kekuatan militer yang sangat pasif, Belanda berhasil menguasai kepulauan Nusantara termasuk Maluku dan Maluku Utara yang semula memiliki lima kerajaan Islam yang cukup besar dan berpengaruh: Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, dan Iha. Dalam perspektif ini dapat mengetahui bahwa Belanda menjadikan agama sebagai salah satu alat politik, dan karena itu menjadi bagian dari sumber konflik yang bersifat laten.

Sebagai alat politik, Belanda memberlakukan sistem anak emas terhadap kelompok Kristen dalam hal: pendidikan, birokrasi, militer, dan polisi. Dalam hal pendidikan, kesempatan hanya diberikan pada kelompok Kristen dan raja-raja Islam.

Dengan sistem ini kesempatan kelompok Kristen untuk memperoleh pendidikan, dan seterusnya memasuki birokrasi, militer, dan polisi menjadi terbuka. Sementara pemberian kesempatan pada raja-raja Muslim bahkan menimbulkan kesenjangan dan semacam konflik terpendam antara yang berkuasa dengan rakyatnya. Inilah salah satu bentuk politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda, di samping upaya pecah belah antar kerajaan (baik kerajaan-kerajaan besar maupun kecil di Maluku), yang pada intinya adalah desa, internal kerajaan, maupun bentuk-bentuk perpecahan lain yang didorong dengan iming-iming harta dan kekuasaan.

Salah satu faktor dari sekian penyebab munculnya konflik kekerasan, adalah ketidakrelaan jajaran militer dalam devolusi kekuasaan ke elite politik sipil. Militer masih berkeinginan untuk *in power*. Sementara tuntutan masyarakat (publik), sudah secara memaksa menghendaki demokratisasi negara melalui peran masyarakat. Di sinilah terjadi keguncangan politik yang berimplikasi luas kepada masyarakat di tingkat bawah. Ada dua kemungkinan, yaitu: *pertama*, bukan mustahil ‘perang sipil’ yang terjadi di Maluku Utara adalah bagian tak terpisahkan dari dampak perubahan dan pengurangan peran militer dalam politik. Isu agama hanyalah sebagai obyek yang menjadi korban di tengah ketidaksadaran secara kritis kalangan komunitas yang terlibat di dalamnya. *Kedua*, peristiwa Maluku Utara bukanlah sekadar ujian bagi kepemimpinan nasional, melainkan merupakan cobaan berat bagi kepemimpinan elite sipil dalam proses demokratisasi Indonesia. Sebab, diakui atau tidak, adanya konflik-konflik yang terjadi selama peralihan kepemimpinan nasional, pada saat yang sama keberadaan militer tidak terlalu tampak perannya dalam menyelesaikan konflik.

Kalau itu terjadi dan akan terus berkelanjutan, bukan mustahil demokratisasi Negara Indonesia akan gagal karena hambatan dari dalam negeri sendiri. Padahal, pemerintah seharusnya sadar akan peran utama yang dimainkan, yakni: menciptakan kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat. Dengan kata lain, berangkat dari kasus ‘perang sipil’ di Maluku Utara, negara gagal kalau tidak dikatakan tidak mampu menyelesaikan konflik. Karena negara dengan kekuasaannya yang legitimet, berhak memaksa rakyatnya untuk berdamai. Pada saat yang sama apabila pihak militer tetap tidak bisa menciptakan stabilitas, maka tuduhan negatif dan kecurigaan masyarakat terhadap kepentingan militer akan semakin beralasan.

Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru (sebelum 1990) masih terasa sebagai masa keterpinggiran umat Islam. Hal ini terkait dengan sisa-sisa peninggalan masa kolonial, di samping keterbatasan kualitas sumberdaya manusia. Tertutupnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebagian besar umat Islam Maluku (kecuali kalangan keluarga raja) telah memantapkan keterpinggiran umat Islam ini. Pada saat umat Kristen bisa memasuki birokrasi (sipil, militer, dan polisi) umat Islam hanya bisa hidup sebagai petani dan nelayan. Ketika umat Kristen tinggal di wilayah perkotaan dengan bangunan yang dilengkapi listrik dan air bersih, umat Islam tinggal di pedesaan (di pinggiran perkotaan) yang relatif kumuh. Kesempatan memperoleh pendidikan mulai terbuka sejak zaman kemerdekaan, membutuhkan waktu untuk secara nyata meningkatkan kualitas sumberdaya manusia umat Islam. Keterbatasan dalam kemampuan ekonomi dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan kendala utama peningkatan kualitas umat Islam ini.

Umat Islam yang tertindas di zaman penjajahan dan terpinggirkan di masa kemerdekaan hingga akhir 1980-an, merasa mendapat momentum kebangkitan sejak awal 1990-an. Paling tidak ada tiga hal yang mewarnai kebangkitan ini. *Pertama*, kesadaran akan kuantitas, khususnya dengan pertumbuhan karena proses migrasi Umat Islam Jawa dan BBM (Buton, Bugis dan Makassar) mencari nafkah di Maluku. *Kedua*, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang tumbuh seiring dengan kebebasan memperoleh pendidikan di zaman kemerdekaan ini. Meskipun lambat, kebebasan ini memberi kesempatan tumbuhnya umat Islam yang berpendidikan. *Ketiga*, munculnya keberanian berekspresi dan menipisnya rasa rendah diri. Hal ini makin terasa dengan dukungan kuantitas dari migran muslim dan dukungan kualitas dari kesempatan memperoleh pendidikan bagi umat Islam pasca kemerdekaan.

Terkait dengan kebangkitan ini, muncul fenomena ICMI yang mengusung warna intelektual yang meredam perbedaan ideologis umat Islam. Dengan ICMI, umat Islam (secara politis direpresentasikan oleh PPP) yang semula kurang nyaman dengan kiprah politik Golkar tiba-tiba merasa memperoleh kawan untuk bekerjasama. Tentu tidak dapat menutup mata terhadap ekses kekuatan ICMI ini dalam perebutan posisi birokratis di Maluku, yang kemudian menjadi sangat tajam sebagai persaingan antara Islam dan Kristen. Padahal sebelum fenomena ICMI, Golkar adalah kekuatan nasionalis yang relatif netral.

Ketegangan-ketegangan sosial antara komunitas Islam dan Kristen dipertajam dengan munculnya *stereotipnes* baik dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Pihak Kristen menganggap kebangkitan umat Islam yang didukung oleh kedatangan

migran muslim, khususnya BBM sebagai ancaman. Sementara pihak Islam melihat adanya pihak Kristen yang berpolitik ingin kembali merebut hegomoni yang mereka miliki pada masa kolonial hingga awal Orde Baru. Pandangan ini dikaitkan dengan kemunculan isu kembalinya RMS (Republik Maluku Selatan) pada awal masa kerusuhan. Selain faktor-faktor tersebut, unsur adat dalam konflik di Maluku Utara juga mengambil peran yang cukup siginifikan. Fenomena ini terlihat dari peran aktif yang dilakukan ketiga kesultanan di wilayah ini dalam konflik 1999-2001.

Kerusuhan di Maluku Utara sebagaimana yang terjadi di Maluku Tengah, pada akhirnya tidak lagi ditentukan oleh ada tidaknya insiden pemicu melainkan oleh adanya kekuatan politik-militer yang berusaha melanggengkan konflik di dalam masyarakat. Kekuatan ini mengkondisikan masyarakat untuk tetap rentan terhadap aksi-aksi kekersan. Hal ini dapat terukur dari adanya distribusi senjata di masyarakat, adanya bias sikap aparat dalam mencegah kerusuhan ataupun keterlibatan aparat secara langsung dalam berbagai aksi kekerasan serta masih dipakainya simbol-simbol agama untuk menguatkan masyarakat melakukan aksi terhadap konflik dengan cara kekerasan. Konflik komunal yang berkepanjangan di Maluku membelah masyarakat menjadi dua komunitas yang didasarkan atas basis agama, yakni komunitas Islam dan Kristen. Pembelahan tersebut tidak saja dialami oleh masyarakat umum tetapi juga pers dan aparat keamanan.

Melalui persepektif yang ditawarkan Kriesberg (1998), Zartman (1985) serta Mitchael (1981:17-34) proses resolusi konflik dapat dibagi dalam empat tahapan, meliputi: (1) Tahap De-eskalaasi Konflik; (2) Tahap Negosiasi; (3) Tahap *Problem-*

solving Approach; dan (4) Tahap *Peace Building*. Selain tahapan tersebut dalam upaya resolusi konflik di Maluku Utara, ringkasan ini juga akan dilihat proses *law-inforcement* yang dilakukan oleh aparat terkait. Tahap pertama (de-eskalasi konflik), konflik yang terjadi masih diwarnai dengan pertikaian bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dalam tahap ini dapat dimulai jika didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.

Kajian tentang *entry-point* ini didominasi pendapat Zartman (1985), tentang kondisi *hurting stalemete*. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai akan lebih terbuka kepada opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat, juga untuk menghindari kehancuran total. Pendapat ini didukung oleh Bloomflied, Nupen, dan Haris (2000). Namun, *repeniss* tesis ini ditolak oleh Burton (1990, 88-90), menyatakan bahwa *"problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable option , that would make this ripening unnecessary*." Dengan demikian, *entry-point* juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik. De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melalui intervensi militer yang dapat dilakukan pihak ketiga internasional yang berdasarkan mandat Bab 6 dan 7 Piagam PBB (Croker, 1996).

Tahap kedua (negosiasi), tahap ini dapat dilakukan ketika tahap de-eskalasi konflik sudah terjadi atau bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik, untuk membuka peluang

diadakannya negosiasi antar elite. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (*political settlement*) antar aktor yang berkonflik. Hal ini sejalan dengan Bloomflied, Nupen dan Haris (2000), telah mengembangkan suatu pedoman kerja yang rinci tentang bagaiaman merancang, menginisiasi, dan memantau proses negosiasi. Pedoman kerja ini meliputi 11 prosedur, mulai dari pemilihan peserta, cara-cara untuk mengilangkan negosiasi, perbagia lapangan bermain, persiapan biaya negosiasai penetapan jangka waktu negosiasi dan prosedur pembuatan keputusan.

Hal yang sama juga ditawarkan oleh Saunders (1996), yang mengembangkan terminologi *circum-negotiation*. Terminologi ini menekankan perlunya dilakukan interaksi di seputar arena negosiasi politik. Interaksi ini digunakan untuk mencari proses-proses alternatif yang dapat dipergunakan untuk mendukung proses perdamaian yang ada. Kontribusi penting Saunders adalah indentifikasi keberadaan empat arena utama dari suatu proses perdamaian yaitu: *official process*, *quasi official process*, *public dialogue*, dan *civil sosiety*. Keempat arena ini harus digunakan secara optimal untuk mencari celah bagi terciptnya perdamaian.

Tahap ketiga *(problem-solving approach*), lebih diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antgonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri, 1996:149). Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeskplorasi altrnatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing

komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (2000:202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisis dalam konteks yang menyeluruh (*total enviroment*). Karena itu, proses resolusi konflik harus berhadapan dengan suatu realitas sosial yang kompleks dan tidak hanya melakuka usaha-usaha *ad-hoc* untuk mengendalikan suatu demensi interaksi sosial spesifik yang menyulut kekerasan.

Aplikasi empirik dari *problem solving approach* ini dikembangkan oleh Rotman (1992:30), menawarkan beberapa komponen utama dalam proses *problem solving*. Komponen pertama adalah, masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Kemudian masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibelitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik.

Tahap keempat (*peace building*), meliputi rekonsialisi dan konsolidasi. Tahap ini merupakan terberat dan memakan waktu yang lama, karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Pada tahap transisi, *governace-based approach* merupakan suatu pedekatan yang dominan digunakan selama ini. Pendekatan ini sangat menekankan penerapan model Grotian dan Kantian tentang pemulihan norma-norma libral untuk memulihkan *civil society* (Hampson:1977). Model Grotian dan Kantian

ini menempatkan pembentukan institusi demokrasi dan pelaksanaan HAM sebagai prioritas utama (Baker, 1996; Owen, 1995).

Kaum Grotian melandaskan diri pada konsep *civil society* yang diperkenalkan oleh *societas quasi politica et moralis* yang diperkenalkan oleh Fransisco Suarez (Wight:1996). Konsep ini menganggap negara sebagai suatu entitas politik semu serta semi babarian yang harus membuat suatu kontrak sosial (tipe Lokean) berupa standar-standar normal yang akan mengatur hubungan antar negara. Konsep tersebut kemudian diaplikasikan dengan usaha menciptakan sistem keamanan kolektif untuk menangkal perang dan pembentukan norma atau hukum internasional untuk melindungi HAM (Keohane and Martin: 1995).

Kaum Kartian meneruskan ide Christian Wolf tentang *civitas maxima* (Wight: 1996, Bab 10, Dolyle: 1997, Bab 8). Ide *civitas maxima* merupakan suatu pemikiran untuk membentuk komunitas peradaban global yang memerlukan suatu prasyarat uniformitas yaitu adanya keseragaman doktrin dan komposisi struktur domestik, serta homogenitas ideologi antar negara. Aplikasi praktis dari ide ini adalah upaya sistematis untuk menyebarkan ide liberalisasi politik dan liberalisasi ekonomi (Copeland, 1996). Masalah utama dari ide tersebut, adalah adanya keharusan untuk menyeragamkan doktrin dasar negara dan program perdamaian. Uniformitas ide perdamaian tersebut akan menemui batu sandungan terutama ketika ide tersebut berusaha diaplikasikan untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi karena pecahnya konflik-konflik internal. Hal ini karena uniformitas perdamaian tidak memberikan kesempatan terhadap komunitas lokal untuk mengembangkan

sendiri alternatif-alternatif resolusi konflik yang cocok dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Tahap kedua dari *peace building* adalah rekonsilaiasi. Rekonsialisai ini perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang dialami suatu komunitas telah menimbulkan kerapuhan kohesi asal masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam sejarah komunitas tersebut.

Rekonsialisasi itu sendiri, secara abstrak didefinisikan sebagai pemulihan kembali ke kesucian mayarakat yang telah ternoda oleh tindakan-tindakan kekerasan. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menempatkan pihak-pihak yang bertikai dengan jalan menghilangkan penghalang antara kedua pihak, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama tentang masa depan mereka. Definisi di atas menunjukkan bahwa proses rekonsialiasi baru bisa dilakukan jika sudah ada proses de-eskalasi konflik. Usaha untuk melakukan de-eskalasi konflik ini merupakan bagian dari proses negosiasi yang telah dilakukan pada tahap II. Proes resolusi konflik tahap II tersebut berlanjut dengan proses di tahap III untuk menyentuh sebab-sebab fundamental dari konflik yang terjadi. Determinan-determinan dasar dari suatu konflik dapat diatasi, jika masalah-masalah interpretasi subyektif (faktor-faktor fenomenologis) antar kelompok yang terbentuk oleh dinamika sejarah ditangani secara arif (Lederach, 1997, Hampson, 1997; Kelman, 1997).

Perhatian pada faktor-faktor fenomenalogis ini dapat diawali dengan berkonsentrasi untuk mengurangi beban yang menimpa para korban pertikaian dalam masyarakat (Ball, 1996:619-620). Hal ini dilakukan dengan menimbulkan kesadaran kolektif bahwa telah terjadi proses "*victimisation*" dalam masyarakat (Lederach, 1997

Hampson, 1997; Kelman, 1997). Kesadaran ini dapat diperoleh dengan memberi kesempatan pada koban untuk secara eksplisit, ekspresif, dan dalam kondisi tanpa tekanan untuk mengungkapkan realitas penderitaan dan kekerasan yang dialami. Perlu ditekankan di sini bahwa pengungkapan realitas ini tidak dimaksudkan untuk mencari para "penjahat perang" tetapi lebih ditujukan untuk membagi beban penderitaan yang dialami sekelompok masyarakat ke lapisan masyarakat lainnya. Pengakuan akan adanya korban tidak boleh dipakai untuk membagi kembali masyarakat menjadi dua kelompok: "*the good guys against the bad guys*." Pengakuan tersebut harus dilihat sebagai awal untuk menggali kembali semangat kebersamaan seluruh masyarakat dalam mengatasi penderitaan yang dialaminya.

Kesadaran kolektif bahwa ada sekolompok masyarakat yang mengalami peristiwa traumatik dapat menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya rekonsiliasi hanya jika ada kemampuan dan kemauan dari para koban untuk menerima kata maaf yang diucapkan oleh para pelaku kekerasan. *"The power of forgiveness*" dari seluruh lapisan masyarakat memainkan peranan penting untuk menentukan seberapa besar proses rekonsiliasi akan kembali menyatukan masyarakat atau bahkan "menyucikan " masyarakat dari noda kekerasan yang selama ini terjadi.

Tahap penting dari proses rekonsialisi adalah perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, harus kembali ditekankan bahwa rekonsiliasi bertujuan untuk mencatat sejarah hitam suatu bangsa (masyarakat), kemudian menjadikannya sebagai kekuatan baru untuk membentuk masa depan bersama. Dengan demikian, perwujuan rasa keadilan ditujukan untuk: (1) memberi kompensasi bagi para korban kekerasan;

(2) memberikan jaminan hukum terutama untuk mencegah terulangnya pemakaian kembali tindak kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan antar kelompok.

Proses rekosiliasi ini dapat dikatakan berhasil jika pihak-pihak yang bertikai secara bersama-sama memandang penderitaan yang selama ini dialami oleh masing-masing kelompok sebagai pengorbanan yang memang diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi bangsa. Dengan kata lain, kedua kelompok berhasil merubah *destructive conflict* yang terjadi selama ini menjadi *constructive conflict* yang tidak akan lagi menjadikan kekerasan sebagai sarananya (Kriesberg, 1998).

Tahap terakhir dari proses *peace building* ialah tahap konsolidasi perdamian. Upaya ini dapat dilakukan dengan merumuskan hubungan antara masyarakat dengan negara dimana terbuka kesempatan bagi pihak yang semula bertikai (konflik) dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Untuk itu, perlu diberdayakan lembaga-lembaga adat dan nilai-nilai budaya lokal yang didukung oleh lembaga-lembaga administrasi negara, penegak hukum dan jasa sosial. Erat kaitannya dengan dimensi politik-kekuasaan adalah kebijakan keamanan, kongkretnya demiliterisasi konflik lewat pendidikan, pengawasan persenjataan, dan penataan ulang hubungan sipil-militer (Galtung, 2003).

Pendekatan transformasi konflik berbeda dengan pendekatan resolusi konflik dan manajemen konflik. Resolusi konflik berasumsi bahwa “konflik adalah fenomena jangka pendek yang bisa diselesaikan dengan intervensi atau mediasi.” Manajemen konflik berasumsi bahwa “konflik adalah proses jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi lebih berfokus untuk mengurangi atau mengontrol

ketidakpastian daripada menyentuh akar (sumber) permasalahan.” Resolusi konflik dan manajemen konflik sangat berguna dan efektif dalam situasi tertentu, khususnya di daerah yang rentan konflik, seperti di Maluku dan Maluku Utara. Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan transformasi konflik dibangun di daerah yang rawan konflik sebagai saluran-saluran untuk institusialisasi konflik. Konflik besar-besaran terjadi karena masalah kecemburuan sosial-ekonomi, diskriminasi rasial atau etnis, ketidakadilan dalam sistem birokrasi dan pendapatan. Masalah-masalah ini tidak akan hilang walaupun kekerasan berkurang atau berhenti. Konflik akan terus berlanjut kalau tidak disalurkan dengan baik dan dikaji dari sudut akarnya.

B. Demokrasi dan Nasionalisme Pasca Kolonial

Abad ke-20 yang baru dilewati merupakan abad ‘Perang Dingin’ dengan ditandai oleh terbaginya dunia dalam dua kutub ideologi: ideologi nonkomenis dan ideologi komenis, yang saling bersaing dengan hebatnya untuk menguasai dunia. Persaingan kedua ideologi itu didukung dengan kekuatan militer yang memiliki persenjataan nuklir sehingga mengancam dunia dengan perang nuklir yang sangat dahsyat. Berakhirnya ‘Perang Dingin’ tahun 1989 yang ditandai dengan runtuhnya salah satu dari dua kekuatan adikuasa yang pada saat itu mendominasi percaturan politik dan ekonomi dunia. Kondisi tersebut menandai dunia mengalami perubahan yang sangat drastis. Perubahan yang dimaksud ditandai dengan runtuhnya imperium komenis yang dipimpin oleh Uni Soviiet tiba-tiba mengalami kehancuran.

Angin demokrasi yang semula meniup dengan sepoi-sepoi basah sejak tahun 1989 berubah menjadi angin topan yang menerpa seluruh dunia. Hantington (1993), seorang pakar ilmu politik berkebangsaan Amerika, mencatat bahwa antara tahun 1974-1990 telah lebih dari tiga puluh negara di Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur, dan Eropa Timur telah meninggalkan sistem pemerintahan yang *otoriter* dan menggantikannya dengan pemerintahan yang demokratis. Lebih lanjut, Hantington menyebutkan bahwa *global democratic revoolution* ini merupakan kecenderungan politik yang paling penting pada akhir abad ke-20 (Soetrisno, 1995:20).

Menurut Hantington, Dunia sedang memasuki gelombang ketiga dari *demokratisasi*, sedang demokratisasi gelombang pertama dan kedua terjadi pada abad ke-19 di Amerika dan pada akhir Perang Dunia II ketika proses demokratisasi terjadi di seluruh negara jajahan di dunia. Pada akhir abad ke-20 juga bidang ekonomi dunia mengalami perubahan yang mendasar dalam dua segi. *Pertama*, kapitalisme muncul sebagai suatu sistem ekonomi yang dominan di dunia dan menjadi harapan bagi sebagian besar negara-negara sedang berkembang termasuk negara-negara eks blok komenis seperti Rusia, negara-negara Eropa Timur, Cina dan Vietnam sebagai sistem ekonomi yang akan mampu membawa kemakmuran. *Kedua*, ekonomia dunia pasca Perang Dingin ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi ekonomi regional yang membuat ironisnya ekonomi dunia menjadi cenderung proteksionistik.

Pembahasan pasca-kolonial mengenai suku-suku di Indonesia berkembang bersamaan dengan meningkatnya dominasi negara atas masyarakat. Meski moto nasional ‘Bhineka Tunggal Ika’ masih tetap berkumandang, dalam praktek negara

sebenarnya menekankan keseragaman budaya dan sama sekali tidak menghiraukan pluralitas. Setelah kemerdekaan, persoalan-persoalan suku dihapus dari senus penduduk karena dikhawatirkan bahwa pengungkapan keanekaragaman suku dapat melahirkan ‘sukuisme’ dan menghambat langkah menuju integrasi nasional. Biro Pusat Statistik secara terus menerus mendapat tekanan dari pejabat tinggi dalam pemerintahan untuk menyingkirkan penelitian-penelitian mengenai suku.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mencoba menghilangkan pluralitas suku. Menurut Eyerman (1996), kewajiban elite negara adalam membangun bangsa yang bersatu dan seragam, kewajiban suku minoritas adalah perilaku pasif. Pluralisme suku dapat ditelusuri melalui tiga faktor: (1) penaklukan dan aneksasi, ketika suatu bangsa kalah dan ditaruh di bawah kekuasaan pemenang; (2) kolonisasi dan dekolonisasi oleh Eropa, yang menggabungkan di dalam wilayah administrasi, yang dibentuk untuk kepentingan pemerintahan kolonial, kelompok-kelompok penduduk yang tidak memiliki perasaan dekat satu sama lain dan sering dipecah-belah di antara dua atau lebih negara kolonial; (3) gerakan penduduk sebagai rakyat telah melewatii garis-garis batas politik dalam upaya mereka mencari peluang ekonomi atau kebebasan beragama dan berpolitik.

Mencermati kategori-kategori yang ditawarkan di atas, sumber-sumber pluralisme suku di Indonesia pada dasarnya adalah kategori (2) dan (3). Pembahasan mengani suku, atau lebih luas mengenai pluralisme budaya, dapat dikatakan berkaitan dengan upaya untuk membongkar warisan kolonial dan membangun identitas yang baru berdasarkan gambaran masyarakat yang dicita-citakan. Tidak mengherankan bila

elite nasional menuduh kekuasaan kolonial menggunakan *cara devide et impera* untuk membendung keinginan rakyat yang makin besar untuk merdeka. Semangat nasionalisme generasi pertama para pemimpin nasional diteruskan kepada para pemimpin berikutnya, seperti dalam kemiliteran, dengan perspektif yang jauh lebih sempit. Hingga saat ini, perspektif nasionalis sempit pihak militer sangat besar pengaruhnya pada pandangan pihak sipil mengenai persepsi tentang ancaman yang harus disingkirkan untuk menjaga kesatuan dan integrasi nasional. Operasi-operasi militer berperan sebagai alasan untuk membenarkan pandangan yang sempit ini

Ketika Albert Einstein dinobatkan sebagai *The Man of the Century* oleh majalah Time edisi 31 Desember 1999, publik mungkin tidak terlalu heran. Sejarah abad ke-20 memang banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam sains, khususnya fisika modern, sebagai bentuk pencarian manusia atas hakikat alam. Abad ke-20 bukan hanya abad sains, tetapi juga abad nasionalisme. Periode akhir dari milenium kedua ini diwarnai oleh dua perang dunia yang menelan korban jutaan jiwa serta kerugian ekonomi dan sosial yang luar biasa, akibat pertentangan antarkelompok manusia yang dibatasi oleh sebuah konsep bernama bangsa, *nation*, yang ditopang oleh ideologi nasionalisme.

Nasionalisme adalah sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya Perang Dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme)

pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme. Sebaliknya, narasi-narasi nasionalisme menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi dan transaksi sosial, politik, dan ekonomi internasional, baik di kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat (khususnya pascatragedi WTC), Jerman, dan Perancis, maupun di kalangan negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Brasil, dan Indonesia.

Sebagai konsep sosial, nasionalisme tidak muncul dengan begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. Dalam studi semantik Guido Zernatto (1944), kata *nation* berasal dari kata Latin *natio* yang berakar pada kata *nascor* ’saya lahir.’ Selama Kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada abad pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (Permias untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang). Kata *nation* mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu, Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Dari sinilah makna kata *nation* menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Perkembangan nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasi-kan sebuah politik bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber nyaris frustrasi ketika harus memberikan penjelasan sosiologis tentang fenomena nasionalisme. Dalam sebuah artikel pendek yang ditulis pada 1948, Weber menunjukkan sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang nasionalisme dapat dibangun. Tidak adanya rujukan mapan yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Apapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai budaya, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme mencari pengetahuan universal. Dengan alasan yang sama, dua bapak ilmu sosial: Marx dan Durkheim, tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme.

Pesimisme Weber mungkin benar. Namun, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoretis. Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana mencoba memahami dan sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidak

mudah mengingat, seperti yang dikatakan Weber, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme.

Sebuah ilustrasi yang mengandaikan nasionalisme adalah sebuah gedung, maka setiap upaya mencari esensi nasionalisme berada di lantai yang berbeda-beda. Konsekuensinya, teorisasi nasionalisme sering bersifat partikular, tidak universal seperti yang diinginkan Weber. Namun, ini tidak menjadi masalah, khususnya dalam paradigma pascamodernisme ketika pengetahuan tak lagi monolitik dan homogen. Beragamnya pandangan justru akan memperkaya pemahaman manusia akan fenomena di sekelilingnya. Membangun epistemologi nasionalisme berawal dari dua pertanyaan fundamental. Pada titik sejarah mana fenomena nasionalisme muncul dan apa yang menjadi materi dasar pembentuknya? Satu pendekatan yang digunakan beberapa sarjana menjawab pertanyaan ini adalah dengan melacak jejak-jejak etnik suatu bangsa ke masa sebelum nasionalisme berbentuk seperti sekarang.

Kaca mata etnonasionalisme ini, berangkat dari asumsi bahwa fenomena nasionalisme telah eksis sejak manusia mengenal konsep kekerabatan biologis. Dalam sudut pandang ini, nasionalisme dilihat sebagai konsep yang alamiah berakar pada setiap kelompok masyarakat masa lampau yang disebut sebagai *ethnie* (Anthony Smith, 1986), suatu kelompok sosial yang diikat oleh atribut kultural meliputi memori kolektif, nilai, mitos, dan simbolisme. Dalam argumen Smith, *ethnie* merupakan sumber inspirasi yang mendefinisikan batas-batas budaya yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa lain seperti sekarang. Implikasi titik pandang ini adalah bahwa nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada

fenomena politik, karena dia berakar pada etnisitas dan budaya pramodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalis pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya ketika terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar dalam membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya (Compbell: 1994; Chilcote: 2003).

Perspektif etnonasionalisme yang membuka wacana tentang asal-muasal nasionalisme berdasarkan hubungan kekerabatan dan kesamaan budaya bagaimana-pun tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan, khususnya jika ingin mengamati batas-batas bangsa yang terbentuk dalam masyarakat kontemporer. Yang ditawarkan oleh pendekatan etnonasionalis dapat dipakai untuk mengamati fenomena nasionalisme di negara ‘monokultur’ seperti Jerman, Itali, dan Jepang. Namun, penjelasan yang sama tidak berlaku sepenuhnya ketika dipakai untuk menjelaskan nasionalisme bangsa multikultural seperti Amerika Serikat, Perancis, Singapura, dan Indonesia untuk menyebut beberapa. Tentu saja di bangsa multikultural ini ada dominasi etnik atau ras tertentu yang pada tingkat tertentu menjadi sumber utama inspirasi nasionalisme. Namun, itu tidak berarti bangunan nasionalisme menjadi homogen karena fondasi nasionalisme juga ditopang oleh ikatan-ikatan nonetnik.

Lepas dari konundrum tersebut, melacak genealogi nasionalisme melalui jejak-jejak etnik mungkin terlalu jauh mengingat fenomena nasionalisme sebenarnya relatif baru. Ini bisa ditelusuri dari sejarah munculnya konsep bangsa-negara di Eropa

sekitar abad ke-18 yang merupakan bagian dari gelombang revolusi kerakyatan dalam meruntuhkan hegemoni kelas aristokrat. Pembacaan sejarah yang demikian memberi indikasi asal-muasal nasionalisme sebagai anak modernitas yang lahir dari rahim Pencerahan, suatu revolusi berpikir yang membawa semangat egaliterianisme. Namun, konsep nasionalisme tidak hanya meliputi aspek-aspek kegemilangan dari gagasan modernitas yang ditawarkan oleh Pencerahan Eropa karena dia merupakan akibat (*by-product*) dari pengkondisian modernitas bersamaan dengan transformasi sosial masyarakat Eropa pada saat itu.

Demikian dapat dikatakan bahwa, nasionalisme adalah penemuan bangsa Eropa yang diciptakan untuk mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat modern (Zeitlin, 1988). Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas. Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama (Sanderson, 2003). Dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme yang membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Dari sudut pandang deterministik ini Gellner sampai pada satu argumen bahwa nasionalismelah yang melahirkan bangsa, bukan sebaliknya.

Sebagai sebuah produk modernitas, perkembangan nasionalisme berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Namun, nasionalisme tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peran lebih penting dalam pembentukan nasionalisme

daripada kelas yang terdominasi. Artinya, pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan dengan juga melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat (Anthony Giddens, et.al: 2003). Pada level inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Perspektif melihat dari bawah ini Benedict Anderson (1991), mengatakan bahwa nasionalisme sebagai sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, *imagined communities*. Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari kelompok dominan.

Keunikan konsep Anderson dapat ditarik lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negara-negara pascakolonial. Bukan kebetulan jika konsep Anderson sebagian besar didasarkan pada pengamatan terhadap sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun, ada satu hal dalam karya seminal

Anderson yang dapat menjadi subyek kritik orientalisme seperti yang ditengarai oleh Edward Said terhadap cara pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan masyarakat non-Barat (lihat Chilcote, 2003).

Anderson berargumen dalam bukunya Imagined Communities, bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme bangsa Eropa. Di sini letak problematika dari pandangan Anderson karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan bangunan nasionalisme yang berbeda dengan Eropa (Eyerman, 1996). Secara esensial nasionalisme masyarakat pascakolonial dibentuk berdasarkan suatu *differance* sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kolonialisme. John Plamenatz (1976) membuat dikotomi antara nasionalisme Barat dan nasionalisme Timur. Kategorisasi ini mungkin kedengaran terlalu sederhana, walaupun Plamenatz cukup layak didengar.

Menurut Plamenatz, nasionalisme Barat bangkit dari reaksi masyarakat yang merasakan ketidaknyamanan budaya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat kapitalisme dan industrialisme. Namun, mereka beruntung karena budaya mereka memungkinkan mereka menciptakan sebuah kondisi yang dapat mengakomodasi standar-standar modernitas. Sebaliknya, nasionalisme Timur lahir dalam masyarakat yang terobsesi akan apa yang telah dicapai oleh Barat tetapi secara budaya mereka tidak dilengkapi oleh prakondisi-prakondisi modernitas yang

memadai. Karena itu, nasionalisme Timur, dalam hal ini masyarakat pascakolonial, penuh dengan ambivalensi. Pada satu sisi, dia merupakan emulasi dari apa yang telah terjadi di Barat. Di sisi lain dia juga menolak dominasi Barat (Keller, 1995).

Chatterjee mencoba memecahkan dilema nasionalisme antikolonialisme ini dengan memisahkan dunia materi dan dunia spirit yang membentuk institusi dan praktik sosial masyarakat pascakolonial. Dunia materi adalah "dunia luar" meliputi ekonomi, tata negara, serta sains dan teknologi. Dalam domain ini superioritas Barat harus diakui dan mau tidak mau harus dipelajari dan direplikasi oleh Timur. Dunia spirit, pada sisi lain, adalah sebuah "dunia dalam" yang membawa tanda esensial dari identitas budaya. Semakin besar kemampuan Timur mengimitasi kemampuan Barat dalam dunia materi, semakin besar pula keharusan melestarikan perbedaan budaya spiritnya. Domain spiritual inilah nasionalisme masyarakat pascakolonial mengklaim kedaulatan sepenuhnya terhadap pengaruh-pengaruh dari Barat. Walaupun demikian, Chatterjee menambahkan bahwa dunia spirit tidaklah statis, melainkan terus mengalami transformasi karena lewat media ini masyarakat pascakolonial dengan kreatif menghasilkan imajinasi tentang diri mereka yang berbeda dengan apa yang telah dibentuk oleh modernitas terhadap masyarakat Barat. Hasil dari pendaulatan dunia spiritual ini membentuk sebuah kombinasi unik antara spiritualitas Timur dan materialitas Barat yang mendorong masyarakat pascakolonial memproklamasikan budaya "modern" mereka yang berbeda dari Barat.

Dikotomi antara dunia spirit dan dunia material seperti yang dijelaskan Chatterjee pada satu sisi mengikuti paradigma Cartesian tentang terpisahnya raga dan

jiwa. Namun, di sisi lain ia menunjukkan bahwa penekanan dunia spirit dalam masyarakat pascakolonial adalah bentuk respons mereka terhadap penganaktirian dunia spirit oleh peradaban Barat. Karena itu, masyarakat pascakolonial mencoba mengambil peluang tersebut untuk membangun sebuah jati diri yang autentik dan berakar pada apa yang telah mereka miliki jauh sebelumnya. Hasilnya berupa bangunan materi modernitas yang dibungkus oleh semangat spiritualitas Timur. Implikasi strategi ini dalam bangunan nasionalisme pascakolonial dapat dilihat dari upaya-upaya kaum elitee nasionalis membangun sebuah ideologi nasionalisme yang memiliki kandungan spiritual yang tinggi sebagai representasi kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh peradaban Barat (Lerner, 1983).

Orientasi spiritualitas Timur mengilhami lahirnya konsep Pancasila yang dilontarkan Soekarno pertama kali dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, yang mengklaim bahwa Pancasila bukan hasil kreasi dirinya, melainkan sebuah konsep yang berakar pada budaya masyarakat Indonesia yang terkubur selama 350 tahun masa penjajahan. Bagi Soekarno, tugasnya hanya menggali Pancasila dari bumi pertiwi dan mempersembahkannya untuk masyarakat Indonesia Jika dicermati secara kritis, ada beberapa poin yang problematis dengan klaim Soekarno di atas. *Pertama*, masa penjajahan 350 tahun adalah sebuah mitos (Rahardjo, 1993). Mitos ini menjadi strategi retorika untuk membakar sentimen anti-Belanda saat itu. *Kedua*, dan yang lebih penting, apakah Pancasila merupakan konsep yang benar-benar produk indigenous? Dalam pidato Soekarno terlihat bahwa Pancasila adalah hasil kombinasi dari gagasan pemikiran yang diimpor dari Eropa, yakni ‘humanisme,’ ‘sosialisme,’

‘nasionalisme,’ dikombinasikan dengan Islamisme yang berasal dari gerakan Islam modern di Timur Tengah. Dalam konteks politik saat itu, Pancasila ditawarkan sebagai upaya rekonsiliasi antara kaum nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islamis.

Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip Pancasila telah ada dalam masyarakat di Nusantara jauh sebelumnya seperti yang diklaim Soekarno. Yang ingin ditunjukkan dari pengamatan ini adalah bahwa, penjelasan Chatterjee tentang spiritualitas Timur yang menjadi domain kedaulatan masyarakat pascakolonial menjadi problematis ketika dipakai untuk mencari akar spiritualitas itu di dalam Pancasila sebagai sebuah ideologi nasional. Problematis karena ketika mencari akar spiritualitas Timur yang diklaim sebagai produk ‘alamiah, yang ditemukan sekali-lagi adalah, apropriasi konsep-konsep Barat yang secara retoris direpresentasikan sesuatu yang berakar pada budaya lokal. Ini menjadi jelas terlihat jika memahami konsep ‘gotong-royong’ yang oleh Soekarno disebut sebagai inti dari Pancasila, tetapi jika ditelusuri ke belakang merupakan hasil konstruksi politik kolonialisme. Indikasi lain dapat ditemui pada salah satu elemen pembentuk nasionalisme Indonesia, yaitu budaya (aristokrat) Jawa yang diklaim sebagai akar budaya bangsa Indonesia. Klaim demikian menjadi goyah setelah membaca Nurchlis Madjid (1999) yang menunjukkan bagaimana budaya aristokrat Jawa itu sendiri tidak sepenuhnya bersifat lokal, melainkan terbentuk dari proses asimilasi dengan budaya Eropa selama masa kolonialisme beberapa abad. Tentu saja bisa mengkritik apa yang dikatakan Madjid sebagai pengamatan yang mengandung

bias orientalisme. Ironisnya, tidak memiliki bukti yang ‘autentik’ untuk mengklaim bahwa nasionalisme Indonesia dibentuk oleh warisan akar budaya lokal.

Argumen di atas menunjukkan bahwa, nasionalisme Indonesia sebagai sebuah model nasionalisme masyarakat pascakolonial jauh lebih kompleks dan ambivalen, baik dari kategorisasi Madjid tentang nasionalisme Timur dan Barat maupun penjelasan Chatterjee tentang spiritualitas Timur sebagai satu-satunya wilayah di mana masyarakat pascakolonial mampu membangun autentitasnya. Artinya, domain spiritual dalam nasionalisme Indonesia bagaimana pun diisi oleh elemen-elemen yang melekat erat pada dan lahir dari proses dialektis dengan kolonialisme. Mengklaim bahwa nasionalisme Indonesia berakar secara "alami" pada budaya lokal tidak memiliki landasan historis yang cukup kuat. Dari sini dapat mengambil kesimpulan, yang tentunya masih dapat diperdebatkan, bahwa Indonesia baik sebagai konsep bangsa maupun ideologi nasionalisme yang menopangnya adalah produk kolonialisme yang sepenuhnya diilhami oleh semangat modernitas di mana budaya Barat menjadi sumber inspirasi utama.

Kesimpulan demikian tentu saja memiliki implikasi politik. Namun, ini tak berarti membatalkan bangunan nasionalisme yang telah dibangun para elite nasionalis selama beberapa dekade terakhir. Hanya saja patut disadari, bahwa terlalu tergesa-gesa mengatakan nasionalisme Indonesia telah mencapai titik final. Karena dia masih terus berkembang mencari bentuknya dalam aliran sejarah yang terus mengalir secara dinamis. Inilah titik kritis nasionalisme sebagai sebuah ideologi, memiliki kapasitas mentransformasikan energi sosial ke dalam aksi-aksi politik otoriterianisme. Dalam

konteks ini, kacamata Anderson yang melihat nasionalisme sebagai imajinasi kolektif menjadi kabur dan tidak lagi memadai untuk mengamati bagaimana wacana nasionalisme beroperasi dalam relasi kekuasaan.

Perspektif ini, nasionalisme berada dalam sebuah relasi antara negara dan masyarakat yang menyediakan kekuasaan begitu besar dalam mengendalikan negara. Dalam kondisi demikian, nasionalisme tidak lagi menjadi milik publik, melainkan hak eksklusif kaum elite nasionalis yang dengan otoritas pengetahuan mendominasi wacana nasionalisme. Intinya, nasionalisme berevolusi menjadi alat *manufacturing consent* untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan ekonomi politik kelompok elite nasionalis. Untuk menghindari jebakan ideologis ini, wacana nasionalisme harus dilepaskan dari dominasi institusi negara (sipil atau militer) dalam mendefinisikan nasionalisme. Wacana nasionalisme harus diletakkan dalam ruang publik di mana setiap kelompok masyarakat dapat dengan leluasa menguji secara kritis dan memberi kontribusi kreatif terhadap wacana nasionalisme. Dengan demikian, nasionalisme menjadi arena ekspresi sosial dan budaya masyarakat yang demokratis.

Gejala tindak kekerasan nampaknya merebak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi selama masa pembangunan jangka panjang pertama. Pembangunan yang dititik beratkan pada bidang ekonomi telah meningkatkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik yang memerlukan dukungan pranata sosial yang menjamin keadilan sosial (*social justice*), demokrasi politik (*political democracy*) dan kebebasan budaya (*cultural freedom*). Penerapan teknologi maju yang mahal biayanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, telah memperkenalkan nilai-nilai merkantil, materialistik dan

kompetitif yang memacu timbulnya persaingan. Tetapi, persaingan tanpa aturan main yang jelas akhirnya mengembangkan persaingan tidak sehat dan merangsang tindak kekerasan (*violent conflict*). Hanya sejumlah kecil warga masyarakat yang memiliki keunggulan modal, teknologi dan organisasi, yang berhasil menguasai sebagaian besar sumber daya untuk mengejar keuntungan materi.

Merebaknya tindak kekerasan itu sesungguhnya dapat diperkecil, sekiranya iklim demokrasi dikembangkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian sosial (*social control*). Selama ini banyak peraturan yang dibuat dan menyangkut kepentingan masyarakat luas tanpa menyertakan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai merkantil yang diperkenalkan lewat kegiatan perdagangan yang semakin meningkat intensitasnya, telah menghinggapi sementara tokoh masyarakat dan pembuat keputusan. Nilai-nilai yang memacu pengusaha untuk mengejar keuntungan materi sebesar besarnya dengan mengembangkan cara kerja untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi, diberlakukan bukan hanya dalam dunia usaha, akan tetapi meluas dalam bidang sosial, politik dan kebudayaan. Seolah-olah kelembagaan lama yang kurang menjamin efisiensi dalam produktivitas tidak ada tempat lagi dalam masyarakat Indonesia.

Semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dapat digantikan dengan teriakan peran mayoritas tunggal yang justru bertentangan dengan amanat UUD 1945. Demikian pula kebebasan orang untuk berserikat dipasung demi efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Setiap profesi hanya boleh mendirikan satu perkumpulan, semboyan persatuan dan kesatuan hanya berarti kesatuan monolitik yang tidak memberi tempat

bagi keanekaragaman yang dipersatukan. Karena itu, menyampaikan pendapat tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah, dengan mudah dituduh sebagai kambing hitam dan harus siap untuk menghadapi berbagai kesulitan sebelum diperlakukan sebagai kambing korban. Dalam menghadapi suasana sosial demikian, masyarakat cenderung untuk bersikap masa bodoh atau menekan perasaan sampai pada akhirnya meledak dalam bentuk amuk massa membebaskan diri dari tekanan yang tidak tertahan. Kebudayaan Melayu lama dalam cerita Hang Jebat mengamuk, hidup kembali sebagai mekanisme perlawanan, karena kelembagaan sosial yang semula berlaku telah digusur dengan berbagai peraturan dan perundangan bersifat nasional. Sesungguhnya demokrasi politik diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup kelembagan sosial, ekonomi dan politik tradisional yang masih efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Setidaknya masyarakat diberi keleluasaan meredefinisi dan merevitalisasi kelembagaan sosial, ekonomi dan politik yang relevan dengan pesatnya perkembangan masyarakat yang sedang bergeser dari masyarakat agraris (*equilibrious society*) yang berkeseimbangan menuju masyarakat industri yang berkesenjangan (*disequilibrious society*).

Perbedaan kepentingan dalam masyarakat seharusnya dapat diselesaikan sedini mungkin dengan pengendalian sosial yang efektif. Dengan demikian perbedaan kepentingan atau pertentangan sosial tidak harus diselesaikan dengan menggunakan kekerasan sebagaimana terjadi di berbagai tempat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kebebasan budaya tidak kalah pentingnya dalam memberdayakan masyarakat untuk mengahadapi krisis moneter disusul dengan krisis pemerintah yang

didukung oleh kekuatan militer telah menimbulkan kecongkakan dan membangkitkan kembali mentalitas aparat kolonial (*colonial administrator mentality*) pemerintah. Rakyat dianggap bodoh dan terbelakang yang harus dibina. Berbagai kebijakan dibuat sebagai pedoman bagi rakyat dengan memasung kreativitas pembaharuan mereka dalam menanggapi tantangan pembangunan.

Kegiatan mengejar keuntungan materi sementara warga suku bangsa yang telah mengembangkan ekonomi pasar (*market oriented economy*) telah menimbulkan reaksi masyarakat telah bertumpu pada ekonomi subsistensi yang mengutamakan pengelolahan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Kenyataan ini kurang diperhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat, walaupun pada akhirnya mereka harus menghadapinya . Tidak urung, perbenturan budaya antar suku bangsa itu sering kali berlanjut dengan tindak kekerasan. Masih banyak alasan yang memicu tindak kekerasan dalam masyarakat majemuk Indonesia, seperti pergeseran perimbangan kekuasaan sosial, ekonomi dan politik di tingkat nasional, meningkatnya arus informasi dan jaringan komunikasi global hingga dampak kehancuran kubu sosial. Kenyataan ini menuntut pengembangan kebijaksanaan yang dapat membangkitkan semangat kreativitas masyarakat untuk menanggapi tantangan secara menguntungkan. Kebijaksanaan yang kurang memperhatikan keadilan sosial dan kelumpuhan sosial itu harus segera ditanggulangi dengan melibatkan segenap masyarakat termasuk militer yang cukup tinggi keterlibatnya dalam masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik selama ini.

C. Kebijakan Demografi dan Strategi Pembangunan

Mengawali bagian ini dengan sebuah pertanyaan "bagaimana demografi dipresentasekan, dikelola dan digunakan oleh para elite penguasa Indonesia sebagai sebuah faktor kunci dalam konfigurasi sosial ekonomi negara bangsa ini?" Dipandang sebagai sebuah masalah demografi yang amat penting untuk pembangunan negara-bangsa oleh elite penguasa Indonesia, adalah apa yang disebut 'distribusi demografi yang pincang.' Pulau Jawa dan Bali dianggap sudah sangat padat, sedangkan pulau-pulau lain masih jarang penduduknya.

Mencermati akan kondisi demografis dalam konteks pembangunan, maka alasan yang muncul adalah untuk ketimpangan dan pemerataan dalam mewujudkan negara-bangsa yang kuat, serta menciptakan kesejahteraan. Namun, ketika Indonesia melewati setengah abad (50 tahun) kemerdekaan, tanda-tanda ketegangan politik dan kekerasan (konflik) muncul di sejumlah daerah terutama di luar Jawa (daerah-daerah atau tempat di mana beberapa dekade silam orang Jawa dimukimkan) di bawah program transmigrasi pemerintah. Sebuh laporan yang akurat dan layak dipercaya *Norwegian Refugee Council* (NRC) menyimpulkan bahwa, penduduk pemukim berada dalam keadaan yang menyedihkan dan ini sebagian besar karena kebijakan transmigrasi: "sebab-sebab utama perpindahan penduduk di negeri itu berkaitan dengan program transmigrasi yang dijalankan di bawah pemerintahan Soeharto, dengan tujuan mengurangi ketimpangan demografi antara berbagai wilayah negeri itu" (Anwar, et.al: 2005: 66).

Pandangan di atas memberi gambaran sebab-sebab konflik dan penduduk pemukim terlalu simplistis. Meskipun banyak dianut, pandangan ini tidak dapat menjelaskan mengapa konflik dan kekerasan terjadi di sejumlah tempat, tetapi tidak terjadi di temapt lain; pandangan itu tidak dapat menjelaskan mengapa sejumlah perselisihan penuh dengan kekerasan dan sulita diatasi, sementara konflik lain-lain tidak demikian halnya. Menyalahkan transmigrasi berarti mengabaikan kenyataan bahwa, sementara mayoritas transmigran adalah orang Jawa, sebagai kelompok mereka tidak pernah terlibat dalam konflik komunal. Pandangan ini juga mengabaikan kenyataan bahwa, perpindahan penduduk yang terpenting terjadi di luar program transmigrasi. Sejumlah kelompok suku yang penting: Minangkabau, Banjar, Bugis, dan Madura memiliki dorongan kuat untuk merantau, tetapi ini hampir selalu dilakukan di luar program transmigrai yang direncanakan.

Dibandingkan dengan persoalan-persoalan demografi lain dan indikator-indikator demografi lain seperti tingkat kesuburan atau tingkat kematian, tidak heran bila mobilitas penduduk menonjol sebagai faktor yang paling berkaitan dengan konflik sosial dan persoalan-persoalan lainnya. Konflik sosial merupakan ciri utama dari semua perilaku politik, pada ssemua tingkat interaksi manusia, dan peran penting yang dimainkan variabel-variabel penduduk dalam membentuk perilaku politik meletakkan persoalan penduduk dan persoalan konflik sangat dekat satu sama lain. Barangkali sifat kepulauan Indonesia, serta keragaman suku dan agamanya, juga dapat menjelaskan beberapa dari kaitan-kaitan antara mobilitas penduduk dengan konflik sosial, meski ini harus dilakukan dengan hati, atas dasar kasus per kasus.

Demografi Indonesia sudah lama menjadi obyek rekayasa elite. Di samping tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang jelas, tujuan-tujuan strategis dan politik juga menduduki tempat utama dalam program-program itu. Selama hampir satu abad, mengisi daerah-daerah kosong di luar Jawa dengan penduduk sudah menjadi tujuan kebijakan emigrasi pada jaman kolonial dan kebijakan transmigrasi pasca kolonial. Setelah kemerdekaan, integrasi nasional menjadi tujuan utama – dan alasan intervesi yang terus dilakukan dalam bidang demografi. Karena dianggap mengancam integrasi nasional, tidak ada pembahasan mengenai suku dalam kebijakandan dokumen negara. Karena mayoritas transmigran adalah orang Jawa, logis jika 'Jawanisasi' menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan transmigrasi. Karena itu, menjadi titik balik dalam sejarah kebijakan migrasi pemerintah Indonesia ketika arus migrasi sebaliknya terlihat jelas selama lima tahun terakhir, ketika konflik-konflik sosial terjadi di luar Jawa setelah terjadi kritis dan Presiden Soeharto tumbang.

Menarik untuk dicatat bahwa sepanjang menyangkut suku, orang Jawa bukan bagian dari konflik komunal yang terjadi akhir-akhir ini, meski mereka sering menjadi korban dari bentrokan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Beberapa orang Jawa non Maluku ikut dalam konflik Maluku (Utara) sebagai pejuang dari luar, yang dikenal 'laskar jihad' tetapi mereka terlibat setelah konflik berkembang. Absennya orang Jawa dalam konflik jelas bertentangan dengan persepsi umum bahwa transmigrasi adalah penyebab langsung konflik. Kaitan antara transmigrasi dengan konflik, menurut hemat peneliti harus dilihat dari perspektif lain. Kaitan itu harus dilihat: (1) pada tingkat konsep dan tingkat ideologi, dan (2) dalam prraktek diterjemahkan ke

dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tidak selalu harus berlabel transmigrasi.

Distribusi penduduk dan pembangunan daerah, silih berganti mendominasi tujuan-tujuan Repelita I dan II kemudian mendapat tempat yang sama dalam Repelita III. Melalui fokus pemerintah pada pemerataan kesejahteraan di bawah kebijakan yang disebur' Delapan Jalur Pemerataan,' transmigrasi menjadi kendaraan (alat) yang penting untuk mencapai tujuan baru itu. Rencana ini juga menetapkan bahwa prioritas akan diberikan kepada daera-daerah termiskin pengirim transmigran, tempat masalah orang tidak punya tanah paling parah, serta seleksi dan persiapan di daerah penerima juga mendapat peehatian yang lebih baik. Pemerintah menempatkan transmigrasi dalam Repelita III, tidak hanya di tanah kering, tetapi juga di daerah pasang surut. Jumlah transmigran yang meningkat untuk dimukimkan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penyediaan tanah pertanian di daerah penerima. Sebuah perubahan penting dalam kebijakan transmigrasi terjadi pada awal Repelita III.

Perubahan itu dapat ditafsirkan sebagai revitalisasi kekuatan-kekuatan non ekonomi, terutama kekuatan-kekuatan yang diwakili elite militer dan aparat birokrasi pemerintah; perubahan itu dapat dilihat pula sebagai mencerminkan menurunnya pengaruh pemerintah dan teknokrat Bank Dunia. Kenyataan bahwa Bank Dunia membiarkan orientasi demografi yang makin dominan dalam kebijakan transmigrasi untuk mendukung kepentingan-kepentingan militer menyiratkan bahwa Bank Dunia mengambil pendekatan pragmatis. Karena pertimbangan-pertimbangan birokrasi dan

politik, tidak praktis bagi Bank Dunia untuk menarik diri dari keterlibatannya yang luas dalam program transmigrasi.

Kaitan konseptual antara kebijakan transmigrasi dengan konsep militer mengenai keamanan strategis; diungkap oleh Brigjend Edi Sugardo dari Lemhanas (kelompok pemikir, Departemen Pertahanan (1987), bahwa: "Dari sudut pandang 'geo-politik' dan 'geo-strategi,' kebijakan transmigrasi adalah sebuah upaya, metode, dan cara untuk mencapai 'integrasi geografi,' yang merupakan syarat pokok bagi persatuan bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran rakyat, dan untuk membuka kesempatan bagi pemanfaatan sumber daya alam. Integrasi geografi, di satu pihak, akan melindungi bangsa dari kecenderungan-kesenderungan sentrifugal, dan di pihal lain, akan memperkuat kekuatan-kekuatan sentripetal. Integrasi geografi juga sebuah medium untuk membangun saling pengertian, persahabatan, dan kerja sama dengan negara-negara lain" (Anwar, et.al: 2005).

Selama Orde Baru (pasca 1966), transmigrasi mulai dirancang ulang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Namun, melihat kebijakan transmigrasi seolah-olah kebijakan itu semata-mata berkaitan dengan kegiatan pembangunan ekonomi naif dan menyesatkan. Tujuan-tujuan yang sulit ditangkap dan bermacam rupa, serta perubahan-perubahan terus menerus pada lembaga-lembaga pelaksana, memberikan indikasi-indikasi yang kuat bahwa program itu tidak pernah dipantau dan dievaluasi dengan seksama. Persaingan yang tidak dapat dielakkan antara para ahli ekonomi teknokrat, yang melihat program itu terutama sebagai sebuah elemen dari pembangunan daerah, dengan para politisi-birokrat, yang dekat dengan pihak

militer dan kepentingan-kepentingan strategisnya, tidak diragukan lagi melencengkan proses perumusan rencana itu dan pelaksanaannya. Dalam keadaan sulit seperti ini, Bank Dunia, pada awalnya melihat transmigrasi sebagai alat untuk mengembangkan pertanian tanaman keras, tidak memiliki alternatif lain selain menerima bahwa kebijakan transmigrasi menjadi alat utama bagi distribusi penduduk.

Strategi pembangunan ekonomi selama Orde Baru, mendampingi harmoni dan integrasi nasional sebagai slogan fovorit elite militer. Para elite militer melihat bahwa misi mereka adalah menghadapi 'ancaman menurut persepsi' mereka pada persatuan dan integrasi nasional, sementara para ahli ekonomi teknokrat melihat misi mereka sebagai mempercepat kedatangan 'pertumbuhan ekonomi yang direncanakan' berdasarkan keyakinan bahwa ekonomi yang direncanakan secara nasional akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang (Rostow, 1966). Pemikiran mereka sangat diwarnai oleh teori-teori modernisasi tahun 1960-an. Pada awal periode Orde Baru, banyak orang mengira negeri ini sedang bergerak dengan tekad bulat menuju dunia modern dan kesejahteraan ekonomi. Karena itu, landasan ideologi bagi pemerintahan Soeharto: keyakinan bahwa masyarakat dapat direkayasa melalui perencanaan yang rasional dan sistematis untuk mewujudkan tujuan-tujuan akhir, yakni bangsa yang bersatu, aman, dan makmur (Sajogjo, 1985; Fakih, 2002).

Kenyataan bahwa, kesulitan penting dengan asumsi-asumsi di atas adalah 'reduksionisme asumsi-asumsi' itu, yang menyederhanakan kompleksitas masyarakat Indonesia ke dalam satu dimensi geografi. Kedua kelompok (militer dan ahli ekonomi teknokrat), mengabaikan perbedaan budaya dan menganggap orang Indonesia dapat

diatur melalui kebijakan dan program yang sama. Suku, bentuk dasar perbedaan budaya dalam masyarakat Indonesia, diabaikan, bahkan disembunyikan. Orde Baru menterjemahkan pluralisme suku ke dalam ide keseragaman budaya; mencerminkan khayalan elite mengenai masyarakat yang harmonis dan bebas dari konflik.

Upaya memastikan kepatuhan visi ini, Orde Baru menciptakan singkatan baru 'SARA' (suku, agama, ras dan antargolongan) untuk menentukan bidang-bidang yang tidak boleh dibicarakan demi keharmonisan sosial dan stabilitas politik. Selain itu, pihak militer berhasil mengukuhkan 'Dwi Fungsi ABRI' yang menjadi dasar legitimasi bagi perannya dalam bidang sosial politik. Sttabilitas politik, pemertaan dan pertumbuhan ekonomi diperjuangkan melalui slogan baru 'Trilogi Pembangunan' untuk menggantikan slogan 'pembangunan bangsa' dari Soekarno. Selama periode ini, ketika soal-soal politik sebagian besar diurus oleh militer dan urusan ekonomi oleh teknokrat, Indonesia mendapat pujian karena berhasil mengubah perekonomian pertanian menjadi perekonomian industri modern. Namun, gambaran cerah mengenai pembangunan ekonomi Soeharto yang dilukiskan sejumlah pihak, ternyata khayalan belaka. Keruntuhan nilai tukar baht Thailand bulan Juli 1997 memulai spiral krisis keuangan, yang kemudian melanda Indonesia dan membawa tantangan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintahan Soeharto, dan akhirnya mundur Mei 1998.

Kondisi Indonesia pascakepemimpinan Soeharto, memang memungkinkan untuk terjadinya berbagai kerusuhan dan kekerasan, baik yang berciri konflik vertikal maupun horisontal seperti yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara. Faktor utama yang sering dijadikan sebagai kambing hitam adalah melemahnya peran negara

(pemerintah pusat) berikut citra kalangan aparat yang kurang baik selama Orde Baru di mana perilaku mereka terus berlanjut di era reformasi atau Indonesia baru sekarang ini. Barangkali, hal itu juga benar adanya. Tetapi, kalau mengikuti perubahan dari pemerintah yang berwatak militeristik ke demokrasi seperti yang terjadi di era reformasi ini, seperti yang dikatakan para sosiolog bahwa konflik sosial, kerusuhan, dan kekerasan yang terjadi akibat dari proses peralihan pemerintahan militer ke pemerintahan sipil yang disebutnya sebagai *civilization impact*. Korban-korban yang terjadi di tingkat masyarakat berupa kerusuhan dan kekerasan itu merupakan biaya dari proses sivilisasi (c*ost of civilization*) yang harus dibayar oleh masyarakat sendiri. Agaknya, menurut tesis ini, kekerasan dan korban-korbannya tak bisa dihindari dalam proses perubahan dari otoritarianisme ke pemerintahan yang demokratis.

Menurut Esman (1994), pluralisme suku dapat ditelusuri melaui tiga faktor: (1) penaklukan dan aneksasi, ketika suatu bangsa kalah – ditaruh di bawah kekuasaan pemenang; (2) kolonisasi dan dekolonisasi oleh Eropa, yang menggabungkan di dalam wilayah administrasi, yang dibentuk untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kelompok-kelompok penduduk yang tidak memiliki perasaan dekat satu sama lain dan sering dipecah-pecah di antara dua atau lebih negara kolonial; (3) gerakan penduduk sebagai rakyat telah melewati garis-garis batas politik dalam upaya mereka mencari peluang ekonomi atau kebebasan beragama dan berpolitik. Lebih jauh Esman menjelaskan bahwa, ‘kewajiban elite negara adalah membangun bangsa yang bersatu dan seragam, kewajiban suku minoritas adalah berasimilasi; satu-satunya alternatis yang dapat diterima di luar asimilasi adalah perilaku pasif.’

Menggunakan kategori-kategori yang ditawarkan Esman, sumber-sumber pluralisme suku di Indonesia (terutama Maluku Utara) pada dasarnya adalah upaya untuk membongkar warisan kolonial dan membangun identitas nasional yang baru berdasarkan gambaran masyarakat yang dicita-dicitakan. Tidak mengherankan bila elite tradisional dan elite formal menuduh kekuasaan kolonial menggunakan politik *devide et impera* untuk membendung keinginan rakyat yang makin besar untuk mendesak. Semangat nasionalisme generasi pertama para pemimpin lokal maupun nasional diteruskan kepada para pemimpin berikutnya, terutama elite militer dengan perspektif yang jauh lebih sempit.

Hingga saat ini, perspektif nasionalis sempit pihak militer sangat besar pengaruhnya pada pandangan pihak sipil mengenai persepsi tentang ancaman yang harus disingkirkan untuk menjaga kesatuan dan integrasi nasional. Opsesi-opsesi militer berperan sebagai alasan untuk membenarkan pandangan yang sempit ini. Di samping itu, transmigrasi adalah kebijakan yang secara elegan memberikan kepada elit formal sebuah cara untuk mewujudkan dan menyelubungi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Menjelang akhir tahun 1990-an, menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan bisnis tertentu, terutama perusahaan kayu dan pertambangan; mendapat manfaat jauh lebih besar dari seharusnya – dari apa yang merupakan tujuan baru program transmigrasi.

Situasi seperti sekarang, saat di mana konflik komunal dan gerakan separatis menduduki tempat teratas dalam agenda keamanan nasional, merekayasa gerakan penduduk menurut suku dan tanda-tanda identitas lain dapat kembali pilihan

kebijakan jangka pendek bagi pembuat kebijakan nasionalis, dalam rangka merespons teroris global. Tanda-tanda kebijakan ancaman itu akan dihidupkan kembali, antara lain: rencana Menteri Negara untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia Timur, untuk memukimkan kembali penduduk di daerah perbatasan dalam meningkatkan keamanan nasional. Program transmigrasi memiliki kemungkinan besar dirancang ulang agar lebih sesuai dengan kerangka desentralisasi yang makin mencuat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pernyataan ini memang sangat relevan untuk membangun sebuah pola pemahaman sosial budaya yang baru. Pada masa lalu keanekaragaman budaya yang kemudian disusun menjadi mozaik budaya yang berwarna warni atas kekuatan sistem pembangunan nasional. Tampaknya hal itu sangat lemah sebab lukisan yang berasal dari mozaik itu tidak cukup kuat untuk menopang sebuah bangunan bangsa (bangsa Indonesia). Ketika terjadi mobilitas geografis, susunan mozaik itu tidak tersulam kuat, hanya bagaikan gambaran yang menempel sehingga tidak kuat sebagaimana yang diharapkan. Dengan terjadinya mobilitas geografi yang kuat, peta heterogenitas (kemajemukan budaya) yang ada mulai mengalami perubahan. Dahulu, aspek multikulturalisme tergambar sebagai mozaik kain yang menghasilkan gambaran maya. Sekarang ini, aspek multikulturalisme berubah menjadi sebuah ‘permadani’ yang terdiri atas benang-benang budaya yang meliputi beragam budaya antar etnis (suku bangsa) itu mulai merajud atau dalam proses menyulam, untuk membentuk permadani budaya nasional.

Budaya antar etnis tidak bisa dipahami sepotong-sepotong, tetapi harus merupakan rajutan lengkap yang menjadi pemahaman dalam anyaman yang kokoh dan kuat. Parsudi melihat multikulturalisme merupakan pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbendaan-perbedaan, termasuk perbedaan suku bangsa (etnis) dalam masyarakat. Dengan demikian, perbedaan itu harus dipahami dalam wadah-wadah yang transparan sehingga diketahui oleh umum (dalam ruang publik) yang diketahui banyak orang, sehingga tidak kelihatan adanya budaya yang dominan. Hal senada ditegaskan oleh Antropolog UGM, Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra (Kompas, 3 September 2001:32), dalam proses pembuatan permadani: benang-benang yang ada harus disulam mengikuti sebuah desain besar (*grand-design*) dan setiap benang harus tunduk pada aturannya.

Mencermati pandangan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembuatan permadani budaya, unsur hukum merupakan unsur penting. Karena budaya sebagai sistem aturan, tata nilai dan pandangan hidup; dapat dikatakan sebagai sistem hukum dari sebuah masyarakat. Ketika terjadi perubahan dari mozaik budaya kepada permadani budaya, perubahan dalam bidang hukum inilah yang kemudian sangat penting untuk dipahami. Untuk lepas dari masalah yang dialami oleh berbagai suku bangsa, diperlukan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat memayungi keseluruhan sistem-sistem penyelesaian perkara yang lebih kecil, lokal dan khusus. Karena payung yang ada telah dianggap asing dan tidak memenuhi tuntutan akan rasa keadilan, diperlukan sebuah payung baru dengan bagian-bagian yang berasal dari berbagai suku bangsa (termasuk nilai-nilai dalam komunitas lokal).

Membangun kesadaran multikultural di kalangan masyarakat heterogen juga dilakukan dalam proses pendidikan, dalam hal ini perlu dibangun jenis-jenis sekolah multikultural sejak dini. Anak-anak sekolah adalah potensi pengembang basis pergaulan utama dari interaksi multi kultural (beda ras, agama dan struktur sosial – ekonomi), mereka sejak dini akan memiliki pergaulan yang cukup intens dengan beragam pola budaya yang ada dalam masyarakat. Jenis sekolah yang demikian akan berhasil merajut benang-benang keragaman budaya, yang jalin menjalin secara kultural dalam pengamatan peristiwa keseharian yang sangat empirik.

Sejak dini lewat lembaga sekolah yang multi kultural, anak-anak telah membangun pemahaman akan keragaman perilaku masyarakatnya, paham akan adat kebiasaan mereka, penghargaan mereka dan keunikan yang terkandung dalam perilaku mereka. Tetapi karena mereka terbiasa merajut benang-benang itu, maka perbedaan perilaku budaya sejak awal telah mereka ketahui, sehingga di masa dewasa mereka telah memiliki penghargaan yang sama terhadap perbedaan yang mereka miliki. Dengan demikian, sekolah multi kultural merupakan labaratorium hidup yang menjadi ‘miniatur’ kehidupan sosial yang menjadi ajang sebuah upaya ‘rekonstruksi’ secara intensif. Keterlibatan anak-anak sejak kecil akan sangat membantu pola sosialisasi mereka pada masa dewasa dalam rangka pergaulan yang heterogen, di mana mereka akan mengambil keputusan terhadap pola hidup bersama dengan pilihan kepentingan yang serba beragam.

Pada masa sekolah mereka akan belajar ‘membangun’ pemahaman baru, kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah ada di dalam kehidupan keluarga-keluarga

mereka. Mereka belajar bahwa setiap anak akan memiliki pengetahuan bahwa mereka memang telah hadir dan berada secara fisik, juga menyadari bahwa di kalangan mereka ada pula perbedaan atas agama yang direngkuh oleh keluarga secara turun temurun, serta di kalangan mereka juga telah membwa perbedaan kepemilikan (ekonomi) oleh keluarga mereka. Kemudian saling mengdakan pemahaman baru tentang bagaimana membangun sebuah perilaku yang relevan dan serasi bagi kepentingan pergaulan mereka. Atas dasar saling memahami pola perilaku mereka masing-masing, akan tercipta perasaan saling menghargai, menghoormati, emphaty dan menimbulkan persahabatan satu dengan yang lain.

Proses pembangunan yang dilaksanakan dalam kerangka perubahan sosial yang tepat, adalah suatu upaya membentuk suatu upaya yang menentukan konsep penentuan nasib suatu bangsa. Masyarakat dengan pembangunan butuh penentuan nasib sendiri, kebutuhan dasar manusia, kelangsung hidup (*sustaninability*) dan pembangunan berdasarkan pertimbangan lain yang bersifat lokal. Menurut teoritisi mashab alternatif pembangunan nasional haruslah merupakan proses yang endogen, yang di dalamnya mencakup suatu proses yang memiliki kesamaan tertentu dengan teori modernisasi klasik. Masyarakat dalam teori pembangunan alternatif harus mengikuti jalanannya pembangunan mereka sendiri yang terdapat kekuatan sejarah masyarakat lokal, ekologi dan kebudayaan mereka sendiri.

Suatu pandangan yang sedikit banyak menyimpang dari teori pembangunan formal pada tingkat abstraksi yang tinggi. Untuk membangun model pembangunan alternatif atau pembangunan lain (*another development*) dalam tradisi berpikir ilmu-

ilmu sosial, membutuhkan suatu ketegangan penyusunan suatu kosptual yang secara rutin harus selalu diikuti sebagai wacana yang terbuka. Dimensi berpikir itu harus dapat dipahami secara lebih baik, lebih bisa diterapkan secara utuh. Ini berarti teori pembangunan merupakan suatu kesatuan tertentu atau kesepahaman bersama yang akhirnya dapat dicapai kesepakatan. Pembangunan tetap merupakan bidang kajian ilmu sosial yang menarik dan tidak bisa dipisah-piisahkan (*indivisible*) meskipun juga tidak bisa dipersatukan. Teori pembangunan andaikata mengalami pengkajian, bukan berarti merupakan suatu langkah yang surut, tetapi harus menjadi wacana yang harus diperbaiki, disempurnakan karena merupakan proses belajar yang terus menerus dan teratur. Beberapan indikator yang dapat dilihat, antara lain:

1. Banyak gejolak masyarakat lokal akibat krisis masyarakat yang multidimensional, di samping keinginan negara yang masih bertahan dengan gaya pemerintahan yang semakin represif dan otoriter. Krisis tidak lagi tumbuh akibat kesenjangan masalah ekonomi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, tetapi telah berkembang sangat kompleks antara benturan-benturan yang bersifat agama, etnis dan kedaerahan. Konflik kekerasan yang muncul di berbagai daerah akhir-akhir ini (khususnya Maluku Utara), sebagai salah satu indikator dalam studi ini.
2. Pertikaian antar etnis kerap timbul sebagai fenomena yang sering terjadi, dan model perubahan sosial yang terjadi dari aspek ini hampir tidak pernah disadari dalam gambaran lanskap dan sejarah perubahan sosial ekonomi suatu masyarakat (termasuk Maluku Utara). Fenomena ini banyak memakan korban, seperti yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara (1999-2001). Sejauh ini tidak ada upaya

yang sistematis untuk mencegahnya (*conflict prefention*). Perjuangan kemudian dilakukan dengan cara-cara ‘kekerasan lingkungan’ (*environmetal violence*), yakni sebagai proses perubahan lingkungan dan marjinalisasi sumberdaya alam secara massif oleh kekuasaan pemerintah pusat, yang mewarisi ketidak adilan dan mengikis habis martabat etnis yang merupakan basis kebudayaan lokal.

Konflik-konflik antar suku bangsa serta antar kelompok agama yang sejak beberapa tahun terakhir terjadi, berintikan pada permasalahan hubungan antar suku bangsa yang asli setempat dengan pendatang. Konflik-konflik itu justru terjadi karena adanya proses peng-aktifan jati-diri suku bangsa untuk solidaritas membentuk sumber daya yang ada. Karena ideologi kesukubangsaan serta pengaktifan jati-diri suku bangsa itu, seperti yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara; mengakibatkan konflik berkembang menjadi konflik antar suku dan agama. Dengan demikian, pembangunan nasional yang terjadi telah menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis, melainkan sebuah masyarakat yang berpotensi otoriter dan despotis, karena corak suku bangsanya yang beraneka ragam yaitu dari feodalistis, paternalistis sampai etnosentris.

Masyarakat majemuk yang menekankan keaneka ragaman suku bangsa sudah sepatutnya dikaji ulang, untuk kemudian digeser penekannya keanekaragaman kebudayaan. Penekanan pada keaneka ragaman kebudayaan tidak hanya mencakup kebudayaan suku bangsa, tetapi juga berbagai kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat (komunitas lokal) dibarengi dengan kebijakan politik nasional yang menjamin budaya lokal dan kesetaraan derajat.

D. Konsep Persatuan Nasional, Birokrasi dan Konflik

Mengawali sub bahasan ini dengan mengutip sebuah ungkapan Mohammad Hatta, sebagai ilustrasi dalam menjelaskan konsep persatuan nasional hubungannya dengan birokrasi dan konflik. Ungkapan yang dimaksud adalah, "Persatuan yang dicari Persatean yang didapat." Hal ini sangat relevan untuk menjelaskan persatuan semu selama Orde Baru. Karena yang terjadi sebetulnya 'persatean nasional,' di mana pluralisme dan kebhinekaan dikekang dan disatukan dengan sentralisme birokrasi dan organisasi teritorial militer. Di bawah karpet persatuan nasional, tersebut meminjam istilah dari Romo Sandyawan, tersimpan berbagai bom waktu yang siap meledak. Sebab di zaman Orba, konflik dan perbedaan diselesaikan hanya dengan satu cara, yaitu represi atau intervensi negara dengan pembenaran konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Masyarakat tidak diberi kesempatan atau ruang mencari solusi dan jalan damai untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Akibatnya, masyarakat tidak punya pengalaman, inisiatif dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola (manajemen) konflik dan perbedaan.

Dewasa ini, tidak ada alasan untuk membenarkan cara-cara otoriter di masa lalu untuk sekedar menjaga persatean nasional. Harus dikembangkan, dicoba, dan terus disempurnakan suatu model manajemen konflik yang melibatkan masyarakat dan para korban di daerah konflik. Penyelesaian secara *top down*, hanya melalui negara, mungkin sebatas pada penjaga keamanan, tidak lebih dari itu, tapi manajemen dan penyelesaian konflik harus melibatkan partisipasi masyarakat; menggunakan

berbagai sarana yang mungkin dan positif, termasuk nilai-nilai agama, lokalitas, tradisi atau sejarah. Bagi lingkungan Ornop, menejemen konflik juga harus menjadi suatu proyek yang partisipatif, bukan model *top down* , memaksakan paradigmanya kepada masyarakat sebagai laboratorium. Tapi menggabungkan proses partisipasi dengan ide-ide dan mekanisme rehabilitasi sosial atas masyakat didaerah konflik. Cara seperti ini, masyarakat dapat mengembangkan ide-ide perdamaian, rekonsiliasi sebagai bagian dari kehidupan sosial-budaya-ekonomi dan politik.

Penelitian mengenai konflik telah banyak dilakukan, tetapi penelitian tentang konflik hubungannya dengan perubahan sosial belum banyak dilakukan, terutama di Maluku Utara. Karena itu, penelitian ini mencoba menelusuri akar penyebab konflik yang mendorong perubahan sosial dalam berbagai dimensi. Pengamatan dan analisis mendalam, diharapkan studi ini melengkapi di mana yang perlu. Dari penelusuran ulang dan kajian yang cermat, ditemukan bahwa sebagian besar peneliti memusatkan perhatian pada kronologis setiap konflik, dengan fokus pada tahap-tahap pra konflik, dan pasca konflik, atau melakukan analisis mengenai akar-akar konflik, termasuk bias kebijakan pemerintah, kesenjangan ekonomi dan politik, atau apa yang dinamakan ‘kecemburuan sosial.’ Namun, sedikit sekali penelitian yang fokus sebagai titik tolak perhatian bahwa konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, dan sering merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perubahan sosial. Studi ini memutuskan untuk memusatkan hal ini sebagai titik tolak, khususnya di Maluku Utara dengan menggunakan berbagai perspektif: sejarah, sosiologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya (agama).

Proses penngelolaan (manajemen konflik) memang tidak mudah dan butuh waktu, energi bahkan *trial and eror*. Namun, itu jauh lebih baik daripada strategi persatean nasional yang banjir darah dan anti demokrasi. Sebab, persatuan yang beradab haruslah bersandar pada pluralisme. Situasi yang sama terjadi di Indonesia, bahwa konflik mempunyai berbagai jenis. Sejak 1998 berbagai konflik komunal muncul, penelitian ini memusatkan perhatian di Maluku Utara. Konflik tersebut merupakan konflik antar agama, etnis, politik, dan ekonomi, berarti masalah vertikal maupun horisontal. Walaupun dinamika konflik itu berbeda, semua konflik komunal di Indonesia yang disebutkan merupakan konflik fisik dan menghasilkan korban jiwa karena tingkat kekerasan yang tinggi. Karena itu, konflik komunal yang terjadi di Indonesia disamakan dengan kekerasan, dan potensi untuk menggali konflik tersebut menjadi perubahan positif tidak dikembangkan.

Konflik dengan kekerasan masuk secara tiba-tiba ke dalam agenda analisis kehidupan politik Indonesia pada pertenagahan tahun 1990-an. Para peneliti sebelum itu, sama-sama memahami bahwa Orde Baru dibangun di atas landasan kekerasan anti komunisme, dan kejam dalam memperlakukan perbedaan pendapat serta brutal dalam menghadapi pemberontakan. Namun, mungkin saja menjelaskan kekerasan oleh pemerintah dari sisi instrumentalisme. Artinya, kekerasan merupakan satu dari tiga tonggak yang menopang kekuasaan Orde Baru, di samping kinerja ekonomi dan manipulasi ideologi (Anwar, et.al: 2005). Dengan kata lain, Orde Baru menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak bila tidak berhasil menggunakan tutur kata untuk membujuk, atau imbalan untuk membujuk warganya agar mau tunduk pada

kekuasannya. Perdebatan banyak terjadi mengenai sampai sejauh mana ketiga unsur ini penting untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru.

Dalam diskusi-diskusi mengenai politik Orde Baru jarang sekali disinggung mengenai kemungkinan tangan besi rezim itu, telah turut memberikan sumbangan pada ketertiban sosial karena dapat meredam konflik dengan kekerasan dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, sejak jaman kolonial sudah ada diskusi yang hangat dengan menekankan secara intrinsik masyarakat tradisional Indonesia adalah masyarakat yang damai. Gambaran Belanda mengenai orang Jawa sebagai manusia yang paling lembut di muka bumi (*het zachste volk ter aarde*), yang dipelihara baik-baik padahal sejarah Jawa pada abad 18 penuh bersimbah darah akibat peperangan dan pembantaian, seperti diangkat dalam lukisan-lukisan berwarna kepariwisataan mengenai Bali yang tenang dan damai, untuk membangun kesan sebagai akibat dari intervensi dari luar. *Kedua*, barangkali lebih penting, ide bahwa Orde Baru mungkin merupakan sebuah kekuatan untuk kedamaian sosial dibantah oleh pengalaman pembantaian massal orang-orang komunis Indonesia pada tahun 1965-66. Meski hanya sedikit orang yang mengetahui peristiwa-peristiwa ini, namun jelas tidak saja bahwa pembunuhan besar-besaran dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia sendiri, tetapi juga para petinggi Orde Baru yang bermunculan dengan sengaja memperbesar konflik sosial pada periode ini.

Para pengamat pada awal Orde Baru cenderung melihat pembantaian tahun 1965-66 sebagai akhir dari Orde Lama (sisa-sisa dari berbagai ketegangan politik dan sosial yang timbul di bawah Demokrasi Terpimpin dan sebelumnya), ada konsensus

yang makin meluas pada masa-masa kemudian selama masa Orde Baru bahwa, pembantaian-pembantaian itu lebih baik dilihat sebagai era kekerasan dan kekejaman rezim Orde Baru. Selain itu, pada pertengahan hingga akhir Orde Baru, pemerintah telah kehilangan citranya di mana sebelumnya dikenal sebagai "pemerintahan yang terdiri dari serdadu dan teknokrat yang sedikit bicara banyak kerja."

Persepsi umum birokrasi di Indonesia, tidak lain ialah birokrasi pemerintah. Birokrasi dengan segala kelemahannya sudah menjadi milik pemerintah. Dalam hal ini, birokrasi pemerintah sering diartikan sebagai *officialdom* (kerajaan pejabat). Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Dalam birokrasi terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang yurisdiktif. Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi, yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kesuasanaan. Mereka memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Selain itu dalam kerajaan pejabat tersebut, proses komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis (*the files*).

Konsepsi birokrasi Weber yang dianut dalam organisasi pemerintahan (*government*) banyak memperlihatkan cara-cara *officialdom* di atas. Pejabat birokrasi pemerintah adalah sentra dari penyelesaian berbagai urusan masyarakat. Rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, dan bukan pejabat yang tergantung pada rakyat. Pelayanan kepada rakyat bukan diletakkan pada pertimbangan utama, melainkan pada

pertimbangan yang ke sekian. Pengalaman konsep birokrasi pemerintah Weberian yang cenderung menjadikan kerajaan pejabat banyak mendapat kritikan. Salah satu yang mengeritik secara pedas adalah Warren Bennis (1967), menulis bahwa birokrasi Weberian sekitar 25 sampai 50 tahun yang akan datang (dihitung sejak tulisannya itu) akan jatuh dan diganti dengan sistem sosial yang baru yang sesuai dengan harapan masyarakat pada abad ke-20 (Thoha, 2004).

Kritikan Bennis itu didasarkan atas suatu prinsip evolusi bahwa setiap zaman tertentu akan mengembangkan suatu bentuk tatanan sistem organisasi yang sesuai dengan zamannya. Dikatakan bahwa bentuk hierarki piramidal yang dikenal oleh ahli sosiologi sebagai birokrasi dan oleh businesman sebagai birokrasi terkutuk (*the damn bureaucracy*) sudah ketinggalan dari realitas zaman sekarang. Bersamaan dengan Bennis, Lawrence dan Lorch (1967) menyatakan bahwa bentuk organik yang berupa birokrasi itu seyogyanya hanya cocok untuk sutuasi lingkungan kompleks dan tidak menentu, bukannya yang selama ini terjadi hanya untuk hal-hal yang bersifat rutin dan stabil. Karena itu, jika birokrasi ingin selalu *survive*, maka birokrasi harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah.

Kritikan yang lebih mutakhir dilontarkan oleh Heckscher dan Donnellon (1994), kedua penulis mengemukakan bahwa bentuk organisasi masa depan adalah *Post Bureaucratic Organization*. Organisasi masa depan menurut kedua penulis tidak akan sama dengan birokrasi Weberian. Dengan kata lain, bentuk organisasi masa depan tidak hanya menempatkan diri pada koherensi internal dan pemusatan kekuasaan, tetapi juga memusatkan pada interaksi eksternal dan interaksi sosial yang

berhubungan dengannya. Kekuasaan bukannya satu-satunya alat yang ampuh untuk melaksanakan mekanisme birokrasi tanpa diimbangi kewenangan melalui persuasi dan dialog. *Powering* bukan lagi satu-satunya cara mengendalikan mesin birokrasi pemerintah tanpa harus diimbangi dengan caca-cara yang bersifat *empowering*.

Dewasa ini, ramalan Bennis dan para kritikus lainnya telah banyak menjadi kenyataan. *Officialdom* ternyata mulai pudar, salah satu wujud telah pudarnya kerajaan pejabat ialah dilakukan gerakan redormasi dalam birokrasi pemerintah, antara lain berusaha mengubah sikap keterbukaan pelaku-pelakunya. Adalah hampir tidak mungkin melakukan perubahan dan pembaharuan prosedur dan aliran kerja menjadi lebih lancar, melakukan pembaharuan pelaayanan kepada masyarakat agar lebih responsif, dan melakukan perubahan struktur birokrasi agar mampu bersaing, tetapi menghalangi orang-orangnya untuk berkembang. Birokrasi yang tertutup dan *centralized* cenderung menghasilkan kelangkaan *open people* di dalamnya. Itulah sebabnya upaya untuk mereformasi birokrasi pemerintah yang paling mendasar ialah bagaimana bisa mengubah *mindset* dan *perilaku* dari para pelaku birokrasi publik.

Salah satu perubahan yang perlu dilakukan adalah pandangan birokrasi terhadap kekuasaan (*power*) yang cenderung menjadikan birokrasi sebagai kekuatan yang sakral. Kekuasaan birokrasi yang diwujudkan dalam jabatan pejabat bisa sangat menakutkan, dan hampir tidak mungkin bisa ditembus oleh lapisan masyarakat yang sangat lemah di hadapan kekuasaan birokrasi tersebut. Perbuatan menyakralkan jabatan birokrasi pemerintah hampir tidak bisa lagi dihindari orang Indonesia. Segala urusan dari yang kecil sampai yang besar selalu membutuhkan legitimasi birokrasi

pemerintah. Rakyat membutuhkan dan memperoleh rejeki maupun pelayanan selalu berhubungan dengan pejabat, pegawai dan pelaku-pelaku birokrasi pemerintah. Semua pemborong atau rekanan dari yang kecil pribumi sampai yang konlomerat yang keturunan membutuhkan rejeki melalui pejabat birokrasi ini. Rakyat kecil sampai yang besar membutuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau bentuk perizinan-perizinan lainnya selalu menjumpai pejabat-pejabat ini

Ciri birokrasi Weberian adalah kekuasaan itu ada pada setiap hierarki jabatan, semakin tinggi hierarki jabatan tersebut semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah hierarkinya semakin tidak berdaya (*powerless*). Hierarki yang paling bawah (*beyond the hierarchy*) adalah masyarakat atau rakyat. Pada posisi ini mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan. Disiplin birokrasi model Weber ini menyatakan bahwa hierarki bawah tidak berani atau tidak boleh melawan kekuasaan hierarki atas. Di Indonesia hierarki kekuasaan ini dibalu dengan sistem bapak atau patrimonial, sehingga menjadi kental praktik birokrasi ini. Pejabat hierarki bawah tidak berani bertindak jika tidak memperoleh restu dan petunjuk dari hierarki atas. Semua surat-surat dinas yang berasal dari pejabat hierarki bawah selalu diakhiri dengan kata-kata manis “mohon arahan dan petunjuk” dari pejabat hierarki atas.

Perilaku birokrasi Indonesia selalu diwarnai dengan sikap *nyuwun sewu* (minta seribu), seperti orang Jawa yang mau lewat melangkahi posisi orang tua. Ini merupakan sikap sopan (*proper behaviour*) yang harus dilakukan oleh orang Jawa yang kekuasaannya lebih rendah dari orang yang dimintai seribu tersebut. Dengan demikian, meminta petunjuk itu merupakan sikap sopan yang harus diperlihatkan

agar tidak melampaui kekuasaan yang berada di luar kekuasaannya. Tidak ada rasa salah (*guilty*) jika meminta petunjuk. Pejabat tersebut tidak ada sedikitpun keraguan untuk dikatakan tidak mempunyai inisiatif atau kreatif, seperti yang umumnya menjadi ukuran bagi manajemen rasional yang juga menjadi ciri lain birokrasi Weberian. Dengan kata lain, birokrasi Weberian di Indonesia sedikit banyak telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia.

Sikap-sikap sopan yang melenceng dari rasional model Weber tersebut banyak dijumpai dalam praktik perilaku birokrasi pemerintah. Sikap ini berlindung pada kekuasaan yang berada pada hierarki yang kesemuanya mempunyai hak-hak istimewa berupa fasilitas kekuasaan. Pengawal pribadi, ajudan, dan pejabat protokol pada birokrasi sipil merupakan jabatan-jabatan yang dipandang berlebihan dan cenderung menyakralkan jabatan-jabatan itu. Meminta pengawalan, disediakan fasilitas VIP, membawakan naskah pidato, dibukakan pintu mobil, dibawakan tas kerja, dan lain sebagainya adalah contoh-contoh kelebihan kekuasaan yang berada di hierarki atas yang pada gilirannya membuat sakral jabatan hierarki dan memperkuat *officialdom* di Indonesia.

Otoritas yang sering disebut *untouchable* tiba-tiba ternyata bisa diruntuhkan, institusi sipil, institusi militer, hampir semua berebut pengaruh. Sementara pada saat yang sama, bangsa ini belum memiliki kultur yang mengedepankan hukum sebagai penyelesai persoalan baik di level masyarakat maupun di level elite. Karena itu, sangat mudah *stereotip-steriotip* yang sudah dipendam dan tidak pernah diselesaikan dalam masyarakat dengan mudah diprovokasi untuk menjadi konflik kekerasan.

Pertanyaan krusialnya adalah setelah 1997-1998, tiba-tiba konflik meledak menjadi kekerasan yang sangat tragis dan melibatkan banyak komponen. Hal itu terjadi karena ada *intervensi - the circle of power* dan kepentingan politiknya. Kondisi itu tidak mampu lagi diselesaikan di tingkat internal masyarakat dengan *traditional wisdom*-nya, karena ada intervensi. Upaya untuk menghentikan konflik kekerasan itu, merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat untuk bangsa ini, karena ini berkaitan dengan penegakan hukum, budaya hukum, dan politik. Dengan demikian, tidak bisa diselesaikan oleh elit. Model Malino adalah salah satu contoh pendekatan *topdown*, yang bisa meredusir kekerasan di Ambon dan Poso. Tetapi itu sama dengan mempeti-eskan energi konflik di antara masyarakat, tanpa mencoba memfasilitasi masyarakat yang berkonflik. Karena itu, yang harus dilakukan ialah mengajak seluruh komponen yang terlibat dalam konflik dan meminta kerendahan hati pemerintah untuk terlibat dalam *stakeholder* penyelesaian konflik.

Kelemahan yang sering disiasati orang, tetapi kelemahan yang paling sulit dan menyedihkan, adalah kemampuan dan keberanian untuk menyiasati hukum. Yang paling gamblang dapat dilihat dalam kasus Inpres untuk Papua. Meskipun sudah punya UU Otsus (Otonomi Khusus), muncul Inpres seperti petir disiang bolong dan dia mencederai kewenangan di atasnya (hanya contoh kecil), dan itulah *inconsistency* elite dalam upaya penegakan hukum. Kelemahan ini sekaligus menyumbangkan banyak hal dalam proses-proses konflik di Indonesia. Sehubungan dengan itu, menyangkut tentang konflik komunal yang sering terjadi di Indonesia, secara garis besar dijelaskan bahwa, sejak runtuhnya rejim Orbe Baru, tiba-tiba dipertontonkan

serial kekerasan dari Sabang sampai Papua. Kompleksitas persoalan konflik di Indonesia harus dilihat bahwa, kegagalan hampir di semua institusi.

Bertitik tolak dari gambaran dan uraian di atas, studi ini menemukan bahwa peran para elite terutama elite formal di Maluku Utara dalam mencetuskan konflik kekerasan antar suku dan agama berpijak pada pilihan teori rasional. Indikator yang jelas dapat dilihat (dianalisis) adalah pola penyerangan (konflik) antara dua kelompok dengan menggunakan momentum tertentu, misalnya: proses perjuangan pembentukan provinsi Maluku Utara, menjelang dan sesudah penetapan ibukota Provinsi Maluku Utara, pemilihan umum (legislatif dan presiden), pilkada kabupaten/kota. Terjadinya secara serentak pergeseran, dan pergeseran secara besar-besaran menurut garis agama dalam pemilihan partai dan pemilu, seperti elite dan suara Protestan.

Perbedaan agama di satu tempat tidak akan meledak menjadi konflik kekerasaan tanpa dipicu oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Ambon misalnya, sebagai perkembangan kepentingan elite politik di pusat, diformat sedemikian halus dan rapi sebagai konflik antara Islam dan Kristen. Demikian juga Poso, yang sebenarnya adalah pertarungan politik antara beberapa pihak yang berkepentingan untuk jabatan tertentu di daerah, yang kemudian mengerahkan massa Kristen dan Islam untuk bertarung. Hal seperti itu juga yang terjadi di Maluku Utara karena Kepres No. 44 yang membagi dua daerah (Malifuf-Kao), dan berkaitan dengan pemilikan tambang emas di Malifut.

Demikian dapat disimpulkan bahwa, diluar pihak yang berkonflik ada sebuah kekuatan struktural atau kekuatan lain, yang kadang lebih mempertajam konflik dan

menghambat jalan damai. Sebenarnya, masyarakat memiliki mekanisme tradisional dan internal untuk menangani dan menyelesaikan konflik. *Pela Gandong* di Ambon, meskipun cuma mengatur dan mengurus antar dua etnis, tetapi untuk waktu yang lama, pertengkaran semacam itu tidak perlu menjadi satu konflik yang berdarah-darah seperti sekarang. Begitu juga di Maluku Utara, antara lain *Forum Bakubae* di samping nilai-nilai budaya dan institusi-institusi yang telah terbukti mempersatukan dua komunitas masyarakat yang berbeda agama (Islam dan Kristen) sejak raturan tahun yang lalu. Di Halmahera Selatan, khususnya Bacan; institusi yang dimaksud adalah *Saruma* dan di Halmahera Utara, khususnya Galela Tobelo; disebut *Hibua Lamo* sebaga institusi (lembaga adat) yang dapat mempersatukan dan mendamaikan dua komunitas, yang sesuangguhnya adalah bersaudara meski berbeda agama.

Kadang-kadang usaha menghadapi konflik, keadilan (*justice*) dikorbankan atas nama sebuah perdamaian. Rekonsiliasi sebenarnya bukan pengampunan tanpa proses pengakuan. Rekonsiliasi itu bisa jalan, kalau ada pengakuan dari orang-orang yang bersalah. Persoalannya: "apakah yang menjadi korban bersedia mengampuni atau dibawa ke pengadilan." Jadi, rekonsiliasi itu dibangun di atas kebenaran dan keadilan. Bukan kebenaran yang dibangun di atas rekonsiliasi, kalau rekonsiliasi seperti itu sama saja yang terjadi seperti selama ini sifatnya *top down*.

Selama ini tidak ada upaya untuk mengungkap siapa yang salah dan siapa yang benar dalam penyelesaian semua konflik di Indonesia. Kelompok-kelompok yang *promote* rekonsiliasi sekarang sebenarnya tidak bergerak di area rekonsiliasi, melainkan bergerak di area *conflict resolution* dan *conflict transformation.* Selain itu,

belum punya instrumen dan mekanisme yang *clear* ke titik rekonsiliasi. Singkatnya, tidak melakukan rekonsiliasi. Perbedaan antara *conflict resolution* dan *conflict transformation.. Conflict resolution* adalah penanganan penyelesaian masalah, berarti sifatnya temporer. C*onflict transformation*, tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah, menangani, melanggengkan proses damai. *Conflict transformation* adalah upaya membudayakan dan menginstitu-sionalisasi mekanisme penanganan konflik dan menggali potensi-potensi konstruktif konflik itu dalam rangka perubahan-perubahan di level personal maupun komunal. Sebelum sampai kesana harus *clear* dulu apa sisi destruktif dan sisi konstruktifnya. Dengan demikian, ide dasar dari *conflict transformation* adalah membudayakan penanganan konflik, untuk menggali energi konflik yang terbangun dari konflik itu.

Common Ground Indonesia (CGI) adalah Organisasi Independen nirlaba yang tidak memihak kepada agama, ideologi dan suku tertentu. Dengan semboyan "Kenali Perbedaan, Berbuat untuk Kebersamaan," organisasi ini memperkenalkan bahwa konflik dan perbedaan adalah bagian dari kehidupan, dan keduanya justru bisa menjadi sesuatu potensi yang bernilai positif. Tahun-tahun awal, CGI mengadakan tiga program; pertama, drama radio tentang pemecahan konflik yang diproduksi dan disiarkan pertama kalinya di Indonesia. Drama radio ini berisikan pemecahan konflik yang disajikan dalam bentuk opera sabun. Kedua, penerbitan buku-buku komik populer berseri yang dibuat untuk kalangan remaja, yang membicarakan tentang konflik dan penyelesaiannya tanpa kekerasan. Ketiga, program penyelesaian konflik di daerah-daerah yang rawan konflik bekerja sama dengan masyarakat setempat,

termasuk memfasilitasi forum dialog, menggunakan media lokal secara kreatif, membuat kurikulum khusus tentang toleransi antar kelompok, membuka komunikasi antara pihak yang bertikai dan program-program lainnya. CGI merupakan bagian kerja perdamaian yang dirintis oleh organisasi *Common Ground Internasional* yang berpusat di Washington dan Brussels.

Menyangkut tentang perspektif perubahan sosial adalah sangat kompleks, berbagai sumber (informan kunci) memeberikan penjelasan secara memuaskan. Ada beberapa sumber yang memiliki kontribusi secara relatif, namun hampir dipastikan tidak ada satu pun pengkajian ilmu sosial yang berdiri sendiri. Demikian, perubahan sosial dalam kaitannya dengan pendidikan. Masalah-masalah pendidikan seringkali dicermati sebagai masalah teknis belajar dan mengajar dalam ruang lingkup kelas yang terbatas. Kebijaksanaan pendidikan nasional masih dikelola dengan pendekatan yang sangat positivsm. Masalah-masalah pendidikan tidak pernah atau jarang sekali dicermati dalam bentuk kekuatan kelembagaan sekolah, interaksi kelembagaan sekolah dengan masyarakat, intervensi birokrasi pendidikan, pengaruh kelembagaan pendidikan tradisional, dan bentuk-bentuk swadaya masyarakat dalam peningkatan kegiatan pendidikan. Pemikiran perubahan sosial merupakan arus berpikir utama (*mains-treams*) yang bermuara pada ditemukannya fenomena baru yang berguna bagi masyarakat. Banyak masalah pendidikan yang dapat dilihat dengan jelas dengan memanfaatkan kerangka perubahan sosial.

Peristiwa pendidikan adalah bertolak dari kesadaran kultural yang secara kolektif dirasakan masyarakat. Seringkali dapat terjadi suatu peristiwa pendidikan

sedang berlangsung, tetapi orang mensikapi sebagai peristiwa politis karena menyangkut penyampaian aspirasi kebutuhan sekelompok masyarakat. Demikian halnya, pendekatan sistem organisasi dalam masyarakat model Talcott Parsons sangat diminati oleh pemerintahan Orde Baru (akhir 1960-an sampai 1990). Dalam semua sistem semua kebijaksanaan pembangunan selalu berlandaskan kepada konsep keseimbangan dan keamanan (*security*). Perubahan sosial sebagai fenomena mikro yang sering dijumpai kalangan peneliti ilmu sosial, adalah akibat dari menguatnya pengaruh birokrasi di kalangan masyarakat. Program-program pembangunan yang di-introdusir pemerintah dilakukan oleh lembaga pemerintah yang diatur dengan sistem birokrasi yang kuat. Proyek-proyek pembangunan di semua sektor kehidupan masyarakat tidak lepas dari kekuatan penyelenggaraan birokrasi pelaksana yang berasal dari masing-masing departemen teknis.

Hal ini dapat diamati dalam pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, kesehatan, politik dalam negeri, pendidikan, agama, pembangunan sarana pekerjaan umum, pertambangan dan energi. Akibatnya, pembangunan nasional menghasilkan strategi pendekatan yang mengarah pada penguatan kekuasaan di tingkat pemerintah (lokal, kabupaten, provinsi dan nasional) serta mengabaikan potensi penguatan basis masyarakat lokal. Dalam konteks Maluku Utara pasca konflik, konsep pembangunan kawasan tertinggal memiliki arti penting dalam upaya mengatasi berbagai gejolak yang muncul sebagai akibat ketidak puasan berbagai komponen masyarakat terhadap model penyelesaian konflik, dengan pendekatan-pendekatan seperti yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru.

E. Paradigma *Civil Society* Dalam Masyarakat Plural

Indonesia dikenal sebagai masyarakat plural (majemuk) dalam multi-dimensi, antara lain disebabkan: perbedaan etnis, kultur, bahasa, agama, tingkat sosial, pengelompokkan organisasi politik, dan lain sebagainya. Berbagai konflik dalam realitas kemajemukan masyarakat Indonesia ditengarai telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Nuansa-nuansa kesukuan, kedaerahan, keagamaan maupun perbedaan paham, persepsi dan tendensi politik antar kelompok masyarakat menjadi penyulu bara konflik. Salah satu yang menarik perhatian penulis yang diangkat dalam penelitian ini, adalah konflik bernuansa 'SARA' di Maluku Utara tahun 1999-2001. Studi ini memusatkan perhatian pada pasca konflik, khususnya "strategi penanganan konflik" atau dalam studi ini disebut: "Manajemen Konflik." Dampak dari konflik tersebut, dapat dilihat dari berbagai dimensi terutama dalam konteks pembangunan daerah kaitannya dengan "*Civil Society*."

Dalam sejarah pergerakan nasional, wacana *civil society* ikut memainkan peranan di dalam merintis pembentukan Negara Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional. Namun, pada saat itu konsep *civil society* masih lemah dalam struktur masyarakat setelah kemerdekaan, negara akhirnya mengemban tugas membangun masyarakat. Secara teoritis Negara Republik Indonesia mengalami tiga tahap perkembangan, yakni: tahap pertama disebut, *state building* yang melahirkan negara pasca kolonial (*post colonial state*). Sementara perkembangan negara terus berjalan, muncullah tahap kedua yang disebut, *nation building*, yakni revolusi politik yang

diikuti revolusi sosial. Pada masa Orde Baru, Indonesia memasuki tahap baru, yaitu tahap ketiga yang disebut, pembangunan ekonomi (*economic development*).

Ketiga-tiganya merupakan proses yang tidak selesai, bahkan mengalami kegagalan. Gerakan *speratism* dan berbagai pemberontakan bersenjata, konflik vertikal antara negara dan masyarakat, konflik horizontal antara etnis maupun agama di tengah masyarakat disinyalir sebagai akibat kegagalan dari proses *state-building* tersebut. Ternyata proses kontrak sosial yang diperkirakan terjadi pada tahap *nation-building* tidak cukup kokoh, sehingga berakibat pada meletusnya konflik horizontal. Proses pembangunan ekonomi juga mengalami kegagalan dengan timbulnya krisis moneter yang diikuti berbagai krisis multidimensional.

Mengatasi berbagai konflik dan krisis di Indonesia secara mendasar, pemberdayaan *civil society* sangat penting dipertimbangkan. Studi ini bermaksud menyegarkan kembali semangat *nation-state nationalim* melalui paradigma *civil society* sebagai strategi alternatif penanganan konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Maluku dan Maluku Utara. Perlu disadari bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang paling problematis. Di satu pihak, konflik mempunyai dinamika instrinsik untuk menundukkan, menindas, merusak dan membunuh. Kesadaran itu terungkap dalam konsep politik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Di lain pihak, ada pelbagai teori konflik yang membicarakan tentang fungsi positif konflik dalam perkembangan suatu masyarakat.

Konflik muncul dalam kehidupan nyata, karena adanya persaingan antar-individu atau antar-golongan dalam suatu masyarakat atau bahkan antar-negara dan

bangsa. Seringkali hal ini terjadi karena persaingan dalam penguasaan akses atau pengontrolah terhadap sumberdaya maupun berbagai kesempatan yang terbatas. Secara leksikal konflik sosial diartikan sebagai pertentangan antaranggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Karena itu, konflik dapat dipahami sebagai suatu pertentangan antardua kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Dengan demikian, pengertian ini dapat mencakup kasus konflik dan potensialitas konflik (Zeitlin, 1998).

Berdasarkan pengertian di atas, perlu dibedakan dengan tegas antara ‘onflik’ dan ‘situasi yang dapat menimbulkan konflik.’ Hal ini dimaksudkan agar jelas adanya ketegangan emosional, kepentingan-kepentingan yang secara obyektif saling bertentangan belum merupakan konflik. Terjadinya konflik apabila antara dua kelompok dalam masyarakat mengambil jalan hendak memaksa. Konflik dalam konteks ini berarti bahwa, masing-masing pihak untuk mencapai tujuannya tidak memperhatikan kehendak dan otonomi pihak lain. Konflik diputuskan bukan sesuai dengan keadilan atau menurut hak-hak yang terlibat, bukan pula dengan kebenaran, melainkan menurut yang menang atau yang kuat. Konflik selalu merupakan usaha untuk mencapai sesuatu dengan menundukkan, memaksa, atau membunuh pihak lain; suatu usaha di mana nilai pihak lain, martabatnya, haknya, tidak masuk hitungan. Selain itu, akal budi, tanggung jawab, pertimbangan moral dan segala apa yang merupakan keluhuran manusia diabaikan.

Konflik selalu dipertentangkan dengan perdamaian dan integrasi. Damai; di samping kebenaran, bukan hanya nilai sosial semata, tetapi merupakan nilai sosial

yang fundamental. Dari pemahaman ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, keselarasan yang diperlukan manusia tidak berdiri dalam keseimbangan antara damai dan konflik, melainkan dalam damai yang sempurna. Di lain pihak, integrasi atau damai dapat hidup berdampingan dengan konflik. Dalam teori konflik diungkapkan keseimbangan hubungan sebenarnya bisa ditata kembali. Karena itu, untuk lebih memahami fenomena perdamaian dan integrasi, seyogyanya fenomena konflik harus dapat dibedah dengan baik. Hal ini karena konflik sesungguhnya merupakan kenyataan hidup, baik yang terjadi di tingkat mikro berupa hubungan antar pribadi hingga ke tingkat makro berupa hubungan antar kelompok organisasi, masyarakat dan negara. Semua bentuk hubungan dalam masyarakat baik sosial, politik maupun ekonomi sesungguhnya mengalami perubahan dan perkembangan.

Memahami hal tersebut, dalam membahas pembangunan masyarakat di mana pun selalu bergerak dalam irama dialektika antara tradisi dan reformasi, antara integrasi dan disintegrasi, antara kesepakatan dan pengingkaran, antara perdamaian dan konflik. Bila tradisi, integrasi, kesepakatan dan perdamaian diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup dan pembentukan identitas bangsa, maka reformasi, disintegrasi, pengingkaran dan konflik dibutuhkan untuk membuka peluang tersusunnya pembaruan dan pengembangan kebudayaan. Keanekaragaman entitas etnis baik dari segi agama, bahasa dan budaya merupakan aset yang berharga untuk meningkatkan kreativitas bangsa Indonesia, baik secara parsial maupun secara kolektif. Keanekaragaman dapat mengundang “dinamika sosial” yang sangat berharga. Namun perlu diperhatikan pula bahwa, ketidakadilan sosial dan ekonomi

merupakan ancaman terhadap kesatuan dan persatuan nasional. Mereka yang tidak diperlakukan secara adil, berpotensi akan memunculkan pertentangan, disintegrasi dan konflik sosial (Madjid, 1999).

Demokratisasi pada prinsipnya mendasarkan diri pada pluralisme, keadilan sosial ekonomi dan hak-hak asasi manusia. Namun sejak kemerdekaan hingga dewasa ini terutama melalui dua bapak bangsa; Soekarno (rejim orde lama) dan Soeharto (rejim orde baru), kenyataan itu menjadi utopia belaka. Dalam era reformasi sekarang ini, gerakan masyarakat bangkit dalam benetuk-bentuk vulgar, sehingga sukar untuk dikendalikan. Konflik terbuka (antar etnis dan agama) seakan tiba-tiba meledak. Sekarang baru menuai luapan perasaan "*sparatism*" yang telah disemaikan oleh rejim Soekarno dan oleh politik "belah bambu" Soeharto yang telah berkuasa lebih tiga dekade. Politik belah bambu adalah "satu diangkat satu dipijak" yang dijalankan secara sistematis, sehingga dalam suatu proposisi ada kelompok etnis yang diberi prioritas dan perlindungan (seperti kelompok etnis Tionghoa di bidang perdagangan, Jawa di bidang birokrasi, pemerintahan dan TINI/Polri), tetapi ada pula terus menerus dicurigai dan dipinggirkan, sehingga menimbulkan permusuhan dan dendam di kalangan mereka (Rahardjo, 1993).

Disadari sepenuhnya, bahwa kemajemukan agama (*relegius plurality*) dan etnis merupakan faktor potensial untuk membangkitkan konflik di tengah kehidupan masyarakat. Wilayah agama dan etnis memang sangat sensitif, karena itu siapapun harus pandai-pandai menjaganya. Pertentangan antar masyarakat yang dipicu terutama kasus etnis dan agama akan berdampak luas dan menimbulkan luka

mendalam, yang sembuhnya memakan waktu relatif lama. Beberapa kasus konflik yang dapat dicatat sepeti: ‘peristiwa situbondo,’ ‘peristiwa kelabu Glodok,’ pertarungan suku Dayak dan Madura di Kalimantan, Konflik Psos, Maluku dan Maluku Utara, Timika (Papua), serta berbagai tindak kekerasan kriminal politik lainnya yang masih dirasakan dampaknya hingga saat ini.

Selain itu, gerakan ‘*sparatism*’ seperti Aceh Merdeka, Papua Merdeka, RMS, dan sebagainya masih saja terdengar menggema di bumi Nusantara. Anarki sosial, main hakim sendiri (*vigilante*) telah menjelma menjadi pembengkakan massal (*mass-disobedience*), di tengah penghujatan terhadap TNI-Polri, sehingga penegakan humum hampir tidak dapat berjalan. Sampai sejauhmana penegakan hukum, demokratisasi, kedamaian dan kerukunan hidup masyarakat ditunaikan? Sejauhmana akar kultural agama *sparatism*, *vigilante*, dan *mass-disobedience*, memiliki relevansi dengan kekecewaan etnis dan agama terhadap sistem politik pemerintah? Sehingga pengkajian secara menyeluruh untuk menata kembali struktur kehidupan masyarakat yang berlandaskan *nation state* melalui paradigma *civil society* di Indonesia perlulah disegarkan kembali.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, menerima sikap dan pemikiran yang berbeda-beda belum membumi. Keberanian mempersoalkan, bertanya dan mengkritik belum diterima sebagai ciri khas kebudayaan masyarakat. Sampai saat ini yang diutamakan adalah “musyawarah” atau diskusi yang dipimpin oleh seorang pakar atau tokoh dari generasi tua. Dalam suasana yang dikuasai oleh ‘kepakaran’ atau kehormatan, suatu ‘diskusi’ merupakan pemberian petuah dan tidak

menggalakkan pertanyaan dan keterbukaan yang berbobot dari generasi muda. Pergeseran dari musyawarah ke ‘dialog’ memerlukan reorientasi pikiran, sikap yang terbuka (*gentlement*). Dalam dialog yang benar, komunikasi keterbukaan sudah barang tentu akan memunculkan percekcokan. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan, sebab perselisihan dan perbedaan pendapat adalah dasaran sistensi baru. Tanpa reaksi dan penyelesaian alternatif, pembenaran sama sekali tidak akan pernah terwujud.

Kultur masyarakat Indonesia seperti digambarkan Tholkhah (2001), bersifat konfliktual, yang tergambar dari sejarah konflik komunal yang panjang (Islam dan Kristen, pribumi dan non pribumi, pendatang dan penduduk asli). Dalam kehidupan masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, yang dibutuhkan adalah keterbukaan sikap dan pemikiran. Sebagaimana keaneka-ragaman budaya dan etnis yang diakui dan diutamakan dalam semboyan negara ‘Bhinneka Tunggal Ika’ (*Diversity in Unity*). Kenyataannya yang ditekankan ialah ‘kesatuan’ bukan ‘kenakeragaman.’ Padahal, kalau yang ditonjolkan itu ialah “kenakeragaman,” mungkin akan lebih menunjukkan realitas yang sesungguhnya. “Keanekaragaman dan kesatuan” sebagai mozaik dari perwujudan *civip society*, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pengindonesiaan kata *civil society* memiliki banyak makna. Padanan kata yang sering diterjemahkan adalah ‘masyarakat madani,’ ‘masyarakat kewargaan,’ ‘masyarakat sipil,’ ‘masyarakat berperadaban’ atau ‘masyarakat berbudaya.’ Dalam konteks Islam, konsep negara seperti itu pernah ada dalam konsep negara-kota

Madinah, seperti dilukiskan oleh seorang orientalis, Montgomerry Watt yang menyebutnya dengan istilah “Konstitusi Madinah,” yakni masyarakat pluralis (Culla, 1999). Dalam konstitusi ini, diperoleh rumusan mengenai prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslim dengan berbagai kelompok non Muslim di Madinah. Di bawah kepimpinanan Rasulullah swa, untuk tujuan membangun masyarakat politik secara bersama. Prinsip-prinsip Konstitusi Madinah yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian adalah menyangkut egalitarialisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dll), keterbukaan partisipasi seluruh warga masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.

Selanjutnya, negara-kota itu berkembang menjadi negara bangsa (Arab) dan negara multi-etnis, multi-nasional, multi-budaya, yang dihadapkan masyarakat Badui atau lebih khusus lagi masyarakat jahiliyah yang belum menjalankan syariat Islam (tidak tercakup dalam Konstitusi Madinah). Dalam hal ini, agar terus memperkaya makna penyempurnaan konsepsi *civil society* serta untuk mengkontekstualkan dan mengefektifkan pembentukannya dalam konteks historis dann geografis, termasuk di Indonesia, maka penggalian elemen dasar *civil society* dari berbagai perspektif, tradisi pemikiran, aliran filsafat, agama atau pengalaman praktek kemasyarakatan lain, tidak bisa dielakkan. Salah satunya adalah menggali elemen nilai-nilai Islam yang secara geografis merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Islam memiliki doktrin yang kuat dalam mempengaruhi dan menggerakkan perilaku pemeluknya. Hal yang mendasar mencermati konsep *civil society* dalam kaitan dengan kebijakan dan

langkah-langkah pengelolaan konflik di Maluku Utara, adalah nilai-nilai Islam yang telah dipraktekkan para sultan di empat kesultanan (Moloku Kie Raha) jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Asing (Eropa), hingga sekarang. Bahkan dewasa ini ada upaya untuk mengembalikan budaya 'Moloku Kie Raha' yang syarat dengan nilai-nilai Islami sebagai salah satu solusi pengelolaan konflik.

Sejarah perjalanan negeri ini, Islam yang termasifestasi lewat perilaku para pemeluknya terbukti mempunyai peran penting dan menentukan. Potensi doktrin Islam untuk menyediakan titik-titik temu pada tingkat normatif dengan wacana *civil society* menurut Hikam (1996), tidak perlu diragukan. Islam tidak hanya mengajarkan ritus-ritus ketuhanan, tetapi juga menyediakan konsep-konsep dasar dalam kehidupan sosial-politik, bahkan pergumulan Islam dengan praksis sosial, ekonomi dan politik telah berlangsung sejak masa awal kelahirannya. Karena itu, kemampuan Islam dalam menyediakan pijakan teologis serta mendorong keterlibatan pemeluknya dalam pembentukan wacana dan praksis *civil society* di Indonesia sangat signifikan dalam mempercepat terwujudnya tatanan masyarakat ideal yang didambakan oleh seluruh komponen bangsa.

Dalam konsep *civil society*, masyarakat dipimpin dan tunduk pada hukum. Penguasa, rakyat dan siapa pun harus patuh dan taat pada hukum yang berlaku. *Civil society* secara umum dimaksudkan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang bercirikan kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan berkurban (menolong satu sama lain), dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati bersama. Paling tidak dari sejumlah literatur, terdapat minimal lima model pemaknaan *civil society*.

Pertama, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan (ini yang paling kuno). *Civil society* identik dengan *state* (negara), pemhaman ini dikembangkan terutama oleh Aistoteles (384-322 SM). Sejalan dengan pemaknaan di atas, pada masa pencerahan (*enlightment*), istilah *civil society* kemudian dikembangkan oleh filsuf-filsuf sosial seperti Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704), yang membicarakan hak-hak azasi manusia seiring dengan tumbuh kembangnya masyarakat kota yang relatif makin independen dari masyarakat feodal di pedesaan. Pada saat itu *civil society* dipahami sebagai suatu wilayah yang mencakup masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat ekonomi (*economic society*). Dalam masyarakat alami oleh Hobbes digambarkan sebagai kumpulan orang di mana berlaku manusia adalah srigala bagi orang lain, karena belum mengenal hukum (*homo homini lupus*), sedangkan dalam *civil society* anggota masyarakat telah melepaskan berbagai haknya melalui proses perjanjian kemasyarakatan (*social control*). Lembaga perjanjian itu bisa berwujud perkumpulan atau organisasi yang menetapkan dan mencapai tujuan bersama melalui kegiatan bersama berdasarkan aturan-aturan tertentu. Dari sinilah kemudian berkembang lembaga yang namanya negara (*state*) yang mencakup suatu bangsa (*nation*). Negara yang didasarkan konsep bangsa inilah yang disebut negara-bangsa (*nation-state*).

Kedua, dimaknai sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial yang bercirikan solidaritas sosial dan terilhami oleh sentimen moral serta sikap yang saling menyayangi antar warga secara alamiah (Gellner, 1995:68-90). Timbulnya gejala pasar sejak abad ke-16, merupakan bagian

dari *civil society* yang dalam karya klasiknya *An Essay of Civil Society* (1767). Dalam wacana ini, *civil society* dihadapkan dengan *state of nature* (masyarakat alami) yang dibatasi di lingkungan individu dan keluarga.

Ketiga, Thomas Pain (1972) yang mulai memakai *civil society* dalam posisi diametral dengan negara, bahkan *civil society* dinilai sebagai antitesis negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya hanyalah kenicayaan buruk (*necessary evil*) (Rasyid, 1997:4). Kondisi inilah yang kemudian mendorong George Wilhelm Friedrich Hegel bereaksi dan berseru bahwa *civil society* harus tetap terkontrol oleh aturan main, hukum dan administrasi yang melibatkan negara. Menurut Hegel, struktur sosial terdiri dari tiga entitas, yaitu keluarga, *civil society* dan negara. Intervensi negara dalam masyarakat, menurutnya bukan tindakan illegitimate. Karena negara adalah pemilik ide universal, dan hanya pada tataran negara politik bisa berlangsung murni serta utuh. Hegel kemudian mengajukan dua kondisi yang mengabsahkan intervensi negara dalam masyarakat. *Pertama*, jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidak-sederajatan masyarakat. *Kedua*, jika terjadi ancaman kepentingan universal masyarakat. Tentu saja negaralah yang berhak menentukan kriteria kepentingan universal itu.

Karl Marx, memahami *civil society* sebagai ‘masyarakat borjuis’ dalam hubungan produksi kapitalis, di mana keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karena itu, negara harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas (Gellner, 1995:59). Berbeda halnya dengan Antonio Gramsci (1937) tidak memahami *civil society* dari relasi produksi, tetapi

lebih pada sisi ideologis. Gramsci kemudian meletakkan *civil society* pada basis superstruktur, berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai *political society*. *Civil society* adalah tempat hegemonik di luar kekuatan negara, di dalamnya aparat mengembangkan hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat. Proses ini memungkinkan munculnya kontra hegemoni dari luar kekuatan negara. Ceritra akhir dari semua proses itu adalah terserapnya negara dalam *civil society,* sehingga terbentuklah sebuah masyarakat teratur (*regulated society*). Kalau Hegel dan Marx cenderung pesimistis dengan kemandirian *civil society,* maka Gramsci lebih bersifat optimistis. Pemaknaan dari ketiga pemikir di atas, disebut dengan "elemen ideologi kelas dominan" dikategorikan sebagai model keempat dari pemaknaan *civil society*. Namun, yang dilupakan Hegel bahwa esensi dari civil society adalah kemandirian dari warga negara, bukan kekuatan negara sebagai terminal akhir dari segala keputusan dan hukum (Bobbio, 1988:77).

Alexis De' Tocqueville, menetralisir dengan mencoba mengembalikan makna *civil society* pada prinsipnya semula, yakni menempatkan kemandirian dan pluralitas sebagai asasnya yang utama, namun tanpa mengabaikan peran negara di dalamnya (Syamsuddin: 2000), inilah sebagai model *kelima* dari pemaknaan *civil society*. Bahwa warga negara harus mampu mengimbangi kekuatan negara sepanjang mereka memiliki kemandirian, berpegang teguh pada pluralisme dan memiliki kompetensi politik yang cukup akan melanggengkan jalan menuju cita-cita masyarakat ideal, bertoleransi dan memiliki etika serta norma sosial yang tertata dengan apik. Model terakhir ini kemudian diperkaya oleh Hannah Arendt dan Juergen

Habermas dengan konsep “ruang publik yang bebas” (*the free public sphere*). Setiap warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mempublikasikan penerbitan yang berkenan dengan kepentingan umum. Institusionalisasi ruang publik ini, antara lain: media massa, sekolah, gedung pertemuan umum, dan parlemen.

Civil society model Tocqueville, menjadi basis kehidupan masyarakat modern, yang berlandaskan toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom dan konstitusionalisme. Dalam perspektif pembangunan masyarakat (*civil society*), unsur kemandirian tidak hanya dalam wacana verbalistik, ia harus diwujudkan sebagai suatu kepribadian yang mendasar dan mampu melahirkan kecenderungan-kecenderungan psikologis seperti kreativitas, dinamika, prakarsa dan inovasi yang menjadi ciri dominan kemandirian. Di sinilah perlunya meletakkan unsur etika dalam struktur kemanusiaan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak dan berbuat (*free will dan free act*). peran etika dalam konteks ini adalah membimbing kepeibadian dalam aktualisasi kemandirian, mengembangkan setiap potensi kerohanian yang instrinsik dalam diri manusia.

Dalam menetapkan kebijakan pembangunan negara, potensi *free will dan free act* ini harus tetap dijaga sebagai bagian penting dari pesan moral agama. Dalam konteks masyarakat yang plural sepeti Indonesia misalnya, kebhinekaan secara kultural maupun agama akan dapat terus dipelihara dengan konsesnsus umum mengenai nilai dan norma yang dihormati bersama. Ia tidak harus tunduk pada

formulasi doktrinal, apalagi menuruti salah satu agama. Itulah sebagai "*civil religion*" atau "*social ethics*" perlu dikembangkan oleh para pemeluk agama. Olaf Schumann mengatakan konsep "*civil religion"* dengan memisahkan organisasi keagamaan dan organisasi negara dari pelembagaan yang membuatnya tunduk pada kepentingan lain, sehingga agama-agama bebas untuk menentukan sendiri bagaimana cita-citanya yang berkaitan dengan kehidupan yang dapat di bawakan dalam suatu dialog sosial dengan golongan lain (Bellah, 2000).

Wacana *civil society,* setiap warga negara bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama. Dalam konteks ini *civil society* dapat dipahami sebagai dasar gagasan demokrasi. Dengan kata lain, hanya dalam *civil society* yang kuat demokrasi dapat ditegakkan, sebaliknya hanya dalam situasi demokrasilah *civil society* kemudian dapat berkembang secara wajar. Menurut Cak Nur, *civil society* adalah "rumah" persemaian demokrasi. Perlambang demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Namun demokrasi tidak hanya bersemayam dalam pemilu. Jika demokrasi harus punya "rumah", maka rumah itu adalah *civil society*. Hal senada dikatakan oleh John Keane (1999), bahwa dalam perspektif *civil society,* demokratisasi tidal melulu dimaknai sebagai gerakan diametral dan antitesis negara. Tergantung situasi, *civil society* bukanlah musuh bebuyutan, juga bukan teman kental kekuasaan negara. Tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasan negara, tetapi juga tidak bisa dibangun tanpa kekuasan negara.

Demokratisasi tidak semata dimanifestasikan dalam gerakan protes atau pemogokan yang vulgar, namun gerakan halus, gradual dan di bawah permukaan serta kurang terpublikasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan penyadaran masyarakat luas dalam pelbagai dimensi, politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya juga dapat dikategorikan sebagai gerakan pro-demopkrasi. Melalui gerakan seperti itu, pribadi-pribadi demokrasi dapat dibentuk. Dengan demikian, *civil society* harus bermuatan visi etik yang seirama dengan kepentingan menjaga kohesi sosial dan menghindari titik ekstrim yang justru dapat melahirkan *chaos*. Pada situasi yang *chaos*, tentu paradoks dengan semangat *civil society* itu sendiri, yang menimbulkan sikap otoritarianisme. Masyarakat yang berbudi luhur atau berakhlak mulia iktulah inti dari masyarakat berperadaban, masyarakat madani atau *civil society*. Untuk lebih jelas pemahaman tentang upaya pemberdayaan *civil society* pada masyarakat plural, penjelasan Nurcholis Madjid (1999:171-180), agak relevan untuk dipertegas kembali, bahwa pangkal dari tegaknya masyarakat madani (*civil society*) adalah pandangan hidup semangat ketuhanan, dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia, di atas landasan keadilan antara lain bersendikan keteguhan dan berpegang pada hukum. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang siapa yang terkena akibatnya. Meskipun mengenai diri sendiri, orang tua atau sanak keluarga, bahkan terhadap orang yang palin dibenci, sikap adil harus ditegakkan.

Masyarakat berperadaban tidak akan terwujud, apabila hukum tidak ditegakkan dengan adil, dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan pribadi-pribadi yang tulus mengikatkan jiwanya kepada

wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman kepada Tuhan secara etis. Namun kiranya itikad baik pribadi tidak cukup kuat untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, tetapi ia harus merupakan buah keimanan yang diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan nyata dalam masyarakat berupa "*amal salih*", yang secara takrif adalah tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan sosial sebagai konsekuensi langsung dari itikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan.

Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimis-positif tersebut, perlu dipahami bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik. Hal ini karena setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar. Kesiapan untuk mendengar itu sendiri memerlukan perangkat dasar moral yang amat penting, yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri selalu berpotensi untuk membuat kekeliruan. Kekeliruan atau kekhilafan terjadi karena manusia merupakan makhluk yang lemah, sedangkan keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar. Keadaban (*civility*) menuntuk setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menghindar dari kebiasaan merendahkan orang atau kelompok lain. Lebih lanjut, Cak Nur menjelaskan bahwa, tegaknya nilai-nilai hubungan yang luhur seperti toleransi dan pluralisme, adalah kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban tersebut. Hal ini karena toleransi dan pluralisme yang dimaksud tidak lain adalah wujud dari "ikatan keadaban" (*bond of civility*), dalam arti sebagaimana telah dikemukakan bahwa

masing-masing pribadi atau kelompok dalam suatu interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri.

Civil Society dalam Penanganan Konflik

Jiwa dan semangat *civil society* diyakini dapat menumbuhkan semangat pembangunan dan sikap demokratis yang mampu mengeliminir konflik-konflik internal dalam masyarakat sebagai batu sandungan yang dapat menjegal proses pembangunan dalam skala makro maupun mikro masyarakat Indonesia ke depan. Tema ini semakin disadari penting, mengingat dewasa ini menghadapi berbagai persoalan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa, terutama daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Maluku (Utara) dan Papua, sehingga sangat membutuhkan lem perekat yang dapat memobilisasi semangat persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan daya saing sekaligus dapat mengeliminir perbedaan (pluralisme). Kemudian dengan kekuatan yang ada dapat menyatukan potensi yang berserakan menuju pembangunan *nation-state* yang tertatih-tatih akibat perubahan-perubahan struktur dan nilai masyarakat yang sangat sporadis bergeser akibat eforia reformasi yang nyaris kebablasan.

Menyimak kondisi bangsa Indonesia dewasa ini muncul keprihatinan akan pengalaman empirik dalam proses pembangunan, karena belum diikuti oleh suatu usaha serius dari bangsa ini untuk membentuk *civil society*, di mana negara menghargai hak-hak dasar dari rakyatnya. Walaupun pemerintah secara formal

berupaya menyatakan bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan unsur yang paling utama dalam menciptakan keberhasilan pembangunan Indonesia dengan membentuk berbagai organisasi yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah atau forum di mana rakyat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Soetrisno (1995:44), ada beberapa permasalahan atau hambatan yang menjadi sebab mengapa organisasi-organisasi itu tidak mampu menciptakan *civil society* seperti yang diharapkan. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain:

Pertama, organisasi-organisasi yang ada kecuali LSM, pada umumnya bukan merupakan suatu organiisasi yang bersifat otonom. Kebanyakan organisasi yang ada dibentuk oleh pemerintah, sehingga mereka sangat tergantung baik dari segi program maupun dana, serta dijabat oleh pejabat atau mantan pejabat pemerintah. *Kedua*, aspek penting dari *civil society* adalah toleransi dari pihak pemerintah suatu negara terhadap pikiran alternatif yang datang dari rakyatnya termasuk kritikan terhadap berbagai kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Namun kalangan aparat pemerintah masih cukup enggan memahami makna penting pikiran alternatif dan kritik dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Masih tumbuh subur persepsi bahwa kritikan dipandang sebagai pembangkangan, *subversib* dan *streotype* lainnya yang pada intinya diianggap sebagai manifestasi oposisi atau sikap yang berlawanan dengan kebijaksanaan pemerintah. Kondisi ini dapat menimbulkan *clash* atau konflik vertikal antara pemerintah rakyat. *Ketiga*, lemahnya partei politik dan pers Indonesia sebagai wahana masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia.

Akibat absennya *civil society* dalam proses pembangunan selama lebih dari dua puluh lima tahun (rezim Orde Baru), yaang pada kenyataannya belum mampu menciptakan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi modern sebagai dasar pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tanpa terbentuknya tatanan *civil society* dalam proses pembangunan, maka akan kehilangan makna emansipatifnya dan dengan demikian harus menghadapi banyak kesulitan dalam usaha lebih lanjut untuk mengeliminir berbagai bentuk konflik menuju terciptanya kedamaian dan pemerataan pembangunan. Hasil analisis dan temuan peneliti pasca konflik 1999-2001 khususnya di Maluku Utara menunjukkan bahwa, untuk bisa keluar dari berbagai persoalan yang melatarbelakangi timbulnya konflik yang berkepanjangan terutama konflik antar elit yang diformat sedemikian rupa sehingga konflik yang muncul seolah konflik 'SARA' terutama konflik agama (Islam dan Kristen). Konteks ini ada benarnya bila disimak perjalanan sejarah Moloku Kie Raha (Emapt Kerajaan Islam) yang berpengaruh sejak awal terbentuknya Maluku Utara. Dengan kata lain, untuk memperbaharui kondisi masyarakat Maluku Utara pasca konflik 1999-2000 perlu dilihat dan diidentifikasi masalah-masalah pokok secara jelas untuk dapat merumuskan cita-cita dan tujuan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Berdasarkan konteks ini, maka yang terpenting dalam upaya penyelesaian berbagai konflik terutama konflik berlabelkan suku dan agama, adalah "penjernihan pikiran" terutama para elite formal. Hal ini bisa dicapai apabila ada keberanian untuk mengungkap latar belakang timbulnya konflik bernuansa 'SARA' dalam hubungan dengan sejarah, seperti di Maluku Utara terutama eksistemsi empat kesultanan

Moloku Kie Raha, meliputi: Kesultanan Makian (Bacan), Kesultanan Moti (Jailolo), Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Terfnate. Hal ini perlu ditelusuri karena dewasa ini banyak penulisan tentang sejarah Moloku Kie Raha yang tidak sesuai dengan fakta empiris (menyimpang dari konteks yang sebenarnya). Dengan kata lain, penulisan sejarah Moloku Kie Raha lebih dititik beratkan kepada kepentingan elite penguasa (baik elite formal maupun tradisional sehingga banyak menimbulkan kontravesri yang pada gilirannya menimbulkan konflik yang lebih luas.

Soedjatmoko (1985:13), mengajak untuk perlu mengadakan konfrontasi dengan diri sendiri dan dengan dunia sekitar. Dari pangkalan ini penentuan kembali tujuan-tujuan bersama akan dapat memberi daya penyusunan dan dorongan untuk menguasai masalah-masalah yang mencirikan kondisi yang sebenarnya serta upaya pemecahan secara cepat dan tepat. Dengan cara demikian akan dapat menyelami sumber pencipta dari kebudayaan-kebudayaan daerah dan mengerahkan kebudayaan-kebudayaan tersebut demi terciptanya bentuk dan isi masyarakat baru, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta individu yang baru. Persepsi seseorang tentang masyarakatnya akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: status dan posisi, latar belakang dan minat intelektual, budaya, serta kecenderungan politiknya (Maslow, 1999:106). Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, agama, individu dan masyarakat, hal ini sangat potensial sebagai pijakan untuk dapat keluar dari berbagai masalah konflik.

Kaitan *civil society* dengan agama, sebagai kontribusi penyelesaian masalah adalah menyangkut nilai-nilai kebebasan dan toleransi yang merupakan cerminan dari

masyarakat *civil society*. Namun kenyataannya, umat beragama seringkali tidak terbiasa berpandangan demikian. Agama-agama justru mudah terperangkap pada kecenderungan totalitarisme dan absolutisme karena senantiasa merasa digoda untuk menerapkan kemutlakan Tuhan yang diakui dalam dirinya sendiri. Hal inilah yang menjadi penghambat perkembangan *civil society*. Karena itu dalam agama diperlukan proses belajar terutama bagi masyarakat plural (majemuk), agar kondisi-kondisi yang menunjang terwujudnya *civil society* dapat berkembang. Agama sebagai intrumen dalam memahami dunia, di mana agama tetap dapat memainkan perannya di tengah proses globalisasi. Dalam hal ini, agama tidak akan berada di pinggiran dalam proses tersebut. Jelasnya secara teologis maupun sosiologis, tidak ada kesulitan bagi siapapun untuk menerima premis tersebut, yakni agama baik melalui simbol-simbol maupun melalui nilai-nilai yang dikandungnya hadir di mana-mana (*omnipresence*), ikut mempengaruhi bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi maupun politik, serta kebijakan publik. Hal ini dapat segera dipahami bahwa di mana pun susatu agama berada, diharapkan dapat memberi panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

Agama harus dipahami sebagai salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Agama tidak hanya dipandang sebagai ibadah rutin belaka, lebih dari itu melingkupi seluruh segmen kehidupan manusia. Jadi, dapatlah dipahami bahwa ruang lingkup agama sangat multidimensi, ia menjadi pijakan untuk dapat keluar dari setiap problema yang dihadapi manusia. Dalam konteks demikian, agama dapat dijadikan sebagai strategi pemecahan masalah konflik

vertikal dan horizontal di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Dalam banyak kasus, agama di samping memiliki kekuatan mempersatu, ia juga mempunyai potensi untuk memecah belah. Kesan ambivalensi agama juga dapat dilihat dari konsep ‘perang dan damai,’ merupakan akibat logis dari watak-watak agama yang dapat mendorong pertentangan dan konflik keagamaan. Watak-watak itu antara lain: adalah watak penyebaran agama (*absolutisme*) dan watak keharusan penyebaran agama (*ekspansionisme*). Pertautan antara kedua watak ini merupakan faktor memicu dan memacu konflik antarumat beragama. Selain faktor teologis yang menyangkut perbedaan doktrin keagamaan di atas, sebenarnya konflik antarumat beragama juga disebabkan oleh faktor yang bersifat kultural, yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam kasus demikian, agama sangat rentang memunculkan persoalan-persoalan konflik (intoleransi). Hal ini disebabkan karena posisi agama sampai sejauh ini disejajarkan dengan kesukuan, rasisme, dan antar golongan, yang tercermin dalam kosep SARA di Indonesia. Perlu disimak pandangan Nurcholis Madjid, agar agama tidak disejajarkan dengan suku dan ras. Betapapun semangat yang terdapat dalam akronim SARA, mungkin dapat dibenarkan tetapi dari sudut pandang yang lebih luas dan jangka panjang, sebenarnya sangat merugikan, terutama dalam bidang pembangunan agama. Dampak negatif agama berupa daya pecah belah (*sentrifugal*), juga konflik dapat dieliminir. Dampak positif berupa daya pemersatu (*sentripetal*) dapat dibangun dan dikembangkan.`Menyadari akan hal itu, sudah saatnya untuk mencari terobosan baru dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam

kehidupan beragama, harmonis dan penuh toleransi seperti yang diidam-idamkan *civil society*. Dalam konteks ini, dirasakan sangat perlu toleransi beragama disegarkan kembali, sebab setiap agama sesungguhnya mengajarkan kasih sayang dan toleransi, cara pemahaman dan pengalaman para penganutnyalah yang seringkali membuat ajaran tersebut menjadi kabur.

Filsafat Politik dalam *Civil Society*

Filsafat politik dalam menjelaskan *civil society,* cenderung polemis berhadapan dengan konsep "masyarakat madani." Pertaruhan nilai tradisi dan kesejarahan dalam penafsiran filsafat politik, dan pertaruhan kontekstualisasi dalam konsedp masyarakat madani. Ketegangan ini selalu mewarnai pendekatan filsafat. Bila selalu menekankan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan cara berpikir akan abstrak serta kering, maka perlu juga mengacu kepada prinsip-prinsip dan acuan-acuan yang digunakan para politikus sendiri untuk melegitimasi praktik politik mereka. Dengan kata lain, filsafat politik tidak bisa mengabaikan perkembangan ilmu politik. Ilmu politik memiliki ciri khas deskriptif, analisis dan penjelasan karena ambisi keilmiahannya. Ilmu politik ingin menjangkau ideal sebuah pengetahuan yang obyektif dan menerapkan prinsip bebas nilai (netralitas) aksiologis (yang tentu tidak mungkin).

Filsafat politik lebih refleksif, sintesis, dan menyeluruh sehingga menuntut pengambilan jarak untuk tetap kritis terhadap realitas politik. Filsafat politik selalu menentukan cara pandang tertentu dan menuntut suatu penilaian (sintesis), serta unsur

normatif sangat kental. Karena itu, refleksi filosofis hanya mungkin dengan penjelasan dari sebuah ideal yang mengandaikan sebuah konsepsi tentang manusia dan tujuannya. Pendekatan filsafat politik tidak bisa lepas dari acuan ke sejarah filsafat politik yang berkembang sejak jaman Yunani. Pendekatan ini berfungsi sebagai pembanding, kritik ideologi, kontekstalisasi, dan peran mendasar. “Filsafat merupakan upaya rasional untuk memahami struktur-struktur dasar pengalaman dan realitas.” Struktur-struktur dasar adalah pengalaman dan realitas politik. Selalu terulangnya kerusuhan dan pembunuhan massal bukan hanya masalah insiden yang diakibatkan oleh situasi politik saat itu, namun memiliki akar yang dalam: masalah ketidakadilan, ingatan kolektif dibungkam, ideologi yang mencipta individu massa, pengawasan panoptik. Tema-tema ini mengungkap struktur-struktur dasar realitas kekerasan politik tersebut.

Permasalahan yang dewasa ini cukup mengusik para filsufis politik ialah memburuknya antara filsafat politik dan politik itu sendiri. Karena untuk membangun suatu disiplin, filsafat politik harus mampu memaparkan pernyataan-pernyataan normatif yang terkait dengan politik yang baik. Filsafat politik harus menelusuri kembali sampai pada suatu hakikat kekuasaan, hukum, demokrasi. Selain itu, filsafat politik dituntut memahami kebaharuan yang berkembang dewasa ini seperti transformasi negara, demokrasi, kewarganegaraan, kekerasan politik, kecenderungan pada primordialisme. Tuntutan tersebut mencerminkan betapa sulitnya hubungan antara filsafat politik dan politik itu sendiri.

Para politikus sendiri kalau menganalisis perilaku dan tindakan mereka akan sadar bahwa mereka cenderung menjauh dari prinsip-prinsip dan pengertian-pengertian yang menjadi struktur pemikiran politik. Penyebab kecenderungan itu ialah karena obsesi kebutuhan untuk mendapatkan dukungan, di mana fokusnya pada mobilisasi massa. Dengan demikian, maka demagogi, wacana manipulatif, "tujuan menghalalkan cara," masih terlalu dominan dalam kehidupan politik di Indonesia. Karena itu, keprihatinan filsafat politik untuk memahami masyarakat sebagai warga negara yang mandiri, masyarakat yang ambil bagian dalam menentukan pilihan-pilihan bersama, hanya sebuah utopia.

Filsafat politik tidak boleh larut dalam normativitas dan utopia. Ia tidak bisa melepas diri dari kondisi konkret kehidupan politik dan realitas perilaku para politikus serta warga negara. Pendekatan akan mengantar filsafat politik semakin terbuka pada suatu realisme politik, yaitu tindakan yang mengubah (praksis). Dengan demikian, filsafat politik menerima bahwa politik mempunyai lingkupnya yang khas. Filsuf harus belajar dari politik tanpa keinginan menganeksi, tapi dengan keprihatinan memahami apa hakikat politik itu sendiri. Karena itu, pada tahap teori, yang bekerja ialah landasan filosofis, argumentasi, kejelian analisis; sedangkan pada tahap praktik, menyimpan informasi, aktivitas politik, penggunaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Namun pada tahap teori, bisa saja terjadi refleksi filosofis partisan. Misalnya seorang filsuf yang berasal dari lingkungan buruh membuat refleksi filosofis tentang penderitaan kelompok yang dieksploitasi, tekanan pada solidaritas kepada mereka yang ditindas dengan segala teknisitas konseptual dan argumen logis serta sistematis.

Para filsuf melihat tugas utamanya merasionalisasi penghayatannya dalam suatu filsafat yang dikonstruksi sesuai dengan keadaannya (Rush, Michael & Phillip Althoff, 2000).

Sejalan dengan pandangan di atas, filsafat politik menyelubungi konspirasi oportunis dengan politik sehingga mengaburkan perbedaan antara etika dan sosiologi. Hal ini cenderung diikuti Mashab Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas I) yang dipengaruhi oleh arah filsafat Marxian yang yakin akan kesatuan organis antara teori dan praksis. Dengan demikian, mashab ini mengabaikan etika politik. Karena itu, hakikat politik dari semua riil sosial harus membawa kepada penggunaan politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan kekuasaan, suatu visi emansipasi sosial akan menemukan jalannya. Tidak ada refleksi yang mandiri tentang politik, nilai moral yang dapat memobilisasi, dan yang dapat mewujudkan tanpa memperhitungkan dengan seksama intelektual secara keseluruhan. Politik adalah bidang di mana moral dan kriteria trasenden lain tidak mempunyai tempat. Hanya satu yang mungkin yaitu pemahaman strategi liku-liku politik sebagai praksis sejarah. Verifikasi sahih tidaknya pemikiran terletak pada kemampuan membawa perubahan sejarah.

Sejauh konsepsi filsafat politik didasarkan pada politik riil, filsafat tidak mempu memberi petunjuk melawan arah sejarah. Demikian yang menjadi ukuran sejarah adalah efektivitas, bukan refleksi kritis. Pada gilirannya ditunjukkan bahwa, bukan rakyat yang memerintah melalui Sang Pangeran (anggota Dewan atau Partai), tetapi kelompok masyarakat yang paling terorganisir dan efektif (elite birokrasi, elite

kapitalis, militer, atau kombinasinya) yang akan memegang kendali kekuasaan. Filsafat politik selalu dalam ketegangan antara tuntutan politik-riil, di satu pihak, mendasarkan pada deskripsi empiris situasi riil, praktik-praktik politik dan institusi-institusi politik; di lain pihak, mengacu pada kehidupan politik yang baik, kebebasan moral dan politik (Plato, dan Aristoteles).

Masalahnya adalah "bagaimana menggunakan data-data empiris untuk merefleksi tentang norma, perubahannya, perbaikannya, dan kritik." Dengan kata lain, bagaimana membuat sintesa antara "yang seharusnya" dan "yang faktual". Menurut Catherine Audard (filosuf Prancis), "suatu teori politik normatif selalu konseptual, dalam arti mendasarkan pada deskripsi empirik *hic et nunc* .... Suatu teori normatif harus selalu menguji kembali prinsip-prinsipnya, norma-normanya, dan nilai-nilainya dari informasi baru, konteks sosial, budaya, teknologi yang baru" (Haryatmoko, 2003:9). Hal ini berbeda dengan mengatakan bahwa "prinsip-prinsip politik tergantung pada konteks sosio-budaya." Determinisme semacam ini dapat membawa ke relativisme budaya karena tidak membedakan antara fakta sosial dan penilaian normatif.

Tugas pertama adalah mengusulkan suatu penjelasan isi normatif yang ditunjukkan oleh sejarah, fakta ekonomi, sosial, dan budaya. Tugas filsafat politik adalah menganalisis secara refleksif, menyingkap dan mendiskusikan secara kritis isi normatif yang ada dalam konteks sosio-budaya, serta merumuskan kembali dalam rangka prinsip umum dengan metode pembenaran yang mudah dipahami. Sementara berhadapan dengan situasi kemanusiaan yang plural baik dalam hal budaya, gaya

hidup, nilai maupun norma, filsafat politik mencoba penalaran manusia dalam kerangka komunikatif atau dialogis (Habermas) dan bukan yang mengatur secara universal (Kant). Teori Rawls dan Habermas membidik bukan universalitas, tetapi apa yang diterima sebanyak mungkin anggota masyarakat; dari konteks konkret yang terbuka terhadap penafsiran yang berbeda, melalui diskusi. Teori normatif semacam ini mulai dari keyakinan yang dipertimbangkan secara dalam, dari institusi moral yang khas suatu komunitas.

F. Globalisasi, Perubahan Nilai dan Pola Perilaku

Sub pembahasan ini mencoba untuk mengungkap kembali upaya-upaya revitalisasi nilai-nilai budaya "Moloku Kie Raha" di era globalisasi dalam kaitan dengan proses penyelesaian konflik di Maluku Utara, baik secara makro maupun mikro (nasional dan lokal). Memang, tidak mudah dalam upaya '*merevitalisasi*' (menghidupkan kembali) suatu nilai budaya yang telah lama, meskipun nilai-nilai budaya tersebut telah dipahami secara luas di berbagai komunitas masyarakat. Namun, Moloku Kie Raha (MKR) yang dalam konteks sejarah telah mengalami perubahan-perubahan (dalam arti positif dan negatif), sehingga upaya tersebut tidak semudah membalik telapak tangan.

Secara garis besar, upaya revitalisasi nilai-nilai buday MKR memang menarik untuk diperbincangkan. Menarik, karena upaya ini secara obyektif ada sejumlah argumen mendasarinya, tetapi sekaligus memancing sejumlah pertanyaan kritis yang masih diperdebatkan di tengah globalisasi dan reformasi sekarang ini.

Pertama, perlunya revitalisasi nilai-nilai budaya MKR membuktikan bahwa ada semacam gejala *cultural deprivatian* (ketercemburuan budaya) yang telah atau tengah terjadi di daerah ini (Provinsi Maluku Utara). Artinya, sudah saatnya mulai merasa menjauh dari kosmopolit kebudayaan sendiri sehingga perlu ada gerakan ke pengalaman nilai-nilai budaya sendiri (kearifan lokal). *Kedua*, revitalisasi nilai-nilai budaya MKR menjadi suatu kesadaran baru, yang tidak saja menampilkan bagaimana menggali kearifan-kearifan lokal (*lokal wisdom*) masa lalu yang terangkum dalam berbagai fakta sejarah, tetapi juga bagaimana merumuskan dan memodifikasi nilai-nilai budaya MKR sebagai sebuah wacana kebudayaan dalam kerangka menata dan menatap masa depan. *Ketiga*, revitalisasi nilai-nilai budaya MKR mengisyaratkan bahwa semua elemen masyarakat ingin berpikir, bertindak, bekerja, dan beretika, sebagai ikhtiar membangun Provinsi Maluku Utara dengan mewujudkan etos budaya MKR, agar tidak terjebak dari akar budaya sendiri.

Perdebatan mengenai nilai-nilai budaya (kebudayaan) MKR hingga sekarang belum ada kesepahaman, namun dalam kaitan dengan pembahasan ini penulis lebih cenderung mengutip definisi kebudayaan yang diajukan oleh E.B. Tailor, bahwa “kebudayaan adalah segala daya cipta yang terangkum di dalam pengetahuan, kepercayaan/keyakinan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, beragam kemampuan dan kebiasaan lain yang diterima oleh manusia sebagai anggota dari sebuah masyarakat” (Koentjaraningrat, 1992; Kaplan, David, et.al: 2002). Definisi ini, bila dikaitkan dengan kebudayaan MKR maka dapat dipahami bahwa, segala daya cipta komunitas di jazirah Maluku Utara, yang dikenal “Moloku Kie Raha,”

meliputi: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. tetapi, apakah definisi semacam ini representatif? Jawaban atas pertanyaan ini, dapat disimak pembahasan terdahulu tentang sejarah terbentuknya empat kerajaan di Maluku Utara.

Globalisasi sebagai produk peradaban industri, tampil dengan dengan dua muka. Di satu muka, globalisasi telah 'merebak' batas-batas sosio-politik-ekonomi-budaya lintasnegara. Dunia, kata Alvin Toffler, bagai sebuah desa global (*the global village*). Dalam konteks ini, batas-batas lintasnegara dan lintasbudaya nyaris tidak ditemukan, yang dalam sebutan John Naisbitt, *the borderless world* 'dunia tanpa batas.' Desa global tanpa batas ini adalah anak kandung dari ibu peradaban bernama 'globalisasi.' Pada muka ini, telah memperjumpakan komunitas lintasnegara dan lintasbudaya dalam satu ruang sosial yang mendorong keseragaman pola tindak dan perilaku. Apa yang menjadi kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam satu wilayah peradaban akan secara cepat menjadi pola bertindak yang relatif seragam pada berbagai belahan dunia. Secara ekstrim, wilayah arus utama (*mainstream*), kemudian meluber ke wilayah tepian (*peripheral*), wilayah yang mengadaptasi atau mengadopsi kecenderungan bertindak atau berperilaku itu.

Wilayah-wilayah arus utama ialah penguasa ekonomi global, penguasa kekuasaan global, dan pencipta kebudayaan industri (*cultural industry*), sementara wilayah-wilayah tepian adalah pelahap ekonomi global 'pesakit' kekuasaan global dan penikmat kebudayaan industri. Dalam cara berpikir dikotomis, wilayah-wilayah arus utama ialah Barat, sedang wilayah-wilayah tepian ialah Timur. Meski dikotomi ini telah terbanta oleh kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Timur dengan

tumbuhnya Jepang, Cina, dan Korea dalam berbagai industri manufaktur; globalisasi masih cukup relevan didefinisikan sebagai peluberan dan pelebaran pengaruh dan pemindahan kecenderungan dari wilayah arus utama sebagai yang memproduksi budaya industri ke wilayah tepian sebagai wilayah penikmat.

Peluberan dan pelebaran kuasa-kuasa ekonomi, politik dan budaya dari wilayah arus utama ke wilayah tepian sebagai ejawantah utama globalisasi sekaligus menampilkan muka kedua, yaitu "hegemoni dan penyeragaman budaya." Tampilnya muka kedua ini, budaya-budaya tempatan (*local culture*) tersedot ke dalam resonasi budaya global, dan pada gilirannya kehilangan daya tarik karena masyarakat pemilik budaya lokal itu telah tercerabut darinya. Dalam konteks ini, ketercerabutan budaya (*cultural deprivation*), kini terus berlangsung karena didorong oleh dua hal. Pertama, terus berlangsungnya proses heredesisasi kultural, pewarisan budaya, pada komunitas atau budaya tempatan. Kedua, kuasa-kussa pragmatik yang ditawarkan globalisasi. Terputusnya pelembagaan dan pembelajar-an jiwa-jiwa kultur tempatan dan kuasa budaya global sebagai entitas peradaban yang berkarakter *cultural industry* akan mendorong masyarakat ke dalam peng-hambaan atas benda-benda, bukan pada jiwa-jiwa, sehingga kemanusiaan menjadi terjerembab ke dalam kubangan pragmatis dan pada gilirannya mengantar manusia ke cara hidup yang berorientasi pendek, sesaat, dan bendawi. Hidup adalah mengumpul benda-benda, menguasainya, menyebarkan, dan menjadikan berhala kenikmatan.

Upaya memilih strategi penggalian, pemaknaan, dan penguatan budaya-budaya tempatan menjadi penting. Meneliti dan menuliskan kembali atau menafsir-

ulang dengan mempertegas komitmen kultural merupakan cara-cara ikhtiar terhadap kebudayaan bagi penyelamatan akar kearifan budaya tempatan (lokal) dari gempuran pragmatik budaya global. Setidaknya, dengan meneliti dan menulis kembali apa-apa (nilai-nilai lokal) yang terasa mulai hilang dari kebiasaan setempat. Kesadaran akan budaya lokal dapat menjadi alat pemandu (pemersatu) masa depan, merupakan cara-cara yang sederhana dan pertama-tama dalam kerangka kelembagaan pelembagaan serta pembelajaran kebudayaan lokal. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tafsiran dan analisis sejarah dan budaya "Moloku Kie Raha" merupakan bagian dari ikhtiar pelembagaan dan pembelajaran yang dewasa ini terasa semakin penting, baik kondisi kekinian maupun mendatang terutama berkaitan dengan gempuran budaya global yang telah menghegemoni dalam budaya lokal.

Berdasarkan hasil penciuman lapangan dan analisis yang cermat terhadap berbagai sumber, dapat dikatakan bahwa MKR dalam pengertian budaya meliputi: Kesultanan Ternate (sekarang Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, serta bekas wilayah Kesultanan Jailolo); Kesultanan Tidore (sekarang Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tenagh dan Halmahera Timur); Kesultanan Bacan (sekarang Kabupaten Halmahera Selatan dan wilayah Kepulauan Sula). Budaya MKR dalam konteks budaya nasional, dapat terlibat dalam berberapa proses pembudayaan. Untuk sampai kepada suatu kebudayaan nasional baru; unsur-unsur, nilai-nilai budaya setempat bersaing dalam pilihan alternatif. Di satu pihak, menguntungkan pertumbuhannya dan di pihak lain, dapat merugikan bahkan menghancur leburkan

budaya lokal; dan pada gilirannya akan punahlah budaya setempat itu di dalam kancah mencari alternatif sebagai budaya yang *survival of the fittest*.

Menurut H.M. Yusuf Abdulrahman (Budayawan Maluku Utara), bahwa ada beberapa proses pembudayaan sebagai alternatif: (1) *inkulturasi* atau *enkulturasi;* proses terintegrasinya seseorang (individu) ke dalam kebudayaan sezaman dan setempat; (2) *akulturasi*; proses pembauran kebudayaan, *cultural borrowing, cultural transmission proses*. Proses ini dapat mempunyai dampak, antara lain: (a) resistensi, daya bertahan, (b) reaksi negatif, dan (c) penerimaan gegabah tanpa kritik; (3) *moderninsasi*; proses ini identik dengan *westernisasi* tetapi integrasi nilai tanpa mengorbankan nilai-nilai kedua pihak, yaitu *nilai budaya donor* maupun *budaya akseptor*, tetapi nilai kedua pihak terintegrasi menjadi *bahan jadi bernilai* dalam suatu perilaku *budaya baru*. Ketiga proses di atas merupakan suatu kontak budaya yang berdampak: (a) saling menghalangi, (b) saling mendorong, (c) proses akselerasi, (d) proses pembekuan, (e) kegoncangan budaya, *shock culture* (Bakker SJ, 1994); dan (4) proses akulturasi bergerak pada persimpangan jalan antara isolasi dan absorbsi, antara masa lampau dan masa depan. Ia merupakan proses "*Midway*" antara *konfrontasi* dan *fusi*. Corak dan model budaya baru sering tampil pada gerakan pariwisat, yang memperlihatkan wajah donor dan wajah akseptor pada pentasnya, (Syah, Mudafar, et.al, 2002).

Pengertian 'budaya' memiliki konotasi yang saling melengkapi dengan pengertian-pengertian: perilaku, adat-istiadat, kebudayaan, struktural, peradaban. Manusia adalah makhluk berbudaya, makhluk beradab, serta memiliki tradisi dalam

struktur masyarakat, termasuk kebiasaan-kebiasaan tertentu secara tetap dan berubah sesuai perkembangan zaman. Dalam konteks ini, budaya politik terkaita dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem politik yang dianut oleh bangsa (sistem demokrasi, parlemen, trias politica), dan seterusnya. Masyarakat MKR adalah masyarakat *agamais*, sejumlah nilai budaya yang hidup di daerah ini diwarnai oleh nilai adat/tradisi yang dapat didominasi oleh pengaruh agama (terutama Islam). Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, masyarakat MKR dihadapkan pula dengan proses '*institusionalisasi budaya*' dan inilah merupakan tantangan sekaligus ujian bagi warga masyarakat di kawasan ini (Maluku Utara).

Era globalisasi adalah suatu tantangan baru dalam upaya pembinaan dan pengembangan budaya daerah maupun budaya nasional. Tantangan yang paling menonjol adalah globalisasi bidang *ekonomi* dan *informasi*, yang demikian cepat bergerak sehingga dapat menghapus batas wilayah negara serta dapat menerobos seluruh pelosok dunia. Karena itu, globalisasi di satu sisi, dapat berdampak positif karena adanya interaksi yang mendorong perubahan budaya dan mempercepat proses modernisasi budaya ke arah kemajuan. Namun, di sisi lain globalisasi juga berdampak negatif karena proses interaksi budaya dapat menimbulkan polusi terhadap nilai-nilai intrinsik yang seharusnya dipertahankan untuk membentuk kepribadian bangsa. Masyarakat MKR harus dapat mempertahankan jati dirinya untuk mengeliminasi dan mengantisipasi dampak negatif proses globalisasi. Jati diri masyarakat MKR adalah perangkat nilai luhur yang terpancar dari falsafat '*Jou se Ngofa Ngare*' dalam bentuk tradisi dan dijiwai oleh agama (Islam).

Diskusi mengenai globalisasi pada awal abad ke-21 cenderung didominasi oleh paradigma bahwa globalisasi adalah sebuah kekuatan untuk mewujudkan stándar yang sama dan keseragaman, untuk memaksakan praktik-praktek dan keyakinan-keyakinan Barat kepada bagian dunia yang lain, yang diinterpretasikan sebagai peserta yang kadang-kadang sangat ingin, dan kadang-kadang enggan, menjadi peserta dalam dunia modern. Mempertahankan ciri-ciri khas lokal, apakah dalam bentuk praktek budaya seperti cara memasak atau ajaran moral seperti sikap pada hak asasi manusia, biasanya dilihat sebagai menentang globalisasi.

Perlawanan ini dapat mengambil bentuk seperti menentang pembangunan restoran cepat saji gaya Amerika dan penggunaan pakaian model *gangsta* Amerika, atau dapat pula dalam bentuk seperti menentang nilai-nilai moral Amerika – konvensi mengenai perilaku kaum perempuan. Misalnya, perlawanan ini didorong oleh konservatisme – keinginan untuk memelihara budaya tradisional atas pertimbangan-pertimbangan murni estetika – atau upaya oleh pemegang kekuasaan tradisional untuk menghindari kekuatan pasar. Inti dari perdebatan globalisasi adalah pertanyaan kembar mengenai apakah pasar pada dasarnya adil dan apakah ada nilai dalam melestarikan apa yang tidak dapat dilestarikan dalam sistem pasar.

Ide pembagian kerja global membantu menjelaskan ketegangan yang ada di semua wilayah jajahan Barat antara universalisme hukum – penerapan hukum yang sama pada semua orang – pluralisme hukum, yakni mempertahankan berbagai hukum bagi berbagai penduduk. Universalisme hukum merupakan kekuatan intelektual sejak zaman pencerahan dan selalu menarik karena rasionalitas dan kesederhanaannya.

Asas ini diberi nilai moral dalam kegiatan penjajahan kolonial oleh ide misi kolonialisme sebagai pembawa peradaban yang lebih tinggi, yang bertugas membawa rakyat di negara jajahan ke dalam estándar yang digunakan kekuasaan kolonial.

Pluralisme hukum, di pihak lain, sangat erat terkait dengan pembagian kerja global dan dengan konsep-konsep mengenai pluralisme budaya. Pluralisme hukum kadang-kadang ditunjang oleh keengganan orang Barat di negeri jajahan untuk menyerahkan hak-hak politik yang dinikmatinya di negeri asalnya. Pluralisme hukum membenarkan klasifikasi berdasar ras dan perbudakan – memungkinkan pembagian kerja yang tajam dalam bidang ekonomi antara negara penjajah dan negara jajahan. Pluralisme hukum juga terkait erat dengan keadaan mengenai pluralisme budaya dan rasa hormat pada integritas dan nilai bermacam-macam budaya.

Di antara kekuatan-kekuatan kolonial Barat, Belanda-lah yang paling kuat berpegang pada pluralisme hukum. Akar dari pluralisme hukum ini menjangkau jauh kembali ke masa lalu ke era Perusahaan India Timur Belanda (VOC), yang pada awalnya, berbeda dengan Portugis dan Spanyol, tidak berniat untuk memiliki wilayah kekuasaan atau melakukan kegiatan menyebar agama, dan hanya berniat semata-mata mencari laba dari kegiatan dagang. VOC sebagai imperialis yang setengah hati, yang terlibat meski sebenarnya tidak mau dalam benang kusut politik setempat di Jawa dan bagian-bagian lain (terutama kepulauan Maluku), sehingga pada akhirnya menjelma dari sebuah perusahaan dagang menjadi pengelola perkebunan dan administrator sebuah wilayah. Masih segar dalam ingatan bahwa pada puncak era kolonialisme sekitar sepuluh dari kepulauan Indonesia berada di bawah pemerintahan resmi tidak

langsung. Selain itu, menjelang akhir era kolonialisme, pemerintah kolonial bahkan mulai menjalankan sebuah program yang disebut ‘pengalihan wewenang,’ yang berarti bahwa tanggung jawab administrasi bahwa tanggung jawab administrasi yang telah dipikul selama era ini oleh birokrasi kolonial dikembalikan kepada penguasa aristokrat tradisional di kepulauan (Maluku).

Analisis Weber memungkinkan negera melimpahkan molopolinya atas kekuasaan untuk sementara waktu kepada pelaku-pelaku lain. Namun, analisis Weber tidak menawarkan suatu kerangka untuk memahami kategori-kategori kekerasan dalam hal negara tidak memiliki legitimasi atasnya. Contoh yang paling jelas untuk hal ini adalah kasus kekerasan dalam keluarga. Dalam hal ini, hak negara untuk campur tangan dalam hal kekerasan pada perempuan dan anak-anak sangat ditentang. Analisis itu juga tidak menawarkan kerangka untuk memahami mengapa negara dengan sengaja memutuskan untuk tidak mengaku berhak memonopoli kekerasan yang sah dalam sektor-sektor penting dalam masyarakat. Namun, fragmentasi sistem hukum di India Belanda berarti bahwa juga ada sistem pidana yang berbeda-beda, sistem penyidikan dan hukuman yang berbeda-beda bagi berbagai bagian dari masyarakat. Khususnya, fragmentasi itu berarti bahwa pemerintah kolonial tidak terlalu berniat untuk terlibat dalam penyidikan dan menghukum kejahatan di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat pemukiman orang Eropa dan kepentingan ekonomi Eropa. Di wilayah ini, sistem hukum dan pidana setempat bukan saja diijinkan berjalan, tetapi hal itu bahkan lebih disukai.

Kejahatan struktur bukan kejahatan anonim yang tidak bisa ditimpakan tanggung jawabnya kepada pelaku. Ia merupakan kejahatan moral (juga hukum) sebagai akibat dari kejahatan pribadi dan kolektif yang menghasilkan struktur-struktur yang mengadopsikan tindakan baik individu maupun kolektif mengarah ke kejahatan. Kejahatan struktur mengacu pada keseluruhan faktor negatif yang terdapat dalam institusi-institusi masyarakat dan bekerja melawan keadilan dan kesejahteraan umum. Dengan perspektif *hermeneutika* Paul Ricoeur, menjelaskan makna sebuah teks bisa mandiri terhadap maksud semula pengarangnya. Demikian juga tindakan, dengan rentang waktu dan tempat, bisa otonom terhadap pelaku. Tindakan bisa mempunyai dinamikanya tersendiri terlepas dari maksud awal pelakunya. Institusi sebagai karya masyarakat bisa memisahkan diri dari maksud awal dan berkembang sesuai dengan dinamikanya sendiri.

Ketidakadilan sebagai kejahatan struktural cenderung memperlemah atau menghancurkan institusi-institusi dasar dalam masyarakat. Situasi seperti ini rentang terhadap konflik dan kekerasan. Di satu pihak, kekerasan bisa terlembaga karena kekerasan ingin mempertahankan *status quo* dan ini mengakibatkan banyak korban. Di lain pihak, kekerasan atas nama perubahan akan didorong melakukan kekerasan karena merasa diperlakukan tidak adil. Akhirnya, kekerasan hanya menghasilkan kekerasan yang lain. Kekerasan tidak hanya akibat dari struktur yang tidak adil, tetapi juga ada pada diri pelaku dalam bentuk hasrat mimesis (R.Girard). Mimesis yang telah berubah menjadi “hasrat untuk memperoleh” akan mengubah hubungan perantara menjadi mimesis konfliktual. Mediator menjadi penghambat bagi “hasrat

untuk memperoleh," dan ini akan memicu kemarahan; kekuatan dasar manusia yang tersembunyi. Orang marah bisa berbuat apa saja (Smith, 1985).

Perubahan Nilai dan Pola Perilaku

Perilaku kerja dalam hubungan manusia merupakan dua konsep utama dalam membahas nilai dan perilaku hubungan masyarakat industri. Perubahan perilaku masyarakat dari masyarakat transisi (dari masyarakat agraris) ke masyarakat industri modern akan mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan. perubahan bersifat mendasar, berhubungan dengan landasan filosofi dan pandangan masyarakat secara kolektif. Hubungan manusia akan mengalami perubahan, sesuai dengan pergeseran penghargaan manusia terhadap konsep waktu, nilai kerja, masa depan, keluarga, dll. Dalam hal ini, terjadi perubahan terhadap lingkungan yang terus menerus dalam tatanan cara produksi, distribusi, bentuk organisasi, hubungan antar peribadi, kontrol politik terhadap lembaga akan menciptakan bentuk konvergensi tatanan masyarakat yang amat beragam. Di sisi yang lain, akan menimbulkan bentuk divergensi dalam tatanan masyarakat sebagai reaksi balik kehidupan yang baru.

Di samping itu, proses modernisasi terjadi secara drastis dalam masyarakat tetapi tidak terjadi proses industrialisasi. Modernisasi yang dilukiskan sebagai 'westernisasi' dalam mengambil alih (adopsi) pola perilaku komunitas masyarakat kebudayaan barat dengan nilai-nilainya. Dalam hal ini, terjadi modernisasi gaya hidup, pola perilaku, kehidupan dalam bermasyarakat telah mengalami perubahan (pakaian jeans, film barat, night club, bars, credits card, hand phone), di mana semua

jenis produk industri barat telah menjadi barang konsumsi dalam kehidupan keseharian masyarakat setempat.

Pola-pola perubahan dari tempat tinggal dan pandangan hidup masyarakat, berpengaruh kepada perhatian masyarakat terhadap kehidupan masa lalu dan harapan kepada masa depan. Orang modern telah mulai menilai bahwa tradisi nenek moyang ada kalanya dapat ditinggalkan tergantung kepada tingkat kebutuhan yang dirasakan. Dalam mencari tempat tinggal mereka sudah tidak lagi memperhatikan adanya batas-batas tempat leluhur berupa makam, bekas tempat bermukim dan tempat beribadah nenek moyangnya; mereka akan mengembangkan diri lebih rasional. Di samping itu, perhatian yang sangat kuat terhadap pendidikan bagi generasi muda secara terbuka, tidak hanya berpikir untuk hari ini tetapi juga untuk jangka panjang.

Sistem kekeluargaan dan hubungan keluarga, bergeser ke bentuk yang lebih mikro dan intens. Perubahan ini hampir dapat diamati dalam kehidupan keseharian keluarga-keluarga baru di perkotaan maupun di pedesaan (Maluku Utara), munculnya keluarga kecil yang lebih mandiri tampaknya cukup mengancam pertalian keluarga batih (di perkotaan maupun di pedesaan). Ada tiga aspek yang dapat dilihat. *Pertama*, semakin kuatnya keluarga inti dan melemahnya hubungan keluarga batih disebabkan oleh tarikan kebutuhan ekonomi, menipisnya peluang usaha, serta keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh institusi keluarga modern terutama di perkotaan. *Kedua*, relasi hubungan orang tua dengan anak mengalami perubahan yang radikal, menyebabkan tanggung jawab, nilai, perilaku ekonomi mengalami pergeseran. Rasa hormat anak kepada orang tua, pola asuh orang tua mengalami perubahan yang cukup

mendasar, karena tidak lagi bergantung kepada nilai-nilai hubungan aspectasi tetapi kepada aspek kehidupan material. *Ketiga*, akibat sosio-psikologis dari perubahan dalam pola hubungan kekeluargaan, dengan semakin ter-alinasi dan terisolasinya keluarga inti. Keluarga 'dipenjarakan' oleh norma konsumsi, dan nilai material yang memiliki relevansi kuat dalam kehidupan yang dihadapi.

Penyebab Konflik dari sisi Budaya, Ekonomi dan Politik

Sejumlah penjelasan telah dikemukakan untuk mengungkap berbagai konflik dari sisi budaya, ekonomi dan politik. Dari penjelasan murni budaya dapat diketahui 'kebencian kesukuan' hingga penjelasan murni 'ekonomi' perorangan (ketamakan). Dari sisi politik terungkap 'kejahatan struktural' yang merangcang kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian konflik. Penjelasan murni dari sudut budaya (pertarungan peradaban) sebagai penyebab utama konflik menurut Hantington, tidak menawarkan peran bagi kebijakan ekonomi atau sosial, dan tidak memberi harapan sama sekali bahwa konflik dapat dicegah – selain dari memisahkan suku-suku yang bertarung. Namun, dalam kenyataan banyak masyarakat yang multi suku yang hidup berdampingan tanpa konflik besar, dan ini menunjukkan bahwa penjelasan murni dari sudut budaya tidak tepat. Dengan demikian, faktor-faktor budaya, ekonomi, dan politik tidak satu pun bendiri sendiri dapat menjelaskan konflik, tetapi pada umumnya semua faktor memainkan peran.

Berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa, banyak konflik memiliki dimensi budaya, yaitu kelompok-kelompok bermusuhan melihat dari sisi masing-

masing sebagai anggota dari suatu budaya yang sama (suku atau agama) dan bertarung antara lain untuk memperoleh otonomi budaya. Berbagai laporan terutama di media massa, mengungkapkan bahwa konflik dipicu oleh semangat kesukuan primordial, sehingga konflik tidak terelakkan dan sulit diatasi. Beberapa antropoloh mendukung pandangan primordial ini. Mereka berpendapat bahwa ‘kesukuan adalah warisan budaya,’ sebuah ‘keadaan kehidupan setengah alami yang ditentukan oleh asal keturunan seseorang dan dengan, menurut pandangan ekstrim, faktor-faktor penentu sosial-biologis’ (Douglas, 1988).

Sebagian besar ahli antropologi melihat ada masalah-masalah serius dalam pendekatan ini, yang didasarkan pada pandangan naif tentang pembentukan identitas, peranan, dan kemampuannya untuk dibentuk, serta mengalihkan perhatian dari dfaktor-faktor penting di bidang ekonomi dan sosial. Bukti-bukti yang cukup banyak mengenai bagaimana identitas terbentuk dan berubah, dan mengapa ciri-ciri khasnya berubah seiring dengan perjalanan waktu, menunjukkan bahwa meski budaya seseorang sebagian diwarisi, namun juga dibentuk dan dipilih, dan banyak orang yang memiliki banyak identitas (Eyerman, 1996). Pandangan instrumentalisme yang dikemukakan sejumlah ahli antropologi bahwa, identitas budaya dikembangkan dan ditonjolkan oleh orang bersangkutan untuk tujuan mencapai sasaran tertentu.

Menonjolkan identitas, perbedaan, dan menggunakan simbol budaya adalah cara yang sangat tangguh untuk menjalin ikatan dengan orang lain agar mereka dapat bertindak bersama-sama untuk tujuan tertentu, sebuah cara untuk menghindarkan diri jenis-jenis masalah dilema yang dihadapi orang terpenjara, atau masalah-masalah

tindak bersama, yang timbul bila motivasi murni pribadi lebih menonjol. Seringkali tujuan utama dari promosi identitas budaya dan kesatuan budaya menyangkut ekonomi, misalnya, perkembangan kesadaran dan adat istiadat harus dengan cara ini. Tujuan administrasi dan politik juga dapat diwujudkan dengan cara menekankan perbedaan budaya. Misalnya, pengelompokkan suku yang diciptakan oleh penguasa kolonial digunakan untuk tujuan administrasi dan tujuan politik.

Kesukuan jelas digunakan sebagai instrumen dalam konflik. Menggunakan simbol kesukuan dan mempertebal identitas kesukuan adalah mekanisme yang sangat ampuh bagi para pemimpin untuk memperoleh dukungan dan mengarahkan rakyat untuk perjuangan menentukan nasib sendiri. Perbedaan persepsi mengenai identitas sering digunakan oleh elite politik dan intelektual sebelum dan selama konflik. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kesadaran bersama menyangkut suku dan agama. Namun harus ada perasaan perbedaan perilaku, adat istiadat, ideologi atau agama, yang memungkinkan meningkatkan kesadaran kesukuan atau lainnya untuk digunakan sebagai instrumen. Misalnya, berbahasa sama, memiliki tradisi budaya yang sama, atau menghadapi sumber kesulitan hidup (penindasan) yang sama.

Apa pun asal usul sebuah kelompok, perbedaan identitas tampak nyata bagi anggotanya – inilah sebabnya mengapa identitas kelompok demikian kuat sebagai pendorong untuk bertindak. Karena efektif untuk mengikat dan mengarahkan pelaku, identitas bersama merupakan satu elemen dalam berbagai konflik kekerasan. Namun perbedaan budaya sendiri saja tidak cukup untuk menjelaskan konflik kekerasan, karena perbedaan semacam itu tampak menonjol bila pebedaan lain (politik/ekonomi)

juga ada. Karena itu, banyak masyarakat multi suku yang tidak mengenal konflik, dan dalam masyarakat lain lagi ada masa-masa panjang – bahkan berabad-abad – tanpa kekerasan (konflik) yang berarti.

Ketika peristiwa-peristiwa kekerasan itu mulai mereda, yang muncul ke permukaan ialah politik uang dan korupsi. Politik uang mempunyai tujuan kekuasaan, pada akhirnya kecenderungan kekuasaan ialah semakin memperkokoh dominasi, tentu saja membutuhkan fasilitas penopangnya terutama ekonomi. Jadi, korupsi tidak bisa dilepaskan dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir ini begitu mudahnya terjadi karena tatanan politik yang ada sangat lemah, dalam hal mekanisme kontrol. Kekerasan, politik uang dan korupsi ini memang lekat dengan praktek kekuasaan. Ketiga bentuk kejahatan itu semakin menyadarkan urgensi penerapan etika politik.

Politik pada tataran normatif memberi kesan naif, meskipun politik pada dasarnya pertarungan kekuatan dan kecenderungannya adalah "tujuan menghalalkan segala cara." Dalam politik, betapapun kerasnya pertarungan dalam memperoleh kekuasaan, masih ada kerinduan akan keteraturan dan kedamaian. Kedua hal ini, mengingatkan landasan hidup bersama dan butuh legitimasi (persetujuan masyarakat) berdasarkan moral, agama, dan kebiasaan. Kekuasaan bisa saja diperoleh dengan kekerasan, kemudian hukum atau norma melegitimasi sesudahnya. Namun, kualitas legitimasi itu berpengaruh terhadap keluasan dukungan warga negara. Kebutuhan akan legitimasi tindakan ini memberi peluang wacana normatif. Orang tidak akan sanggup terus menerus menghadapi kekerasan dan ketidakpastian. Suatu sistem politik yang rasional, dapat diramalkan dan memperhitungkan manajemen konflik,

diperlukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Sistem politik semacam itu tidak bisa mengabaikan etika politik.

Budaya politik menekankan aspek normatif, kaidah politik dan terutama pembinaan nilai dan perwujudan cita-cita seperti kesejahteraan umum, keadilan, dan keharuman bangsa. Budaya politik sebagai yang mengarahkan dan membentuk tata hidup, perilaku, dan juga etos bangsa. Dengan demikian, aktivitas politik bukan pertama-tama karena kodrat sosial manusia, tetapi sesuatu yang diusahakan. Politik adalah seni untuk mengabadikan diri manusia. Mengabadikan diri merupakan seni untuk dikenang oleh sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama. Identitas itu dimungkinkan karena adanya pluralitas, penerimaan pluralitas identik dengan membangun ruang publik. Haryatmoko (2003:3), bahwa ruang publik ini mencakup semua bentuk institusi dan lingkup yang memberi konteks aktivitas warga negara di mana warga negara bisa mengkomunikasikan diri dengan orang lain. Bertindak untuk dan bersama orang lain ini berlangsung di dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Budaya politik yang baik adalah bila politik mampu menjamin prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Dalam hal ini, politik santun ini dimungkinkan adanya pengakuan timbal balik dan hubungan *fair* di antara para pelaku.

Penjelasan yang murni dari sudut motivasi pribadi mengenai konflik tidak memadai sebagai dasar atau penyeluruh mengenai berbagai konflik dengan kekerasan yang terjadi selama ini, karena sebagian besar pertarungan terjadi antara kelompok lawan kelompok, dan kelompok-kelompok bersangkutan terjun ke medan laga sesuai

suatu agenda bersama. Meski demikian, jelas bahwa motivasi pribadi mengejar untung atau menghindari biaya – memang memainkan peran dalam sebagian besar konflik begitu konflik sudah terjadi, dan mengendornya. Dalam beberapa hal, konflik tampaknya berubah dari semula konflik ideologi antar kelompok menjadi konflik yang culas, lebih mengenai soal mengeruk untuk diri pribadi.

G. Dalil – Dalil

Tafsiran dan analisis sosiologis tentang fenomena konflik dan perubahan sosial: "studi sosiologi politik," melahirkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Sistem klasifikasi suku sejak masa pemerintah kolonial telah menyumbang pada disentralisasi, yang tidak saja membedakan antara Eropa 'Asli' dan 'Timur Asing' tetapi juga memasukkan setiap kelompok ke dalam berbagai macam sub kategori, masing-masing dengan hukum, kewajiban dan hak-hak khusus. Perbedaan-perbedaan antar kelompok itu ada yang dangkal sifatnya, dan ada pula, misalnya larangan mengalihkan hak milik atas tanah dari orang asli ke orang bukan asli, merupakan inti dari orde sosial kolonial.
2. Distribusi geografi yang pincang, adalah realitas terbangun yang telah lama menjadi fokus pemikiran strategi dan politik elite penguasa, dan ini telah diterjemahkan ke dalam kebijakan demografi. Di Indonesia (khususnya Maluku dan Maluku Utara) pasca kolonial, migrasi dan transmigrasi telah menjadi bagian utama dari rekayasa demografi di pihak negara untuk mendukung proyeknya

membangun negara-bangsa. Tujuan yang banyak dari kebijakan transmigrasi memberikan fleksibilitas tinggi, yang memungkinkan bagi para elite pemerintah untuk mengambil alih dan menggunakann kebijakan itu sesuai dominasi orang Jawa sebagai alat politik memainkan peranan yang besar dalam menentukan garis-garis perbedaan suku di daerah penerima transmigrasi.

3. Konflik komunal, adalah konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok masyarakat karena antagonisme atau perseteruan primordial (warisan sejarah), kadang-kadang berdasarkan ideologi (agama). Konflik memperebutkan sumber daya alam, biasanya menyangkut kontrol atas sumber daya hutan atau mineral. Konflik jenis ini semata-mata konsep pembantu, dan tidak menilai terlebih dahulu analisis mengenai setiap situasi konflik.
4. Ketimpangan kesejahteraan antara kelompok, suku, desa, dan agama, mendorong timbulnya konflik. Jika tidak semua, konflik yang berlarut-larut khususnya di kepulauan Maluku setelah kemerdekaan, mengurangi kekuasaan elite setempat – yang telah lama menikmati kekuasaan dan perlakuan khusus Belanda (penduduk Kristen), menguntungkan penduduk Muslim setempat dan orang Jawa. Menurut *Pandangan primordial*: struktur sejarah obyektif dan relatif stabil dari produksi, melahirkan budaya yang langsung menyebabkan konflik atau yang memiliki elemen-elemen yang tidak cocok dengan struktur modern ekonomi politik global.
5. Konflik kekerasan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah ‘perang’ antar daerah, antar suku, dan/atau antar agama seperti yang terjadi di masa lalu, tetapi lebih merupakan fenomena situasional berkembang dan

dinamis bercampur baur dengan konsep-konsep identitas, nasionalisme, dan kebudayaan (tradisi budaya) komunitas setempat dalam memperebutkan sumber daya, hegemoni (pengaruh), dan kekuasaan.

6. Kemampuan sebuah masyarakat mengelola perselisihan kepentingan dan konflik erat kaitannya dengan mutu dan legitimasi struktur, lembaga dan tata aturannya. Konci untuk penyelesaian konflik secara damai adalah, pertama dan terpenting, mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi yang stabil dan menghormati hak asasi manusia.
7. Transformasi konflik adalah proses yang meliputi pencegahan, penyelesaian dan manajemen konflik yang mengisyaratkan bahwa membangun sebuah struktur pelitik internal yang stabil dan utuh bukanlah terpisah dari pengelolaan konflik, tetapi harus menjadi bagian di dalamnya sebagai syarat keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses penyelesaian konflik-konflik kekerasan spesifik secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip yang legal dan demokratis dalam membangun sebuah institusi di atas keberagaman etnis, budaya, dan agama yang telah disepakati bersama.
8. Prinsip-prinsip demokrasi yang diimplementasikan dalam pengelolaan konflik, termasuk proses transformasi yang dinginkan komunitas yang bertikai untuk menumbuhkan semangat *civil society* terutama para aktor yang terlibat, dengan mengembangkan kebiasaan berkompromi, kerjasama dan membangun konsensus. Bahwa toleransi, kedamaian, komitmen terhadap janji, pengampunan adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan agama.

9. Nilai-nillai agama bergantung pada kehendak baik yang tentu sangat labil dan rentan terhadap godaan. Untuk menjamin kehendak baik itu perlu dengan produk hukum yang jelas dan tegas. Orang mengharap banyak dari demokrasi, namun radikalisme, pandangan sempit, dan fanatisme akan menjadi bumerang terhadap sistem politik ini dan akhirnya melahirkan kekerasan (konflik).
10. Kekuasaan negara di masa Orde Baru menganut dan melancarkan kebijakan 'keteriban dan keamanan,' membuat para penguasa lokal terkooptasi oleh kekuasaan birokrasi 'atas desa' dan kehilangan dukungan politis dari basis massa. Kekuatan negara makin menguat (*state-quo-state*), berbarengan dengan kelompok kelas menengah kota dan menguatnya elite pedesaan.
11. Struktur sosial secara "normal" menghasilkan peran dan kegiatan menyimpang, yang mempunyai akibat positif. Penyimpangan dapat bersifat fungsional dan dikembangkan oleh suatu masyarakat (komunitas) dan memaksa pribadi-pribadi tertentu melakukan perilaku menyimpang. Derajat tekanan yang diberikan sustu struktur sosial (komunitas setempat), diarahkan kepada cara-cara untuk mencapai sesuatu (nilai dan norma yang melembaga) yang relatif dalam hubungan derajat aspirasi untuk mencapai tujuan-tujuan budaya. Oleh masyarakat modern lebih diarahkan untuk tujuan-tujuan (kemajuan dan perubahan), sehingga menimbulkan konflik dan menghasilkan *adopsi inovatif*.
12. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjuangan berkepanjangan dengan pihak luar, di dalam kelompok tersebut cenderung menjadi tidak toleran. Mereka tidak mungkin toleran melebihi yang diperbolehkan oleh kesatuan kelompok.

Kelompok yang demikian cenderung menerima karakater yang mirip-sekte; yang memilih anggotanya atas dasar karakteristik khusus yang karena itu ukurannya cenderung terbatas dan menuntut keterlibatan seluruh kepribadian anggotanya.

13. Demokrasi hanya mungkin dapat berkembang dan hidup secara mantap dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yang warganya memiliki toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apa pun. Adanya kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, diatur oleh hukum yang adil dan beradab, mendorong kemajuan serta menjamin kesejahteraan hidup warganya. Prinsip-prinsip demokrasi yang bersumber dari unsur kesetaraan derajat individu, kebebasan, individualisme dan individualitas serta toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Kesetaraan derajat individu meniadakan hierarki atau jenjang sosial (stratifikasi) yang menempel berdasarkan asal rasial, suku bangsa, kekayaan maupun kekuasaan.

BAB VIII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai intisari dari studi ini adalah sebagai berikut :

Konflik berawal dari ‘politik’ diiringi dengan konflik antar pemeluk agama yang berpangkal pada konflik kepentingan ekonomi. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa, konflik yang mengakar dan berkepanjangan sesungguhnya dipicu oleh konflik antar elite kesultanan di Maluku Utara dalam perebutan hegemoni dan perluasan daerah kekuasaan. Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa, pada awalnya dimanfaatkan masing-masing kesultanan untuk mengefektifkan pertahanan atau pun ekspansi kekuasaan. Namun, ketika hak-hak lokal diceroki oleh pemerintah kolonial, maka tidak urung akan muncul kualisi baru di antara empat kesultanan dengan mengatasnamakan perlindungan terhadap agama lokal (Islam).

Konflik antar pemeluk agama adalah akibat politisasi yang dimunculkan, karena adanya kekecawaan atas kebijakan yang bepihak. Khusus di Maluku Utara ada kecenderungan yang agak mengkhawatirkan, yaitu semacam puritanisasi (pemurnian) dan eksklusivitas agama bersamaan dengan melemahnya ketaatan terhadap ikatan etnis dan adat. Sebagai contoh, di Halmahera Utara khususnya Suku Kao, semula sangat toleran dalam kehidupan beragama. Hal ini karena mereka merasa saudara

sesuku atau bahkan masih memiliki ikatan keluarga, sehingga tidak harus dipisahkan oleh perbedaan agama. Melalui gerakan puritanisasi agama-agama, dimulai sejak akhir tahun 1980-an dapat mengurangi atau menghilangkan interaksi sosial dan saling tolong menolong. Hal ini secara perlahan-lahan membuat jarak antara mereka yang memiliki keyakinan berbeda (Islam dan Kristen). Kondisi ini membuat masalah agama berjalan sangat rumit dengan masalah adat sebagai penyebab konflik.

Konflik 1999-2001 di Maluku Utara merupakan akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat atas ketidakadilan, keserakahan, dan tindakan yang ingin memaksakan kehendak dalam mencapai tujuan para elite politik, birokrasi dan militer (elite formal) selama Orde Baru. Konflik di Maluku Utara pada era reformasi muncul bersamaan dengan diresmikannya Provinsi Maluku Utara. Setelah kekacauan awal, proses pemilihan gubernur yang berlarut-larut dilaksanakan di bawah pengawasan keamanan yang sangat ketat yang disediakan oleh pusat.

Kategori yang digunakan masing-masing pihak untuk memberi ciri pada pihak lain pada dasarnya suku, baik tempat asal maupun agama. Ternate dan Tidore memilih pihak-pihak yang bermusuhan dalam sejarah antara Belanda dan Spanyol pada abad ke-17, yang meninggalkan akibat-akibat yang dalam pada keadaan sosial. Ternate berada di pihak yang menang, sementara Tidore berada di pihak yang kalah. Ternate Selatan menjadi masyarakat plural yang dihuni oleh para migran, di mana wilayah ini tetap kosmopolitan hingga hari ini. Pembentukan kategori tidak pernah setajam seperti dalam sejarah. Para pelaku menambahkan dengan sejumlah identitas lain, sesuai dengan kepentingan-kepentingan kelompok.

Rumusan yang pasti mengenai kategori-kategori itu berbeda-beda seiring dengan semakin dalam polarisasi, dengan tuntutan-tuntutan keinginan perantara dan persaingan. Faksi Sultan Ternate sudah lama memiliki sejarah panjang bekerjasama dengan Orde Baru. Faksi itu mewakili dirinya sendiri melalui nilai-nilai hierarki feodal dan tradisi yang terfokus pada mistik sultan, dengan dukungan kuat di daerah pedesaan dan Kristen. Faksi yang satu lagi memiliki inti yang terdiri dari generasi kota yang sedang berkembang; aktivis Islam yang modernis (HMI), dan memandang dirinya sebagai penantang yang berjiwa demokrasi. Faksi ini, karena tidak ada ikatan yang dapat digunakan, dalam kenyataan adalah persekutuan longgar yang melakukan pengelompokkan ulang dengan cara-cara yang sangat pragmatis.

Secara teoritis, kebiasaan yang sering dipergunakan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul termasuk antisipasi dalam penyelesaian koflik, adalah kebiasaan berpikir dan pendekatan monokausal (melihat permasalahan hanya dari sebab langsung), tanpa mempertimbangkan berbagai dimensinya. Pendekatan ini merupakan pendangkalan dan pemiskinan politik. Model ini adalah anak kandung pragmatisme yang mewarnai mentalitas dan cara berpikir produk sistem pendidikan yang menghendaki hasil segera. Bila ditelusuri lebih jauh, pragmatisme sendiri pada dasarnya positif. Tetapi, pragmatisme menjadi otoriter ketika menafikkan perdebatan teoritis, di mana diskusi tentang nilai, perdebatan ideologis atau diskusi tentang prioritas hanya demi mengejar hasil segera.

Pemerintah pusat dan daerah masih bertumpu pada dua proses awal, yakni tahap deeskalasi konflik meliputi penghentian kekerasan dan rehabilitasi korban serta

negosiasi. Tahap penghentian konflik, aparat keamanan di Maluku Utara bekerja jauh lebih maksimal dibanding di Maluku Tengah sehingga konflik dapat segera diisolir dan dihentikan, karena tidak ada keterlibatan secara emosional ataupun kepentingan aparat keamanan terhadap konflik yang terjadi. Namun pada tahap rehabilitasi korban konflik, tindakan pemerintah daerah sangat minim hanya sebatas pada bidang fisik seperti penampungan dan pemberian bantuan (logistik dan medis), tetapi upaya lain berupa penyediaan trauma konseling korban konflik tidak dilakukan sama sekali. Untuk hal ini inisiatif masyarakat yang cukup besar.

Pertikaian antar etnis kerap timbul sebagai fenomena yang sering terjadi, model perubahan sosial yang terjadi dari aspek ini hampir tidak pernah disadari dalam gambaran lanskap dan sejarah perubahan sosial ekonomi suatu masyarakat. Fenomena ini banyak memakan korban, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (khususnya Maluku Utara). Sampai sejauh ini tidak ada upaya yang sistematis untuk mencegahnya (*conflict prevention*). Perjuangan etnis akhirnya dilakukan melalui cara-cara ‘kekerasan lingkungan’ (*environmental violence*), yakni sebagai proses perubahan lingkungan dan marjinalisasi sumber daya alam secara massif oleh kekuasaan pemerintah pusat, yang mewarisi ketidak asilan dan mengikis habir martabat kebudayaan etnik yang merukapan basis kebudayaan lokal.

Nilai-nilai dalam perilaku kehidupan tidak dapat mengendap dan menjelma menjadi perilaku pilihan melalui proses pendidikan tanpa melihat daya dukung aspek-aspek kehidupan yang bersifat kontekstual. Nilai-nilai tumbuh sebagai pedoman perilaku secara diakronik, yaitu dengan mempertimbangkan gejala kelembagaan yang

mengatur hubungan manusia dengan yang lain dan kemampuan yang memberi daya dukung kehidupan ekonomisnya. Karena itu, pendidikan keluarga di masa depan akan cenderung bersifat terbuka terhadap gejala sosial. Pola sosialisasi aktif yang digunakan oleh keluarga menempatkan orang tua dan anak bersama-sama dalam situasi belajar yang intens. Sumber belajar berada dalam kehidupan atau di sekitar keluarga, yang bersama-sama dan terus menerus memberi warna kepada kehidupan keluarga. Kebiasaan terhadap "saling tindak kritis" antara pendidik dan peserta perlu dikembangkan dalam kerangka yang luas, melalui bentuk-bentuk upaya riil dalam kehidupan keseharian. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak cukup hanya dengan model sosialisasi, tetapi melalui kesanggupan dan keberanian untuk memberi dan menerima pemikiran inovatif-kreatif dengan meniadakan kendala struktural dan kebudayaan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai inti pembahasan dalam studi ini, maka dikemukakan beberapa saran yang memiliki implikasi teoritis (akademik) dan praktis. Implikasi teoritis, adalah temuan-temuan dalam studi ini dapat dikembangkan untuk kepentingan akademik, terutama dalam kaitan dengan perspektif teori konflik dan perubahan sosial sebagai berikut :

1. Adalah penting untuk dikaji lebih jauh yang didasarkan pada pemikiran yang kritis dan jernih tentang akar penyebab konflik, apakah peran dan simbol-simbol

agama menjadi penyebab utama konflik? Agama tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya, karena percampuradukan itu adalah tanda tidak adanya unsur kritis, tidak berfungsinya perangkat kewaspadaan dan kaburnya rambu-rambu pengarah pemahaman.

2. Studi ini menemukan konflik-konflik yang berbasiskan identitas-identitas tertentu telah berkembang demikian rumit dan konpleksnya, sehingga perlu dan penting untuk melakukan 'keberlanjutan' (*sustainable*) studi dengan melibatkan disiplin lain (multidisiplin) melaui pendekatan nilai-nilai budaya pada tingkat komunitas yang rentan konflik.
3. Harus terus mendorong upaya-upaya untuk menegakkan tatanan *civil society,* agar konflik dan potensi berbagai bentuk konflik dapat diminimalisir untuk kemudian secara berangsur-angsur dikelola dengan mentransformasikan nilai-nilai budaya demokrasi, transparansi dan akuntabilitas di Maluku dan Maluku Utara. Dengan demikian, upaya-upaya yang dimaksud diharapkan agar tidak terdengar lagi istilah-istilah; *buldozer democracy, tiranny of the mayority, teror by the minority* dan sebagainya yang seringkali dapat memperuncing suasana konflik di bumi Maluku dan Maluku Utara. Singkatnya, harus tetap berpegang pada prinsip "toleransi dan perbedaan pendapat adalah rahmat," tanpa itu maka *civil society* yang dicita-citakan adalah *utopia* belaka.

Implikasi praktis, adalah upaya pengelolaan (manajemen) konflik yang mengakar di Maluku Utara secara khusus dan Maluku secara umum, serta wilayah (daera-daerah) yang rentan (rawan) konflik dalam rangka transformasi dampak

konflik terhadap dimensi-dimensi perubahan sosial (pasca konflik) guna menciptakan kondisi yang damai dan tenteram dalam waktu yang relatif lama.

1. Diharapkan kepada *stake holders* yang berperan dalam penyelesaian konflik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat keamanan sejak tahap de-eskalasi konflik yang telah dilalui dengan berbagai persoalan yang tidak tertangani secara tuntas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, yang terpenting sekarang adalah, tahap rehabilitasi korban yang sedang dan akan dilaksanakan dengan pilihan-pilihan (prioritas) kebijakan yang harus diambil meliputi: (a) penyelesaian secara menyeluruh persoalan yang berkaitan dengan pengungsi; (b) rehabilitasi infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah); (c) menempatkan kembali tenaga pendidik yang eksodus di wilayah Maluku Utara; dan (d) program rehabilitasi dan pembinaan mental bagi korban konflik.
2. Berkaitan upaya-upaya penyelesaian konflik di mana pilihan-pilihan kebijakan yang diambil harus memiliki keterkaitan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang berkembang pada kelompok-kelompk yang berkonflik, terwujudnya interaksi yang terlembaga pada komunitas-komunitas yang berkonflik, serta adanya integrasi antar kebijakan yang diambil dengan pilihan-pilihan kehidupan pada komunitas-komunitas yang berkonflik. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, *stake holders* yang terlibat tidak hanya negara (pemerintah pusat dan daerah) tetapi juga masyarakat setempat meliputi: tokoh adat, tokoh agama (elite tradisional), para negosiator, dan lain-lain. Pilihan-pilihan kebijakan yang perlu diambil, antara lain: (a) adanya penerimaan perbedaan sebagai satu kekuatan yang

saling menghargai; (b) menata kembali sistem budaya setempat sebagai *socisl capital* yang mampu menjadi instrumen untuk mencegah dan menyelesaikan konflik; (c) tersedianya tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan dasar (9 tahun) di setiap kecamatan; dan (d) perlu adanya program pelatihan profesional dan kewirausahaan serta kursus-kursus keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri.

3. Kebijakan dan langkah strategis lain yang berkaitan dengan penyelesaian konflik adalah '*Supporting System*.' Dalam hal ini, perlu adanya hukum dan perundangan yang memiliki kepastian, adil dan transparan. Selain itu, kebijakan yang tidak memihak, beragam dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini mengisyaratkan peran besar birokrasi pemerintah (Pusat dan Daerah), serta semua elemen masyarakat secara luas pasca konflik untuk menciptakan perdamaian yang langgeng dan tahan lama. Pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan meliputi: (a) meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui *civic education* yang berorientasi *early warning system*; (b) meningkatkan kapasitas kelembagaan yang bersifat antisipatif, proaktif, dan preventif untuk menopang praktek *good governance*; (c) perbaikan *worksmanship* sumber daya manusia dalam ilmu maupun teknologi; (d) menciptakan sistem rekrutmen yang transparan dalam proses seleksi jabatan-jabatan birokrasi (sipil dan militer); (e) perumusan kebijakan ekonomi dalam pembangunan yang tidak menimbulkan terjadinya proses marginalisasi.
4. Dalam hal kebijakan pemekaran wilayah tidak semata-mata melihat syarat-syarat administratif dan kepentingan elite semata, tetapi harus memperhatikan kebutuhan

lokal, baik yang menyangkut pengakuan atas sistem nilai dan norma yang berlaku di wilayah tersebut serta kebiasaan masyarakat yang berkembang di tingkat lokal. Pilihan-pilihan kebijakan yang perlu diambil adalah: (a) adanya pengakuan atas peran dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; (b) adanya pengakuan hak-hak adat dan ulayat sebagai tatanan hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam; dan (c) perlu adanya pertemuan empat sultan (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo) yang difasilitasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Negosiator dalam satu forum resmi (formal) dalam kaitan dengan peran dan eksistensi masing-masing kesultanan, serta sumbangsinya dalam membangun Maluku Utara yang damai, maju, dan mandiri.

5. Ddalam hal pendidikan, diharapkan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara untuk mempertimbangkan membangun jenis sekolah ‘multi kultural’ sejak dini, dalam upaya sosilialisasi membangun kesadaran multi kultural di kalangan masyarakat heterogen. Hal ini mengingat salah satu aspek penting di dalam perubahan sosial dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Anak-anak sekolah adalah potensi pengembang basis pergaulan utama dari interaksi multi kultural (beda ras, agama dan struktur sosial – ekonomi), mereka sejak dini akan memiliki pergaulan yang cukup intens dengan beragam pola budaya yang ada dalam masyarakat. Jenis sekolah yang demikian akan berhasil merajut benang-benang keragaman budaya, yang jalin menjalin secara kultural sejak usia disi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik (ed) 1986. *Agama dan Perubahan Sosial*. CV. Rajawali, Jakarta.

Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika – Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.

_____ 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Pustaka Jaya, Bandar Lampung.

Abustam, Muh. Idrus (ed) 1996. *Pedoman Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah***.** Lembaga Penelitian IKIP, Ujung Pandang.

Adrian, F. Charles, 1995. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Ahmadi, Abu H. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Rineka Cipta, Jakarta.

_____ 1991. *Kamus Lengkap Sosiologi*. CV. Aneka, Solo.

Ali, Fachri dan Bahtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam**:** Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru***.*** Mizan, Jakarta.

Alfian. 1985. *Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia*. CV. Rajawali, Jakarta.

_____ 1988. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. PT. Pustaka Grafika Kita, Jakarta.

Alwi, Aidit dan Zainal AKSP. 1989. *Elit dan Modernisasi*. Liberty, Yogyakarta.

Amal, Adnan M. 2002. *Maluku Utara Perjalanan Serjarah 1250 – 1800* (Jilid I). Universitas Khairun, Ternate.

Amal, Adnan M. dan Izra Arnyta Djafar. 2003. *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800 – 1950* (Jilid II). Universitas Khairun, Ternate.

Ammari, Fachry dan J.W. Siokona. 2003. *Ternate: Kelahiran dan Sejarah Sebuah Kota*. Pemerintah Kota Ternate.

Amirin, Tatang M. 1984. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Rajawali Press, Jakarta.

Anwar, Dewi Fortuna, (et.al) (ed) 2005. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Yayasan Obor Indonesia, LIPI, (LESMA – CNRS), KITLV, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*. CV. Bina Aksara, Jakarta.

Artir, Mustafa O. (et.al) (ed) 1989. *Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis Tentang Teori, Riset, dan Realitas*. Terj. Hartono Hadikusumo, dari judul aslinya: *Directions of Change: Modernization Theoty, Research, and Realities*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat Politik – Perbandingan Antara Islam dan Barat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Baker, Pauiline H. 1996. *Conflict Resolution Versus Democratic Gvernance: Divergent Paths to Peace*? dalam Croker, Chester A (et.al) (ed). *Maganing Global Chaos: Sources of an Responses to International Conflict*. USIP Ress, Washington D.C.

Ball, Nicole. 1996. *The Chalenge of Rebuilding War-Torn Societies* dalam Croker, Chester A (et.al) (ed). *Maganing Global Chaos: Sources of an Responses to International Conflict*. USIP ress, Washington D.C.

Beilharz, Peter. 2003. *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka.* Terj. Sigit Jatmiko, dari judul aslinya: *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*. Pustaka Pelajar Offset, Jakarta.

Bellah, Rober N. 2000. *Beyond Belief Eseii-Esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*. Terj. Rudy Harisyah Alam, dari judul aslinya: *Beyond Belief Essays an Religion in a Post-Traditional World*. Paramadina, Jakarta.

Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Terj. Paulus Wirutomo, dari judul aslinya: *The Principles of Sociology*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Blau, Peter M. & Marshall W. Meyer, 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Terjemahan oleh Gary Rakhman Yusuf. UI Press, Jakarta.

Bloomflield, David, Nupen, Charles, dan Haris, Peter. 2000. *Proses-proses Negosiasi*, dalam Haris, Peter dan Really (ed) *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar*: Sejumlah Pilihan Negosiator. International IDEA, Jakarta.

Bobbio, Noberto. 1988. *Gramsi and The Concept of Civil Society*. John Keane (ed), *Civil Society and The State New European Perspective*. Verso, New York.

Brannen, Julia. 1999. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Terj. H. Nukthah Arfawie Kurde, Imam Safe'i, dan Noorhaedi, H.A. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Brewer, Anthony. 1999. *A Guide to Marx's Capital*. Terjemahan oleh: Joebaar Ajoeb, dengan judul *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Teplok Press, Jakarta.

Brojonegoro, Arjuno. 2000. *Indonesia Menapak Abad 21-Kajian Ekonomi Politik*. LPSK – LIPI, Jakarta.

Budiman, Arief. 1989. *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. PT. Gramedia, Jakarta.

Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial.* Terj. Mestika Zed dan Zulfami, dari judul aslinya: *History and Social Theory*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Burton, John. 1990. *Conflict, Resolution and Provention*. MacMillan Press, London.

Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Terj. F. Budi Hardiman, dari judul aslinya: *Seven Theories of Human Society*. Kanisius, Yogyakarta.

Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Terj. Haris Munandar dan Deedy Priatna, dari judul aslinya: *Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Collins, Randall. 1974. *Conflict Sociology*. Akademic Press, New York.

Coser, Lewis A. 1964. *The Functional of Social Conflict*, The Free Press, New York.

_____ 1977. *Master of Sociologicl Thought, Idealis in Historical and Social Context*. Hacort Brace Jovanovich, Inc. New York.

Craib, Ian. 1994. *Teori-teori Sosial Modern; Dari Parsons sampai Habermas*. Terj. Paul S. Baut dan T. Effendi, dari judul asliny: *Modern Social Theory : From Parsons to Habermas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cohen, Raymond. 1996. *Negotiating Across Culture* dalam Croker, Chester A (et.al) (ed). *Maganing Global Chaos: Sources of an Responses to International Conflict.* USIP Press, Washington D.C.

Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Terj. Ali Mandan, dari judul aslinya: *Class and Class Conflict in Industrial Society*. CV. Rajawali Pers, Jakarta.

Djafar, Izra Arnyta. 2005. Dari Moloku Kie Raha Hingga Negara Federal. Biro Pustaka, Yogyakarta.

Durkheim, Emile. 1984. *The Devision of Labor in Society*. Introduction : Lewis A. Coser, The Free Press, New York.

Duverger, Maurice. 1998. *Sosiologi Politik*. Terj. Daniel Dhakidae, dari judul aslinya: *The Study of Politic*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ecip, S. Sinansari. 2003. *Bila Cengkeh Tak Berbunga* (*Membuka Rusuh Ambon*). Cahaya Timur, Jakarta.

Effendy, Bahtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Galang Press, Yogyakarta.

Eickelman, F. Date and Piscation, James. 1998. *Ekspressi Politik Muslim*. Terj. Rofik Suhud, dari judul aslinya: *Muslim Politic*. Mizan, Bandung.

Eisentadt, Summel N (ed). 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Terj. Chandra Johan, dari judul aslinya: *Revolution an The Transformation of Societies*. CV. Rajawali, Jakarta.

Elster, Jon. 2000. *Karl Marx – Marxisme : Analisis Kritis*. Terj. Sudarmaji, dari judul aslinya: *An Introduction to Karl Marx*. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Engels, Frederick. 2002. *Tentang Das Kapital Karl Marx*. Terj. Ira Iramanto, dari judul aslinya: *On Marx's Capital*. Hasta Mitra, Jakarta.

Erickson, B. H. et.at. 1987. *Memahami Data Untuk Statistik Ilmu Sosial*. Terj. R. K. Sembiring, dari judul aslinya: *Understanding Data*. LP3ES, Jakarta.

Ever, Hans Diater. 1980. *Sociology of Sout East Asia, Reading on Social Change and Deverlopment*. Oxford University Press.

Eyerman, Ron. 1996. *Cendekiawan: Antara Budaya dan Politik Dalam Masyarakat Modern*. Terj. Matheos Nalle, dari judul aslinya: *Between Culture an Politics : Intellectuals in Modern Society*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar Offset, Bandung.

Fowlw, Jt. Floyd J. 1990. *Survey Research Methods*. SAGE Publications, Newbury London – New Delhi.

Fromm, Erich. 2000. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio Psikologis Atas Watak Manusia*. Terjemahkan oleh Imam Muttaqien. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gaffar, Affan. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gama, Judistira K. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Pascasarjana UNPAD, Bandung.

Garcia, Manuel B. 1985. *Sociology of Development Perspektives and Isseus*. National Book Store, Metro Manila.

Geertz, Clifford. 1986. *The Social History of on Indonesian Town*. Terjemahan Pustaka Grafitipers : *Mojokuto – Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. PT. Pustaka Grafitipers, Jakarta.

Gellner, Ernest. 1995. *Membangun Masyarakat, Prasyarat Menuju Kebebasan*. Terj. Ilyas Hasan, dari judul aslinya: *Condition of Liberty, Civil Society and Its Rivals*. Mizan, Bandung.

Giddens, Anthony. 1981. *Perbedaan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Rajawali Pers, Jakarta.

_____ 1986. *Kapitalisme dan Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*. Terj. Soeheba Kramadibrata, dari judul asli: *Capitalism and Modern Social Theory: an Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber*. UI Press, Jakarta.

Giddens, Anthony. 2004. *Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. Terj. Dari judul aslinya: *The Constitution of Society.* Pedati, Pasuruan.

Giddens, Anthony, (et.al). 2004. *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Terj. Ninik Rochani Sjams, dari judul aslihya: *La Sociologie Histoire it idees*. Editor: Nurhadi. Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Goldschider, Calvin. 1985. *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial*. Terj. Nin Bakdi Sumanto, dari judul aslinya: *Population, Modernization and Social Structure*. CV. Rajawali, Jakarta.

Hamid, Abu. 1994. *Syeh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

_____ 2004. *Ekologi Manusia dan Kependudukan*. Disunting dari buku *A. Terry Rammbo dan Percy E. Sajise*: *"Human Ecology Research by Social Scientist on Tropical Agroecosystems.*" PPS UNHAS, Makassar.

Hamilton, Peter. 1990. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Terj. Hartono Hadikusumo, dari judul aslinya: *Readings from Talcott Parsons*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Hanafi, Abdillah. 1986. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Disarikan dari karya: Everent Rogers dan F. Floyd Shoemaker *"Communication of Inovations"*. Usaha Nasional Indonesia, Surabaya.

Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif – Ilmu, Masyarakat, Politik & Modernisasi Menurut Jürgen Habermas*. Kanisius, Yogyakarta.

Harris, Peter & Ben Reilly (ed). 2000. *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiasi*. IDEA, Jakarta.

Harrison, David. 1990. *The Sociology of Modernization and Development*. University of Sussex, London and New York.

Harskamp, Anton van (ed). 2005. *Konflik-konflik dalam Ilmu Sosial*. Terj. Bern Hidayat, dari judul aslinya: *Conflicts in Social Sciences*. Kanisius, Yogyakarta.

Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Buku Kompas, Jakarta.

Hasan, Abdul Hamid. 2001. *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Antara Pustaka Utama, Jakarta.

Hikam, Muhammad A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES, Jakarta.

Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Terj. Dari judul aslinya: *A traditional Leader in Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*. L3M, Jakarta.

Horowitz, Donald. 2000. *Ethnic Group in Conflict*. University of California Press, Berkeley, California.

Hoover, Kenneth R. 1989. *Unsur-unsur Pemikiran Ilmiah dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Terj. Hartono Hadikusumo, dari judul aslinya: *The Elements of Social Scintific thinking*. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jilid I & II). Terj. Robert M. Z. Lawang, dari judul aslinya: *Sociological Theory : Classical Founders and Contemporery Perspective*. PT. Gramedia, Jakarta.

Kaplan, Davir, et.al. 2002. *Teori Budaya*. Terj. Landung Simatupang, dari judul aslinya: *The Theory of Culture*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Karim, Muh. Rusli. 1989. *Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Usaha Nasional Indonesia, Surabaya.

Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. LP3ES, Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono, (et.al). 1975. *Sejarah Nasional Indonesia* (Jilid III). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Kastor, Rustam. 1999. *Konspirasi Politik RMS & Kristen Menghancurkan Ummat Islam di Ambon-Maluku.* CV. Adipura, Yogyakarta.

Katoppo, E. 1957. *Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*. Sinar Harapan, Jakarta.

Kelman, Herbert C. 1997. *Negotiating in the International Context* dalam Zartman, William I, dan Rasmussen, J.L. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*. USIP Press, Washington, D.C.

Keesing, Roger, M. 1992. *Antropologi Budaya : Suatu Perspektif Kontemporer*. Erlangga, Jakarta.

Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit : Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Rajawali, Jakarta.

Kriesberg, Louis. 1998. *Contructive Conflict: Form Escalationh to Resolution*. Rowman & Littlefield, Publ, New York.

Kerlinger, Fred N. 2002. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Terj. Landung R. Simatupang, dari judul aslinya: *Foundation of Behavioral Research*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Koentjaraningrat. 1980. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

_____ 1984. *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. LP3ES, Jakarta.

_____ 1992. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.* Gramedia, Jakarta.

Kuhn, Thomas S. 2000. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Terj. Tjun Surjaman, dari judul aslinya: *The Structure of Scientific Revolutions*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Kunio, Yoshihara. 1987. *Kapitalisme Asia Tenggara*. Pengantar: Arief Budiman. LP3ES, Jakarta.

Kuntowijoyo, 2000. *Kesadaran dan Perilaku dalam Menuju Tata Indonesia Baru*. Editor: Selo Sumardjan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kuper, Adam & Jasica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Terj. Haris Munandar (et.al), dari judul aslinya: *The Social Sciences Encyclopedia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kurasawa, Aiko, 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 – 1945*. Gramedia, Jakarta.

Laeyendecker, L. 1991. *Tata Perubahan, dan Ketimpangan* (*Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*). Terj. Samekto, dari judul aslinya: *Orde, Verandering, Ongelijkheid : End Inleding in de Geschiedenis van de Sociologie*. PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.

Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan, dari judul aslinya: *Perspective on Social Change*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Lederach, J, Building Oeace: 1997. *Sustainable Reconsciliation in Diveded Societies.* USIP Press, Washington .D.C.

Leirissa, R.Z. 1996. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan Sekitar Llaut Seram Abad 19*. Balai Pustaka, Jakarta.

Lerner, Daniel. 1983. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Terj. Muljarto Tjokrowinoto. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Lloyd, Christopher. 1986. *Teori Sosial dan Praktek Politik*. Terj. Nazaruddin Sjamsudin (et.al), dari judul aslinya: *Socisl Theory and Political Practice*. CV. Rajwali, Jakarta.

Lund, Michael S. 1996. *Early Warning and Preventive Diplomacy* dalam Croker, Chester A (et.al) (ed). *Maganing Global Chaos: Sources of an Responses to International Conflict*. USIP Press, Washington D.C.

Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Paramadina, Jakarta.

Malik, Ichsan. 2001. *Konflik Bahaya Atau Peluang*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mannheim, Karl. 1985. *Sosiologi Sistematis.* Terj. Soerjono Soekanto. CV. Rajawali, Jakarta.

Marlow, Louis. 1999. *Masyarakat Egaliter Visi Islam*. Terj. Nina Nurnila, dari judul aslinya: *Hierarchy Eglitarianism in Islamic Thoght*. Mizan, Bandung.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mas'oed, Mohtar & Colin MacAndrews. 1997. *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Martin, Roderick. 1993. *The Sociology of Power***.** Terjemahan Herry Joediono, dengan judul *Sosiologi Kekuasaan*. Rajawali Press, Jakarta.

Merton, Robert King, 1968. *Social Theory and Social Structure***.** Edition : Enlarged Free Press, New York.

Miall, Hugh, et.al. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Terj. Tri Budhi Sastrio, dari judul aslinya: *Contemporery Conflict Resolution: The Prevention Management and transformation of Deadly Conflicts*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhadjir, Noeng H. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: *Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama.* Rakesarasin, Yogyakarta.

Muhammad, Syahril, 2004. *Kesultanan Ternate; Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik, Ombak*, Yogyakarta.

Mulkham, Abdul Munir. 1989. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965 – 1987 dalam Perspektif Sosiologi*. Rajawali Press, Jakarta.

Nasikun, 2000. *Sistem Sosial Indonesia.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nasir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____ 2000. *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Tarawang, Yogyakarta.

Nattingham, Elizabeth K. 1997. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Terj. Abdul Muis Naharong, dari judul aslinya: *Religion and Society*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nawawi, H. Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua***.** Pustaka Raja, Yogyakarta.

Niel, Robert Van. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Terjemahan oleh YIIS. Pustaka Jaya, Jakarta.

O'dea, Thomas F. 1996. *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar Awal*. Terj. Yayasan Solidaritas Gajah Mada, dari judul aslinya: *The Sociology of Religion*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Paloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Tterj. Yayasan Solidaritas Gjah Mada, dari judul aslinya: *Contemporary Sociological Theory*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Paramita, R. Abdurachman. 1980. *Kegunaan Sumber-sumber Portugis dan Spanyol untuk Penulisan Sejarah Maluku Utara, Konsep dan Strategi Penelitian*. Balai Pustaka, Jakarta.

Parsons, Talcott. 1969. *Political and Social Structur*. The Free Press, New York.

Papayungan, M.M. 1992, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (*Teori dan Praktek*), Pusat Studi Kependudukan UNHAS, Ujung Pandang.

Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

Punch, Keith F. 1998. *Introduction to Social Research Quantitative and Qualitative Approaches*. SAGE Publication: Thousond Oaks, New Delhi.

Putuhena, Saleh A. 1980. *Sejarah Agama Islam di Ternate, dalam Masinambouw, Halmahera dan Raja Ampat Konsep dan Strategi Penelitian*. LIPI, Jakarta.

Quarles van Ufford, Philip (et.al). 1989. *Tendensi dan Tradisi dalam Sosiologi Pembangunan*. Terj. R.G. Soekadijo, dari judul aslinya: *Trends en Tradities in De Ontwikkelingssociologie*. PT. Gramedia, jakarta.

Rachbini, Didik J. 1999. *Resiko Pembangunan Yang Diimbangi Utang*. PT. Gramedia, Jakarta.

Rahardjo, M. Dawan. 1993. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Mizan, Bandung.

Rahim, Husni, 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Logos, Jakarta.

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Terj. Alimandan, dari judul aslinya: *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. CV. Rajawali Pers, Jakarta.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimanda, Triwibowo (ed), dari judul aslinya: *Modern Sociological Theory*. Kencana, Jakarta.

Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Robertson, Roland (ed), 1995. *Agama; Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Terj. Achmad Fedyani Saifuddin, dari judul aslinya: *Sociology of Religion*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ross, M. 1993. *The Management of Conflict: Interpretation and Interest in Comparative Perspective*. Yale University Press, New Hahen.

Rush, Michael & Phillip Althoff, 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Terj. Kartini Kartono, dari judul aslinya: *An Introduction to Political Sociology*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sahur, Ahmad (et.al). 1988. *Migrasi, Kolonisasi, Perubahan Sosial*. PT. Pustaka Grafika Kita, Jakarta.

Sajogjo, Pudjiwati. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta.

Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Pengantar Sudomo Wiyahandoyo. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sanderson, Stephen K. 2003. *Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas*. Terj. Farid Wajidi dan S. Menno, dari judul aslinya: *Macro Sociology*. PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum, dan Hak Asasi*. CV. Rajawali, Jakarta.

_____ 2000. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuasaan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Cultural dan Struktural*. Rajawali Perss, Jakarta.

Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sastopoetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung.

Schramm, Wilbur; Daniel Lerner. 1975. *Communication and Change*. The Last Tem Years – and the Next. An East Center Book – The University Press of Hawaii, Honolulu.

Schermerhorn, R.A. 1987. *Masyarakat dan Kekuasaan*. Terj. Soerjono Soekanto & Agus Brotosusilo, dari judul aslinya: *Society and Power*. Rajawali Pers, Jakarta.

Schoorl, J.W. 1984. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. PT. Gramedia, Jakarta.

Scoot, C. James. 1994. *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan dan Substansi di Asia Tenggara*. Terj. Hasan Basri, dari judul aslinya: *The Moral Economy of The Peasont; Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. LP3ES, Jakarta.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung.

Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Siahaan, Hottman M. 1986. *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Erlangga, Jakarta.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Efensi, 1987. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press, Yogyakarta.

Smith, Eugene D. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik – Suatu Kajian Analitis*. Terj. Mahnun Husein, dari judul aslinya: *Religion and Political Development – An Analytic Study*. CV. Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____ 1985. *Sosiologi: Ruang Lingkup dan Aplikasinya*. CV. Remadja Karya, Bandung

_____ 1986. *Seri Pengantar Talcott Parsons : Fungsionalisme Imperatif*. CV. Rajawali, Jakarta.

_____ 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soelaiman, Munandar M. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Pustaka Pelajar Offset, Bandung.

Soejono, dan Abdurrahman, 1999. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Rineka Cipta, Jakarta.

Soemardjan, Selo. 1986. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soetomo, 1990. *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*. Liberty, Yogyakarta.

_____ 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Jakarta.

Soedjatmoko. 1995. *Pembebasan, Pilihan Karangan tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. LP3ES, Jakarta.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif – Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data.* Terj. Muh. Shodiq & Imam Muttaqien, judul aslinya: *Basics of Qualitative Research-Grounded Theory Procedures and Techniques*. Pustaka Pelajar Offset, Bandung.

Sugandhi, Yulia. 2002. *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implementasinya*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudjana, Nana, 1999. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Sinar Baru, Bandung.

Sumardjan, Selo. 1986. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. UGM Press, Yogyakarta.

Sunarto, Kumanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Suprapto, H.R. Riyadi. 2002. *Interaksionisme Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*. Averroes Press, Yogyakarta.

Susetiawan, 1999. *Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial : Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. UII Press, Yogyakarta.

_____ 2000. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Susanto, Astrid S. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial***.** Binacipta, Jakarta.

Suwarsono, Alvin Y. SO. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES Indonesia, Jakarta.

Svalastoga, Kaare. 1989. *Diferensiasi Sosial.* Terj. Alimandan, dari judul aslinya: *Social Diferentiation*. Bina Aksara, Jakarta.

Syah, Mudafar H. (et.al). Sukardi Syamsudin, Basir Awal (ed) 2005. *Moloku Kie Raha Dalam Perspektif Budaya dan Sejarah Masuknya Islam*. Himpunan Pelajar Mahasiswa Ternate (HPMT), Ternate.

Syamsuddin, Din. 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Logos, Jakarta.

Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan, Editor: Triwibowo Budi Santoso, dari judul aslinya: *The Sociology of Social Change*. Prenada, Jakarta.

Tahel, Elza Peldi (ed). 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Paramadina, Jakarta.

Taneko, Soleman B. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia.* Fajar Agung, Bandar Lampung.

Thoha, Miftah. 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tholkhah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia, Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*. Terj. Achmad Syahid Cholil, Editor Jajat Burhanuddin, dari judul aslinya: *Anatomy Conflict Politics in Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thosby, David. 2001. *Economic and Culture*. Cambridge University Press, New York.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1994. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Tomagola, Tamrin Amal. 2001. *Halmahera Berdarah, Ketika Semerbak Cengekeh Tergusur Asap Mesiu*. Tapak Ambon, Jakarta.

Trijono, Lambang, 2001. *Keluar Dari Kemelut Maluku Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk Perdamaian Maluku*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Turner, Bryan S. 1984. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*. Terj. G.A. Ticoalu, dari judul aslinya: *Weber and Islam*. CV. Rajwali, Jakarta.

_____ 1994. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*. Terj. Sirojuddin (et.al), dari judul aslinya: *Orientalism, Postmodernism and Globalism*. Ar-Ruzz Press, Yogyakarta.

Turner, Jonathan H. 1991. *The Structure Of Sociological Theory*. Wodsworth Inc, Belmont California.

Usman, Sunyoto. 1990. *Elite Dalam Perspektif Sosiologi*. FISIP UGM, Yogyakarta.

Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial***,** (*Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*), Gramedia, Jakarta.

Verhaak, C. dan R. Haryono Imam. 1997. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wahyudi, Akdam H. 2005. *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Efektif*. Alfabeta, Bandung.

Wallace, Walter L. 1994. *Metode Logika Ilmu Sosial*. Terj. Yyasan Solidaritas Gajah Mada, dari judul aslinya: *The Logic of Science in Sociology*. Bumi Aksara, Jakarta.

Warsito, Tulus. 1999. *Pembangunan Politik: Refleksi Atas Krisis*. Bigraf Publishing, Jakarta.

Warnaen, Suwarsih. 2002. *Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multietnis*. Mata Bangsa, Yorgyakarta.

Weber, Max, 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. The Free Press. New York.

_____ 2000. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Terjemahan Yusup Priyasudiarja, dengan judul: *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. Pustaka Promethea, Surabaya.

_____ 2002. *Sosiologi Agama*. Terj. Muhammad Yamin, dari judul asli: *The Sociology of Religion*. IRCiSoD, Yogyakarta.

Weilenman, Alexander. 1994. *Riset Evaluasi dan Perubahan Sosial.* Terj. H. Soenarwan, dari judul aslinya: *Evaluation Research and Social Change*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Winardi, 1994. *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Perbandingan*. Mandar Mamuju, Bandung.

Windhu, Marsana I. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan : Menurut Johan Galtung*. Kanisius, Jakarta.

Worsley, Peter, (et.al). 1992. *Introducing Sociology*. Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo, dengan judul: *Pengantar Sosiologi-Sebuah Pembanding*. PT. Tiara Wacana, Yogya.

Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.* Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus: Desain dan Metode.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusuf, Sri Yuniarti, (et.al). 2004. *Konflik Maluku Utara: Penyebab, Karakateristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang*. LIPI, Jakarta.

Yusup, Yusmar. 1988. *Dinamika Kelompok: Kerangka Studi dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Armico, Bandung.

Zeitlin, Irving M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi (Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer)*. Gajah Mada Univercity Press, Yogyakarta.

TESIS DAN DISERTASI

Abdullah, S., 1985, *Birokrasi dan Pembangunan Nasional : Strudi Tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program-program Pembangunan di Sulawesi Selatan***,** (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas), Ujung Pandang.

Iberamsyah, 1988. *Peranan Elit Informal Desa Dalam Proses Pembuatan Keputusan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor (Tesis)*. Program Pascasarjana IPB, Bogor.

Kube, Syahrir Andi, 1997. *Studi Tentang Kepemimpinan Elit Lokal dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Wajo***,** (Tesis)**.** Program Pascasarjana Unhas, Makassar.

Rauf, La Ode Abdul, 1988. *Peranan Elit dalam Proses Modernisasi : Suatu Studi Kasus di Muna*, (Disertasi). Program Pascasarjana Unhas, Makassar.

Tina, Dwia Aries NK, 2005. *Kekerasan Komunal dan Damai; Studi Dinamika Pengelolaan Konflik Sosial Luwu*, (Disertasi). Program Pascasarjana Unhas, Makassar.

Usman, Ahmad, 2001. *Peranan dan Kepemimpinan Elit Informal Menggerakkan Partisipasi Sosial dalam Pembangunan; Kasus di Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima***,** (Tesis). Program Pascasarjana Unhas, Makassar.

Usman, Jaelan, 2001. *Konflik dan Integrasi Sosial di Maluku Utara; Analisis Teori Fungsionalisme Robert King Merton***,** (Tesis). Program Pascasarjana Unhas, Makassar.

Walinono, Hasan, 1979. *TANETE – Suatu Studi Sosiologi Politik***,** (Disertasi). Program Pascasarjana Unhas, Ujungpandang.

ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH, MAJALAH DAN SURAT KABAR

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "*Proses pembuatan permadani*." Harian Kompas, 3 September 2001:32.

Albert Einstein, dinobatkan sebagai "*The Man of the Century*" Majalah Time, edisi 31 Desember 1999.

Ardial & Dahlena Sari Marbun, *Posisi Pers dalam Solusi Konflik Politik*. Madani: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 4, No. 3, Oktober 2003.

Arifin, Syamsul. *Pluralisme Agama, Antara Konflik dan Integrasi Sosial* (Hasil Penelitian, diramu dalam bentuk Artikel). Surya, 13 Juli 1995.

Gafur, Abdul, *Membangun Maluku Utara*, (Visi dan Misi) Calom Gubernur Propinsi Maluku Utara. Ternate, 2001.

Naben, Anton. *Elit Agama adalah Simbol Moral dan Kultural Masyarakat*. Suara Pembaruan, 8 Oktober 1999.

Pardede, Nurhaida, *Peranan Bahasa dalam Pemecahan Konflik Sosial***.** Madani : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 4, No. 3, Oktober 2003.

Pohan, Syahdin Yusuf, *Peranan Kontrol Sosial dalam Membangun Budaya Politik Indonesia*. Madani : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sumut. Vol. 5, No. 3, Oktober 2004.

Purnomo, Aloys Budi, *Agama Sebagai Kekuatan Transformatif* (Artikel). Surya, 29 Oktober 1994.

Rasyid, Ryaas. 1997. Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan Teoritik). Jurnal Ilmu Politik, edisi ke-17.

Ritonga, Jhon Tafbu, *Benturan Peradaban Barat dan Ilsam dalam Perspektif Ekonomi*. Madani : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Univ. Muhammadiyah, Sumatera Utara. Vol. 4, No. 3, Oktober 2003.

Sihombing, Buyung Ali, *Strategi Penanganan Konflik Sosial Melalui Paradigma Civil Society*. Madani : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah, Sumut. Vol. 4, No. 3, Oktober 2003.

Suhardono, Edy, *Mengapa Kelompok Elit Gagal Meneladani ?* (Artikel). Surya, 16 September 1995.

Syafa'at, Rachmad, *Posisi Konflik Etnis dalam Masalah Integrasi Bangsa*. Legality : Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Vol. 10, No. 1, Februari – Agustus 2002.

Tomagola, Thamrin Amal, "*Tragedi Maluku Utara*" (Makalah). Ternate, 2000.

DOKUMENTASI

Bappeda, Provinsi Maluku Utara. 2004. *Maluku Utara Membangun 2003 – 2007*.

Biro Hukum dan HAM, Setda Provinsi Maluku Utara. 2003. *Undang-undang No. 1 Th 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara*. Ternate.

Direktorat Sospol Propinsi Maluku Utara. 2000. "*Kronologis Kerusuhan Sosial Bernuansa SARA di Propinsi Maluku Utara.*" Ternate.

Pemda, Maluku Utara. 1984. *Rencana Induk Pembangunan Kota Ternate dan Maluku Utara Tahun 1984 – 2004*. Ternate.

Pemda, Propinsi Maluku Utara, 2000. *Selayang Pandang dan Pola Dasar Pembangunan Propinsi Maluku Utara*, Ternate.

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 2 Tahun 2006. Tentang "*Pembentukan Kecamatan-kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara*." Tobelo.